REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Tahun 2007

(Audited)

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN KEUANGAN PEMERINTAH PUSAT

Tahun 2007

(Audited)

KATA PENGANTAR

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara dan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah menyampaikan laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) berupa laporan keuangan kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan. Sebelum disampaikan kepada DPR, Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) diaudit terlebih dahulu oleh BPK.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 55 ayat (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, LKPP disampaikan Presiden kepada BPK paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir untuk diperiksa. Sehubungan dengan itu, pada tanggal 28 Maret 2008, Pemerintah telah menyampaikan LKPP Tahun 2007 untuk diperiksa oleh BPK. Berdasarkan hasil pemeriksaannya, BPK memberikan opini "tidak menyatakan pendapat (*disclaimer*)" atas LKPP Tahun 2007. Walaupun masih mendapat opini disclaimer, LKPP Tahun 2007 menunjukkan beberapa peningkatan kualitas, antara lain penyelenggaraan akuntansi oleh kementerian negara/lembaga (KL) yang semakin meningkat, pengungkapan (*disclosure*) yang lebih ekstensif, dan data aset Pemerintah yang lebih baik karena adanya inventarisasi aset pada beberapa kementerian negara/lembaga.

Sejak tahun 2006, laporan keuangan KL telah diberi opini tersendiri oleh BPK. Dengan diberikannya opini kepada masing-masing KL, maka akan memacu KL untuk meningkatkan kualitas laporan keuangannya, yang pada akhirnya akan berdampak pada kualitas dan opini LKPP. Pemerintah terus berupaya untuk meningkatkan kualitas laporan keuangan KL, sehingga pada tahun-tahun mendatang kualitas dan opini LKPP semakin membaik.

Sehubungan dengan LKPP Tahun 2007 (*Audited*) ini, perlu kami kemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. LKPP Tahun 2007 (*Audited*) ini disusun berdasarkan laporan keuangan seluruh entitas pelaporan (kementerian negara/lembaga/KPPN/entitas lainnya) yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.
2. Laporan Realisasi APBN Tahun Anggaran (TA) 2007 memberikan informasi tentang realisasi pendapatan, belanja, dan pembiayaan. Berdasarkan laporan ini, realisasi Pendapatan Negara dan Hibah adalah sebesar Rp707,81 triliun, atau 101,98 persen dari yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2007. Sementara itu, realisasi Belanja Negara adalah sebesar Rp757,65 triliun, atau 100,70 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2007, sehingga terjadi Defisit Anggaran sebesar Rp49,84 triliun. Namun, Laporan Realisasi APBN TA 2007 ini masih menunjukkan suspen pada sisi Belanja Negara sebesar minus Rp0,24 triliun. Suspen tersebut dipastikan terjadi karena masih terdapat sebagian realisasi pengembalian belanja yang belum dilaporkan oleh beberapa satuan kerja kementerian negara/lembaga.

3. Neraca menyajikan informasi tentang posisi aset, kewajiban, dan ekuitas Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007. Dari Neraca tersebut diinformasikan bahwa nilai Aset adalah sebesar Rp1.600,21 triliun dan Kewajiban sebesar Rp1.430,96 triliun, sehingga Ekuitas Dana (kekayaan bersih) Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp169,25 triliun.
4. Laporan Arus Kas menyajikan informasi tentang penerimaan dan pengeluaran kas dari Kas Umum Negara. Dari Laporan Arus Kas tersebut diperoleh informasi bahwa penurunan Kas Negara selama TA 2007 adalah sebesar Rp1,39 triliun.
5. Catatan atas Laporan Keuangan dimaksudkan agar pengguna laporan keuangan dapat memperoleh informasi tentang hal-hal yang termuat dalam laporan keuangan. Catatan atas Laporan Keuangan meliputi uraian tentang kebijakan fiskal, kebijakan akuntansi, dan penjelasan pos-pos laporan keuangan, daftar rinci atau uraian atas nilai pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca, dan Laporan Arus Kas.

LKPP Tahun 2007 ini disusun berdasarkan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) yang telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 59 Tahun 2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat, dengan mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

Pemerintah menyadari bahwa LKPP Tahun 2007 (*Audited*) ini masih perlu disempurnakan dan bila perlu dikoreksi sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan PP Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah. Oleh sebab itu, kami mengharapkan tanggapan, saran, maupun kritik yang membangun dari para pengguna (*stakeholders*) LKPP ini. Pemerintah akan terus berupaya untuk dapat menyusun dan menyajikan LKPP yang tepat waktu dan akurat sehingga terwujud tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*).

a.n. Pemerintah Republik Indonesia

Menteri Keuangan,

Sri Mulyani Indrawati

INDEKS ISI

KATA PENGANTAR iii

INDEKS ISI v

INDEKS TABEL vi

INDEKS GRAFIK vii

INDEKS DAFTAR ix

INDEKS SINGKATAN xi

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN xiv

RINGKASAN 1

I. LAPORAN REALISASI APBN 5

II. NERACA 7

III. LAPORAN ARUS KAS 9

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN 11

A. PENJELASAN UMUM 11

A.1. DASAR HUKUM 11

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO 12

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN 47

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI 51

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN 60

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN 60

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN 61

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA 76

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA 82

C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM 82

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA 83

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA 116

C.4. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN 124

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS 127

D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS 127

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS 129

DAFTAR 145

INDEKS TABEL

1.	Asumsi Dasar APBN TA 2005 – 2007	27
2.	Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2007 dan 2006	28
3.	Persentase Anggaran dan Realisasi APBN TA 2007 Terhadap PDB	45
4.	Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2007 dan 2006	46
5.	Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi TA 2007 dan 2006	66
6.	Mutasi Rekening Nomor 600.000.411 Tahun 2007	84
7.	Piutang Pajak per Jenis Pajak	87
8.	Piutang Pajak per Kanwil DJBC	88
9.	Posisi Utang Luar Negeri dan SUN	112
10.	Saldo Anggaran Lebih TA 2007 dan 2006	113
11.	Ringkasan Perubahan Posisi SUN Tahun 2007	378
12.	SUN Jatuh Tempo Tahun 2007	381

INDEKS GRAFIK

1.	Rasio Utang terhadap PDB	13
2.	Struktur PDB Tahun 2006 dan 2007	14
3.	Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007	15
4.	Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Tahun 2007	15
5.	Laju Inflasi Bulanan Tahun 2007	16
6.	Hubungan antara PDB, Laju Inflasi dan BI Rate	17
7.	Perkembangan IHSG Tahun 2007	17
8.	Perkembangan Ekspor-Impor Indonesia Tahun 2007	18
9.	Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2005-2007	18
10.	Perkembangan Posisi Cadangan Devisa Indonesia Tahun 2005-2007	19
11.	Perkembangan NPL dan LDR Indonesia	22
12.	Laju dan Sumber Pertumbuhan Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007	23
13.	Kepemilikan Asing pada Surat Utang Negara	24
14.	Tren Penyerapan Belanja Negara TA 2007	29
15.	Rasio Penerimaan Perpajakan dan PNBP terhadap Pendapatan Negara TA 2005 - 2007	34
16.	Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah TA 2005 - 2007	37
17.	Perbandingan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2006 dan 2007	39
18.	Perbandingan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2006 dan 2007	40
19.	Perbandingan Realisasi Dana Perimbangan TA 2006 dan 2007	42
20.	Defisit dan Perimbangan Primer TA 2006 dan 2007	43
21.	Rasio Defisit terhadap PDB	43
22.	Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2003-2007	60
23.	Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2003-2007	61
24.	Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2007	62
25.	Komposisi Alokasi Belanja Negara TA 2007	65
26.	Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2007	66
27.	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2007	67
28.	Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis TA 2007	67
29.	Komposisi Realisasi Dana Perimbangan TA 2007	72
30.	Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2004 - 2007	82
31.	Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas	128
32.	Komposisi SUN seri FR menurut Jumlah TA 2007	373
33.	Struktur Jatuh Tempo Obligasi FR TA 2007	373
34.	Komposisi Zero Coupon Bond Menurut Jumlah TA 2007	374
35.	Struktur Jatuh Tempo Zero Coupon Bond TA 2007	374
36.	Komposisi Jumlah Obligasi VR TA 2007	375
37.	Struktur Jatuh Tempo Obligasi VR TA 2007	375
38.	Komposisi Surat Utang kepada BI (SU/SRBI) TA 2007	376

39.	Struktur Jatuh Tempo Surat Utang kepada BI (SU/SRBI) TA 2007	376
40.	Komposisi Jumlah per Seri International Bonds	377
41.	Struktur Jatuh tempo International Bonds	378
42.	Komposisi Jenis-Jenis SUN pada TA 2007	379

INDEKS DAFTAR

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan Negara dan Hibah TA 2007 145
2. Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2007 152
3. Laporan Realisasi Dana Perimbangan TA 2007 186
4. Daftar Saldo Kas di KPPN per 31 Desember 2007 314
5. Saldo Rekening Pemerintah Lainnya di BI per 31 Desember 2007 320
6. Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2007 322
7. Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2007 324
8. Piutang Pungutan Ekspor per 31 Desember 2007 325
9. Piutang Pajak per 31 Desember 2007 326
10. Piutang Bukan Pajak pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2007 327
11. Bagian Lancar Tagihan TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2007 328
12. Bagian Lancar RDI per 31 Desember 2007 329
13. Piutang Bunga dan Denda Pinjaman Pendanaan KUMK Periode 1 Januari - 31 Desember 2007 330
14. Piutang yang Berasal dari Kewajiban Bank Dalam Likuidasi 331
15. Persediaan pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2007 332
16. Posisi Dana Penerusan Pinjaman Luar Negeri dan Dalam Negeri SLA, RDI, dan RPD per 31 Desember 2007 334
17. Rekening Dana Bergulir yang dikelola Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman 335
18. Rincian Pencairan Pinjaman Pendanaan KUMK Periode 1 Januari - 31 Desember 2007 338
19. Penyertaan Modal Negara pada BUMN dan Non BUMN (Minoritas) 339
20. Penyertaan Modal Negara pada Organisasi/Lembaga Keuangan Internasional/ Regional 342
21. Aset Tetap pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2007 343
22. Tagihan TGR pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2007 352
23. Aset Tak Berwujud pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2007 353
24. Saldo Rekening Khusus Pemerintah per 31 Desember 2007 354
25. Saldo Rekening-Rekening Escrow per 31 Desember 2007 358
26. Aset Lain-lain pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2007 360
27. Ringkasan Aset Negara Ex-BPPN yang Dikelola PPA untuk Periode 1 Januari – 31 Desember 2007 361
28. Ringkasan Data Nominatif Aset Kredit yang Diserahkan kepada Tim Koordinasi 362
29. Rincian aset KKKS per 31 Desember 2007 363
30. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang –Surat Utang Negara per 31 Desember 2007 365
31. Utang Bunga Obligasi Negara per 31 Desember 2007 366
32. Utang Kepada Pihak Ketiga pada pada Kementerian Negara/Lembaga per 31 Desember 2007 368
33. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri-SUN per 31 Desember 2007 369
34. Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Utang Negara Tahun 2007 372
35. Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara 385

36. Ikhtisar Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya 393
37. Ikhtisar Laporan Keuangan BLU 397
38. Daftar Lembaga Non Struktural/Independen 401
39. Rincian Aset Eks Cina 408

INDEKS SINGKATAN

APBD	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
APBN	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara
APBN-P	:	Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara-Perubahan
BAPPENAS	:	Badan Perencanaan Pembangunan Nasional
BBM	:	Bahan Bakar Minyak
BDL	:	Bank Dalam Likuidasi
BEJ	:	Bursa Efek Jakarta
BHMN	:	Badan Hukum Milik Negara
BI	:	Bank Indonesia
BKKBN	:	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional
BLBI	:	Bantuan Likuiditas Bank Indonesia
BLU	:	Badan Layanan Umum
BP MIGAS	:	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi
BPHTB	:	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan
BPK	:	Badan Pemeriksa Keuangan
BPOM	:	Badan Pengawas Obat dan Makanan
BPPN	:	Badan Penyehatan Perbankan Nasional
BPPT	:	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi
BPYBDS	:	Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya
BRR	:	Badan Rekontruksi dan Rehabilitasi
BULOG	:	Badan Urusan Logistik
BUMD	:	Badan Usaha Milik Daerah
BUMN	:	Badan Usaha Milik Negara
BUN	:	Bendahara Umum Negara
CFO		*Chief Financial Officer*
CGI	:	*Consultative Group on Indonesia*
COO		*Chief Operating Officer*
CPI	:	*Consumer Price Index*
DAK	:	Dana Alokasi Khusus
DAU	:	Dana Alokasi Umum
DAU	:	Dana Abadi Umat
DBH	:	Dana Bagi Hasil
DIPA	:	Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran
DJA	:	Direktorat Jenderal Anggaran
DJBC	:	Direktorat Jenderal Bea dan Cukai
DJKN	:	Direktorat Jenderal Kekayaan Negara
DJP	:	Direktorat Jenderal Pajak
DJPBN	:	Direktorat Jenderal Perbendaharaan
DPR	:	Dewan Perwakilan Rakyat
EDI	:	*Electronic Data Exchange*
GBHN	:	Garis-Garis Besar Haluan Negara
HTI	:	Hutan Tanaman Industri
INDRA	:	*Indonesian Debt Restructuring Agency*
KITE	:	Kemudahan Impor Tujuan Ekspor
KKKS	:	Kontraktor Kontrak Kerja Sama
K/L		Kementerian Negara/Lembaga
KMK	:	Keputusan Menteri Keuangan
KONI	:	Komite Olahraga Nasional Indonesia
KPPN	:	Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara
KSM	:	Kelompok Swadaya Masyarakat
KU	:	Kiriman Uang

KUHR	:	Kredit Usaha Hutan Rakyat
KUMK	:	Kredit Usaha Mikro dan Kecil
KUN	:	Kas Umum Negara
KUTPA	:	Kredit Usaha Tani Persuteraan Alam
LAK	:	Laporan Arus Kas
LDKP	:	Lembaga Dana Kredit Pedesaan
LDR	:	*Loan to Deposit Ratio*
LKP	:	Lembaga Keuangan Pelaksana
LKPP	:	Laporan Keuangan Pemerintah Pusat
LNSI	:	Lembaga Non Struktural/Independen
LRA	:	Laporan Realisasi Anggaran
MAK	:	Mata Anggaran Pengeluaran
MAP	:	Mata Anggaran Penerimaan
MPN	:	Modul Penerimaan Negara
MP3	:	Monitoring Pelaporan Pembayaran Pajak
NAD	:	Nanggroe Aceh Darussalam
NPL	:	*Non-Performing Loan*
PDB	:	Pendapatan Domestik Bruto
PFK	:	Perhitungan Fihak Ketiga
PIP	:	Pusat Investasi Pemerintah
PMA	:	Penanaman Modal Asing
PMDN	:	Penanaman Modal Dalam Negeri
PMN	:	Penyertaan Modal Negara
PNBP	:	Penerimaan Negara Bukan Pajak
PPh	:	Pajak Penghasilan
PPN	:	Pajak Pertambahan Nilai
PPnBM	:	Pajak Penjualan atas Barang Mewah
PSL	:	*Past Service Liability*
PSO	:	*Public Service Obligation*
PT PPA	:	PT Perusahaan Pengelolaan Aset
RANTF	:	*Recovery of Aceh Nias Trust Fund*
RDI	:	Rekening Dana Investasi
RPD	:	Rekening Pembangunan Daerah
RPJMN	:	Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional
RSUP	:	Rumah Sakit Umum Pusat
SABMN	:	Sistem Akuntansi Barang Milik Negara
SAI	:	Sistem Akuntansi Instansi
SAKUN	:	Sistem Akuntansi Kas Umum Negara
SAL	:	Sisa Anggaran Lebih
SAP	:	Standar Akuntansi Pemerintahan
SAPP	:	Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat
SAU	:	Sistem Akuntansi Umum
SDA	:	Sumber Daya Alam
SiAP	:	Sistem Akuntansi Pusat
SIBOR	:	*Singapore Interbank Offered Rate*
SiKPA	:	Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran
SiLPA	:	Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran
SKPA	:	Surat Kuasa Pengguna Anggaran
SKPKB	:	Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar
SKPLB	:	Surat Ketetapan Pajak Lebih Bayar
SPKPBM	:	Surat Pemberitahuan Kekurangan Pembayaran Bea Masuk
SLA	:	*Subsidiary Loan Agreement*
SPPD	:	Surat Perintah Pencairan Dana
SUN	:	Surat Utang Negara

TA	:	Tahun Anggaran
TGR	:	Tuntutan Ganti Rugi
THT	:	Tabungan Hari Tua
TP	:	Tim Pemberesan Aset
TPA	:	Tagihan Penjualan Angsuran
TSA	:	*Treasury Single Account*
TSP	:	Tempat Simpan Pinjam
USD	:	*United State Dolar*
USP	:	Usaha Simpan Pinjam
UP	:	Uang Persediaan

INDEKS CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Halaman

LAPORAN REALISASI APBN

Pendapatan Negara dan Hibah

Catatan	B.2.1	**Pendapatan Negara dan Hibah**	61
Catatan	B.2.1.1	**Penerimaan Perpajakan**	62
Catatan	B.2.1.1.1	Pajak Dalam Negeri	62
Catatan	B.2.1.1.2	Pajak Perdagangan Internasional	62
Catatan	B.2.1.2	**Penerimaan Negara Bukan Pajak**	63
Catatan	B.2.1.2.1	Penerimaan Sumber Daya Alam	63
Catatan	B.2.1.2.2	Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	63
Catatan	B.2.1.2.3	Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	63
Catatan	B.2.1.3	**Penerimaan Hibah**	64

Belanja Negara

Catatan	B.2.2	**Belanja Negara**	64
Catatan	B.2.2.1	**Belanja Pemerintah Pusat**	65
Catatan	B.2.2.2	**Transfer untuk Daerah**	71
Catatan	B.2.2.2.1	Dana Perimbangan	71
Catatan	B.2.2.2.1.1	Dana Bagi Hasil	72
Catatan	B.2.2.2.1.2	Dana Alokasi Umum	72
Catatan	B.2.2.2.1.3	Dana Alokasi Khusus	73
Catatan	B.2.2.2.2	Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	73
Catatan	B.2.2.2.2.1	Dana Otonomi Khusus	73
Catatan	B.2.2.2.2.2	Dana Penyesuaian	73
Catatan	B.2.2.3	Suspen	73

Surplus (Defisit) Anggaran

Catatan	B.2.3	**Surplus (Defisit) Anggaran**	73

Pembiayaan

Catatan	B.2.4	**Pembiayaan**	73
Catatan	B.2.4.1	**Pembiayaan Dalam Negeri (Neto)**	74
Catatan	B.2.4.2	**Pembiayaan Luar Negeri (Neto)**	75
Catatan	B.2.4.2.1	Penarikan Pinjaman Luar Negeri	75
Catatan	B.2.4.2.1.1	Penarikan Pinjaman Program	75
Catatan	B.2.4.2.1.2	Penarikan Pinjaman Proyek	76
Catatan	B.2.4.2.2	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	76

SILPA (SIKPA)

Catatan	B.2.5	**Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SILPA (SIKPA)**	76

NERACA

ASET

		Aset Lancar	
Catatan	C.2.1	Rekening Kas BUN di BI	83
Catatan	C.2.2	Rekening Kas di KPPN	83
Catatan	C.2.3	Rekening Pemerintah Lainnya di BI	83

Catatan	C.2.4	Kas di Bendahara Pengeluaran	85
Catatan	C.2.5	Kas di Bendahara Penerimaan	85
Catatan	C.2.6	Kas Pada BLU	85
Catatan	C.2.7	Kas Trust Fund	86
Catatan	C.2.8	Uang Muka dari Rekening BUN	86
Catatan	C.2.9	Piutang Pajak	86
Catatan	C.2.10	Piutang Bukan Pajak	88
Catatan	C.2.11	Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	90
Catatan	C.2.12	Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	91
Catatan	C.2.13	Bagian Lancar RDI/RPD	91
Catatan	C.2.14	Belanja Dibayar Di Muka	91
Catatan	C.2.15	Piutang Lain-lain	92
Catatan	C.2.16	Persediaan	93
		Investasi Jangka Panjang	
Catatan	C.2.17	Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah	94
Catatan	C.2.18	Dana Bergulir	95
Catatan	C.2.19	Investasi Non Permanen Lainnya	97
Catatan	C.2.20	Investasi Permanen PMN	97
Catatan	C.2.21	Investasi Permanen Lainnya	99
Catatan	C.2.22	**Aset Tetap**	100
Catatan	C.2.23	**Aset Lainnya**	101
KEWAJIBAN			
		Kewajiban Jangka Pendek	
Catatan	C.2.24	Utang Perhitungan Fihak Ketiga	106
Catatan	C.2.25	Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	106
Catatan	C.2.26	Utang Bunga	107
Catatan	C.2.27	Utang Kepada Pihak Ketiga	108
Catatan	C.2.28	Utang Jangka Pendek Lainnya	109
		Kewajiban Jangka Panjang	
Catatan	C.2.29	Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SUN	109
Catatan	C.2.30	Kewajiban Pemerintah terhadap Program THT	111
Catatan	C.2.31	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	111
Catatan	C.2.32	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan	111
Catatan	C.2.33	Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN	111
Catatan	C.2.34	Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	112
EKUITAS			
		Ekuitas Dana Lancar	
Catatan	C.2.35	SAL	112
Catatan	C.2.36	SILPA (SIKPA)	113
Catatan	C.2.37	Dana Lancar Lainnya	113
Catatan	C.2.38	Cadangan Piutang	113
Catatan	C.2.39	Cadangan Persediaan	114
Catatan	C.2.40	Pendapatan yang Ditangguhkan	114
Catatan	C.2.41	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	114
Catatan	C.2.42	Selisih Kurs	114
		Ekuitas Dana Investasi	
Catatan	C.2.43	Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	115
Catatan	C.2.44	Diinvestasikan dalam Aset Tetap	115
Catatan	C.2.45	Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	115
Catatan	C.2.46	Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	115

LAPORAN ARUS KAS

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Catatan	D.2.1	Penerimaan Perpajakan	129
Catatan	D.2.2	Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	132
Catatan	D.2.3	Penerimaan Hibah	134
Catatan	D.2.4	Belanja Pegawai	134
Catatan	D.2.5	Belanja Barang	135
Catatan	D.2.6	Bunga Utang	135
Catatan	D.2.7	Subsidi	136
Catatan	D.2.8	Bantuan Sosial	136
Catatan	D.2.9	Belanja Lain-Lain	137
Catatan	D.2.10	Bagi Hasil Pajak	137
Catatan	D.2.11	Bagi Hasil Sumber Daya Alam	137
Catatan	D.2.12	Dana Alokasi Umum	138
Catatan	D.2.13	Dana Alokasi Khusus	138
Catatan	D.2.14	Dana Otonomi Khusus	138
Catatan	D.2.15	Dana Penyesuaian	138

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN

Catatan	D.2.16	Penjualan Aset Tetap	138
Catatan	D.2.17	Belanja Aset Tetap	139

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Catatan	D.2.18	Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	140
Catatan	D.2.19	Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	141
Catatan	D.2.20	Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	142
Catatan	D.2.21	Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	142
Catatan	D.2.22	Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	142
Catatan	D.2.23	Penyertaan Modal Negara dan Dukungan Infrastruktur	142
Catatan	D.2.24	RDI/RPD	142
Catatan	D.2.25	Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	142

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN

Catatan	D.2.26	Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	143
Catatan	D.2.27	Transfer Antar Kantor	143

REPUBLIK INDONESIA

RINGKASAN

RINGKASAN

Berdasarkan Pasal 23 Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, dan UU Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, sebagaimana telah diubah dengan UU Nomor 41 Tahun 2007, Pemerintah menyusun laporan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran (TA) 2007 dalam bentuk laporan keuangan. Laporan keuangan tersebut terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2007 (*Audited*) ini telah disusun dan disajikan sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP).

LKPP Tahun 2007 (*Audited*) ini disusun berdasarkan gabungan laporan keuangan seluruh kementerian negara/lembaga, informasi keuangan yang berada dalam pengelolaan Bendahara Umum Negara (BUN), dan unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset Pemerintah.

1. LAPORAN REALISASI APBN

Laporan Realisasi APBN menggambarkan perbandingan antara APBN TA 2007 dengan realisasinya, yang mencakup unsur-unsur pendapatan, belanja, dan pembiayaan selama periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada TA 2007 adalah sebesar Rp707,81 triliun atau mencapai 101,98 persen dari anggarannya. Sementara itu, realisasi Belanja Negara pada TA 2007 adalah sebesar Rp757,65 triliun atau mencapai 100,70 persen dari anggarannya. Jumlah realisasi Belanja Negara tersebut terdiri dari realisasi Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp504,62 triliun atau 101,29 persen dari anggarannya, dan realisasi Transfer untuk Daerah sebesar Rp253,26 triliun atau 99,63 persen dari anggarannya. Dalam Belanja Negara terdapat Suspen sebesar Rp1,42 triliun.

Realisasi Defisit Anggaran TA 2007 adalah sebesar Rp49,84 triliun, sedangkan dalam APBN-P TA 2007 dianggarkan defisit sebesar Rp58,29 triliun.

Realisasi Pembiayaan Neto TA 2007 adalah sebesar Rp42,46 triliun atau 72,84 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2007 sebesar Rp58,29 triliun, sehingga terjadi Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar Rp7,39 triliun.

Ringkasan Laporan Realisasi APBN TA 2007 dan 2006 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam triliun rupiah)

Uraian	TA 2007 (*Audited*)			TA 2006 (*Audited*)
	Anggaran (UU No. 41/2007)	Realisasi	% Realisasi thd Anggaran	Realisasi
Pendapatan Negara dan Hibah	694,09	707,81	101,98%	637,99
Belanja Negara	752,37	757,65	100,70%	667,13
Belanja Pemerintah Pusat	498,17	504,62	101,29%	440,03
Transfer untuk Daerah	254,20	253,26	99,63%	226,18
Suspen		(0,24)		0,92
Surplus (Defisit) Anggaran	(58,29)	(49,84)	85,52%	(29,14)
Pembiayaan Neto	58,29	42,46	72,84%	29,42
SiLPA (SiKPA)		(7,39)		0,27

2. NERACA

Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Pusat mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas dana pada tanggal 31 Desember 2007.

Jumlah Aset per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp1.600,21 triliun yang terdiri dari Aset Lancar sebesar Rp156,60 triliun; Investasi Jangka Panjang sebesar Rp691,34 triliun; Aset Tetap sebesar Rp443,49 triliun; dan Aset Lainnya sebesar Rp308,78 triliun.

Jumlah Kewajiban per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp1.430,96 triliun yang terdiri dari Kewajiban Jangka Pendek sebesar Rp139,73 triliun dan Kewajiban Jangka Panjang sebesar Rp1.291,23 triliun.

Sementara itu jumlah Ekuitas Dana Neto per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp169,25 triliun yang terdiri dari Ekuitas Dana Lancar sebesar minus Rp30,79 triliun dan Ekuitas Dana Investasi sebesar Rp200,04 triliun.

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2007 dan 2006 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam triliun rupiah)

Uraian	31 Desember 2007 (*Audited*)	31 Desember 2006 (*Audited*)	% Kenaikan (Penurunan)
Aset	1.600,21	1.219,96	31,17%
Aset Lancar	156,60	125,99	24,30%
Investasi Jangka Panjang	691,34	663,55	4,19%
Aset Tetap	443,49	343,92	28,95%
Aset Lainnya	308,78	86,50	256,97%
Kewajiban	1.430,96	1.330,06	7,59%
Kewajiban Jangka Pendek	139,73	108,14	29,21%
Kewajiban Jangka Panjang	1.291,23	1.221,92	5,67%
Ekuitas Dana Neto	169,25	(110,10)	253,72%
Ekuitas Dana Lancar	(30,79)	17,84	(272,59%)
Ekuitas Dana Investasi	200,04	(127,94)	256,35%

3. LAPORAN ARUS KAS

Laporan Arus Kas adalah laporan yang menyajikan informasi mengenai sumber, penggunaan, perubahan kas dan setara kas selama Tahun 2007 serta saldo kas dan setara kas pada tanggal 31 Desember 2007.

Saldo Kas Bendahara Umum Negara (BUN) & Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) dan Kas Badan Layanan Umum (BLU) per 31 Desember 2007 adalah sebesar Rp24,06 triliun yang berarti terdapat kenaikan sebesar Rp2,51 triliun dari saldo per 31 Desember 2006 sebesar Rp21,55 triliun. Kenaikan saldo kas tersebut berasal dari koreksi penambahan kas awal tahun sebesar Rp3,91 triliun, kenaikan arus kas dari aktivitas operasi sebesar Rp14,45 triliun, penurunan arus kas dari aktivitas investasi aset non keuangan sebesar Rp64,30 triliun, kenaikan arus kas dari aktivitas pembiayaan sebesar Rp42,46 triliun, dan kenaikan arus kas dari aktivitas non anggaran sebesar Rp5,99 triliun.

Ringkasan Laporan Arus Kas Tahun 2007 dan 2006 dapat disajikan sebagai berikut:

(dalam triliun rupiah)

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Saldo Awal Kas BUN & KPPN	21,55	18,06
Penambahan Saldo Awal:		
Reklasifikasi dari Rekening Pemerintah Lainnya di BI	3,81	-
Saldo Awal BLU	0,10	-
Saldo Awal Kas BUN & KPPN dan Kas BLU setelah Koreksi	25,46	-
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi	14,45	26,11
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(64,30)	(55,25)
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan	42,46	29,42
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran	5,99	3,22
Kenaikan (Penurunan) Kas	(1,39)	3,49
Saldo Akhir Kas BUN & KPPN dan Kas BLU	24,06	21,55

4. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN

Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK) menguraikan kebijakan makro, kebijakan fiskal, metodologi penyusunan LKPP, dan kebijakan akuntansi yang diterapkan. Selain itu, dalam CaLK dikemukakan penjelasan pos-pos laporan keuangan dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, dalam penyajian Laporan Realisasi APBN, pendapatan, belanja, dan pembiayaan diakui berdasarkan basis kas, yaitu pada saat kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari Kas Umum Negara (KUN). Dalam penyajian Neraca, aset, kewajiban, dan ekuitas dana diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan oleh dan dari KUN.

Dalam CaLK ini diungkapkan pula kejadian penting setelah tanggal pelaporan keuangan serta beberapa informasi tambahan yang diperlukan.

REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

MENTERI KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2007 (*Audited*) yang terdiri dari Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan sebagaimana terlampir, adalah merupakan tanggung jawab kami.

LKPP Tahun 2007 (*Audited*) ini telah disusun berdasarkan sistem pengendalian intern yang memadai, dan isinya telah menyajikan informasi pelaksanaan APBN dan posisi keuangan Pemerintah Pusat secara layak sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan yang tersaji dalam LKPP Tahun 2007 (*Audited*) ini meliputi semua laporan keuangan entitas pelaporan sebagaimana termuat dalam Catatan atas Laporan Keuangan, yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan.

Jakarta, 26 Mei 2008

a.n. Pemerintah Republik Indonesia
Menteri Keuangan,

Sri Mulyani Indrawati

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN REALISASI APBN
(*AUDITED*)

I. LAPORAN REALISASI APBN (*AUDITED*)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN REALISASI APBN
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 DAN 2006

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2007 (*Audited*) Anggaran (UU No. 41/2007)	TA 2007 (*Audited*) Realisasi	TA 2007 (*Audited*) % Realisasi terhadap Anggaran	TA 2006 (*Audited*) Realisasi
A. Pendapatan Negara dan Hibah	**B.2.1**				
I. Penerimaan Perpajakan	**B.2.1.1**	**492.010.893.000.000**	**490.988.634.954.090**	**99,79%**	**409.203.019.335.450**
1. Pajak Dalam Negeri	B.2.1.1.1	474.550.950.000.000	470.051.815.733.040	99,05%	395.971.535.630.012
2. Pajak Perdagangan Internasional	B.2.1.1.2	17.459.943.000.000	20.936.819.221.050	119,91%	13.231.483.705.438
II. Penerimaan Negara Bukan Pajak	**B.2.1.2**	**198.253.670.829.000**	**215.119.705.411.332**	**108,51%**	**226.950.066.385.871**
1. Penerimaan Sumber Daya Alam	B.2.1.2.1	115.053.273.200.000	132.892.588.952.859	115,51%	167.473.800.945.318
2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN	B.2.1.2.2	21.800.000.000.000	23.222.505.531.880	106,53%	22.973.056.234.957
3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya	B.2.1.2.3	61.400.397.629.000	59.004.610.926.593	96,10%	36.503.209.205.596
III. Penerimaan Hibah	**B.2.1.3**	**3.823.317.683.000**	**1.697.747.939.503**	**44,41%**	**1.834.050.785.735**
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah (A.I + A.II)		**694.087.881.512.000**	**707.806.088.304.925**	**101,98%**	**637.987.136.507.056**
B. Belanja Negara	**B.2.2**				
I. Belanja Pemerintah Pusat	**B.2.2.1**	**498.172.161.850.000**	**504.623.263.587.032**	**101,29%**	**440.032.084.569.643**
1. Belanja Pegawai		92.843.560.640.000	90.424.946.964.533	97,39%	73.252.287.265.554
2. Belanja Barang		65.260.429.057.000	54.511.365.469.438	83,53%	47.181.912.659.247
3. Belanja Modal		75.050.813.170.000	64.288.669.050.730	85,66%	54.951.875.415.032
4. Pembayaran Bunga Utang		83.555.140.000.000	79.806.377.534.753	95,51%	79.082.563.276.141
5. Subsidi		105.073.369.472.000	150.214.443.691.269	142,96%	107.431.785.858.675
6. Bantuan Sosial		50.607.662.924.000	49.756.281.449.623	98,32%	40.708.566.188.991
7. Belanja Lain-lain		25.781.186.587.000	15.621.179.426.686	60,59%	37.423.093.906.003
II. Transfer untuk Daerah	**B.2.2.2**	**254.201.014.938.000**	**253.263.178.086.104**	**99,63%**	**226.179.954.328.611**
1. Dana Perimbangan	**B.2.2.2.1**	**244.607.806.138.000**	**243.967.173.165.971**	**99,74%**	**222.130.617.897.611**
a. Dana Bagi Hasil	B.2.2.2.1.1	62.726.306.138.000	62.941.953.784.545	100,34%	64.900.298.776.741
b. Dana Alokasi Umum	B.2.2.2.1.2	164.787.400.000.000	164.787.399.928.352	100,00%	145.664.184.719.236
c. Dana Alokasi Khusus	B.2.2.2.1.3	17.094.100.000.000	16.237.819.453.074	94,99%	11.566.134.401.634

2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	**B.2.2.2.2**	**9.593.208.800.000**	**9.296.004.920.133**	**96,90%**	**4.049.336.431.000**
a. Dana Otonomi Khusus	B.2.2.2.2.1	4.045.748.000.000	4.045.748.000.000	100,00%	3.488.284.000.000
b. Dana Penyesuaian	B.2.2.2.2.2	5.547.460.800.000	5.250.256.920.133	94,64%	561.052.431.000
III. Suspen	**B.2.2.3**		**(236.528.782.258)**		**916.774.166.988**
Jumlah Belanja Negara (B.I + B.II + B.III)		**752.373.176.788.000**	**757.649.912.890.878**	**100,70%**	**667.128.813.065.242**
C. Surplus (Defisit) Anggaran (A - B)	**B.2.3**	**(58.285.295.276.000)**	**(49.843.824.585.953)**	**85,52%**	**(29.141.676.558.186)**
D. Pembiayaan	**B.2.4**				
I. Pembiayaan Dalam Negeri	**B.2.4.1**	**70.825.681.176.000**	**66.308.947.652.257**	**93,62%**	**52.424.102.591.780**
1. a. Rekening Pemerintah	B.2.4.1.1	10.621.642.900.000	11.143.278.070.772	79,27%	18.912.866.605.494
b. Penerusan Pinjaman			(2.723.357.058.788)		(3.557.973.958.998)
2. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi	B.2.4.1.2	6.357.719.000.000	5.416.839.483.371	85,20%	5.055.702.597.315
3. Surat Utang Negara (Neto)	B.2.4.1.3	58.546.319.276.000	57.172.187.156.902	97,65%	35.985.507.347.969
4. Penyertaan Modal Negara dan Dukungan Infrastruktur	B.2.4.1.4	(4.700.000.000.000)	(4.700.000.000.000)	100,00%	(3.972.000.000.000)
II. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)	**B.2.4.2**	**(12.540.385.900.000)**	**(23.852.411.834.488)**	**190,20%**	**(23.008.512.339.912)**
1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto)	**B.2.4.2.1**	**42.210.304.100.000**	**34.070.047.317.686**	**80,72%**	**29.672.559.197.871**
a. Penarikan Pinjaman Program	B.2.4.2.1.1	19.005.000.000.000	19.607.480.189.151	103,17%	13.579.552.756.283
b. Penarikan Pinjaman Proyek	B.2.4.2.1.2	23.205.304.100.000	14.462.567.128.535	62,32%	16.093.006.441.588
2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	**B.2.4.2.2**	**(54.750.690.000.000)**	**(57.922.459.152.174)**	**105,79%**	**(52.681.071.537.783)**
Jumlah Pembiayaan (D.I + D.II)		**58.285.295.276.000**	**42.456.535.817.769**	**72,84%**	**29.415.590.251.868**
E. Sisa Lebih (Kurang)Pembiayaan Anggaran-SILPA (SIKPA) (D+C)	**B.2.5**		**(7.387.288.768.184)**		**273.913.693.682**

REPUBLIK INDONESIA

NERACA
(AUDITED)

II. NERACA (*AUDITED*)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
NERACA
PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	31 Desember 2007 (*Audited*)	31 Desember 2006 (*Audited*)
ASET			
Aset Lancar			
Kas dan Bank			
Rekening Kas BUN di BI	C.2.1	18.170.046.148.742	954.310.836.789
Rekening Kas di KPPN	C.2.2	5.492.896.654.079	20.594.618.632.501
Rekening Pemerintah Lainnya di BI	C.2.3	3.248.408.392.480	12.331.109.271.481
Kas di Bendahara Pengeluaran	C.2.4	1.245.221.273.097	1.457.362.551.679
Kas di Bendahara Penerimaan	C.2.5	878.054.836.115	429.489.122.788
Kas di BLU	C.2.6	444.767.605.022	-
Kas Trust Fund	C.2.7	0	2.425.944.284.122
Jumlah Kas dan Bank		29.479.394.909.535	38.192.834.699.360
Uang Muka dari Rekening BUN	C.2.8	3.405.421.282.834	2.764.674.545.037
Piutang			
Piutang Pajak	C.2.9	42.042.099.564.945	35.454.552.126.836
Piutang Bukan Pajak	C.2.10	38.045.969.394.145	25.737.724.557.593
Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran	C.2.11	82.112.146	90.560.467
Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	C.2.12	4.229.682.020	12.153.879.936
Bagian Lancar RDI/RPD	C.2.13	23.180.947.180.000	-
Belanja Dibayar Di Muka	C.2.14	1.322.504.162.418	597.914.389.211
Piutang Lain-lain	C.2.15	12.321.167.839.147	19.688.724.084.329
Jumlah Piutang		116.916.999.934.821	81.491.159.598.372
Persediaan	C.2.16	6.797.911.546.822	3.536.487.866.859
Jumlah Aset Lancar		**156.599.727.674.012**	**125.985.156.709.628**
Investasi Jangka Panjang			
Investasi Non Permanen			
Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah	C.2.17	39.533.081.330.000	59.212.080.140.000
Dana Bergulir	C.2.18	6.915.945.297.699	5.690.613.254.758
Investasi Non Permanen Lainnya	C.2.19	6.916.259.685.177	2.750.000.000.000
Jumlah Investasi Non Permanen		53.365.286.312.876	67.652.693.394.758
Investasi Permanen			
Investasi Permanen PMN	C.2.20	496.606.812.461.827	475.737.070.434.585
Investasi Permanen Lainnya	C.2.21	141.370.363.451.861	120.161.338.331.481
Jumlah Investasi Permanen		637.977.175.913.688	595.898.408.766.067
Jumlah Investasi Jangka Panjang		**691.342.462.226.564**	**663.551.102.160.825**
Aset Tetap	C.2.22		
Tanah		126.356.123.950.050	81.443.273.004.883
Peralatan dan Mesin		128.364.176.462.694	111.945.481.046.323
Gedung dan Bangunan		74.830.730.558.020	53.225.867.742.893
Jalan, Irigasi, dan Jaringan		94.082.094.925.843	82.173.661.040.323
Aset Tetap Lainnya		6.056.479.440.047	4.101.873.511.741
Konstruksi Dalam Pengerjaan		13.796.365.616.075	11.034.797.470.188
Jumlah Aset Tetap		**443.485.970.952.729**	**343.924.953.816.351**
Aset Lainnya	C.2.23		
Tagihan Penjualan Angsuran		264.984.954	140.032.475
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi		30.048.960.054	51.048.922.086
Kemitraan Dengan Pihak Ketiga		501.250.000	33.569.000
Aset Tak Berwujud		1.899.119.911.980	569.719.157.703

Dana yang Dibatasi Penggunaannya		21.431.360.880.137	29.533.267.302.742
Aset Lain-lain		285.422.216.024.595	56.349.135.641.011
Jumlah Aset Lainnya		**308.783.512.011.720**	**86.503.344.625.017**
JUMLAH ASET		**1.600.211.672.865.025**	**1.219.964.557.311.821**
KEWAJIBAN			
Kewajiban Jangka Pendek			
Utang Perhitungan Fihak Ketiga	C.2.24	525.494.606.202	460.693.623.955
Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	C.2.25	96.214.976.565.544	79.760.070.578.171
Utang Bunga	C.2.26	15.168.399.409.074	13.307.756.263.984
Utang Kepada Pihak Ketiga	C.2.27	25.063.414.380.587	11.668.015.966.779
Utang Jangka Pendek Lainnya	C.2.28	2.760.047.411.652	2.944.434.123.992
Jumlah Kewajiban Jangka Pendek		**139.732.332.373.059**	**108.140.970.556.881**
Kewajiban Jangka Panjang			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri			
Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SUN	C.2.29	693.789.445.220.648	664.069.038.386.125
Kewajiban Pemerintah terhadap Program THT	C.2.30	1.754.377.650.427	1.646.697.846.635
Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri		695.543.822.871.075	665.715.736.232.760
Utang Jangka Panjang Luar Negeri			
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan	C.2.31	528.644.752.378.689	505.104.096.673.440
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan	C.2.32	14.808.032.952	130.873.212.300
Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN	C.2.33	66.559.215.313.000	50.456.525.092.318
Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya	C.2.34	470.533.090.781	514.869.376.960
Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri		595.689.308.815.422	556.206.364.355.018
Jumlah Kewajiban Jangka Panjang		**1.291.233.131.686.497**	**1.221.922.100.587.778**
JUMLAH KEWAJIBAN		**1.430.965.464.059.556**	**1.330.063.071.144.659**
EKUITAS DANA			
Ekuitas Dana Lancar			
SAL	C.2.35	18.830.302.308.895	17.066.126.565.213
SILPA (SIKPA)	C.2.36	(7.387.288.768.184)	273.913.693.682
Dana Lancar Lainnya	C.2.37	19.584.010.680.384	22.727.286.238.759
Cadangan Piutang	C.2.38	108.296.689.599.084	81.491.159.598.372
Cadangan Persediaan	C.2.39	6.797.911.546.822	3.536.487.866.859
Pendapatan yang Ditangguhkan	C.2.40	9.952.607.700.809	429.489.122.788
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek	C.2.41	(139.206.837.766.857)	(107.680.276.932.926)
Selisih Kurs	C.2.42	(47.657.062.985.254)	-
Jumlah Ekuitas Dana Lancar		**(30.789.667.684.301)**	**17.844.186.152.747**
Ekuitas Dana Investasi			
Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang	C.2.43	691.342.462.226.564	663.551.102.160.825
Diinvestasikan dalam Aset Tetap	C.2.44	443.485.970.952.729	343.924.953.816.351
Diinvestasikan dalam Aset Lainnya	C.2.45	308.783.512.011.720	86.503.344.625.017
Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang	C.2.46	(1.243.576.068.701.243)	(1.221.922.100.587.778)
Jumlah Ekuitas Dana Investasi		**200.035.876.489.770**	**(127.942.699.985.585)**
EKUITAS DANA NETO		**169.246.208.805.469**	**(110.098.513.832.838)**
JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA		**1.600.211.672.865.025**	**1.219.964.557.311.821**

REPUBLIK INDONESIA

LAPORAN ARUS KAS
(*AUDITED*)

III. LAPORAN ARUS KAS (*AUDITED*)

PEMERINTAH REPUBLIK INDONESIA
LAPORAN ARUS KAS
UNTUK PERIODE YANG BERAKHIR SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 DAN 2006

(Dalam Rupiah)

Uraian	Catatan	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
A. ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Perpajakan	D.2.1		
a. Pajak Penghasilan		238.430.926.067.905	208.833.125.652.841
b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah		154.526.773.832.995	123.035.859.568.711
c. Pajak Bumi dan Bangunan		23.723.546.008.858	20.858.516.906.183
d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan		5.953.378.541.995	3.184.469.880.249
e. Cukai		44.679.463.855.018	37.772.132.887.314
f. Bea Masuk		16.699.443.059.175	12.140.401.555.427
g. Pajak Ekspor		4.237.376.161.875	1.091.082.150.011
h. Pajak Lainnya		2.737.727.426.269	2.287.430.734.714
Total Penerimaan Perpajakan		490.988.634.954.090	409.203.019.335.450
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP)	D.2.2		
a. Penerimaan Sumber Daya Alam		132.892.588.952.859	167.473.800.945.318
b. Penerimaan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN		23.222.505.531.880	22.973.056.234.957
c. Penerimaan PNBP Lainnya		58.922.417.177.557	36.467.597.306.379
Total PNBP		215.037.511.662.296	226.914.454.486.654
3. Penerimaan Hibah	D.2.3	1.697.747.939.503	1.834.050.785.735
Jumlah Arus Kas Masuk (A.I)		**707.723.894.555.889**	**637.951.524.607.839**
II. Arus Kas Keluar			
1. Belanja Pegawai	D.2.4	90.358.606.656.075	72.884.043.314.552
2. Belanja Barang	D.2.5	54.395.453.562.207	47.065.451.829.540
3. Bunga Utang	D.2.6	79.744.341.931.244	79.069.362.794.878
4. Subsidi	D.2.7	150.214.150.451.047	107.456.739.357.285
5. Bantuan Sosial	D.2.8	49.668.943.160.212	40.684.769.238.136
6. Belanja Lain-Lain	D.2.9	15.623.762.951.481	38.155.510.436.090
7. Bagi Hasil Pajak	D.2.10	34.990.350.498.937	28.544.231.692.934
8. Bagi Hasil Sumber Daya Alam	D.2.11	27.951.938.003.404	36.700.805.029.998
9. Dana Alokasi Umum	D.2.12	164.808.765.128.352	145.666.815.317.795
10. Dana Alokasi Khusus	D.2.13	16.237.819.453.074	11.566.091.977.723
11. Dana Otonomi Khusus	D.2.14	4.058.348.000.000	3.488.284.000.000
12. Dana Penyesuaian	D.2.15	5.216.291.720.133	558.303.431.000
Jumlah Arus Kas Keluar (A.II)		**693.268.771.516.166**	**611.840.408.419.931**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi (A.I - A.II)		**14.455.123.039.723**	**26.111.116.187.908**
B. ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NON KEUANGAN			
I. Arus Kas Masuk			
Penjualan Aset Tetap	D.2.16	82.193.749.036	35.611.899.217
Jumlah Arus Kas Masuk (B.I)		**82.193.749.036**	**35.611.899.217**
II. Arus Kas Keluar			
Belanja Aset Tetap	D.2.17	64.381.141.374.712	55.288.404.645.311
Jumlah Arus Kas Keluar (B.II)		**64.381.141.374.712**	**55.288.404.645.311**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan (B.I - B.II)		**(64.298.947.625.676)**	**(55.252.792.746.094)**

C. ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN			
I. Arus Kas Masuk			
1. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.18	132.927.083.411.932	118.203.381.971.024
2. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri	D.2.19	34.070.047.317.686	29.672.559.197.871
3. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain	D.2.20	9.261.378.112.144	3.665.247
Jumlah Arus Kas Masuk (C.I)		**176.258.508.841.762**	**147.875.944.834.142**
II. Arus Kas Keluar			
1. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri	D.2.21	59.686.063.547.598	58.249.309.085.493
2. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri	D.2.22	57.922.459.152.174	52.681.071.537.783
3. Penyertaan Modal Negara dan Dukungan Infrastruktur	D.2.23	4.700.000.000.000	3.972.000.000.000
4. RDI/RPD	D.2.24	2.723.357.058.788	3.557.973.958.998
5. Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain	D.2.25	8.770.093.265.433	0
Jumlah Arus Kas Keluar (C.2)		**133.801.973.023.993**	**118.460.354.582.274**
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan (C.I – C.II)		**42.456.535.817.769**	**29.415.590.251.868**
D. ARUS KAS DARI AKTIVITAS NON ANGGARAN			
1. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	D.2.26	231.158.227.155	184.359.625.705
2. Transfer Antar Kantor	D.2.27	5.760.832.890.959	3.033.686.327.758
Arus Kas Bersih dari Aktivitas Non Anggaran (D.I – D.II)		**5.991.990.918.114**	**3.218.045.953.463**
KENAIKAN (PENURUNAN) KAS (A+B+C+D)		**(1.395.297.850.070)**	**3.491.959.647.145**
SALDO AWAL KAS BUN DAN KPPN		**21.548.929.469.290**	**18.056.969.822.145**
PENAMBAHAN SALDO AWAL:			
REKLASIFIKASI REKENING PEMERINTAH LAINNYA DI BI (DALAM VALAS USD)		3.806.594.579.799	-
KAS BLU		102.188.801.037	-
SALDO AWAL KAS BUN & KPPN DAN KAS BLU SETELAH PENAMBAHAN		**25.457.712.850.126**	**18.056.969.822.145**
SALDO AKHIR KAS BUN & KPPN DAN KAS BLU		**24.062.415.000.056**	**21.548.929.469.290**
REKENING PEMERINTAH LAINNYA PADA BI	C.2.3	3.248.408.392.480	12.331.109.271.481
KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN	C.2.4	1.245.221.273.097	1.457.362.551.679
KAS DI BENDAHARA PENERIMAAN	C.2.5	878.054.836.115	429.489.122.788
KAS TRUST FUND	C.2.7	-	2.425.944.284.122
SALDO AKHIR KAS DAN BANK		**29.434.099.501.748**	**38.192.834.699.360**

REPUBLIK INDONESIA

CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN
(*AUDITED*)

IV. CATATAN ATAS LAPORAN KEUANGAN (*AUDITED*)

A. PENJELASAN UMUM

A.1. DASAR HUKUM

1. UUD 1945 Pasal 23 ayat (1) menetapkan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) sebagai wujud dari pengelolaan keuangan negara ditetapkan setiap tahun dengan undang-undang dan dilaksanakan secara terbuka dan bertanggung jawab untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (1) menetapkan bahwa Presiden menyampaikan rancangan undang-undang tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBN kepada Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) berupa laporan keuangan yang telah diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) selambat-lambatnya 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, Pasal 30 ayat (2) menetapkan bahwa laporan keuangan setidak-tidaknya meliputi Laporan Realisasi APBN, Neraca, Laporan Arus Kas, dan Catatan atas Laporan Keuangan, yang dilampiri dengan laporan keuangan perusahaan negara dan badan lainnya.
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Pasal 55 ayat (1) menetapkan bahwa Menteri Keuangan selaku pengelola fiskal menyusun Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) untuk disampaikan kepada Presiden dalam rangka memenuhi pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara yang menetapkan bahwa LKPP (*Audited*) disusun berdasarkan LKPP (*Unaudited*) yang telah dikoreksi atau disesuaikan menurut hasil pemeriksaan BPK.
6. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2007, Pasal 17 ayat (3) menetapkan bahwa Pemerintah mengajukan Rancangan Undang-Undang tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007, setelah Laporan Keuangan diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan, paling lambat 6 (enam) bulan setelah Tahun Anggaran 2007 berakhir untuk mendapatkan persetujuan DPR.
7. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan.
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah.
9. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar.
10. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 59/PMK.06/2005 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 171/PMK.05/2007.

A.2. KEBIJAKAN FISKAL/KEUANGAN DAN EKONOMI MAKRO

Ekonomi Makro

Perekonomian Indonesia stabil

Selama tahun 2007, walaupun dipengaruhi oleh berbagai faktor eksternal yang relatif tidak kondusif, perekonomian Indonesia berada dalam kondisi yang stabil dan terjaga. Relatif stabilnya perekonomian tidak terlepas dari keberhasilan Pemerintah dalam meredam imbas fluktuasi harga minyak mentah dunia dan tren naiknya harga komoditas. Sedangkan faktor eksternal seperti gejolak pasar keuangan dunia akibat krisis *subprime mortgage* (kredit perumahan dengan profil risiko tinggi) di Amerika belum berdampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia secara makro karena tidak adanya *underlying factors* yang langsung mempengaruhi perekonomian Indonesia. Faktor eksternal lain seperti kenaikan harga komoditas *crude palm oil* dan komoditas dunia lainnya juga mampu diatasi Pemerintah melalui pemberian subsidi yang terkendali, antara lain berupa subsidi minyak goreng.

Kondisi perekonomian yang stabil juga tidak terlepas dari berbagai kebijakan yang dilakukan Pemerintah seperti pemberian subsidi BBM pada tahun 2007 yang berhasil mendorong kegiatan perekonomian sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Pemerintah bahkan juga mampu memanfaatkan momentum penguatan rupiah terhadap dolar Amerika dan tren menurunnya suku bunga *the Fed* untuk mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas.

Faktor-Faktor Pertumbuhan

Dari dalam negeri, pertumbuhan diwarnai dengan masih dominannya konsumsi masyarakat, meningkatnya volume anggaran Pemerintah, bertumbuhnya investasi langsung, dan surplus neraca perdagangan yang menunjukan tren peningkatan dari tahun ke tahun, terutama tahun 2006 dan 2007. Salah satu faktor pertumbuhan yang dominan dan menjadi penggerak utama perekonomian adalah *purchasing power* masyarakat yang meningkat sebagai akibat pemberian berbagai subsidi. Komitmen Pemerintah dalam pembangunan yang terlihat dalam alokasi anggaran yang semakin besar juga telah memberikan stimulus pada perekonomian dan perbaikan kebijakan-kebijakan, terutama di bidang perpajakan, untuk mencapai kesinambungan fiskal. Sementara itu, perbaikan kebijakan untuk mengurangi hambatan berinvestasi dan lalu lintas perdagangan sebagai tindak lanjut dari Inpres No. 3/2006 mampu mendorong kenaikan investasi langsung yang masuk ke Indonesia. Ditambah lagi perbaikan harga komoditas di luar negeri mampu mendorong naiknya volume ekspor Indonesia ke berbagai negara. Berbagai faktor-faktor pendorong pertumbuhan di atas, mengindikasikan perbaikan kondisi makro ekonomi Indonesia yang cukup signifikan sepanjang tahun 2007.

Peningkatan perekonomian dibandingkan tahun 2006

Apabila dibandingkan dengan tahun 2006, maka secara umum kondisi perekonomian tahun 2007 di semua sektor mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi yang mencapai target, laju inflasi yang terkendali, nilai tukar rupiah yang stabil dan tren menurunnya SBI telah memberikan pengaruh positif bagi perekonomian secara agregat. Pengaruh positif ini terbukti dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat yang ditunjukkan dari meningkatnya pendapatan per kapita dari Rp15 juta di tahun 2006 menjadi Rp16,4 juta di tahun 2007, menurunnya proporsi penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan, dan membaiknya kondisi fiskal. Upaya perbaikan kondisi fiskal terus dilakukan Pemerintah dengan mengupayakan pengurangan program-program subsidi yang dapat membebani anggaran, antara lain melalui konversi energi dari BBM ke gas. Di samping itu, Pemerintah terus berkomitmen untuk menyediakan energi alternatif yang dipandang sebagai solusi yang optimal, walaupun saat ini kenaikan harga minyak mentah dunia dan belum tercapainya produksi minyak harian (*lifting*) sesuai dengan target serta program konversi yang kurang tepat sasaran telah menambah beban anggaran. Adapun program yang dianggap dapat menjadi solusi meliputi pengembangan *biofuel* berbasis biji jarak dan jagung, penggunaan energi fosil lainnya seperti batu-bara dan gas untuk pembangkit listrik. Selain itu, Pemerintah juga akan terus melanjutkan program pengalihan konsumsi minyak tanah menjadi gas. Di masa yang akan datang, dengan terlaksananya program-program secara berkesinambungan, *fiscal space* yang memadai dapat tersedia bagi pembangunan nasional.

Kondisi fiskal yang membaik dan tren penurunan debt to GDP ratio

Membaiknya kondisi fiskal yang didukung dengan meningkatnya sumber-sumber pembiayaan dalam negeri telah memfasilitasi Pemerintah untuk menciptakan kemandirian ekonomi. Hal ini ditunjukkan melalui percepatan pelunasan utang kepada pihak luar negeri, sehingga rasio utang terhadap PDB terus memperlihatkan penurunan yang berarti. Pada tahun 2005, rasio utang terhadap Pendapatan Domestik Bruto (PDB) adalah 47,0 persen, kemudian pada tahun 2006 turun menjadi 39 persen dan pada tahun 2007 ini turun menjadi sekitar 36 persen. Sebagai salah satu indikator kesinambungan fiskal, penurunan rasio utang terhadap PDB menunjukkan bahwa APBN semakin sehat sehingga memungkinkan alokasi anggaran yang lebih besar pada berbagai sektor pembangunan terutama anggaran yang bertujuan untuk memperbaiki kualitas kesejahteraan rakyat Indonesia. Perkembangan rasio utang terhadap PDB dalam tiga tahun terakhir disajikan dalam **Grafik 1**.

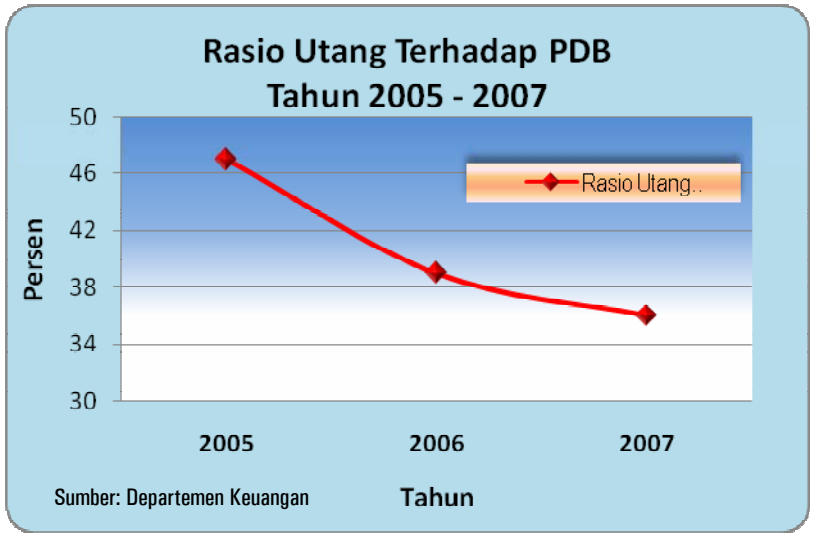

Grafik 1. Rasio Utang terhadap PDB

Sumber-Sumber Pembiayaan DN

Pemerintah terus mendorong pembiayaan yang berasal dari sumber-sumber pembiayaan dalam negeri. Hal ini disebabkan karena sumber pembiayaan dalam negeri relatif aman jika dibandingkan dengan sumber pembiayaan luar negeri dalam hal meminimalkan risiko anggaran yang berasal dari goncangan nilai tukar, suku bunga dan risiko perpanjangan jatuh tempo. Adapun sumber-sumber pembiayaan dalam negeri yang terus digalang oleh Pemerintah antara lain berupa peningkatan target SUN neto, dividen Pemerintah atas laba BUMN, serta efisiensi dan efektifitas sumber-sumber pembiayaan lainnya. Selain semakin luasnya sumber-sumber pembiayaan dalam negeri, arus modal baik jangka pendek maupun jangka panjang yang terus masuk ke Indonesia mendukung semakin membaiknya kinerja neraca pembayaran. Hal-hal tersebut di atas mendukung ketahanan fundamental perekonomian Indonesia dalam menghadapi goncangan eksternal.

Kewaspadaan terhadap beberapa permasalahan fiskal

Kendati demikian, Pemerintah terus mengamati dan mengantisipasi berbagai permasalahan fiskal yang mungkin timbul di masa yang akan datang sehubungan dengan implementasi dari berbagai paket kebijakan ekonomi Pemerintah di bidang perpajakan dan perdagangan serta risiko penerbitan surat utang untuk pembiayaan dalam negeri. Meningkatnya alokasi belanja untuk pembayaran bunga utang dalam tiga tahun terakhir terus mendapat perhatian Pemerintah terutama dalam kaitannya dengan defisit anggaran. Pemerintah juga secara khusus memberikan perhatian terhadap sektor ketenagakerjaan yang belum optimal mengatasi pengangguran. Hal penting lainnya adalah upaya Pemerintah dalam menciptakan lapangan pekerjaan yang baru melalui peningkatan investasi baik PMA maupun PMDN.

Pertumbuhan ekonomi bertumpu pada konsumsi dan investasi

Pertumbuhan ekonomi domestik pada tahun 2007 masih bertumpu pada sektor konsumsi (*consumption-driven economy*), namun secara bertahap peranannya semakin menurun dan digantikan oleh investasi. Sebagai gambaran dalam tahun 2003, sumbangan konsumsi terhadap PDB 79,3 persen dan investasi 20,3 persen. Dalam tahun 2007, sumbangan konsumsi terhadap

PDB menurun menjadi 74,7 persen sementara investasi naik menjadi 25,9 persen. Kondisi ini terkait erat dengan terus membaiknya nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika, terkendalinya laju inflasi, subsidi/bantuan sosial yang mendukung daya beli, dan terus membaiknya fungsi intermediasi perbankan. Membaiknya daya beli antara lain terlihat dari meningkatnya PDB per-kapita dari sebesar Rp15,0 juta di tahun 2006 menjadi Rp16,4 juta di tahun 2007. Sebagai komponen utama pembentuk PDB, konsumsi rumah tangga merepresentasikan 63,5 persen dari seluruh total PDB atau relatif sama jika dibandingkan dengan kondisi tahun 2006 sebesar 62,7 persen. Demikian pula investasi yang menyumbang 24,9 persen dalam tahun 2007.

Untuk lebih mendorong pertumbuhan investasi Pemerintah melalui berbagai kebijakan terus berupaya untuk meningkatkan produksi sebagai sumber pertumbuhan ekonomi. Sementara itu, komponen pengeluaran Pemerintah mengalami peningkatan dari 24,1 persen di tahun 2006 menjadi 24,9 persen di tahun 2007. Hal ini sejalan dengan peningkatan volume belanja Pemerintah dalam anggaran yang semakin meningkat dari tahun ke tahun. Struktur PDB menurut komponen penggunaannya tergambar pada **Grafik 2**.

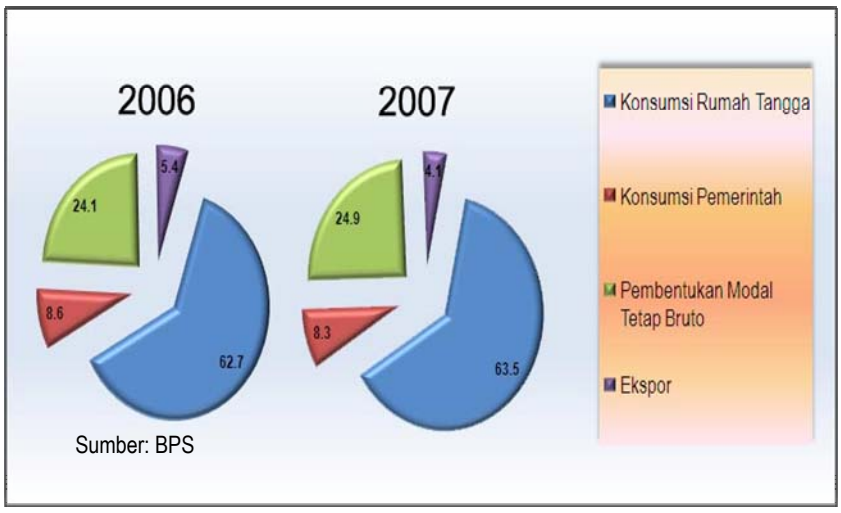

Grafik 2. Struktur PDB Tahun 2006 dan 2007

PDB Tahun 2007 sebesar Rp3.957,4 triliun

Produk Domestik Bruto Indonesia pada tahun 2007 mencapai Rp3.957,4 triliun (harga berlaku) atau Rp1.964,0 triliun (harga konstan tahun 2000). Pertumbuhan ekonomi sebesar 6,3 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2006 yang hanya tumbuh sebesar 5,5 persen. Selama tahun 2007, seluruh sektor ekonomi pembentuk PDB mengalami pertumbuhan. Pertumbuhan tertinggi dicapai oleh sektor pengangkutan dan komunikasi yang mencapai 14,4 persen, sementara yang terendah dicapai sektor pertambangan dan penggalian yang hanya 0,2 persen. Akan tetapi, sumbangan terbesar dalam menciptakan laju pertumbuhan ekonomi justru diberikan oleh sektor perdagangan-hotel-restoran yang tumbuh 8,5 persen. Selama tahun 2007 sektor ini memberikan sumbangan ke PDB sebesar 1,4 persen atau tertinggi di antara sumbangan sektor-sektor lainnya. Perkembangan sektor perdagangan ini mengindikasikan kondisi perekonomian yang makin kondusif.

Komposisi PDB menurut Lapangan Usaha

Apabila dilihat dari lapangan usahanya, maka komposisi industri pengolahan merupakan komponen tertinggi dalam pembentukan PDB yang meliputi 27 persen dari total PDB. Komponen terbesar kedua adalah perdagangan-hotel-restoran yang merepresentasikan 14,9 persen, diikuti pertanian-perkebunan-peternakan sebesar 13,8 persen dan pertambangan-penggalian sebesar 11,2 persen. Secara umum, struktur PDB menurut lapangan usaha tahun 2007 tergambar dalam **Grafik 3.**

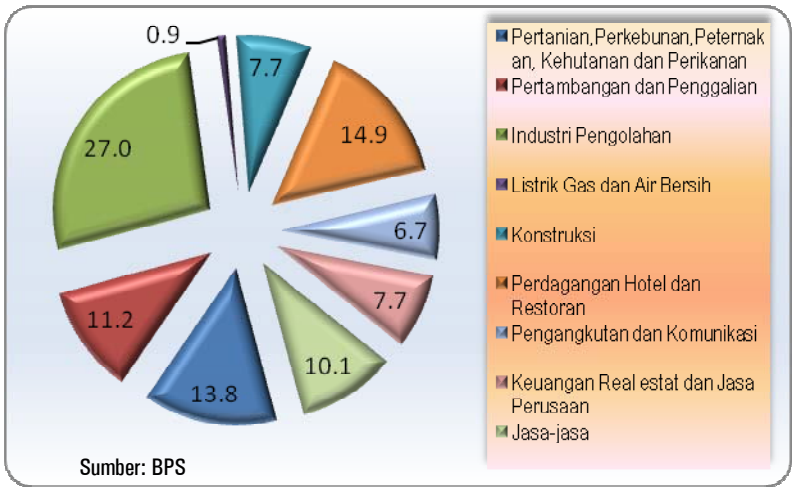

Grafik 3. Struktur PDB Menurut Lapangan Usaha Tahun 2007

Nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika sebesar Rp9.419,00

Selama tahun 2007, nilai tukar rupiah relatif stabil pada kisaran Rp9.100-9.400/USD. Meskipun pelemahan mata uang dolar Amerika, peningkatan suku bunga *Federal Reserve*, serta penurunan kondisi pasar keuangan di beberapa negara sempat memicu sentimen negatif di pertengahan tahun, pada akhir tahun 2007 posisi rupiah ditutup stabil pada Rp9.419 per dolar Amerika. Jika dibandingkan dengan tahun 2006 rupiah mengalami depresiasi sebesar 0,4 persen, namun karena posisinya yang relatif stabil menyebabkan stimulus nilai tukar terhadap perekonomian dapat terus dijaga. Perkembangan nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika tergambar dalam **Grafik 4.**

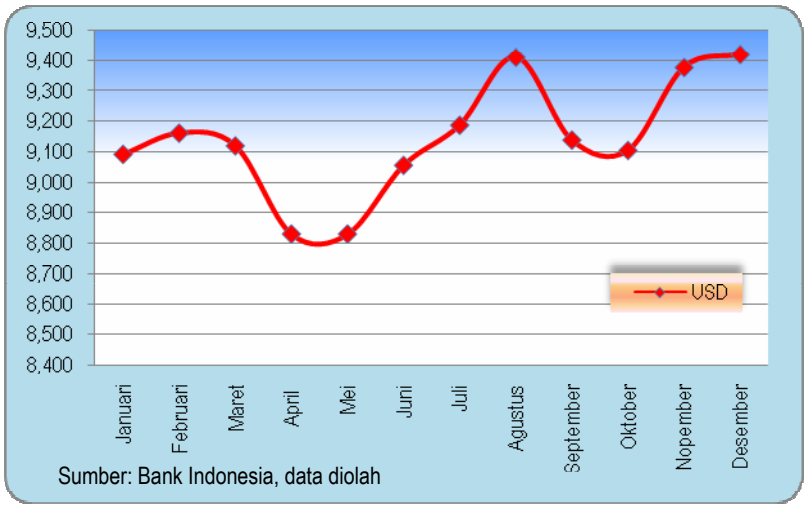

Grafik 4. Perkembangan Nilai Tukar Rupiah Terhadap Dolar Amerika Tahun 2007

Laju inflasi sebesar 6,59 persen

Stabilitas nilai tukar ini berimplikasi pada terkendalinya laju inflasi, yakni dari 6,6 persen pada tahun 2006 menjadi 6,59 persen pada tahun 2007. Nilai tukar dan laju inflasi yang membaik memberi ruang pada penurunan BI *Rate*. Seiring dengan meningkatnya kepercayaan masyarakat terhadap kondisi perekonomian, BI *Rate* pada awal tahun 2007 sebesar 9,75 persen turun menjadi 8,25 persen pada akhir tahun. Terkendalinya laju inflasi juga berdampak pada peningkatan daya beli masyarakat, yang pada gilirannya mempengaruhi tingkat konsumsi masyarakat sebagai pendorong pertumbuhan. Inflasi yang sesuai dengan sasaran inflasi (6,0 ± 1 persen) mencerminkan adanya koordinasi antara otoritas fiskal dengan otoritas moneter yang semakin solid dalam mempertahankan tingkat pertumbuhan yang diharapkan.

Komponen-Komponen Inflasi

Seperti diketahui, terdapat tiga komponen pembentuk inflasi yaitu kelompok inti yang berkaitan dengan faktor moneter, kelompok *administered price* yang berkaitan dengan harga-harga komoditas yang ditentukan oleh Pemerintah seperti BBM dan tarif listrik; serta kelompok *volatile price* yang dipengaruhi fenomena *supply-shock* dalam perekonomian, baik domestik (kekeringan, gagal panen) maupun internasional (naiknya CPO dan harga komoditas pangan). Sepanjang tahun 2007 inflasi kelompok barang yang *volatile* seperti naiknya harga makanan berpengaruh cukup besar pada laju inflasi. Naiknya harga komoditas di pasaran dunia telah memicu kenaikan harga bahan makanan, seperti biji-bijian (jagung, kedelai, gandum), minyak goreng, dan daging. Kenaikan harga komoditas dunia dipicu oleh naiknya permintaan bahan makanan seperti jagung untuk keperluan *biofuel*, sementara ekspektasi atas kecukupan persediaan pangan menunjukan penurunan. Hal inilah yang memicu inflasi kelompok *volatility* sangat tinggi di periode akhir tahun. Secara umum laju inflasi sepanjang tahun 2007 tergambar dalam **Grafik 5.**

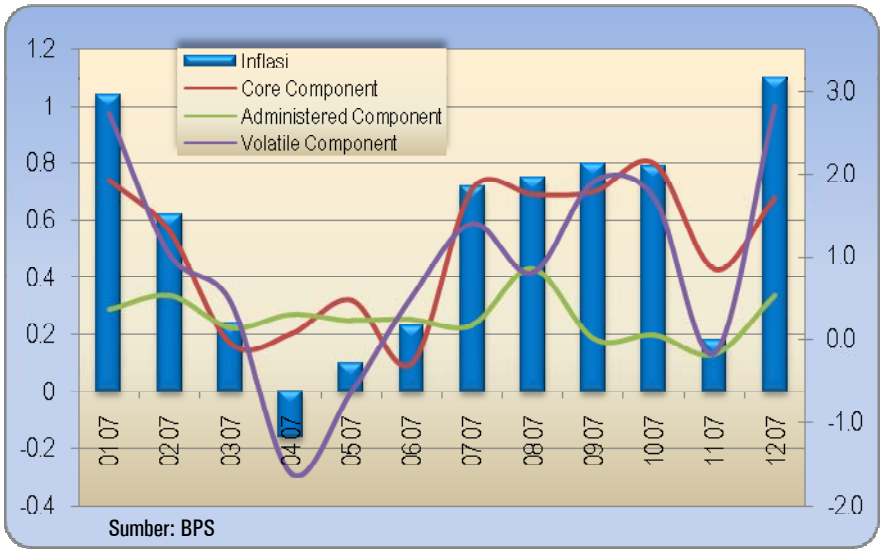

Grafik 5. Laju Inflasi Bulanan Tahun 2007

Tren membaiknya perekonomian

Kondisi perekonomian yang menunjukkan tren membaik tersebut mendorong Bank Indonesia untuk terus melakukan kebijakan penurunan suku bunga yang merupakan *enabling factor* bagi sektor riil untuk mulai berkembang. Turunnya suku bunga Bank Indonesia diharapkan mampu meningkatkan kredit yang disalurkan oleh bank sehingga dapat meningkatkan investasi langsung. Sepanjang tahun 2007 Bank Indonesia telah beberapa kali melakukan penurunan suku bunga, dari sekitar 9,25 persen di awal tahun menjadi 8,25 persen (turun 100 basis poin). Turunnya suku bunga ditambah dengan terkendalinya laju inflasi ini telah mendorong pertumbuhan ekonomi, sebagaimana tergambar pada **Grafik 6.**

Tren positif pasar modal

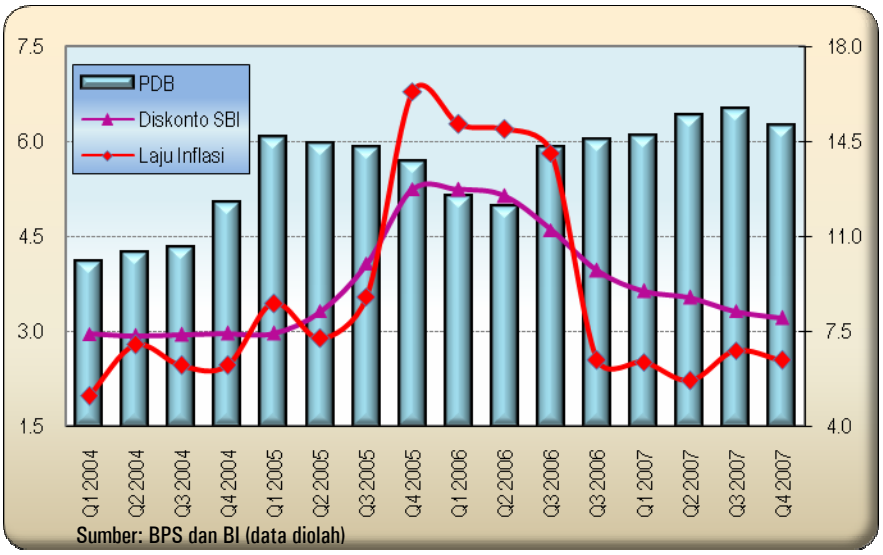

Grafik 6. Hubungan antara PDB, Laju Inflasi, dan BI *Rate*

Seiring dengan menurunnya BI *Rate,* suku bunga SBI 3 bulan juga menurun, sehingga rata-rata suku bunga SBI 3 bulan relatif sama dengan asumsi suku bunga dalam APBN-P TA 2007 sebesar 8,0 persen. Pada beberapa bulan terakhir tahun 2007, Fed Fund Rate menurun hingga mencapai 4,25 persen pada akhir Desember 2007. Kondisi ini menyebabkan *interest rate differential* semakin melebar. Masih tingginya *interest rate differential* ini menyebabkan meningkatnya arus modal asing yang masuk ke Indonesia melalui pasar modal. Sebagai bukti, Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) di BEJ meningkat dari 1.805 pada akhir Desember 2006 menjadi 2.139,28 pada 30 Juni 2007 dan menjadi 2.745,83 pada Desember 2007 atau tertinggi sepanjang sejarah pasar modal Indonesia. Ini membuktikan bahwa suku bunga Indonesia yang kompetitif dan membaiknya perekonomian mampu memberikan persepsi positif kepada para investor. Perkembangan IHSG ini dapat dilihat pada **Grafik 7.**

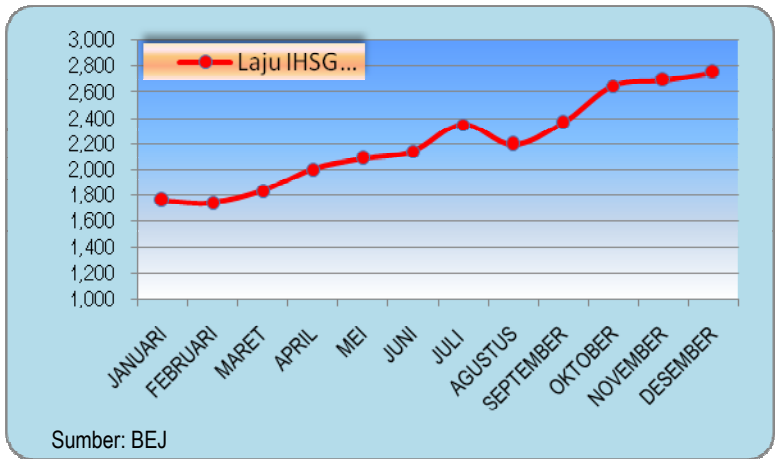

Grafik 7. Perkembangan IHSG Tahun 2007

Surplus Neraca Pembayaran Indonesia dan Ekspor Indonesia

Neraca Pembayaran Indonesia (NPI) selama tahun 2007 mencatat surplus cukup tinggi terutama diakibatkan oleh surplus di neraca transaksi berjalan. Sampai dengan bulan Desember 2007 sumbangan peningkatan nilai ekspor Indonesia cukup baik yaitu sebesar 13,09 persen (USD 113,99 miliar) lebih tinggi dibandingkan dengan periode yang sama tahun sebelumnya yang hanya mencapai USD 91,94 miliar. Ekspor nonmigas sampai dengan Desember 2007 mencapai USD 91,93 miliar, naik 15,51 persen dibandingkan periode yang sama tahun 2006 (USD 79,59 miliar). Sementara itu, pertumbuhan impor selama tahun 2007 ini meningkat 21,84 persen (tahun 2006=USD 61,07 miliar, tahun 2007=USD 74,40 miliar) sejalan dengan meningkatnya

permintaan domestik. Perkembangan nilai ekspor dan impor Indonesia sepanjang satu tahun terakhir terlihat pada **Grafik 8.**

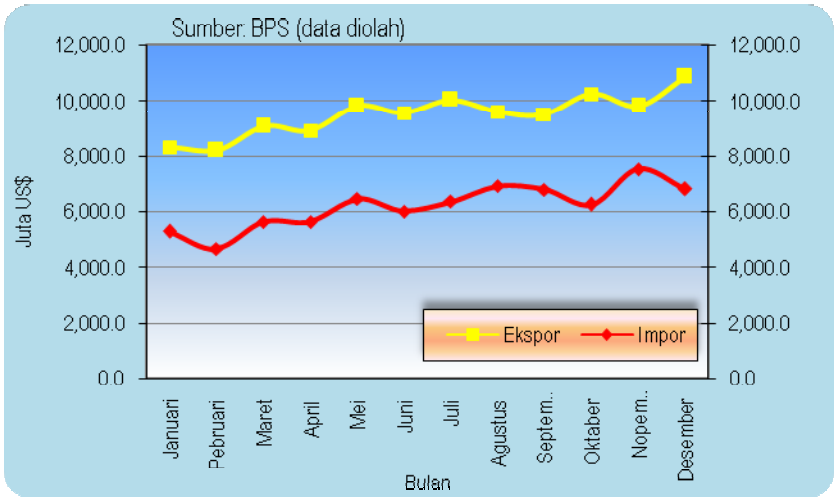

Grafik 8. Perkembangan Ekspor-Impor Indonesia Tahun 2007

Neraca Modal dan Finansial mencatat surplus

Di sisi lain, neraca lalu lintas modal dan finansial juga mencatat surplus, yang antara lain disebabkan oleh masih relatif besarnya aliran modal masuk akibat stimulus perbedaan suku bunga yang lebih menarik. Aliran *portfolio investment* terlihat tinggi yang tercermin dari peningkatan kepemilikan asing pada surat-surat berharga seperti SBI dan saham yang diakibatkan masih kompetitifnya tingkat suku bunga domestik dibandingkan dengan suku bunga luar negeri. Secara keseluruhan, pada akhir tahun 2007 Neraca Pembayaran Indonesia mencatatkan surplus sebesar USD 3.637. Kondisi tersebut meningkatkan jumlah cadangan devisa USD dari USD 42,4 miliar pada tahun 2006 menjadi sekitar USD 56,9 miliar atau setara dengan sekitar 5 bulan impor dan pembayaran utang luar negeri Pemerintah pada tahun 2007. Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia dan Posisi Cadangan Devisa dapat dilihat pada **Grafik 9 dan Grafik 10.**

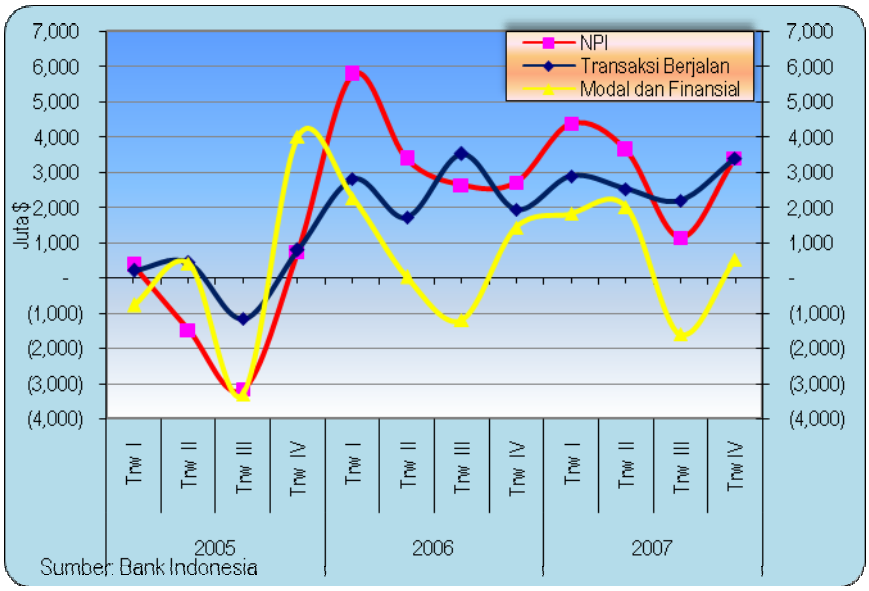

Grafik 9: Perkembangan Neraca Pembayaran Indonesia Tahun 2005-2007

Grafik 10: Perkembangan Posisi Cadangan Devisa Indonesia Tahun 2005-2007

Harga rata-rata minyak mentah dunia sebesar USD 78/barel

Meroketnya harga minyak dunia dari rata-rata 64,26 USD/barrel di tahun 2006 menjadi rata-rata 78 USD/barrel di tahun 2007 karena spekulasi dan ekspektasi kenaikan permintaan dunia mengakibatkan tekanan pada harga komoditi yang ikut naik. Tekanan harga minyak ini berdampak pada meningkatnya harga-harga produk substitusi minyak seperti CPO, jagung, dan lain-lain. Hal tersebut menyebabkan tekanan inflasi di seluruh dunia, sehingga meningkatkan kekhawatiran dunia akan timbulnya resesi. Kenaikan harga minyak ini juga menyebabkan kenaikan biaya produksi pada industri yang mempunyai ketergantungan pada BBM, dan mendorong kenaikan harga-harga secara menyeluruh yang pada gilirannya akan mengurangi daya beli masyarakat yang berpotensi menghambat pertumbuhan nasional. Menyikapi hal ini Pemerintah telah melakukan langkah-langkah antisipatif antara lain dengan melakukan perubahan APBN 2007 untuk beradaptasi dengan dinamika eksternal tersebut.

Peningkatan PMA dan PMDN

Ditinjau dari sisi investasi dalam negeri, mulai terlihat adanya kemajuan yang ditunjukkan oleh pemulihan kinerja investasi swasta. Hal ini ditandai dengan meningkatnya angka persetujuan dan realisasi investasi langsung dalam negeri selama tahun 2007 dibandingkan tahun 2006. Pada tahun ini, realisasi persetujuan Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) mengalami peningkatan 16 persen dibandingkan tahun 2006 (dari Rp162,77 triliun menjadi Rp188,88 miliar). Demikian pula, realisasi persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA) yang mengalami peningkatan lebih dari 200 persen di tahun 2007 bila dibandingkan dengan tahun 2006 (dari USD 15,66 miliar menjadi USD 40,15 miliar).

Survai JETRO dan Perbaikan Iklim Investasi

Meskipun realisasi investasi langsung mengalami peningkatan cukup signifikan, namun berbagai hal masih perlu dicermati untuk meningkatkan iklim investasi di Indonesia terutama dengan terus mengurangi ekonomi biaya tinggi akibat keterbatasan prasarana dan belum efisiennya birokrasi Pemerintah terkait pengurusan perizinan. Terbatasnya pasokan energi ataupun infrastruktur lainnya juga dapat berimplikasi pada tingginya biaya produksi yang menyebabkan tingginya harga dan mempengaruhi daya saing Indonesia. Survai dari *the Japan External Trade Organization* (JETRO) menunjukkan bahwa di antara sepuluh negara Asia Timur, Indonesia menduduki peringkat 8 dalam hal negara yang paling menjanjikan bagi investor Jepang untuk menanamkan modalnya. Survai ini mengukur komparasi negara-negara tujuan investasi dengan mempertimbangkan stabilitas ekonomi dan politik, kejelasan peraturan perundangan, dan dukungan infrastruktur. Oleh karena itu, pelaksanaan kebijakan Pemerintah melalui Instruksi Presiden No. 3/2006 tentang Perbaikan Iklim Investasi akan terus dilanjutkan untuk mengurangi ekonomi biaya tinggi.

Penanaman Modal di

Dalam rangka mengatasi hambatan ketersediaan infrastruktur, Pemerintah terus mendukung penyempurnaan peraturan perundangan di bidang Kerjasama Pemerintah-Swasta

Indonesia

(KPS), dengan menawarkan berbagai kemudahan berinvestasi. Salah satunya dengan memberikan insentif perpajakan bagi investor yang menanamkan modalnya pada proyek-proyek yang mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pengembangan infrastruktur dan teknologi, mengembangkan daerah perdesaan, serta industri perintis yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 25/2007 tentang Penanaman Modal (lihat Boks 1). Menurut UU tersebut, atas impor barang modal yang digunakan untuk KPS akan dibebaskan PPN-nya. Selain itu, selama tahun 2007 Pemerintah juga ikut menyediakan tambahan dana Rp2 trilyun bagi *Indonesia Infrastructure Fund* untuk menjamin investasi KPS. Sektor-sektor yang mendapatkan prioritas untuk dilaksanakan terlebih dahulu antara lain di bidang jalan tol, kelistrikan dan energi.

Boks 1
Penanaman Modal di Indonesia

Dalam rangka mempercepat tumbuhnya sektor riil, Pemerintah terus mendorong berkembangnya investasi di Indonesia. Tumbuhnya sektor ini diyakini mampu memulihkan kondisi perekonomian dan memacu pertumbuhan sehingga mendorong pembangunan ekonomi nasional secara menyeluruh. Untuk itu Pemerintah terus mendorong tumbuhnya iklim investasi yang kondusif melalui berbagai deregulasi kebijakan karena perkembangan investasi langsung dalam beberapa tahun terakhir belum sesuai dengan yang diharapkan.

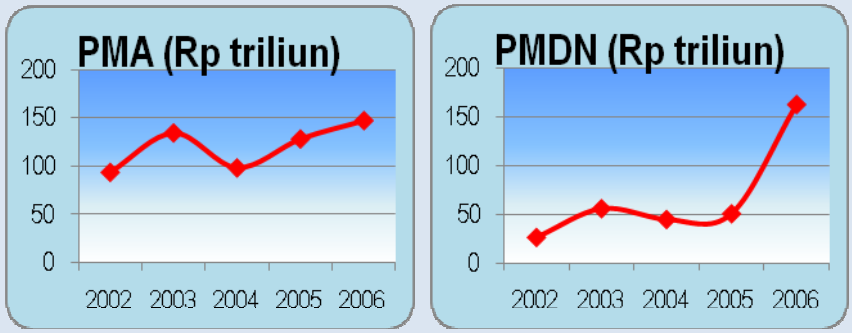

Sumber data: BKPM

Tabel. Realisasi Persetujuan PMA dan PMDN 2002-2006

Seperti telihat dalam tabel di atas, realisasi persetujuan Penanaman Modal Asing (PMA) menunjukan tren peningkatan dari tahun ke tahun. Persetujuan PMA meningkat dari USD13,64 miliar (Rp128,0 triliun) di tahun 2005 menjadi USD15,66 miliar (Rp146,9 triliun) di tahun 2006. Akan tetapi, peningkatan ini masih belum optimal sehingga dampaknya terhadap perekonomian belum sesuai dengan yang diharapkan. Sementara itu, lonjakan PMDN dari Rp50,58 triliun di tahun 2005 menjadi Rp162,77 triliun di tahun 2006 belumlah dapat memenuhi harapan, terutama dari sisi keterlibatan sektor usaha mikro, kecil dan menengah.

Untuk mengatasi hambatan di atas, pada tahun 2006 Pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden No. 3/2006 tentang Paket Kebijakan Perbaikan Iklim Investasi. Paket kebijakan ini mengatur tentang langkah-langkah yang harus diambil oleh para menteri terkait dalam menciptakan kepastian hukum bagi para investor; mengurangi hambatan di bidang kepabeanan dan cukai, perpajakan dan ketenagakerjaan melalui percepatan proses pemeriksaan kepabeanan, pemberantasan penyelundupan, pemberian fasilitas dan penurunan tarif pajak serta penciptaan hubungan industrial bagi perluasan kesempatan kerja; sekaligus mendorong berkembangnya usaha kecil, menengah, dan koperasi. Penciptaan kepastian hukum diupayakan melalui penguatan kelembagaan pelayanan investasi, sinkronisasi peraturan pusat dan daerah, serta adanya kejelasan kewajiban analisa mengenai dampak lingkungan. Kondisi kepabeanan, perpajakan dan ketenagakerjaan yang baik diperlukan bagi percepatan arus keluar-masuknya barang, insentif berusaha sekaligus mampu memperluas kesempatan kerja. Sedangkan tumbuhnya usaha kecil, menengah dan koperasi diyakini mampu lebih memperkuat kondisi perekonomian sebab

sektor UKM telah terbukti tahan dalam menghadapi berbagai gejolak perekonomian. Hasil nyata dari paket kebijakan ini adalah dengan tumbuhnya persetujuan investasi langsung selama tahun 2006 dan 2007. Pada tahun 2006 PMA mencapai USD15,66 miliar sedangkan PMDN mencapai Rp162,77 triliun. Jumlah ini terus meningkat di tahun 2007 menjadi PMA sebesar USD40,15 miliar dan PMDN sebesar Rp188,88 triliun.

Upaya memperkuat kelembagaan pelayanan investasi diwujudkan Pemerintah dengan pengajuan RUU tentang Penanaman Modal yang pada tahun 2007 ini berhasil disahkan menjadi Undang-Undang No. 25/2007 tentang Penanaman Modal. Pokok-pokok pengaturan dalam UU tersebut antara lain meliputi:

1. Seluruh penanaman modal di Indonesia diatur dalam satu peraturan yang terpadu (*unified law*). Tidak seperti undang-undang sebelumnya, undang-undang penanaman modal yang baru mengatur seluruh kebijakan penanaman modal dalam negeri dan asing ke dalam satu kesatuan. Dengan kebijakan ini diharapkan mampu mendorong terciptanya iklim usaha nasional yang kondusif bagi penanaman modal untuk penguatan daya saing perekonomian nasional, dan mempercepat peningkatan penanaman modal.
2. Dalam rangka merangsang investasi, penggunaan hak atas tanah diperpanjang, yaitu hak guna usaha dari 35 menjadi 95 tahun, hak guna bangunan dari 30 menjadi 80 tahun dan hak pakai dari 25 tahun menjadi 75 tahun yang dapat diperbaharui kembali setelah diadakan evaluasi. Dengan kemudahan memperoleh hak atas tanah ini diharapkan para investor tertarik untuk menanamkan modalnya dalam jangka panjang.
3. Pemberian insentif fiskal berupa pengecualian dan pengurangan pajak atas proyek-proyek yang mampu memperluas kesempatan kerja, meningkatkan pengembangan infrastruktur dan teknologi, mengembangkan daerah perdesaan, serta untuk industri perintis diberikan oleh Pemerintah kepada para investor. Insentif perpajakan yang diberikan antara lain meliputi insentif PPh, perubahan PPN untuk mempromosikan ekspor, dan penurunan tariff pajak daerah.
4. Untuk meningkatkan kepastian hukum, Pemerintah memberikan kesamaan perlakuan antara penanam modal asing dan penanam modal dalam negeri.
5. Undang-undang penanaman modal ini juga lebih mendetil, yaitu undang-undang memerinci kriteria secara eksplisit (seperti penentuan daftar penanaman modal yang tidak diperbolehkan dan insentif fiskal yang didapatkan investor) dan lebih jelas (seperti memerinci kewenangan Pemerintah).
6. Selain itu, Pemerintah juga menunjukkan komitmen yang jelas untuk memperbaiki tata kelola dan koordinasi kebijakan penanaman modal, yaitu undang-undang menggariskan sistem pelayanan aplikasi penanaman modal secara terpadu dan dipusatkan di tingkat nasional yang dikoordinasikan oleh Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM).

Di tahun yang sama Pemerintah juga berhasil menyelesaikan Peraturan Presiden No. 76 dan 77/2007 tentang kriteria, persyaratan dan daftar usaha yang tertutup dan bidang usaha yang terbuka dengan persyaratan di bidang penanaman modal. Kedua peraturan ini menjadi bahan rujukan bagi para penanam modal sehingga menjamin transparansi dalam proses penanaman modal di Indonesia. Sementara itu, untuk memperjelas kewenangan daerah dalam penanaman modal, Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 38 dan 41/2007 yang mengatur tentang pembagian kewenangan antara Pemerintah pusat dan daerah serta organisasi perangkat daerah yang bertanggung jawab atasnya.

(Sumber: UU No. 25/2007)

Inpres No. 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan UKM

Selain mengatasi hambatan berinvestasi, Pemerintah mengeluarkan Inpres Nomor 6/2007 tentang Kebijakan Percepatan Sektor Riil dan Pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Kebijakan ini dimaksudkan agar usaha mikro, kecil dan menengah yang meliputi sebagian besar jenis usaha di Indonesia dapat lebih berkembang, memacu pertumbuhan ekonomi

nasional dan pada gilirannya mampu menyerap tenaga kerja. Hal ini sesuai dengan kenyataan bahwa usaha mikro, kecil dan menengah inilah yang relatif tahan terhadap goncangan perekonomian. Selain itu dari data yang ada 98% jenis usaha yang ada di Indonesia adalah usaha kecil dan menengah dengan kemampuan menyerap lebih dari 90% tenaga kerja yang tersedia.

Penyempurnaan peraturan perpajakan

Dalam upaya mendukung peningkatan investasi dan perluasan pasar, Pemerintah terus menyempurnakan peraturan perpajakan dan cukai serta menjalin kerjasama regional di bidang ekonomi dengan negara ASEAN lainnya. Melanjutkan amanat UU No. 25/2007, Pemerintah juga berhasil menerbitkan Peraturan Pemerintah Nomor 76/2007 tentang Kriteria dan Persyaratan Penyusunan Bidang Usaha yang Tertutup dan Terbuka dengan Persyaratan di Bidang Penanaman Modal. Selain untuk melindungi investor dalam negeri, PP tersebut juga bertujuan meningkatkan transparansi dan kepastian berusaha bagi para investor. Sementara di bidang perpajakan berbagai kemudahan seperti insentif perpajakan sebagaimana UU No. 28/2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. Insentif perpajakan tersebut antara lain berupa fasilitas pengurangan penghasilan neto sebesar 30 persen selama 6 tahun bagi wajib pajak yang menginvestasikan modalnya pada sektor/wilayah tertentu dan percepatan restitusi untuk wajib pajak patuh dari semula 1 tahun menjadi 1 minggu. Dengan adanya insentif ini diharapkan arus modal ke dalam negeri dapat meningkat tajam.

NPL menurun, LDR meningkat

Dari sisi perbankan, meskipun risiko *Non-Performing Loan* (NPL) mulai berkurang namun keengganan/kehati-hatian untuk melakukan ekspansi kredit masih terlihat di kalangan praktisi perbankan. Data *Gross NPL* akhir tahun 2007 terhadap total kredit sebesar 5,54 persen menunjukkan terjadi perbaikan dalam struktur kredit perbankan. Angka kredit bermasalah ini berkurang dibandingkan pada akhir tahun 2006 yang sebesar 6,3 persen. Walaupun belum optimal, mulai membaiknya intermediasi sektor perbankan ini juga ditandai dengan mulai bergeraknya LDR *(Loan to Deposit Ratio)* yaitu di level 67,3 persen sepanjang tahun 2007. Dibandingkan dengan rasio pada tahun 2006 sebesar 61 persen, rasio LDR tahun 2007 ini meningkat tipis, sehingga belum memberikan dampak seperti yang diharapkan pada sektor riil. Semenjak tahun 2006 pergerakan kredit perbankan mengalami perlambatan dan angka LDR nasional cenderung merambat tipis. Kredit perbankan kepada sektor riil yang belum meningkat ini lebih disebabkan kehati-hatian dalam melakukan ekspansi kredit, peraturan prudensial BI yang lebih ketat, dan konsentrasi perbankan untuk memenuhi ketentuan keuangan dan kesehatan *Capital Adequacy Ratio* (CAR) dari BI. Pada masa mendatang LDR perbankan akan terus ditingkatkan mengingat rata-rata tren kenaikan kredit perbankan mencapai 22 persen. Perkembangan NPL dan LDR dalam tiga tahun terakhir tergambar dalam **Grafik 11.**

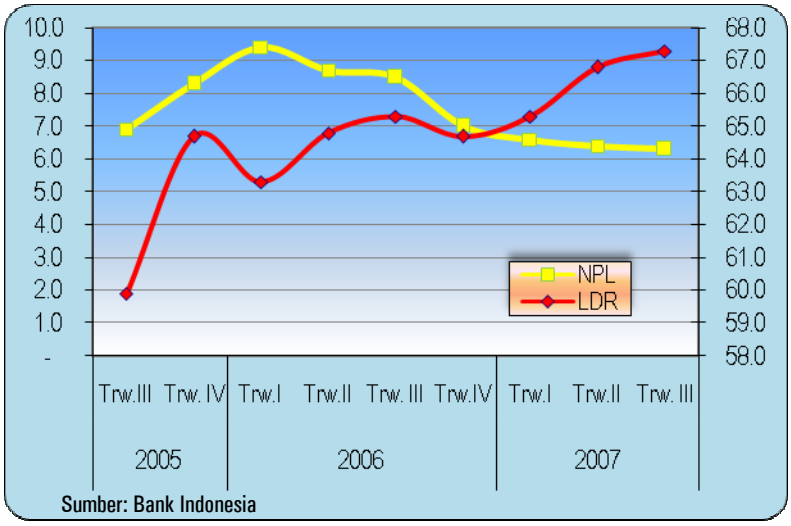

Grafik 11: Perkembangan NPL dan LDR Indonesia

Pengembangan sektor riil

Pergerakan sektor riil pada tahun 2007 masih menjadi perhatian Pemerintah yang utama. Pemerintah mengeluarkan berbagai kebijakan untuk merangsang tumbuhnya sisi produksi yang menjadi motor pertumbuhan, salah satunya dengan menumbuhkan sektor usaha mikro, kecil dan menengah. Dalam tahun 2007, sektor perdagangan tumbuh sebesar 8,5 persen, konstruksi sebesar 8,6, dan industri pengolahan sebesar 4,7 persen. Ini menunjukan bahwa pergerakan sektor riil telah mampu menggerakkan perekonomian. Sumbangan masing-masing sektor ini tergambar dalam **Grafik 12**.

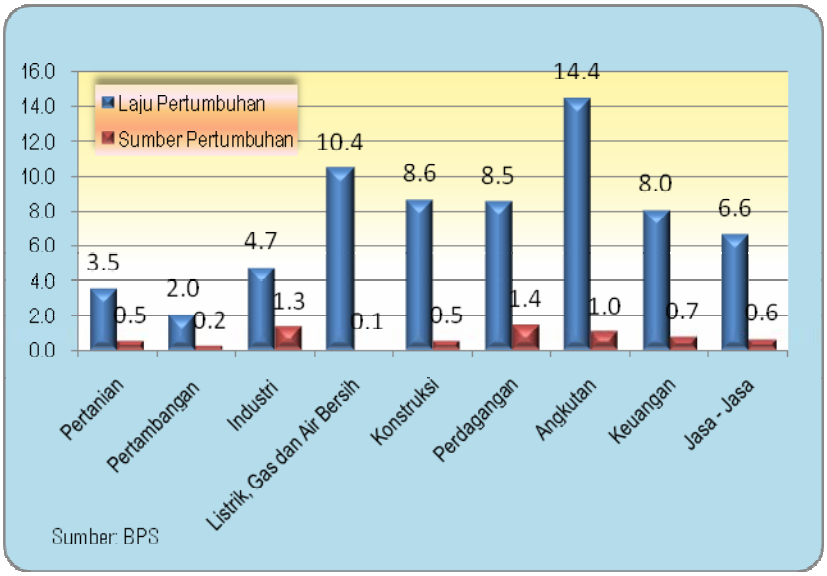

Grafik 12: Laju dan Sumber Pertumbuhan menurut Lapangan Usaha 2007

Kepemilikan Asing pada SUN

Seiring dengan aliran arus dana dari luar negeri, maka kepemilikan asing atas surat berharga yang diterbitkan di Indonesia menjadi meningkat. Salah satunya adalah terdapatnya kecenderungan porsi kepemilikan asing pada SUN yang terus meningkat dari tahun ke tahun. Pada tahun 2007 kepemilikan ini mencapai Rp78 triliun atau meningkat sekitar 42,1 persen dibandingkan dengan tahun 2006 yang hanya Rp54,9 triliun. Di satu sisi, hal tersebut menunjukkan bahwa disparitas suku bunga dengan luar negeri masih menjadikan investasi ke Indonesia menarik. Namun hal lain yang perlu dicermati adalah potensi *capital outflow* yang semakin tinggi. Seperti kita ketahui selama krisis ekonomi investor asing banyak menarik modalnya dari Indonesia, bahkan sampai tahun 2005 gejala penempatan *resident* di luar negeri juga cenderung meningkat. Keadaan ini perlu dicermati mengingat krisis keuangan mampu menyulut krisis ekonomi yang menyeluruh. Untuk mengantisipasinya Pemerintah telah melakukan *debt switch* untuk memperpanjang durasi (*smoothing out*) portofolio SUN, *refinancing risk* terkendali melalui perpanjangan durasi portofolio dan penurunan rata-rata jatuh tempo, sehingga jatuh tempo SUN dapat diundur sampai tahun 2033. Selain itu, mengingat fundamental ekonomi Indonesia pada saat ini jauh lebih baik dibandingkan tahun-tahun sebelum krisis di tahun 1997, maka kekhawatiran akan krisis tidak seharusnya mengemuka. Daya tahan pasar SUN domestik sudah cukup baik, terbukti tidak adanya *sudden reversal* selama berlangsungnya krisis *subprime mortgage* di tahun ini. Perkembangan kepemilikan asing terhadap SUN tergambar pada **Grafik 13**.

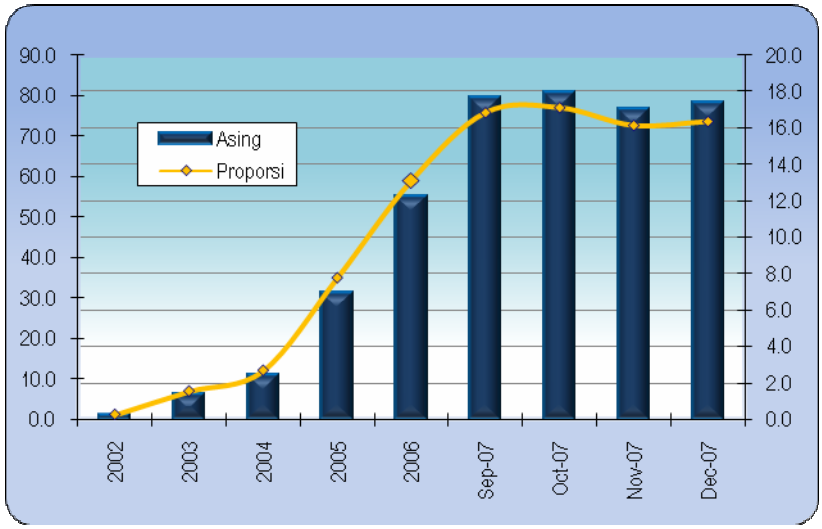

Grafik 13: Kepemilikan Asing pada Surat Utang Negara

Pengentasan kemiskinan

Di samping berbagai kemajuan di atas, Pemerintah juga terus menunjukkan keberpihakannya kepada pengentasan kemiskinan sebagai salah satu agenda yang ditetapkan oleh Pemerintah dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2005-2009 dalam rangka peningkatan kesejahteraan masyarakat. Beberapa faktor yang diperkirakan dapat mendukung upaya penurunan penduduk miskin diantaranya adalah keberhasilan percepatan pertumbuhan ekonomi dalam beberapa tahun terakhir, perbaikan pola ekspansi ekonomi dari sumber konsumtif ke sumber produktif yang diharapkan menjadi landasan yang kuat bagi pertumbuhan selanjutnya dan mampu menciptakan lapangan kerja yang lebih luas, serta kebijakan Pemerintah yang bersifat langsung berupa peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat miskin dan pengembangan wilayah tertinggal. Dalam rangka mengatasi masalah kemiskinan, Pemerintah juga berperan aktif dalam memperbaiki kualitas lingkungan yang mendukung pembangunan berkelanjutan. Pada forum pertemuan Menteri Keuangan dan Menteri Perencanaan anggota *United Nation Framework Convention for Climate Change* (UNFCCC) tanggal 11 Desember 2007, Indonesia menunjukkan komitmennya untuk senantiasa mendukung upaya perbaikan lingkungan. Dengan perbaikan ini diharapkan kualitas hidup masyarakat menjadi meningkat dan mampu menghapuskan kemiskinan serta mendukung pembangunan berkelanjutan (lihat Boks 2).

Boks 2
Hubungan *Climate Change* dengan Pembangunan Berkelanjutan

Penelitian telah membuktikan bahwa terdapat hubungan yang erat antara kondisi lingkungan dengan kesinambungan perkembangan ekonomi suatu negara. Hipotesa awal yang membahas masalah ini merujuk kepada *the Environmental Kuznets Curve* (EKC) yang menyatakan hubungan antara keduanya seperti bentuk huruf U terbalik. Pada tahap awal tingkat kerusakan lingkungan akan terus meningkat sampai dengan level tertentu, kemudian cenderung terus menurun seiring membaiknya perekonomian yang ditandai dengan meningkatnya pendapatan per kapita. Sehingga, kemampuan suatu negara untuk membuat imbangan antara kemajuan perekonomian dengan tingkat kerusakan lingkungan yang dapat ditoleransi akan menentukan keberlangsungan ekonomi (*economic sustainability*).

Salah satu kerusakan lingkungan yang dihadapi oleh masyarakat dunia saat ini adalah perubahan iklim (*climate change*). Emisi gas karbon sebagai ekses dari pembangunan telah menyebabkan pemanasan global yang mengancam keberlangsungan pembangunan itu sendiri. Dalam konferensi *United Nations Framework Convention on Climate Change* (UNFCCC) di Bali, Indonesia, pada tanggal 11 Desember 2007 diadakan pertemuan para Menteri

Keuangan dan Menteri Perencanaan/Pembangunan negara anggota UNFCCC untuk membahas isu-isu menyangkut pembangunan ekonomi berkaitan dengan perubahan iklim. Ada tiga topik utama yang dibahas dalam pertemuan tersebut, yaitu:

1. menumbuhkan kepedulian akan besarnya tantangan pembangunan;
2. pembahasan tentang instrumen kebijakan yang dapat digunakan untuk mempromosikan kegiatan mitigasi maupun adaptasi; dan
3. mendorong pembahasan tentang tindakan kolektif atau instrumen yang dapat membantu para Menteri Keuangan dalam merespon tantangan global.

Pertemuan ini dilandasi pemikiran bahwa perubahan iklim merupakan tantangan global yang sangat mahal sehingga setiap negara berkepentingan untuk mengelola tingkat ekonomi dan aliran investasi yang diperlukan dalam menghadapinya.

Perubahan iklim pada hakekatnya merupakan tantangan ekonomi, pembangunan, dan investasi yang bukan semata-mata sebagai tantangan lingkungan hidup. Oleh karena itu, para Menteri Keuangan tersebut berpendapat bahwa sudah saatnya setiap negara berperan aktif dalam mengintegrasikan isu perubahan iklim ke dalam kerangka kebijakan perencanaan ekonomi dan pembangunan. Bagi banyak negara berkembang, respon terhadap perubahan iklim haruslah disesuaikan dengan tujuan pembangunan dalam mengatasi permasalahan kemiskinan. Sehingga upaya penanggulangan dampak kerusakan lingkungan dapat diselaraskan dengan pembangunan yang berkelanjutan.

Dari hasil pertemuan para Menteri Keuangan di Bali tersebut, dalam waktu dekat program-program pembangunan menghadapi *climate change* akan lebih ditekankan dan diintegrasikan pada penyusunan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2009 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) berikutnya, sebagai bagian dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJN) tahun 2005-2025. Hal ini menunjukkan langkah nyata yang akan diambil oleh Pemerintah Indonesia setelah pertemuan UNFCCC di Bali, dalam rangka mitigasi dan adaptasi perubahan iklim.

Prinsip-prinsip dasar yang digunakan Pemerintah dalam menangani dampak Perubahan Iklim meliputi:

1. Isu Perubahan Iklim tidak hanya merupakan isu lingkungan, akan tetapi juga merupakan isu pembangunan, sehingga harus mendukung target-target pembangunan, seperti pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan dan penciptaan lapangan kerja.

2. Perlunya kerjasama internasional, terutama terkait dengan dukungan pembiayaan dari para donor dan lembaga keuangan internasional. Pembiayaan untuk program-program terkait Perubahan Iklim diharapkan tidak merupakan pengurangan atau pengalihan pembiayaan terhadap program-program yang sudah ada, tetapi betul-betul merupakan sumber dana yang baru, mengingat upaya mengatasi perubahan iklim membutuhkan dana yang sangat besar.

3. Sektor swasta diharapkan lebih berperan aktif dalam menanggulangi dampak Perubahan Iklim. Pemerintah, khususnya Departemen Keuangan hanya berfungsi sebagai fasilitator yang memberikan dukungan dan stimulus, baik berupa regulasi di bidang keuangan maupun insentif fiskal, agar pihak swasta mempunyai kontribusi yang besar dalam menangani Perubahan Iklim.

4. Sebagai tindak lanjut dari kesepakatan Bali, Pemerintah melakukan beberapa kajian, baik secara mandiri maupun bekerja sama dengan lembaga keuangan internasional, seperti World Bank, ADB, and JBIC. Kajian ini diharapkan mampu melihat kelayakan kebijakan-kebijakan yang akan diimplementasikan Pemerintah terkait dengan penanganan dampak Perubahan Iklim.

(Sumber: Departemen Keuangan)

Keberhasilan pengentasan kemiskinan di Indonesia terbukti dengan menurunnya tingkat kemiskinan dari 17,75 persen pada tahun 2006 menjadi 16,58 persen (sekitar 35,6 juta orang) pada tahun 2007 (BPS). Penurunan tingkat kemiskinan ini menunjukkan bahwa berbagai program pengentasan kemiskinan dari Pemerintah antara lain seperti bantuan langsung tunai kepada masyarakat selama tahun 2006 sampai dengan awal 2007 mampu menstimulasi peningkatan daya beli masyarakat melalui peningkatan penghasilan. Pemerintah juga terus mengupayakan program pengentasan kemiskinan yang terpadu dengan melalui peningkatan anggaran yang disediakan dalam mengurangi kemiskinan antara lain dalam bentuk subsidi, penyediaan infrastruktur yang mendukung investasi bagi perluasan kesempatan kerja dan perbaikan kualitas pendidikan. Progres lain yang telah dicapai adalah angka pengangguran terbuka yang mengalami penurunan menjadi 9,11 persen pada bulan Agustus 2007 dari sekitar 10,28 persen pada Agustus 2006. Ini menunjukkan bahwa sektor riil mulai mampu menyerap tenaga kerja.

Angka kemiskinan menurun

Berkaitan dengan pengentasan kemiskinan, pengeluaran Pemerintah dapat dibedakan atas dua, yaitu pengeluaran yang berdampak *tidak langsung* terhadap kemiskinan (seperti pengeluaran untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan perumahan) dan pengeluaran yang berdampak *langsung* terhadap kemiskinan (seperti subsidi dan transfer dana tunai). Di tahun 2007, komitmen Pemerintah terhadap program pendidikan yang diharapkan dapat secara tidak langsung meningkatkan kapasitas masyarakat untuk memutuskan rantai kemiskinan ditunjukkan dengan meningkatnya alokasi anggaran pendidikan, meskipun secara kumulatif anggaran pendidikan tersebut baru mencapai 11,8 persen dari 20 persen yang diamanahkan undang-undang. Dalam kaitan ini Pemerintah berpendapat bahwa tanggung jawab pendidikan juga terletak pada Pemerintah daerah sehingga pemenuhan target 20 persen anggaran untuk pendidikan seyogyanya dapat dipenuhi juga dari APBD. Peningkatan anggaran pendidikan tahun 2007 tersebut terutama ditujukan untuk memperluas angka partisipasi kasar (APK) dan angka partisipasi sekolah (APS) penduduk usia sekolah dan pemerataan kesempatan belajar melalui perbaikan sarana dan prasarana sekolah.

Prioritas pembangunan APBN 2007

Dalam Rencana Kerja Pemerintah Tahun Anggaran 2007 disebutkan bahwa prioritas pembangunan dalam APBN 2007 ditujukan antara lain untuk: (1) penanggulangan kemiskinan; (2) peningkatan kesempatan kerja, investasi dan ekspor; (3) revitalisasi pertanian dalam arti luas dan pembangunan perdesaan; (4) peningkatan aksesabilitas dan kualitas pendidikan dan kesehatan; (5) penegakan hukum dan HAM, pemberantasan korupsi, dan reformasi birokrasi; (6) penguatan kemampuan pertahanan, pemantapan keamanan dan ketertiban, serta penyelesaian konflik; (7) rehabilitasi dan rekonstruksi NAD, Nias, DIY dan Jawa Tengah, serta mitigasi dan penanggulangan bencana; (8) percepatan pembangunan infrastruktur; dan (9) pembangunan daerah perbatasan dan wilayah terisolir. Dari prioritas ini terlihat bahwa pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya menjadi sasaran utama Pemerintah. Pada tahun ini Pemerintah secara eksplisit menyatakan bahwa pembangunan nasional dilandasi dengan *triple track strategy* yang berusaha meningkatkan pertumbuhan ekonomi, penciptaan lapangan kerja dan pengentasan kemiskinan. Dengan konsistensi ini diharapkan kesejahteraan masyarakat dapat terwujud.

Sembilan langkah pengamanan APBN 2008

Pada tahun-tahun mendatang stabilitas makroekonomi domestik diproyeksikan terus membaik seiiring terkendalinya tingkat inflasi dan suku bunga, stabilnya nilai tukar, serta meningkatnya cadangan devisa. Meskipun perekonomian Indonesia masih dibayangi dengan fluktuasi harga minyak mentah dan komoditas dunia, namun Pemerintah telah mengambil langkah-langkah pengamanan APBN yang meliputi: (1) penggunaan dana cadangan APBN; (2) efisiensi belanja; (3) pemanfaatan *wind fall* daerah; (4) pemangkasan belanja; (5) penurunan konsumsi dan kenaikan produksi BBM; (6) efisiensi Pertamina dan PLN; (7) optimalisasi perpajakan dan dividen BUMN; (8) penerbitan surat berharga negara; dan (9) insentif bagi sektor eksternal. Langkah-langkah ini diharapkan mampu mengeliminasi risiko anggaran yang bersumber dari guncangan eksternal. Selain itu, Pemerintah juga telah mampu mengidentifikasi 12 risiko fiskal yang berpotensi membebani anggaran.

Dua belas risiko fiskal yang telah teridentifikasi

Sebagaimana telah tercantum juga dalam Nota Keuangan dan RAPBN Tahun Anggaran 2008, Pemerintah setidaknya dihadapkan pada dua belas sumber risiko fiskal, yaitu: (1)

sensitivitas asumsi ekonomi makro, yang dapat menimbulkan risiko fiskal sehubungan dengan adanya variansi pada asumsi dasar ekonomi makro, yang menjadi acuan bagi perhitungan besaran-besaran pendapatan, belanja, dan pembiayaan anggaran andalan APBN; (2) utang Pemerintah, yang sebagai pembiayaan memiliki risiko tingkat bunga, risiko nilai tukar, risiko *refinancing*, dan risiko operasional; (3) proyek pembangunan infrastruktur, yang dapat menimbulkan risiko sehubungan dengan pemberian jaminan Pemerintah terhadap proyek tersebut; (4) Badan Usaha Milik Negara (BUMN), yang dapat membebani APBN apabila Pemerintah diharuskan menambah Penyertaan Modal Negara (PMN); (5) program pensiun dan Tunjangan Hari Tua Pegawai Negeri Sipil, yang juga dapat membebani APBN dalam jumlah signifikan; (6) desentralisasi fiskal, yang dapat membebani APBN sehubungan dengan kebijakan *hold harmless*; (7i) Bank Indonesia, yang dapat menimbulkan risiko fiskal sehubungan dengan adanya kewajiban Pemerintah untuk menjaga modal awal Bank Indonesia; (8) Lembaga Penjamin Simpanan, yang juga memerlukan peran Pemerintah dalam menjaga modal awalnya; (9) tuntutan hukum kepada Pemerintah, yang antara lain terjadi dalam kasus pengadaan listrik swasta (*Independent Power Producers*/IPPs) dan Badan Penyehatan Perbankan Nasional (BPPN); (10 keanggotaan organisasi internasional, menimbulkan komitmen Pemerintah untuk memberikan kontribusi kepada organisasi internasional tersebut; (11) bencana alam, yang menuntut Pemerintah untuk memberikan bantuan tanggap darurat dan penanggulangan bencana serta pemulihan pasca bencana; dan (12) Lumpur Sidoarjo, yang menimbulkan kewajiban bagi Pemerintah untuk menanggulanginya dengan mengacu kepada Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2007. Pengenalan terhadap risiko fiskal mutlak diperlukan dalam rangka mengantisipasi pengeluaran dan membatasi *exposure* sehingga memudahkan pembiayaannya di kemudian hari.

Perbaikan outlook investasi dari Lembaga Pemeringkat LN

Terus membaiknya fundamental ekonomi mampu menurunkan persepsi *country risk* sebagaimana terefleksi dari meningkatnya peringkat utang jangka panjang Indonesia dari beberapa lembaga pemeringkat luar negeri. Lembaga pemeringkat Moody's menaikkan peringkat Indonesia dari B1 menjadi Ba3 dengan *outlook stabl*e, sedangkan Fitch meskipun tetap menempatkan Indonesia pada peringkat BB- akan tetapi *outlook*nya berubah dari *stable* menjadi positif. Perbaikan *rating* utang tersebut didasarkan pada kinerja fiskal dan eksternal yang membaik dengan mengecilnya beban utang. Perbaikan ini setidaknya akan mampu menaikkan daya saing Indonesia pada tingkat global yang merupakan sinyal positif kebangkitan ekonomi Indonesia.

Asumsi dasar APBN TA 2005-2007 dapat dilihat pada Tabel 1.

Tabel 1
Asumsi Dasar APBN TA 2005 – 2007

Uraian	Realisasi TA 2005	Realisasi TA 2006	APBN (UU 18/2006)	APBN-P (UU 41/2007)	Realisasi TA 2007
Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,6	5,5	6,3	6,3	6,3
Tingkat Inflasi (%)	17,1	6,6	6,5	6,0	6,59
Nilai Tukar Rupiah (Rp/USD)	9.705	9.020	9.300	9.050	9.419
Suku Bunga SBI 3 Bulan (%)	9,09	9,75	8,50	8,00	8,25
Harga Minyak (USD/barel)	51,80	56,80	63,00	60,00	78,00
Produksi Minyak (juta barel/hari)	0,999	0,935	1,000	0,950	0,909

Catatan:

- Per Triwulan III-2007, Neraca Transaksi Berjalan Tahun 2007, surplus USD 3.389 juta dan Neraca Modal dan Finansial Tahun 2007, surplus USD 2.753 juta;
- Posisi Cadangan Devisa Tahun 2007, USD 56,9 miliar.

Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007

Perkembangan ekonomi dan pembangunan nasional membawa konsekuensi meningkatnya volume Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Perkembangan variabel ekonomi makro seperti fluktuasi harga minyak dunia yang tinggi dan nilai tukar rupiah yang mengalami penguatan antara lain mendasari perubahan terhadap perkiraan Pendapatan Negara dan Hibah menurut UU Nomor 41 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2007. Perbandingan realisasi anggaran TA 2006 dan TA 2007 dapat dilihat pada **Tabel 2**.

Tabel 2
Perbandingan Realisasi Anggaran TA 2007 dan 2006 (dalam triliun)

Uraian	Realisasi TA 2006	TA 2007			
		APBN (UU 18/2006)	APBN-P (UU 41/2007)	Realisasi	% Realisasi Terhadap Anggaran
Penerimaan Perpajakan	409,2	509,5	492,0	491,0	99,8%
PNBP	227,0	210,9	198,3	215,1	108,5%
Penerimaan Hibah	1,8	2,7	3,8	1,7	44,4%
Pendapatan Negara dan Hibah	638,0	723,1	694,1	707,8	102,0%
Belanja Pemerintah Pusat	440,0	504,8	498,2	504,6	101,3%
Transfer utk Daerah	226,2	258,8	254,2	253,3	99,7%
Total Belanja Negara	667,1	763,6	752,4	757,7	100,7%
Defisit Anggaran	29,1	40,5	58,3	49,8	85,5%
Pembiayaan	29,4	40,5	58,3	42,5	72,8%

Sumber: Laporan Realisasi Anggaran

Langkah-langkah memperbaiki penyerapan anggaran

Melalui reformasi Perbendaharaan yang bertujuan untuk mengefisienkan sistem pembayaran, Pemerintah terus berupaya agar pola absorpsi APBN dari bulan ke bulan semakin merata. Dengan filosofi pelayanan yang cepat, pola penyerapan yang semakin baik diharapkan dapat menjadi stimulus fiskal bagi pergerakan perekonomian. Belum optimalnya tren penyerapan belanja negara (lihat Boks 3) telah direspon dengan berbagai langkah konkret yang telah dilakukan Pemerintah antara lain: (i) penyiapan dan penyerahan dokumen pelaksanaan anggaran secara tepat waktu; (ii) penyederhanaan prosedur dan mekanisme pencairan dana APBN; (iii) memberikan pemahaman/sosialisasi kepada kementerian negara/lembaga; (iv) pembentukan Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara percontohan; (v) peningkatan pelayanan penyelesaian SP2D belanja non pegawai; (vi) penerapan rekening tunggal Pemerintah *(Treasury Single Account)*; (viii) penertiban rekening pada kementerian negara/lembaga. Pola penyerapan APBN tahun 2007 tergambar dalam **Grafik 14**.

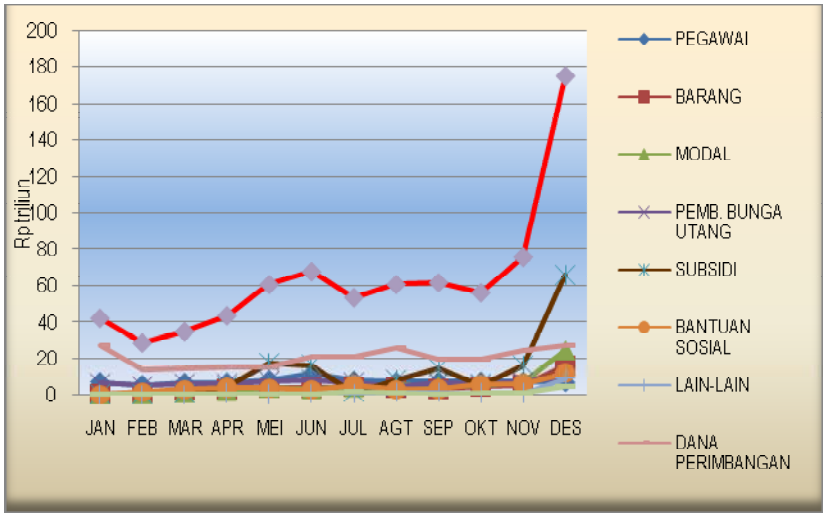

Grafik 14: Tren Penyerapan Belanja Negara TA 2007

Boks 3

Penyerapan Anggaran dan Akuntabilitas Keuangan

Salah satu fungsi anggaran adalah fungsi distribusi, yaitu memberikan pemerataan pelayanan kepada masyarakat terutama yang tidak dapat disediakan oleh sektor privat. Penyelenggaraan fungsi pelayanan tersebut dilakukan dengan berjalannya program ataupun kegiatan kementerian negara/lembaga pada saat menggunakan anggaran pada masing-masing dokumen pelaksanaan anggarannya. Apabila pihak kementerian negara/lembaga tidak segera mencairkan dana dalam DIPA maka program ataupun kegiatan tidak dapat dinikmati oleh masyarakat sasaran, dan dengan demikian fungsi pelayanan Pemerintah berkurang. Dengan demikian, penyerapan anggaran menjadi salah satu indikator penting dari berjalannya fungsi distribusi ini.

Penyerapan anggaran pada kementerian negara/lembaga di tahun 2007 menunjukkan angka penyerapan yang tertinggi dari anggaran beberapa tahun belakangan ini. Secara kumulatif, setiap kementerian negara/lembaga mampu menyerap dana di atas 90 persen dari pagu yang dianggarkan, sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

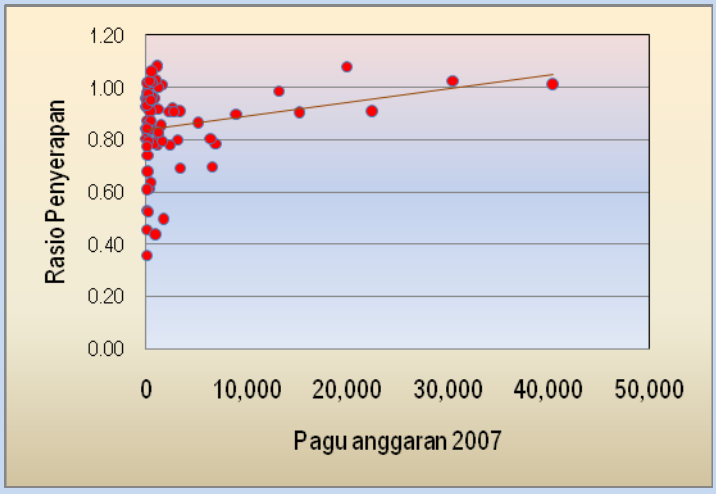

Grafik Plot Diagram Rasio Penyerapan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga

Dari grafik tersebut terlihat bahwa terdapat kecenderungan, meskipun tidak *robust*, bahwa semakin tinggi anggaran yang diterima oleh suatu kementerian negara/lembaga, maka semakin tinggi pula rasio penyerapan anggaran di kementerian negara/lembaga tersebut.

Seiring dengan meningkatnya anggaran, maka setiap kementerian negara/lembaga harus meningkatkan pengelolaan dan akuntabilitas keuangan negara. Salah satunya dengan membuat laporan keuangan yang berkualitas sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan yang berlaku. Hasil audit BPK pada LK K/L tahun 2006 menunjukkan bahwa belum semua kementerian negara/lembaga mencapai standar akuntabilitas yang diinginkan. Akan tetapi hal ini dapat dimaklumi mengingat proses akuntabilitas ini baru dimulai semenjak tahun 2005. Dari data tersebut, hanya 7 bagian anggaran/kementerian negara/lembaga yang mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian, dan 38 buah mendapatkan opini Wajar Dengan Pengecualian. Sisanya sebanyak 36 buah mendapat opini *disclaimer* dan 1 buah mendapat opini *adverse*. Kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan akuntabilitas ini umumnya bersumber pada banyaknya satuan kerja di bawah suatu K/L dan banyaknya satker Dana Dekonsentrasi/Tugas Pembantuan, sehingga mengakibatkan lemahnya sistem pengendalian intern.

Seperti telah dikemukakan di muka, penyerapan anggaran menjadi salah satu kunci keberhasilan pembangunan. Namun, penyerapan anggaran tersebut harus pula diikuti dengan tata kelola yang lebih baik. Tata kelola ini diwujudkan dalam pembuatan LK K/L yang mengisyaratkan adanya transparansi dan akuntabilitas keuangan negara. Sebab dalam banyak literatur disebutkan adanya korelasi positif antara transparansi dan akuntabilitas dengan kemajuan ekonomi suatu negara.

(Sumber: Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga)

Pemotongan anggaran perjalanan dinas bagi pembiayaan

Seiiring dengan terbatasnya anggaran, pada tahun 2007 ini Pemerintah melakukan pemotongan terhadap belanja barang perjalanan dinas yang bersifat non operasional di kementerian negara/lembaga. Pemotongan ini ditujukan agar terjadi penghematan anggaran, sehingga dapat digunakan untuk membiayai anggaran yang lebih prioritas dan mendesak, terutama untuk perbaikan infrastruktur.

Usaha-usaha peningkatan tax ratio

Untuk meningkatkan penerimaan negara, Pemerintah juga mengadakan perbaikan-perbaikan administrasi perpajakan yang ditujukan untuk meningkatkan *tax ratio*. Saat ini *tax ratio* Indonesia berada pada kisaran 13 persen, yang diupayakan untuk terus ditingkatkan. Perbaikan di bidang administrasi perpajakan ini dilaksanakan melalui modernisasi administrasi perpajakan dan kelembagaan, seperti *e-filling*, dan *e-payment* dan pembentukan kantor modern yang terpadu. Selain itu, reformasi kebijakan perpajakan telah dilakukan Pemerintah dan disetujui DPR meliputi UU No. 28/2007 tentang Ketentuan Umum dan Tatacara Perpajakan (lihat Boks 4), UU No. 17 Tahun 2006 tentang Perubahan atas UU No. 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan, dan UU No. 39 Tahun 2007 tentang Perubahan atas UU No. 11 Tahun 1995 tentang Cukai. Dalam rangka meningkatkan penanaman modal, Pemerintah juga memberikan insentif perpajakan yang meliputi PPh, PPN, Bea Masuk dan fasilitas perpajakan untuk penanganan bencana alam yang menimpa beberapa daerah. Instensifikasi perpajakan di tahun 2007 dilakukan melalui cara yang lebih sistemik dan terstandar, yaitu Optimalisasi Pemanfaatan Data Perpajakan (OPDP), aktifasi wajib pajak *non-filer*, *mapping* dan pembuatan *profile*, serta penegakan hukum. Di bidang ekstensifikasi perpajakan, Pemerintah melakukan 3 pendekatan utama, yaitu pendekatan properti, pendekatan pemberi kerja, dan pendekatan profesi. Program ini mampu menambah jumlah wajib pajak baru sejumlah 1,7 juta WP, namun dampak penerimaan WP baru ini baru akan dirasakan bulan Maret 2008.

Perbaikan tata kelola penganggaran

Sejalan dengan makin besarnya volume anggaran, Pemerintah terus melaksanakan upaya perbaikan tata kelola penganggaran. Salah satunya melalui upaya penertiban rekening

Pemerintah yang berada di bawah pengelolaan kementerian negara/lembaga. Seperti diketahui, semenjak reformasi bidang keuangan negara digulirkan maka menteri/pimpinan lambaga diposisikan sebagai *chief operating officer* (COO), sementara Menteri Keuangan sebagai *chief financial officer* (CFO). Oleh karena itu, kementerian negara tidak diperbolehkan untuk membuka rekening di luar kepentingan kementerian negara/lembaga tersebut dan Menteri Keuangan bertugas mengawasi pembukaan rekening bersangkutan karena keberadaannya dapat berimplikasi pada keuangan negara. Melalui Permenkeu No. 57/PMK.05/2007 dan No. 58/PMK.05/2007, Pemerintah mulai menertibkan rekening-rekening itu. Hasilnya pada tahun 2007 ini, pengelolaan rekening-rekening Pemerintah di kementerian negara/lembaga dapat dilaksanakan dengan lebih transparan, yaitu dengan melaporkannya pada Laporan Keuangan K/L bersangkutan.

Reformasi birokrasi

Sementara itu, dalam upaya meningkatkan kinerja dan profesionalisme birokrasi, Pemerintah melaksanakan reformasi birokrasi. Reformasi ini ditujukan untuk meningkatkan transparansi dan *clean government* yang akan mendukung pengelolaan anggaran. Reformasi tersebut juga harus dipahami sebagai penyempurnaan yang dinamis, terus menerus, dalam rangka meningkatkan kinerja birokrasi sehingga pelayanan yang diberikan menjadi semakin baik. Sebagai permulaan pada tahun 2007 ini, reformasi tersebut dilaksanakan di lingkungan Departemen Keuangan sebagai kelanjutan dari reformasi keuangan negara. Perubahan fundamental yang dilaksanakan dalam reformasi birokrasi Departemen Keuangan adalah dengan merubah sikap tertutup yang selama ini dipersepsikan masyarakat menjadi suatu birokrasi yang terbuka dan transparan guna memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat. Langkah-langkah yang dilakukan meliputi: (1) menciptakan aparatur yang bersih, bertanggung jawab dan profesional; (2) menciptakan birokrasi yang efisien dan efektif; dan (3) menciptakan pelayanan prima kepada masyarakat. Selama tahun 2007, telah dibentuk kantor-kantor pelayanan prima di bidang perpajakan, kepabeanan dan cukai, serta perbendaharaan. Selain itu, Departemen Keuangan juga melakukan penyempurnaan *standard operating procedures*, peningkatan kompetensi pegawai dan perbaikan sistem remunerasi. Kesemua upaya di atas dilaksanakan untuk meningkatkan efektifitas pengelolaan anggaran.

Komposisi Realisasi APBN TA 2007

1. Pendapatan Negara

Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2007 mencapai Rp707,8 triliun atau 102 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2007. Jumlah ini mengalami peningkatan sebesar Rp69,9 triliun jika dibandingkan dengan realisasi tahun anggaran sebelumnya sebesar Rp637,9 triliun.

Realisasi Penerimaan Perpajakan sebesar Rp491,0 triliun

Realisasi Penerimaan Perpajakan dalam TA 2007 adalah sebesar Rp491,0 triliun atau mencapai hampir 100 persen dari sasaran yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2007. Hal ini berarti meningkat sebesar Rp81,8 triliun atau 20 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2006 sebesar Rp409,2 triliun. Meningkatnya Penerimaan Perpajakan sejalan dengan upaya Pemerintah meningkatkan *tax ratio* yaitu peningkatan penerimaan perpajakan dan rasionya terhadap PDB melalui langkah-langkah yang dilakukan sejak tahun 2006 yaitu peningkatan efektivitas dan efisiensi pada sistem perpajakan di antaranya dengan melakukan evaluasi dan penyempurnaan atas kebijakan perpajakan (*tax policy*) dan administrasi perpajakan.

Walaupun telah ditargetkan secara cermat, realisasi APBN juga dipengaruhi oleh berbagai faktor terkait, di mana pada gilirannya memiliki implikasi pada berbagai kondisi perekonomian secara makro. Berbagai capaian/realisasi APBN baik di sisi pendapatan dan belanja tahun 2007 memiliki implikasi yang signifikan bagi perekonomian khususnya

pertumbuhan ekonomi. Capaian realisasi penerimaan perpajakan TA 2007 sebesar Rp491,0 triliun secara signifikan mempengaruhi upaya peningkatan kinerja Pemerintah dalam rangka mengoptimalisasi fungsi perpajakan itu sendiri sebagai *budgeter* untuk membiayai kegiatan publik dan sebagai *regulator* dimana Pemerintah dapat menggunakan sumber daya tersebut untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu.

Tax ratio 12,41 persen

Dalam TA 2007, realisasi Penerimaan Perpajakan berada di bawah sasarannya, sehingga *tax ratio* sedikit mengalami penurunan dibandingkan dengan target asumsi APBN-P dan hanya tercapai 12,41 persen. Hal ini antara lain disebabkan oleh kebijakan Pemerintah untuk memberikan stimulus perpajakan secara terbatas guna mendukung pertumbuhan ekonomi yang lebih berkualitas. Hal ini dilakukan dengan memberikan fasilitas perpajakan di bidang-bidang dan sektor-sektor tertentu dengan tetap menjaga iklim usaha yang kondusif, namun tetap berpegang pada prinsip-prinsip dasar pengenaan pajak yang sehat dan kompetitif, agar tidak mengganggu upaya untuk meningkatkan penerimaan negara. Selain itu, Pemerintah juga mengupayakan proses restitusi pajak yang semakin cepat untuk mendukung kepastian hukum yang adil bagi para wajib pajak.

Dari sisi komposisi penerimaan perpajakan, realisasi Pajak Perdagangan Internasional TA 2007 adalah sebesar Rp20,9 triliun atau naik 58 persen dari realisasi TA 2006 sebesar Rp13,2 triliun. Sedangkan realisasi Pajak Dalam Negeri TA 2007 adalah sebesar Rp470,1 triliun yang berarti mengalami kenaikan yaitu sebesar Rp74,1 triliun atau naik 19 persen dibanding realisasi TA 2006 yang sebesar Rp395,97 triliun. Penerimaan Pajak Dalam Negeri tahun ini dipengaruhi oleh kenaikan semua jenis pajak yang mengindikasikan terus membaiknya kondisi perekonomian dan reformasi perpajakan yang mulai menunjukkan hasilnya.

Boks 4
UNDANG-UNDANG NO. 28 TAHUN 2007
TENTANG PERUBAHAN KETIGA ATAS UNDANG-UNDANG NO. 6 TAHUN 1983
TENTANG KETENTUAN UMUM DAN TATA CARA PERPAJAKAN

Pesatnya perkembangan ekonomi, sosial dan politik dalam beberapa tahun belakangan ini belum diakomodasi dengan sistem perpajakan yang efektif. Dasar hukum sistem perpajakan yang tidak lain adalah undang-undang yang sudah berlaku selama kurang lebih 24 tahun tersebut, tidak mampu mengikuti (*catching up with)* dinamika yang ada. Hal ini terbukti dengan berbagai kelemahan peraturan yang teridentifikasi seperti masih dirasakan belum adil, kurang memberikan kemudahan kepada Wajib Pajak dan kurang memberikan kepastian hukum. Upaya koreksi melalui pemberlakuan Undang-Undang Perpajakan yang baru secara umum dilakukan untuk mendongkrak rasio penerimaan perpajakan terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) atau *tax ratio* sebagai salah satu indikator optimalnya penerimaan perpajakan.

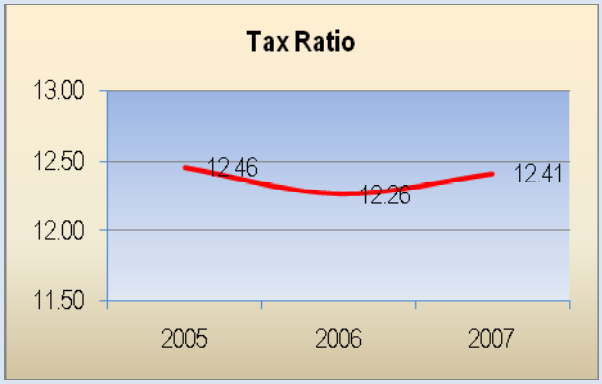

Perkembangan Tax Ratio Tahun 2005-2007

Undang-Undang No. 28 tahun 2007 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang No. 6 tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan merupakan respon Pemerintah dalam menerapkan prinsip-prinsip perpajakan seperti keadilan *(fairness)*, kesederhanaan *(simplicity),* netralitas *(neutrality)*, dan kepastian hukum *(legal).* Di samping itu, terbitnya Undang-Undang pada bulan Juli tahun 2007 tersebut mencerminkan upaya serius Pemerintah dalam menegakkan prinsip-prinsip *good governance* terutama kaitannya dengan prinsip penegakan hukum serta prinsip efektivitas dan efisiensi ekonomi.

Seperti yang tercantum dalam penjelasan Undang-Undang tersebut, tujuan dari perubahan adalah untuk lebih memberikan keadilan, meningkatkan pelayanan kepada Wajib Pajak, meningkatkan kepastian dan penegakan hukum, serta mengantisipasi kemajuan di bidang teknologi informasi dan perubahan ketentuan material di bidang perpajakan. Selain itu perubahan juga dimaksudkan untuk meningkatkan profesionalisme aparatur perpajakan, meningkatkan keterbukaan administrasi perpajakan dan meningkatkan kepatuhan sukarela Wajib Pajak.

Kebijakan pokok tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang diatur dalam Undang-Undang tersebut adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara;
2. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;
3. Meningkatkan efisiensi pemungutan pajak dalam rangka mendukung penerimaan negara;
4. Meningkatkan pelayanan, kepastian hukum dan keadilan bagi masyarakat guna meningkatkan daya saing dalam bidang penanaman modal, dengan tetap mendukung pengembangan usaha kecil dan menengah;
5. Menyesuaikan tuntutan perkembangan sosial ekonomi masyarakat serta perkembangan di bidang teknologi informasi;
6. Meningkatkan keseimbangan antara hak dan kewajiban;
7. Menyederhanakan prosedur administrasi perpajakan;
8. Meningkatkan penerapan prinsip *self assessment* secara akuntabel dan konsisten; dan
9. Mendukung iklim usaha ke arah yang lebih kondusif dan kompetitif.

Walaupun relatif baru, ketentuan perpajakan ini telah dan berpotensi signifikan untuk memberikan dampak masif bagi perekonomian Indonesia secara makro. Dalam hasil survai yang dilakukan WorldBank, Indonesia berada pada ranking 110 dari 178 negara dalam hal kemudahan membayar pajak pada periode tahun 2006 s.d. 2007 (www.doingbusiness.org). Melalui reformasi perpajakan, *high cost economy* yang harus dibayar oleh dunia bisnis di Indonesia diharapkan dapat dieliminasi untuk menstimulasi investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Tidak dapat dipungkiri No. 28 tahun 2007 tersebut telah memfasilitasi jalan (*pave the way*) menuju sistem perpajakan yang sehat dan kompetitif. Di masa yang akan datang, perubahan sistem perpajakan ini juga diharapkan dapat mengoptimalisasi tujuan kebijakan perpajakan itu sendiri yakni menghasilkan pendapatan untuk membiayai kegiatan publik, sebagai sarana distribusi pendapatan dan pembuatan kebijakan Pemerintah demi terwujudnya masyarakat yang sejahtera.

(Sumber: UU No. 28/2007)

Kinerja perpajakan

Secara nominal kinerja penerimaan perpajakan TA 2007 lebih baik dibandingkan TA 2006, walaupun realisasinya sedikit di bawah target APBN-P TA 2007. Pada tahun ini realisasi penerimaan pajak mencapai Rp491 triliun dari target sebesar Rp492 triliun, lebih besar dari realisasi tahun 2006 sebesar Rp409,2 dari target sebesar Rp425,1 triliun. Tidak tercapainya target perpajakan dikarenakan realisasi Pajak Penghasilan non migas hanya mencapai Rp194,4 triliun atau 90,6 persen dari target. Sementara itu Pajak Penghasilan dari sektor migas melebihi target dalam APBN-P hampir sebesar Rp7 triliun atau mencapai 118 persen dari target. Hal ini menunjukkan bahwa sektor migas masih memegang peranan penting dalam penerimaan perpajakan di Indonesia.

Sumbangan sektor perpajakan

Realisasi penerimaan pajak tersebut di atas ditentukan oleh beberapa faktor penentu yaitu indikator-indikator ekonomi makro seperti pertumbuhan ekonomi, tingkat inflasi, dan nilai tukar. Selain itu penerimaan perpajakan juga dipengaruhi oleh faktor eksternal seperti harga minyak internasional. Harga minyak internasional yang yang mengalami kenaikan memberikan pengaruh signifikan terhadap penerimaan pajak dari sektor migas, meskipun realisasi *lifting* minyak Indonesia (0,909 juta barel/hari) tidak mencapai target APBN-P (1 juta barel/hari). Realisasi penerimaan pajak sektor migas pada tahun 2007 ini mencapai Rp44 triliun, lebih tinggi dari target APBN-P sebesar Rp37,3 triliun. Sama seperti tahun sebelumnya sumbangan sektor perpajakan yang semakin dominan terhadap penerimaan negara (mencapai 70 persen) diharapkan dapat mendukung ketahanan fiskal, sebagaimana tergambar pada **Grafik 15**.

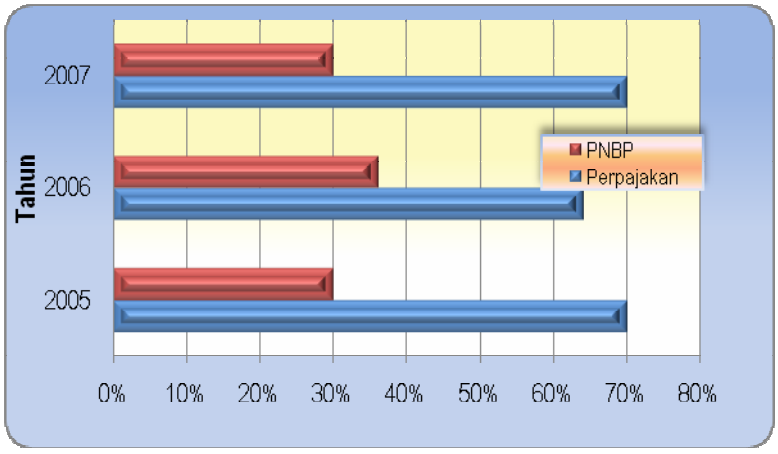

Grafik 15: Rasio Penerimaan Perpajakan dan PNBP terhadap Pendapatan Negara TA 2005-2007

Penyempurnaan administrasi perpajakan

Dalam upaya meningkatkan penerimaan perpajakan Pemerintah melaksanakan penyempurnaan administrasi perpajakan. Langkah-langkah yang diambil untuk memperbaiki administrasi perpajakan dalam mengatasi rendahnya rasio pajak yang dipengaruhi oleh (i) sistem perpajakan yang rumit dan kecenderungan terjadinya tumpang-tindih peraturan; (ii) tendensi wajib pajak untuk membayar kewajiban pajaknya; (iii) dan kondisi perekonomian yang didominasi sektor informal. Upaya nyata yang saat ini sedang dilakukan adalah perubahan UU perpajakan, yaitu UU No. 28/2007 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 6/1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, agar pelaksanaan sistem perpajakan dapat lebih efektif dan efisien. Tercapainya prinsip-prinsip perpajakan yang sehat seperti persamaan, kesederhanaan dan keadilan akan mampu meningkatkan kapasitas fiskal dan merangsang perkembangan ekonomi makro yang lebih baik dengan menghapuskan hambatan berinvestasi. Menurut UU tersebut reformasi administrasi perpajakan dilaksanakan melalui peningkatan pelayanan terhadap wajib pajak yang meliputi implementasi dan pembentukan sistem administrasi perpajakan modern (KPP Modern: *Large Tax Office*, *Medium Tax Office* dan *Small Tax Office*) serta perluasan wajib pajak patuh ditambah wajib pajak tertentu untuk percepatan pemberian restitusi; dan implementasi praktek *good governance* meliputi pembentukan Pusat Data Pajak dan *e-system*, serta pembentukan dan implementasi manajemen SDM modern.

Penerimaan negara bukan pajak

Selama tahun 2007 ini terjadi juga penurunan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) sebesar hampir Rp12 triliun atau sekitar 5,3 persen dari realisasi tahun 2006. Penurunan ini disebabkan oleh menurunnya PNBP yang berasal dari sumber daya alam minyak bumi dan gas alam (SDA migas) karena tidak tercapainya target produksi harian migas. Secara umum kebijakan PNBP pada tahun ini lebih dititikberatkan pada peninjauan dan penyempurnaan peraturan PNBP pada masing-masing kementerian negara/lembaga, antara lain melalui (1) penyusunan peraturan perundang-undangan PNBP, serta evaluasi dan penyempurnaan tarif di bidang PNBP, dan (2) melakukan verifikasi besaran PNBP dan penegakan hukum (*law enforcement*) di bidang PNBP. Walaupun terjadi penurunan PNBP yang berasal dari minyak bumi dan gas alam, namun prospek penerimaannya di masa yang akan datang semakin membaik karena adanya kepastian hukum mengenai pemungutan PNBP non migas lainnya. Hal ini antara lain ditunjukkan dengan keberhasilan Pemerintah menetapkan Peraturan Pemerintah No. 19/2007 tentang Penentuan Tarif PNBP pada Departemen Hukum dan HAM serta PP No. 59/2007 tentang Penentuan Tarif PNBP Badan Koordinasi Survai dan Pemetaan Nasional.

Sumber-Sumber Penerimaan SDA

Sumber PNBP yang berasal dari penerimaan SDA meliputi SDA minyak bumi dan gas alam, SDA pertambangan umum, SDA kehutanan, dan SDA perikanan. Kenaikan sumbangan penerimaan SDA terhadap PNBP tahun 2007 antara lain dipengaruhi berbagai faktor seperti harga minyak mentah di pasar internasional serta nilai tukar rupiah terhadap dolar Amerika Serikat. Kontribusi penerimaan SDA yang berasal dari migas selama tahun 2007 ini mencapai Rp124,8 triliun atau 116 persen dari target yang dianggarkan, sedangkan SDA non migas mencapai Rp8,2 triliun atau 112,4 persen dari target yang dianggarkan. Pendapatan SDA non migas bersumber dari pertambangan umum, kehutanan, perikanan dan sebagainya. Penerimaan SDA pertambangan umum bersumber dari iuran tetap *(landrent*), dan iuran produksi/eksploitasi *(royalty).* Meskipun penerimaan PNBP melebihi sasaran, tetapi jumlahnya lebih kecil dibandingkan dengan tahun sebelumnya dikarenakan faktor eksternal dan internal seperti *lifting* minyak yang di bawah asumsi anggaran dan apresiasi nilai tukar rupiah membawa konsekuensi penurunan PNBP yang berasal dari migas. Untuk itu, dalam upaya meningkatkan lifting minyak, Menteri Keuangan mengeluarkan 2 peraturan penting, yakni PMK No. 177/PMK.011/2007 tentang Pembebasan Bea Masuk atas Impor Barang untuk Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi serta Panas Bumi; dan PMK No. 179/PMK.011/2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Platform Pengeboran atau Produksi Terapung di Bawah Air sebesar 0%. Dari realisasi PNBP non-migas, hanya PNBP non perbankan saja yang menunjukkan penurunan dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 9 persen (2006= Rp21,8 triliun dan 2007=Rp19,9 triliun).

Sementara itu, dalam rangka mengefektifkan sumber-sumber penerimaan Pemerintah melaksanakan revitalisasi Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Pada tahun ini, revitalisasi tersebut mampu menghasilkan peningkatan pendapatan bagian laba BUMN yang diterima Pemerintah dari Rp23 triliun di tahun 2006 menjadi Rp23,2 triliun di tahun 2007. Salah satu upaya nyata dari Pemerintah adalah dengan meningkatkan koordinasi pengelolaan BUMN sehingga terjadi perbaikan tata kelola (lihat Boks 5).

Boks 5.
BUMN dan Pengembangannya

Badan Usaha Milik Negara (BUMN) didirikan untuk memberikan sumbangan bagi perekonomian nasional pada umumnya dan penerimaan Negara pada khususnya, melalui penyediaan barang dan jasa bagi pemenuhan hajat hidup orang banyak, seperti BBM, pupuk, beras, dan jasa transportasi; serta menjadi perintis bagi kegiatan-kegiatan usaha yang belum dapat dilaksanakan oleh sektor swasta. Perkembangan BUMN dalam beberapa tahun belakangan ini menunjukkan perkembangan yang menggembirakan yang ditandai dengan meningkatnya laba bersih di atas 20 persen pada tahun 2006, peningkatan deviden dan pajak yang disetorkan ke APBN dan sebagainya. Dari sekitar 139 Badan Usaha Milik Negara yang ada di Indonesia, saat ini tinggal 20 BUMN yang masih memerlukan perbaikan

pengelolaan, dengan nilai kerugian yang terus mengecil. Jumlah BUMN sebanyak ini lebih sedikit jika dibandingkan dengan 3 tahun lalu yang mencapai 158 buah.

Sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menciptakan pertumbuhan ekonomi nasional sebesar 6,3 persen di tahun 2007 ini, BUMN diharapkan mampu menjadi motor pembangunan. Untuk hal tersebut, Pemerintah menunjukkan komitmen dengan berencana mengalokasikan belanja modal atau investasi yang mencapai Rp 114 triliun di tahun 2007 dan Rp 150 triliun di tahun 2008. Beberapa program seperti pemanfaatan bahan bakar nabati untuk menggantikan BBM, percepatan pembangunan infrastruktur, percepatan pembangunan perumahan untuk rakyat, dan peningkatan investasi serta revitalisasi sektor pertanian melalui Perkebunan Inti Rakyat (PIR) diharapkan dapat dilaksanakan oleh BUMN.

Untuk mencapai hal tersebut, pengelolaan BUMN harus didasarkan pada prinsip-prinsip tata kelola perusahaan yang baik sehingga BUMN mampu meningkatkan efisiensi, bebas dari segala bentuk intervensi non korporasi. BUMN harus menerapkan prinsip-prinsip yang mencerminkan *good corporate governance* yang mengutamakan akuntabilitas dan tranparansi. Dalam waktu dekat hal yang harus dilakukan oleh BUMN adalah melakukan restrukturisasi dan reformasi BUMN untuk menyelaraskan strategi internal perusahaan dengan kebijakan industrial serta pasar untuk memisahkan fungsi komersial dan dan fungsi pelayanan masyarakat umum serta mengoptimalkan prinsip tata kelola perusahaan yang baik secara utuh. Oleh karena itu, di masa mendatang BUMN diharapkan mampu meningkatkan daya saingnya baik di tingkat regional maupun tingkat global melalui efisiensi dan mampu menghindari intervensi kekuasaan yang tidak semestinya. Sehingga BUMN mampu berkiprah lebih luas yang ditandai dengan meningkatnya kontribusi BUMN kepada Negara berupa pajak dan dividen, di samping kemampuan bersaing untuk menciptakan produk yang berkualitas dan murah sesuai kebutuhan rakyat.

Garis Besar Pengelolaan BUMN 2007-2009

Pertama, program revitalisasi dan optimalisasi peran BUMN untuk mendukung program-program Pemerintah, yaitu percepatan pembangunan infrastruktur, revitalisasi sektor pertanian-perkebunan-perikanan, pengembangan energi alternatif, pengembangan koperasi dan UKM dan meningkatkan kontribusi kepada Negara dengan pajak, dividen dan efisiensi pengeluaran.

Kedua, program peningkatan kinerja BUMN pada tahun 2007 sebesar 20 persen melalui efisiensi dan efektifitas penciptaan nilai (*value creation*) dengan program-program sebagai berikut:

1. Peningkatan dan optimalisasi investasi yang dapat menciptakan *multiplier effect* bagi perekonomian nasional;
2. Peningkatan efiensi (*cost reduction*), antara lain melalui penerapan *e-procurement* dan internal control yang lebih ketat;
3. Pelaksanaan proyek Pemerintah oleh BUMN sesuai ketentuan yang berlaku;
4. Mendorong untuk dapat terlaksananya restrukturisasi keuangan BUMN;
5. Pemantapan pelaksanaan UU No. 19/2003 dan harmonisasi peraturan perundangan yang terkait dengan pengelolaan BUMN;
6. Pengembangan dan diversifikasi usaha BUMN yang berbasis sumber daya alam untuk perluasan pangsa pasar dan penyebaran risiko usaha;
7. Peningkatan ekspor untuk menghasilkan devisa negara.

Ketiga, program *rightsizing* BUMN untuk meningkatkan efektifitas dan efisiensi pembinaan melalui rasionalisasi jumlah BUMN sehingga dapat dicapai jumlah BUMN yang ideal untuk dilakukan pembinaan secara efektif. Langkah pertama yang dilaksanakan dalam proses tersebut adalah pemetaan terhadap kondisi BUMN saat ini. Fokus utama pemetaan ini adalah pengelompokkan BUMN menjadi BUMN yang harus dimiliki negara karena menjalankan *public service obligation* dan BUMN yang tidak harus dimiliki negara.

(Sumber: Rumusan Hasil Rakor BUMN tanggal 12-13 April 2007)

Realisasi PNBP

Secara keseluruhan, realisasi PNBP TA 2007 adalah sebesar Rp215,1 triliun, atau menurun sekitar Rp12 triliun dibanding dengan realisasi PNBP TA 2006 yang sebesar Rp227 triliun. Rasio realisasi PNBP terhadap PDB adalah 5,4 persen. Kontribusi PNBP terhadap pendapatan negara diupayakan untuk terus ditingkatkan melalui perbaikan administrasi, intensifikasi, dan ekstensifikasi sehingga mampu mendukung kesinambungan fiskal.

Penerimaan Hibah

Realisasi Penerimaan Hibah TA 2007 mencapai Rp1,7 triliun atau 44 persen dari sasaran yang ditetapkan APBN-P TA 2007. Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, realisasi Penerimaan Hibah TA 2007 mengalami penurunan sebesar 5,5 persen dari sejumlah Rp1,8 triliun di TA 2006. Perkembangan hibah yang diterima oleh Pemerintah Indonesia dalam tiga tahun terakhir terkait erat dengan terjadinya bencana alam yang melanda berbagai daerah di Indonesia seperti bencana alam dan gempa bumi dan gelombang tsunami yang menerpa sebagian besar wilayah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Kepulauan Nias pada penghujung tahun 2004, yang kemudian disusul dengan gempa bumi di Pulau Simeuleu pada Maret 2005 dan gempa bumi yang melanda Provinsi DI Yogyakarta dan sebagian Provinsi Jawa Tengah pada tahun 2006.

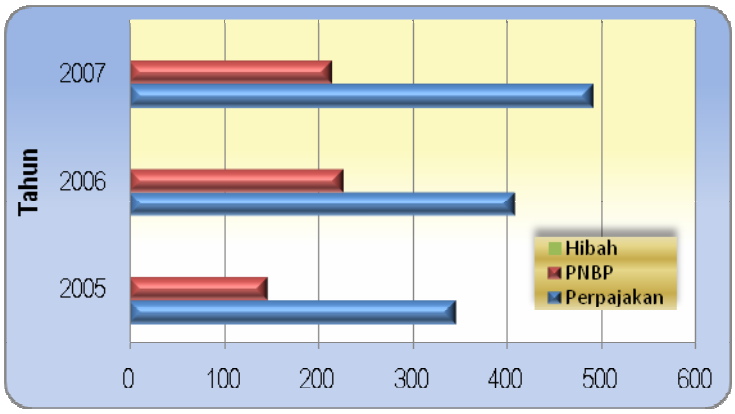

Grafik 16: Perkembangan Pendapatan Negara dan Hibah TA 2005-2007

2. Belanja Negara

Volume alokasi belanja negara meningkat

Sejalan dengan peningkatan kapasitas fiskal, volume alokasi anggaran belanja negara tahun 2007 meningkat jika dibandingkan dengan TA 2006 dengan kenaikan sebesar Rp77,3 triliun atau mengalami peningkatan sebesar 11,6 persen. Ditinjau dari komposisi, maka belanja Pemerintah terdiri dari belanja Pemerintah Pusat dan transfer untuk daerah. Pada tahun 2007, alokasi belanja Pemerintah Pusat mengalami peningkatan sebesar Rp53,7 triliun. Jumlah alokasi tersebut pada dasarnya ditujukan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat melalui program-program pengentasan kemiskinan, perluasan kesempatan kerja, peningkatan ketahanan pangan, peningkatan investasi dan daya saing ekspor, peningkatan produksi minyak bumi dan diversifikasi energi, dukungan infrastruktur, peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan, serta penanganan dan mitigasi risiko bencana.

Alasan peningkatan volume anggaran

Apabila dibandingkan dengan tahun 2006, pada tahun 2007 terjadi peningkatan anggaran belanja Pemerintah Pusat yang cukup signifikan. Hal tersebut dipengaruhi oleh perkembangan indikator-indikator ekonomi makro khususnya harga minyak mentah Indonesia (*Indonesia crude oil price*), nilai tukar rupiah dan suku bunga SBI 3 bulan, selain berbagai kebijakan internal yang diambil Pemerintah dalam menjalankan amanat UU Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Volume yang meningkat tersebut juga dikaitkan dengan (1) kemampuan daya serap masing-masing kementerian negara/lembaga yang diperkirakan sekitar 90 persen; (2) pembangunan dan perbaikan berbagai infrastruktur yang rusak akibat bencana alam; (3) kebijakan untuk menentukan harga pembelian Pemerintah atas beras; dan (4) adanya tambahan hibah dari donor luar negeri dalam kerangka rehabilitasi dan rekonstruksi daerah

bencana di NAD-Nias. Selain itu, kebutuhan peningkatan anggaran juga dikarenakan prioritas pembangunan yang tercermin dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP) 2007.

Rencana Kerja Pemerintah (RKP) sebagai dokumen perencanaan pembangunan nasional, memuat prioritas-prioritas pembangunan, rancangan kerangka ekonomi makro serta program-program kementerian/lembaga, lintas kementerian/lembaga, dan lintas wilayah yang tercerminkan dalam bentuk: (i) kerangka regulasi, serta (ii) kerangka investasi Pemerintah dan layanan umum. Dengan demikian, pos-pos dalam APBN baik besaran maupun sasarannya disusun dan dirumuskan berdasarkan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) tahun 2007 yang ditetapkan bersama oleh DPR dan Pemerintah. Adapun fungsi pokok dari RKP adalah merupakan (1) acuan bagi seluruh pelaku pembangunan dalam menjabarkan seluruh kebijakan publik (2) pedoman dalam penyusunan APBN sesuai dengan arah kebijakan pembangunan nasional satu tahun dan (3) jaminan kepastian kebijakan sebagai wujud nyata komitmen Pemerintah dalam melaksanakan pembangunan nasional.

Belanja Pemerintah dilihat dari fungsinya memiliki 2 fungsi yaitu menjalankan mesin birokrasi melalui efisiensi birokrasi atau roda pemerintahan dan menstimulasi kegiatan ekonomi secara umum. Terkait dengan fungsi menjalankan roda pemerintahan, secara umum terdapat empat fungsi yang mendapat prioritas tinggi dalam penganggaran pusat, meliputi fungsi pelayanan umum, pendidikan, pertahanan dan ekonomi. Dalam dua tahun terakhir alokasi belanja pemerintah telah difokuskan pada fungsi pelayanan umum di mana di tahun 2007 realisasi belanja untuk fungsi pelayanan umum sebesar Rp308,5 triliun atau sebesar 61,1 persen dari total belanja pemerintah pusat. Program-program pelayanan umum pada tahun ini meliputi program-program yang dilaksanakan Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara untuk pembayaran bunga utang, subsidi dan transfer lainnya serta pembiayaan lain-lain. Besarnya anggaran berkaitan dengan perubahan indikator ekonomi yang berpengaruh pada asumsi pengeluaran dan kebijakan yang dijalankan pemerintah dalam mengatasi dampak kenaikan harga pangan dunia dan BBM.

Prioritas utama pembangunan 2007

Pada dasarnya prioritas pembangunan sesuai dengan RKP 2007 diarahkan pada 7 (tujuh) prioritas utama yang meliputi: (1) perbaikan penghasilan dan kesejahteraan aparatur negara dan pensiunan; (2) peningkatan kualitas pelayanan dan efisiensi penyelenggaraan kegiatan operasional pemerintahan; (3) pemenuhan kewajiban pembayaran bunga utang; (4) investasi pemerintah di bidang infrastruktur untuk mendukung kegiatan ekonomi nasional; (5) penyediaan subsidi untuk membantu menstabilkan harga barang dan jasa pada tingkat yang terjangkau masyarakat; (6) peningkatan rasio anggaran pendidikan sejalan dengan amanat UUD 1945; serta (7) menjaga kesinambungan bantuan langsung bersyarat ke masyarakat terutama di bidang pendidikan dan kesehatan. Prioritas-prioritas di atas diwujudkan dalam kenaikan alokasi belanja pegawai mencapai sekitar Rp98 triliun, belanja barang Rp61,8 triliun, belanja modal Rp71,7 triliun, pembayaran bunga utang Rp83,5 triliun, subsidi Rp105 triliun, bantuan sosial Rp52 triliun dan belanja lain-lain Rp25,7 triliun.

Realisasi subsidi Rp150,2 triliun

Secara keseluruhan, dari realisasi sekitar Rp504,6 triliun Belanja Pemerintah Pusat tahun 2007, subsidi masih menempati urutan teratas belanja yaitu sekitar Rp150,2 triliun atau meningkat 40 persen dibandingkan TA 2006. Beban subsidi yang sangat besar terutama ditujukan untuk subsidi BBM dan non-BBM. Dari sisi BBM, subsidi yang membesar disebabkan naiknya harga minyak mentah internasional dan konsumsi BBM yang cenderung membesar. Sementara untuk non-BBM, terutama diakibatkan peningkatan subsidi listrik melalui PT. PLN, subsidi pangan melalui Perum Bulog, subsidi pupuk bagi pertanian, subsidi minyak goreng dan subsidi bagi BUMN yang mendapat tugas melaksanakan pelayanan publik. Subsidi listrik berkaitan dengan naiknya biaya produksi listrik akibat naiknya harga BBM, sementara subsidi lainnya berhubungan dengan kewajiban dan komitmen pemerintah untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat (*public service obligation*).

Belanja modal infrastruktur

Sementara itu, Pemerintah juga merealisasikan belanja modal sekitar Rp64,3 triliun untuk perbaikan infrastruktur atau melonjak sebesar 17 persen bila dibandingkan dengan tahun 2006. Untuk mendukung roda kepemerintahan, pemerintah juga mengalokasikan kenaikan yang besar untuk belanja pegawai dan belanja barang bila dibandingkan tahun 2006. Hal ini tidak terlepas dari keinginan Pemerintah Pusat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat secara berkesinambungan melalui perbaikan pendapatan para Pegawai Negeri Sipil (PNS) dalam kerangka reformasi birokrasi dan melalui penyediaan belanja barang ditujukan untuk mendukung pengembangan jumlah dan jenis kegiatan pemerintah, serta pembukaan kantor perwakilan RI di luar negeri, selain untuk penyesuaian harga. Perbandingan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2006 dan 2007 dapat dilihat pada **Grafik 17**.

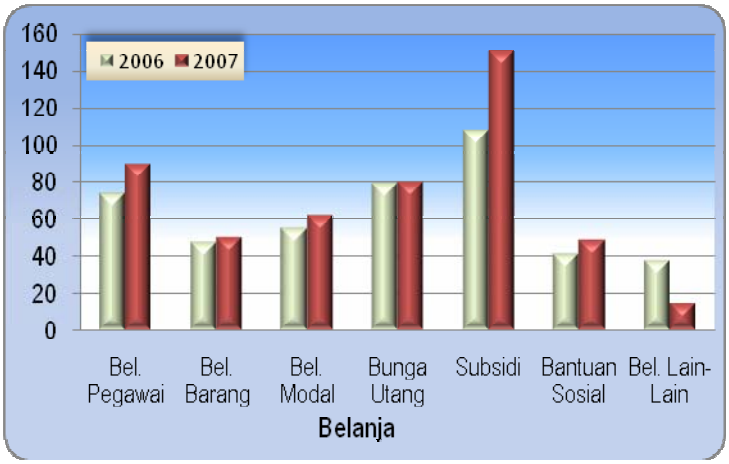

Grafik 17: Perbandingan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2006 & 2007

Alokasi dana kesehatan

Di lain pihak, alokasi dana kesehatan juga meningkat menjadi Rp17,2 triliun antara lain direalisasikan untuk meningkatkan status kesehatan dan gizi masyarakat, menurunkan angka kematian bayi/ibu melahirkan, dan menurunkan prevalensi gizi kurang pada balita melalui bantuan kesehatan gratis, peningkatan jumlah dan fungsi Puskesmas dan Posyandu serta Program Imunisasi Nasional. Selain itu, dana sektor kesehatan juga dialokasikan untuk memerangi wabah flu burung, tuberkulosis, dan meningkatkan partisipasi masyarakat pada program keluarga berencana.

Skema pembangunan infrastruktur

Dalam rangka menggerakkan perekonomian dilakukan pembangunan infrastruktur yang meliputi infrastruktur sumber daya air, transportasi, kelistrikan dan energi, serta perumahan dan permukiman. Anggaran yang disediakan untuk mempercepat pembangunan infrastruktur dan pengelolaan energi ini disediakan sebesar Rp46,7 triliun yang digunakan untuk (1) peningkatan pelayanan infrastruktur sesuai standar pelayanan minimal; (2) peningkatan daya saing sektor riil; (3) peningkatan investasi dalam skema Kerjasama Pemerintah-Swasta; (4) Peningkatan produksi migas dan produksi final migas; (5) percepatan diversifikasi energi melalui pemanfaatan gas bumi, batubara, dan energi baru/terbarukan; (6) peningkatan efisiensi pemanfaatan energi; (7) pemboran air tanah di daerah sulit air; dan (8) inventarisasi geologi daerah di kabupaten/kota dengan prioritas tertentu.

Perbandingan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi pada TA 2006 dan 2007 dapat dilihat pada **Grafik 18**.

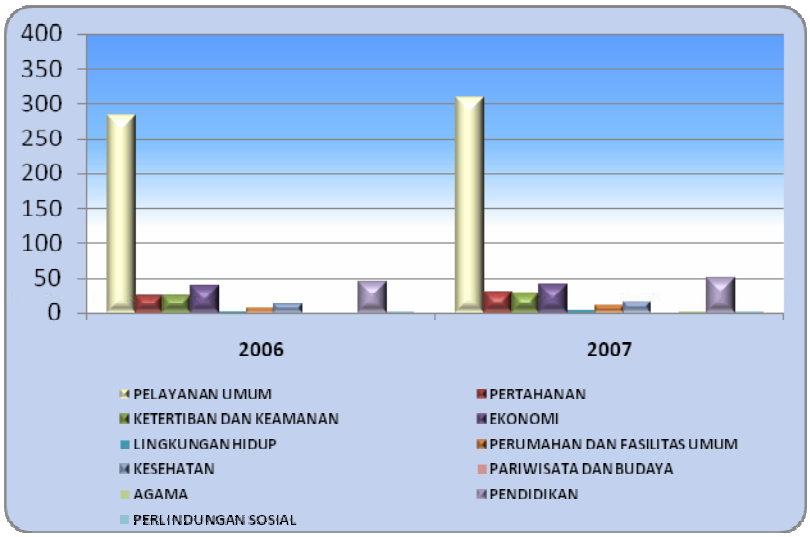

Grafik 18: Perbandingan Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2006 dan 2007

Total Belanja Negara sebesar Rp757,7 triliun

Total realisasi Belanja Negara TA 2007 adalah sebesar Rp757,7 triliun. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat pada TA 2007 adalah sebesar Rp504,6 triliun atau mencapai 101 persen dari yang dianggarkan dan meningkat 14,7 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2006. Peningkatan realisasi belanja Pemerintah Pusat ini antara lain kenaikan anggaran disebabkan oleh perubahan indikator-indikator makroekonomi, terus bergulirnya pembangunan pemerintah yang bertumpu pada *triple track strategy* (*pro growth, pro job* dan *pro poor*) dan faktor-faktor eksternal lainnya. Pada intinya kenaikan tersebut didasari kebijakan pemerintah untuk terus memberikan stimulus fiskal dalam batas-batas kemampuan keuangan negara sekaligus mempertahankan kesinambungan fiskal (*fiscal sustainability)*.

Growth with equity

Pertumbuhan ekonomi yang telah dicapai pada tahun 2007 tidak otomotis atau serta merta mengurangi kemiskinan, pengangguran dan kesenjangan. Minimnya kapasitas SDM kerap menjadi kendala dalam merespon lapangan kerja yang ada. Oleh karena itu Pemerintah berupaya untuk memadukan upaya pengentasan kemiskinan, penciptaan lapangan kerja dan perbaikan kualitas SDM. Upaya tersebut dimanifestasikan melalui peningkatan belanja Pemerintah Pusat yang bertujuan menstimulus pertumbuhan ekonomi telah dibarengi dengan upaya pemerataan *(growth with equity)* terutama melalui pengeluaran untuk program-program pemihakan yang konkrit, intensif dan konsisten untuk pengentasan kemiskinan. Hal ini terbukti dari anggaran subsidi dan program bantuan langsung tunai yang semakin meningkat dengan tujuan untuk memutuskan rantai kemiskinan *(vicious circle of poverty).* Salah satu program unggulan yang dilaksanakan oleh Pemerintah adalah dengan meluncurkan Program Pemberdayaan Masyarakat Madani (PNPM) yang bertujuan membangun kemitraan antara masyarakat dalam menciptakan peluang ekonomi sehingga dapat meningkatkan kualitas kesehatan, pendidikan, pangan dan lainnya.

Subsidi masih merupakan komponen terbesar belanja negara

Jika dilihat dari komposisi belanja pemerintah pusat, maka subsidi merupakan pos APBN yang mendapat alokasi dana terbesar dibanding belanja pemerintah pusat lainnya. Meningkatnya realisasi belanja pemerintah pusat juga terkait dengan program-program pengentasan kemiskinan lain seperti program beras untuk rakyat miskin, bantuan kesehatan gratis, pembangunan perumahan rakyat, bantuan petani, nelayan dan bantuan untuk sekolah/pendidikan melalui peningkatan anggaran pendidikan. Program-program yang direalisasikan melalui eksekusi belanja Pemerintah yang semakin meningkat ini sejalan dengan upaya global yang dicanangkan Perserikatan Bangsa-Bangsa dalam *Millenium Development Goals* yang salah satu tujuannya adalah mengentaskan kemiskinan. Adapun dampak realisasi belanja pemerintah pusat terhadap sektor riil tercermin dari naiknya dana yang direalisasikan untuk subsidi dari Rp107,4 triliun di

tahun 2006 menjadi Rp150,2 triliun di tahun 2007, meskipun secara persentase belanja modal pemerintah terhadap PDB di tahun 2007 sebesar 1,6 persen relatif sama dibanding tahun 2006 yang juga mencapai 1,6 persen (lihat Boks 6). Meningkatnya realisasi belanja modal pemerintah pusat menjadi salah satu sumber stimulus fiskal di tahun 2007.

Boks 6
DAMPAK APBN 2007 TERHADAP SEKTOR RIIL

Teori *Keynesian* telah membuktikan bahwa kebijakan fiskal yang tercermin dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) cukup efektif bagi stimulasi perekonomian suatu negara. Secara logis, APBN 2007 sebagai indikator aktivitas sektor Pemerintahan berdampak materiil bagi semua sektor-sektor yang ada dalam perekonomian yaitu sektor riil, sektor moneter dan sektor eksternal. Terkait dengan sektor riil, APBN 2007 melalui kebijakan insentif perpajakan telah mendorong aktivitas perekonomian yang mendorong peningkatan konsumsi dan investasi. Sedangkan kebijakan alokasi anggaran secara langsung telah mendorong percepatan pertumbuhan ekonomi.

Tabel Dampak APBN Tahun 2007 terhadap Sektor Riil

No.	Rincian	Tahun 2006		Tahun 2007	
		Realisasi (Rp triliun)	% thd PDB	Realisasi (Rp triliun)	% thd PDB
1	Konsumsi Pemerintah (a-b)	**288.08**	**8.6**	**306.22**	**7.7**
	a Belanja Barang dan Jasa	310.90	9.3	327.62	8.3
	Belanja Pegawai	72.87	2.2	90.31	2.3
	Belanja Barang	47.06	1.4	52.93	1.3
	Belanja Rutin Daerah	152.81	4.6	169.01	4.3
	Belanja Lainnya	38.15	1.1	15.58	0.4
	b Pendapatan Barang dan Jasa	22.82	0.7	21.40	0.5
2	Pembentukan Modal Domestik Bruto	**132.50**	**4.0**	**145.85**	**3.7**
	Pemerintah Pusat	58.93	1.8	64.13	1.6
	Pemerintah Daerah	73.57	2.2	81.37	2.1
Jumlah 1 dan 2		**420.58**	**12.6**	**452.07**	**11.4**

Dampak APBN terhadap sektor riil terefleksi dari persentase konsumsi dan investasi Pemerintah terhadap PDB tahun 2007 sebesar 11,42 persen. Secara agregat, nilai ini turun dibandingkan tahun 2006 dengan nilai 12,61 persen. Walaupun secara nominal realisasi belanja modal pemerintah pusat dan daerah naik, namun presentase pembentukan modal domestik bruto terhadap PDB pada tahun 2007 turun (1,6 persen) jika dibandingkan tahun 2006 (1,8 persen). Begitu juga dengan konsumsi total pemerintah yang turun menjadi 7,7 persen dari PDB. Dari angka konsumsi, hanya belanja pegawai yang menunjukkan peningkatan kontribusi terhadap PDB. Hal ini antara lain diakibatkan oleh perbaikan remunerasi sebagai dampak dari reformasi birokrasi pada pemerintahan.

Dari struktur realisasi PDB tahun 2007, investasi fisik (PMTB) berkontribusi sekitar 24,9 persen terhadap total PDB. Dengan asumsi rasio PMTB terhadap tahun 2007 sama dengan tahun 2006, dengan kontribusi PMTB pemerintah tahun 2007 sebesar 4 persen, maka selebihnya 20,9 persen berasal dari sektor swasta.

(Sumber: Realisasi APBN 2007)

Subsidi minyak goreng

Di antara berbagai subsidi yang ada pemerintah juga menyalurkan subsidi sebesar Rp325 milyar pada tahun ini untuk mengatasi dampak kenaikan harga minyak goreng. Subsidi tersebut diberikan dalam dua bentuk yaitu pengurangan tarif PPN sebesar Rp300 milyar dan subsidi langsung melalui operasi pasar sebesar Rp25 milyar. Subsidi tersebut diberikan mengingat kenaikan harga *crude palm oil* (CPO) di pasar dunia mengakibatkan naiknya harga minyak goreng dalam negeri.

Transfer ke Daerah

Realisasi Transfer untuk Daerah pada TA 2007 juga mengalami peningkatan, yaitu sebesar Rp253,3 triliun atau 99,6 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2007. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp27,1 triliun jika dibandingkan dengan realisasi TA 2006. Peningkatan realisasi anggaran Transfer untuk Daerah terkait dengan kebijakan desentralisasi fiskal yang diarahkan untuk (*i*) meningkatkan efisiensi pemanfaatan sumber daya nasional; (*ii*) meningkatkan akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat; (*iii*) mengurangi kesenjangan fiskal antara pusat dan daerah *(vertical fiscal imbalance)* dan antar daerah (*horizontal fiscal imbalance)*; (*iv*) meningkatkan pelayanan publik; serta (*v*) meningkatkan efisiensi melalui anggaran berbasis kinerja.

Komposisi Transfer ke Daerah

Dengan otonomi daerah, Kepala Daerah diberikan kewenangan yang lebih besar, dan sebagai konsekuensinya dalam rangka menjalankan kewenangan itu, bagian APBN yang ditransfer ke daerah untuk dikelola dalam APBD juga semakin meningkat. Alokasi dana perimbangan meningkat yaitu dari hanya Rp216,8 triliun pada TA 2006 menjadi Rp244,6 triliun pada TA 2007 atau naik hampir 12,8 persen. Sedangkan Dana Alokasi Umum yang diprioritaskan untuk gaji dan tunjangan PNS daerah, kesejahteraan pegawai, kegiatan operasi dan pemeliharaan serta pembangunan fisik sarana dan prasarana dalam meningkatkan pelayanan dasar dan pelayanan umum mengalami kenaikan yang cukup signifikan sebesar 12,5 persen dari Rp145,7 trilun pada TA 2006 menjadi Rp164,8 triliun pada TA 2007 dengan realisasi pada tahun 2007 mencapai 100 persen.

Peningkatan DAK

Selain itu, alokasi anggaran untuk Dana Alokasi Khusus juga mengalami peningkatan tajam dari Rp11,6 triliun pada TA 2006 menjadi Rp17,1 triliun pada TA 2007. Sedangkan realisasi DAK TA 2007, mencapai 95 persen yaitu sebesar Rp16,2 triliun dan realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) yang bersumber dari pendapatan negara dalam APBN, baik perpajakan maupun sumber daya alam, yang dibagihasilkan kepada daerah sedikit menurun dari Rp64,9 triliun di TA 2006 menjadi Rp62,9 triliun di TA 2007. Secara keseluruhan kontribusi belanja daerah terhadap PDB tahun 2007 adalah 6,4 persen. Dengan demikian, belanja APBN TA 2007 dapat dikatakan lebih ekspansif dibanding dengan realisasi belanja APBN TA 2006.

Perbandingan Realisasi Dana Perimbangan pada TA 2007 dan 2006 dapat dilihat pada **Grafik 19**.

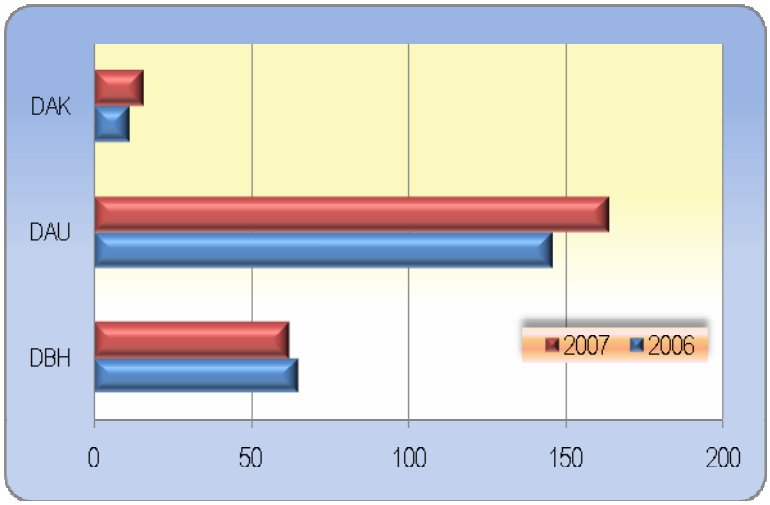

Grafik 19: Perbandingan Realisasi Dana Perimbangan TA 2006 dan 2007

3. Pembiayaan

Defisit Anggaran 1,26 persen dari PDB

Defisit Anggaran TA 2007 adalah sebesar Rp49,8 triliun, atau 1,26 persen dari PDB, yang berarti masih berada di bawah yang telah dianggarkan yaitu Rp58,3 triliun. Namun, defisit ini meningkat 41,6 persen dari defisit TA 2006 sebesar Rp29,14 triliun. Dalam tiga tahun terakhir Pemerintah mengalami defisit yang terus meningkat, akan tetapi keseimbangan primer terus menunjukan perbaikan. Tahun 2007, Pemerintah mengalami defisit sebesar Rp50,0 triliun. Angka ini meningkat dari defisit 2006 senilai Rp29,14 triliun dan Rp14,41 triliun tahun 2005. Peningkatan defisit antara lain disebabkan oleh adanya penambahan biaya di beberapa departemen dan lembaga/instansi pemerintah.

Namun demikian, keseimbangan primer terus menurun dengan nilai sebesar Rp29,80 triliun. Keseimbangan primer yang positif atau lebih besar nilainya dari defisit fiskal menunjukkan bahwa permasalahan utama fiskal juga disebabkan oleh akumulasi utang dari aktivitas pinjaman pemerintah di waktu-waktu yang lalu. Keseimbangan primer yang menurun di tahun 2007 menunjukkan beban bunga Pemerintah yang semakin menurun. Grafik defisit dan keseimbangan primer tergambar dalam **Grafik 20**.

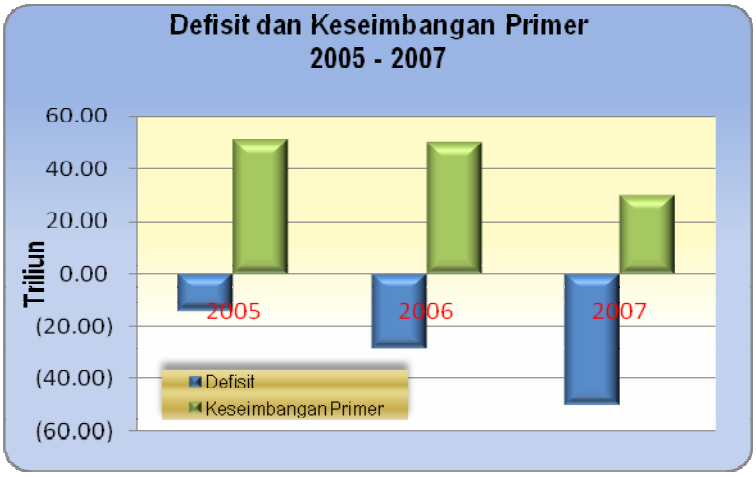

Grafik 20: Defisit dan Kesimbangan Primer 2005-2007

Sementara itu, angka rasio defisit terhadap PDB selama tiga tahun juga terus meningkat di mana pada tahun 2007 mencapai sebesar 1,26%. Namun demikian, tingkat *solvency* tetap mendapat perhatian dari Pemerintah yang ditunjukkan dengan upaya penurunan rasio utang terhadap PDB *(debt ratio)* dari tahun ke tahun. Di samping itu, di masa yang akan datang Pemerintah akan terus berupaya untuk melakukan efisiensi pengeluaran dan menggenjot pendapatan dalam rangka mengurangi defisit fiskal. Rasio defisit terhadap PDB tiga tahun terakhir tergambar pada **Grafik 21**.

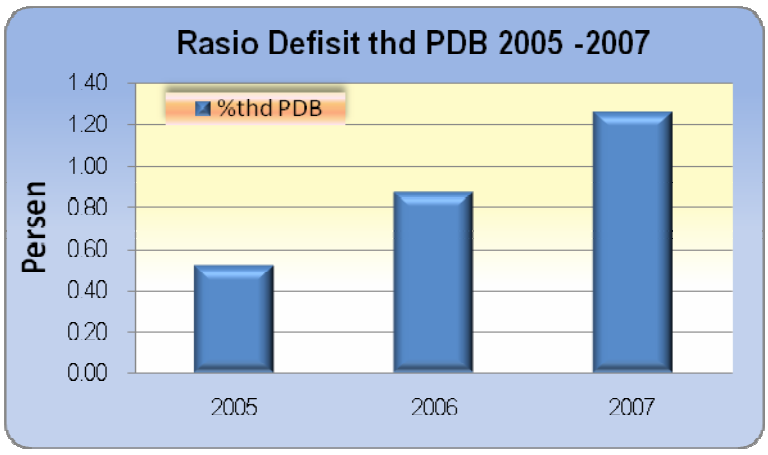

Grafik 21: Rasio Defisit terhadap PDB

Realisasi Pembiayaan Anggaran mencapai Rp42,5 triliun

Realisasi Pembiayaan Anggaran pada TA 2007 mencapai Rp42,5 triliun atau 1,2 persen dari PDB atau 72,8 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P TA 2007 sebesar Rp58,3 triliun. Jumlah tersebut menunjukkan peningkatan sebesar Rp12,7 triliun dibandingkan dengan realisasi TA 2006. Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2007 adalah sebesar Rp66,3 triliun atau 94 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2007. Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2006 yang meningkat tajam dibanding dengan realisasi TA 2005 digunakan untuk menutup defisit anggaran yang meningkat. Namun demikian, terdapat perbaikan struktur sumber pembiayaan dimana defisit anggaran negara dibiayai melalui penerbitan Surat Utang Negara (SUN) yaitu 86 persen dari total sumber pembiayaan dalam negeri. Hal ini sesuai dengan fokus Pemerintah untuk membiayai defisit anggaran dengan penerbitan obligasi negara.

Aktifitas perdagangan SUN

Kondisi pasar SUN selama tahun 2007 diwarnai dengan meningkatnya aktivitas perdagangan SUN. Hal ini tercermin dari meningkatnya volume rata-rata perdagangan SUN harian dari sekitar Rp4,6 triliun per hari pada bulan Januari 2007 menjadi Rp5,5 triliun per hari pada bulan Desember 2007. Hal ini seiring dengan tren tahun sebelumnya yang cenderung menunjukkan kenaikan sampai akhir tahun. Perbaikan kondisi makro ekonomi yang ditandai dengan rendahnya inflasi dan turunnya suku bunga referensi Bank Indonesia, diikuti dengan kestabilan politik dan peningkatan *rating|outlook sovereign credit* masih menjadi *driver* utama peningkatan aktivitas perdagangan SUN tahun 2007.

Kepemilikan SUN

Sementara itu, kepemilikan SUN per akhir tahun 2007 menunjukkan *shifting* dari investor perbankan ke kelompok investor lainnya. Hal ini dapat dilihat dari menurunnya kepemilikan SUN pada perbankan dari Rp269 triliun pada akhir tahun 2006 menjadi Rp268 triliun pada akhir tahun 2007. Kelompok investor lain hampir semua mengalami peningkatan, kecuali Dana Pensiun yang cenderung stagnan. Khusus untuk investor asing terdapat peningkatan investasi portofolio yang sangat signifikan, dari Rp55 triliun pada akhir tahun 2006 menjadi Rp78 triliun pada akhir tahun 2007. Hal ini menunjukkan tingkat kepercayaan investor asing yang semakin meningkat terhadap SUN. Pada saat bersamaan, meningkatnya kepemilikan SUN oleh pihak asing juga perlu dicermati, khususnya terkait dengan risiko *sudden reversal* yang berpotensi membahayakan pasar SUN secara keseluruhan. Akan tetapi, pasar SUN domestik terbukti mempunyai daya tahan (*resilience*) yang baik karena penurunan kepemilikan asing saat terjadi krisis *subprime mortgage* tidak menyebabkan *mass redemption* dan proses *recovery* terjadi dalam waktu yang relatif singkat.

Target SUN Neto

Target APBN atas pengelolaan SUN terkait dalam tiga pos yaitu pos SUN (Neto), Bunga Utang Dalam Negeri, dan Bunga Utang Luar Negeri. Mulai tahun 2005, DPR telah menyetujui penerapan konsep net penerbitan SUN. Net penerbitan SUN adalah selisih antara SUN yang diterbitkan dengan yang jatuh tempo dan yang dibeli kembali. Mengingat target pembiayaan SUN di APBN ditetapkan dalam bentuk net penerbitan SUN, maka Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah penerbitan SUN dan jumlah pembelian kembali. Untuk tahun 2007 target net penerbitan SUN (SUN neto) ditetapkan sebesar Rp58,5 triliun. Realisasinya mencapai Rp57,5 triliun sehingga terdapat kekurangan dari target sebesar Rp1 triliun.

Pembiayaan lainnya

Pembiayaan lainnya berasal dari privatisasi dan penjualan aset program restrukturisasi dan perbankan dalam negeri. Sedangkan pembiayaan perbankan dalam negeri berasal dari rekening Pemerintah seperti rekening dana investasi (RDI), rekening penjaminan, dan rekening pemerintah lainnya. Pembiayaan melalui RDI ditujukan untuk membayar sebagian utang luar negeri, membiayai keperluan yang berhubungan dengan penyediaan kebutuhan dasar masyarakat, keberhasilan program Pemerintah, menjamin ketersediaan barang guna menghindarkan kemungkinan terjadinya kerawanan sosial dan mempercepat perkembangan produk perbankan yang mampu mendorong kegiatan ekonomi serta pembelian kembali SUN. Selama tahun 2007, RDI menyumbang sekitar Rp2,7 triliun ke kas negara. Realisasi pembiayaan luar negeri tahun 2007 adalah sebesar minus Rp23,9 triliun atau 190 persen dari pagu anggarannya dalam APBN-P TA 2007. Pembiayaan luar negeri bersaldo minus karena pembayaran cicilan pokok utang luar negeri lebih besar dibandingkan dengan penarikan pinjaman luar negeri.

Tabel 3
Persentase Anggaran dan Realisasi APBN TA 2007 Terhadap PDB

Uraian	2007			
	APBN-P (Rp triliun)	% thd PDB	Realisasi (Rp triliun)	% thd PDB
Pendapatan Negara dan Hibah				
1. Penerimaan Perpajakan	492,0	12,4	491,0	12,4
a. Pajak Dalam Negeri	474,6	12,0	470,1	11,9
b. Pajak Perdagangan Internasional	17,5	0,4	20,9	0,53
2. Penerimaan Negara Bukan Pajak	198,3	5,0	215,1	5,4
a. SDA	115,1	2,9	132,9	3,3
b. Bagian Laba BUMN	21,8	0,6	23,2	0,6
c. PNBP Lainnya	61,4	1,6	59,0	1,5
3. Hibah	3,8	0,1	1,7	0,04
Jumlah Pendapatan Negara dan Hibah	694,1	17,5	707,6	17,9
Belanja Negara				
Belanja Pemerintah Pusat				
1. Belanja Pegawai	92,8	2,4	90,4	2,3
2. Belanja Barang	65,3	1,7	54,5	1,4
3. Belanja Modal	75,0	1,9	64,3	1,6
4. Pembayaran Bunga Utang	83,6	2,1	79,8	2,0
5. Subsidi	105,1	2,7	150,2	3,8
6. Bantuan Sosial	50,6	1,3	49,8	1,3
7. Belanja Lainnya	25,8	0,7	15,6	0,4
Jumlah Belanja Pemerintah Pusat	498,2	12,6	504,6	12,7
Transfer untuk Daerah				
1. Dana Perimbangan	244,6	6,2	243,9	6,2
a. DBH	62,7	1,6	62,9	1,6
b. DAU	164,8	4,2	164,8	4,2
c. DAK	17,1	0,4	16,2	0,4
2. Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian	9,6	0,2	9,3	0,2
a. Dana Otonomi Khusus	4,1	0,1	4,0	0,1
b. Dana Penyesuaian	5,6	0,1	5,3	0,1
Jumlah Transfer untuk Daerah	254,2	6,4	253,3	6,4
Defisit Anggaran	58,3	1,5	49,8	1,3
Pembiayaan	58,3	1,5	42,5	1,1

Keterangan
PDB sebesar Rp 3.957,4 triliun (BPS)

Tabel 4
Perbandingan Indikator Ekonomi Tahun 2007 dan 2006

No.	Indikator	2006	2007	Ket
1	Nilai PDB Harga Konstan Tahun 2000 (Rp Triliun)	1.846,7	1.964,0	(1)
2	Nilai PDB Harga yang Berlaku (Rp Triliun)	3.338,2	3.957,4	(1)
3	PDB per kapita (Rp Juta)	15,0	16,4	(1)
4	Pertumbuhan PDB (%)	5,0	6,3	(1)
5	Inflasi (%)	6,6	6,6	(1)
6	Total Ekspor (USD Miliar)	100,7	113,9	(1)
7	Ekspor Non Migas (USD Miliar)	79,5	91,9	(1)
8	Total Impor (USD Miliar)	61,1	74,4	(1)
9	Impor Non Migas (USD Miliar)	42,1	52,5	(1)
10	Cadangan Devisa (USD Miliar, akhir tahun)	42,0	56,9	(2)
11	Rupiah/USD (Kurs Tengah Bank Indonesia)	9.020,0	9.419,0	(2)
12	Total Pendapatan Negara (Rp Triliun)	637,8	707,6	(4)
13	Total Belanja Negara (Rp Triliun)	670,7	757,7	(4)
14	Defisit Anggaran (Rp Triliun)	29,1	49,8	(4)
15	Uang Primer (Rp Triliun)	297,1	379,6	(2)
16	Uang Beredar (Rp Triliun)			
	a. Arti Sempit (M1)	342,6	460,8	(2)
	b. Arti Luas (M2)	1.338,5	1,888,1	(2)
17	Kredit Perbankan (Rp Triliun)	761,6	787,1	(2)
18	Suku Bunga (% per tahun)			
	a. SBI satu bulan	9,5	9,75	(2)
	b. Deposito 1 bulan	9,8	8,96	(2)
	c. Kredit Modal Kerja	15,4	15,1	(2)
	d. Kredit Investasi	15,4	15,1	(2)
19	Persetujuan Investasi			
	a. Domestik (Rp triliun)	143,7	162,8	(5)
	b. Asing (USD Miliar)	13,2	15,7	(5)
20	IHSG BEJ	1.805,0	1.805,5	(4)
21	Peringkat Daya Saing Indonesia	50,0	50,0	
22	Rasio Utang terhadap PDB (DSR,%)	39,0	36,0	(3)

Sumber:

(1) Badan Pusat Statistik
(2) Bank Indonesia
(3) Badan Kebijakan Fiskal, Dep. Keuangan
(4) Laporan Realisasi APBN, Dep. Keuangan
(5) Badan Koordinasi Penanaman Modal

A.3. PENDEKATAN PENYUSUNAN LAPORAN KEUANGAN

Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) Tahun 2007 mencakup seluruh aspek keuangan yang dikelola oleh seluruh entitas Pemerintah Pusat, yang terdiri dari Bendahara Umum Negara (BUN) dan kementerian negara/lembaga, beserta jenjang struktural di bawahnya seperti eselon I, kantor wilayah, serta satuan kerja yang bertanggung jawab atas otorisasi kredit anggaran yang diberikan kepadanya termasuk satuan kerja Badan Layanan Umum (BLU) dan satuan kerja pengguna dana dekonsentrasi dan tugas pembantuan. LKPP disusun berdasarkan kompilasi data/laporan keuangan kementerian negara/lembaga, laporan keuangan BUN, dan data lainnya dari unit-unit yang terkait.

Untuk LKPP Tahun 2007, entitas pelaporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga dan entitas akuntansi tingkat satuan kerja (satker) di bawahnya yang dicakup meliputi:

Daftar entitas pelaporan keuangan tingkat kementerian negara/lembaga

No.	Bagian Anggaran	Kementerian Negara/Lembaga	Jumlah Satker
1.	BA 001	Majelis Permusyawaratan Rakyat	2
2.	BA 002	Dewan Perwakilan Rakyat	2
3.	BA 004	Badan Pemeriksa Keuangan	24
4.	BA 005	Mahkamah Agung	786
5.	BA 006	Kejaksaan Agung	489
6.	BA 007	Sekretariat Negara	13
7.	BA 010	Departemen Dalam Negeri	882
8.	BA 011	Departemen Luar Negeri	131
9.	BA 012	Departemen Pertahanan	254
10.	BA 013	Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia	751
11.	BA 015	Departemen Keuangan	1.099
12.	BA 018	Departemen Pertanian	2.363
13.	BA 019	Departemen Perindustrian	112
14.	BA 020	Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral	89
15.	BA 022	Departemen Perhubungan	704
16.	BA 023	Departemen Pendidikan Nasional	396
17.	BA 024	Departemen Kesehatan	1.298
18.	BA 025	Departemen Agama	4.019
19.	BA 026	Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi	1.348
20.	BA 027	Departemen Sosial	206
21.	BA 029	Departemen Kehutanan	334
22.	BA 032	Departemen Kelautan dan Perikanan	687
23.	BA 033	Departemen Pekerjaan Umum	982
24.	BA 034	Kementerian Koordinator Bidang Politik dan Keamanan	1
25.	BA 035	Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian	1
26.	BA 036	Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat	1
27.	BA 040	Departemen Kebudayaan dan Pariwisata	53
28.	BA 041	Kementerian Negara Badan Usaha Milik Negara	1
29.	BA 042	Kementerian Negara Riset dan Teknologi	12
30.	BA 043	Kementerian Negara Lingkungan Hidup	17
31.	BA 044	Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah	36
32.	BA 047	Kementerian Negara Pemberdayaan Perempuan	7
33.	BA 048	Kementerian Negara Pendayagunaan Aparatur Negara	1
34.	BA 050	Badan Intelijen Negara	1
35.	BA 051	Lembaga Sandi Negara	1
36.	BA 052	Dewan Ketahanan Nasional	1

37.	BA 054	Badan Pusat Statistik	435
38.	BA 055	Kementerian Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/ Badan Perencanaan Pembangunan Nasional	1
39.	BA 056	Badan Pertanahan Nasional	429
40.	BA 057	Perpustakaan Nasional	31
41.	BA 059	Departemen Komunikasi dan Informatika	56
42.	BA 060	Kepolisian Negara Republik Indonesia	956
43.	BA 063	Badan Pengawasan Obat dan Makanan	35
44.	BA 064	Lembaga Ketahanan Nasional	1
45.	BA 065	Badan Koordinasi Penanaman Modal	8
46.	BA 066	Badan Narkotika Nasional	8
47.	BA 067	Kementerian Negara Pembangunan Daerah Tertinggal	38
48.	BA 068	Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional	42
49.	BA 074	Komisi Nasional Hak Asasi Manusia	1
50.	BA 075	Badan Meteorologi dan Geofisika	185
51.	BA 076	Komisi Pemilihan Umum	474
52.	BA 077	Mahkamah Konstitusi	1
53.	BA 078	Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan	1
54.	BA 079	Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia	51
55.	BA 080	Badan Tenaga Nuklir Nasional	22
56.	BA 081	Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi	23
57.	BA 082	Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional	18
58.	BA 083	Badan Koordinasi Survey dan Pemetaan Nasional	4
59.	BA 084	Badan Standarisasi Nasional	1
60.	BA 085	Badan Pengawas Tenaga Nuklir	3
61.	BA 086	Lembaga Administrasi Negara	15
62.	BA 087	Arsip Nasional Republik Indonesia	33
63.	BA 088	Badan Kepegawaian Negara	13
64.	BA 089	Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan	31
65.	BA 090	Departemen Perdagangan	134
66.	BA 091	Kementerian Negara Perumahan Rakyat	5
67.	BA 092	Kementerian Negara Pemuda dan Olahraga	35
68.	BA 093	Komisi Pemberantasan Korupsi	1
69.	BA 094	Badan Rekonstruksi dan Rehabilitasi NAD dan Nias	119
70.	BA 095	Dewan Perwakilan Daerah	1
71.	BA 100	Komisi Yudisial	1
72.	BA 103	Badan Koordinasi Nasional Penanganan Bencana	1
73.	BA 104	Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia	1
74.	BA 105	Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo	1
75.	BA 061	Cicilan Bunga Utang	-
76.	BA 062	Subsidi dan Transfer	-
77.	BA 069	Belanja Lain-lain	-
78.	BA 070	Dana Perimbangan	-
79.	BA 071	Dana Penyesuaian dan Dana Otonomi Khusus	-
80.	BA 096	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri	-
81.	BA 097	Pembayaran Cicilan Pokok Utang Dalam Negeri	-
82.	BA 098	Penerusan Pinjaman	-
83.	BA 099	Penyertaan Modal Negara	-
84.	BA 101	Penerusan Pinjaman sebagai Hibah	-
85.	BA 102	Penerusan Hibah	-
		Total	21.796

LKPP Tahun 2007 ini mencakup transaksi-transaksi sebagai berikut:

- transaksi keuangan yang berasal dari APBN, termasuk dana APBN yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yaitu dana dekonsentrasi dan dana tugas pembantuan;
- transaksi pelaksanaan APBN pada beberapa unit-unit fiskal register/kuasi organisasi pemerintah, seperti pada Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam (Otorita Batam), Otorita Asahan, Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas (BPH Migas), Televisi Republik Indonesia (TVRI), dan Radio Republik Indonesia (RRI);
- transaksi keuangan terbatas dari unit-unit fiskal register yang tidak menggunakan dana APBN, namun mengelola aset pemerintah, seperti Badan Pengelola Minyak dan Gas (BP Migas), BP Gelora Bung Karno, BP Komplek Kemayoran, Lembaga Penjamin Simpanan (LPS), dan BP3 Taman Mini Indonesia.

LKPP Tahun 2007 ini tidak mencakup entitas:

- Pemerintahan Daerah;
- Badan Usaha Milik Negara (BUMN);
- Badan Hukum Milik Negara (BHMN); dan
- Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

Namun, penyertaan modal (investasi) pemerintah pada perusahaan negara (BUMN dan Non BUMN) serta BHMN, nilainya disajikan sebagai investasi pemerintah dan dijabarkan dalam Ikhtisar Laporan Keuangan Perusahaan Negara/Badan Lainnya.

LKPP dihasilkan melalui Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP), yang terdiri dari Sistem Akuntansi Pusat (SiAP) dan Sistem Akuntansi Instansi (SAI). SAI diselenggarakan oleh kementerian negara/lembaga secara berjenjang mulai dari tingkat satker (Kuasa Pengguna Anggaran) sampai tingkat kementerian negara/lembaga (Pengguna Anggaran), untuk menghasilkan laporan realisasi anggaran dan neraca. SAI terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN). SAK diselenggarakan untuk membukukan transaksi anggaran (Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran), pendapatan, belanja, serta data neraca. Sedangkan SABMN diselenggarakan untuk membukukan data barang milik negara (aset tetap dan persediaan) dalam rangka menghasilkan data neraca.

Sementara itu, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) membukukan transaksi penerimaan dan pengeluaran kas melalui SiAP. SiAP diselenggarakan secara berjenjang mulai dari tingkat KPPN selaku Kuasa BUN sampai tingkat BUN Pusat. SiAP terdiri dari 2 (dua) subsistem, yaitu Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN) dan Sistem Akuntansi Umum (SAU). SAKUN diselenggarakan untuk menghasilkan Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat, sedangkan SAU diselenggarakan untuk membukukan data yang akan direkonsiliasi dengan data yang dibukukan SAI. SAPP dan subsistemnya disajikan pada diagram di bawah ini.

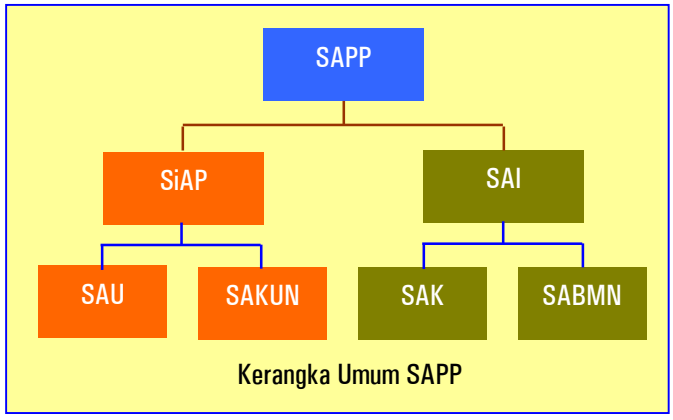

Kerangka Umum SAPP

Sementara itu, alur penyusunan LKPP dapat digambarkan pada diagram di bawah ini:

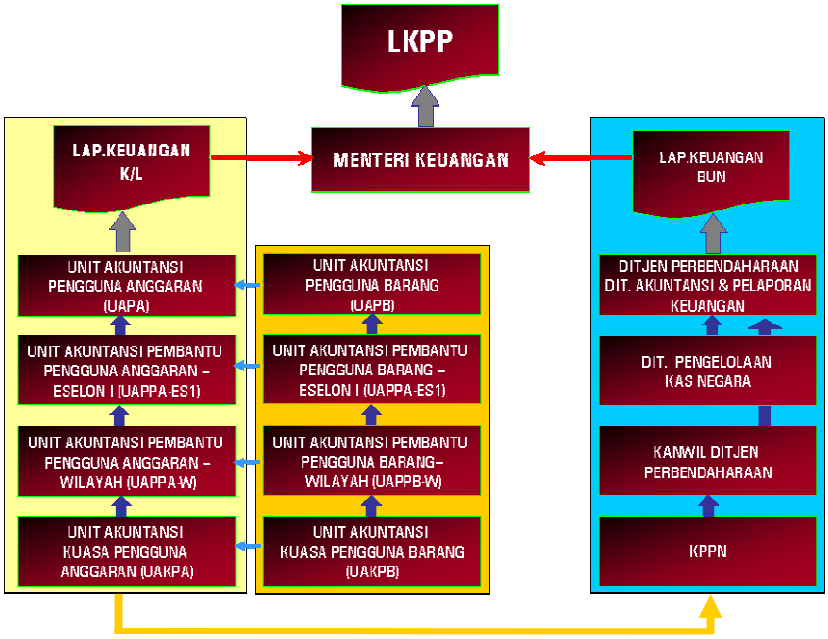

Alur Penyusunan LKPP

SAPP dirancang untuk menghasilkan LKPP yang terdiri dari:

1. Laporan Realisasi Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN)

   Laporan Realisasi APBN disusun berdasarkan kompilasi Laporan Realisasi Anggaran seluruh entitas pelaporan kementerian negara/lembaga dan entitas pelaporan BUN. Laporan Realisasi APBN terdiri dari Pendapatan Negara dan Hibah, Belanja Negara, dan Pembiayaan.

   - Angka realisasi Pendapatan Negara dan Hibah yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2007 berdasarkan data penerimaan kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN sebagai pembukuan intrakomtabel atas seluruh penerimaan uang yang riil masuk ke Kas Negara. Sedangkan data realisasi Pendapatan Negara dan Hibah kementerian negara/lembaga berfungsi sebagai penguji (kontrol) data BUN.
   - Angka realisasi Belanja Negara yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2007 berdasarkan kompilasi realisasi belanja negara seluruh entitas kementerian negara/lembaga, di mana pengguna anggaran bertanggung jawab penuh atas seluruh pengeluaran yang dibelanjakannya. Sedangkan data realisasi pengeluaran yang dikelola oleh BUN (data SAU) berfungsi sebagai penguji (kontrol) data belanja kementerian negara/lembaga.
   - Angka realisasi Pembiayaan yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2007 berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN.

2. Neraca

   Neraca Pemerintah Pusat disusun berdasarkan kompilasi Neraca Kementerian Negara/Lembaga dan data yang dikelola Departemen Keuangan, Kementerian Negara BUMN, dan unit register, serta unit-unit terkait lainnya yang mengelola dan/atau menguasai aset pemerintah. Data mengenai Kas Umum Negara dan Non Anggaran,

investasi jangka panjang, dan kewajiban jangka panjang didasarkan pada data Departemen Keuangan. Sedangkan data Penyertaan Modal Negara berasal dari Kementerian Negara BUMN. Data mengenai Kas di Bendahara Penerimaan, Kas di Bendahara Pengeluaran, Piutang, Persediaan, Aset Tetap, dan Aset Lainnya didasarkan pada Neraca Kementerian Negara/Lembaga. Neraca Kementerian Negara/Lembaga disusun melalui SAI.

3. Laporan Arus Kas

   Laporan Arus Kas disusun berdasarkan data penerimaan dan pengeluaran kas yang dikelola oleh Menteri Keuangan selaku BUN. Laporan Arus Kas TA 2007 mencakup data penerimaan dan pengeluaran kas melalui rekening KPPN (rekening 501.000000) dan rekening BUN (rekening 502.000000). Laporan Arus Kas disusun dengan menggunakan SAKUN yang merupakan subsistem dari SiAP.

4. Catatan atas Laporan Keuangan

   Catatan atas Laporan Keuangan menyajikan informasi tentang analisis makro ekonomi, penjelasan atau daftar terinci atau analisis atas nilai suatu pos yang disajikan dalam Laporan Realisasi APBN, Neraca Pemerintah Pusat, dan Laporan Arus Kas dalam rangka pengungkapan yang memadai.

Implementasi SAI pada kementerian negara/lembaga pada tahun 2007 mengalami kemajuan bila dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini terbukti dari kenyataan bahwa pada tahun 2007 seluruh kementerian negara/lembaga telah menyelenggarakan SAI dalam menyusun laporan keuangan, kecuali Departemen Pertahanan. Namun demikian, diakui bahwa masih terdapat permasalahan-permasalahan terutama organisasi dan kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan yang masih rendah.

Dalam rangka meningkatkan kualitas sumber daya manusia di bidang akuntansi dan pelaporan keuangan, mulai tahun 2007, Pemerintah melalui Program Percepatan Akuntabilitas Keuangan Pemerintah (PPAKP) di Departemen Keuangan melaksanakan pelatihan akuntansi pemerintahan bagi pelaksana akuntansi untuk seluruh jajaran satuan kerja kementerian negara/lembaga secara bertahap.

Permasalahan lain yang cukup berpengaruh dalam penyusunan LKPP adalah implementasi SABMN di sebagian besar kementerian negara/lembaga yang masih belum berjalan dengan baik. Selain itu, sebagian kementerian negara/lembaga belum melakukan inventarisasi fisik dan revaluasi atas nilai barang milik negara. Hal ini mempengaruhi kualitas nilai aset yang ada di Neraca Pemerintah Pusat. Untuk mengatasi permasalahan tersebut, mulai tahun 2007, Pemerintah mulai melaksanakan penertiban barang milik negara dengan melakukan inventarisasi fisik dan penilaian atas nilai barang milik negara pada beberapa kementerian negara/lembaga.

A.4. KEBIJAKAN AKUNTANSI

Laporan Realisasi APBN disusun dengan menggunakan basis kas yaitu basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima pada Kas Umum Negara (KUN) atau dikeluarkan dari KUN.

Penyajian aset, kewajiban, dan ekuitas dana dalam Neraca diakui berdasarkan basis akrual, yaitu pada saat diperolehnya hak atas aset dan timbulnya kewajiban tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dikeluarkan dari KUN.

Penyusunan dan penyajian LKPP Tahun 2007 telah mengacu pada Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) yang telah ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan. Dengan demikian, dalam penyusunan LKPP telah diterapkan kaidah-kaidah pengelolaan keuangan yang sehat di lingkungan pemerintahan.

Prinsip-prinsip akuntansi yang digunakan dalam penyusunan LKPP adalah:

(1) Pendapatan

Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN.

Pendapatan adalah semua penerimaan KUN yang menambah ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah pusat dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah pusat. Pendapatan diakui pada saat kas diterima pada KUN. Akuntansi pendapatan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Pendapatan disajikan sesuai dengan jenis pendapatan.

Pengecualian terhadap azas bruto pada penyusunan LKPP Tahun 2007 adalah untuk penerimaan minyak dan gas bumi (migas) yang ditampung dalam rekening antara (rekening 600.000.411) dan penerimaan panas bumi (rekening 508.000.084). Hal ini dilandasi bahwa *earnings process* atas penerimaan migas dan panas bumi tersebut belum selesai karena penerimaan migas pada rekening 600.000.411 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084 masih harus memperhitungkan unsur-unsur kewajiban Pemerintah seperti *under/over lifting*, DMO, dan pengembalian PPN dan PBB. Penerimaan migas pada rekening 600.000.411 dan penerimaan panas bumi pada rekening 508.000.084 diakui sebagai "Pendapatan yang Ditangguhkan". Selanjutnya, terhadap pengeluaran-pengeluaran kewajiban Pemerintah yang membebani rekening tersebut akan dikeluarkan terlebih dahulu, baru kemudian disetor ke Kas Negara sebagai penerimaan negara (PNBP).

(2) Belanja

Belanja diakui pada saat kas keluar dari KUN

Belanja adalah semua pengeluaran KUN yang mengurangi ekuitas dana lancar dalam periode tahun yang bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah pusat. Belanja diakui pada saat terjadi pengeluaran kas dari KUN. Khusus pengeluaran melalui bendahara pengeluaran, pengakuan belanja terjadi pada saat pertanggungjawaban atas pengeluaran tersebut disahkan oleh Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN). Belanja disajikan pada muka (*face*) laporan keuangan menurut klasifikasi ekonomi/jenis belanja, sedangkan pada Catatan atas Laporan Keuangan, belanja disajikan menurut klasifikasi organisasi dan fungsi.

(3) Pembiayaan

Pembiayaan diakui pada saat kas diterima/keluar dari KUN

Pembiayaan adalah seluruh transaksi keuangan Pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran Pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran. Pembiayaan diakui pada saat kas diterima pada KUN serta pada saat terjadinya pengeluaran kas dari KUN. Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan azas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah netonya (setelah dikompensasi dengan pengeluaran).

(4) Aset

Aset terdiri dari Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya

Aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan/atau dimiliki oleh Pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan/atau sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh, baik oleh Pemerintah maupun oleh masyarakat, serta dapat diukur dalam satuan uang, termasuk sumber daya non-keuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara

karena alasan sejarah dan budaya. Dalam pengertian aset ini tidak termasuk sumber daya alam seperti hutan, kekayaan di dasar laut, dan kandungan pertambangan. Aset diakui pada saat diterima atau pada saat hak kepemilikan berpindah.

Aset diklasifikasikan menjadi Aset Lancar, Investasi, Aset Tetap, dan Aset Lainnya.

a. Aset Lancar

Aset Lancar terdiri dari kas, piutang, dan persediaan

Suatu aset diklasifikasikan sebagai Aset Lancar jika berupa kas dan setara kas serta diharapkan segera untuk direalisasikan, dipakai, atau dimiliki untuk dijual dalam waktu 12 (dua belas) bulan sejak tanggal pelaporan. Aset lancar ini terdiri dari kas, piutang, dan persediaan.

Kas disajikan di neraca dengan menggunakan nilai nominal. Kas dalam bentuk valuta asing disajikan di neraca dengan menggunakan kurs tengah BI pada tanggal neraca.

Piutang dinyatakan dalam neraca menurut nilai yang timbul berdasarkan hak yang telah dikeluarkan surat keputusan penagihannya. Temasuk dalam pos Piutang adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Persediaan adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintah, dan barang-barang yang dimaksudkan untuk dijual dan/atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Persediaan dicatat pada neraca berdasarkan:
- harga pembelian terakhir, apabila diperoleh dengan pembelian,
- harga standar apabila diperoleh dengan memproduksi sendiri,
- harga wajar atau estimasi nilai penjualannya apabila diperoleh dengan cara lainnya seperti donasi/rampasan.

b. Investasi

Investasi Jangka Panjang terdiri dari Investasi Non Permanen dan Investasi Permanen.

Investasi adalah aset yang dimaksudkan untuk memperoleh manfaat ekonomik seperti bunga, dividen dan royalti, atau manfaat sosial sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.

Investasi pemerintah diklasifikasikan kedalam investasi jangka pendek dan investasi jangka panjang. Investasi jangka pendek adalah investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki dalam kurun waktu setahun atau kurang. Investasi jangka panjang adalah investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki selama lebih dari setahun. Penyajian investasi pada Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007 terbatas pada investasi jangka panjang.

Investasi jangka panjang dibagi menurut sifat penanaman investasinya, yaitu non permanen dan permanen.

(i) Investasi Non Permanen

Investasi non permanen adalah investasi jangka panjang yang tidak termasuk dalam investasi permanen dan dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan. Investasi non permanen sifatnya bukan penyertaan modal saham melainkan berupa pinjaman jangka panjang yang dimaksudkan untuk pembiayaan investasi perusahaan negara/daerah, pemerintah daerah, dan pihak ketiga lainnya.

Investasi Non Permanen meliputi:

- Seluruh dana pemerintah yang bersumber dari dana pinjaman luar negeri yang diteruspinjamkan melalui *Subsidiary Loan Agreement* (SLA), dan dana dalam

negeri dalam bentuk Rekening Dana Investasi (RDI) dan Rekening Pembangunan Daerah (RPD) yang dipinjamkan kepada BUMN/BUMD dan Pemda.

- Seluruh dana pemerintah yang diberikan dalam bentuk Pinjaman Dana Bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM), nasabah Lembaga Dana Kredit Pedesaan (LDKP), nasabah Usaha Simpan Pinjam/Tempat Simpan Pinjam (USP/TSP) atau nasabah BPR.
- Seluruh pencairan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) eks dana Surat Utang (SU) 005 yang disalurkan melalui dua pola sebagai berikut:

  a. Dana SU-005 dipinjamkan langsung oleh Pemerintah kepada Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP) yang ditunjuk oleh Pemerintah c.q. Menteri Keuangan dalam rangka pendanaan KUMK;

  b. Dana SU-005 dipinjamkan kepada BUMN Pengelola dan selanjutnya diteruspinjamkan kepada LKP yang ditunjuk oleh BUMN Pengelola yang bersangkutan dalam rangka pendanaan KUMK.

Selain itu, dana kelolaan berupa kas dan pos aset lainnya beserta nilai tambahnya yang dikelola oleh Badan Layanan Umum Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP) di Departemen Keuangan yang berasal dari BA 099 (Penyertaan Modal Negara) disajikan sebagai investasi non permanen dalam LKPP, sesuai dengan PSAP Nomor 6 tentang Akuntansi Investasi Paragraf 16.

(ii) Investasi Permanen

Investasi Permanen adalah investasi jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan. Investasi permanen dimaksudkan untuk mendapatkan dividen atau menanamkan pengaruh yang signifikan dalam jangka panjang. Investasi permanen meliputi seluruh Penyertaan Modal Negara (PMN) pada perusahaan negara, lembaga internasional, dan badan usaha lainnya yang bukan milik negara. PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disebut sebagai Badan Usaha Milik Negara/Badan Hukum Milik Negara (BUMN/BHMN). PMN pada badan usaha atau badan hukum lainnya yang kurang dari 51 persen (minoritas) disebut sebagai Non BUMN.

PMN dapat berupa surat berharga (saham) pada suatu perseroan terbatas dan non surat berharga, yaitu kepemilikan modal bukan dalam bentuk saham pada perusahaan yang bukan perseroan.

Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada BUMN disajikan sebagai Investasi Permanen PMN. Dengan demikian, aset-aset yang berstatus BPYBDS yang telah dilaporkan pada neraca kementerian negara/lembaga akan dieliminasi pada saat konsolidasi LKPP.

Nilai PMN pada BUMN/BHMN dengan persentase kepemilikan sama dengan atau lebih dari 51 (lima puluh satu) persen disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*). Nilai PMN pada perusahaan minoritas (Non BUMN) dengan kepemilikan 20 (dua puluh) persen atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20 (dua puluh) persen menggunakan metode biaya (*cost method*).

Penilaian investasi jangka panjang diprioritaskan menggunakan metode ekuitas. Jika suatu investasi bisa dipastikan tidak akan diperoleh kembali atau terdapat bukti bahwa investasi hendak dilepas, maka digunakan metode nilai bersih yang direalisasikan. Investasi dalam bentuk pinjaman jangka panjang kepada pihak ketiga dan *non earning asset* atau hanya sebagai bentuk partisipasi dalam suatu organisasi, seperti penyertaan pada lembaga-lembaga keuangan internasional, menggunakan metode biaya.

c. Aset Tetap

Aset Tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, Aset Tetap Lainnya, dan KDP

Aset tetap adalah aset berwujud yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintah atau dimanfaatkan oleh masyarakat umum. Aset tetap terdiri dari Tanah, Gedung dan Bangunan, Peralatan dan Mesin, Jalan, Irigasi, dan Jaringan, dan Aset Tetap Lainnya. Aset tetap juga mencakup biaya-biaya atas pembangunan aset tetap yang sampai dengan tanggal pelaporan sedang dalam proses pngerjaan dan dilaporkan sebagai Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP). KDP dipindahkan ke aset tetap yang bersangkutan pada saat aset tersebut selesai dan siap digunakan.

Aset tetap dilaporkan berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga per 31 Desember 2007 pada harga perolehan.

Pengakuan aset tetap yang perolehannya sejak tanggal 1 Januari 2002 didasarkan pada nilai satuan minimum kapitalisasi, yaitu:

(a) Pengeluaran untuk per satuan peralatan dan mesin dan peralatan olah raga yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp300.000 (tiga ratus ribu rupiah), dan

(b) Pengeluaran untuk gedung dan bangunan yang nilainya sama dengan atau lebih dari Rp10.000.000 (sepuluh juta rupiah).

Pengeluaran yang tidak tercakup dalam batasan nilai minimum kapitalisasi tersebut di atas, diperlakukan sebagai biaya kecuali pengeluaran untuk tanah, jalan/irigasi/ jaringan, dan aset tetap lainnya berupa koleksi perpustakaan dan barang bercorak kesenian. Nilai satuan minimum kapitalisasi juga dikecualikan terhadap aset tetap yang diperoleh dari transfer/pengalihan/pertukaran.

SAP telah mengatur mengenai depresiasi, tapi aset tetap dalam LKPP ini belum didepresiasi.

Menurut PSAP Nomor 07 tentang Akuntansi Aset Tetap, aset tetap disajikan berdasarkan biaya perolehan aset tetap dikurangi akumulasi penyusutan (depresiasi). Namun, dalam LKPP Tahun 2007, seluruh aset tetap yang dikelola oleh kementerian negara/lembaga selaku pengguna barang **belum disusutkan/didepresiasi**. Hal ini disebabkan antara lain belum dilakukannya inventarisasi dan penilaian kembali (revaluasi) atas aset tetap tersebut.

d. Aset Lainnya

Aset lainnya terdiri dari TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

Aset Lainnya adalah aset pemerintah selain aset lancar, investasi, dan aset tetap. Termasuk dalam Aset Lainnya adalah Tagihan Penjualan Angsuran (TPA), Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Penggunaannya, Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain.

TPA menggambarkan jumlah yang dapat diterima dari penjualan aset pemerintah secara angsuran kepada pegawai pemerintah yang dinilai sebesar nilai nominal dari kontrak/berita acara penjualan aset yang bersangkutan setelah dikurangi dengan angsuran yang telah dibayar oleh pegawai ke kas negara atau daftar saldo tagihan

penjualan angsuran.

TGR merupakan suatu proses yang dilakukan terhadap bendahara/pegawai negeri bukan bendahara dengan tujuan untuk menuntut penggantian atas suatu kerugian yang diderita oleh negara sebagai akibat langsung ataupun tidak langsung dari suatu perbuatan yang melanggar hukum yang dilakukan oleh bendahara/pegawai tersebut atau kelalaian dalam pelaksanaan tugasnya.

TPA dan Tagihan TGR yang akan jatuh tempo dalam jangka waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal neraca disajikan sebagai aset lancar (Lihat Kebijakan Akuntansi pada Aset Lancar).

Kemitraan dengan pihak ketiga merupakan perjanjian antara dua pihak atau lebih yang mempunyai komitmen untuk melaksanakan kegiatan yang dikendalikan bersama dengan menggunakan aset dan/atau hak usaha yang dimiliki.

Dana yang Dibatasi Penggunaannya merupakan kas atau dana yang alokasinya hanya akan dimanfaatkan untuk membiayai kegiatan tertentu seperti kas besi perwakilan RI di luar negeri, rekening dana reboisasi, dan dana moratorium Nias dan Nanggroe Aceh Darussalam (NAD).

Aset Tak Berwujud merupakan aset nonkeuangan yang dapat diidentifikasi dan tidak mempunyai wujud fisik serta dimiliki untuk digunakan dalam menghasilkan barang atau jasa atau digunakan untuk tujuan lainnya termasuk hak atas kekayaan intelektual. Aset Tak Berwujud meliputi software komputer; lisensi dan *franchise*; hak cipta (*copyright*), paten, *goodwill*, dan hak lainnya; hak jasa dan operasi Aset Tak Berwujud dalam pengembangan.

Aset Lain-lain merupakan aset lainnya yang tidak dapat dikategorikan ke dalam TPA, Tagihan TGR, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, maupun Dana yang Dibatasi Penggunaannya. Aset lain-lain dapat berupa aset tetap pemerintah yang dihentikan dari penggunaan aktif pemerintah, aset yang dikelola pihak lain seperti aset pemerintah eks BPPN yang dialihkan kepada PT Perusahaan Pengelola Aset (PT PPA) dan Tim Koordinasi, dan aset pemerintah yang digunakan oleh Kontraktor Kontrak Kerja sama (KKKS) BP MIGAS. Di samping itu, piutang macet kementerian negara/lembaga yang dialihkan penagihannya kepada Departemen Keuangan juga termasuk dalam kelompok Aset Lain-lain.

(5) Kewajiban

Kewajiban adalah utang yang timbul dari peristiwa masa lalu yang penyelesaiannya mengakibatkan aliran keluar sumber daya ekonomi Pemerintah. Dalam konteks pemerintahan, kewajiban muncul antara lain karena penggunaan sumber pembiayaan pinjaman dari masyarakat, lembaga keuangan, entitas pemerintahan lain, atau lembaga internasional. Kewajiban Pemerintah juga terjadi karena perikatan dengan pegawai yang bekerja pada pemerintah. Setiap kewajiban dapat dipaksakan menurut hukum sebagai konsekuensi dari kontrak yang mengikat atau peraturan perundang-undangan.

Kewajiban terdiri dari kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang.

Kewajiban Pemerintah diklasifikasikan kedalam kewajiban jangka pendek dan kewajiban jangka panjang.

a. Kewajiban Jangka Pendek

Suatu kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka pendek jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu 12 (dua belas) bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka pendek meliputi Utang Kepada Pihak Ketiga, Utang Perhitungan

Fihak Ketiga (PFK), Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga (*accrued interest*) dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

b. Kewajiban Jangka Panjang

Kewajiban diklasifikasikan sebagai kewajiban jangka panjang jika diharapkan untuk dibayar atau jatuh tempo dalam waktu lebih dari dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Kewajiban jangka panjang pemerintah terdiri dari utang luar negeri dan utang dalam negeri. Utang Luar Negeri Pemerintah adalah pinjaman bilateral, multilateral, kredit ekspor, *leasing*, dan kredit komersial yang dikelola Departemen Keuangan. Utang Dalam Negeri Pemerintah antara lain adalah utang dalam bentuk sekuritas (*government debt securities*), yang terdiri dari *fixed rates bonds*, *variable rates bonds,* dan *zero coupon bonds* yang dikelola Departemen Keuangan.

Fixed Rate Bonds-FR adalah obligasi yang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan, dan dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan. Tingkat kupon obligasi jenis FR berkisar antara 9,00 persen sampai 15,57 persen, yang terdiri dari 39 seri, dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2008 sampai 2037. Selain itu, terdapat 3 (tiga) seri Obligasi Republik Indonesia (ORI), yaitu ORI001, ORI002, dan ORI003 dengan tingkat kupon berkisar 9,28 persen sampai 12,05 persen yang akan jatuh tempo antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Baik obligasi jenis FR maupun ORI, dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

Variable Rate Bonds-VR adalah obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan referensi tertentu. Dalam hal ini referensi yang digunakan ialah tingkat bunga Sertifikat Bank Indonesia (SBI) berjangka 3 (tiga) bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan sekali. Sampai akhir tahun 2007, terdapat 19 seri VR yang jatuh temponya berkisar antara tahun 2008 sampai dengan 2020. Obligasi VR adalah obligasi yang dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

SU-002 dan SU-004 adalah jenis utang Pemerintah kepada Bank Indonesia berkaitan dengan program penjaminan dan Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI). SU-002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1 persen per tahun (dari sebelumnya 3 persen), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU-004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3 persen per tahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).

SU-005 adalah surat utang yang diterbitkan terkait dengan pemberian kredit program, khususnya kredit kepada usaha kecil dan menengah. Tingkat bunga SU-005 ditetapkan sebesar tingkat bunga SBI 3 bulan dan dibayar setiap enam bulan (*semiannually*) yaitu setiap tanggal 10 Juni dan 10 Desember. Pokok SU-005 mulai diamortisasi/dicicil secara *semiannually* sejak 10 Desember 2007 sampai dengan jatuh tempo pada tahun 2009.

SU-007 adalah surat utang hasil konversi indeksasi perhitungan indeksasi dan tungggakan bunga SU-002 dan SU-004. SU-007 memiliki tingkat bunga 0,1 persen pertahun dan jatuh tempo pada tahun 2025.

SRBI-01 adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 sebagai pengganti SU-001 dan SU-003, dalam rangka BLBI. Jatuh tempo SRBI01 adalah tahun 2033 dengan tingkat kupon 0,1 persen per tahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik 2 (dua) kali setahun.

International Bond adalah jenis obligasi negara yang berdenominasi mata uang asing yang dapat diperdagangkan/diperjualbelikan. Pada saat ini terdapat 6 (enam) seri international bond yang berdenominasi USD, yaitu RI0014, RI0015, RI0016, RI0017, RI0035, dan RI0037. Obligasi tersebut memiliki tingkat kupon sebesar 6,625 persen sampai dengan 8,5 persen dengan masa jatuh tempo mulai tahun 2014 sampai dengan 2037.

Kewajiban dicatat sebesar nilai nominal, yaitu sebesar nilai kewajiban Pemerintah pada saat pertama kali transaksi berlangsung. Aliran ekonomi sesudahnya seperti transaksi pembayaran, perubahan penilaian karena perubahan kurs mata uang asing, dan perubahan lainnya selain perubahan nilai pasar, diperhitungkan dengan menyesuaikan nilai tercatat kewajiban tersebut.

Utang bunga atas utang Pemerintah dicatat sebesar biaya bunga yang telah terjadi dan belum dibayar. Bunga dimaksud berasal dari utang Pemerintah baik dari dalam maupun luar negeri. Utang bunga atas utang pemerintah yang belum dibayar diakui pada setiap akhir periode pelaporan sebagai bagian dari kewajiban yang berkaitan.

Utang PFK dicatat sebesar saldo pungutan/potongan berupa PFK yang belum disetorkan kepada pihak lain sampai akhir periode pelaporan.

Nilai yang dicantumkan dalam neraca untuk bagian lancar utang jangka panjang adalah jumlah yang jatuh tempo dalam waktu dua belas bulan setelah tanggal pelaporan.

Nilai nominal atas utang luar negeri Pemerintah merupakan kewajiban Pemerintah kepada pemberi utang sebesar pokok utang dan bunga sesuai yang diatur dalam kontrak perjanjian dan belum diselesaikan sampai tanggal pelaporan. Utang dalam bentuk sekuritas dinilai berdasarkan nilai historis. Khusus untuk *hedge bonds* menggunakan kurs rupiah terhadap dollar Amerika Serikat yang terakhir.

SAP telah mengatur penyajian utang kepada pegawai (*past service liability*). Namun demikian, penyajian utang Pemerintah di neraca belum mencakup utang kepada pegawai terkait kompensasi pemerintah, sebagai pemberi kerja, kepada pegawai sebagai pekerja atas jasa yang telah diberikan. *Past service liablility* berupa pensiun dan tunjangan hari tua (THT) diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya pada LKPP ini.

(6) Kewajiban Kontinjensi

Kewajiban kontinjensi diungkapkan dalam catatan penting lainnya

Kewajiban kontinjensi merupakan kewajiban potensial yang timbul dari peristiwa masa lalu dan keberadaannya menjadi pasti dengan terjadinya atau tidak terjadinya satu peristiwa atau lebih pada masa datang yang tidak sepenuhnya berada dalam kendali Pemerintah, atau kewajiban kini yang timbul sebagai akibat masa lalu, tetapi tidak diakui karena kemungkinan besar Pemerintah tidak mengeluarkan sumber daya yang mengandung manfaat ekonomis untuk menyelesaikannya, atau jumlah tersebut tidak dapat diukur dengan andal.

Utang kontinjensi pemerintah yang bersifat eksplisit seperti jaminan pembangunan Proyek Monorail Jakarta dan jaminan Pemerintah terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit tenaga listrik yang menggunakan batubara diungkapkan dalam Catatan Penting Lainnya. Sedangkan utang kontinjensi Pemerintah yang bersifat implisit seperti intervensi Pemerintah apabila perbankan mengalami kebangkrutan belum diungkapkan dalam LKPP.

(7) Ekuitas Dana

Ekuitas Dana terdiri dari Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi

Ekuitas dana merupakan kekayaan bersih Pemerintah, yaitu selisih antara aset dan utang pemerintah. Ekuitas dana diklasifikasikan Ekuitas Dana Lancar dan Ekuitas Dana Investasi. Ekuitas Dana Lancar merupakan selisih antara aset lancar dan utang jangka pendek. Ekuitas Dana Investasi mencerminkan selisih antara aset tidak lancar dan kewajiban jangka panjang.

(8) Kurs Valuta Asing

Kurs Valuta Asing

Menurut PSAP Nomor 02 tentang Laporan Realisasi Anggaran Paragraf 62, transaksi dalam mata uang asing harus dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tengah bank sentral pada tanggal transaksi.

Dalam penyusunan LKPP Tahun 2007, transaksi dalam mata uang USD dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang USD tersebut menurut kurs tengah BI pada tanggal transaksi. Hal ini disebabkan Pemerintah memiliki rekening dalam mata uang USD di BI, sehingga dalam melakukan transaksi Pemerintah tidak harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Namun, transaksi dalam mata uang asing selain USD dibukukan dalam mata uang rupiah dengan menjabarkan jumlah mata uang asing tersebut menurut kurs tunai (*spot rate*) pada tanggal transaksi. Hal ini disebabkan Pemerintah tidak memiliki rekening dalam mata uang asing selain USD di BI, sehingga dalam melakukan transaksi, Pemerintah harus membeli mata uang asing yang bersangkutan.

Setiap pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing dilaporkan ke dalam mata uang rupiah dengan menggunakan kurs tengah bank sentral pada tanggal neraca. Kurs tengah BI (Rupiah terhadap 1 USD) pada tanggal 31 Desember 2006 dan 2007 masing-masing sebesar Rp9.020 dan Rp9.419.

Selisih penjabaran pos aset dan kewajiban dalam mata uang asing antara tanggal transaksi dan tanggal neraca dicatat sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan. LKPP Tahun 2007 ini menyajikan selisih kurs atas aset atau kewajiban dalam mata uang asing sebagai kenaikan atau penurunan ekuitas dana periode berjalan dalam Neraca.

B. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN REALISASI APBN

B.1. PENJELASAN UMUM LAPORAN REALISASI APBN

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah pada Tahun Anggaran (TA) 2007 adalah sebesar Rp707.806.088.304.925, yang berasal dari Penerimaan Dalam Negeri dan Hibah.

Penerimaan Dalam Negeri terdiri dari Penerimaan Perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Pemerintah telah berupaya untuk meningkatkan penerimaan dalam negeri dari tahun ke tahun. Salah satu upaya yang dilakukan adalah dengan meningkatkan penerimaan pajak. Faktor-faktor yang mempengaruhi penerimaan pajak dalam tahun 2007 antara lain mencakup: (i) perkembangan beberapa indikator ekonomi makro yang berubah cukup signifikan dari perkiraan semula terutama nilai tukar rupiah terhadap dolar USA, dan harga minyak; (ii) langkah-langkah kebijakan perpajakan yang diambil dalam meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak yang lebih baik; dan (iii) langkah-langkah administrasi yang terus-menerus dilakukan dalam upaya perbaikan sistem dan prosedur perpajakan, cukai, dan kepabeanan.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah berasal dari Penerimaan Perpajakan sebesar Rp490.988.634.954.090, PNBP sebesar Rp215.119.705.411.332, dan Penerimaan Hibah sebesar Rp1.697.747.939.503.

Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP selama 5 (lima) tahun terakhir menunjukkan adanya peningkatan, hal ini terlihat pada Grafik 22.

Perkembangan realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP

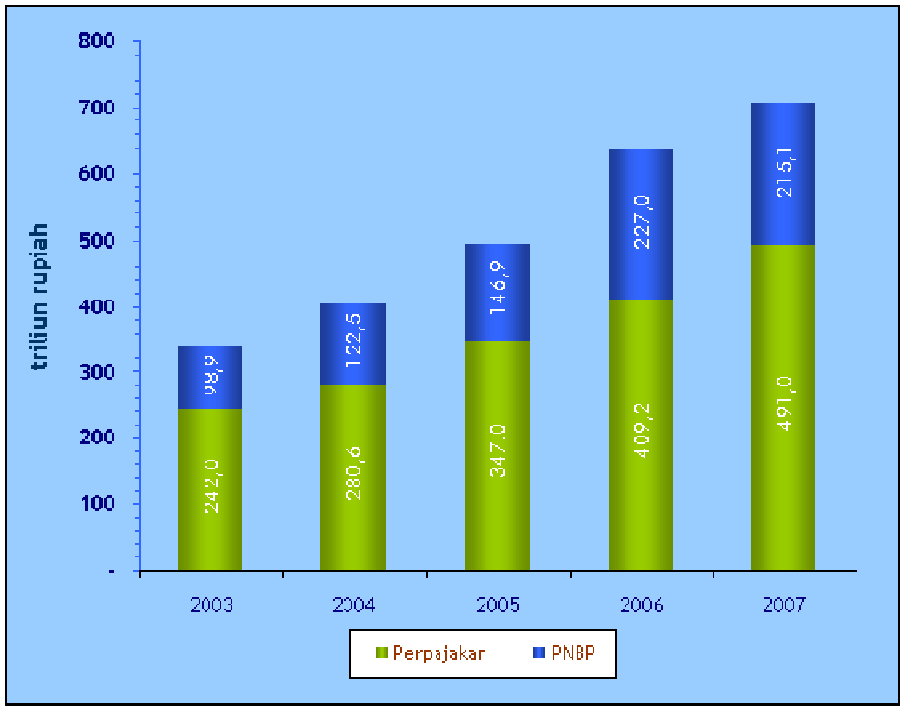

Grafik 22: Perkembangan Realisasi Penerimaan Perpajakan dan PNBP TA 2003-2007

Sementara itu, Belanja Negara dilakukan berdasarkan pada prinsip pengendalian anggaran belanja negara dengan tetap menjamin terpenuhinya kebutuhan dasar dan alokasi belanja minimum, dengan mempertimbangkan penghematan dan efisiensi penggunaan belanja negara, menjamin terlaksananya kegiatan administrasi pemerintahan, serta terselenggaranya agenda-agenda penting kenegaraan. Belanja Negara meliputi (i) Belanja Pemerintah Pusat, dan (ii) Transfer untuk Daerah. Transfer untuk Daerah bertujuan untuk mendukung dan memantapkan

pelaksanaan otonomi daerah.

Realisasi Belanja Negara pada TA 2007 sebesar Rp757.649.912.890.878 terdiri dari Belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp504.623.263.587.032, Transfer untuk Daerah sebesar Rp253.263.178.086.104, dan Suspen sebesar minus Rp236.528.782.258. Perkembangan realisasi Belanja Negara selama 5 (lima) tahun terakhir dapat dilihat pada Grafik 23.

Perkembangan realisasi Belanja Negara

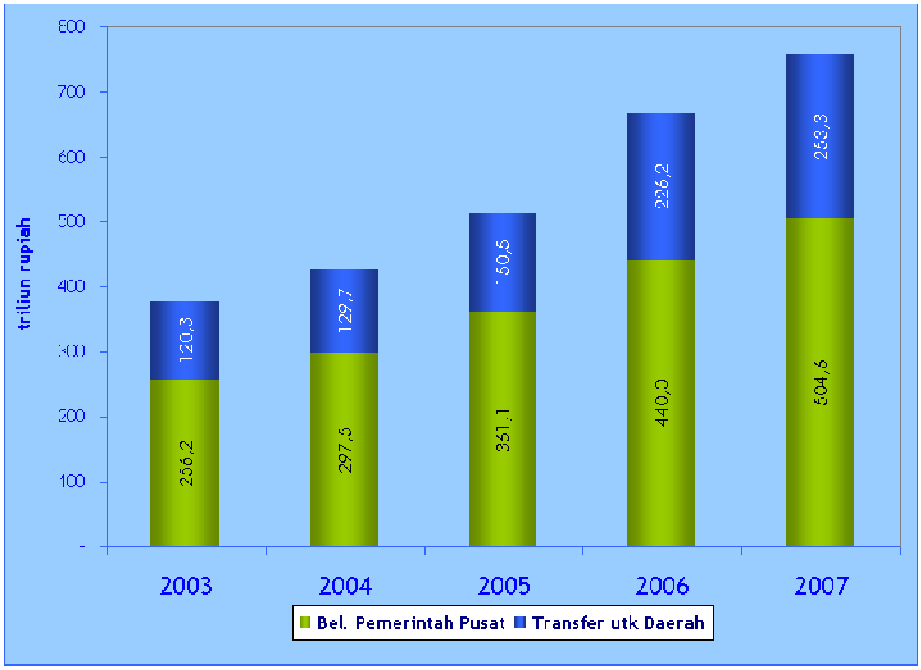

Grafik 23: Perkembangan Realisasi Belanja Negara TA 2003-2007

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah sebesar Rp707.806.088.304.925 dan realisasi Belanja Negara sebesar Rp757.649.912.890.878, maka realisasi Defisit Anggaran yang terjadi pada TA 2007 adalah sebesar Rp49.843.824.585.953.

Untuk menutupi Defisit Anggaran tersebut, Pemerintah berusaha menggunakan sumber-sumber pembiayaan baik berasal dari dalam negeri maupun luar negeri. Realisasi Pembiayaan (Neto) pada TA 2007 adalah sebesar Rp42.456.535.817.769, yang terdiri dari Pembiayaan Dalam Negeri (Neto) sebesar Rp66.308.947.652.257, dan Pembiayaan Luar Negeri (Neto) sebesar minus Rp23.852.411.834.488.

Realisasi Pembiayaan Neto tersebut tidak dapat menutupi jumlah Defisit Anggaran yang terjadi, sehingga mengakibatkan adanya Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) TA 2007 sebesar Rp7.387.288.768.184.

B.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN REALISASI APBN

B.2.1. Pendapatan Negara dan Hibah

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah Rp707,81 triliun.

Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2007 adalah sebesar Rp707.806.088.304.925, berarti mencapai 101,98 persen dari anggaran yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp694.087.881.512.000. Pendapatan Negara dan Hibah terdiri dari Penerimaan Perpajakan, PNBP, dan Hibah.

Komposisi realisasi Pendapatan Negara dan Hibah (dalam persentase) TA 2007 dapat dilihat pada Grafik 24.

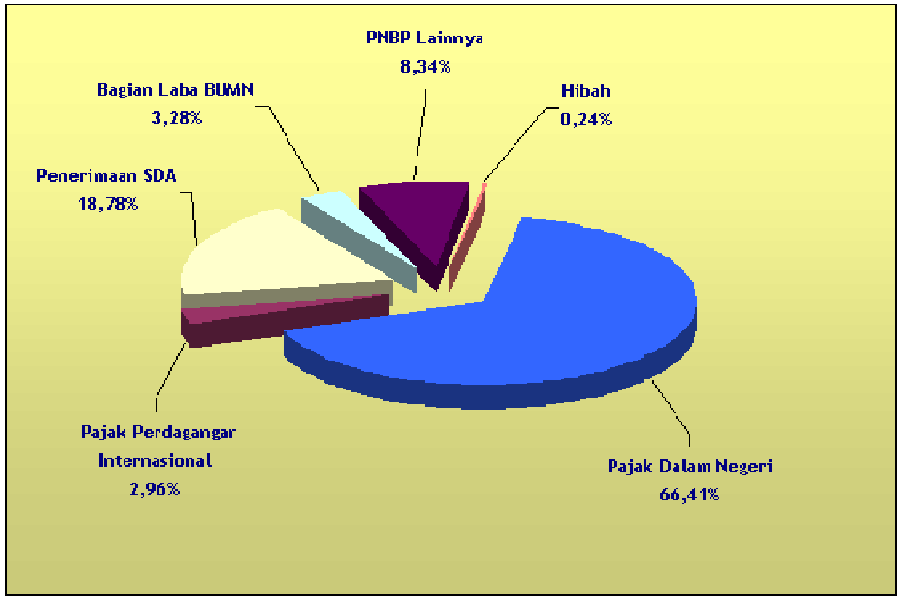

Grafik 24: Komposisi Realisasi Pendapatan Negara dan Hibah TA 2007

B.2.1.1. Penerimaan Perpajakan

Realisasi penerimaan perpajakan Rp490,99 triliun

Realisasi Penerimaan Perpajakan TA 2007 adalah sebesar Rp490.988.634.954.090 atau mencapai 99,79 persen dari target yang direncanakan dalam APBN-P sebesar Rp492.010.893.000.000. Hal ini berarti Penerimaan Pajak TA 2007 lebih besar Rp81.785.615.618.640 atau naik 19,99 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2006. Penerimaan Perpajakan ini berasal dari (i) Pajak Dalam Negeri dan (ii) Pajak Perdagangan Internasional.

B.2.1.1.1. Pajak Dalam Negeri

Realisasi penerimaan pajak dalam negeri Rp470,05 triliun

Realisasi Penerimaan Pajak Dalam Negeri TA 2007 adalah sebesar Rp470.051.815.733.040 atau mencapai 99,05 persen dari target yang direncanakan dalam APBN-P sebesar Rp474.550.950.000.000. Hal ini berarti Pajak Dalam Negeri TA 2007 lebih besar Rp74.080.280.103.028 atau 18,71 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2006. Besarnya realisasi Pajak Dalam Negeri ini adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
PPh Migas	44.000.473.091.966	165.645.237.830.836
PPh Nonmigas	194.430.452.975.939	43.187.887.822.005
PPN dan PPn BM	154.526.773.832.995	123.035.859.568.711
PBB	23.723.546.008.858	20.858.516.906.183
BPHTB	5.953.378.541.995	3.184.469.880.249
Cukai	44.679.463.855.018	37.772.132.887.314
Pajak Lainnya	2.737.727.426.269	2.287.430.734.714
Jumlah	**470.051.815.733.040**	**395.971.535.630.012**

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

B.2.1.1.2. Pajak Perdagangan Internasional

Realisasi pajak perdagangan internasional Rp20,94

Realisasi Penerimaan Pajak Perdagangan Internasional TA 2007 adalah sebesar Rp20.936.819.221.050, atau mencapai 119,91 persen dari target yang direncanakan dalam APBN-P sebesar Rp17.459.943.000.000. Hal ini berarti Pajak Perdagangan Internasional TA

triliun

2007 lebih besar Rp7.705.335.515.612 atau naik 58,23 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2006. Besarnya realisasi Pajak Perdagangan Internasional adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Bea Masuk	16.699.443.059.175	12.140.401.555.427
Pajak/Pungutan Ekspor	4.237.376.161.875	1.091.082.150.011
Jumlah	**20.936.819.221.050**	**13.231.483.705.438**

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

B.2.1.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

Realisasi PNBP Rp215,12 triliun

Realisasi PNBP TA 2007 adalah sebesar Rp215.119.705.411.332 atau mencapai 108,51 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp198.253.670.829.000. Hal ini berarti PNBP TA 2007 lebih kecil Rp11.830.360.974.539 atau 5,21 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2006. Realisasi PNBP berasal dari (i) Penerimaan Sumber Daya Alam; (ii) Bagian Pemerintah atas Laba BUMN; dan (iii) PNBP Lainnya.

B.2.1.2.1. Penerimaan Sumber Daya Alam

Realisasi penerimaan SDA Rp132,89 triliun

Realisasi Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) TA 2007 adalah sebesar Rp132.892.588.952.859, atau mencapai 115,51 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp115.053.273.200.000. Hal ini berarti Penerimaan SDA TA 2007 lebih kecil Rp34.581.211.992.459 atau 20,65 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2006. Rincian realisasi Penerimaan SDA adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (Audited)
Pendapatan Minyak Bumi	93.604.467.046.203	125.145.403.396.875
Pendapatan Gas Alam	31.179.214.032.362	32.940.684.187.448
Pendapatan Pertambangan Umum	5.877.885.712.092	6.781.369.889.324
Pendapatan Kehutanan	2.114.762.626.831	2.409.460.598.313
Pendapatan Perikanan	116.259.535.371	196.882.873.358
Jumlah	**132.892.588.952.859**	**167.473.800.945.318**

B.2.1.2.2. Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Realisasi bagian pemerintah atas laba BUMN Rp23,22 triliun

Realisasi Bagian Pemerintah atas Laba BUMN TA 2007 adalah sebesar Rp23.222.505.531.880 atau mencapai 106,53 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp21.800.000.000.000. Hal ini berarti Bagian Laba Pemerintah atas Laba BUMN TA 2007 lebih besar Rp249.449.296.923 atau 1,09 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2006.

B.2.1.2.3. Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya

Realisasi PNBP lainnya Rp59,00 triliun

Realisasi PNBP Lainnya TA 2007 adalah sebesar Rp59.004.610.926.593 atau 96,10 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P yaitu sebesar Rp61.400.397.629.000. Hal ini berarti PNBP Lainnya TA 2007 lebih besar Rp22.501.401.720.997 atau naik 61,64 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2006. Realisasi PNBP Lainnya ini terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Penjualan Hasil Produksi, Sitaan	4.148.228.101.298	388.908.924.399
Penjualan Aset	82.193.749.036	35.611.899.217
Pendapatan Sewa	61.897.671.664	69.889.864.639
Pendapatan Jasa	11.030.726.921.908	9.808.266.112.552
Pendapatan Bukan Pajak Luar Negeri	254.407.935.947	353.011.168.545
Pendapatan Bunga	47.954.230.569	4.785.279.335
Pendapatan On Redemption atas Pemb. Kembali Obligasi DN Jk. Pjg	283.000.000	51.575.792.275
Pendapatan Premium Obligasi Negara	639.299.403.000	1.731.248.733.000
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan	78.312.985.638	74.413.840.000
Pendapatan Pendidikan	3.326.172.118.270	2.357.826.811.004
Pendapatan Lain-lain	23.189.537.000.603	21.627.670.780.630
Pendapatan PNBP Lainnya I	14.014.361.540.394	-
Pendapatan BLU	2.131.236.268.266	-
Jumlah	**59.004.610.926.593**	**36.503.209.205.596**

Pendapatan BLU sebesar Rp2.131.236.268.266, terdiri dari:

Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Masyarakat:	
Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit	Rp 1.976.405.530.760
Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan	15.247.309.380
Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi	12.105.531.885
Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran	11.310.697.084
Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya	4.553.129.138
Subtotal	**Rp2.019.622.198.247**
Pendapatan Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat:	
Pendapatan Program Dana Penjaminan	12.740.174.409
Pendapatan investasi	98.873.895.610
Subtotal	**111.614.070.019**
Total	**Rp2.131.236.268.266**

Rincian lebih lanjut dapat dilihat dalam **Daftar 1**.

B.2.1.3. Penerimaan Hibah

Realisasi penerimaan hibah Rp1,70 triliun

Realisasi Penerimaan Hibah Tahun Anggaran (TA) 2007 adalah sebesar Rp1.697.747.939.503 atau 44,41 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp3.823.317.683.000. Hal ini berarti Penerimaan Hibah TA 2007 lebih kecil Rp136.302.846.232 atau 7,43 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2006.

B.2.2. Belanja Negara

Realisasi belanja negara Rp757,65 triliun

Realisasi Belanja Negara TA 2007 adalah sebesar Rp757.649.912.890.878 atau 100,70 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp752.373.176.788.000. Dibandingkan dengan TA 2006, Belanja Negara TA 2007 lebih besar Rp90.521.099.825.636 atau 13,57 persen dibandingkan dengan realisasi TA 2006. Realisasi Belanja Negara terdiri dari *(i)* Belanja Pemerintah Pusat dan *(ii)* Transfer untuk Daerah.

Berdasarkan alokasi peruntukkannya, komposisi Belanja Negara TA 2007 dapat disajikan pada Grafik 25.

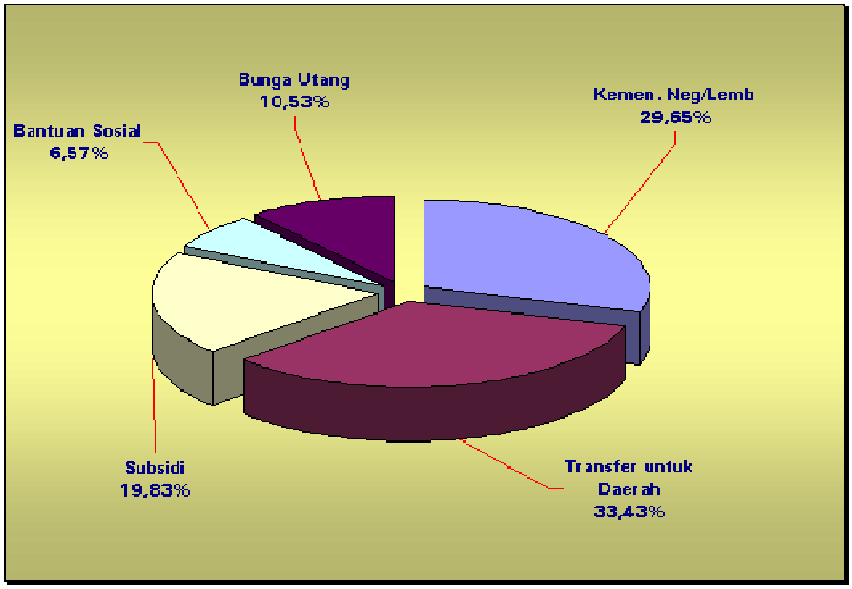

Grafik 25: Komposisi Alokasi Belanja Negara TA 2007

Alokasi untuk kementerian negara/lembaga (K/L), antara lain untuk belanja pegawai, belanja barang, belanja modal, dan belanja lain-lain dalam rangka pelaksanaan kegiatan kepemerintahan.

B.2.2.1. Belanja Pemerintah Pusat

Realisasi belanja pemerintah pusat Rp504,62 triliun

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2007 adalah sebesar Rp504.623.263.587.032 atau 101,29 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp498.172.161.850.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2007 lebih besar Rp64.591.179.017.389 atau 14,68 persen dari TA 2006.

Belanja Pemerintah Pusat dikelompokkan menjadi 3 (tiga) kategori, yaitu (i) Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/Bagian Anggaran; (ii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi; dan (iii) Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja.

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Organisasi/Bagian Anggaran

Belanja Pemerintah Pusat menurut Organisasi/BA

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2007 menurut Bagian Anggaran (BA) terbesar adalah pada BA 062 (Subsidi dan Transfer) sebesar Rp179.654.408.301.489 atau 35,62 persen dari total belanja. Total realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2007 pada kementerian negara/lembaga (K/L) adalah sebesar Rp225.014.218.669.639. Realisasi belanja pada K/L terbesar adalah Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp40.475.796.860.038 atau 8,02 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat atau 17,99 persen dari total realisasi Belanja Pemerintah Pusat untuk K/L.

Komposisi 5 (lima) terbesar K/L pengguna anggaran Belanja Pemerintah Pusat (dalam persentase) selain BA 061, BA 062, dan BA 069 dalam TA 2007 dapat dilihat pada Grafik 26.

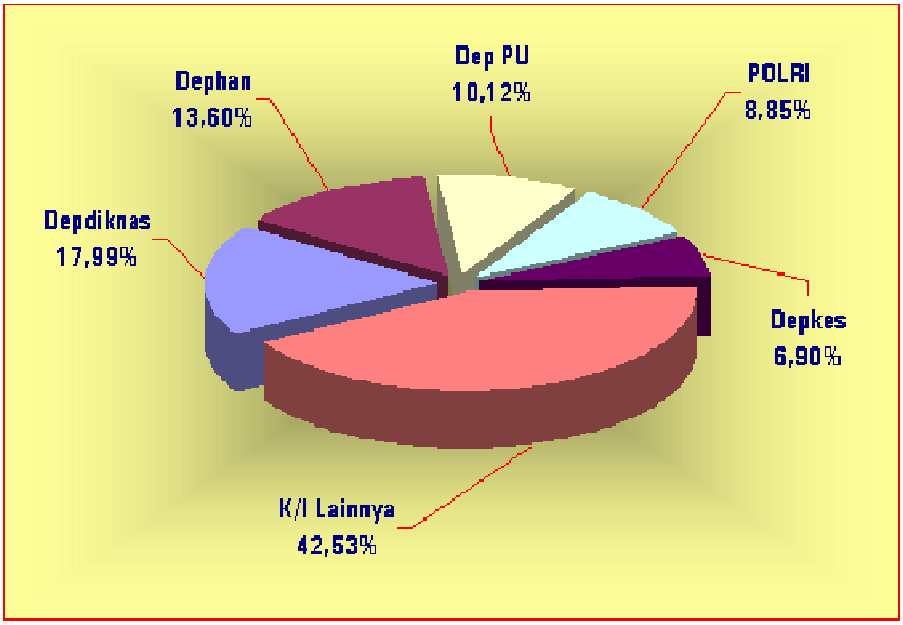

Grafik 26: Komposisi Lima Terbesar Kementerian Negara/Lembaga Pengguna Anggaran Belanja Pemerintah Pusat TA 2007

Rincian realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut organisasi/bagian anggaran dapat dilihat dalam **Daftar 2.**

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi

Realisasi Belanja Pemerintah Pusat juga dapat dikelompokkan berdasarkan fungsi. Realisasi Belanja Pemerintah Pusat per Fungsi pada TA 2007 dan 2006 adalah sebagaimana terdapat dalam Tabel 5

Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi

Tabel 5
Realisasi Belanja Pemerintah Pusat Menurut Fungsi
TA 2007 dan TA 2006
(Dalam Rupiah)

Kode	Uraian Fungsi	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
01	Pelayanan Umum	316.139.260.908.537	283.343.024.696.465
02	Pertahanan	30.685.860.754.906	24.426.141.042.980
03	Ketertiban dan Keamanan	28.315.877.968.474	23.743.115.168.836
04	Ekonomi	42.221.943.292.024	38.295.620.549.454
05	Lingkungan Hidup	4.952.579.575.714	2.664.480.351.583
06	Perumahan dan Fasilitas Umum	9.134.607.348.313	5.457.205.792.482
07	Kesehatan	16.004.456.928.185	12.189.728.205.984
08	Pariwisata dan Budaya	1.851.230.677.806	905.443.154.946
09	Agama	1.884.193.559.998	1.411.200.131.019
10	Pendidikan	50.843.367.968.915	45.303.905.094.389
11	Kependudukan dan Perlindungan Sosial	2.650.370.769.523	2.303.280.818.537
	Total *)	504.623.263.587.032	440.032.084.569.643

**) Termasuk realisasi sebesar minus Rp60.486.165.363 pada TA 2007 dan Rp11.060.437.032 pada TA 2006 yang tidak diketahui kelompok fungsinya.*

Dari tabel di atas dapat diketahui bahwa realisasi Belanja Pemerintah Pusat TA 2007 menurut fungsi yang terbesar digunakan untuk Fungsi Pelayanan Umum yaitu sebesar Rp316.139.231.707.397 atau 62,65 persen dari total Belanja Pemerintah Pusat. Sementara

itu, komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut fungsi dapat dilihat pada Grafik 27.

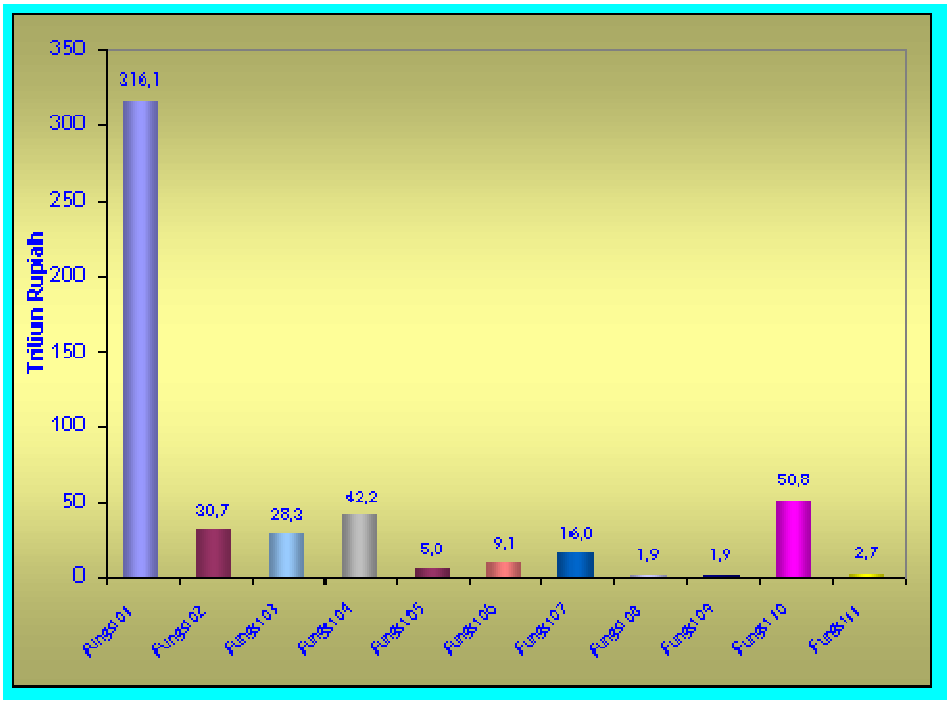

Grafik 27: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Fungsi TA 2007

Laporan Realisasi Anggaran Belanja Pemerintah menurut Fungsi dan Subfungsi dapat dilihat dalam **Daftar 2.**

Belanja Pemerintah Pusat Menurut Jenis

Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja terdiri atas: (i) Belanja Pegawai; (ii) Belanja Barang; (iii) Belanja Modal; (iv) Pembayaran Bunga Utang; (v) Subsidi; (vi) Belanja Hibah; (vii) Bantuan Sosial; dan (viii) Belanja Lain-lain. Komposisi realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut jenis belanja disajikan pada Grafik 28.

Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis Belanja

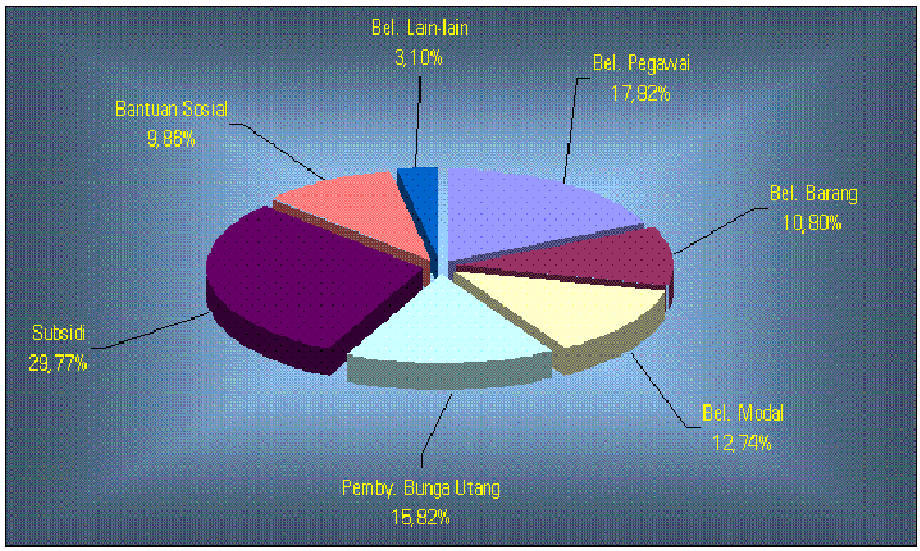

Grafik 28: Komposisi Realisasi Belanja Pemerintah Pusat menurut Jenis TA 2007

Belanja Pegawai

Belanja Pegawai Rp90,42 triliun

Realisasi Belanja Pegawai TA 2007 adalah sebesar Rp90.424.946.964.533 yang berarti 97,39 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp92.843.560.640.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pegawai TA 2007 lebih besar Rp17.172.659.698.979 atau 23,44 persen dari TA 2006. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Belanja Gaji dan Tunjangan PNS	25.118.867.861.207	21.861.441.027.969
Belanja Gaji dan Tunjangan TNI/Polri	24.450.454.976.367	20.226.100.239.647
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	382.341.613.548	345.820.221.603
Belanja Pegawai Perjan	(12.792.782)	301.310.697
Belanja Gaji Dokter PTT	391.814.755.506	634.200.949.934
Belanja Honorarium	7.087.877.927.837	4.823.371.370.112
Belanja Lembur	246.715.845.386	102.550.933.903
Belanja Vakasi	552.138.719.702	717.610.862.297
Belanja Tunjangan Khusus dan Belanja Pegawai Transito	3.644.996.661.383	782.637.835.960
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	27.705.672.106.579	23.271.785.238.852
Belanja Asuransi Kesehatan	675.301.964.800	436.485.393.140
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	53.494.390.000	49.981.881.440
Belanja Cadangan Perubahan Sharing	115.282.935.000	-
Jumlah	**90.424.946.964.533**	**73.252.287.265.554**

Belanja Barang

Belanja Barang Rp54,51 triliun

Realisasi Belanja Barang TA 2007 adalah sebesar Rp54.511.365.469.438 yang berarti 83,53 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp65.260.429.057.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Barang TA 2007 lebih besar Rp7.329.452.810.191 atau naik 15,53 persen dari TA 2006. Rinciannya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Belanja Barang Operasional	25.445.581.426.699	22.751.797.847.669
Belanja Barang Non Operasional	4.419.034.214.187	3.831.965.753.266
Belanja Jasa	9.020.493.177.002	7.785.054.455.755
Belanja Pemeliharaan	4.787.808.430.454	3.905.631.283.180
Belanja Perjalanan	9.006.938.650.353	8.907.463.319.377
Belanja Barang BLU	1.831.509.570.743	-
Jumlah	**54.511.365.469.438**	**47.181.912.659.247**

Belanja Barang BLU sebesar Rp1.831.509.570.743 terdiri dari:

Belanja Gaji dan Penunjang	729.549.109.868
Belanja Barang	598.233.163.347
Belanja Jasa	34.602.688.676
Belanja Pemeliharaan	92.201.620.713
Belanja Perjalanan	5.211.162.882
Belanja Penyedia Barang dan Jasa BLU Lainnya	371.711.825.257
Total	**1.831.509.570.743**

Belanja Modal

Belanja Modal Rp64,29 triliun

Realisasi Belanja Modal TA 2007 adalah sebesar Rp64.288.669.050.730 yang berarti 85,66 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp75.050.813.170.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Modal TA 2007 lebih besar Rp9.336.793.635.698 atau 16,99 persen dari TA 2006. Rincian realisasi Belanja Modal adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah	1.489.595.690.931	1.675.902.652.399
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.437.459.125.258	18.523.010.677.334
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.501.872.881.725	12.107.707.935.319
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	23.068.817.644.545	19.156.430.213.317
Belanja Modal Fisik Lainnya	3.773.079.136.674	3.488.823.936.663
Belanja Modal BLU	17.844.571.597	-
Jumlah	**64.288.669.050.730**	**54.951.875.415.032**

Belanja Modal BLU sebesar Rp17.844.571.597 terdiri dari:

Belanja Modal Peralatan dan Mesin	11.119.500.685
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	606.458.000
Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	299.227.500
Belanja Modal Fisik Lainnya	5.819.385.412
Total	**17.844.571.597**

Pembayaran Bunga Utang

Pembayaran Bunga Utang Rp79,81 triliun

Realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2007 adalah sebesar Rp79.806.377.534.753 yang berarti 95,51 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp83.555.140.000.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Pembayaran Bunga Utang TA 2007 lebih besar Rp723.814.258.612 atau 0,92 persen dari TA 2006. Rincian Pembayaran Bunga Utang TA 2007 adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2007 (Rp)
Belanja Pembayaran Bunga Utang Dalam Negeri - Jangka Pendek	608.648.631.679
Belanja Pembayaran Bunga Utang DN - Jangka Panjang	48.437.511.570.973
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Pendek	-
Belanja Pembayaran Bunga Utang LN - Jangka Panjang	25.509.169.299.965
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Dalam Negeri	3.013.460.888.233
Belanja Pembayaran Discount Surat Utang Negara Luar Negeri	217.800.000.000
Belanja Pembayaran Loss on Bond Redemption atas pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri	2.019.787.143.903
Jumlah	**79.806.377.534.753**

Subsidi

Belanja Subsidi Rp150,21 triliun

Realisasi Subsidi TA 2007 adalah sebesar Rp150.214.443.691.269 yang berarti 142,96 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp105.073.369.472.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Subsidi TA 2007 ini lebih besar Rp42.782.657.832.594 atau 39,82 persen dari TA 2006. Rincian realisasi Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (Audited)
Subsidi BBM	-	64.212.079.995.900
Subsidi Premium	25.287.122.316.398	-
Subsidi Minyak Solar	19.055.027.553.466	-
Subsidi Minyak Tanah	39.450.166.646.514	-
Subsidi Minyak Goreng	24.624.718.000	-
Subsidi Pangan	6.284.324.994.000	5.320.237.500.000
Subsidi Listrik	33.073.543.656.064	30.393.303.368.309
Subsidi Benih	478.985.800.000	131.125.500.000
Subsidi Pupuk	6.260.537.497.379	3.165.723.566.190
Subsidi Perawatan Beras	300.000.000.000	-
Subsidi Bunga KPR	299.993.159.983	251.996.426.346
Subsidi Bunga Ketahanan Pangan	47.508.483.000	34.223.400.000
Subsidi PPh	837.781.003.465	1.863.753.579.000
Subsidi PPN	16.275.827.863.000	-
Subsidi Lainnya	1.514.000.000.000	264.359.949.000
Subsidi PT KAI	281.250.000.000	450.000.000.000
Subsidi PT PELNI	650.000.000.000	650.000.000.000
Subsidi PT Pos dan Giro	93.750.000.000	115.000.000.000
Subsidi TVRI	-	40.199.923.930
Subsidi BULOG	-	394.999.996.000
Subsidi Dalam Rangka PSO Lainnya	-	144.782.654.000
Jumlah	**150.214.443.691.269**	**107.431.785.858.675**

Subsidi Lainnya sebesar Rp1.514.000.000.000 merupakan subsidi BPHTB yang ditanggung Pemerintah sehubungan dengan kebijakan Pemerintah yang mengubah status Pertamina menjadi PT Pertamina (Persero) berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 31 Tahun 2003 dan Keputusan Menteri Keuangan No. 408/KMK.02/2003. Atas perubahan status tersebut, timbul kewajiban BPHTB berdasarkan Undang Undang No. 20 Tahun 2000 tentang BPHTB, sebagaimana ditetapkan oleh Kantor Pelayanan PBB di berbagai tempat kedudukan objek/tanah dan bangunan Pertamina. Namun, karena perubahan status tersebut bukan merupakan tindakan korporasi, melainkan merupakan kebijakan Pemerintah sebagai pemilik maka konsekuensi perpajakannya menjadi tanggung jawab Pemerintah.

Karena transaksi tersebut merupakan transaksi Pemerintah ke Pemerintah, dan tidak ada aliran kas masuk dan keluar, maka transaksi tersebut diselesaikan dengan mekanisme pajak yang ditanggung Pemerintah (DTP) dan DIPA-nya dibebankan pada BA 062. Selanjutnya, karena transaksi ini secara substansi tidak menimbulkan pendapatan ril bagi Pemerintah, maka tidak ada proses bagi hasilnya kepada pemerintah daerah.

Bantuan Sosial

Belanja Bantuan Sosial Rp49,76 triliun

Realisasi Bantuan Sosial TA 2007 adalah sebesar Rp49.756.281.449.623 yang berarti 98,32 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp50.607.662.924.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Bantuan Sosial TA 2007 ini lebih besar Rp9.047.715.260.632 atau 22,23 persen dari TA 2006. Rincian realisasi Bantuan Sosial adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Belanja Bantuan kompensasi Kenaikan Harga BBM	14.900.742.365.448	14.955.371.830.306
Belanja Bantuan langsung (Block Grant) Sekolah/Lembaga/Guru	17.031.445.611.773	14.072.013.491.492
Belanja Bantuan Imbal Swadaya Sekolah/ Lembaga	4.440.335.585.638	2.755.885.733.150

Belanja Bantuan Beasiswa	1.856.956.254.338	920.733.173.581
Belanja Bantuan Sosial Lembaga Peribadatan	87.125.642.390	113.980.593.282
Belanja Lembaga Sosial Lainnya	11.439.711.990.036	7.890.581.367.180
Jumlah *)	**49.756.281.449.623**	**40.708.566.188.991**

*) Termasuk pengembalian belanja (MAK 613411) pada Departemen Pendidikan Nasional sebesar Rp36.000.000.

Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain Rp15,62 triliun

Realisasi Belanja Lain-lain TA 2007 adalah sebesar Rp15.621.179.426.686 yang berarti 60,59 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp25.781.186.587.000. Hal ini berarti realisasi Belanja Lain-lain TA 2007 lebih kecil Rp21.801.914.479.317 atau 58,26 persen dari TA 2006. Rincian Belanja lain-lain adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Belanja Kerjasama Teknis Internasional	-	6.107.628.750
Belanja Pengeluaran Tak Tersangka	623.476.000	-
Belanja Cadangan Umum	0	3.222.515.140.639
Belanja Pemilu/Sidang Tahunan	0	5.426.131.214
Belanja Cadangan Tunjangan Beras PNS/TNI/Polri	16.579.982.000	3.641.069.000
Belanja Cadangan Dana Reboisasi	1.946.251.971.367	3.911.997.016.852
Belanja Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	120.244.000	58.489.459.545
Belanja Dana Cadangan Tanggap Darurat (Dana Kontijensi)	697.922.519.628	26.951.255.117.883
Belanja Bagi Hasil Biaya/Upah Pungut PBB	774.102.006.321	784.914.701.630
Jasa Surveyor	151.662.828.578	-
Jasa Perbendaharaan	4.947.417.597	-
Belanja Lain-lain II lainnya	12.028.968.981.195	2.478.747.640.490
Jumlah	**15.621.179.426.686**	**37.423.093.906.003**

B.2.2.2. Transfer untuk Daerah

Realisasi Transfer daerah Rp253,26 triliun

Realisasi Transfer untuk Daerah TA 2007 adalah sebesar Rp253.263.178.086.104, yang berarti 99,63 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp254.201.014.938.000. Hal ini berarti Transfer untuk Daerah TA 2007 ini lebih besar Rp27.083.223.757.493 atau 11,97 persen dari TA 2006. Belanja untuk daerah terdiri dari *(i)* Dana Perimbangan, dan *(ii)* Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian.

B.2.2.2.1. Dana Perimbangan

Realisasi dana perimbangan Rp243,97 triliun

Realisasi Dana Perimbangan TA 2007 adalah sebesar Rp243.967.173.166.971 yang berarti 99,74 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp244.607.806.138.000. Hal ini berarti realisasi Dana Perimbangan TA 2007 ini lebih besar Rp21.836.555.268.460 atau 9,83 persen dari TA 2006. Dana Perimbangan terdiri dari *(i)* Dana Bagi Hasil (DBH), *(ii)* Dana Alokasi Umum (DAU), dan *(iii)* Dana Alokasi Khusus (DAK). Komposisi realisasi Dana Perimbangan disajikan pada Grafik 29.

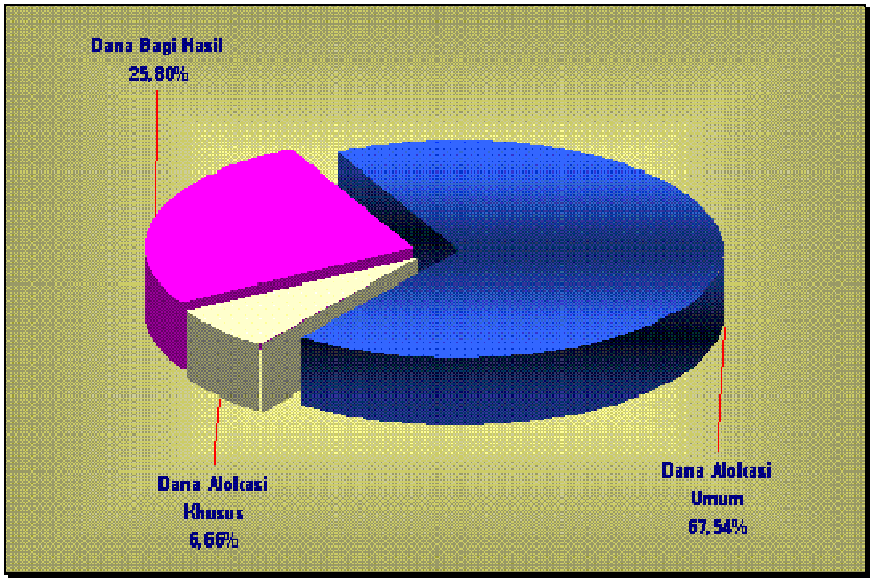

Grafik 29: Komposisi Realisasi Dana Perimbangan TA 2007

Rincian realisasi Dana Perimbangan disajikan pada **Daftar 3**.

B.2.2.2.1.1. Dana Bagi Hasil

Realisasi DBH Rp62,94 triliun

Realisasi Dana Bagi Hasil (DBH) TA 2007 adalah sebesar Rp62.941.953.784.545, yang berarti 100,34 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp62.726.306.138.000. Hal ini berarti realisasi Dana Bagi Hasil TA 2007 ini lebih kecil Rp1.958.344.992.196 atau turun 3,02 persen dari TA 2006. Realisasi DBH terdiri dari Bagi Hasil Perpajakan sebesar Rp34.990.015.781.141 dan Bagi Hasil SDA sebesar Rp27.951.938.003.404.

B.2.2.2.1.2. Dana Alokasi Umum

Realisasi DAU Rp164,79 triliun

Realisasi Dana Alokasi Umum (DAU) TA 2007 adalah sebesar Rp164.787.399.928.352, yang berarti 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp164.787.400.000.000. Hal ini berarti realisasi DAU TA 2007 ini lebih besar Rp19.123.215.209.116 atau 13,13 persen dari TA 2006.

B.2.2.2.1.3. Dana Alokasi Khusus

Realisasi DAK Rp16,24 triliun

Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) TA 2007 adalah sebesar Rp16.237.819.453.074, yang berarti 94,99 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp17.094.100.000.000. Hal ini berarti realisasi DAK TA 2007 ini lebih besar Rp4.671.685.051.440 atau 40,39 persen dari TA 2006.

B.2.2.2.2. Dana Otonomi Khusus & Penyesuaian

Realisasi dana otonomi khusus dan penyesuaian Rp9,30 triliun

Realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2007 adalah sebesar Rp9.296.004.920.133, yang berarti 96,90 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp 9.593.208.800.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian TA 2007 ini lebih besar Rp5.246.668.489.133 atau 129,57 persen dari TA 2006.

Dana Otonomi Khusus dan Penyesuaian terdiri dari *(i)* Dana Otonomi Khusus, dan *(ii)* Dana Penyesuaian.

B.2.2.2.2.1. Dana Otonomi Khusus

Realisasi dana otonomi khusus Rp4,05 triliun

Realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2007 adalah sebesar Rp4.045.748.000.000, yang berarti 100,00 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp4.045.748.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Otonomi Khusus TA 2007 ini lebih besar Rp557.464.000.000 atau 15,98 persen dari TA 2006.

B.2.2.2.2.2. Dana Penyesuaian

Realisasi dana penyesuaian Rp5,25 triliun

Realisasi Dana Penyesuaian TA 2007 adalah sebesar Rp5.250.256.920.133, yang berarti 94,64 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp5.547.460.800.000.000. Hal ini berarti realisasi Dana Penyesuaian TA 2007 ini lebih besar Rp4.689.204.489.133 atau 835,79 persen dari TA 2006.

B.2.2.3. Suspen

Perkiraan Suspen minus Rp236,53 miliyar

Suspen merupakan perkiraan (*account*) yang menampung perbedaan pencatatan realisasi APBN menurut kementerian negara/lembaga dengan pencatatan penerimaan dan pengeluaran anggaran yang dilakukan oleh Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN). Angka Suspen yang dilaporkan timbul karena perbedaan pencatatan realisasi Belanja Negara. Sementara perbedaan pencatatan realisasi Pendapatan Negara dan Hibah tidak ada karena data yang digunakan adalah data BUN. Jumlah perkiraan Suspen TA 2007 adalah sebesar minus Rp236.501.532.258 yang merupakan selisih lebih total Belanja Negara menurut data BUN dan data kementerian negara/lembaga dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	BUN	Kementerian Negara/Lembaga (KL)	Selisih (BUN – K/L)
Belanja Pemerintah Pusat	504.386.400.086.978	504.623.263.587.032	(236.863.500.054)
Transfer untuk Daerah	253.263.512.803.900	253.263.178.086.104	334.717.596
Suspen			**(236.528.782.258)**

Suspen tersebut terjadi terutama karena kementerian negara/lembaga kurang membukukan belanja (bruto) sebesar Rp353.879.010.776 dan pengembalian belanja sebesar Rp590.407.793.034, sehingga suspen neto sebesar minus Rp236.501.532.258.

B.2.3. Defisit Anggaran

Defisit anggaran Rp49,84 triliun

Berdasarkan realisasi Pendapatan Negara & Hibah dan realisasi Belanja Negara TA 2007 sebagaimana telah diuraikan di atas, maka Defisit Anggaran TA 2007 adalah sebesar Rp49.843.824.585.953, yang berarti 85,52 persen dari defisit yang diperkirakan dalam APBN-P sebesar Rp58.285.295.276.000.

B.2.4. Pembiayaan

Realisasi pembiayaan (neto) Rp42,46 triliun

Untuk menutupi Defisit APBN-P TA 2007 tersebut ditempuh berbagai upaya strategis untuk mengoptimalkan pembiayaan, baik yang bersumber dari dalam negeri maupun luar negeri. Dalam pelaksanaan APBN-P TA 2007, realisasi Pembiayaan (Neto) adalah sebesar Rp42.456.535.817.769 yang berarti 72,84 persen dari jumlah yang ditetapkan dalam APBN-P sebesar Rp58.285.295.276.000. Pembiayaan terdiri dari *(i)* Pembiayaan Dalam Negeri, dan *(ii)* Pembiayaan Luar Negeri.

B.2.4.1. Pembiayaan Dalam Negeri

Realisasi pembiayaan dalam negeri Rp66,31 triliun

Realisasi Pembiayaan Dalam Negeri TA 2007 adalah sebesar Rp66.308.947.652.257, yang berarti 93,62 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp70.825.681.176.000. Pembiayaan Dalam Negeri terdiri dari *(i)* Rekening Pemerintah, *(ii)* Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi, *(iii)* Surat Utang Negara (Neto), dan *(iv)* Penyertaan Modal Negara dan Dukungan Infrastruktur.

Rekening Pemerintah

Realisasi Pembiayaan Rekening Pemerintah Rp8,42 triliun

Realisasi Pembiayaan Rekening pemerintah TA 2007 adalah sebesar Rp8.419.921.011.984, yang berarti 79,27 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp10.621.642.900.000. Rincian Pembiayaan Rekening Pemerintah adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)	279.042.900.000	0
Penerimaan dari Penutupan Rekening	30.350.324.061	5.055.462.940.247
Penerimaan Pembiayaan dari RDI	4.500.000.000.000	2.000.000.000.000
Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi	-	4.500.000.000.000
Penerimaan Pembiayaan dari dana eks moratorium pokok untuk Cadangan Aceh	6.342.600.000.000	7.357.400.000.000
Pengembalian Pembiayaan dari RDI	(500.000.000.000)	0
Penyesuaian Penambahan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs	9.261.378.112.144	3.665.247
Penyesuaian Penurunan Saldo Rekening Khusus Karena Selisih Kurs	(8.770.093.265.433)	0
Penerusan Pinjaman LN kepada Daerah TA Berjalan	(24.669.226.467)	0
Penerusan Pinjaman LN kepada BUMN TA Berjalan	(2.247.418.390.060)	(3.557.973.958.998)
Penerusan Pinjaman LN kepada BUMN TA yang Lalu	(451.269.442.261)	0
Jumlah	**8.419.921.011.984**	**15.354.892.646.496**

Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Realisasi pembiayaan Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi Rp5,42 triliun

Realisasi Pembiayaan dari Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi TA 2007 sebesar Rp5.416.839.483.371, atau 85,20 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp6.357.719.000.000, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Penerimaan Hasil Privatisasi	3.004.286.291.162	2.371.675.405.434
Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi	1.446.223.678.766	2.684.027.191.881
Penerimaan Hasil Penjualan Aset eks BPPN	967.284.139.898	0
Pengembalian Penerimaan Hasil Penjualan penyelesaian Aset esks BPPN	(954.626.455)	0
Jumlah	**5.416.839.483.371**	**5.055.702.597.315**

Surat Utang Negara (Neto)

Realisasi pembiayaan Surat Utang Negara (Neto) Rp57,17 triliun

Realisasi Pembiayaan dari Surat Utang Negara (SUN) Neto TA 2007 adalah sebesar Rp57.172.187.156.902, atau 97,65 persen dari yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2007 sebesar Rp58.546.319.276.000. Realisasi Pembiayaan dari Surat Utang Negara berasal dari:

Uraian	TA 2007 (Audited)	TA 2006 (Audited)
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara DN	1.120.907.117.000	1.689.768.517.000
Penerimaan Pembiayaan untuk Obligasi DN	97.992.895.000.000	73.757.650.000.000

Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi LN	13.575.648.587.500	18.466.901.169.540
Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan DN	4.168.800.000.000	-
Penerimaan Utang Bunga SUN/Obligasi LN	-	320.496.746.922
Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN	(39.786.861.003.598)	(25.141.982.761.508)
Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi - Melalui Pembelian Kembali	(18.702.248.000.000)	(31.226.291.000.000)
Belanja Pembayaran Utang Bunga SUN/Obligasi DN	(1.196.954.544.000)	(1.567.098.452.000)
Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi LN	-	(313.936.871.985)
Jumlah	**57.172.187.156.902**	**35.985.507.347.969**

Penyertaan Modal Negara dan Dukungan Infrastruktur

Realisasi PMN dan Dukungan Infrastruktur minus Rp4,70 triliun

Realisasi pengeluaran Pembiayaan Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dukungan Infrastruktur TA 2007 adalah sebesar Rp4.700.000.000.000, yang berarti 100,00 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P TA 2007 sebesar Rp4.700.000.000.000. Rincian Penyertaan Modal tersebut adalah (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
PMN untuk BUMN	2.700.000.000.000)	1.972.000.000.000
Penyertaan Modal Lainnya (Dukungan Infrastruktur)	2.000.000.000.000)	2.000.000.000.000
Total	**4.700.000.000.000)**	**3.972.000.000.000**

B.2.4.2. Pembiayaan Luar Negeri (Neto)

Realisasi pembiayaan LN (neto) minus Rp23,85 triliun

Realisasi Pembiayaan Luar Negeri (Neto) TA 2007 adalah sebesar minus Rp23.852.411.834.488, yang berarti 190,20 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar minus Rp12.540.385.900.000. Pembiayaan Luar Negeri berasal dari penarikan pinjaman luar negeri bruto setelah dikurangi dengan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri.

B.2.4.2.1. Penarikan Pinjaman Luar Negeri

Realisasi penarikan pinjaman LN (bruto) Rp34,07 triliun

Realisasi Penarikan Pinjaman Luar Negeri (Bruto) TA 2007 adalah sebesar Rp34.070.047.317.686 yang berarti 80,72 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp42.210.304.100.000. Penarikan pinjaman luar negeri terdiri dari *(i)* penarikan pinjaman program, dan *(ii)* penarikan pinjaman proyek.

B.2.4.2.1.1. Penarikan Pinjaman Program

Realisasi penarikan pinjaman program Rp19,61

Realisasi Pinjaman Program TA 2007 adalah sebesar Rp19.607.480.189.151, yang berarti 103,17 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp19.005.000.000.000. Rincian realisasi Penarikan Pinjaman Program adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (Audited)
Penarikan Pinjaman Program dari OECF	3.725.790.689.151	915.056.506.949
Penarikan Pinjaman Program dari IBRD	5.630.089.500.000	4.788.020.000.000
Penarikan Pinjaman Program dari ADB	8.454.400.000.000	5.428.400.000.000
Penarikan Pinjaman Program Multilateral Lainnya	1.797.200.000.000	2.448.076.249.334
Jumlah	**19.607.480.189.151**	**13.579.552.756.283**

B.2.4.2.1.2. Penarikan Pinjaman Proyek

Realisasi penarikan pinjaman proyek Rp14,46 triliun

Realisasi Pinjaman Proyek TA 2007 adalah sebesar Rp14.462.567.128.535, yang berarti 62,32 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp23.205.304.100.000. Rincian realisasi Penarikan Pinjaman Proyek adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Penarikan Pinjaman Proyek Bilateral	5.467.822.744.486	5.039.901.938.771
Penarikan Pinjaman Proyek Multilateral	5.204.974.233.105	6.064.506.728.051
Penarikan Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	3.350.335.783.286	4.801.291.435.052
Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya	439.490.286.838	187.306.339.714
Pengembalian Penarikan Pinjaman Proyek Lainnya	-55.919.180	0
Total *)	**14.462.567.128.535**	**16.093.006.441.588**

*) Terdapat reklasifikasi realisasi Penerusan Pinjaman Luar Negeri yang pada TA 2006 disajikan sebagai pengurang Penarikan Pinjaman Proyek, menjadi bagian dari Pembiayaan Rekening Pemerintah pada TA 2007.

B.2.4.2.2. Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri

Pembayaran cicilan pokok utang LN Rp57,92 triliun

Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri merupakan pembayaran pokok utang luar negeri yang jatuh tempo pada TA 2007. Realisasi Pembayaran Cicilan Pokok Utang Luar Negeri dalam TA 2007 adalah sebesar Rp57.922.459.152.174, yang berarti 105,79 persen dari jumlah yang dianggarkan dalam APBN-P sebesar Rp54.750.690.000.000.

B.2.5. Sisa Lebih (Kurang) Pembiayaan Anggaran – SILPA (SIKPA)

SIKPA Rp7,39 triliun

Berdasarkan realisasi Defisit Anggaran sebesar Rp49.843.824.585.953 dan realisasi Pembiayaan Neto sebesar Rp42.456.535.81.769 sebagaimana diuraikan di atas, maka dalam pelaksanaan APBN-P TA 2007 terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SIKPA) sebesar Rp7.387.288.768.184.

B.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. **Dampak Hasil Pemeriksaan BPK atas 23 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2006 terhadap Laporan Realisasi APBN**

   Sesuai dengan penjelasan pada LKPP Tahun 2006 (*Audited*), bahwa LKPP Tahun 2006 (Audited) tersebut memuat data 23 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang masih berstatus belum diaudit oleh BPK (*Unaudited*). Hal ini terjadi karena pada saat penyusunan dan penyampaian LKPP Tahun 2006 (Audited) kepada DPR RI, 23 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tersebut belum selesai diaudit oleh BPK.

   Pos-pos yang disajikan pada Laporan Realisasi APBN TA 2006 yang disandingkan dengan Laporan Realisasi APBN TA 2007 ini berdasarkan Laporan Realisasi APBN TA 2006 yang memuat 23 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang belum

diaudit tersebut.

Koreksi atas pos-pos dalam Laporan Realisasi Anggaran 23 Kementerian Negara/Lembaga TA 2006 berdasarkan hasil pemeriksaan BPK tidak berpengaruh pada SiLPA (SiKPA) dan SAL TA 2006.

2. Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (PK BLU)

Sebagai bagian dari reformasi manajemen keuangan negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara telah mengamanatkan berbagai perubahan fundamental, antara lain pada Pasal 68 dan 69 mengenai PK BLU untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan negara dalam rangka meningkatkan kinerja pelayanan publik.

Amanat UU Nomor 1 Tahun 2004 tersebut telah dijabarkan lebih lanjut dalam PP Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum dan 5 (lima) Peraturan Menteri Keuangan berkaitan dengan Persyaratan Administratif Dalam Rangka Pengusulan dan Penetapan Satker Instansi Pemerintah untuk Menerapkan PPK BLU, Kewenangan Pengadaan Barang/Jasa pada BLU, Pembentukan Dewan Pengawas pada BLU, Pedoman Penetapan Remunerasi pada BLU, Tata Cara Penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA) serta Dokumen Pelaksanaan Anggaran BLU.

BLU merupakan wadah implementasi konsep *"enterprising the government"* dan penganggaran berbasis kinerja di lingkungan pemerintah. BLU diberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan untuk mendukung produktivitas, efisiensi, dan efektivitas pelayanan publik tetapi tidak bertujuan mencari laba. Fleksibilitas BLU antara lain mengelola langsung pendapatan operasionalnya, tidak harus menyetor surplus akhir tahun ke Rekening Kas Negara, pegawai bisa PNS dan non-PNS, remunerasi berdasarkan tingkat tanggung jawab dan profesionalisme. Sumber pembiayaan instansi yang menerapkan PK BLU berasal dari APBN, pendapatan dari pelayanan, kerja sama operasional, hibah, dan pendapatan lainnya.

Bidang layanan umum yang diselenggarakan instansi PK BLU adalah kegiatan pemerintah yang bersifat operasional dalam menyelenggarakan pelayanan umum yang menghasilkan semi barang/jasa (*quasi public goods*), meliputi penyediaan barang/jasa, pengelola wilayah, dan pengelola dana khusus untuk meningkatkan ekonomi masyarakat.

BLU diharuskan menyusun dan mengintegrasikan Rencana Biaya dan Anggaran (RBA) dalam Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) kementerian negara/lembaga induknya. Transparansi dan akuntabilitas diinformasikan dalam laporan keuangan instansi PK BLU, minimal terdiri dari laporan operasional/laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan catatan atas laporan keuangan, disertai laporan kinerja. Laporan keuangan tersebut diaudit oleh pemeriksa ekstern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laporan keuangan instansi PK BLU tersebut harus dikonsolidasikan dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga, yang selanjutnya dikonsolidasikan dalam LKPP yang disampaikan Presiden kepada DPR sebagai RUU pertanggungjawaban pelaksanaan APBN.

Sampai dengan tanggal 31 Desember 2007, terdapat 37 (tiga puluh tujuh) instansi pemerintah yang telah menerapkan PK BLU, yaitu:

1. RSUP Dr. Cipto Mangunkusumo Jakarta, Departemen Kesehatan.
2. RSUP Fatmawati Jakarta, Departemen Kesehatan.
3. RS Kanker Dharmais Jakarta, Departemen Kesehatan.
4. RS Jantung & Pembuluh Darah Harapan Kita Jakarta, Departemen Kesehatan.

5. RS Anak & Bersalin Harapan Kita Jakarta, Departemen Kesehatan.
6. RSUP Persahabatan Jakarta, Departemen Kesehatan.
7. RSUP Hasan Sadikin Bandung, Departemen Kesehatan.
8. RSUP Kariadi Semarang, Departemen Kesehatan.
9. RSUP Sardjito Yogyakarta, Departemen Kesehatan.
10. RSUP Sanglah Denpasar, Departemen Kesehatan.
11. RSUP Dr. M. Djamil Padang, Departemen Kesehatan.
12. RSUP Moh. Hoesin Palembang, Departemen Kesehatan.
13. RSUP Dr. Wahidin Sudirohusodo Makassar, Departemen Kesehatan.
14. RSPI PROF.DR. Sulianti Saroso Jakarta, Departemen Kesehatan.
15. RSO PROF.DR.R.Soeharso Surakarta, Departemen Kesehatan.
16. RSU PROF.Dr.R.D. Kandow Manado, Departemen Kesehatan.
17. RSU Dr. Soeradji Tirtonegoro Klaten, Departemen Kesehatan.
18. RS Paru Ario Wirawan Salatiga, Departemen Kesehatan.
19. RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung, Departemen Kesehatan.
20. RS Mata Cicendo Bandung, Departemen Kesehatan.
21. RSJ Dr. Soeharto Heerdjan Jakarta, Departemen Kesehatan.
22. RS Jiwa Dr. Soeroyo Magelang, Departemen Kesehatan.
23. RS. DR. H. Marzoeki Mahdi Bogor, Departemen Kesehatan.
24. RS Adam Malik Medan, Departemen Kesehatan.
25. RS Ketergantungan Obat Jakarta, Departemen Kesehatan.
26. RS Paru Dr. M. Gunawan Cisarua Bogor, Departemen Kesehatan.
27. RSUP Rujukan Stroke Nasional Bukittinggi, Departemen Kesehatan.
28. RS Jiwa Radjiman W. Lawang, Departemen Kesehatan.
29. Unit Pembiayaan Penyediaan Dana Pengadaan Pembebasan Lahan Tol, Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT), Departemen Pekerjaan Umum.
30. Pusat Investasi Pemerintah (PIP), Departemen Keuangan.
31. Balai Telekomunikasi dan Informatika Perdesaan (BTIP), Departemen Komunikasi dan Informatika.
32. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB), Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil Menengah.
33. Pusat Peragaan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (PP IPTEK), Kementerian Negara Riset dan Teknologi.
34. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (PPPH), Departemen Kehutanan.
35. Lembaga Layanan Pemasaran Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah (LLP KUKM), Kementerian Negara Koperasi dan UKM.
36. Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi Enjiniring (BPPT Enjiniring), Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi.
37. Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga (UIN Sunan Kalijaga), Departemen Agama.

Dari 37 BLU tersebut, 33 BLU bergerak dalam bidang layanan barang/jasa dan 4 BLU bergerak dalam bidang pembiayaan. Dari 33 BLU yang bergerak dalam bidang layanan barang/jasa, 28 BLU merupakan RS Pemerintah (13 RS eks Perjan dan 15 RS eks Satker PNBP), 2 BLU bergerak dalam bidang teknologi yaitu BPPT Enjiniring dan PP IPTEK, 1 BLU yang bergerak dalam bidang jasa telekomunikasi yaitu BTIP, 1 BLU bergerak dalam bidang pemasaran KUKM yaitu LLP KUKM, dan 1 BLU bergerak dalam bidang pendidikan yaitu UIN Sunan Kalijaga. Sedangkan 4 BLU yang bergerak dalam bidang pembiayaan adalah BPJT, PIP, LPDB, dan PPPH.

Beberapa BLU telah menyusun laporan keuangan tahun 2007 dan telah mengkonsolidasikan laporan keuangannya ke dalam laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan LKPP Tahun 2007, kecuali 2 Satker BLU yaitu BPJT yang belum

mempunyai DIPA yang memuat pendapatan untuk melakukan kegiatan operasionalnya dan PPPH yang belum mempunyai kegiatan pada tahun 2007. Selain itu, terdapat Satker BLU yang tidak menyampaikan laporan keuangan berdasarkan SAK yaitu UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, sehingga nilai yang tercantum dalam diagram pada CaLK ini untuk Satker BLU tersebut adalah nilai dari laporan keuangan berdasarkan SAP.

Berdasarkan laporan keuangan 37 (tiga puluh tujuh) BLU pada tahun 2007, total pendapatan adalah sebesar Rp5.330.731.872.358 yang rinciannya dapat dilihat dari grafik berikut ini:

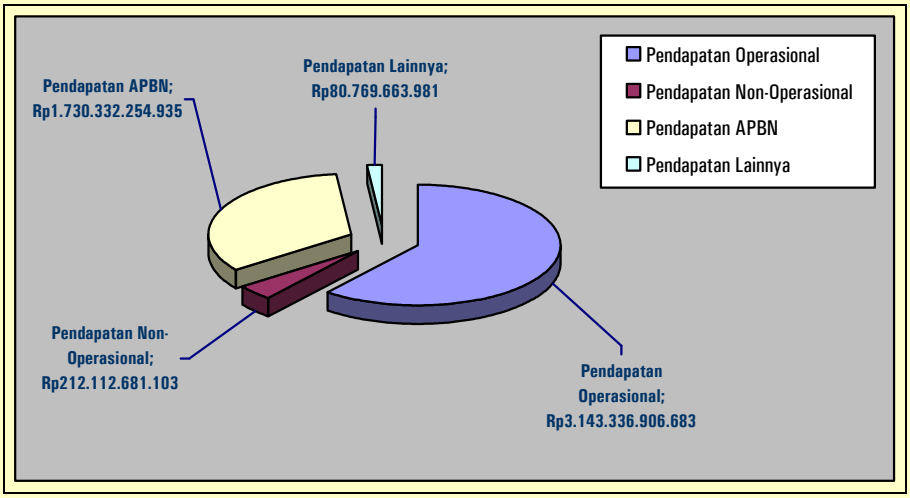

Perbandingan pendapatan, beban, dan surplus (defisit) Satker BLU tahun 2006 dan tahun 2007 disajikan dalam grafik di bawah ini:

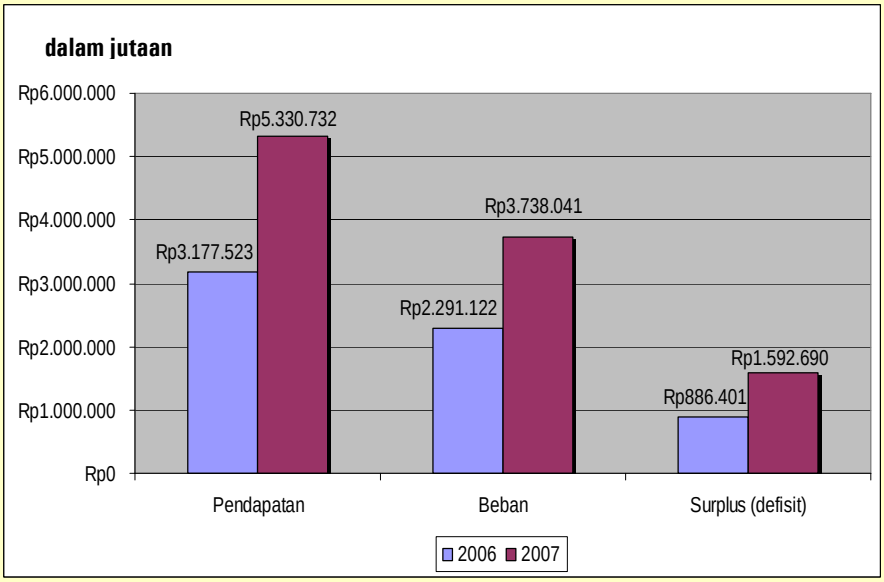

3. Pertanggungjawaban Penerimaan Hibah

Pada beberapa kementerian negara/lembaga, terdapat penerimaan hibah yang belum dilaporkan dalam Laporan Realisasi Anggaran (LRA) Kementerian Negara/Lembaga yang bersangkutan. Berikut rincian anggaran dan realisasi penerimaan hibah masing-masing kementerian negara/lembaga yang belum dilaporkan dalam LRA:

Kementerian Negara/Lembaga	Pemberi Hibah	Mata Uang	Anggaran	Realisasi
BPK	ANAO	AUS$	2.826.659	-
	SNAO	SEK	1.600.000	-
Sekretariat Negara	IASTP	Rp	64.565.657.000	-
Departemen Kesehatan	WHO	Rp	1.531.946.750	1.510.701.200
	WHO, JPFR, UNICEF, NNFPA	Rp	11.525.080.777	6.968.436.984
	WHO, UNICEF	Rp	378.476.468.193	136.610.557.323
	GF,KNCV,GAVI, PATH, NLR, CDC ATLANTA	Rp	258.121.800	257.505.100
	QUINSLAND UNIVERSITY	Rp	2.383.888.700	2.383.888.700
	SCHJ UNI EROPA	Euro	12.822.517	11.822.547
BKKBN	UNFPA	Rp	2.850.320.000	-
BAKORSURTANAL	MCRMP	US$	490.638	451.332
	AIPRO	AUS$	4.070.087,68	-
		AUS$	3.500.000	-
	JBIC	JP YEN	6.370.000.000	-
	GIS	E	1.688.983,15	-
		NOK	13.700.000	-
		E	127.500	127.500
BRR NAD-NIAS (RANTF)	Berbagai Donatur	US$	3.476.886.146	2.113.858.475

Selain itu, terdapat bantuan hibah dari Pemerintah Jerman yang tercantumkan dalam DIPA Kementerian Negara PAN sebesar Rp7.833.333.000 yang dalam pelaksanaannya dikelola sendiri oleh pemberi hibah dalam hal ini GTZ. Kementerian Negara PAN tidak bisa melaporkan jumlah realisasinya karena pihak pengelola tidak menyampaikan laporan.

4. Bencana Lumpur Sidoarjo

Pada tanggal 29 Mei 2006 telah terjadi luapan lumpur panas di Desa Renokenongo, Kecamatan Porong, Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. Luapan lumpur panas ini disebabkan kebocoran pipa gas milik PT Lapindo Brantas di lokasi eksplorasi Sumur Banjarpanji-1 (BJP-1).

Semburan lumpur panas di Sidoarjo, yang dikenal dengan "Lumpur Sidoarjo" tersebut telah menimbulkan kerusakan lingkungan hidup dan kerugian ekonomi yang sangat besar, seperti kerusakan infrastruktur vital, sarana umum, dan tempat tinggal. Lumpur yang keluar dari perut bumi tersebut semakin meningkat, pada bulan Juni 2006 sekitar 5.000 m^3 per hari, meningkat menjadi 50.000 m^3 per hari pada akhir tahun 2006, dan menjadi 100.000 – 126.000 m^3 per hari pada akhir tahun 2007.

Sampai dengan akhir tahun 2007, luapan lumpur Sidoarjo tersebut telah menenggelamkan sekitar 1 persen dari total luas wilayah Sidoarjo dan daerah yang terkena dampak sekitar 10 persen dari total wilayah Sidoarjo.

Untuk menangani bencana lumpur Sidoarjo tersebut, Pemerintah telah membentuk Tim Nasional Penanggulangan Semburan Lumpur Sidoarjo (Timnas PSLS) melalui Keputusan Presiden Nomor 13 Tahun 2006 pada tanggal 8 September 2006 sebagaimana telah diperpanjang dengan Keputusan Presiden Nomor 5 Tahun 2007. Timnas PSLS ini bertugas mengambil langkah-langkah operasional secara terpadu dalam rangka penanggulangan semburan lumpur di Sidoarjo yang meliputi: (i) penutupan semburan

lumpur, (ii) penanganan luapan lumpur, dan (iii) penanganan masalah sosial.

Karena dampak luapan lumpur di Sidoarjo sudah demikian luas terhadap sendi-sendi kehidupan masyarakat di sekitarnya, maka diperlukan kebijakan nasional yang lebih komprehensif. Oleh karena itu, Pemerintah membentuk organisasi yang lebih terstruktur sebagai pengganti Timnas PSLS, yaitu Badan Penanggulangan Lumpur Sidoarjo (BPLS) melalui Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007.

Berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2007, biaya penanggulangan semburan lumpur termasuk di dalamnya penanganan tanggul utama sampai ke Kali Porong dibebankan kepada PT Lapindo Brantas. Sedangkan biaya masalah sosial kemasyarakatan di luar peta area terdampak tanggal 22 Maret 2007 dan biaya untuk upaya penanganan masalah infrastruktur termasuk infrastruktur untuk penanganan luapan lumpur di Sidoarjo, dibebankan kepada APBN dan sumber dana lainnya yang sah.

Pada tahun anggaran 2007, BPLS mendapatkan alokasi APBN sebesar Rp500.000.000.000 melalui Bagian Anggaran 105. Dari total anggaran sebesar itu, yang terealisasi adalah sebesar Rp114.183.343.657 atau 22,84 persen dari anggarannya. Realisasi belanja tersebut terdiri dari (i) Belanja Pegawai sebesar Rp3.973.508.248, (ii) Belanja Barang sebesar Rp9.917.226.804, (iii) Belanja Modal sebesar Rp100.242.833.605, dan (iv) Belanja Bantuan Sosial sebesar Rp49.775.000. Selain mendapat alokasi anggaran melalui BA 105, BPLS juga mendapatkan alokasi anggaran melalui BA 069 (Belanja Lain-lain) sebesar Rp5.336.639.000 dengan realisasi sebesar Rp4.893.311.562 atau 91,69 persen dari anggarannya.

C. PENJELASAN ATAS POS-POS NERACA

C.1. POSISI KEUANGAN SECARA UMUM

Posisi Neraca secara umum

Ringkasan Neraca per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2007	31 Desember 2006
Aset Lancar	156.599.727.674.012	125.985.156.709.628
Investasi Jangka Panjang	691.342.462.226.564	663.551.102.160.825
Aset Tetap	443.485.970.952.729	343.924.953.816.351
Aset Lainnya	308.783.512.011.720	86.503.344.625.017
Jumlah Aset	**1.600.211.672.865.025**	**1.219.964.557.311.821**
Kewajiban Jangka Pendek	139.732.332.373.059	108.140.970.556.881
Kewajiban Jangka Panjang	1.291.233.131.686.497	1.221.922.100.587.778
Jumlah Kewajiban	**1.430.965.464.059.556**	**1.330.063.071.144.659**
Ekuitas Dana Lancar	(30.789.667.684.301)	17.844.186.152.747
Ekuitas Dana Investasi	200.035.876.489.770	(127.942.699.985.585)
Jumlah Ekuitas Dana Neto	**169.246.208.805.469**	**(110.098.513.832.838)**

Perbandingan Neraca selama 4 tahun terakhir

Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto selama 4 (empat) tahun terakhir disajikan pada Grafik 30.

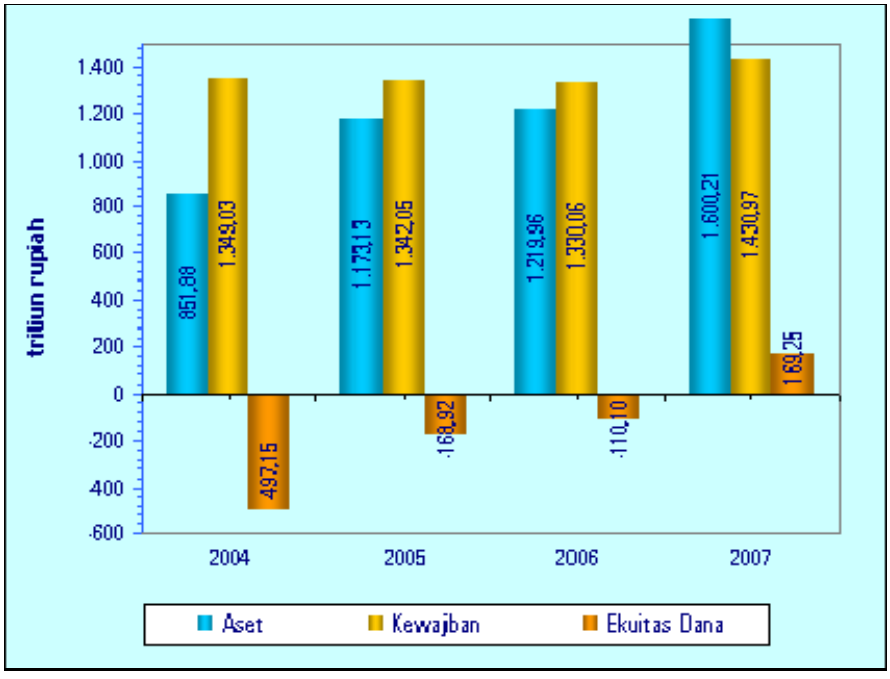

Grafik 30: Perbandingan Aset, Kewajiban, dan Ekuitas Dana Neto pada Neraca Tahun 2004 - 2007

C.2. PENJELASAN PER POS NERACA

C.2.1. Rekening Kas BUN di Bank Indonesia

Rekening Kas BUN di BI Rp18,17 triliun

Jumlah Rekening Kas BUN di Bank Indonesia (BI) per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp18.170.046.148.742 dan Rp954.310.836.789 merupakan saldo Rekening 502 yang ada di BI.

Saldo per 31 Desember 2007 terdiri dari:

Jenis Rekening	31 Desember 2007	31 Desember 2006
Rek. BUN No. 502.000000	15.367.828.965.873	954.310.836.789
Rek. KUN dalam Valuta USD No. 600.502411 (USD297,506,867)	2.802.217.182.869	0
Jumlah	18.170.046.148.742	954.310.836.789

Kenaikan saldo Rekening Kas BUN di BI terjadi karena mulai TA 2008 pembayaran Dana Alokasi Umum (DAU) kepada pemerintah daerah dilakukan melalui BUN Pusat tidak melalui KPPN lagi, sehingga diperlukan saldo yang besar pada akhir tahun anggaran. Selain itu juga karena reklasifikasi Rekening Valuta Asing dalam bentuk USD yang pada tahun 2006 disajikan sebagai Rekening Pemerintah Lainnya, mulai tahun 2007 disajikan sebagai Rekening Kas BUN di BI.

C.2.2. Rekening Kas di KPPN

Rekening Kas di KPPN Rp5,50 triliun

Jumlah Rekening Kas di KPPN per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp5.492.896.654.079 dan Rp20.594.618.632.501 merupakan saldo Rekening Kas KPPN di seluruh Indonesia. Penurunan terhadap saldo kas di KPPN disebabkan oleh:

- Saldo besi KPPN untuk pembayaran DAU pada awal tahun tidak diperlukan lagi, karena mulai TA 2008 pembayaran DAU kepada pemerintah daerah tidak melalui KPPN melainkan melalui kantor BUN Pusat (**Lihat Catatan C.2.1**).
- Penerapan *Treasury Single Account* (TSA) pada tahun 2007, sehingga KPPN tidak lagi memiliki *based stock* (saldo besi) yang besar pada akhir tahun anggaran.

Daftar Saldo Kas di KPPN dapat dilihat pada **Daftar 4.**

C.2.3. Rekening Pemerintah Lainnya di Bank Indonesia

RPL di BI Rp3,25 triliun

Jumlah Rekening Pemerintah Lainnya di BI per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp3.248.408.392.480 dan Rp12.331.109.271.481 merupakan saldo Rekening Pemerintah Lainnya yang ada di BI, yang terdiri dari (dalam Rp):

Rekening	31 Desember 2007	31 Desember 2006
RDI/RPD	452.257.388.454	4.263.280.108.491
Rek. Pemerintah Lainnya	2.633.225.384.062	6.916.339.111.331
Rek. Hasil Minyak Perjanjian KPS	162.925.619.964	1.151.490.051.659
Jumlah	**3.248.408.392.480**	**12.331.109.271.481**

Saldo Rekening Pemerintah Lainnya per 31 Desember 2007 mengalami penurunan dari saldo per 31 Desember 2006. Hal ini disebabkan antara lain adanya reklasifikasi Rekening Valuta Asing dalam bentuk USD ke Rekening Kas BUN di BI (**Lihat Catatan C.2.1**).

Saldo Rekening Minyak Perjanjian KPS sebesar Rp162.925.619.964 merupakan Kas BUN dalam bentuk valas dengan Rekening No. 600.000.411, sebagai rekening antara untuk menampung seluruh penerimaan dalam valuta asing dari hasil kegiatan usaha hulu migas dalam rangka *Production Sharing Contract*/Kontrak Kerja Sama dan membayar kewajiban kontraktual migas kepada Pemerintah. Transaksi (mutasi) arus masuk dan keluar kas dari Rekening No. 600.000.411 tersebut disajikan pada Tabel 6.

Mutasi Rekening Migas No.600.000.411

Tabel 6
Mutasi Rekening Nomor 600.000.411 Tahun 2007

URAIAN		US$	Ekuivalen Rp (Juta)
I. Penerimaan:			
1. Penerimaan PPh Migas dan Penerimaan Bag Pemerintah		11.680.514.651	106.931.826,00
2. Selisih Kurs		-	6.326.176,77
3. Pengembalian Dana Talangan	a)	461.538.462	4.200.000,00
4. Koreksi Pembukuan	b)	937.253.771	8.749.344,73
Total Penerimaan		**13.079.306.883**	**126.207.347,51**
II. Pengeluaran:			
1. Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD:			
a. Bagi Hasil PBB Migas ke Pemda via BO III		1.970.278.035	17.997.308,23
b. Pajak Penerangan Jalan non PLN & ABT ke Pemda		7.672.963	70.637,95
c. Pemindahbukuan ke Rek. Valas KUN No. 502.600411		8.303.450.273	76.299.328,34
- PPh Minyak Bumi (MAP 411111)		1.775.864.734	16.289.863,96
- PPh Gas Alam (MAP 411112)		2.970.961.726	27.257.829,98
- Pendapatan Minyak Bumi (MAP 421111)		157.690.623	1.448.777,21
- Pendapatan Gas Alam (MAP 421211)		3.385.302.374	31.179.214,03
- Pendapatan Migas lainnya (MAP 423439)		11.130.816	100.848,15
- Pendapatan Bunga Penagihan PPh Non Migas (MAP 411621)	c)	2.500.000	22.795,00
Sub Total Pengeluaran berkaitan dengan APBN/APBD		10.281.401.270	94.367.274,53
2. Pengeluaran non APBN/APBD:			
a. Reimbursement PPN ke Kontraktor		460.515.229	4.183.857,19
b. Pembayaran DMO Fee KKKS		349.889.061	3.221.308,22
c. Pembayaran Fee Penjualan & BPMIGAS		62.600.315	567.525,76
d. Pembayaran Underlifting KKKS		28.009.339	252.702,80
Sub Total Pengeluaran non APBN/APBD		901.013.944	8.225.393,98
3. Koreksi Pembukuan	d)	937.253.771	8.749.302,00
Selisih Kurs		-	5.775.611,42
4. Pinjaman untuk Dana Talangan	e)	1.070.000.000	10.078.330,00
Total Pengeluaran		**13.189.668.985**	**127.195.911,95**
III. Kenaikan/Penurunan (I - II)		**(110.362.102)**	**(988.564,43)**
IV. Saldo Awal		127.659.651	1.151.490,05
V. Saldo Akhir (III + IV)		**17.297.549**	**162.925,61**

Keterangan:

a) Merupakan pengembalian Dana Talangan yang dipinjam dari saldo rekening valas No. 600.000411 pada bulan Desember 2006. Penggunaan dana talangan tersebut merupakan kebijakan Pemerintah yang ditetapkan pada tanggal 29 Desember 2006 guna menutup kekurangan *cash flow* pada akhir tahun 2006.

b) Koreksi-koreksi yang diakibatkan adanya koreksi pembukuan, retur pengeluaran (retur pembayaran kewajiban-kewajiban sektor migas), kesalahan transfer pihak ketiga, pembetulan atau koreksi karena kesalahan penggunaan kurs, dll, dengan rincian sebagai berikut:
   - Koreksi atas kesalahan transfer bukan peruntukkan rekening No. 600.000411 sebesar $113.195
   - Koreksi karena dua kali pembukuan untuk pembayaran overlifting sebesar $3.780.367
   - Koreksi karena dua kali pembukuan untuk pembayaran PBB Migas sebesar $365.551

- Koreksi pembetulan kurs dalam pembukuan untuk pembayaran reimbursement PPN sebesar $64.282.190
- Koreksi pembetulan kurs dalam pembukuan untuk pemindahbukuan PPh dan SDA migas ke rekening KUN sebesar $868.712.468

c) Merupakan koreksi pemindahbukuan karena salah transfer dari KKKS (berasal dari setoran yang peruntukkannya bukan untuk rekening valas No. 600.000411).

d) Koreksi pembukuan atas transaksi II.1.a - II.1.c, dengan rincian sebagai berikut:
- Koreksi karena dua kali pembukuan untuk pembayaran PBB Migas sebesar $365.551
- Koreksi pembetulan kurs dalam pembukuan untuk pemindahbukuan PPh dan SDA migas ke rekening Kas Umum Negara (KUN) sebesar $868.712.468

Koreksi pembukuan atas transaksi II.2.a - II.2.d, dengan rincian sebagai berikut:
- Koreksi atas kesalahan transfer bukan peruntukkan rekening No. 600.000411 sebesar $113.195
- Koreksi karena dua kali pembukuan untuk pembayaran overlifting sebesar $3.780.367
- Koreksi pembetulan kurs dalam pembukuan untuk pembayaran reimburesement PPN sebesar $64.604.905

e) Merupakan pinjaman Dana Talangan dari saldo rekening valas No.600.000411 pada bulan Desember 2007 untuk menutup kekurangan *cash flow* pada akhir tahun 2007.

Rincian lebih lengkap masing-masing rekening dapat dilihat pada **Daftar 5**.

C.2.4. Kas di Bendahara Pengeluaran

Kas di Bendahara Pengeluaran Rp1,25 triliun

Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp1.245.221.273.097 dan Rp1.457.362.551.679 merupakan kas yang dikuasai, dikelola, dan di bawah tanggung jawab bendahara pengeluaran, yang berasal dari sisa Uang Persediaan (UP) dan seluruh pendapatan yang diterima oleh bendahara pengeluaran (non UP), namun sampai dengan akhir tahun anggaran belum disetor/dipertanggungjawabkan ke kas negara. Kas di Bendahara Pengeluaran sebesar Rp1.245.221.273.097 terdiri dari kas UP yang merupakan bagian dari SAL sebesar Rp1.155.864.576.821, dan sisanya sebesar Rp89.356.696.276 merupakan kas non UP.

Rincian Kas di Bendahara Pengeluaran dapat dilihat pada **Daftar 6.**

C.2.5. Kas di Bendahara Penerimaan

Kas di Bendahara Penerimaan Rp878,05 miliar

Jumlah Kas di Bendahara Penerimaan per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp878.054.836.115 dan Rp429.489.122.788 mencakup seluruh kas, baik saldo rekening di bank maupun saldo uang tunai yang berada di bawah tanggung jawab bendahara penerimaan yang belum disetorkan ke kas negara. Rincian Kas di Bendahara Penerimaan pada 38 K/L dapat dilihat pada **Daftar 7.**

C.2.6. Kas pada BLU

Kas pada BLU Rp444,77 miliar

Jumlah Kas pada BLU per 31 Desember 2007 sebesar Rp444.767.605.022 merupakan saldo kas pada BLU, yang terdiri dari (dalam Rp):

1. BLU di Departemen Keuangan	13.808.096.801
2. BLU di Departemen Kesehatan	407.612.396.968
3. BLU di Departemen Agama	8.033.580.828
4. BLU di Kementerian Negara Koperasi dan UKM	10.277.513.438
5. BLU di BPPT	5.036.016.987
Jumlah	**444.767.605.022**

Saldo Kas BLU tersebut diperoleh berdasarkan Neraca BLU yang telah dikonsolidasikan pada Neraca

kementerian negara/lembaga yang membawahinya. Apabila dibandingkan dengan saldo Kas BLU berdasarkan data Laporan Arus Kas, maka terdapat perbedaan sebesar Rp45.295.407.788 (Rp444.767.605.022 dikurangi Rp399.472.197.234). Perbedaan tersebut disebabkan antara lain oleh penggunaan mata anggaran pendapatan dan belanja yang tidak tepat dalam SPM Pengesahan atas Pendapatan dan Belanja Operasional BLU.

C.2.7. Kas Trust Fund

Kas trust Fund Rp0

Saldo Kas Trust Fund per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 adalah Rp0 dan Rp2.425.944.284.122. Saldo per 31 Desember 2006 terdiri dari Kas Trus Fund Rp2.213.702.756.920, Kas ReKOMPAK Rp158.504.274.302 dan Kas Komite Beasiswa Rp53.737.252.900.

Saldo Kas Trust Fund sebesar Rp2.213.702.756.920 ditampung di rekening Nomor 00000037-01-001973-30-6. Penggunaan rekening tersebut berdasarkan Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan No. PER-03/PB/2007 tentang Penggunaan Trust Fund BRR NAD-Nias yang Berasal dari Sisa DIPA TA 2006. Selama tahun 2007, dana tersebut telah direalisasikan sebesar Rp1.953.552.866.062, dan sisanya Rp260.149.890.858 beserta jasa giro Rp24.465.750.665, denda Rp4.636.617.101 dan total pajak Rp125.587.872.722 telah disetor ke Kas Negara sehingga saldo per 31 Desember 2007 nihil.

Sedangkan Kas ReKOMPAK dan Kas Komite Beasiswa pada LKPP Tahun 2007 direklasifikasi ke Aset Lainnya.

C.2.8. Uang Muka dari Rekening Bendahara Umum Negara (BUN)

Uang Muka dari Rekening BUN Rp3,41 triliun

Jumlah Uang Muka dari Rekening BUN per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp3.405.421.282.834 dan Rp2.764.674.545.037 merupakan pembayaran pembiayaan pendahuluan dalam rangka penarikan pinjaman luar negeri dari BUN yang belum ada penggantian dari lender. Rincian Uang Muka dari Rekening BUN menurut lender adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Lender	31 Desember 2007	31 Desember 2006
IBRD	1.762.217.825.636	962.602.151.537
ADB	551.777.481.113	873.514.048.925
OECF/JBIC	651.326.993.413	650.366.643.918
Lainnya	440.098.982.672	278.191.700.656
Jumlah	**3.405.421.282.834**	**2.764.674.545.037**

C.2.9. Piutang Pajak

Piutang Pajak Rp42,04 triliun

Jumlah Piutang Pajak per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp42.042.099.564.945 dan Rp35.454.552.126.836 yang berada di Departemen Keuangan dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Unit Pengelola	31 Desember 2007	31 Desember 2006
1. Direktorat Jenderal Anggaran	187.733.156.816	0
2. Direktorat Jenderal Pajak	31.906.597.010.360	32.280.657.580.871
3. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai	9.947.769.397.769	3.173.894.545.965
Jumlah	**42.042.099.564.945**	**35.454.552.126.836**

1. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Anggaran (DJA) sebesar Rp187.733.156.816

merupakan Piutang Pajak Ekspor kepada eksportir batu bara yang sampai dengan 31 Desember 2007 masih menunggu keputusan Menteri Keuangan atas tagihan batu bara tersebut. Rincian Piutang Pajak Ekspor dapat dilihat pada **Daftar 8.** Pada Neraca per 31 Desember 2006, Piutang Pajak Ekspor disajikan sebagai Piutang Bukan Pajak dengan saldo sebesar Rp160.990.689.783.

2. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sebesar Rp31.906.597.010.360 merupakan tagihan pajak yang tercantum dalam Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar (SKPKB) dan Surat Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan (SKPKBT) dan Surat Tagihan Pajak (STP) atau Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) yang belum dilunasi sampai dengan 31 Desember 2007. Rincian Piutang Pajak per jenis pajak dapat dilihat pada Tabel 7.

Tabel 7
Piutang Pajak per Jenis Pajak

No.	Nama Perkiraan	Rupiah
1.	Piutang PPh Pasal 21	1.020.414.690.864
2.	Piutang PPh Pasal 22	66.827.848.091
3.	Piutang PPh Pasal 23	2.389.628.147.076
4.	Piutang PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	930.137.420.350
5.	Piutang PPh Pasal 25/29 Badan	8.885.377.594.100
6.	Piutang PPh Non Migas Lainnya	879.508.183.935
7.	Piutang PPN Dalam Negeri	11.042.004.050.239
8.	Piutang PPnBM Dalam Negeri	99.268.206.548
9.	Piutang PBB Pedesaan	606.882.233.000
10.	Piutang PBB Perkotaan	2.929.676.818.000
11.	Piutang PBB Perkebunan	178.163.623.000
12.	Piutang PBB Kehutanan	478.052.255.000
13.	Piutang PBB Pertambangan	45.810.576.000
14.	Piutang BPHTB	219.093.221.678
15.	Piutang Bunga Penagihan PPh	2.089.472.781.488
16.	Piutang Bunga Penagihan PPN	46.252.964.479
17.	Piutang Bunga Penagihan PPnBM	26.396.512
Jumlah		**31.906.597.010.360**

Dari piutang pajak sebesar Rp31.906.597.010.360, terdapat nominal surat ketetapan pajak yang diajukan keberatan oleh Wajib Pajak sebesar Rp11.197.296.590.781 dan USD108,220,893.00. Rincian lengkap Tunggakan Keberatan dan Banding disajikan pada **Daftar 9.**

Sampai dengan tahun 2007, jumlah tunggakan pajak yang telah daluwarsa adalah sebesar Rp3.054.988.009.366, diusulkan penghapusan sebesar Rp2.028.079.205.591 dan telah dihapuskan Rp7.933.202.000. Berdasarkan Undang-Undang, hak pemerintah dalam melaksanakan penagihan kepada Wajib Pajak atas pajak yang ditagih dengan menggunakan surat ketetapan pajak dibatasi sampai dengan 5 (lima) tahun.

3. Piutang Pajak pada Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC) sebesar Rp9.947.769.397.769 merupakan tagihan pajak yang telah mempunyai surat ketetapan yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada tanggal neraca yang diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Rincian Piutang Pajak per Kanwil DJBC dapat dilihat pada Tabel 8.

Tabel 8
Piutang Pajak per Kanwil DJBC

No.	Wilayah	Jumlah (Rupiah)
1.	Instansi Pusat	-
2.	Kanwil DJBC NAD	1.724.902.356.711
3.	Kanwil DJBC Sumatera Utara	8.402.835.462
4.	Kanwil DJBC Riau dan Sumbar	166.453.361
5.	Kanwil DJBC Kepulauan Riau	147.802.759.896
6.	Kanwil DJBC Sumbagsel	6.359.625.254
7.	Kanwil DJBC Banten	22.111.904.815
8.	Kanwil DJBCJakarta I	186.754.573.188
9.	Kanwil DJBCJakarta II	12.757.668
10.	Kanwil DJBC Jawa Barat	47.401.563.000
11.	Kanwil DJBC Jawa Tengah dan DIY	3.253.750.648.197
12.	Kanwil DJBC Jawa Timur I	57.833.267.291
13.	Kanwil DJBC Jawa Timur II	4.170.906.990.000
14.	Kanwil DJBC Bali-NTB-NTT	-
15.	Kanwil DJBC Kalimantarn Barat	1.234.194.386
16.	Kanwil DJBC Kalimantan timur	294.637.430.074
17.	Kanwil DJBC Sulawesi	25.478.761.666
18.	Kanwil DJBC Maluku dan Papua	13.276.800
Jumlah		**9.947.769.397.769**

C.2.10. Piutang Bukan Pajak

Piutang Bukan Pajak Rp38,05 triliun

Jumlah Piutang Bukan Pajak per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp38.045.969.394.145 dan Rp25.737.724.557.593. Piutang tersebut merupakan semua hak atau klaim terhadap pihak lain atas uang, barang atau jasa yang dapat dijadikan kas dan belum diselesaikan pada akhir tahun anggaran diharapkan dapat diterima dalam jangka waktu tidak lebih dari satu tahun. Piutang tersebut terdiri dari (dalam Rp):

Jenis Piutang	31 Desember 2007	31 Desember 2006
Piutang Bukan Pajak di K/L	38.005.973.365.087	25.658.717.662.864
Piutang kepada PT PPA	39.996.029.058	79.006.894.729
Jumlah	**38.045.969.394.145**	**25.737.724.557.593**

1. Piutang Bukan Pajak di K/L per 31 Desember 2007 sebesar Rp38.005.973.365.087 merupakan piutang PNBP yang berada di kementerian negara/lembaga, termasuk di dalamnya adalah Piutang Bukan Pajak di Departemen Keuangan sebesar Rp34.458.942.679.003. Rincian Piutang Bukan Pajak di Departemen Keuangan tersebut adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Piutang	31 Desember 2007	31 Desember 2006
Piutang Migas kepada PT Pertamina	25.816.684.636.777	18.556.219.133.446
Piutang Migas kepada KKKS	8.579.536.598.232	3.818.683.368.529
Piutang Panas Bumi	40.773.737.505	
Piutang Denda dan Dividen	3.926.400.819	5.440.601.893
Piutang PNBP Lainnya	18.021.305.580	218.458.354.547
Jumlah	**34.458.942.679.003**	**22.598.801.458.415**

- Piutang Pemerintah kepada PT Pertamina sebesar Rp25.816.684.636.777 merupakan kewajiban PT Pertamina (Persero) dari sektor migas sampai dengan 31 Desember 2007

yang terdiri dari (dalam Rp):

Piutang Minyak Bumi[1)]	19.726.409.944.058
Piutang Gas Alam[2)]	6.090.274.692.719
Jumlah	**25.816.684.636.777**

Keterangan:

1) Termasuk piutang sebesar USD172,928,993.24 dan Rp5.997.412.769.300 yang dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah sesuai KMK No. 454/KMK.06/2006 tanggal 21 September 2005.

2) Termasuk piutang LNG sebesar USD5,963,317.65 dan natural gas sebesar USD70,768,910.54 yang dijadikan Penyertaan Modal Pemerintah sesuai KMK No. 454/KMK.06/2006 tanggal 21 September 2005.

- Piutang Migas kepada Kontraktor Kontrak Kerja Sama (KKKS) sebesar Rp8.579.536.598.232 merupakan piutang yang timbul karena penjualan minyak dan gas yang jatuh tempo dan diperkirakan akan dibayar satu bulan setelah pengiriman minyak dan gas tersebut, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Piutang Minyak Bumi[1)]	3.893.876.734.694
Piutang Gas Alam[2)]	4.685.659.863.538
Jumlah	**8.579.536.598.232**

Keterangan:
1) Termasuk overlifting minyak mentah KKKS sebesar USD243,869,785
2) Termasuk underlifting gas alam KKKS sebesar USD21,259,712

- Piutang Panas Bumi sebesar Rp40.773.737.505 merupakan piutang setoran bagian pemerintah dan denda dari kegiatan usaha panas bumi, dengan rincian sebagai berikut:

Nama Pengusaha	USD	Rp (ekuivalen)
1. Chevron Geothermal Salak, Ltd	3,844,978.83	35.504.392.958
2. Chevron Geothermal Indonesia, Ltd	409.840.47	3.854.631.884
3. Dayabumi Salak Pratama, Ltd	154,012.40	1.414.712.663
Jumlah	**4,408,840.69**	**40.773.737.505**

Dari jumlah tersebut, yang merupakan piutang setoran bagian Pemerintah adalah sebesar Rp31.235.424.694. Jumlah tersebut masih harus diperhitungkan dengan kewajiban perpajakan. Penerimaan dari kegiatan usaha panas bumi/setoran bagian Pemerintah masih berada pada Rekening No. 508.000084 di BI.

- Piutang Denda dan Dividen sebesar Rp3.926.400.819 merupakan pembayaran dividen BUMN kepada pemerintah yang penyelesaiannya dijadwalkan tahun 2007, namun sampai dengan 31 Desember 2007 belum diselesaikan pembayarannya. Keterlambatan penyelesaian ini mengakibatkan denda, yang diperhitungkan sebagai penambah piutang. Rincian piutang dividen per BUMN sebagai berikut (dalam Rp):

BUMN	31 Desember 2007	31 Desember 2006
PT Nindya Karya	1.550.605.718	3.201.105.867
PT Yodya Karya	893.878.408	1.118.878.408
PT Balai Pustaka	1.286.749.799	1.120.193.135
PT Rajawali Nusantara Indonesia	97.504.050	0
PT Sang Hyang Seri	97.662.844	0
PT PAL	0	424.483
Jumlah	**3.926.400.819**	**5.440.601.893**

- Piutang PNBP yang berada di Departemen ESDM sebesar Rp2.108.177.827.685 sebagian masih merupakan asumsi serta menunggu kepastian nilai dari perusahaan kontraktor pertambangan.

  Rincian Piutang Bukan Pajak di K/L dapat dilihat pada **Daftar 10.**

2. Piutang kepada PT PPA sebesar Rp39.996.029.058 dan Rp79.006.894.729 merupakan kewajiban PT PPA atas Hasil Pengelolan Aset (HPA) yang masih harus disetorkan kepada pemerintah dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2007	31 Desember 2006
Saldo Awal (1)	79.006.894.729	29.941.177.405
Penerimaan:		
Hasil Pengelolaan Aset (HPA):		
Divestasi saham yang dikelola	1.400.039.444.445	2.269.255.316.405
Dividen atas saham yang dikelola	8.890.915.756	28.619.817.293
Pokok dan bunga atas tagihan yang dikelola	180.815.686.939	517.147.111.212
Bunga atas obligasi yang dikelola	32.310.735.992	32.550.000.000
Redemption obligasi	50.000.000.000	-
HPA properti	7.543.454.545	-
HPA aset lainnya	36.012.000.000	-
Jumlah HPA	**1.715.612.237.677**	**2.847.572.244.910**
Dana Cadangan Biaya Pengelolaan	-	150.000.000.000
Bunga dari dana HPA yg masih harus disetor	42.865.150.455	72.754.608.120
Jumlah Penerimaan (2)	**1.758.477.388.132**	**3.070.326.853.030**
Pengurangan:		
Biaya pengelolaan yang dapat diperoleh kembali tahun berjalan dan telah dibayar tunai	127.684.956.505	123.972.633.961
Biaya pengelolaan yang dapat diperoleh kembali periode sebelumnya yang dibayar tunai pada tahun berjalan	4.937.116.010	1.457.203.291
Insentif Kinerja Perusahaan	55.596.799.514	221.186.353.712
PPN atas Insentif Kinerja Perusahaan	5.559.679.951	22.118.635.371
Jumlah Pengurangan (3)	**193.778.551.980**	**368.734.826.335**
HPA yang harus disetor ke Pemerintah ((4)=(1)+(3) –(3))	1.643.705.730.882	2.731.533.204.100
HPA yang telah disetor ke Pemerintah (5)	(1.603.709.701.824)	(2.652.526.309.371)
Jumlah HPA yang masih harus disetor (6) = (4) –(5)	**39.996.029.058**	**79.006.894.729**

C.2.11. Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran

Bagian Lancar TPA Rp82,11 juta

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp82.112.146 dan Rp90.560.467 merupakan saldo TPA yang akan jatuh tempo dua belas bulan setelah tanggal neraca. Jumlah tersebut merupakan Saldo Bagian Lancar TPA yang berada di 2 K/L yaitu (dalam Rp):

K/L	31 Desember 2007	31 Desember 2006
Badan Pemeriksa Keuangan	29.260.000	75.240.000
Menneg PPN/Bappenas	52.852.146	15.320.467
Jumlah	**82.112.146**	**90.560.467**

C.2.12. Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Bagian Lancar Tagihan TGR Rp4,23 miliar

Jumlah Bagian Lancar Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp4.229.682.020 dan Rp12.153.879.936 merupakan saldo Tagihan TGR kementerian negara/lembaga yang akan jatuh tempo 12 bulan setelah tanggal neraca.

Rincian Bagian Lancar TGR pada 31 K/L dapat dilihat pada **Daftar 11.**

C.2.13. Bagian Lancar RDI/RPD

Bagian Lancar RDI/RD Rp23,18 triliun

Jumlah Bagian Lancar Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD) per 31 Desember 2007 sebesar Rp23.180.947.180.000 merupakan pokok pinjaman kepada Pemda, BUMN, dan BUMD yang akan jatuh tempo dua belas bulan setelah tanggal neraca dengan rincian sebagai berikut (dalam juta Rp):

Pokok Jatuh Tempo (01-01-2008 s.d 31-12-2008)	5.109.310,20
Tunggakan Kewajiban Pinjaman (s.d 31 - 12 -2007)	16.443.798,17
Kewajiban akrual Bunga, CC dan Denda (s.d 31 - 12 -2007)	1.627.838,81
Jumlah	**23.180.947,18**

Tunggakan Kewajiban Pinjaman sebesar Rp16.443.798,17 juta sampai dengan 31 Desember 2007 terdiri dari (dalam juta Rp):

Pokok Penarikan Pinjaman	5.931.503,90
Bunga Kapitalisasi yang dijadikan Pokok Pinjaman	574.503,34
Bunga Berjalan Terhadap Pokok Penarikan Pinjaman	5.176.889,61
Bunga dari Bunga Kapitalisasi yang dijadikan Pokok Pinjaman	2.676,22
Commitment Charge	41.791,96
Denda	4.716.433,14
Jumlah	**16.443.798,17**

Berdasarkan tingkat kolektibilitas, tunggakan sebesar Rp16.443.798,17 juta tersebut dapat diklasifikasikan sebagai berikut:

Kategori	Rp (juta)	%
Dalam Perhatian	95.648,12	0.58
Kurang Lancar	436.165,93	2.67
Diragukan	3.972,94	0.02
Macet	15.905.011,18	96.73
Jumlah	**16.443.798,17**	**100,00**

Pada Neraca per 31 Desember 2006, Bagian Lancar Rekening RDI/RPD masih disajikan sebagai bagian dari piutang jangka panjang RDI/RPD.

Rincian Bagian Lancar RDI per sektor dapat dilihat pada **Daftar 12.**

C.2.14. Belanja Dibayar di Muka

Belanja Dibayar Dimuka Rp1,32 triliun

Jumlah Belanja Dibayar di Muka per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp1.322.504.162.418 dan Rp597.914.389.211 merupakan belanja yang telah dibayarkan kepada pihak ketiga yang manfaat/barangnya masih akan diterima pada periode berikutnya yang berada di (dalam Rp):

K/L	31 Desember 2007	31 Desember 2006
1. Departemen Luar Negeri	56.500.000.000	0
2. Departemen Pendidikan Nasional	422.695.688	0
3. Kementerian Negara PAN	0	167.475.000

4. BMG	1.215.250.000	0
5. LIPI	53.005.821.125	0
6. BPPT	743.264.278	0
7. BKN	347.995.140	597.853.472
8. BRR NAD-Nias	1.207.792.696.187	594.839.660.739
9. Komisi Yudisial	2.476.440.000	2.309.400.000
Jumlah	**1.322.504.162.418**	**597.914.389.211**

C.2.15. Piutang Lain-lain

Piutang Lain-lain Rp12,32 triliun

Piutang Lain-lain per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp12.321.167.839.147 dan Rp19.688.724.084.329 merupakan piutang yang tidak dapat diklasifikasikan ke dalam salah satu kategori piutang sebagaimana telah dijelaskan di atas, yang terdiri dari (dalam Rp):

Jenis Piutang	31 Desember 2007	31 Desember 2006
1. Piutang di K/L	376.081.832.550	6.314.315.922.896
2. Bunga dan Denda	14.920.043.249	17.056.982.202
3. Kredit Program	1.077.328.222	1.017.038.368.126
4. Piutang 18 BDL	11.929.088.635.126	12.180.641.909.105
5. Piutang Lainnya	0	159.670.902.000
Jumlah	**12.321.167.839.147**	**19.688.724.084.329**

1. Piutang di K/L sebesar Rp376.081.832.550 dan Rp6.314.315.922.896 merupakan piutang yang berada di:

No.	K/L	31 Desember 2007	31 Desember 2006
1.	BPK	116.344.203	0
2.	Departemen Pertahanan	12.073.052.256	0
3.	Departemen Keuangan	114.736.007	0
4.	Departemen ESDM	36.281.629	0
5.	Departemen Pendidikan Nasional	427.959.875	0
6.	Departemen Kesehatan	235.641.185.286	0
7.	Kementerian Negara BUMN	125.000.000.000	0
8.	BPN	405.690.000	0
9.	BNN	579.800.000	0
10.	BPPT	1.623.675.394	0
11.	BPKP	63.107.900	0
12.	Kejaksaan Agung*)	0	6.314.315.922.896
	Jumlah	**376.081.832.550**	**6.314.315.922.896**

*) pada LKPP 2007, piutang di Kejaksaan Agung direklasifikasi ke Aset Lainnya.

2. Piutang Bunga dan Denda sebesar Rp14.920.043.249 merupakan jumlah bunga dan denda dari pinjaman pendanaan KUMK eks dana SU-005 yang sudah jatuh tempo tetapi sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 belum diterima. Rincian piutang bunga dan denda dapat dilihat pada **Daftar 13.**

3. Piutang Kredit Program sebesar Rp1.077.328.222 merupakan tunggakan yang menjadi bagian Pemerintah atas klaim risiko dalam rangka Program Kredit Ketahanan Pangan sampai dengan 31 Desember 2007.

4. Piutang 18 Bank Dalam Likuidasi (BDL) sebesar Rp11.929.088.635.126 merupakan total kewajiban 18 BDL kepada Pemerintah sampai dengan triwulan IV tahun 2007, yang terdiri dari:

- Piutang kepada 15 BDL eks dana talangan pemerintah	8.930.239.653.430
- Piutang kepada 3 BDL eks dana penjaminan pemerintah	2.998.848.981.696
Jumlah	**11.929.088.635.126**

Piutang pada 15 BDL eks dana talangan pemerintah sebesar Rp8.930.239.653.430, berasal dari Total dana BLBI BDL yang di-*cessie*-kan sebesar Rp11.888.938.781.558 dikurangi dengan pengembalian BLBI sampai dengan akhir tahun 2007 sebesar Rp2.958.699.128.128.

Rincian lebih lengkap dapat dilihat pada **Daftar 14.**

Mengingat Tim Likuidasi telah selesai masa tugasnya, maka sisa aset 15 BDL diserahkan kepada Pemerintah c.q Departemen Keuangan RI q.q Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) sebagai bentuk pemenuhan kewajiban dengan total nilai buku untuk aset yang telah diserahkan sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp3.415.224.839.134. Aset yang diserahkan tersebut berupa aset tetap yang terdiri dari tanah dan/atau bangunan, kendaraan bermotor, dan surat berharga sebanya 238 obyek dan aset kredit sebanyak 6.823 akun.

Untuk aset tetap telah dibuatkan Akta Kuasa menjual yang akan dilanjutkan dengan penjualan melalui lelang oleh Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL), sedangkan untuk aset kredit telah dibuatkan Akta Pengalihan Hak Tagih (*cessie*) yang dilanjutkan dengan penyerahan pengurusan/penagihan piutang kepada PUPN/KPKNL. Dalam hal ini, Departemen Keuangan akan menerapkan sistem *cash settlement* terhadap sisa aset BDL yang diserahkan tersebut yaitu bahwa yang digunakan sebagai pengurang kewajiban BDL adalah hasil pencairan aset-aset dimaksud.

Sementara itu, Piutang kepada 3 BDL eks dana penjaminan pemerintah sebesar Rp2.998.848.981.696 merupakan saldo penjaminan pemerintah terhadap PT Bank Dagang Bali, PT Bank Asiatic, dan PT Bank Global Internasional yang diberikan melalui UP3 (Unit Pelaksana Penjaminan Pemerintah) dengan Bank Pembayar PT BNI (Persero). Rincian Piutang kepada 3 BDL tersebut adalah sebagai berikut:

No	Nama Bank	Saldo Awal	Pembayaran	Saldo Akhir
1.	PT Bank Dagang Bali	1.331.516.991.477	-	1.331.516.991.477
2.	PT Bank Asiatic	886.597.719.823	23.500.000.000	863.097.719.823
3.	PT Bank Global Int'l	804.234.270.396	-	804.234.270.396
	Jumlah	**3.022.348.981.696**	**23.500.000.000**	**2.998.848.981.696**

Mengingat masa tugas Tim Likuidasi BDL dimaksud belum berakhir, maka penanganan aset-asetnya masih ditangani oleh Tim Likuidasi. Departemen Keuangan untuk saat ini berkoordinasi dengan pihak Bank Indonesia untuk melakukan monitoring atas pencairan likuidasi aset yang dilakukakn oleh Tim Likuidasi.

C.2.16. Persediaan

Persediaan Rp6,80 triliun

Jumlah Persediaan per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp6.797.911.546.822 dan Rp3.536.487.866.859 merupakan nilai persediaan yang berdasarkan neraca kementerian negara/lembaga dan unit terkait lainnya, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Persediaan	31 Desember 2007	31 Desember 2006
Persediaan di K/L	5.820.948.165.642	2.050.894.259.692
Cadangan Beras Pemerintah	828.368.826.990	1.275.713.700.000
Cadangan Benih Nasional	148.594.554.190	209.879.907.167
Jumlah	**6.797.911.546.822**	**3.536.487.866.859**

Nilai Persediaan di K/L sebesar Rp5.820.948.165.642 antara lain berasal dari Persediaan di Departemen Pertahanan sebesar Rp3.426.363.502.221, penyiapan lahan dan pembangunan rumah

transmigran sebesar Rp253.913.274.241, dan gedung untuk korban tsunami Aceh sebesar Rp40.000.610.917. Rincian Persediaan di K/L dapat dilihat pada **Daftar 15.**

Persediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) per 31 Desember 2007 berjumlah 179.301 ton dengan nilai nominal sebesar Rp828.368.826.990.

Persediaan Cadangan Benih Nasional (CBN) terdiri dari benih padi 23.470.817 kg, benih kedelai 1.997.355 kg, benih jagung hibrida 1.075.106 kg, dan benih jagung komposit 1.356.560 kg dengan total nominal sebesar Rp148.594.554.190. Persediaan CBN pengelolaannya ditugaskan kepada PT Sang Hyang Seri (Persero).

C.2.17. Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah

RDI/RPD Rp39,53 triliun

Jumlah Rek. Dana Investasi/Rek. Pembangunan Daerah (RDI/RPD) per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp39.533.081.330.000 dan Rp59.212.080.140.000 merupakan jumlah pinjaman jangka panjang kepada Pemda, BUMD, dan BUMN yang akan jatuh tempo setelah Desember 2008. Rincian saldo RDI/RPD (termasuk bagian lancar) dapat dilihat pada **Daftar 16.**

Dalam upaya melakukan optimalisasi piutang negara yang bersumber dari tagihan kewajiban terhadap penerusan pinjaman luar negeri telah dilakukan program restrukturisasi pinjaman. Pada tahun 2007 telah diupayakan restrukturisasi piutang PDAM dan BUMN.

Dalam rangka proses restrukturisasi RDI/RPD/SLA untuk PDAM telah diterbitkan PMK Nomor 107/PMK.06/2005 dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 53/PB/2006 sebagai dasar pelaksanaannya dengan tahapan penjadwalan ulang, perubahan persyaratan, dan penghapusan. Sampai dengan akhir tahun 2007 dari 178 PDAM seluruh Indonesia yang mempunyai tunggakan kepada pemerintah, 12 PDAM telah mengajukan penyelesaian utang melalui percepatan pelunasan, 31 PDAM menyampaikan permohonan resrukturisasi dengan rincian, 18 PDAM telah menyampaikan permintaan penentuan *cut-off date* pinjaman, 2 PDAM dalam tahap evaluasi komite teknis, 3 PDAM dalam tahap evaluasi kelompok kerja, 5 PDAM belum melengkapi dokumen pendukung, dan 3 PDAM ditolak karena tidak memenuhi persyaratan.

Untuk pelaksanaan restrukturisasi BUMN, telah diterbitkan Peraturan Menteri Keuangan No.17/ PMK.05/2007 tanggal 19 Pebruari 2007 dengan tahapan penjadwalan ulang, perubahan persyaratan, penyertaan modal negara dan penghapusan dan Peraturan Dirjen Perbendaharaan No. 31/PB/2007 tentang Petunjuk Teknis Penyelesaian Piutang Negara yang Bersumber dari Naskah Perjanjian Penerusan Pinjaman dan Perjanjian Pinjaman Rekening Dana Investasi pada Badan Usaha Milik Negara/Perseroan Terbatas.

Sampai dengan 31 Desember 2007, total BUMN yang mengikuti program restrukturisasi sebanyak 48 BUMN dengan rincian sebanyak 27 BUMN telah menyampaikan permohonan, 4 BUMN telah dibatalkan COD (*Cut Off Date*) , 7 BUMN belum menyampaikan permohonan, dan 10 BUMN tidak termasuk COD, termasuk di dalamnya BUMN yang terkait Financing Agreement. Penyelesaian restrukturisasi pada Komite sampai dengan 31 Desember 2007 adalah sebanyak 48 BUMN dengan rincian sebagai berikut:

- Dalam Proses Penyelesaian	1 BUMN
- Dalam Proses Secara Struktural	2 BUMN
- Dalam Penyelesaian Pada Menteri Negara BUMN	5 BUMN
- Dalam Penyelesaian Pada Menteri Keuangan	1 BUMN
- Dalam Analisis Lanjutan Tim Kerja	3 BUMN
- Dalam Analisis Pendahuluan	13 BUMN
- Dokumen Belum Lengkap	9 BUMN
- Belum Menyampaikan Permohonan	5 BUMN
- Telah Dibatalkan COD	4 BUMN
- Yang Menindaklanjuti Atas Ketentuan Pada *Financing Agreement*	5 BUMN
Jumlah	48 BUMN

Beberapa penyelesaian Piutang Negara diselesaikan tersendiri, di tahapan PMK 17/2007, yaitu pertama, berkoordinasi dengan Tim Kerja eks BBO/BBKU dalam penyelesaian permasalahan BBKO dan BBKU; kedua, menunggu penyelesaian masalah hukum terkait likuidasi PT.Bank Dagang Bali (PT.BDB); ketiga, Utang Pemerintah Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (NAD) diselesaikan dengan cara *Debt Swap* untuk pembangunan pendidikan, kesehatan dan infrastruktur di NAD.

Sementara itu, dalam penyelesaian piutang Pemerintah kepada Pemerintah Daerah telah dilakukan upaya persuasif kepada Pemerintah Daerah untuk menyelesaikan tunggakan pinjaman dengan melakukan pemantauan ke Pemerintah Daerah; menerbitkan surat kepada Walikota/Bupati dan Ketua DPRD tentang laporan pemantauan yang antara lain berisi posisi pinjaman dan upaya-upaya penyelesaian pinjaman tersebut; dan menyusun Peraturan Menteri Keuangan dan Perdirjen Perbendaharaan tentang Penyelesaian Piutang Negara pada Pemerintah Daerah.

C.2.18. Dana Bergulir

Dana Bergulir Rp6,92 triliun

Jumlah Dana Bergulir per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp6.915.945.297.699 dan Rp5.690.613.254.758 merupakan dana Pemerintah yang disalurkan dalam bentuk pinjaman bergulir kepada pengusaha kecil, anggota koperasi, anggota KSM, dan lain-lain yang dikelola oleh kementerian negara/lembaga. Saldo Dana Bergulir tersebut berasal dari Dana Bergulir yang dikelola oleh (dalam Rp):

K/L	31 Desember 2007	31 Desember 2006
1. Dep. Keuangan	3.793.230.646.948	1.658.234.536.813
2. Dep. Perindustrian	11.865.481.901	7.610.858.926
3. Kem Neg. Kop dan UKM	3.085.849.168.850	2.540.083.505.300
4. KLH	5.000.000.000	5.000.000.000
5. BKKBN	20.000.000.000	0
6. Dep. Kehutanan	0	1.476.715.412.919
7. Dep. Kelautan dan Perikanan	0	2.968.940.800
Jumlah	**6.915.945.297.699**	**5.690.613.254.758**

Keterangan:

1) Dana Bergulir yang dikelola oleh Departemen Keuangan yang disalurkan antara lain melalui Bank Pembangunan Daerah, PT Bank BUKOPIN, PT Bank BRI (Persero) dan PT Bank Mandiri (Persero). Jumlah tersebut terdiri dari:

Uraian	Jumlah (Rp)
Kas di Bank Umum Pengelolaan Dana Bergulir	1.805.843.088.266
Tunggakan KKOP Pangan MP 2000	91.845.982.210
Tunggakan Pengadaan KUT TP 1999/2000	922.684.593.580
Tunggakan Kredit Listrik Pedesaan	1.742.226.000
Hak Tagih Perkebunan dan Peternakan	808.592.711.343
Hak Tagih Pemerintah dari proyek Kredit GLK	75.281.771.269
Dana Lingkungan Bergulir	53.506.155.708
Dana bergulir KPPA	9.000.000.000
Dana Cadangan KUT TP 1999/2000	24.734.118.572
Jumlah	**3.793.230.646.948**

- Dari jumlah kas sebesar Rp1.805.843.088.266 yang terkait dengan RDI sebesar Rp583.335.061.779 dan tidak terkait RDI sebesar Rp1.222.508.026.486. Rincian masing-masing rekening dapat dilihat pada **Daftar 17.**
- Tunggakan KKOP Pangan sebesar Rp91.845.982.210 merupakan hak pemerintah atas Kredit kepada Koperasi dalam rangka Pengadaan Pangan (KKOP Pangan) Musim Panen 2000. Dalam rangka pelaksanaan program tersebut, Pemerintah telah

menandatangani perjanjian dengan 5 (lima) bank pelaksana dengan total plafond sebesar Rp. 500 milyar.

- Hak pemerintah sebesar Rp922.684.593.580 merupakan tunggakan yang terkait dengan program KUT Tahun 1999/2000. dalam rangka pelaksanaan KUT TP 1999/2000 tersebut, pemerintah telah melakukan kerjasama dengan 11 (sebelas) bank pelaksana dalam rangka penyediaan pendanaan dengan subsidi bunga dari pemerintah, dengan total plafond Rp.1.903 milyar.
- Jumlah Hak Tagih Kredit Listrik Pedesaan (KLP) sebesar Rp1.742.226.000 merupakan angka yang berasal dari PT BRI (Persero). Kredit Listik Pedesaan dimaksudkan untuk pemerataan penerangan listrik bagi masyarakat pedesaan yang tidak mampu membayar penyambungan listrik PLN.
- Hak Tagih sebesar Rp808.592.711.343 merupakan hak tagih yang terdiri dari PIR Perkebunan sebesar Rp540.787.265.195, UPP Perkebunan sebesar Rp153.716.329.045 dan Peternakan sebesar Rp114.089.117.103. Saldo hak tagih Pemerintah atas proyek PIR Perkebunan sebesar Rp540.787.265.195,00 adalah saldo per 31 Agustus 2007 sesuai dengan hasil rekonsiliasi. Posisi hak tagih Pemerintah atas Proyek PIR/UPP Perkebunan per 31 Desember 2007 belum dapat disajikan, karena belum dilakukan rekonsiliasi bersama dengan instansi terkait (Ditjen Perkebunan – Departemen Pertanian, BPKP dan Perbankan).
- Hak Tagih sebesar Rp75.281.771.269 merupakan hak tagih Pemerintah kepada KUD yang berasal dari proyek Kredit Gudang, lantai jemur dan kios pupuk Koperasi Unit Desa (GLK-KUD).
- Dana Lingkungan Bergulir (DLB) sebesar Rp53.506.155.708 terdiri dari Pembayaran kembali pokok pinjaman yang berasal dari dana hibah *Kreditanstalt fur Wiederaufbau-Industrial Efficiency and Pollution Control Project* yang diteruspinjamkan kepada Bank Pelaksana (5 bank pelaksana: Bank Jabar Banten, Bank Jateng, Bank Nagari, BPD Bali, dan BNI), bunga dan biaya lainnya. Dana ini diberikan kepada Pemerintah untuk pembiayaan dalam bentuk pinjaman guna kepentingan pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan. Sebagai *executing agent* dalam kegiatan ini adalah Kementrian Lingkungan Hidup (KLH).
- Hak tagih KKPA sebesar Rp9.000.000.000 merupakan hak tagih pemerintah atas KKPA yang berada pada Bank Muamalat Indonesia (BMI) sebesar Rp6.771.529.111 dan di masyarakat sebesar Rp2.228.470.889. Dana tersebut digunakan untuk mendukung pengembangan usaha kecil dan koperasi yang tergabung dalam Koperasi Pondok Pesantren (Kopontren) dan Koperasi Syariah lainnya serta Baitul Maal wa Tamwil (BMT).
- Dana Cadangan KUT sebesar Rp24.734.118.572 merupakan hak pemerintah kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan KUT Tahun 1999/2000. Pemerintah telah melakukan kerjasama dengan 11 bank pelaksana.

2) Dana bergulir di Departemen Perindustrian sebesar Rp11.865.481.901 terdiri nilai kas yang dipegang unit pengelola sebesar Rp1.519.897.328 dan jumlah yang diharapkan tertagih yaitu piutang lancar sebesar Rp8.083.289.506 dan piutang kurang lancar sebesar Rp2.262.295.067.

3) Dana bergulir di Kementerian Negara Koperasi dan UKM sebesar Rp3.085.849.168.850 merupakan nilai akumulasi sejak tahun 2000 s.d. 31 Desember 2007. Dana tersebut disalurkan kepada usaha mikro, kecil dan menengah melalui lembaga koperasi sebagai stimulan dalam pemberdayaan koperasi dan usaha kecil dan menengah.

4) Dana bergulir di Kementerian Negara Lingkungan Hidup (KLH) sebesar Rp5.000.000.000

merupakan dana KLH yang ditempatkan di Bank Syariah Mandiri yang akan disalurkan kepada Usaha Ekonomi Lemah (UKM) sebagai kredit untuk membiayai investasi di bidang lingkungan hidup.

Di samping itu, terdapat juga dana bergulir yang merupakan realisasi belanja bantuan sosial tahun anggaran 2006 di BRR NAD-Nias yang dikelola oleh Koperasi/Lembaga Keuangan Mikro dan *Aceh Micro Finance* sebesar Rp29.224.830.000. Sedangkan dana bergulir yang berada di Departemen Kehutanan dan Departemen Kelautan dan Perikanan direklasifikasi ke Aset Lainnya karena dana yang berada di kedua instansi tersebut sudah tidak memenuhi kriteria dana bergulir.

C.2.19. Investasi Non Permanen Lainnya

Investasi Non Permanen Lainnya Rp6,92 triliun

Investasi Non Permanen Lainnya per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp6.916.259.685.177 dan Rp2.750.000.000.000 merupakan investasi yang berada di:

Uraian	31 Desember 2007	31 Desember 2006
Direktorat PPP-Dep. Keuangan	2.830.956.000.000	2.750.000.000.000
BLU-PIP Dep. Keuangan	4.071.245.253.373	0
Dep. Perindustrian	14.058.431.804	0
Saldo akhir	**6.916.259.685.177**	**2.750.000.000.000**

Investasi yang dikelola oleh Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman (Dit. PPP) Departemen merupakan pinjaman pendanaan Kredit Usaha Mikro dan Kecil (KUMK) yang disalurkan melalui BUMN dan lembaga keuangan yang ditunjuk sebagai BUMN Pengelola dan/atau Lembaga Keuangan Pelaksana (LKP). Pinjaman pendanaan KUMK merupakan kelanjutan pendanaan Kredit Likuiditas Bank Indonesia (KLBI) sehubungan dengan berlakunya Undang-Undang No. 23 Tahun 1999, BI tidak diperkenankan lagi untuk memberikan kredit likuiditas. Untuk itu pemerintah menerbitkan Surat Utang No. SU-005/MK/1999 tanggal 29 Desember 1999 dengan pagu sebesar Rp9,97 triliun. Realisasi pencairan pinjaman pendanaan KUMK eks dana SU-005 adalah sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2007 (Rp)	31 Desember 2006 (Rp)
Saldo awal	2.750.000.000.000	2.684.000.000.000
Mutasi	80.956.000.000	66.000.000.000
Saldo akhir	**2.830.956.000.000**	**2.750.000.000.000**

Rincian mengenai pencairan pinjaman pendanaan KUMK sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 dapat dilihat pada **Daftar 18.**

Investasi Non Permanen pada BLU Pusat Investasi Pemerintah (PIP) sebesar Rp4.071.245.253.373 merupakan penyertaan modal dalam bentuk dukungan infrastruktur dari Pemerintah Pusat yang terdiri dari dana yang tersimpan dalam bentuk giro dan deposito, piutang bunga deposito, dan piutang bagi hasil investasi sebesar Rp3.477.614.909.623 serta dana investasi yang telah digulirkan kepada BLU Badan Pengatur Jalan Tol sebesar Rp593.630.343.750.

Investasi Non Permanen pada Departemen Perindustrian sebesar Rp14.058.431.804 merupakan dana program peningkatan industri tekstil dan produk tekstil yang disalurkan kepada sebelas Perusahaan Pasangan Usaha (PPU) sebagai pembayaran pembelian mesin/peralatan yang dikelola oleh PT Permodalan Nasional Madani.

C.2.20. Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara

Penyertaan Modal Negara Rp496,61 triliun

Jumlah Investasi Permanen Penyertaan Modal Negara (PMN) per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp496.606.812.461.827 dan Rp475.737.070.434.585 merupakan nilai penyertaan modal negara pada BUMN, Non BUMN, BHMN, dan Lembaga Internasional dengan jumlah (dalam Rp):

PMN	31 Desember 2007	31 Desember 2006
BUMN	455.367.879.388.622	427.734.043.176.954
BHMN	1.341.649.524.757	11.077.359.758.021
Non BUMN	3.239.560.005.983	2.891.624.719.663
Lembaga Internasional	36.657.723.542.465	34.034.042.779.947
Jumlah	**496.606.812.461.827**	**475.737.070.434.585**

1. Nilai PMN pada BUMN sebesar Rp455.367.879.388.622 disajikan berdasarkan metode ekuitas (*equity method*), yaitu dihitung dari penjumlahan total ekuitas masing-masing BUMN setelah dikalikan dengan persentase kepemilikan Pemerintah pada BUMN yang bersangkutan. Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2007 tersebut merupakan nilai PMN pada 139 BUMN dengan status laporan keuangan sebagai berikut:

Status Laporan Keuangan	Jumlah BUMN	Jumlah (Rp)
Audited	73	134.279.340.170.177
Unaudited	1	70.947.738.518
Prognosa	49	23.327.447.815.928
Tahunan	14	280.076.444.518.000
Triwulan II	1	1.144.451.310.000
Triwulan III	1	16.469.247.836.000
Jumlah	**139**	**455.367.879.388.622**

Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2007 tersebut, belum termasuk nilai PMN pada 2 (dua) BUMN, yaitu PT Industri Soda Indonesia dan PT Survey Udara Penas, karena sampai dengan penyusunan LKPP ini belum mengirimkan laporan keuangannya, serta 1 (satu) BUMN, yaitu Perum Antara yang masih mendapatkan alokasi anggaran dari Departemen Komunikasi dan Informatika sampai dengan akhir tahun 2007.

Sehubungan dengan kondisi/keadaan *force majure* adanya putusan PAILIT yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Niaga Jakarta kepada PT DI, maka audit atas BUMN tersebut baru akan dilaksanakan pada bulan Juni 2008 dan berakhir pada bulan September 2008.

Nilai PMN pada BUMN per 31 Desember 2007 tersebut termasuk Bantuan Pemerintah yang Belum Ditetapkan Statusnya (BPYBDS) pada 19 BUMN dengan nilai sebesar Rp36.959.243.328.784.

Rincian penyertaan modal Negara pada BUMN dapat dilihat pada **Daftar 19.**

Sesuai dengan ketentuan Pasal 30 ayat (2) UU No.17 Tahun 2003 dan Pasal 22 ayat (1) PP No. 8 Tahun 2006, LKPP dilampiri dengan ikhtisar laporan keuangan perusahaan negara yang memuat informasi lebih rinci tentang aktiva, kewajiban, ekuitas, pendapatan, beban, dan laba (rugi) bersih yang disajikan dalam **Daftar 35.**

2. PMN pada Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebesar Rp1.341.649.524.757 dan Rp11.077.359.758.021 merupakan nilai ekuitas pada BHMN dengan rincian sebagai berikut:

BHMN	31 Desember 2007	31 Desember 2006
1. Institut Pertanian Bogor	735.077.478.369	666.119.015.547
2. Universitas Airlangga	472.091.990.105	485.865.957.320
3. BP MIGAS	134.480.056.283	134.480.056.283
4. BHMN Lainnya *)	0	9.790.894.728.871
Jumlah	**1.341.649.524.757**	**11.077.359.758.021**

*) Untuk tahun 2007, neraca 5 BHMN yaitu Universitas Indonesia, Universitas Sumatera Utara, Universitas Gajah Mada, Universitas Pendidikan Indonesia dan Institut Teknologi Bandung masih dikonsolidasikan dengan Laporan Keuangan Departemen Pendidikan Nasional.

Ikhtisar Laporan Keuangan BHMN dan Badan Lainnya disajikan pada **Daftar 36.**

3. PMN pada perusahaan minoritas (non BUMN) sebesar Rp3.239.560.005.983 merupakan penyertaan pemerintah pada perusahaan dengan prosentase kepemilikan kurang dari 51%. Nilai penyertaan pada perusahaan minoritas dengan kepemilikan 20% atau lebih disajikan dengan menggunakan metode ekuitas (*equity method*), sedangkan kepemilikan kurang dari 20% menggunakan metode biaya (*cost method*). Sampai dengan LKPP 2007 ini disusun, dari 20 perusahaan non BUMN, baru 13 perusahaan yang telah mengirimkan laporan keuangannya. Kondisi di atas menyebabkan angka yang disajikan sebagian masih menggunakan data LKPP 2006 (Audited).

   Rincian PMN pada perusahaan minoritas dapat dilihat pada **Daftar 19.**

4. Penyertaan pada Lembaga Internasional merupakan Penyertaan Modal Pemerintah Indonesia pada beberapa organisasi/lembaga keuangan internasional/regional yang telah disetor sampai dengan 31 Desember 2007. Setoran dalam bentuk promissory notes tidak diperhitungkan dalam nilai penyertaan modal ini. PMN ini dikonversikan ke dalam rupiah berdasarkan kurs tengah Bank Indonesia pada tanggal 31 Desember 2007.

   Rincian PMN pada Lembaga Internasional dapat dilihat pada **Daftar 20.**

C.2.21. Investasi Permanen Lainnya

Investasi Permanen Lainnya Rp141,37 triliun

Jumlah Investasi Permanen Lainnya per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp141.370.363.451.861 dan Rp120.161.338.331.481 merupakan nilai penyertaan modal negara pada badan-badan lainnya yang disajikan berdasarkan metode ekuitas, kecuali Otorita Asahan. Rincian Investasi Permanen Lainnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2007	31 Desember 2006
- Bank Indonesia[1)]	111.629.635.000.000	97.162.895.000.000
- Otorita Batam	3.661.554.189.037	3.352.543.555.131
- BP Kemayoran	5.350.317.647.598	1.932.229.948.842
- BPGBK	13.661.282.017.192	13.661.282.017.192
- LPS	6.951.948.944.000	4.000.000.000.000
- Taman Mini Indonesia Indah	29.045.300.994	27.335.937.622
- Otorita Asahan[2)]	449.482.699	449.482.699
- BP Gedung Manggala Wanabakti	26.864.559.749	24.602.389.995
- Yayasan Gedung Veteran	3.491.432.753	0
- INDRA[3)]	55.774.877.839	0
Jumlah	**141.370.363.451.861**	**120.161.338.331.481**

Keterangan:

1) Merupakan nilai ekuitas berdasarkan Laporan Keuangan BI per 31 Desember 2007 (*audited*)

2) Merupakan aset negara di bawah pengelolaan Otorita Asahan berupa tanah, bangunan dan barang tidak bergerak lainnya per 31 Desember 2006

3) Berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 tanggal 16 April 1999 dinyatakan bahwa setelah Indonesian Debt Restructuring Agency (INDRA) bubar maka aset INDRA menjadi milik pemerintah. Berdasarkan *term of restructured* antara INDRA dan debitur, program INDRA berakhir tanggal 15 Desember 2007.

C.2.22. Aset Tetap

Aset Tetap Rp443,49 triliun

Jumlah Aset Tetap per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp443.485.970.952.729 dan Rp343.924.953.816.351 merupakan nilai aset tetap berdasarkan neraca K/L. Aset tetap dinilai dengan menggunakan metode harga perolehan (*acquisition cost*) dan belum memperhitungkan depresiasi (penyusutan).

Sampai saat ini telah dilakukan penilaian atas nilai wajar aset tetap pada beberapa K/L. Hasil penilaian tersebut telah dijadikan sebagai dasar koreksi atas nilai aset tetap pada beberapa K/L antara lain Departemen Keuangan, Kementerian Negara BUMN, Badan Intelijen Negara, Komisi Pemberantasan Korupsi, dan Dewan Ketahanan Nasional.

Rincian Aset Tetap menurut jenisnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Aset Tetap	31 Desember 2007	31 Desember 2006
Tanah	126.356.123.950.050	81.443.273.004.883
Peralatan dan Mesin	128.364.176.462.694	111.945.481.046.323
Gedung dan Bangunan	74.830.730.558.020	53.225.867.742.893
Jalan, Irigasi, dan Jaringan	94.082.094.925.843	82.173.661.040.323
Aset Tetap Lainnya	6.056.479.440.047	4.101.873.511.741
Konstruksi Dalam Pengerjaan	13.796.365.616.075	11.034.797.470.188
Jumlah	**443.485.970.952.729**	**343.924.953.816.351**

Nilai aset tetap sebesar Rp443.485.970.952.729 tidak termasuk nilai aset tetap yang diusulkan menjadi Penyertaan Modal Negara (PMN) kepada PT. PLN (Persero) yang berada di Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp20.845.639.434.168. Aset tetap tersebut berupa pembangkit listrik, gardu induk, jaringan Isitrik dan peralatan lain. Saat ini aset tersebut sudah dioperasikan oleh PT PLN (Persero). Sampai 31 Desember 2007, proses penetapan PMN tersebut belum terealisasi, sehingga terhadap aset tetap yang sudah dioperasikan oleh PT. PLN (Persero) dicatat sebagai Bantuan Pemerintah Yang Belum Ditentukan Statusnya (BPYBDS). Dari jumlah tersebut, nilai sementara BPYBDS yang sudah disepakati adalah sebesar Rp16.875.068.010.323. Sedangkan sisanya sebesar Rp3.970.571.423.845 akan diproses sebagai usulan tambahan PMN pada periode berikutnya.

Nilai aset tetap per 31 Desember 2007 mengalami kenaikan sebesar Rp99.561.017.136.378 dari nilai per 31 Desember 2006. Kenaikan nilai aset tetap ini, selain dari realisasi Belanja Modal TA 2007 sebesar Rp64.288.669.050.730, juga disebabkan oleh beberapa hal antara lain:

- Koreksi atas penyajian nilai aset tetap yang dilakukan oleh beberapa K/L antara lain Departemen Pertahanan sebesar Rp33.518.552.091.469 pada tanah; Departemen Keuangan sebesar Rp1.584.063.999.938 pada tanah dan gedung bangunan, Departemen Luar Negeri sebesar Rp69.184.045.580 pada tanah dan gedung bangunan, BPPT sebesar Rp126.784.782.680 pada peralatan mesin dan gedung bangunan dan Lembaga Administrasi Negara sebesar Rp315.420.658.395 pada tanah;
- Pelaksanaan Sistem Akuntansi Barang Milik Negara (SABMN) pada beberapa K/L yang lebih baik, sehingga aset tetap yang dicatat dan dilaporkan meningkat;
- Konsolidasi nilai aset tetap BLU pada laporan keuangan beberapa K/L seperti BLU Rumah Sakit di Departemen Kesehatan sebesar Rp1.174.123.732.026.

Selain penambahan nilai aset tetap sebagaimana tersebut pada paragraf di atas, terdapat penurunan nilai aset tetap yang antara lain karena hasil penilaian oleh DJKN pada beberapa K/L yang terjadi pada Kementerian Negara BUMN sebesar Rp8.744.256.547 pada Peralatan dan Mesin dan di Komisi Pemberantasan Korupsi sebesar Rp6.490.285.302.

Rincian daftar Aset Tetap per K/L disajikan pada **Daftar 21**.

C.2.23. Aset Lainnya

Aset Lainnya Rp308,78 triliun

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp308.783.512.011.720 dan Rp86.503.344.625.017 merupakan saldo Tagihan Penjualan Angsuran (TPA) dan Tagihan Tuntutan Ganti Rugi (TGR) yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun, Kemitraan dengan Pihak Ketiga, Dana yang Dibatasi Pengunaannya (*restricted assets*), Aset Tak Berwujud, dan Aset Lain-lain. Rincian Aset Lainnya adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2007	31 Desember 2006
Tagihan Penjualan Angsuran	264.984.954	140.032.475
Tagihan Tuntutan Ganti Rugi	30.048.960.054	51.048.922.086
Kemitraan dengan Pihak Ketiga	501.250.000	33.569.000
Aset Tak Berwujud	1.899.119.911.980	569.719.157.703
Dana yang Dibatasi Penggunaannya	21.431.360.880.137	29.533.267.302.742
Aset Lain-lain	285.422.216.024.595	56.349.135.641.011
Jumlah	**308.783.512.011.720**	**86.503.344.625.017**

Tagihan Penjualan Angsuran

Saldo TPA per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp 264.984.954 dan Rp140.032.475 merupakan saldo TPA yang berada di (dalam Rp):

K/L	31 Desember 2007	31 Desember 2006
1. Menneg PPN/Bappenas	213.684.954	75.877.475
2. Bakosurtanal	51.300.000	0
3. Dewan Perwakilan Rakyat	0	32.375.000
4. Badan Pemeriksa Keuangan	0	29.260.000
5. Badan Intelijen Negara	0	2.520.000
Jumlah	**264.984.954**	**140.032.475**

Tagihan Tuntutan Ganti Rugi

Saldo Tagihan TGR per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp30.048.960.054 dan Rp51.048.922.086 merupakan saldo Tagihan TGR yang berada di K/L. Rincian Tagihan TGR pada 30 K/L dapat dilihat pada **Daftar 22.**

Kemitraan dengan Pihak Ketiga

Saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp501.250.000 dan Rp33.569.000 merupakan saldo Kemitraan dengan Pihak Ketiga yang berada di (dalam Rp):

K/L	31 Desember 2007	31 Desember 2006
1. Departemen Dalam Negeri	220.000.000	0
2. Menneg PPN/Bappenas	281.250.000	0
3. Departemen Kehutanan	0	33.569.000
Jumlah	**501.250.000**	**33.569.000**

Aset Tak Berwujud

Saldo Aset Tak Berwujud per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar

Rp1.899.119.911.980 dan Rp569.719.157.703 merupakan aset yang berupa software, biaya survey/penelitian, dan hak paten yang berada di K/L. Rincian Aset Tak Berwujud pada K/L dapat dilihat pada **Daftar 23.**

Dana yang Dibatasi Pengunaannya

Saldo Dana yang Dibatasi Pengunaannya per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp21.431.360.880.137 dan Rp29.533.267.302.742 terdiri atas (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2007	31 Desember 2006
1. Rekening Khusus	1.559.857.860.322	845.909.266.282
2. Rekening Cadangan	16.820.283.046.713	26.337.406.166.238
3. Dana Penjaminan	826.080.959.825	579.335.691.131
4. Rekening Penjaminan	277.588.605.838	60.215.666.733
5. Dana Abadi Umat	1.389.756.080.714	1.315.729.609.307
6. Aset Bersih Bapertarum	5.183.832.240	-
7. Kas Besi	405.205.873.556	394.670.903.051
8. Kas Lainnya	147.404.620.929	-
Jumlah	**21.431.360.880.137**	**29.533.267.302.742**

Masing-masing Dana yang Dibatasi Penggunaannya dapat dijelaskan sebagai berikut:

1. Saldo rekening khusus sebesar Rp1.559.857.860.322 merupakan rekening khusus pemerintah di BI. Rincian per rekening dapat dilihat pada **Daftar 24.**
2. Rekening Cadangan sebesar Rp16.820.283.046.713 merupakan rekening yang digunakan untuk menampung sisa anggaran belanja yang terdiri dari:

Uraian	31 Desember 2007	31 Desember 2006
Rekening Cadangan Reboisasi	8.330.226.170.050	10.295.063.936.535
Rekening Cadangan Subsidi	5.064.811.315.145	4.667.266.053.725
Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil	2.881.164.399.957	3.105.524.842.204
Rekening Cadangan Dana Konversi	544.081.161.561	0
Rekening Cadangan Lainnya	0	8.269.551.333.774
Jumlah	16.820.283.046.713	26.337.406.166.238

- *Rekening Cadangan Reboisasi*, adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q Direktur Jenderal perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa dana reboisasi setiap tahun dari bagian pemerintah pusat setelah dikurangi alokasi ke Departemen Kehutanan. Dana yang terdapat dalam rekening cadangan reboisasi digunakan untuk membiayai kegiatan reboisasi seperti Program Gerakan Rehabilitasi Hutan dan Lahan (Gerhan) berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2002 tentang Dana Reboisasi, Peraturan Bersama antara Menteri Keuangan dan Menteri Kehutanan Nomor 06.1/PMK.01/2007 dan Nomor 02/Menhut-II/2007 tanggal 5 Februari 2007 tentang Pengelolaan Dana Reboisasi Dalam Rekening Pembangunan Hutan. Saldo rekening cadangan reboisasi sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp8.330.226.170.050.
- *Rekening Cadangan Subsidi*, adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa pagu DIPA subsidi/PSO yang belum dapat dicairkan karena belum didukung oleh bukti-bukti yang sah. Dana yang terdapat dalam Rekening Cadangan Subsidi/PSO digunakan untuk membayar subsidi/PSO yang sampai dengan akhir Desember tahun anggaran yang bersangkutan belum dapat diajukan kepada Direktorat Jenderal Perbendaharaan. Pencairan dana yang terdapat dalam Rekening Cadangan Subsidi/PSO dibatasi sampai dengan akhir bulan Februari tahun

anggaran berikutnya sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 82/PMK.05/2007 tentang Tata Cara Pencairan Dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Melalui Rekening Kas Umum Negara, kecuali rekening cadangan Subsidi/PSO yang berkaitan dengan BULOG pencairannya menunggu hasil audit BPK-RI. Saldo rekening cadangan subsidi/PSO sampai dengan 31 Desember 2007 sebesar Rp5.064.811.315.145.

- *Rekening Cadangan Dana Bagi Hasil*, adalah rekening milik Menteri Keuangan c.q. Direktur Jenderal Perbendaharaan yang digunakan untuk menampung sisa penerimaan sumber daya alam setiap tahun yang berasal dari sektor kehutanan, pertambangan umum, dan perikanan yang belum disalurkan kepada Pemerintah Daerah karena belum teridentifikasi daerah penghasilnya. Rekening cadangan dana bagi hasil yang berada pada Bank Negara Indonesia telah ditutup pada tanggal 16 Januari 2008 dan saldonya dipindahkan ke Rekening BUN Nomor 502.000000, sedangkan rekening cadangan dana bagi hasil yang berada di Bank Indonesia diselesaikan paling lambat akhir Februari 2008. Saldo rekening cadangan dana bagi hasil per 31 Desember 2007 sebesar Rp2.881.164.399.957.
- *Rekening Cadangan Dana Konversi* Minyak Tanah ke LPG yang berada di Ditjen Migas Departemen Energi dan Sumber Daya Mineral sebesar Rp544.081.161.561.
- Beberapa rekening cadangan lainnya telah diselesaikan pada awal tahun 2007 seperti Rekening Cadangan Infrastruktur dan Rekening Cadangan PMN. Rekening Cadangan Moratorium telah dimintakan penutupannya pada tanggal 28 Desember 2007, namun belum ada jawaban dari Bank Indonesia.

Rincian masing-masing rekening cadangan, kecuali Rekening Cadangan Dana Konversi disajikan pada **Daftar 25.**

3. Dana Penjaminan per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp826.080.959.825 dan Rp579.335.691.131 merupakan dana penjaminan yang berada di (dalam Rp):

K/L	31 Desember 2007	31 Desember 2006
- Departemen Pertanian	254.052.687.836	255.000.000.000
- Departemen Perindustrian	10.940.841.647	0
- Departemen Kehutanan	18.653.781.651	18.652.386.651
- Departemen Kelautan dan Perikanan	251.253.222.192*)	0
- Kementerian Negara Koperasi dan UKM	291.180.426.499	305.683.304.480
Jumlah	826.080.959.825	579.335.691.131

*) Terdiri dari Program Bantuan Sosial Dana Ekonomi Produktif Rp157.022.872.434 dan Program Bantuan Sosial Dana Penguatan Modal Rp100.230.349.758. Dana-dana tersebut akan dikeluarkan dari neraca setelah adanya Berita Acara Serah Terima antara Departemen Kelautan dan Perikanan dengan penerima Bantuan Sosial.

4. Rekening penjaminan per 31 Desember 2007 sebesar Rp277.588.605.838 terdiri dari:
   - Uang jaminan dari Perusahaan Penempatan TKI Swasta (PPTKIS/JTKI) dan jaminan dari Lembaga Penempatan Tenaga kerja swasta yang berada di Departemen Tenaga Kerja dan Transmigrasi sebesar Rp248.230.040.250, dan
   - Uang deposito untuk perusahaan-perusahaan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara (PKP2B) di Departemen ESDM sebesar Rp29.358.565.588.

5. Dana Abadi Umat (DAU) adalah dana yang diperoleh dari hasil efisiensi biaya penyelenggaraan haji dan dari sumber lain sebagaimana tertuang dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 1999. DAU dialokasikan untuk kemaslahatan umat Islam di bidang pendidikan, dakwah, pembangunan sarana dan prasarana ibadah serta bidang penyelenggaraan

haji. Jumlah sebesar Rp1.389.756.080.714 merupakan jumlah kas yang berada di rekening DAU.

6. Aset Bersih Bapertarum sebesar Rp5.183.832.240 merupakan nilai ekuitas Bapertarum per 31 Desember 2006.

7. Kas Besi sebesar Rp405.205.873.556 merupakan saldo kas pada Perwakilan Republik Indonesia di luar negeri yang dibentuk berdasarkan surat Menteri Keuangan No. S-2.18/424/0182 tanggal 13 Januari 1992 untuk keperluan berjaga-jaga terhadap keadaan/kejadian yang mungkin timbul, terutama untuk membiayai perwakilan apabila remise (*cash supply*) terlambat dan keperluan lainnya yang penggunaannya harus mendapat persetujuan/instruksi dari Sekretariat Jenderal Departemen Luar Negeri.

8. Kas lainnya sebesar Rp147.404.620.929 merupakan kas yang berada di:

- Departemen Pertahanan	37.182.685.417
- Departemen Luar Negeri	5.895.075.623
- BRR NAD-Nias	104.326.859.889
Jumlah	**147.404.620.929**

Kas lainnya di Departemen Luar Negeri merupakan kas yang berasal dari pencairan anggaran Belanja Modal yang masih tersimpan di Bendahara dan belum dibayarkan kepada pihak ketiga (rekanan).

Kas lainnya di BRR terdiri dari Kas PMU ReKOMPAK sebesar Rp59.060.265.372 yang belum disalurkan kepada Kelompok Penerima Bantuan (Kelompok Pemukim) dan Kas Komite Beasiswa sebesar Rp45.266.594.517 untuk mendanai beasiswa pendidikan lanjutan bagi tenaga kesehatan di Provinsi NAD. Pada LKPP Tahun 2006, Kas PMU ReKOMPAK dan Kas Komite Beasiswa sebesar Rp212.241.527.202 disajikan sebagai aset lancar dengan akun Kas di BRR NAD-Nias.

Aset Lain-lain

Aset Lain-lain berdasarkan instansi/unit terkait dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Instansi/Unit Terkait	31 Desember 2007	31 Desember 2006
1. K/L	12.239.995.340.397	5.987.410.012.631
2. PT PPA (Persero)	3.989.193.692.989	4.382.507.066.912
3. Tim Koordinasi	7.360.075.725.532	7.360.075.726.532
4. Direktorat PPP – Ditjen PBN	52.415.026.929	73.671.929.170,00
5. BP Migas	232.422.461.205.748	38.545.470.905.766
6. Unit Lainnya	29.358.075.033.000	0
Jumlah	**284.280.488.823.595**	**56.349.135.641.011**

Penjelasan Aset Lain-lain adalah sebagai berikut:

1. Aset Lain-lain yang berada di K/L sebesar Rp12.239.995.340.397 antara lain berupa:
   - Uang pengganti kerugian negara yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap yang sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 belum diselesaikan di Kejaksaan Agung sebesar Rp5.641.859.689.688 dan USD207,604,820.24;
   - Dana Hutan Tanaman Industri, Dana Kredit Usaha Konservasi Daerah Aliran Sungai, Dana Kredit Usaha Persuteraan Alam dan Dana Kredit Usaha Hutan Rakyat di Departemen Kehutanan sebesar Rp1.368.679.924.899. Pada LKPP 2006, dana tersebut disajikan sebagai dana bergulir.
   - Piutang macet di Deplu, Dep. ESDM, BPPT, Bakosurtanal dan BATAN dengan total nilai

sebesar 158.399.709.069;

- Aset tetap yang sudah rusak berat dan tidak digunakan lagi dalam kegiatan operasional pemerintahan.

Rincian Aset Lain-lain di K/L disajikan pada **Daftar 26.**

2. Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA (Persero) sebesar Rp3.989.193.692.989 merupakan aset pemerintah eks BPPN yang masih dikelola PT PPA (Persero) menunggu untuk dijual dan hasilnya disetorkan ke Kas Negara sebagai PNBP. Nilai aset tersebut merupakan nilai pengalihan eks BPPN ke Menteri Keuangan. Rincian Aset Lain-lain yang berasal dari PT PPA disajikan pada **Daftar 27.**

3. Aset Lain-lain yang berasal dari Tim Koordinasi sebesar Rp7.360.075.725.532 merupakan aset pemerintah eks BPPN yang status kepemilikan dan nilainya masih bermasalah (belum bersih), sehingga belum dapat diserahkan kepada PT PPA (Persero). Termasuk di dalamnya adalah tagihan Penyelesaian Kewajiban Pemegang Saham (PKPS) sebesar Rp2.235.982.000.000 yang merupakan piutang BPPN yang timbul sehubungan dengan PKPS kepada perusahaan induk yang didirikan oleh eks Pemegang Saham Pengendali (PSP) BTO dan BBO dalam rangka penyelesaian terhadap kewajiban eks PSP tersebut berdasarkan perjanjian MSAA, MRNIA, dan piutang BPPN kepada eks PSP BBKU dan BTO II dalam perjanjian APU. Rincian jumlah aset dan nilai pengalihan disajikan pada **Daftar 28.**

4. Aset Lain-lain yang berasal dari Direktorat Pengelolaan Penerusan Pinjaman Departemen Keuangan sebesar Rp52.415.026.929 merupakan dana pemerintah dalam rangka kerjasama penjamin kredit UMKM pada Perum Pengembangan Sarana Usaha.

5. Aset Lain-lain yang berasal dari BP Migas sebesar Rp232.422.461.205.748 merupakan aset negara yang digunakan dalam rangka kontrak kerja sama minyak bumi dan gas alam yang dikelola oleh KKKS (tidak termasuk persediaan dan tanah).

   Aset tersebut terdiri dari aset produksi sebesar USD24,642,323,399 (ekuivalen dengan Rp232.106.044.095.181) dan aset non produksi sebesar USD33,593,493 (ekuivalen dengan Rp316.417.110.567) berdasarkan konversi nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2007. Nilai tersebut dihitung berdasarkan *nilai perolehan* dan tidak memperhitungkan nilai depresiasi. Nilai depresiasi dalam aset kegiatan usaha hulu merupakan cerminan dari besarnya nilai perolehan aset kapital untuk kepentingan eskplorasi dan eksploitasi minyak dan gas bumi yang telah diganti *cost recovery*-nya. Untuk tahun-tahun sebelumnya, aset KKKS pada LKPP disajikan berdasarkan nilai buku. Nilai buku tersebut mencerminkan nilai perolehan aset kapital yang belum diperhitungkan *cost recovery*-nya dalam perhitungan bagi hasil sesuai KKKS.

   Nilai depresiasi dan nilai buku per 31 Desember 2007 masing-masing sebesar USD21,318,415,653 (ekuivalen dengan Rp200.798.157.035.607) dan USD3,323,907,746 (ekuivalen dengan Rp31.307.887.059.574). Rincian aset KKKS disajikan pada **Daftar 29.**

   Aset berupa persediaan per 31 Desember 2007 sebesar USD778,756,290.80 (ekuivalen dengan Rp7.335.105.503.045) belum dimasukkan ke neraca karena pada saat penyusunan LKPP nilai persediaan masih dalam proses perhitungan.

6. Aset lainnya sebesar Rp29.358.075.033.000 merupakan aset yang belum ditetapkan pengelolaannya oleh Pemerintah terkait Penetapan Neraca Pembukaan PT Pertamina (Persero) Per 17 September 2003. Aset tersebut terdiri atas:

   a. Aktiva Tetap LNG BADAK-Bontang Rp21.386.569.198.000 dan LNG ARUN-Lhokseumawe Rp6.259.705.405.000.

   b. Aktiva Tetap yang tidak dialihkan kepada PT Pertamina (Persero) pada 12 lokasi dengan total nilai sebesar Rp1.711.800.430.000, namun 2 dari 12 Aktiva Tetap akan diserahkan kemudian kepada PT Pertamina (Persero).

   Nilai Aset Lainnya tersebut di atas dihitung berdasarkan hasil penilaian PT Ujatek yang telah direview oleh Ditjen Pajak.

Jumlah Aset Lainnya per 31 Desember 2007 belum termasuk dana devisa di Departemen Pertahanan berupa L/C yang belum dicairkan oleh pihak ketiga, dengan rincian GBP4,251,101.62; SGD2,620,662.37; EUR16,674,742.41; JPY456,781,253 dan USD150,052,119.12 atau ekuivalen dengan Rp1.777.703.578.033 berdasarkan konversi nilai kurs tengah BI per 31 Desember 2007.

C.2.24. Utang Perhitungan Fihak Ketiga (PFK)

Utang PFK Rp525,50 miliar

Utang PFK per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp525.494.606.202 dan Rp460.693.623.955 merupakan selisih antara Penerimaan Potongan PFK dan Pengeluaran Pembayaran kepada pihak ketiga. Rekapitulasi penerimaan dan pengeluaran PFK adalah sebagai berikut:

Uraian	Penerimaan (Rp)	Pengeluaran (Rp)	Saldo (Rp)
- Pengmbl. Pen. PFK 10% Gaji PNS	7.120.371.923.930	6.910.299.744.000	210.072.179.930
- Pengmbl. Pen. PFK 10% Gaji Polri/PNS Polri	624.150.315.913	533.922.601.000	90.227.714.913
- Pengmbl. Pen. PFK 10% Gaji TNI/PNS Dephan	712.638.345.454	604.163.963.585	108.474.381.869
- Pengmbl. Pen. PFK 2% Gaji Terusan	2.413.668.540	2.694.436.070	(280.767.530)
- Pengmbl. PFK Tabungan wajib perumahan	315.084.829.000	270.000.000.000	45.084.829.000
- Pengmbl. Pen. PFK 2% Iuran Kes. Pemda	1.071.389.141.820	1.000.027.490.000	71.361.651.820
- Pengmbl. Pen. PFK 2% As. Bidan/Dokter PTT	5.804.346.595	13.881.340.000	(8.076.993.405)
- Pengmbl. Pen. PFK 2% Askes TNI/Polri	71.855.711.605	63.224.102.000	8.631.609.605
Jumlah	**9.923.708.282.857**	**9.398.213.676.655**	**525.494.606.202**

C.2.25. Bagian Lancar Utang Jangka Panjang

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang Rp96,21 triliun

Jumlah Bagian Lancar Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp96.214.976.565.544 dan Rp79.760.070.578.171 merupakan utang pemerintah yang diperhitungkan akan dibayar atau jatuh tempo 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca, yang terdiri dari (dalam Rp):

Bagian Lancar Utang Jangka Panjang	31 Desember 2007	31 Desember 2006
1. Bagian Lancar Utang Luar Negeri	57.370.840.349.347	53.681.941.587.000
2. Bagian Lancar Utang Dalam Negeri	38.844.136.216.197	26.078.128.991.171
Jumlah	**96.214.976.565.544**	**79.760.070.578.171**

Penjelasan masing-masing Bagian Lancar Utang Jangka Panjang adalah sebagai berikut:

1. Jumlah Bagian Lancar Utang Luar Negeri sebesar Rp57.370.840.349.347 dan Rp53.681.941.587.000, terdiri atas (dalam Rp):

Jenis Utang	31 Desember 2007	31 Desember 2006
Bilateral	25.514.829.526.410	21.936.088.982.000
Multilateral	18.414.239.177.261	18.708.463.506.000
Kredit Ekspor	13.182.832.139.631	12.495.274.241.000
Kredit Komersil	125.359.815.169	45.913.025.000
Leasing	133.579.690.878	496.201.833.000
Jumlah	**57.370.840.349.347**	**53.681.941.587.000**

Jumlah Bagian Lancar Utang Luar Negeri dalam valuta asing per 31 Desember 2007 dan 2006 masing-masing sebesar USD 6,090,969,354.43 dan USD5,951,434,765.74.

2. Bagian Lancar Utang Dalam Negeri sebesar Rp38.844.136.216.197 dan Rp26.078.128.991.171 merupakan reklasifikasi Surat Utang negara (SUN) dalam negeri yang akan jatuh tempo dalam waktu 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Bonds	31 Desember 2007	31 Desember 2006
I. Fixed Rate Bonds:		
Nominal	1.100.000.000.000	15.453.245.000.000
Unamortized Premium (Disc.)	(4.196.162.000)	(2.411.288.372)
Nilai bersih (nilai buku)	**1.095.803.838.000**	**15.450.833.711.628**
II. SBN Tanpa Bunga[*)]		
Nominal	10.168.800.000.000	0
Unamortized Premium (Disc.)	(536.649.842.000)	0
Nilai bersih (nilai buku)	**9.632.150.158.000**	**0**
III. Variable Rate Bonds:		
Nominal	25.746.389.000.000	9.040.826.000.000
Unamortized Premium (Disc.)	0	0
Nilai bersih (nilai buku)	**25.746.389.000.000**	**9.040.826.000.000**
VI. Surat Utang kepada BI [**)]		
Nominal yg harus diamortisasi	2.369.793.220.197	1.586.469.279.543
Accrued Indexation	0	0
Nilai bersih (nilai buku)	**2.369.793.220.197**	**1.586.469.279.543**
Jumlah (I + II + III+IV)	**38.844.136.216.197**	**26.078.128.991.171**

Keterangan:
*) terdiri dari SPN dan Zero Coupon Rate
**) terdiri dari SU-002, SU-004, SU-005 dan SRBI-1/MK/2003

Rincian lebih lanjut mengenai Bagian Lancar Utang Obligasi DN dapat dilihat pada **Daftar 30.**

C.2.26. Utang Bunga

Utang Bunga Rp15,17 triliun

Jumlah Utang Bunga per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp15.168.399.409.074 dan Rp13.307.756.263.984, merupakan utang bunga yang belum dibayar sampai dengan tanggal neraca, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2007	31 Desember 2006
1. Utang Bunga Obligasi	10.911.985.746.440	9.667.136.117.465
2. Utang Bunga Luar Negeri	4.239.068.958.672	3.630.937.399.980
3. Utang Bunga Lainnya	17.344.703.962	9.682.746.539
Jumlah	**15.168.399.409.074**	**13.307.756.263.984**

Penjelasan masing-masing Utang Bunga adalah sebagai berikut:

1. Utang Bunga Obligasi sebesar Rp10.911.985.746.440 dan Rp9.667.136.117.465 dapat dirinci sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2007	31 Desember 2006
Fixed Rate Bonds	7.695.068.729.841	6.250.198.367.506
Variable Rate Bonds	1.479.593.953.711	2.077.212.220.576
Surat Utang kepada BI*)	275.280.862.916	279.207.834.755
International Bonds	1.462.042.199.972	1.060.517.694.628
Jumlah	**10.911.985.746.440**	**9.667.136.117.465**

Keterangan:
*) terdiri dari SU-002, SU-004, SU-005, SU-007, dan SRBI-1/MK/2003.

Rincian lebih lanjut Utang Bunga Obligasi dapat dilihat pada **Daftar 31.**

2. Utang Bunga Luar Negeri sebesar Rp4.239.068.958.672 dan Rp3.630.937.399.980 terdiri atas (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2007	31 Desember 2006
Utang Bilateral	1.395.686.143.800	1.180.932.071.660
Kredit Komersial	5.841.043.044	5.206.876.180
Kredit Ekspor	852.230.342.193	670.567.221.280
Leasing	1.017.675.669	3.626.996.120
Multilateral	1.984.293.753.966	1.770.604.234.740
Jumlah	**4.239.068.958.672**	**3.630.937.399.980**

Jumlah Utang Bunga Luar Negeri dalam valuta asing per 31 Desember 2007 dan 2006 masing-masing sebesar USD450,055,097.00 dan USD402.542.949,00.

3. Utang bunga lainnya sebesar Rp17.344.703.962 merupakan utang subsidi bunga dalam rangka program Kredit Ketahanan Pangan yang belum ditagih oleh bank pelaksana kepada Pemerintah yang dihitung secara akrual dan harus dibayar sampai dengan 31 Desember 2007.

C.2.27. Utang Kepada Pihak Ketiga

Utang kepada Pihak Ketiga sebesar Rp25,06 triliun

Jumlah Utang kepada Pihak Ketiga per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp25.063.414.380.587 dan Rp11.668.015.966.779 merupakan kewajiban Pemerintah atas barang yang telah diterima dari pihak ketiga dan kewajiban Pemerintah lainnya kepada pihak ketiga namun sampai dengan tahun anggaran berakhir belum dibayar, dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2007	31 Desember 2006
- K/L [1)]	2.538.969.934.920	2.519.279.794.810
- Rekening Penjaminan[2)]	277.588.605.838	60.215.666.733
- Bapertarum	5.183.832.240	0
- Rekening Cadangan[3)]	8.490.056.876.663	7.772.790.895.929
- Utang Subsidi [4)]	13.520.186.210.926	0
- Pemerintah Daerah [5)]	231.428.920.000	0
- Lain-lain	0	1.315.729.609.307
Jumlah	**25.063.414.380.587**	**11.668.015.966.779**

Keterangan:

1) Antara lain berupa dana yang harus dibayarkan atas pekerjaan gedung dan pembelian peralatan dan mesin, keterlambatan penagihan dari pihak ketiga, dan lain-lain. Termasuk di dalamnya adalah tunggakan reimbursement PPN Migas dan Panas Bumi sebesar Rp1.880.349.104.649 dan Realisasi Pengembalian Kompensasi Pungutan Ekspor sebesar Rp909.162.721. Rincian utang kepada pihak ketiga dapat dilihat pada **Daftar 32.**

2) Utang kepada perusahaan Kuasa Pertambangan, Kontrak Karya, dan Perjanjian Karya Pengusahaan Pertambangan Batubara berupa rekening jaminan sebesar Rp29.358.565.588 dan uang jaminan dari Perusahaan Penempatan TKI Swasta dan lembaga penempatan tenaga kerja swasta sebesar Rp248.230.040.250.

3) Merupakan kewajiban kepada pihak lain yang terkait dengan dana bagi hasil dan subsidi PSO yang sampai saat ini masih ditampung di rekening dana cadangan.

4) Merupakan utang subsidi yang terdiri dari:
   - Utang subsidi kepada BULOG sebesar Rp492.025.463.095 yang merupakan tagihan BULOG kepada Pemerintah atas penyaluran beras Program Raskin dan Program PKS BBM tahun 2001 sampai dengan tahun 2003 dengan rincian sebagai berikut:
     - Tahun 2001 sebesar Rp178.038.672.134.
     - Tahun 2002 sebesar Rp103.473.521.728.
     - Tahun 2003 sebesar Rp210.513.269.233.

- Utang subsidi kepada PT KAI (Persero) sebesar Rp143.750.000.000. Dari total DIPA sebesar Rp425.000.000.000 telah dibayarkan subsidi kepada PT KAI (Persero) sebesar Rp281.250.000.000.
- Utang subsidi kepada PT Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp31.250.000.000. Dari total DIPA sebesar Rp125.000.000.000 telah dibayarkan subsidi kepada PT Pos Indonesia (Persero) sebesar Rp93.750.000.000.
- Utang subsidi kepada PT Pertamina (Persero) sebesar Rp5.058.526.486.000 merupakan subsidi BBM dan LPG TA 2007 yang tidak dapat dibayarkan kepada PT Pertamina (Persero).
- Utang subsidi listrik kepada PT PLN (Persero) sebesar Rp7.794.634.261.831 merupakan jumlah subsidi listrik tahun 2007 dan kekurangan subsidi tahun 2006 yang belum dapat dibayarkan dalam TA 2007 (*carry over*) dengan rincian sebagai berikut:
  - Perkiraan kekurangan subsidi listrik tahun 2007 sebesar Rp4.283.713.522.683;
  - Kekurangan subsidi listrik tahun 2006 hasil audit sebesar Rp3.510.920.739.148.

5) Utang pemerintah kepada pemerintah daerah sebesar Rp231.428.920.000 merupakan kekurangan Dana Bagi Hasil tahun 2005. Sumber pembiayaan untuk kekurangan pembayaran dana bagi hasil tahun 2000-2005 tersebut berasal dari penggunaan Rekening Saldo Anggaran Lebih dan tercatat dalam pembiayaan perbankan dalam negeri.

C.2.28. Utang Jangka Pendek Lainnya

Utang Jangka Pendek Lainnya Rp2,76 triliun

Jumlah Utang Jangka Pendek Lainnya per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp2.760.047.411.652 dan Rp2.944.434.123.992 , dengan rincian sebagai berikut:

Uraian	31 Desember 2007	31 Desember 2006
- Departemen Pertahanan [1)]	2.757.337.130.541	2.941.365.403.920
- Departemen Keuangan -- BLU	74.060.000	0
- Kementerian Koord. Bid. Polhukkam	285.908.050	0
- Kredit Ketahanan Pangan [2)]	2.350.313.061	3.068.720.072
Jumlah	**2.760.047.411.652**	**2.944.434.123.992**

Keterangan:

1. Terdiri dari tunggakan kepada suplier Bahan Bakar Minyak Pelumas, Listrik, Telekomunikasi, Gas, dan Air.
2. Merupakan utang yang menjadi bagian Pemerintah kepada bank pelaksana atas jumlah Kredit Ketahanan Pangan yang dipertanggungkan kepada lembaga penjaminan.

C.2.29. Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SUN

Utang Jangka Panjang DN SUN Rp693,79 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SUN per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp693.789.445.220.648 dan Rp664.069.038.386.125 merupakan posisi utang obligasi dalam negeri yang akan jatuh tempo lebih dari 1 (satu) tahun setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang Dalam Negeri SUN adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Obligasi	31 Desember 2007	31 Desember 2006
I. Fixed Rate Bonds		
Principle Outstanding	293.352.587.000.000	223.111.256.000.000
Unamortized Prem (Disc.)	(3.001.386.028.000)	(2.968.375.175.775)
Nilai bersih (nilai buku)	290.351.200.972.000	220.142.880.824.225

II. SBN Tanpa Bunga		
Principle Outstanding	4.500.000.000.000	0
Unamortized Prem (Disc.)	(949.726.369.000)	0
Nilai bersih (nilai buku)	3.550.273.631.000	0
III. Variable Rate Bonds		
Principle Outstanding	142.878.799.000.000	171.145.872.000.000
Unamortized Prem (Disc.)	0	0
Nilai bersih (nilai buku)	142.878.799.000.000	171.145.872.000.000
IV. Surat Utang kepada BI		
Principle Outstanding	257.009.171.617.648	272.780.285.561.900
Accrued Indexation	0	0
Nilai bersih (nilai buku)	257.009.171.617.648	272.780.285.561.900
Jumlah (I+II+III+IV)	**693.789.445.220.648**	**664.069.038.386.125**

Catatan:

- Termasuk di dalam Fixed Rate Bond adalah tiga seri ORI, yaitu ORI001, ORI002, dan ORI003 dengan tingkat kupon berkisar antara 9,28 % sampai 12,05% dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Baik obligasi jenis FR maupun ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.
- Surat Utang kepada Bank Indonesia (BI) merupakan jenis surat utang yang tidak dapat diperdagangkan *(non-tradable).* Surat Utang kepada BI terdiri dari SU002, SU004, SU005, SU007 dan SRBI01.
- SU002 dan SU004 adalah jenis utang Pemerintah kepada BI berkaitan dengan program penjaminan dan BLBI (Bantuan Likuiditas Bank Indonesia). SU002 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga sebesar 1% setahun (dari sebelumnya 3%), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018). SU004 setelah restrukturisasi memiliki tingkat bunga 3% setahun (tidak berubah), pokoknya diamortisasi dengan jatuh tempo pokok yang terakhir pada tahun 2025 (sebelumnya 2018).
- SU005 adalah Surat Utang yang diterbitkan terkait dengan pemberian kredit program, khususnya kredit kepada usaha kecil dan menengah. Tingkat bunga SU005 ditetapkan sebesar tingkat bunga SBI 3 bulan dan dibayar setiap enam bulan (semiannually) yaitu setiap tanggal 10 Juni dan 10 Desember. Pokok SU005 mulai diamortisasi/dicicil secara semiannually sejak 10 Desember 2007 sampai dengan jatuh tempo pada tahun 2009.
- SU007 memiliki tingkat bunga 0,1% setahun dan jatuh tempo pokok pada tahun 2025. Sesuai terms and conditions Surat Utang Nomor SU-007/MK/2006, angsuran pokok SU007 diamortisasi secara semiannually dan telah mulai dibayar sejak 1 Februari 2007 sebesar Rp509.352.721.728. Pembayaran angsuran pokok SU007 dapat dilakukan dengan cara tunai (cash) atau dibayar dengan menggunakan Surat Utang Negara (SUN) yang dapat diperdagangkan *(tradable).*
- SRBI01 adalah surat utang yang diterbitkan oleh Pemerintah pada tanggal 7 Agustus 2003 dalam rangka penyelesaian BLBI. SRBI01 jatuh tempo tahun 2033 dengan tingkat kupon 0,1% setahun dihitung dari sisa pokok terutang yang dibayarkan secara periodik 2 (dua) kali setahun. Pelunasan SRBI dapat bersumber dari surplus BI yang menjadi bagian Pemerintah dan akan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter BI telah mencapai di atas 10%. Dalam hal rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia kurang dari 3%, maka Pemerintah akan membayar charge kepada Bank Indonesia sebesar kekurangan dana yang diperlukan untuk mencapai rasio modal tersebut. Berdasarkan hasil audit BPK, rasio modal terhadap kewajiban moneter BI pada tahun 2006 telah lebih dari 10%, sehingga pada tanggal 23 Mei 2007, BI telah menyetor sisa surplus BI tahun 2006 yang menjadi bagian Pemerintah dengan nilai nominal sebesar Rp13.669.320.724.055. Sisa surplus tersebut akan digunakan seluruhnya untuk membayar sebagian pokok SRBI01, sehingga saldo akhir pokok SRBI01 pada akhir TA 2007 setelah pelunasan tersebut adalah sebesar

Rp129.344.302.808.967.

Rincian Utang Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang dapat dilihat pada **Daftar 33.**

C.2.30. Kewajiban Pemerintah terhadap Program THT

Kewajiban Pemerintah Terhadap Program THT Rp1,75 triliun

Jumlah Kewajiban Pemerintah terhadap THT per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp1.754.377.650.427 dan Rp1.646.697.846.635 merupakan kewajiban Pemerintah terhadap Program THT sehubungan dengan saldo *unfunded liability* tahun 2004 kepada PT TASPEN (Persero) akibat perubahan formula perhitungan manfaat dari SK Menkeu No. 500/KMK.06/2004.

Kenaikan *unfunded liabilities* sebesar Rp107.679.803.792 disebabkan adanya koreksi atas saldo *unfunded liabilities* tahun 2006 yang berasal dari koreksi pembayaran cicilan tahun 2005 dan pembayaran cicilan tahun 2007 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Saldo per 31 Desember 2006 sebelum koreksi	1.646.697.846.635
Koreksi atas cicilan tahun 2005	185.324.770.712
Saldo per 31 Desember 2006 setelah koreksi	1.832.022.617.347
Cicilan tahun 2007	(77.644.966.920)
Saldo per 31 Desember 2007	**1.754.377.650.427**

Di samping itu, masih terdapat *unfunded liability* sebesar Rp1.912.476.507.552 yang belum diselesaikan sebagai akibat kenaikan gaji pokok PNS sesuai PP No. 26 Tahun 2001 sebesar Rp273.410.276.108 dan PP No. 9 Tahun 2007 sebesar Rp1.639.066.231.444. Namun Pemerintah belum menyepakati atas jumlah tersebut sehingga tidak dapat diakui sebagai utang kepada PT TASPEN (Persero).

C.2.31. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan

Utang Jangka Panjang LN Perbankan Rp528,64 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp528.644.752.378.689 dan Rp505.104.096.673.440 merupakan posisi utang luar negeri perbankan yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca. Rincian Utang Jangka Panjang LN Perbankan adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Jenis Utang	31 Desember 2007	31 Desember 2006
Bilateral	276.814.681.076.911	265.200.317.725.260
Multilateral	161.229.599.639.808	151.198.883.902.920
Kredit Ekspor	90.600.471.661.970	88.704.895.045.260
Jumlah	**528.644.752.378.689**	**505.104.096.673.440**

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Perbankan dalam valuta asing per 31 Desember 2007 dan 2006 masing-masing sebesar USD 56,125,358,570.83 dan USD55,998,236,881.76

C.2.32. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan

Utang Jangka Panjang LN Non Perbankan Rp14,81 miliar

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp14.808.032.952 dan Rp130.873.212.300 merupakan utang luar negeri leasing yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca.

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Non Perbankan dalam valuta asing per 31 Desember 2007 dan 2006 masing-masing sebesar USD1,572,144.91 dan USD14,509,225.31.

C.2.33. Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN

Utang Jangka Panjang LN SUN Rp66,56 triliun

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri SUN per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp66.559.215.313.000 dan Rp50.456.525.092.318 merupakan posisi utang obligasi luar negeri (International Bonds-RI0014) yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal

neraca dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	31 Desember 2007	31 Desember 2006
Principles outstanding*)	65.647.648.587.500	52.072.000.000.000
Accrued Indexation	285.351.412.500	(2.462.000.000.000)
Net Unamortized Premium (Discount)	626.215.313.000	846.525.092.318
Nilai Bersih (nilai buku)	**66.559.215.313.000**	**50.456.525.092.318**

*) konversi ke dalam Rupiah menggunakan kurs saat diterbitkan.

Penjelasan lebih lengkap tentang SUN dapat dilihat pada Laporan Pertanggungjawaban Pengelolaan Surat Utang Negara Tahun 2007 di **Daftar 34.**

C.2.34. Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya

Utang Jangka Panjang LN Lainnya Rp470,53 miliar

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 masing-masing sebesar Rp470.533.090.781 dan Rp514.869.376.960 merupakan posisi utang luar negeri komersial kredit yang akan jatuh tempo lebih dari satu tahun setelah tanggal neraca.

Jumlah Utang Jangka Panjang Luar Negeri Lainnya dalam valuta asing per 31 Desember 2007 dan 2006 masing-masing sebesar USD49,955,737.42 dan USD57,080,862.19. Secara keseluruhan, jumlah utang SUN dan Utang Luar Negeri disajikan pada Tabel 9.

Tabel 9
Posisi Utang Luar Negeri dan SUN
(Dalam Juta)

Jenis Utang	31 Desember 2007	31 Desember 2006	Kenaikan (Penurunan)
Utang Luar Negeri (ULN)			
Bag. Lancar Utang LN	57.370.840,35	53.681.941,59	3.688.898,76
Utang LN – Jangka Panjang	529.130.093,50	505.749.839,26	23.380.254,24
Jumlah ULN (Rp)	**586.500.933,85**	**559.431.780,85**	**27.069.153,00**
Jumlah ULN (USD)	62,267.86	62,021.26	2,873.89
Surat Utang Negara (SUN)			
Bag. Lancar SUN	38.844.136,20	26.078.128,99	12.766.007,21
SUN-Jangka Panjang	693.843.643,33	664.069.038,39	29.774.604,94
Obligasi Intl.	66.559.215,31	50.456.525,09	16.102.690,22
Jumlah SUN (Rp)	**799.246.994,84**	**740.603.692,47**	**58.643.302,37**
Jumlah ULN + SUN (Rp)	**1.385.747.928,69**	**1.300.035.473,32**	**85.712.455,37**

C.2.35. Sisa Anggaran Lebih (SAL)

SAL Rp18,83 triliun

Sisa Anggaran Lebih (SAL) sebesar Rp18.830.302.308.895 merupakan saldo awal SAL Tahun Anggaran 2007. Pada Tahun Anggaran 2007 terdapat Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) sebesar minus Rp7.387.288.768.184 dan penambahan dari selisih tahun lalu sebesar Rp1.927.500.597.697 sehingga saldo akhir SAL per 31 Desember 2007 menjadi sebesar Rp13.370.514.138.408 sebagaimana disajikan pada Tabel 10.

Tabel 10
Saldo Anggaran Lebih TA 2007 dan 2006
(dalam Rupiah)

Uraian	2007	2006
Saldo Awal	18.830.302.308.895	17.066.126.565.213
- SILPA (SIKPA)	(7.387.288.768.184)	273.913.693.682
- Penambahan dari Selisih Tahun Lalu	1.927.500.597.697	1.490.262.050.000
Saldo Akhir	**13.370.514.138.408**	18.830.302.308.895
Rincian SAL terdiri dari:		
- Rek SAL pada BI	51.259.408.895	305.609.932.283
- Rek BUN pada BI	18.170.046.148.742	4.760.905.416.585
- Rek KPPN	5.492.896.654.079	20.594.618.630.000
- Kas di Bendahara Pengeluaran*)	1.155.864.576.821	1.457.362.551.679
- Kas pada BLU**)	444.767.605.022	0,00
- Utang PFK	(525.494.606.202)	(460.693.623.955)
- Penggunaan Rek Moratorium	-	(1.700.000.000.000)
- Penggunaan Rek Migas	(10.078.330.000.000)	(4.200.000.000.000)
- Selisih Kas Lebih	(1.340.495.648.949)	(1.927.500.597.697)
SAL Akhir	**13.370.514.138.408**	**18.830.302.308.895**

Catatan:

*) Jumlah Kas di Bendahara Pengeluaran berbeda dengan yang disajikan di Aset Lancar karena yang disajikan sebagai bagian dari SAL, dan tidak termasuk kas di luar UP sebesar Rp89.356.696.276.

) Kas pada BLU menurut Laporan Arus Kas adalah sebesar Rp399.472.197.238. Perbedaan tersebut disebabkan antara lain oleh penggunaan mata anggaran pendapatan dan belanja yang tidak tepat dalam SPM Pengesahan atas Pendapatan Operasional BLU dan Belanja Operasional BLU dan pendapatan dan belanja operasional BLU yang belum disahkan (Lihat Catatan C.2.3**).

C.2.36. SiLPA (SiKPA)

SiKPA Rp7,39 triliun

Jumlah Sisa Kurang Pembiayaan Anggaran (SiKPA) per 31 Desember 2007 sebesar minus Rp7.387.288.768.184 merupakan selisih antara realisasi seluruh penerimaan anggaran dengan pengeluaran anggaran selama TA 2007. (**Lihat Catatan B.2.5**). Posisi per 31 Desember 2006 mencatat Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) sebesar Rp273.913.693.682.

C.2.37. Dana Lancar Lainnya

Dana Lancar Lainnya Rp19,58 triliun

Jumlah Dana Lancar Lainnya per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp19.584.010.680.384 dan Rp22.727.286.238.759 merupakan Kas dan Bank pemerintah di luar Rekening BUN Nomor 502.000000 dan Rekening Kas di KPPN.

C.2.38. Cadangan Piutang

Cadangan Piutang Rp108,30 triliun

Jumlah Cadangan Piutang per 31 Desember 2007 dan per 31 Desember 2006 sebesar Rp108.296.689.599.084 dan Rp81.491.159.598.372. Untuk posisi per 31 Desember 2007, jumlah tersebut berasal dari total Piutang sebesar Rp116.916.999.934.821 dikurangi Piutang Migas kepada KKKS sebesar Rp8.579.536.598.232 dan Piutang Panas Bumi sebesar Rp40.773.737.505.

C.2.39. Cadangan Persediaan

Cadangan Persediaan Rp6,80 triliun

Jumlah Cadangan Persediaan per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp6.797.911.546.822 dan Rp3.536.487.866.859 merupakan pasangan perkiraan persediaan yang dilaporkan kementerian negara/lembaga dan instansi terkait lainnya.

C.2.40. Pendapatan yang Ditangguhkan

Pendapatan yang Ditangguhkan Rp9,95 miliar

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp9.952.607.700.809 dan Rp429.489.122.788 merupakan Pendapatan Negara Bukan Pajak (PNBP) kementerian negara/lembaga yang belum disetorkan ke Kas Negara serta pendapatan dan piutang terkait penerimaan migas dan panas bumi yang belum dapat diakui sebagai PNBP karena *earning process*-nya belum selesai.

Jumlah Pendapatan yang Ditangguhkan per 31 Desember 2007 merupakan pasangan atas (dalam Rp):

- Kas di Bendahara Penerimaan	878.054.836.115
- Rek. Migas No. 600.000411	162.925.619.964
- Rek. Penerimaan Panas Bumi No. 508000084	291.316.908.993
- Piutang Migas kepada KKKS	8.579.536.598.232
- Piutang Panas Bumi	40.773.737.583
Jumlah	**9.952.607.700.887**

C.2.41. Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Pendek Rp139,21 triliun

Jumlah Perkiraan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Pendek per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar minus Rp139.206.837.766.857 dan minus Rp107.680.276.932.926. Perkiraan tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka pendek. Jumlah ini merupakan total nilai Bagian Lancar Utang Jangka Panjang, Utang Bunga, Utang kepada Pihak Ketiga, dan Utang Jangka Pendek Lainnya.

C.2.42. Selisih Kurs

Selisih kurs sebesar minus Rp47.657.062.985.254 merupakan selisih yang timbul karena penjabaran mata uang asing ke rupiah pada kurs yang berbeda antara kurs saat transaksi dengan kurs pada tanggal pelaporan (kurs tengah BI) yang terkait dengan pinjaman luar negeri dan SUN Valas, dengan rincian (dalam Rp):

- Selisih Kurs Pinjaman Luar Negeri	(47.371.711.572.754)
- Selisih Kurs SUN Valas	(285.351.412.500)
Jumlah	**(47.657.062.985.254)**

Rincian selisih kurs pinjaman luar negeri adalah sebagai berikut (dalam Rp):

- Multilateral	(8.944.126.565.419)
- Bilateral	(2.8941.844.496.818)
- Kredit Ekspor	(9.427.567.566.502)
- Kredit Komersial	(36.951.375.950)
- Leasing	(21.221.568.065
Jumlah	**(47.371.711.572.754**

Sedangkan rincian selisih kurs SUN Valas adalah sebagai berikut:

Uraian	USD	Kurs	Jumlah (Rp)
Outstanding Awal	5,500,000,000		52.072.000.000.000
Penambahan:	900,000,000	9.050	8.145.000.000.000
	574,056,500	9.050	5.195.211.325.000
	1,943,500	9.075	17.637.262.500
	24,000,000	9.075	217.800.000.000
Outstanding Akhir (1)	7,000,000,000		65.647.648.587.500
Outstanding Akhir (2)	7,000,000,000	9.419	65.933.000.000.000
Selisih Kurs (1-2)			**(285.351.412.500)**

(1) : Outstanding akhir dengan menggunakan kurs transaksi pada tanggal penerbitan Obligasi Valas
(2) : Outstanding akhir dengan menggunakan kurs tengah pada tanggal pelaporan (31 Desember 2007)

C.2.43. Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang

Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang Rp691,34 triliun

Jumlah Perkiraan Diinvestasikan dalam Investasi Jangka Panjang per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp691.342.462.226.564 dan Rp663.551.102.160.825 dan merupakan dana pemerintah pusat yang diinvestasikan dalam bentuk investasi permanen dan investasi non permanen yang merupakan lawan dari perkiraan Investasi Jangka Panjang.

C.2.44. Diinvestasikan dalam Aset Tetap

Diinvestasikan dalam Aset Tetap Rp443,51 triliun

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Tetap per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp443.485.970.952.729 dan Rp343.924.953.816.351 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk aset tetap.

C.2.45. Diinvestasikan dalam Aset Lainnya

Diinvestasikan dalam Aset Lainnya Rp308,78 triliun

Jumlah Diinvestasikan dalam Aset Lainnya per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar Rp308.783.512.011.720 dan Rp86.503.344.625.017 merupakan jumlah ekuitas dana yang diinvestasikan oleh pemerintah pusat dalam bentuk aset lainnya.

C.2.46. Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang

Dana yang Harus Disediakan untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang Rp1.243,58 triliun

Dana Yang Harus Disediakan Untuk Pembayaran Utang Jangka Panjang per 31 Desember 2007 dan 31 Desember 2006 sebesar minus Rp1.243.576.068.701.243 dan minus Rp1.221.922.100.587.778 tersebut merupakan bagian dari ekuitas dana yang disediakan untuk pembayaran utang jangka panjang. Jumlah ini merupakan akumulasi utang jangka panjang yang terdiri dari Utang Jangka Panjang Dalam Negeri dan Utang Jangka Panjang Luar Negeri dikurangi selisih kurs.

C.3. CATATAN PENTING LAINNYA

1. Dampak Hasil Audit BPK atas 23 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2006 terhadap Neraca Pemerintah Pusat

Sesuai dengan penjelasan pada LKPP Tahun 2006 (*Audited*), bahwa LKPP Tahun 2006 (Audited) tersebut memuat data 23 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang masih berstatus belum diaudit oleh BPK (*unaudited*). Hal ini terjadi karena pada saat penyusunan dan penyampaian RUU tentang Pertanggungjawaban atas Pelaksanaan APBN Tahun Anggaran 2006 berupa LKPP Tahun 2006 (Audited) kepada DPR RI, 23 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga tersebut belum selesai diaudit oleh BPK.

Pos-pos yang disajikan sebagai saldo awal pada Neraca ini berdasarkan Neraca per 31 Desember 2006 yang memuat 23 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga yang belum diaudit tersebut. Namun, Neraca Pemerintah Pusat per 31 Desember 2007 ini telah memuat koreksi atas saldo awal Neraca berdasarkan hasil audit BPK atas 23 Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga Tahun 2006.

2. Penertiban Barang Milik Negara

Berdasarkan Laporan Hasil Pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2004, LKPP Tahun 2005, dan LKPP Tahun 2006, terdapat beberapa temuan yang terkait dengan Barang Milik Negara (BMN), antara lain: (i) BMN yang disajikan pada Neraca belum dapat diyakini kewajarannya, (ii) Aset Tetap Kementerian Negara/Lembaga belum disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, (iii) prosedur pencatatan dan pelaporan barang milik negara tidak dilakukan sesuai dengan sistem akuntansi yang telah ditetapkan, dan (vi) sistem pengendalian intern pengelolaan atas BMN masih lemah.

Sebagai tindak lanjut terhadap temuan pemeriksaan BPK atas LKPP tersebut, Pemerintah telah dan sedang melakukan penertiban BMN. Sebagai langkah awal, telah diterbitkan Keputusan Presiden No. 17 Tahun 2007 tentang Tim Penertiban Barang Milik Negara.

Penertiban Barang Milik Negara (BMN) adalah suatu program nasional yang dibentuk dalam rangka tindak lanjut temuan BPK atas LKPP berkaitan dengan aset tetap dan dalam rangka membenahi pengelolaan BMN pada seluruh Kementerian Negara/Lembaga (K/L) melalui pelaksanaan inventarisasi, penilaian, dan sertifikasi seluruh BMN pada K/L, sehingga diharapkan terwujud penertiban dan pengamanan BMN secara tertib, efektif, efisien dan akuntabel baik secara administratif, teknis maupun hukum.

Mengacu pada amanat Keppres No. 17 Tahun 2007 tersebut, selanjutnya dibentuk Satuan Tugas Penertiban Barang Milik Negara (Satgas Penertiban BMN) melalui Keputusan Menteri Keuangan No. 481/KMK.06/2007, yang merupakan tim operasional guna melaksanakan penertiban BMN. Dalam pelaksanaan tugasnya, Satgas Penertiban BMN bermitra dengan seluruh satuan kerja K/L dalam melaksanakan kegiatan penertiban BMN.

Lingkup obyek penertiban terdiri dari seluruh aset tetap/BMN yang perolehannya berasal dari APBN dan perolehan yang sah serta kekayaan negara lain-lain yang diungkapkan (di-disclose) dalam temuan BPK.

Agar kegiatan penertiban berlangsung efektif, maka pelaksanaan penertiban BMN dibagi ke dalam 2 tahap, yaitu: (i) Tahap I dilakukan pada bulan Oktober 2007 s.d. Desember 2007 untuk 20 K/L, dan (ii) Tahap II akan dilakukan pada bulan Februari s.d. Desember 2008 untuk 57 K/L, Lembaga Pelayanan Publik, dan aset kekayaan negara lain-lain seperti Aset KKKS, BMKT, Aset Asing/Cina, Aset eks Kepabeanan, Aset eks BPPN, Aset eks BDL, dan Aset eks Kelolaan PPA.

Hasil inventarisasi dan penilaian BMN akan dijadikan sebagai dasar koreksi atas nilai BMN yang telah disajikan pada Neraca Awal Pemerintah per 31 Desember 2004. Dari 20 K/L yang telah melakukan inventarisasi dan penilaian pada tahun 2007, terdapat 5 K/L yang telah melakukan koreksi aset tetapnya dan disajikan pada Neraca per 31 Desember 2007, yaitu Departemen Keuangan, Badan Intelijen Negara, Kementerian Negara BUMN, Dewan Pertahanan Nasional, dan Komisi Pemberantasan Korupsi. Untuk K/L yang lain, koreksi aset tetap berdasarkan inventarisasi dan penilaian akan dilakukan dan dimuat pada laporan keuangan K/L dan LKPP Tahun 2008.

Selain itu, sebagai tindak lanjut atas temuan pemeriksaan BPK terkait dengan lemahnya pengelolaan BMN, telah diterbitkan beberapa peraturan sebagai pedoman pengelolaan BMN, yaitu Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 96/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan BMN, PMK Nomor 97/PMK.06/2007 tanggal 4 September 2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi BMN, dan PMK Nomor 120/PMK.06/2007 tentang Penatausahaan BMN.

3. Laporan Keuangan Badan Layanan Umum (BLU)

Pertanggungjawaban Pengelolaan Keuangan BLU telah dijelaskan sebelumnya pada Catatan Penting Lainnya dalam Laporan Realisasi APBN.

Sementara itu, perbandingan aset, kewajiban, dan ekuitas Saker BLU tahun 2006 dan tahun 2007 disajikan dalam grafik di bawah ini:

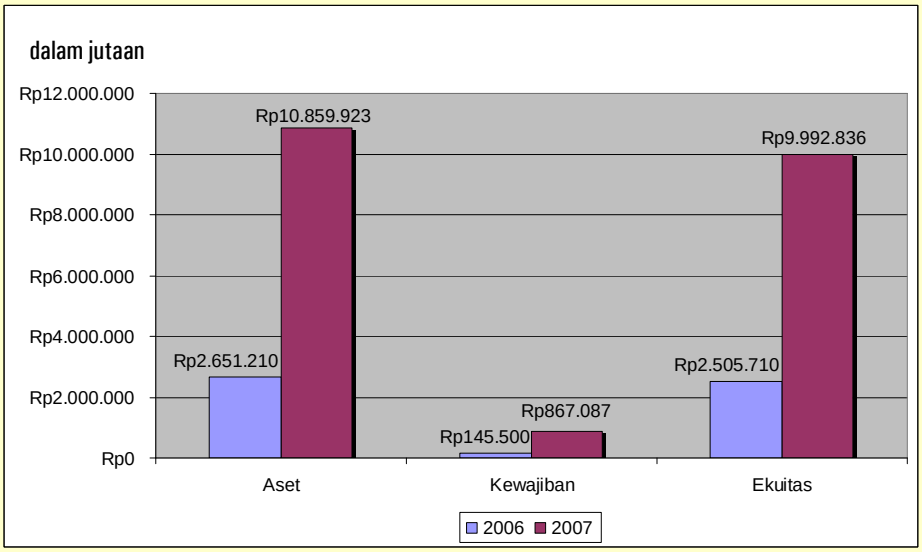

4. Kelebihan Rekapitalisasi Bank Danamon

Saldo kelebihan rekapitalisasi PT Bank Danamon Indonesia Tbk (BDI) per 31 Desember 2006 tercantum sebesar Rp155.000.000.000. Pada tahun 2007, BDI (berdasarkan surat Nomor B-495-DIR tanggal 13 Desember 2007) telah menyetor ke rekening Bendahara Umum Negara Nomor 502.000.000 uang sejumlah: Rp124.320.000.000 dan Rp155.000.000.000 sehingga keseluruhannya berjumlah Rp279.320.000.000.

BDI menyatakan bahwa dengan telah dilaksanakan penyetoran uang tersebut maka:

a. BDI tidak lagi mempunyai kewajiban (*obligations)* atau kewajiban pembayaran (liabilities) terhadap yayasan manapun dan/atau pihak lain manapun untuk membayar kembali Sub Ordinated Loans (SOL) berdasarkan Perjanjian Subordinasi dan/atau Danamon Internasional dan/atau pihak manapun juga untuk membayar kembali modal

pinjaman berdasarkan Perjanjian tentang Modal Pinjaman; dan

b. Permasalahan kelebihan dana rekapitalisasi di BDI sudah tidak ada lagi.

5. Pembayaran Kompensasi Aset Bekas Milik Asing/Cina

Pada LKPP 2006 terdapat saldo piutang lain-lain berupa piutang kompensasi penjualan aset bekas asing/cina (ABMA/C) sebesar Rp4.670.902.000 yang merupakan tagihan atas pelepasan/penjualan ABMA/C kepada pihak ketiga di Surabaya sebesar Rp2.448.268.000 dan di Semarang sebesar Rp2.222.634.000. Terhadap ABMA/C di Jalan Imam Bonjol No. 203 Semarang telah masuk ke rekening Kas Umum Negara pembayaran kompensasi oleh Yayasan Ibu Kartini Semarang sebesar Rp2.222.634.000,00 sesuai SSBP tanggal 6 Juli 2007 dan tambahan setoran sebesar Rp103.506.000. Terhadap ABMA/C di Jalan Gentengkali No. 10 Surabaya belum dilunasi pembayaran kompensasinya sebesar Rp2.448.268.000,00, karena Ketua Tim Pembangunan Perguruan Taman Siswa Cabang Surabaya mengajukan permohonan kembali perpanjangan waktu dispensasi pembayaran kompensasi. Dengan demikian belum ada penerimaan ke rekening Kas Umum Negara, namun belum dapat diakui sebagai piutang sebesar Rp2.448.268.000,00 di LKPP 2007.

6. Laporan Keuangan Lembaga Non Struktural/Independen (LNSI)

Setelah empat kali amandemen UUD 1945, ketatanegaraan Indonesia mengalami perubahan ditandai dengan lahirnya lembaga negara independen (independent regulatory agencies) dan membengkaknya jumlah lembaga negara non struktural (executive branch agencies). Lembaga negara independen merupakan organ negara di luar cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, maupun yudikatif yang eksistensi dan fungsinya diatur dalam UUD 1945 dengan tujuan untuk saling mengawasi dan mengimbangi antar lembaga negara. Mahkamah Konstitusi, Dewan Perwakilan Daerah, Komisi Yudisial dan Komisi Pemilihan Umum merupakan contoh dari lembaga negara independen di Indonesia. Sedangkan lembaga negara non struktural merupakan bagian eksekutif (berada di bawah atau bertanggung jawab kepada presiden atau menteri), namun bukan merupakan struktur/bagian dari kementerian negara/lembaga (K/L). Eksistensi dan fungsinya diatur dalam Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, maupun Peraturan Presiden. Pembentukan lembaga negara non struktural dimaksudkan untuk membantu pemerintah menangani masalah yang belum bisa dilaksanakan dan diselesaikan oleh lembaga negara formal.

Istilah non struktural dikaitkan dengan tidak adanya hubungan organisatoris antara lembaga ini dengan K/L selain hubungan kerja meskipun pendanaannya menginduk ke K/L. Istilah tersebut secara eksplisit juga diungkap dalam peraturan perundangan yang membentuknya. Sedangkan kata "independen" atau mandiri menjadi kata tambahan untuk pembentukan lembaga tertentu dan biasanya dikaitkan dengan keterlibatan pihak-pihak diluar pemerintahan seperti praktisi, pakar, dan tokoh masyarakat dalam komposisi keanggotaan atau pengurus lembaga non struktural/independen (LNSI).

Nomenklatur lembaga tersebut bermacam-macam, ada akademi, badan, dewan, komisi, komite, konsil, korps, lembaga, otorita, dan unit kerja. Kesekretariatan LNSI biasanya berada di departemen atau instansi resmi pemerintah yang sudah ada sebelumnya, sedangkan pegawai seluruhnya berasal atau merupakan pinjaman dari K/L. Gaji pegawai sekretariat LNSI sebagai pegawai negeri sipil (PNS) tetap dibayar oleh instansi asal, sedangkan tunjangan tambahan diperoleh dari masing-masing LNSI.

Sampai dengan akhir tahun 2007, terdapat 76 LNSI (**Daftar 38**). Dari jumlah tersebut 15 lembaga dibentuk dengan Peraturan Pemerintah, 50 lembaga dibentuk dengan Keputusan Presiden, 10 lembaga dibentuk dengan Peraturan Presiden. Dalam kaitan dengan amanat

UU, masih terdapat 6 lembaga yang harus dibentuk, namun sampai sekarang belum terbentuk atau masih dalam proses pembentukan yaitu Dewan Sumber Daya Air Nasional, Dewan Hak Cipta, Dewan Pertimbangan Pembangunan Perikanan Nasional, Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dan Dewan Energi Nasional.

Dari 76 LNSI yang berhasil di inventarisasi, baru 55 LNSI yang menyediakan data/laporan keuangannya. Kecuali Badan Pengelola Komplek Kemayoran, Badan Pengelola Gelora Bung Karno dan Otorita Asahan, hampir 100 persen anggaran LNSI dibiayai dari APBN, baik langsung maupun tidak langsung, dalam arti melalui departemen yang menaungi/terkait atau melalui Bagian Anggaran (BA) 069 - Belanja Lain-lain. Selain itu, sebagian kecil LNSI memperoleh tambahan pendanaan non APBN yang berasal dari imbalan atas pelaksanaan tugas, hibah langsung dari luar negeri, atau hasil pengelolaan aset negara.

Selama tahun 2007, alokasi APBN untuk LNSI (ada beberapa lembaga yang belum menyampaikan laporan) sebesar Rp2,34 triliun dengan realisasi Rp1,97 triliun. Lima besar pengguna APBN berturut-turut Lembaga Penyiaran Publik (LPP) RRI, LPP TVRI, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas Sabang, dan Badan Pengatur Hilir Migas (BPH Migas). Sementara itu, total aset LNSI adalah sebesar Rp24,70 triliun dengan komposisi terbesar berturut-turut Badan Pengelola Gelora Bung Karno, Badan Pengelola Komplek Kemayoran, Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam, LPP RRI, LPP TVRI, BPH Migas. Ikhtisar Laporan Keuangan LNSI disajikan pada **Daftar 38**.

Berdasarkan inventarisasi terdapat 25 LNSI yang merupakan satuan kerja dari K/L, sehingga laporan keuangannya dikonsolidasikan pada laporan keuangan K/L. Namun, sebagian Laporan Keuangan LNSI tersebut belum dapat disajikan, karena belum adanya mekanisme dan peraturan yang jelas menyangkut pertanggungjawaban pelaksanaan APBN bagi LNSI.

7. Aset Eks Asing/Cina

Aset Eks Asing/Cina merupakan aset negara yang berasal dari nasionalisasi aset bekas milik asing (Belanda/Cina) atau organisasi Cina terlarang. Nasionalisasi aset asing/Cina Aset dimulai sejak tahun 1958 dengan dikeluarkannya UU Nomor 86 Tahun 1958 tentang Nasionalisasi Perusahaan-perusahaan Bekas Belanda. Berdasarkan hasil pemeriksaan BPK atas LKPP Tahun 2006, terdapat 942 buah aset eks asing/Cina yang telah lama dikuasai Negara namun belum jelas status hukumnya. Untuk menyelesaikan masalah status hukum kepemilikan aset tersebut, Pemerintah telah melakukan beberapa cara sebagai berikut:

a. disertifikatkan untuk instansi Pemerintah yang ditunjuk;
b. dilepaskan penguasaannya dari Negara kepada pihak ketiga dengan cara kompensasi kepada Pemerintah;
c. dipertukarkan kepada pihak ketiga;
d. dihibahkan; atau
e. dikembalikan kepada pemilik perorangan yang sah.

Penyelesaian masalah aset dengan cara sebagaimana tersebut pada butir a dan c, maka status hak kepemilikan menjadi atas nama Pemerintah Pusat/Daerah, sehingga aset dimaksud dengan sendirinya dicatat dan dilaporkan oleh instansi yang bersangkutan sebagai Barang Milik Negara dari perolehan lain yang sah sesuai dengan PP Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah.

Mengingat aset bekas milik asing/Cina ini sebagian besar adalah berupa sekolah negeri dan telah diserahkan kepada Pemerintah Daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah,

maka statusnya menjadi Barang Milik Daerah.

Pemerintah masih terus melakukan updating data melalui pelaksanaan inventarisasi dan penilaian ABMA/C oleh Kanwil dan KPKNL di seluruh Indonesia yang ditargetkan sampai dengan akhir tahun 2008.

Untuk mengetahui keberadaan 942 aset tersebut di atas, telah dilakukan penelitian fisik/lapangan dan dilaporkan keberadaan asetnya oleh Kanwil dan KPKNL di seluruh Indonesia sebanyak 167 aset, sementara sisanya akan dilaksanakan pada tahun 2008.

Untuk mengetahui nilainya, telah dilakukan penilaian dan baru dilaporkan nilai 67 aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai total Rp613.619.131.523,00 yang akan dilaporkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan karena belum menjadi Barang Milik Negara, sementara 100 aset lainnya yang telah diteliti namun belum dapat dinilai karena data pendukungnya kurang lengkap. Rincian Aset Eks Asing/Cina dan yang telah dilakukan penilaian dapat dilihat pada **Daftar 39.**

Terhadap aset Eks Cina yang dikuasai oleh Yayasan Trisakti/Universitas Trisakti seluas 71.503 meter persegi, statusnya masih dalam proses hukum Saat ini sedang dipersiapkan upaya hukum berupa gugatan kepada Yayasan/Universitas Trisakti sesuai rekomendasi.

8. Aset Bersejarah (Heritage Assets)

Aset Bersejarah pada kementerian negara/lembaga antara lain:

- Departemen Perhubungan berupa Tugu Peringatan.
- Departemen Luar Negeri, berupa aset dari Museum Konferensi Asia Afrika (KAA) Bandung sebanyak 67 unit dan aset yang berada pada Gedung Pancasila yang pengelolaannya berada pada Sekretariat Jenderal sebanyak 524 buah.
- Arsip Nasional Republik Indonesia berupa arsip/dokumen negara yang terdiri atas:
  - Arsip Kertas sebanyak 27.247 km linier
  - Arsip Film sebanyak 70.054 reel
  - Arsip Video sebanyak 30.000 buah
  - Arsip Rekaman Suara sebanyak 30.000 kaset,
  - Arsip Foto dan Arsip VCD sebanyak 29 buah.
- Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia, berupa tumbuhan langka yang terdapat pada Pusat Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Bogor, Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Cibodas, Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Purwodadi, dan Balai Konservasi Tumbuhan Kebun Raya Eka Karya Bali.

9. Kewajiban Kontinjensi

- **Jaminan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunanakan Batu Bara**

  Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara, Pemerintah wajib memberikan jaminan terhadap pembayaran kewajiban PT Perusahaan Listrik Negara (PLN) kepada kreditur yang menyediakan pendanaan kredit ekspor untuk pembangunan pembangkit listrik yang menggunakan batubara. Pemberian jaminan tersebut didasari oleh terbitnya Peraturan Presiden

Nomor 71 Tahun 2006 tentang Penugasan Kepada PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) untuk Melakukan Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 146/PMK.01/2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Percepatan Pembangunan Pembangkit Tenaga Listrik yang Menggunakan Batubara, jaminan Pemerintah diberikan dalam hal PT PLN (Persero) tidak mampu membayar kewajibannya sebagai akibat dari kebijakan Pemerintah. Kebijakan Pemerintah tersebut adalah:

a. Kebijakan harga jual tenaga listrik;
b. Kebijakan subsidi listrik dalam rangka kompensasi fungsi kemanfaatan umum;
c. Kebijakan yang mempengaruhi pasokan clan harga batubara; dan
d. Kebijakan yang menghentikan atau menunda pelaksanaan pembangunan proyek yang telah berjalan, yang mengakibatkan PLN tidak mampu membayar kewajibannya

yang mengakibatkan PT PLN tidak mampu membayar kewajibannya.

Pemenuhan kewajiban pembayaran utang PLN dengan Jaminan Pemerintah dilakukan sebagai langkah terakhir (last resort), setelah terlebih dahulu PLN menggunakan secara maksimal sumber arus kas perusahaan untuk menutup kewajibannya kepada kreditur. Pemenuhan kewajiban jaminan Pemerintah tersebut dilaksanakan melalui mekanisme APBN.

Jumlah proyek pembangkit tenaga listrik yang akan dibangun adalah sebanyak 80 unit yang tersebar di Pulau Jawa dan luar Jawa.

- **Jaminan Pembangunan Proyek Monorail Jakarta**

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 103 Tahun 2006 tentang Pemberian Jaminan Pemerintah untuk Pembangunan Proyek Monorail Jakarta yang ditetapkan tanggal 13 Desember 2006, Pemerintah memberikan jaminan melalui mekanisme APBN terhadap pembangunan Proyek Monorail Jakarta yang dilakukan Pemerintah Provinsi DKI Jakarta melalui kerja sama dengan Badan Usaha. Jaminan diberikan sebesar 50% dari shortfall atas batas penumpang minimum sebanyak 160.000 (seratus enam puluh ribu) penumpang per hari atau 50% dari nilai maksimum sebesar USD22,500,000.00 (dua puluh dua juta lima ratus ribu dolar Amerika) pertahun selama lima tahun.

10. Program Pensiun dan Tabungan Hari Tua Pegawai Negeri

Program Pensiun PNS diselenggarakan berdasarkan UU Nomor 11 Tahun 1969 tentang Pensiun Pegawai dan Pensiun Janda/Duda Pegawai. Dana Pensiun dibentuk berdasarkan kontribusi Pemerintah, sebagai pemberi kerja, dan PNS, sebagai peserta. Namun demikian, selama ini untuk penyelenggaraan program pensiun dan program Tabungan Hari Tua (THT), iuran hanya disetor oleh peserta masing-masing sebesar 4,75% dan 3,25% dari gaji pokok. Pemerintah selaku pemberi kerja belum mengiur.

Pemerintah menganut sistem pembayaran secara *current cost financing* yaitu pembayaran pensiun dipenuhi secara langsung oleh pemerintah melalui APBN pada saat pegawai memasuki masa pensiun dengan sistem *sharing* dengan Dana Pensiun. Pada APBN TA 2007 sharing Pemerintah adalah sebesar 85,5%, sedangkan Dana pensiun membayar sebesar 14,5% sisanya. Dana pensiun yang telah digunakan untuk sharing Pembayaran Manfaat Pensiun sejak tahun 1994 sampai dengan 2006 sebesar Rp30,16 triliun.

Sistem pembayaran sebagaimana tersebut di atas mengakibatkan kekurangan pendanaan penyelenggaraan program pensiun dan THT (*past service liabilities*). Berdasarkan Hasil Valuasi Aktuaria Independen per 31 Desember 2003 terdapat defisit kewajiban Aktuaria Program Dana Pensiun sebesar Rp365,47 triliun sebagai akibat kekurangan pendanaan pemerintah pada Dana Pensiun. Jumlah tersebut dihitung berdasarkan seluruh PNS, termasuk Veteran, TNI dan Polri (yang telah menjalani masa pensiun sampai dengan 31 Maret 1989), serta pejabat negara.

Sejak 1 April 1989, pembayaran pensiun TNI dan Polri dikelola oleh PT Asabri (Persero). Berdasarkan hasil perhitungan aktuaria yang dilakukan oleh konsultan PT Binaputera Jaga Hikmah per 25 April 2007 menunjukkan bahwa *past service liabilities* (gabungan program pensiun dan beras) pada PT Asabri (Persero) per 31 Desember 2006 adalah sebesar Rp70,22 triliun.

Berdasarkan penjelasan di atas, total saldo *past service liabilities* untuk seluruh pensiun PNS, Veteran, TNI dan Polri adalah sebesar Rp435,69 triliun. Saldo *past service liabilities* ini belum disajikan sebagai kewajiban dalam LKPP Tahun 2007.

11. Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga

Sejak awal reformasi, Pemerintah telah melakukan inisiatif dalam upaya penertiban rekening-rekening nonbudgeter dengan menerbitkan Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 9 Tahun 1999 dan Inpres Nomor 4 Tahun 2000 tentang Penertiban Rekening Departemen/Lembaga Pemerintah Non Departemen yang merupakan penegasan dari Inpres Nomor 9 Tahun 1999.

Dalam rangka mewujudkan akuntabilitas dan transparansi keuangan negara serta untuk memenuhi amanat undang-undang yang menjadi landasan bagi reformasi pengelolaan keuangan negara, Pemerintah telah menyajikan LKPP sejak tahun 2004. Dalam LKPP tersebut telah diungkapkan saldo kas pemerintah, termasuk kas di Bendahara Umum Negara (BUN) tahun 2004 sebesar Rp52.307.558.814.276, tahun 2005 sebesar Rp46.187.299.854.447, dan tahun 2006 sebesar Rp38.192.834.699.360.

Berdasarkan pemeriksaan BPK tahun 2004 s.d. 2006, ditemukan sebanyak 4.643 rekening pemerintah di seluruh K/L dengan nilai Rp32.351.337.621.689 yang tidak dilaporkan pada LKPP maupun Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga (LKKL).

Sebagai tindak lanjut atas temuan tersebut dan sesuai dengan Pasal 22 Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara berwenang mengatur dan menyelenggarakan rekening pemerintah, dengan melakukan langkah-langkah penertiban rekening pemerintah pada seluruh instansi kementerian negara/lembaga melalui tiga Peraturan Menteri Keuangan:

- PMK Nomor: 57/PMK.05/2007 tentang Pengelolaan Rekening Milik Kementerian Negara /Lembaga/Kantor/Satuan Kerja;
- PMK Nomor: 58/PMK.05/2007 tentang Penertiban Rekening Pemerintah pada Kementerian Negara/Lembaga;
- PMK Nomor: 67/PMK.05/2007 tentang Pengenaan Sanksi Dalam Rangka Pengelolaan dan Penertiban Rekening Pemerintah Pada Kementerian Negara/ Lembaga/Kantor/Satuan Kerja.

Dari hasil penelitian terhadap seluruh rekening temuan BPK, ditemukan adanya duplikasi temuan dan penambahan/pengurangan, sehingga rekening temuan BPK menjadi 5.197 rekening dengan nilai Rp36,02 triliun.

Pendataan/inventarisasi yang dilakukan oleh Tim Penertiban, mencakup rekening yang sudah atau yang belum dilaporkan dalam LKPP dan LKKL selama ini, dan yang dilaporkan sebagai temuan audit BPK maupun yang non-temuan BPK. Dari hasil inventarisasi rekening pada K/L, sampai dengan tanggal 31 Desember 2007 menunjukkan adanya 32.876 rekening.

Terhadap hasil inventarisasi, telah dilakukan pembahasan dan penetapan status rekening oleh Tim Penertiban Rekening Pemerintah bersama dengan K/L, dimana hasil pembahasan terdata sebanyak 32.570 rekening dengan nilai Rp36.755.489.989.392, US$685.736.071, dan Euro 462.398 dengan rincian sebagai berikut:

No.	Keterangan	Rek.	Nilai
1.	Disetujui untuk digunakan secara permanen/sementara	26.553	Rp19.252.040.159.552 US$679.490.459 Euro 462.398
2.	Sudah ditutup	2.086	Rp7.275.194.016.020 US$ 5.854.163
3.	Tidak terselesaikan pembahasannya	3.931	Rp10.228.255.813.820 US$391.449

Dari tabel tersebut, terdapat rekening yang direkomendasikan ditutup oleh Menteri Keuangan sejumlah 4.785 rekening dengan nilai Rp10.322.719.739.922 dan US$6.865.873 dan rekening yang memerlukan investigasi sejumlah 3.061 rekening dan senilai Rp1.845.474.390.527 dan US$12.292.024.

Dari proses pembahasan secara keseluruhan, dapat dikelompokkan K/L dalam melaksanakan pembahasan rekening sampai dengan 31 Desember 2007 adalah sebagai berikut:

- 55 K/L: Pembahasan selesai berdasarkan data rekening yang tersedia
- 19 K/L : Pembahasan tidak selesai
- 1 K/L : Pembahasan tidak terlaksana (Mahkamah Agung)

12. Unit Bisnis di Lingkungan TNI

Sesuai pasal 76 UU Nomor 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia yang disyahkan tanggal 16 Oktober 2004, dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sejak berlakunya undang-undang ini pemerintah harus mengambil alih seluruh aktivitas bisnis yang dimiliki dan dikelola oleh TNI, baik secara langsung maupun tidak langsung. Tata cara dan ketentuan lebih lanjut mengenai pelaksanaannya diatur dengan keputusan presiden. Keputusan pengalihan tersebut untuk mengambalikan jati diri TNI sebagai tentara profesional yaitu tentara yang terlatih, terdidik, diperlengkapi secara baik, tidak berpolitik praktis, tidak berbisnis, dan dijamin kesejahteraannya, serta mengikuti kebijakan politik negara yang menganut prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan hukum internasional yang telah diratifikasi.

Sebagai tindak lanjut ketentuan UU tersebut, Menteri Pertahanan atas nama pemerintah mengeluarkan Keputusan Menteri Pertahanan Nomor: SKEP/985/M/XI/2005 berkaitan dengan pembentukan Tim Supervisi Transformasi Bisnis TNI (TSTB). Tim Supervisi bertugas memverifikasi kelayakan seluruh unit bisnis di lingkungan TNI dan melakukan koordinasi dan kerjasama dengan pihak/instansi terkait. Selama masa kerja tahun 2005-2007, tim telah melakukan inventarisasi seluruh unit bisnis di Departemen Pertahanan dan di lingkungan TNI dengan mempertimbangkan berbagai aspek; hukum, status dan perkiraan nilai aset serta organisasi pengelolaannya.

Berdasarkan hasil inventarisasi, aktivitas bisnis di lingkungan TNI menggunakan 2 (dua)

bentuk badan hukum yaitu koperasi dan yayasan. Rinciannya sebagai berikut:

No.	Badan Hukum	Jumlah	Jumlah Unit Bisnis	Total Nilai Aset (Rp)
1.	Koperasi	1912	605	350.000.000.000
2.	Yayasan	25	893	650.000.000.000
	Total	1937	1498	1.000.000.000.000

Nilai aset per koperasi bervariasi antara Rp4 juta hingga Rp90 miliar, sedangkan nilai aset per yayasan bervariasi antara Rp2 juta hingga Rp165 miliar. Dari total unit bisnis di lingkungan TNI sebanyak 1498 unit tersebut, hanya 6 - 7 unit yang memenuhi syarat korporasi sesuai ketentuan BUMN.

Berdasarkan pertimbangan terbatasnya anggaran negara untuk mengambil alih seluruh unit bisnis di lingkungan TNI, koperasi dan yayasan di atas tetap dipertahankan dengan persyaratan tidak lagi mengembangkan unit bisnis yang berorientasi profit semata kecuali untuk memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan prajurit. Anggota TNI tidak boleh menjadi pengurus koperasi dan yayasan, kecuali istri dan keluarga prajurit sesuai UU tentang Koperasi dan UU tentang Yayasan. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 39 UU No. 34/2004 bahwa prajurit antara lain dilarang terlibat dalam kegiatan bisnis. Koperasi dan yayasan yang berada di lingkungan TNI tidak lagi memiliki kaitan struktural dengan institusi TNI.

Hasil inventarisasi tim tersebut masih perlu dikaji lebih mendalam karena permasalahan yang dihadapi aktivitas unit bisnis di lingkungan TNI memerlukan penanganan komprehensif melalui mekanisme dan payung hukum yang jelas untuk menghasilkan rekomendasi kebijakan yang tepat sesuai amanat UU No. 34/2004 yang memberi tenggat waktu pengalihan sampai tanggal 16 Oktober 2009. Tugas tersebut akan dilanjutkan oleh Tim Nasional Pengalihan Bisnis TNI yang konsep peraturan presiden tentang pembentukannya telah disampaikan kepada presiden menunggu diterbitkan.

C.4. KEJADIAN PENTING SETELAH TANGGAL PELAPORAN

1. **Penyempurnaan Bagan Akun Standar (BAS)**

   Untuk memenuhi kebutuhan organisasi kementerian negara/lembaga agar penyusunan laporan keuangan dapat memenuhi unsur pengendalian, pengukuran, dan pelaporan kinerja, Menteri Keuangan menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar (BAS) sebagai penganti PMK No.13/PMK.06/2005 tentang Bagan Perkiraan Standar. PMK No. 91/PMK.05/2007 tersebut digunakan sebagai pedoman yang dilaksanakan oleh setiap kementerian negara/lembaga untuk penyusunan dan penelaahan Rencana Kerja dan Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA-KL), Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA), dan pelaporan keuangan dalam rangka penyusunan laporan keuangan kementerian negara/lembaga dan LKPP mulai Tahun Anggaran 2008.

   BAS yang baru tersebut telah mengakomodasi beberapa transaksi yang sebelumnya tidak terdapat perkiraan/akunnya. Selain itu, BAS yang baru tersebut juga memuat penjelasan atas setiap akun yang ada, sehingga memudahkan dalam penyusunan anggaran, pelaksanaan anggaran, dan pelaporan keuangan.

2. Penyempurnaan Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP)

Dalam rangka penyempurnaan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara (BUN) telah menerbitkan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 171/PMK.05/2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat. PMK tersebut dimaksudkan sebagai pengganti PMK Nomor 59/PMK.06/2005.

PMK Nomor 171/PMK.05/2007 ini digunakan untuk penyusunan laporan keuangan mulai tahun 2008. Hal baru yang diatur dalam PMK ini adalah adanya Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN) yang merupakan subsistem dari Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP). Kerangka Umum SAPP disajikan pada diagram berikut:

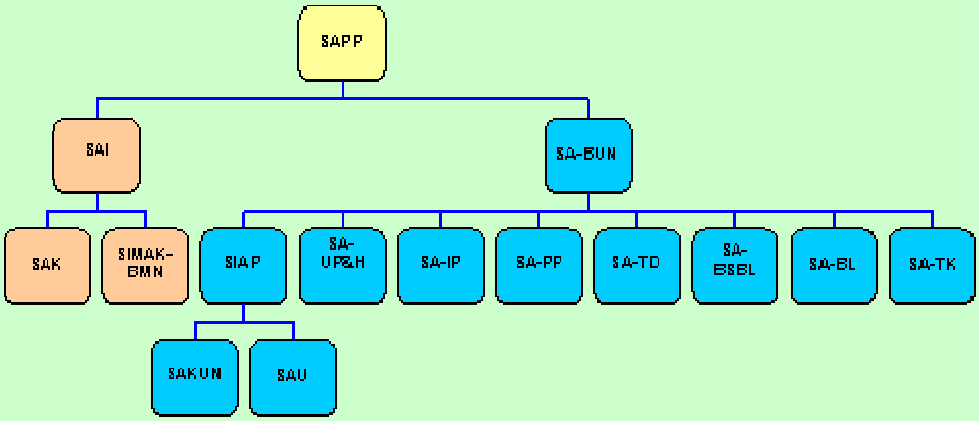

Keterangan:

Sistem Akuntansi Pemerintah Pusat (SAPP) terdiri dari:

A. Sistem Akuntansi Bendahara Umum Negara (SA-BUN)

SA-BUN dilaksanakan oleh Menteri Keuangan selaku BUN dan Pengguna Anggaran Bagian Anggaran Pembiayaan dan Perhitungan (BAPP). SA-BUN terdiri dari beberapa subsistem, yaitu:

1. Sistem Akuntansi Pusat (SiAP), terdiri dari:
   a. Sistem Akuntansi Kas Umum Negara (SAKUN);
   b. Sistem Akuntansi Umum (SAU).
2. Sistem Akuntansi Utang Pemerintah dan Hibah (SA-UP&H);
3. Sistem Akuntansi Investasi Pemerintah (SA-IP);
4. Sistem Akuntansi Penerusan Pinjaman (SA-PP);
5. Sistem Akuntansi Transfer ke Daerah (SA-TD);
6. Sistem Akuntansi Belanja Subsidi dan Belanja Lain-lain (SA-BSBL);
7. Sistem Akuntansi Transaksi Khusus (SA-TK);
8. Sistem Akuntansi Badan Lainnya (SA-BL).

SA-BUN menghasilkan Laporan Keuangan Bendahara Umum Negara. Dalam pelaksanaan SA-BUN, Menteri Keuangan selaku Bendahara Umum Negara membentuk Unit Akuntansi Bendahara Umum Negara (UABUN) yang terdiri dari:

a. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara–Akuntansi Pusat-dilaksanakan oleh:
   1. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) sebagai Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Daerah.
   2. Direktorat Pengelolaan Kas Negara (DPKN) sebagai-Unit Akuntansi Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKBUN) Pusat .
   3. Kanwil sebagai Unit Akuntansi Koordinator Kuasa Bendahara Umum Negara (UAKKBUN).
   4. Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (DAPK) sebagai Unit Akuntansi Pembantu BUN.
b. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara–Penerusan Pinjaman dilaksanakan oleh- Direktorat Jenderal Perbendaharaan dan Direktorat jenderal Perimbangan Keuangan;
c. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara–Investasi Pemerintah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Kekayaan Negara ;
d. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara –Utang/Hibah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Pengelolaan Utang (UAPBUN-DJPU);
e. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-BAPP dan PNBP Khusus dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Anggaran (UAPBUN-DJA);
f. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-Transfer ke Daerah dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (UAPBUN-DJPK);
g. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-Transaksi Lainnya;
h. Unit Akuntansi Pembantu Bendahara Umum Negara-Badan Lainnya dilaksanakan oleh Direktorat Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (UAPBUN- BL).

B. Sistem Akuntansi Instansi (SAI)

Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dilaksanakan oleh kementerian negara/lembaga yang memproses transaksi keuangan baik arus uang maupun barang. SAI terdiri dari Sistem Akuntansi Keuangan (SAK) dan Sistem Informasi Manajemen dan Akuntansi Barang Milik Negara (SIMAK-BMN).

SAK terdiri dari:

a. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Anggaran (SA-UAKPA);
b. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Wilayah (SA-UAPPA-W);
c. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Anggaran Eselon I (SA-UAPPA-E1); dan
d. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Anggaran (SA-UAPA).

SIMAK-BMN terdiri dari:

a. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Kuasa Pengguna Barang (SA-UAKPB);
b. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Wilayah (SA-UAPPB-W);
c. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pembantu Pengguna Barang Eselon I (SA-UAPPB-E1); dan
d. Sistem Akuntansi tingkat Unit Akuntansi Pengguna Barang (SA-UAPB).

D. PENJELASAN ATAS POS-POS LAPORAN ARUS KAS

D.1. IKHTISAR LAPORAN ARUS KAS

SALDO AWAL KAS

Saldo Awal Kas per 1 Januari 2007 sebesar 25,42 triliun

Saldo Awal Kas KPPN dan BUN per 1 Januari 2007 yang telah dikoreksi adalah sebesar Rp25.457.712.850.126. Saldo tersebut merupakan saldo Akhir Kas KPPN dan BUN per 31 Desember 2006 sebesar Rp21.548.929.469.290 ditambah dengan koreksi sebesar Rp3.908.783.380.836. Rincian Saldo Awal Kas KPPN dan BUN adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Saldo Awal Kas KKPN dan BUN Sebelum Koreksi:		
Kas di BI dalam Rupiah	954.310.836.789	100.485.809.688
Kas di KPPN	20.594.618.632.501	17.956.484.012.457
Jumlah	**21.548.929.469.290**	**18.056.969.822.145**
Koreksi Penambahan:		
Kas di BI dalam Valas USD *)	3.806.594.579.799	-
Saldo Kas BLU pada KPPN **)	102.188.801.037	-
Total Koreksi	**3.908.783.380.836**	**-**
Saldo Awal Kas KKPN dan BUN Setelah Koreksi	**25.457.712.850.126**	**18.056.969.822.145**

Keterangan:

*) Rekening Valuta Asing dalam bentuk USD tersebut sebelumnya diklasifikasikan sebagai rekening pemerintah lainnya. Mulai tahun anggaran 2007, rekening ini digunakan untuk kegiatan operasional BUN

**) Berupa saldo kas BLU pada KPPN

PERUBAHAN KAS

Penurunan Kas pada TA 2007 sebesar Rp1,4 triliun

Kenaikan (penurunan) kas dari berbagai aktivitas pemerintah sepanjang TA 2007 dan TA 2006 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Operasi	14.455.123.039.723	26.111.116.187.908
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan	(64.298.947.625.676)	(55.252.792.746.094)
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Pembiayaan	42.456.535.817.769	29.415.590.251.868
Kenaikan (Penurunan) Aktivitas Non Anggaran	5.991.990.918.114	3.218.045.953.463
Kenaikan (Penurunan) Kas	**(1.395.297.850.070)**	**3.491.959.647.145**

Komposisi Arus Kas Bersih dari tiap aktivitas disajikan dalam Grafik 31.

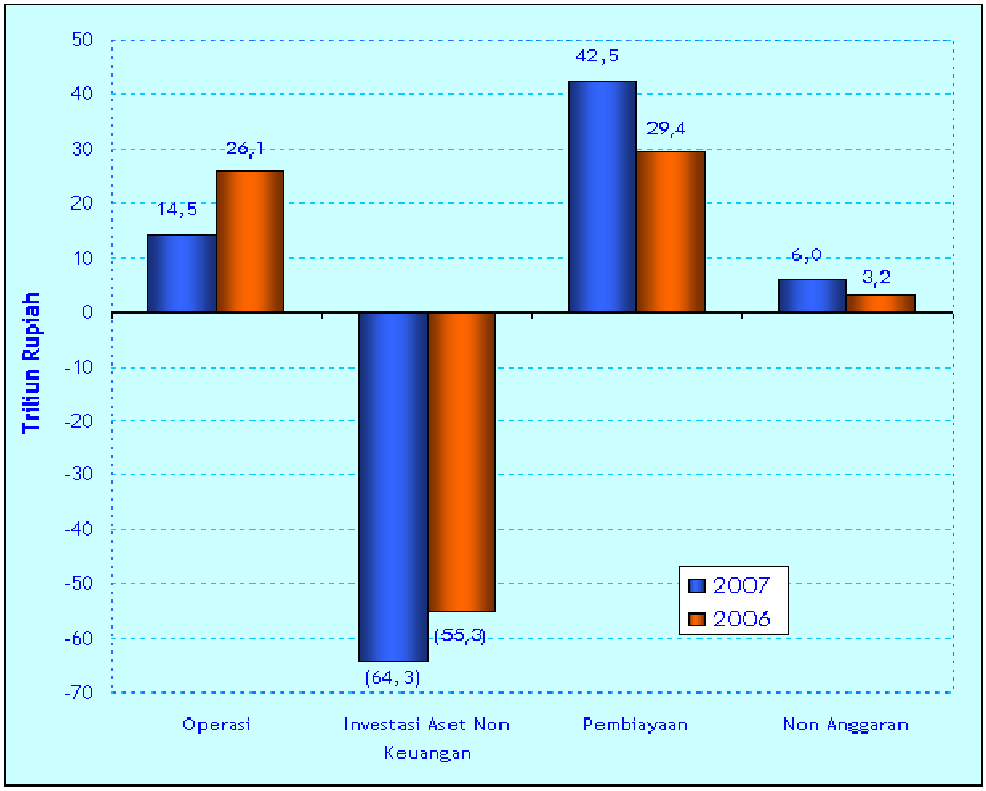

Grafik 31: Komposisi Arus Kas Bersih per Aktivitas

SALDO AKHIR KAS DAN BANK

Saldo Akhir Kas per 31 Desember 2007 sebesar 29,43 triliun

Saldo Akhir Kas dan Bank per 31 Desember 2007 sebesar Rp29.434.099.501.747 merupakan kas Pemerintah Pusat yang tersedia dan siap digunakan untuk membiayai aktivitas Pemerintah tahun berikutnya, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Kas BUN, KPPN & BLU *)	**24.062.415.000.055**	**21.548.929.469.290**
Kas di Bendahara Pengeluaran	1.245.221.273.097	1.457.362.551.679
Kas di Bendahara Penerimaan	878.054.836.115	429.489.122.788
Rekening Pemerintah Lainnya pada BI	3.248.408.392.480	12.331.109.271.481
Kas pada BRR NAD-Nias	-	2.425.944.284.122
Jumlah Saldo Akhir Kas	**29.434.099.501.747**	**38.192.834.699.360**

*) Terdiri dari:

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Rekening Kas BUN di BI	18.170.046.148.742	954.310.836.789
Rekening Kas di KPPN	5.492.896.654.079	20.594.618.632.501
Kas di BLU **)	399.472.197.234	-
Jumlah Saldo Akhir Kas	**24.062.415.000.055**	**21.548.929.469.290**

**) Saldo Kas BLU tersebut berdasarkan selisih antara Pendapatan Operasional BLU dengan Belanja Operasional BLU. Sementara itu, saldo Kas BLU di Neraca yang dihitung berdasarkan

konsolidasian Neraca BLU pada Neraca kementerian negara/lembaga adalah sebesar Rp444.767.605.022, sehingga terjadi perbedaan sebesar Rp45.295.407.788 (Rp444.767.605.022 dikurangi Rp399.472.197.234). Perbedaan tersebut disebabkan antara lain oleh penggunaan mata anggaran pendapatan dan belanja yang tidak tepat dalam SPM Pengesahan atas Pendapatan dan Belanja Operasional BLU.

D.2. PENJELASAN PER POS LAPORAN ARUS KAS

Penjelasan atas Laporan Arus Kas Pemerintah Pusat TA 2007 diuraikan sebagai berikut:

ARUS KAS DARI AKTIVITAS OPERASI

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp14,46 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Operasi menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode yang berakhir 31 Desember 2007. Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi adalah sebesar Rp14.455.123.039.723, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Arus Kas Masuk	707.723.894.555.889	637.951.524.607.839
Dikurangi Arus Kas Keluar	(693.268.771.516.166)	(611.840.408.419.931)
Arus Kas Bersih	**14.455.123.039.723**	**26.111.116.187.908**

Terdapat penurunan Arus Kas Bersih pada tahun 2007 dibanding tahun 2006. Penurunan ini disebabkan kenaikan Arus Kas Keluar lebih tinggi dibandingkan dengan kenaikan Arus Kas Masuk. Penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi TA 2007 sebesar Rp11.655.993.148.185 atau 44,64 persen dibandingkan dengan TA 2006.. Walaupun terjadi penurunan Arus Kas Bersih dari Aktivitas Operasi, dalam TA 2007 Pemerintah dapat mendanai seluruh aktivitas operasi dari penerimaan operasinya.

D.2.1. Penerimaan Perpajakan

Penerimaan Perpajakan (Neto) Rp490,99 triliun

Penerimaan Perpajakan pada TA 2007 sebesar Rp490.988.634.954.090 terdiri dari Penerimaan Pajak sebesar Rp429.609.728.039.897 dan Penerimaan Bea dan Cukai sebesar Rp61.378.906.914.193. Penerimaan Perpajakan ini merupakan penerimaan Pemerintah yang dihimpun dari sektor perpajakan sepanjang TA 2007 setelah dikurangi pengembalian pendapatan perpajakan. Rincian Penerimaan Perpajakan TA 2007 dan 2006 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Pajak Penghasilan	250.413.168.210.158	214.250.525.953.279
PPN & PPnBM	178.805.172.457.182	136.706.459.099.409
PBB	23.728.679.283.676	20.861.277.893.027
BPHTB	5.957.945.839.713	3.193.068.860.495
Pajak Ekspor	4.237.376.161.875	1.905.645.003.419
Pajak Lainnya	2.739.775.823.131	2.297.709.567.757
Total Penerimaan Pajak	**465.882.117.775.735**	**379.214.686.377.386**
Dikurangi:		
Pengembalian Pajak	(36.272.389.735.838)	(19.924.201.484.677)
Jumlah Penerimaan Pajak	**429.609.728.039.897**	**359.290.484.892.709**
Bea Masuk	16.975.871.449.123	12.291.353.126.465

Cukai	44.696.230.626.968	37.774.252.517.288
Total Penerimaan Bea dan Cukai	**61.672.102.076.091**	**50.065.605.643.753**
Dikurangi:		
Pengembalian Bea dan Cukai	(293.195.161.898)	(153.071.201.012)
Jumlah Penerimaan Bea & Cukai	**61.378.906.914.193**	**49.912.534.442.741**
Penerimaan Perpajakan (Neto)	**490.988.634.954.090**	**409.203.019.335.450**

Penerimaan Perpajakan dalam TA 2007 lebih besar Rp81.785.615.618.640 atau 19,99 persen dari TA 2006.

Rincian Penerimaan Perpajakan adalah sebagai berikut:

a. Pajak Penghasilan

Penerimaan Pajak Penghasilan (PPh) pada TA 2007 adalah sebesar Rp238.430.926.067.905 yang berasal dari Pajak Penghasilan Migas dan Non Migas. Rincian penerimaan kas dari PPh pada TA 2007 dan TA 2006 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	**TA 2007 (*Audited*)**	**TA 2006 (*Audited*)**
PPh Migas		
PPh Minyak Bumi	18.233.128.691.331	14.672.114.385.638
PPh Gas Alam	29.711.585.424.387	28.518.465.410.268
PPh Lainnya Minyak Bumi	1.156.372.114	0
PPh Migas Lainnya	446.641.566.073	1.642.213
Jumlah PPh Migas	**48.392.512.053.905**	**43.190.581.438.119**
PPh Non Migas		
PPh Pasal 21	39.504.482.735.492	31.595.456.838.521
PPh Pasal 22	4.000.102.774.032	4.044.915.661.838
PPh Pasal 22 Impor	16.688.263.750.452	13.141.071.473.170
PPh Pasal 23	15.901.700.733.454	15.413.382.073.929
PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	1.659.434.419.099	1.815.312.667.864
PPh Pasal 25/29 Badan	87.467.097.711.328	70.252.110.173.705
PPh Pasal 26	14.768.409.116.907	10.619.311.072.749
PPh Final dan Fiskal LN	22.015.567.223.401	24.136.181.439.872
PPh Non Migas Lainnya	15.597.692.088	42.203.113.512
Jumlah PPh Non Migas	**202.020.656.156.253**	**171.059.944.515.160**
Dikurangi:		
Pengembalian PPh	(11.982.242.142.253)	(5.417.400.300.438)
Jumlah Pajak Penghasilan	**238.430.926.067.905**	**208.833.125.652.841**

Penerimaan Pajak Penghasilan pada TA 2007 lebih besar Rp29.597.800.415.064 atau 14,17 persen dari penerimaan TA 2006.

b. Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah (PPN & PPnBM) untuk TA 2007 adalah sebesar Rp154.526.773.832.995. Rincian Penerimaan PPN & PPnBM adalah sebagai berikut:

Uraian	**TA 2007 (*Audited*)**	**TA 2006 (*Audited*)**
PPN dan PPnBM Dalam Negeri	122.062.064.302.325	91.537.634.194.759
PPN dan PPnBM Impor	56.430.135.196.508	44.847.792.419.723
PPN dan PPnBM lainnya	312.972.958.349	321.032.484.927
Jumlah PPN dan PPnBM	**178.805.172.457.182**	**136.706.459.099.409**

Dikurangi:		
Pengembalian PPN dan PPnBM	(24.278.398.624.187)	(13.670.599.530.698)
Jumlah PPN dan PPnBM (Neto)	**154.526.773.832.995**	**123.035.859.568.711**

Penerimaan Pajak Pertambahan Nilai dan Penjualan Barang Mewah pada TA 2007 lebih besar Rp31.490.914.264.284 atau 25,59 persen dari TA 2006.

c. Pajak Bumi dan Bangunan

Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) pada TA 2007 adalah sebesar Rp23.723.546.008.858. Rincian dari Penerimaan PBB tersebut adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
PBB Pedesaan	1.727.169.049.449	5.787.460.066.156
PBB Perkotaan	4.868.593.432.893	3.800.764.640.362
PBB Perkebunan	403.292.135.569	151.655.887.690
PBB Kehutanan	127.468.299.103	81.311.495.840
PBB Pertambangan	16.572.300.701.292	10.520.745.453.335
PBB Lainnya	29.855.665.370	519.340.349.644
Jumlah	**23.728.679.283.676**	**20.861.277.893.027**
Dikurangi:		
Pengembalian PBB	(5.133.274.818)	(2.760.986.844)
Jumlah (Neto)	**23.723.546.008.858**	**20.858.516.906.183**

Penerimaan PBB pada TA 2007 lebih besar Rp2.865.029.102.675 atau 13,74 persen dari TA 2006.

d. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)

Penerimaan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada TA 2007 adalah sebesar Rp5.953.378.541.995 atau lebih besar Rp2.768.908.661.746 atau 86,95 persen dari penerimaan BPHTB TA 2006 sebesar Rp3.184.469.880.249.

e. Cukai

Penerimaan Cukai pada TA 2007 adalah sebesar Rp44.679.463.855.018. Rincian Penerimaan Cukai adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Cukai Hasil Tembakau	43.541.627.850.271	37.061.549.022.786
Cukai Ethyl Alkohol	433.974.666.059	136.058.679.320
Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol	687.911.073.062	568.055.790.971
Denda Administrasi Cukai	4.835.506.974	2.133.207.339
Cukai Lainnya	27.881.530.602	6.455.816.872
Jumlah	**44.696.230.626.968**	**37.774.252.517.288**
Dikurangi:		
Pengembalian Cukai	(16.766.771.950)	(2.119.629.974)
Jumlah Penerimaan Cukai (Neto)	**44.679.463.855.018**	**37.772.132.887.314**

Penerimaan Cukai pada TA 2007 lebih besar Rp6.907.330.967.704 atau 18,29 persen dari Penerimaan Cukai TA 2006.

f. Bea Masuk

Penerimaan Bea Masuk pada TA 2007 adalah sebesar Rp16.699.443.059.175. Rincian Penerimaan Bea Masuk tersebut adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Bea Masuk	16.560.490.916.251	11.946.641.435.594
Bea Masuk ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)	901.538.344	1.914.331.502
Pendapatan Denda Administrasi Pabean	398.657.823.592	312.924.219.457
Bea Masuk dalam rangka KITE	1.422.585	170.447
Pabean Lainnya	15.819.748.351	29.872.969.465
Jumlah Bea Masuk	**16.975.871.449.123**	**12.291.353.126.465**
Dikurangi:		
Pengembalian Bea Masuk	(276.428.389.948)	(150.951.571.038)
Jumlah Bea Masuk (Neto)	**16.699.443.059.175**	**12.140.401.555.427**

Penerimaan Bea Masuk pada TA 2007 lebih besar Rp4.559.041.503.748 atau 37,55 persen dari Penerimaan Bea Masuk TA 2006.

g. Pajak Ekspor

Penerimaan Pajak Ekspor pada TA 2007 adalah sebesar Rp4.237.376.161.875, yang berarti lebih besar Rp3.146.294.011.864 atau 288,36 persen dari penerimaan TA 2006 sebesar Rp1.091.082.150.011.

h. Pajak Lainnya

Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2007 adalah sebesar Rp2.737.727.426.269. Rincian Penerimaan Pajak Lainnya adalah sebagai berikut:

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Penjualan Benda dan Bea Materai	2.602.142.334.726	2.221.439.005.338
Pajak Tidak Langsung	17.886.106.753	8.367.664.182
Bunga Penagihan Pajak:		
- Bunga Penagihan PPh	85.619.294.729	43.093.548.491
- Bunga Penagihan PPN	33.436.603.360	24.789.103.440
- Bunga Penagihan PPnBM	386.049.001	1.049.202
- Bunga Penagihan PTLL	305.434.562	19.197.104
Jumlah Bunga Penagihan Pajak	**119.747.381.652**	**67.902.898.237**
Dikurangi:		
Pengembalian Pajak Lainnya	(2.048.396.862)	(10.278.833.043)
Jumlah Pajak Lainnya (Neto)	**2.737.727.426.269**	**2.287.430.734.714**

Penerimaan Pajak Lainnya pada TA 2007 lebih besar Rp450.296.691.555 atau 19,69 persen dari TA 2006.

D.2.2. Penerimaan Negara Bukan Pajak

PNBP sebesar Rp215,04 triliun

Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada TA 2007 adalah sebesar Rp215.037.511.662.296, atau lebih kecil Rp11.876.942.824.358 atau 5,23 persen dari TA 2006 sebesar Rp226.914.454.486.654.

PNBP tersebut berasal dari semua penerimaan yang diterima negara dalam bentuk penerimaan dari sumber daya alam, bagian pemerintah atas laba BUMN dan PNBP Lainnya dikurangi dengan pengembalian PNBP.

Rincian atas penerimaan negara bukan pajak adalah sebagai berikut:

a. Penerimaan Sumber Daya Alam

Penerimaan Sumber Daya Alam (SDA) pada TA 2007 adalah sebesar Rp132.892.588.952.859. Penerimaan ini merupakan penerimaan negara yang berhubungan dengan kegiatan eksploitasi SDA, yang terdiri dari:

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Pendapatan Minyak Bumi	93.604.467.046.203	125.145.403.396.875
Pendapatan Gas Alam	34.894.736.001.498	32.940.684.187.448
Pendapatan Pertambangan Umum	5.877.885.712.092	6.781.369.889.324
Pendapatan Kehutanan	2.114.817.178.445	2.409.692.930.813
Pendapatan Perikanan	116.259.535.371	196.882.873.358
Jumlah Penerimaan SDA	**136.608.165.473.609**	**167.474.033.277.818**
Dikurangi:		
Pengembalian Pendapatan SDA	(3.715.576.520.750)	(232.332.500)
Jumlah Penerimaan SDA (Neto)	**132.892.588.952.859**	**167.473.800.945.318**

Penerimaan Sumber Daya Alam pada TA 2007 lebih kecil Rp34.581.211.992.459 atau 20,65 persen dari TA 2006.

b. Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN

Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN pada TA 2007 adalah sebesar Rp23.222.505.531.880, yang berarti lebih besar Rp249.449.296.923 atau 1,09 persen dari TA 2006 sebesar Rp22.973.056.234.957. Pendapatan tersebut merupakan penerimaan laba yang diperoleh Pemerintah atas pengelolaan kekayaan negara yang dipisahkan dan ditempatkan sebagai penyertaan modal pada BUMN.

c. Penerimaan PNBP Lainnya

Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2007 adalah sebesar Rp58.922.417.177.557. Penerimaan ini terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Penjualan Hasil Produksi/Sitaan	4.149.309.247.298	393.768.881.716
Pendapatan Sewa	61.897.671.664	69.890.643.739
Pendapatan Jasa I	8.945.029.075.143	7.514.060.949.675
Pendapatan Jasa II	2.087.027.730.609	2.295.109.749.793
Pendapatan Bukan Pajak dari Luar Negeri	254.407.935.947	353.011.168.545
Pendapatan Bunga	47.954.230.569	4.785.279.335
Gain on Redemption atas Pembelian kembali Obligasi DN Jangka Panjang & Premium Obligasi	639.582.403.000	1.782.824.525.275
Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan	78.323.060.638	74.430.911.500
Pendapatan Pendidikan	3.326.174.885.770	2.357.826.811.004
Pendapatan Laba Bersih Penjualan BBM	8.831.615.131.904	7.328.702.216.238
Pendapatan Pelunasan Piutang	8.540.498.248.258	7.426.686.860.621
Pendapatan Lain-lain	5.467.998.950.852	4.623.636.135.029
Pendapatan dari Pengembalian dan Pembetulan Pembukuan Belanja	1.006.828.750.106	2.537.854.529.668
Pendapatan PNBP Lainnya I	**14.014.361.540.394**	**7.483.742.079**
Pendapatan BLU	**2.131.236.268.266**	**0**
Jumlah PNBP Lainnya	**59.582.245.130.418**	**36.770.072.404.217**
Dikurangi:		
Pengembalian PNBP	(659.827.952.861)	(302.475.097.838)
Jumlah PNBP Lainnya (Neto)	**58.922.417.177.557**	**36.467.597.306.379**

Penerimaan PNBP Lainnya pada TA 2007 lebih besar Rp22.454.819.871.178 atau 61,57 persen dari TA 2006.

D.2.3. Penerimaan Hibah

Penerimaan Hibah sebesar Rp1,70 triliun

Penerimaan Hibah pada TA 2007 adalah sebesar Rp1.697.747.939.503. Pendapatan ini merupakan penerimaan negara yang berasal dari sumbangan swasta dalam negeri dan sumbangan lembaga swasta dan pemerintah luar negeri. Rincian Pendapatan Hibah adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Hibah Dalam Negeri		
Hibah Dalam Negeri – Perorangan	33.481.000	Rp12.982.000
Hibah Dalam Negeri – Lembaga/Badan Usaha	273.181.058	2.435.310.356
Hibah Dalam Negeri Lainnya	37.867.000	51.791.971.296
Jumlah Hibah Dalam Negeri	**344.529.058**	**54.240.263.652**
Hibah Luar Negeri		
Hibah Luar Negeri – Perorangan	0	0
Hibah Luar Negeri – Bilateral	251.067.417.683	26.869.412.948
Hibah Luar Negeri – Multilateral	1.445.596.798.554	1.746.459.165.126
Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya	739.194.208	6.481.944.009
Jumlah Hibah Luar Negeri	**1.697.403.410.445**	**1.779.810.522.083**
Jumlah Hibah	**1.697.747.939.503**	**1.834.050.785.735**

Penerimaan Hibah pada TA 2007 lebih kecil Rp136.302.846.232 atau 7,43 persen dari TA 2006.

D.2.4. Belanja Pegawai

Belanja Pegawai sebesar Rp90,36 triliun

Belanja Pegawai pada TA 2007 adalah sebesar Rp90.358.606.656.075. Rincian Belanja Pegawai adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Belanja PNS	25.137.070.560.775	21.314.222.421.882
Belanja Pegawai TNI/Polri	24.459.888.791.991	20.082.865.325.170
Belanja Gaji dan Tunjangan Pejabat Negara	382.023.312.487	345.957.331.631
Belanja Pegawai Perjan	19.458.296	8.125.701.044
Belanja Gaji Dokter PTT	392.201.869.649	407.989.718.054
Belanja Honorarium	7.128.345.252.804	4.807.285.684.654
Belanja Lembur	247.789.504.238	102.437.840.896
Belanja Vakasi	552.183.449.998	717.283.473.118
Belanja Tunj. Khusus & Pegawai Transito	3.682.883.263.237	1.516.590.573.014
Belanja Pensiun dan Uang Tunggu	27.713.736.153.904	23.307.003.465.420
Belanja Asuransi Kesehatan	675.301.964.800	436.491.067.200
Belanja Tunjangan Kesehatan Veteran	53.494.390.000	50.000.000.000
Belanja Cadangan Perubahan Sharing	115.282.935.000	0
Jumlah Belanja Pegawai	**90.540.220.907.179**	**73.096.252.602.083**
Dikurangi:		
Pengembalian Belanja Pegawai	(181.614.251.104)	(212.209.287.531)
Belanja Pegawai (Neto)	**90.358.606.656.075**	**72.884.043.314.552**

Belanja Pegawai pada TA 2007 lebih besar Rp17.474.563.341.523 atau 23,98 persen dari TA 2006.

D.2.5. Belanja Barang

Belanja Barang sebesar Rp54,40 triliun

Belanja Barang pada TA 2007 adalah sebesar Rp54.395.453.562.207 yang merupakan pengeluaran Pemerintah dalam rangka pengadaan/pembelian barang dan jasa non investasi guna mendukung kegiatan operasional pemerintahan. Rincian Belanja Barang adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Belanja Barang	30.031.434.368.985	26.804.478.679.764
Belanja Jasa	9.013.462.489.946	7.853.875.531.786
Belanja Pemeliharaan	4.795.695.522.125	3.914.148.622.928
Belanja Perjalanan	9.038.651.003.132	8.719.459.719.837
Belanja Barang BLU	1.813.682.644.316	-
Jumlah Belanja Barang	**54.692.926.028.504**	**47.291.962.554.315**
Dikurangi:		
Pengembalian Belanja Barang	(297.472.466.297)	(226.510.724.775)
Jumlah Belanja Barang (Neto)	**54.395.453.562.207**	**47.065.451.829.540**

Belanja Barang TA 2007 ini lebih besar Rp7.330.001.732.667 atau 15,57 persen dari TA 2006.

D.2.6. Bunga Utang

Belanja Bunga Utang sebesar Rp79,74 triliun

Belanja Bunga Utang pada TA 2007 sebesar Rp79.744.341.931.244 merupakan pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang (*outstanding principal*), baik utang dalam negeri maupun utang luar negeri, yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman. Belanja Bunga Utang mengalami kenaikan Rp674.979.136.366 atau 0,85 persen dari Belanja Bunga Utang TA 2006 sebesar Rp79.069.362.794.878.

Rincian Bunga Utang tersebut adalah sebagai berikut:

Bunga atas Utang Dalam Negeri

Bunga atas Utang Dalam Negeri sebesar Rp54.016.373.700.283 merupakan pembayaran bunga atas Surat Utang Negara (obligasi) yang diterbitkan di dalam negeri dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Pembayaran Bunga Utang DN	49.041.615.225.494	53.176.056.906.000
Pembayaran Discount Surat Perbendaharaan Negara DN	311.187.395.000	0
Pembayaran Discount Obligasi DN	2.702.273.493.233	1.086.080.398.600
Belanja Pembayaran *Loss on Bond Redemption* atas pembelian Kembali Obligasi DN	2.019.787.143.903	653.492.107.563
Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN	**54.074.863.257.630**	**54.915.629.412.163**
Dikurangi:		
Pengembalian Pembayaran Bunga Utang DN	(58.489.557.347)	(18.960.897.842)
Jumlah Pembayaran Bunga Utang DN (Neto)	**54.016.373.700.283**	**54.896.668.514.321**

Bunga atas Utang Dalam Negeri TA 2007 lebih kecil Rp880.294.814.038 atau 1,60 persen dari TA 2006.

Bunga atas Utang Luar Negeri

Bunga atas Utang Luar Negeri adalah sebesar Rp25.727.968.230.961, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Pembayaran Bunga Utang LN	25.679.238.858.519	24.102.556.279.180
Pembayaran Discount Obligasi LN	217.926.031.986	86.675.640.000
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN	**25.897.164.890.505**	**24.189.231.919.180**
Dikurangi:		
Pengembalian Pembayaran Bunga Utang LN	(169.196.659.544)	(16.537.638.623)
Jumlah Pembayaran Bunga Utang LN (Neto)	**25.727.968.230.961**	**24.172.694.280.557**

Bunga atas Utang Luar Negeri TA 2007 lebih besar Rp1.555.273.950.404 atau 6,43 persen dari TA 2006.

D.2.7. Subsidi

Subsidi sebesar Rp150,21 triliun

Subsidi pada TA 2007 sebesar Rp150.214.150.451.047 merupakan belanja negara yang diberikan kepada perusahaan/lembaga yang memproduksi, menjual, mengekspor atau mengimpor barang dan jasa, yang memenuhi hajat hidup orang banyak, sehingga harga jual terjangkau oleh masyarakat. Rincian Subsidi adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Subsidi Lembaga Non Keuangan BBM	**83.817.316.516.878**	**64.212.079.995.900**
Subsidi Non Lembaga Keuangan - Non BBM	**65.374.003.458.061**	**41.449.827.732.096**
Subsidi Non BBM – Harga/biaya	46.397.391.947.443	39.299.854.326.750
Subsidi Non BBM – Bunga Kredit/ Penyertaan Risiko	349.002.642.983	286.219.826.346
Subsidi Non BBM – Pajak	17.113.608.867.635	1.863.753.579.000
Subsidi Non BBM – Lainnya	1.514.000.000.000	0
Subsidi dalam Rangka PSO	**1.025.000.000.000**	**1.849.155.256.218**
Jumlah Subsidi	**150.216.319.974.939**	**107.511.062.984.214**
Dikurangi:		
Pengembalian Subsidi	(2.169.523.892)	(54.323.626.929)
Jumlah Subsidi (Neto)	**150.214.150.451.047**	**107.456.739.357.285**

Subsidi TA 2007 ini lebih besar Rp42.757.411.093.762 atau 39,79 persen dari TA 2006.

D.2. 8. Bantuan Sosial

Bantuan Sosial sebesar Rp49,67 triliun

Bantuan Sosial sebesar Rp49.668.943.160.212 merupakan uang atau barang yang diberikan kepada masyarakat guna melindungi dari kemungkinan terjadinya risiko sosial, dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Kompensasi Kenaikan Harga BBM	14.902.741.160.691	14.964.381.638.996
Bantuan Langsung Sekolah/Lembaga/Guru	17.033.081.292.012	14.084.716.710.929
Imbal Swadaya Sekolah/Lembaga	4.407.707.942.828	2.756.028.573.150
Beasiswa	1.947.870.866.063	1.019.688.203.670
Lembaga Peribadatan	87.560.422.390	113.986.593.282
Lembaga Sosial Lainnya	11.453.545.812.169	7.900.176.558.553
Jumlah Bantuan Sosial	**49.832.507.496.153**	**40.838.978.278.580**
Dikurangi:		
Pengembalian Bantuan Sosial	(163.564.335.941)	(154.209.040.444)
Jumlah Bantuan Sosial (Neto)	**49.668.943.160.212**	**40.684.769.238.136**

Belanja Bantuan Sosial TA 2007 ini lebih besar Rp8.984.173.922.076 atau 22,08 persen dari TA 2006.

D.2.9. Belanja Lain-lain

Belanja Lain-lain sebesar Rp15,62 triliun

Belanja Lain-lain pada TA 2007 adalah sebesar Rp15.623.762.951.481, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Kerjasama Teknis internasional	61.921.347.796	140.579.569.525
Pengeluaran Tak Tersangka	10.923.071.004	1.337.845.000
Cadangan Umum	1.003.702.168.655	3.222.564.996.639
Pemilihan Umum/Sidang Tahunan	0	6.255.270.526
Cadangan Dana Reboisasi	3.706.939.363.563	3.773.110.693.493
Tunggakan dan Klaim Pihak Ketiga	120.244.000	58.490.839.545
Tanggap Darurat	704.192.785.376	2.693.871.983.684
Belanja Lainnya	10.168.913.757.152	28.335.238.011.314
Jumlah Belanja Lain-lain	**15.656.712.737.546**	**38.231.449.209.726**
Dikurangi:		
Pengembalian Belanja Lain-lain	(32.949.786.065)	(75.938.773.636)
Jumlah Belanja Lain-lain (Neto)	**15.623.762.951.481**	**38.155.510.436.090**

Belanja Lain-lain TA 2007 mengalami penurunan sebesar Rp22.531.747.484.609 atau 59,05 persen dari TA 2006.

D.2.10. Bagi Hasil Pajak

Bagi Hasil Pajak sebesar Rp34,99 triliun

Bagi Hasil Pajak pada TA 2007 adalah sebesar Rp34.990.350.498.937, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Bagi Hasil Pajak Penghasilan	7.965.277.891.773	6.059.286.512.580
Bagi Hasil PBB	22.584.576.028.744	19.384.722.182.854
Bagi Hasil BPHTB	4.440.558.734.936	3.103.865.928.374
Jumlah Bagi Hasil Pajak	**34.990.412.655.453**	**28.547.874.623.808**
Dikurangi:		
Pengembalian Bagi Hasil Pajak	(62.156.516)	(3.642.930.874)
Jumlah Bagi Hasil Pajak (Neto)	**34.990.350.498.937**	**28.544.231.692.934**

Bagi Hasil Pajak TA 2007 lebih besar Rp6.446.118.806.003 atau 22,58 persen dari TA 2006.

D.2.11. Bagi Hasil Sumber Daya Alam

Bagi Hasil Sumber Daya Aalam sebesar Rp27,95 triliun

Bagi Hasil Sumber Daya Alam (SDA) dalam TA 2007 adalah sebesar Rp27.951.938.003.404 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Bagi Hasil Minyak Bumi	12.237.540.639.508	17.856.208.800.002
Bagi Hasil Gas Alam	9.741.263.758.765	13.865.070.452.502
Bagi Hasil Pertambangan Umum	4.227.570.843.387	3.627.859.026.561
Bagi Hasil Kehutanan	1.724.240.180.775	1.212.717.807.713
Bagi Hasil Perikanan	166.054.154.000	199.948.501.209
Jumlah Bagi Hasil SDA	**28.096.669.576.435**	**36.761.804.587.987**
Dikurangi:		
Pengembalian Bagi Hasil SDA	(144.731.573.031)	(60.999.557.989)
Jumlah Bagi Hasil SDA (Neto)	**27.951.938.003.404**	**36.700.805.029.998**

Bagi Hasil Sumber Daya Alam TA 2007 lebih kecil Rp8.748.867.026.594 atau 23,84 persen dari TA 2006.

D.2.12. Dana Alokasi Umum

DAU sebesar Rp164,81 triliun

Dana Alokasi Umum pada TA 2007 sebesar Rp164.808.765.128.352 digunakan untuk membiayai kebutuhan provinsi dan kabupaten/kota dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Jumlah Dana Alokasi Umum TA 2007 lebih besar Rp19.141.949.810.557 atau 13,14 persen dari TA 2006 sebesar Rp145.666.815.317.795.

D.2.13. Dana Alokasi Khusus

Dana Alokasi Khusus sebesar Rp16,24 triliun

Dana Alokasi Khusus pada TA 2007 sebesar Rp16.237.819.453.074 berasal dari Dana Non Reboisasi. Dana Non Reboisasi digunakan untuk membiayai pendidikan, kesehatan, infrastruktur, pemekaran pemerintah, kelautan dan perikanan, dan untuk pertanian. Jumlah Dana Alokasi Khusus TA 2007 lebih besar Rp4.671.727.475.351 atau 40,39 persen dari TA 2006 sebesar Rp11.566.091.977.723.

D.2.14. Dana Otonomi Khusus

Dana Otonomi Khusus sebesar Rp4,06 triliun

Dana Otonomi Khusus pada TA 2007 adalah sebesar Rp4.058.348.000.000 yang digunakan untuk Provinsi Papua dan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. Penggunaan Dana Otonomi Khusus ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh Sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam dan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua. Jumlah Dana Otonomi Khusus TA 2007 lebih besar Rp570.064.000.000 atau 16,34 persen dari TA 2006 sebesar Rp3.488.284.000.000.

D.2.15. Dana Penyesuaian

Dana Penyesuaian sebesar Rp5,22 triliun

Dana Penyesuaian pada TA 2007 adalah sebesar Rp5.216.291.720.133, lebih besar Rp4.657.988.289.133 atau 834,31 persen dari TA 2006 sebesar Rp558.303.431.000.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS INVESTASI ASET NONKEUANGAN

Penurunan kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan sebesar minus Rp64,3 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan menjelaskan aktivitas yang mencerminkan penerimaan dan pengeluaran kas bruto dalam rangka perolehan dan pelepasan sumber daya ekonomi yang bertujuan untuk meningkatkan dan mendukung pelayanan pemerintah kepada masyarakat di masa yang akan datang. Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan Pada TA 2007 menunjukkan arus kas keluar neto sebesar Rp64.298.947.625.676 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Arus Masuk	82.193.749.036	35.611.899.217
Dikurangi Arus Keluar	(64.381.141.374.712)	(55.288.404.645.311)
Arus Kas Bersih	**(64.298.947.625.676)**	**(55.252.792.746.094)**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Investasi Aset Nonkeuangan Pada TA 2007 lebih kecil Rp9.046.154.879.582 dari TA 2006.

D.2.16. Penjualan Aset Tetap

Penjualan Aset Tetap sebesar Rp82,19 miliar

Pendapatan Penjualan Aset Tetap merupakan pendapatan yang berasal dari penjualan aset yang rusak atau berlebihan. Pendapatan yang berasal dari Penjualan Aset Tetap pada TA 2007 adalah sebesar Rp82.193.749.036 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan, dan Tanah	1.974.658.389	8.275.573.867
Penjualan Kendaraan Bermotor	1.265.464.239	6.295.824.409
Penjualan Sewa Beli	50.773.778.260	45.873.546.733
Penjualan Aset Tetap Lainnya	2.769.299.900	664.490.355
Penjualan Aset Lainnya	25.541.474.003	13.665.663.458
Jumlah Penjualan Aset	**82.324.674.791**	**74.775.098.822**
Dikurangi:		
Pengembalian Pendapatan Penjualan Aset	(130.925.755)	(39.163.199.605)
Jumlah Penjualan Aset (Neto)	**82.193.749.036**	**35.611.899.217**

Pendapatan ini pada TA 2007 lebih besar Rp46.581.849.819 atau 130,80 persen dari TA 2006.

D.2.17. Belanja Aset Tetap

Belanja Aset Tetap sebesar Rp64,38 triliun

Belanja Aset Tetap pada TA 2007 adalah sebesar Rp64.381.141.374.712 dengan rincian sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Belanja Modal Tanah	1.475.771.876.246	1.638.941.416.153
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	21.383.263.674.964	18.762.484.202.202
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	14.587.477.079.146	12.270.311.279.744
Belanja Modal Jalan, Irigasi, dan Jaringan	23.104.325.720.664	19.166.325.721.169
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	3.827.647.782.039	3.523.580.650.796
Belanja Modal BLU	20.101.823.927	
Jumlah Belanja Aset Tetap	**64.398.587.956.986**	**55.361.643.270.064**
Dikurangi:		
Pengembalian Belanja Modal	(17.446.582.274)	(73.238.624.753)
Jumlah Belanja Aset Tetap (Neto)	**64.381.141.374.712**	**55.288.404.645.311**

Belanja ini pada TA 2007 lebih besar Rp9.092.736.729.401 atau 16,45 persen dari TA 2006.

Dengan Arus Kas Masuk Bersih dari Aktivitas Operasi sebesar Rp14.455.123.039.723 dan Arus Kas Bersih Keluar dari Aktivitas Investasi Aset Non Keuangan sebesar Rp64.298.947.625.676 mengakibatkan defisit anggaran sebesar Rp49.843.824.585.953.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS PEMBIAYAAN

Kenaikan kas dari Aktivitas Pembiayaan sebesar Rp42,46 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Pembiayaan menjelaskan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas sehubungan dengan pendanaan defisit atau penggunaan surplus anggaran yang bertujuan untuk memprediksi klaim (tuntutan) pihak lain terhadap arus kas pemerintah dan tuntutan pemerintah terhadap pihak lain di masa yang akan datang. Jumlah Pembiayaan Neto dalam TA 2007 adalah sebesar Rp42.456.535.817.769. Jumlah tersebut berasal dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Arus Masuk	176.258.508.841.762	147.875.944.834.142
Dikurangi Arus Keluar	133.801.973.023.993	118.460.354.582.274
Arus Kas Bersih	**42.456.535.817.769**	**29.415.590.251.868**

Arus Kas Bersih dari Aktivitas Pembiayaan TA 2007 lebih besar Rp13.040.945.565.901 dari TA 2006.

D.2.18. Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri sebesar Rp132,93 triliun

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2007 adalah sebesar Rp132.927.083.411.932, yang terdiri dari (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Rekening Pemerintah	4.809.393.224.061	11.555.462.940.247
Dana Eks. Moratorium	6.342.600.000.000	7.357.400.000.000
Privatisasi dan Penjualan Aset Restrukturisasi	5.417.794.109.826	5.055.702.597.315
Surat Utang Negara	116.858.250.704.500	94.234.816.433.462
Penerimaan Pembiayaan DN	**133.428.038.038.387**	**118.203.381.971.024**
Dikurangi:		
Pengembalian Penerimaan Pembiayaan DN	(500.954.626.455)	0
Jumlah Penerimaan Pembiayaan DN (Neto)	**132.927.083.411.932**	**118.203.381.971.024**

Penerimaan Pembiayaan Dalam Negeri dalam TA 2007 lebih besar Rp14.723.701.440.908 atau 12,46 persen dibandingkan dengan TA 2006.

a. Rekening Pemerintah

Penerimaan pembiayaan dari Rekening Pemerintah merupakan penerimaan pembiayaan dari rekening yang dimiliki oleh pemerintah. Penerimaan Pembiayaan Rekening Pemerintah pada TA 2007 sebesar Rp4.809.393.224.061 berasal dari penerimaan sisa anggaran lebih (SAL), penutupan rekening, dan penerimaan RDI.

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Penerimaan Sisa Anggaran Lebih (SAL)	279.042.900.000	0
Penerimaan dari Penutupan Rekening	30.350.324.061	5.055.462.940.247
Penerimaan Pembiayaan dari RDI	4.500.000.000.000	2.000.000.000.000
Penerimaan Pembiayaan dari Rekening BUN untuk Obligasi	0	4.500.000.000.000
Total	**4.809.393.224.061**	**11.555.462.940.247**

Penerimaan Pembiayaan dari Rekening Pemerintah TA 2007 lebih kecil Rp6.746.069.716.186 atau 58,38 persen dari TA 2006.

b. Dana Eks Moratorium

Penerimaan pembiayaan dari Dana Eks Moratorium sebesar Rp6.342.600.000.000 merupakan penerimaan pembiayaan dari dana eks moratorium pokok untuk Cadangan Aceh. Pada TA 2006 penerimaan pembiayaan dari Dana Eks Moratorium adalah sebesar Rp7.357.400.000.000, berarti lebih kecil Rp1.014.800.000.000 atau 13,79 persen.

c. Privatisasi dan Penjualan Aset Program Restrukturisasi

Penerimaan Hasil Penjualan Aset Program Restrukturisasi pada TA 2007 adalah sebesar Rp5.417.794.109.826, berarti terjadi lebih besar Rp362.091.512.511 atau 7,16 persen dari penerimaan pada TA 2006 sebesar Rp5.055.702.597.315.

d. Surat Utang Negara

Penerimaan pembiayaan Surat Utang Negara (SUN) merupakan penerimaan pembiayaan dari penerbitan SUN/Obligasi baik obligasi dalam negeri maupun luar negeri. Penerimaan pembiayaan Surat Utang Negara pada TA 2007 sebesar Rp116.858.250.704.500. Rincian dari penerimaan pembiayaan penerbitan SUN adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara DN	1.120.907.117.000	1.689.768.517.000
Pembiayaan untuk Obligasi DN	97.992.895.000.000	73.757.650.000.000
Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi LN	13.575.648.587.500	18.466.901.169.540
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara LN	0	320.496.746.922
Penerimaan Penerbitan/Penjualan Surat Utang Perbendaharaan	4.168.800.000.000	0
Total	**116.858.250.704.500**	**94.234.816.433.462**

Penerimaan Pembiayaan SUN pada TA 2007 sebesar lebih besar Rp22.623.434.271.038 atau 24,01 persen dibanding TA 2006.

D.2.19. Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri sebesar Rp34,07 triliun

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2007 sebesar Rp34.070.047.317.686 merupakan seluruh penerimaan pemerintah sehubungan dengan penarikan pinjaman luar negeri yang terdiri dari pinjaman program dan pinjaman proyek, serta penjadualan kembali bunga utang luar negeri. Rincian Pembiayaan Luar Negeri adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Pinjaman Program	19.607.480.189.151	13.579.552.756.283
Pinjaman Proyek	14.462.567.128.535	16.093.006.441.588
Jumlah Penerimaan Pembiayaan LN	**34.070.047.317.686**	**29.672.559.197.871**

Penerimaan Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2007 lebih besar Rp4.397.488.119.815 atau 14,82 persen dari TA 2006.

a. Pinjaman Program

Pinjaman Program yang diterima dalam TA 2007 adalah sebesar Rp19.607.480.189.151, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Program Bilateral dari OECF	3.725.790.689.151	915.056.506.949
Program Mutilateral	15.881.689.500.000	12.664.496.249.334
Jumlah Pinjaman Program (Neto)	**19.607.480.189.151**	**13.579.552.756.283**

Pinjaman Program TA 2007 lebih besar Rp6.027.927.432.868 atau 44,39 persen dari TA 2006.

b. Pinjaman Proyek

Pinjaman Proyek yang diterima dalam TA 2007 adalah sebesar Rp14.462.567.128.535, dengan rincian (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Pinjaman Proyek dari Bilateral	5.467.822.744.486	5.039.901.938.771
Pinjaman Proyek dari Multilateral	5.204.974.233.105	6.064.506.728.051
Pinjaman Proyek Fasilitas Kredit Ekspor	3.350.335.783.286	4.801.291.435.052
Pinjaman Proyek Lainnya	439.490.286.838	187.306.339.714
Jumlah Pinjaman Proyek	**14.462.623.047.715**	**16.093.006.441.588**
Dikurangi:		
Pengembalian	(55.919.180)	0
Jumlah Pinjaman Proyek (Neto)	**14.462.567.128.535**	**16.093.006.441.588**

Pinjaman Proyek TA 2007 lebih kecil Rp1.630.439.313.053 atau 10,13 persen dibandingkan TA 2006.

D.2.20. Penerimaan Pembiayaan Lain-lain

Penerimaan Pembiayaan Lain-lain sebesar Rp9,26 triliun

Penerimaan Pembiayaan Lain-lain dalam TA 2007 sebesar Rp9.261.378.112.144 berasal dari penyesuaian penambahan saldo rekening khusus karena selisih kurs. Jumlah ini berarti lebih besar Rp9.261.374.446.897 dari penerimaan TA 2006 sebesar Rp3.665.247.

D.2.21. Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri

Pengeluaran Pembiayaan DN sebesar Rp59,69 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Dalam Negeri pada TA 2007 adalah sebesar Rp59.686.063.547.598 yang digunakan untuk pembayaran/pelunasan pokok obligasi/SUN yang jatuh tempo. Jumlah tersebut lebih besar Rp1.436.754.462.105 atau 2,47 persen dibandingkan TA 2006 sebesar Rp58.249.309.085.493.

D.2.22. Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri

Pengeluaran Pembiayaan LN sebesar Rp57,92 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Luar Negeri dalam TA 2007 sebesar Rp57.922.459.152.174 merupakan pembayaran cicilan pokok utang luar negeri yang jatuh tempo. Jumlah tersebut lebih besar Rp5.241.387.614.391 atau 9,95 persen dibandingkan dengan TA 2006 sebesar Rp52.681.071.537.783.

D.2.23. Penyertaan Modal Negara dan Dukungan Infrastruktur

PMN dan Dukungan Infrastruktur sebesar Rp4,7 triliun

Pengeluaran Penyertaan Modal Negara (PMN) dan Dukungan Infrastruktur dalam TA 2007 adalah sebesar Rp4.700.000.000.000 yang terdiri dari PMN sebesar Rp2.700.000.000.000 dan Dukungan Infrastruktur sebesar Rp2.000.000.000.000. Dalam TA 2006, PMN dan Dukungan Infrastruktur adalah sebesar Rp3.972.000.000.000, berarti PMN dan Dukungan Infrastruktur TA 2007 lebih besar Rp728.000.000.000 atau 18,33 persen. Pengeluaran Dukungan Infrastruktur sebesar Rp2.000.000.000.000 dialokasikan kepada Badan Layanan Umum-Pusat Investasi Pemerintah (BLU-PIP) di Departemen Keuangan melalui Bagian Anggaran 099 (Penyertaan Modal Negara).

D.2.24. RDI/RPD

RDI/RPD sebesar Rp2,72 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Rekening Dana Investasi/Rekening Pembangunan Daerah (RDI/RPD) merupakan pengeluaran Pemerintah berupa penerusan pinjaman luar negeri yang disalurkan kepada BUMN/BUMD. Pemberian Pinjaman kepada Perusahaan Negara dalam TA 2007 adalah sebesar Rp2.723.357.058.788 yang berasal dari penerusan pinjaman tahun berjalan dan tahun yang lalu. Jumlah tersebut lebih kecil Rp834.616.900.210 atau 23,46 persen dibandingkan dengan TA 2006 sebesar Rp3.557.973.958.998.

D.2.25. Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain

Pengeluaran Pembiayaan Lain-lain sebesar Rp8,77 triliun

Pengeluaran Pembiayaan Lain-Lain dalam TA 2007 sebesar Rp8.770.093.265.443 merupakan pengeluaran Pemerintah akibat penyesuaian penurunan saldo rekening khusus karena selisih kurs.

ARUS KAS DARI AKTIVITAS NONANGGARAN

Kas bersih dari Aktivitas Nonanggaran sebesar minus Rp5,99 triliun

Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran merupakan aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak mempengaruhi anggaran dan tidak disajikan dalam Laporan Realisasi APBN. Dalam TA 2007, Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran adalah sebesar Rp5.991.990.918.114. Arus Kas dari Aktivitas Nonanggaran terdiri dari Perhitungan Fihak Ketiga dan Transfer Antar Kantor.

Berikut adalah penjelasan rinci Arus Kas Bersih dari Aktivitas Nonanggaran:

D.2.26. Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)

Perhitungan Fihak Ketiga (neto) sebesar Rp231,16 milyar

Arus kas masuk bersih yang berasal dari Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam TA 2007 adalah sebesar Rp231.158.227.155. Arus kas masuk ini berasal dari penerimaan Pemerintah yang berasal dari jumlah dana yang dipotong dari Surat Perintah Membayar (SPM)/Surat Perintah Pencairan Dana(SP2D) atau diterima secara tunai untuk fihak ketiga, seperti potongan gaji, pensiun, beras BULOG, dan PFK lainnya setelah dikurangi dengan jumlah pembayaran yang telah dilakukan pemerintah kepada fihak ketiga yang berhak menerimanya, termasuk di dalamnya adalah Penerimaan dan Pelunasan Wesel Pemerintah. Adapun Rincian penerimaan dan pengeluaran PFK pada TA 2007 adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Penerimaan PFK 10% Gaji	8.482.562.797.450	Rp7.068.014.408.668
Penerimaan PFK 2% Pensiun/Gaji Terusan	16.360.855.195	8.561.825.995
Penerimaan PFK Beras Bulog	143.649.653.845	94.854.793.386
Penerimaan PFK 2% Pemda	1.162.049.885.914	741.062.875.573
Penerimaan PFK Lain-lain	315.303.776.300	300.328.854.213
Penerimaan Non Anggaran Fihak Ketiga	109.448.163.521	672.393.667
Jumlah Penerimaan PFK	**10.229.375.132.225**	**8.213.495.151.502**
Dikurangi:		
Pengembalian Penerimaan PFK 10% Gaji	(8.330.308.353.490)	(6.909.407.503.686)
Pengembalian Penerimaan PFK 2% Pensiun/Gaji Terusan	(2.694.436.070)	(28.043.010.491)
Pengembalian Penerimaan PFK Beras Bulog	(142.855.184.242)	(90.524.896.816)
Penerimaan PFK 2% Pemda	(1.161.618.087.768)	(692.650.245.224)
Pengembalian Penerimaan PFK Lain-lain	(306.884.262.100)	(308.495.790.000)
Pengeluaran Non Anggaran Fihak Ketiga	(53.856.581.400)	(14.079.580)
Jumlah Pengeluaran PFK	**(9.998.216.905.070)**	**(8.029.135.525.797)**
Perhitungan Fihak Ketiga (Neto)	**231.158.227.155**	**184.359.625.705**

Perhitungan Fihak Ketiga (PFK) dalam TA 2007 lebih besar Rp46.798.601.450 dari TA 2006.

D.2.27. Transfer Antar Kantor

Transfer Antar Kantor sebesar Rp5,76 triliun

Transfer Antar Kantor dalam TA 2007 sebesar Rp5.760.832.890.959 merupakan penerimaan dan pengeluaran kiriman uang antar rekening pemerintah yang berasal dari KPPN, Kantor Pusat Direktorat Jenderal Perbendaharaan-Departemen Keuangan, rekening BUN, pemindahbukuan intern KPPN, penerimaan dan pengeluaran Uang Persediaan, dan Wesel Pemerintah. Termasuk dalam Transfer Antar Kantor ini adalah penerimaan dana talangan dari rekening migas (rekening 600.000.411). Dana talangan tersebut telah dikembalikan ke rekening migas pada bulan Februari 2008. Rincian Transfer Antar Kantor adalah sebagai berikut (dalam Rp):

Uraian	TA 2007 (*Audited*)	TA 2006 (*Audited*)
Wesel Pemerintah	214.819.615	0
Penerimaan Kiriman Uang (KU)	792.025.749.470.191	721.297.780.174.616
Penerimaan KU Dalam Rangka Reksus	134.119.878.411	265.593.040.449
Penerimaan KU dalam rangka TSA	264.375.670.591.303	38.112.384.240.562
Pemindahbukuan intern KPPN	654.217.159.093.240	685.039.877.487.827
Penerimaan *Reimbursment* dalam rangka *Prefinancing*	47.234.437.407.112	34.400.397.423.255
Penerimaan Uang Persediaan	15.025.011.977.470	15.149.826.953.336
Koreksi Pengeluaran Pemindahbukuan	11.814.644.752	0
Penerimaan Transfer Antar Kantor	**1.773.024.177.882.090**	**1.494.265.859.320.040**
Dikurangi:		
Pengeluaran Wesel Pemerintah	(2.611.200)	0
Pengeluaran Kiriman Uang	(1.698.584.001.031.340)	(1.447.835.105.894.230)
Pembayaran PFK Prefinancing	(53.834.502.864.044)	(28.664.691.995.275)
Pengeluaran Uang Persediaan	(14.844.830.306.571)	(14.732.375.102.785)
Koreksi Penerimaan Pemindahbukuan	(8.377.983)	0
Pengeluaran Transfer Antar Kantor	(1.767.263.345.191.130)	**(1.491.232.172.992.290)**
Jumlah Transfer Antar Kantor	**5.760.832.690.959**	**3.033.686.327.758**

Transfer Antar Kantor dalam TA 2007 lebih besar Rp2.727.146.363.201 dari TA 2006.

REPUBLIK INDONESIA

DAFTAR

DAFTAR 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE MAP	URAIAN MAP	TAHUN ANGGARAN 2007			REALISASI 2006	KENAIKAN (PENURUNAN)
		ANGGARAN (UU APBN-P TA 2007)	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 4 - 6
41	**Penerimaan Perpajakan**	**492.010.893.000.000**	**490.988.634.954.090**	**(1.022.258.045.910)**	**409.203.019.335.450**	**81.785.615.618.640**
411	**Pajak Dalam Negeri**	**474.550.950.000.000**	**470.051.815.733.040**	**(4.499.134.266.960)**	**395.971.535.630.012**	**74.080.280.103.028**
4111	**Pajak Penghasilan (PPh)**	**251.748.250.000.000**	**238.430.926.067.905**	**(13.317.323.932.095)**	**208.833.125.652.841**	**29.597.800.415.064**
41111	**PPh Migas**	**37.267.550.000.000**	**44.000.473.091.966**	**6.732.923.091.966**	**43.187.887.822.005**	**812.585.269.961**
411111	PPh Minyak Bumi	13.835.620.000.000	16.294.048.465.378	2.458.428.465.378	14.672.114.385.638	1.621.934.079.740
411112	PPh Gas Alam	23.431.930.000.000	27.259.183.973.681	3.827.253.973.681	28.518.465.410.268	(1.259.281.436.587)
411113	PPh Lainnya Dari Minyak Bumi	-	599.086.834	599.086.834	-	599.086.834
411119	PPh Migas Lainnya		446.641.566.073	446.641.566.073	(2.691.973.901)	449.333.539.974
41112	**PPh Nonmigas**	**214.480.700.000.000**	**194.430.452.975.939**	**(20.050.247.024.061)**	**165.645.237.830.836**	**28.785.215.145.103**
411121	PPh Pasal 21	34.905.000.000.000	39.448.643.784.387	4.543.643.784.387	31.561.667.373.444	7.886.976.410.943
411122	PPh Pasal 22 Nonimpor	5.326.400.000.000	3.977.621.367.742	(1.348.778.632.258)	4.024.253.492.637	(46.632.124.895)
411123	PPh Pasal 22 Impor	17.395.400.000.000	16.635.283.291.561	(760.116.708.439)	13.140.320.051.468	3.494.963.240.093
411124	PPh Pasal 23	20.327.300.000.000	15.724.471.057.254	(4.602.828.942.746)	15.355.635.005.902	368.836.051.352
411125	PPh Pasal 25/29 Orang Pribadi	2.465.200.000.000	1.577.541.024.051	(887.658.975.949)	1.803.456.312.747	(225.915.288.696)
411126	PPh Pasal 25/29 Badan	88.196.700.000.000	80.829.125.945.461	(7.367.574.054.539)	65.073.976.846.330	15.755.149.099.131
411127	PPh Pasal 26	13.927.000.000.000	14.625.037.838.989	698.037.838.989	10.520.528.073.720	4.104.509.765.269
411128	PPh Final dan Fiskal Luar Negeri	31.937.700.000.000	21.598.601.841.649	(10.339.098.158.351)	24.126.874.618.065	(2.528.272.776.416)
411129	PPh Nonmigas Lainnya		14.126.824.845	14.126.824.845	38.526.056.523	(24.399.231.678)
4112	**Pendapatan Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak atas Penjualan Barang Mewah**	**152.057.200.000.000**	**154.526.773.832.995**	**2.469.573.832.995**	**123.035.859.568.711**	**31.490.914.264.284**
41121	**Pendapatan PPN**	-	**147.440.052.123.972**	**147.440.052.123.972**	**118.239.682.513.673**	**29.200.369.610.299**
411211	Pendapatan PPN Dalam Negeri		93.250.739.828.307	93.250.739.828.307	74.847.101.151.107	18.403.638.677.200
411212	Pendapatan PPN Impor		53.916.112.044.013	53.916.112.044.013	43.090.899.108.883	10.825.212.935.130
411219	Pendapatan PPN Lainnya		273.200.251.652	273.200.251.652	301.682.253.683	(28.482.002.031)
41122	**Pendapatan PPNBM**		**7.086.721.709.023**	**7.086.721.709.023**	**4.796.177.055.038**	**2.290.544.653.985**
411221	Pendapatan PPNBM Dalam Negeri		4.650.928.817.095	4.650.928.817.095	3.094.815.644.266	1.556.113.172.829
411222	Pendapatan PPNBM Impor		2.414.414.459.186	2.414.414.459.186	1.701.579.806.822	712.834.652.364
411229	Pendapatan PPNBM Lainnya		21.378.432.742	21.378.432.742	(218.396.050)	21.596.828.792
4113	**Pajak Bumi dan Bangunan**	**22.025.800.000.000**	**23.723.546.008.858**	**1.697.746.008.858**	**20.858.516.906.183**	**2.865.029.102.675**
41131	**Pajak Bumi dan Bangunan**	-	**23.723.546.008.858**	**23.723.546.008.858**	**20.858.516.906.183**	**2.865.029.102.675**
411311	PBB Pedesaan		1.727.077.097.787	1.727.077.097.787	5.787.388.608.908	(4.060.311.511.121)
411312	PBB Perkotaan		4.864.149.278.212	4.864.149.278.212	3.799.392.031.646	1.064.757.246.566
411313	PBB Perkebunan		402.743.010.373	402.743.010.373	151.243.483.998	251.499.526.375
411314	PBB Kehutanan		127.468.299.103	127.468.299.103	80.999.381.619	46.468.917.484
411315	PBB Pertambangan		16.572.300.701.292	16.572.300.701.292	10.520.190.598.335	6.052.110.102.957
411319	PBB Lainnya		29.807.622.091	29.807.622.091	519.302.801.677	(489.495.179.586)
4114	**Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	**3.965.500.000.000**	**5.953.378.541.995**	**1.987.878.541.995**	**3.184.469.880.249**	**2.768.908.661.746**
41141	**Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)**	-	**5.953.378.541.995**	**5.953.378.541.995**	**3.184.469.880.249**	**2.768.908.661.746**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE MAP	URAIAN MAP	TAHUN ANGGARAN 2007			REALISASI 2006	KENAIKAN (PENURUNAN)
		ANGGARAN (UU APBN-P TA 2007)	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 4 - 6
411411	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)		5.953.378.541.995	5.953.378.541.995	3.184.469.880.249	2.768.908.661.746
4115	**Pendapatan Cukai**	**42.034.700.000.000**	**44.679.463.855.018**	**2.644.763.855.018**	**37.772.132.887.314**	**6.907.330.967.704**
41151	**Pendapatan Cukai**	-	**44.679.463.855.018**	**44.679.463.855.018**	**37.772.132.887.314**	**6.907.330.967.704**
411511	Pendapatan Cukai Hasil Tembakau		43.524.867.297.735	43.524.867.297.735	37.059.432.537.507	6.465.434.760.228
411512	Pendapatan Cukai Ethyl Alkohol		433.974.666.059	433.974.666.059	136.058.679.320	297.915.986.739
411513	Pendapatan Cukai Minuman Mengandung Ethyl Alkohol		687.911.073.062	687.911.073.062	568.055.790.971	119.855.282.091
411514	Pendapatan Denda Administrasi Cukai		4.835.506.974	4.835.506.974	2.130.062.644	2.705.444.330
411519	Pendapatan Cukai Lainnya		27.875.311.188	27.875.311.188	6.455.816.872	21.419.494.316
4116	**Pendapatan Pajak Lainnya**	**2.719.500.000.000**	**2.737.727.426.269**	**18.227.426.269**	**2.287.430.734.714**	**450.296.691.555**
41161	**Pendapatan Pajak Lainnya**	-	**2.620.026.551.479**	**2.620.026.551.479**	**2.228.586.928.889**	**391.439.622.590**
411611	Pendapatan Bea Meterai		1.266.055.294.104	1.266.055.294.104	1.291.112.425.091	(25.057.130.987)
411612	Pendapatan Dari Penjualan Benda Meterai		1.336.085.150.622	1.336.085.150.622	930.326.580.247	405.758.570.375
411619	Pendapatan Pajak Tidak Langsung Lainnya		17.886.106.753	17.886.106.753	7.147.923.551	10.738.183.202
41162	**Pendapatan Bunga Penagihan Pajak**	-	**117.700.874.790**	**117.700.874.790**	**58.843.805.825**	**58.857.068.965**
411621	Pendapatan Bunga Penagihan PPh		84.368.751.933	84.368.751.933	40.318.952.702	44.049.799.231
411622	Pendapatan Bunga Penagihan PPN		32.673.927.294	32.673.927.294	19.926.730.907	12.747.196.387
411623	Pendapatan Bunga Penagihan PPNBM		386.049.001	386.049.001	(1.406.435.928)	1.792.484.929
411624	Pendapatan Bunga Penagihan PTLL		272.146.562	272.146.562	4.558.144	267.588.418
412	**Pajak Perdagangan Internasional**	**17.459.943.000.000**	**20.936.819.221.050**	**3.476.876.221.050**	**13.231.483.705.438**	**7.705.335.515.612**
4121	**Pendapatan Bea Masuk**	**14.417.600.000.000**	**16.699.443.059.175**	**2.281.843.059.175**	**12.140.401.555.427**	**4.559.041.503.748**
41211	**Pendapatan Bea Masuk**	-	**16.699.443.059.175**	**16.699.443.059.175**	**12.140.401.555.427**	**4.559.041.503.748**
412111	Pendapatan Bea Masuk		16.526.821.206.553	16.526.821.206.553	11.922.769.763.518	4.604.051.443.035
412112	Pendapatan Bea Masuk Ditanggung Pemerintah atas Hibah (SPM Nihil)		850.721.549	850.721.549	1.914.331.502	(1.063.609.953)
412113	Pendapatan Denda Administrasi Pabean		391.447.018.601	391.447.018.601	309.081.007.569	82.366.011.032
412114	Pendapatan Bea Masuk Dalam Rangka Kemudahan Impor Tujuan Ekspor		(235.420.587.568)	(235.420.587.568)	(123.003.173.217)	(112.417.414.351)
412119	Pendapatan Pabean Lainnya		15.744.700.040	15.744.700.040	29.639.626.055	(13.894.926.015)
4122	**Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor**	**3.042.343.000.000**	**4.237.376.161.875**	**1.195.033.161.875**	**1.091.082.150.011**	**3.146.294.011.864**
41221	**Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor**	-	**4.237.376.161.875**	**4.237.376.161.875**	**1.091.082.150.011**	**3.146.294.011.864**
412211	Pendapatan Pajak/Pungutan Ekspor		4.237.376.161.875	4.237.376.161.875	1.091.082.150.011	3.146.294.011.864
42	**Penerimaan Negara Bukan Pajak**	**198.253.670.829.000**	**215.119.705.411.332**	**16.866.034.582.332**	**226.950.066.385.871**	**(11.830.360.974.539)**
421	**Penerimaan Sumber Daya Alam**	**115.053.273.200.000**	**132.892.588.952.859**	**17.839.315.752.859**	**167.473.800.945.318**	**(34.581.211.992.459)**
4211	**Pendapatan Minyak Bumi**	**78.234.560.000.000**	**93.604.467.046.203**	**15.369.907.046.203**	**125.145.403.396.875**	**(31.540.936.350.672)**
421111	Pendapatan Minyak Bumi	78.234.560.000.000	93.604.459.694.458	15.369.899.694.458	125.145.403.396.875	(31.540.943.702.417)
421112	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM		7.351.745	7.351.745		7.351.745
4212	**Pendapatan Gas Alam**	**29.484.360.000.000**	**31.179.214.032.362**	**1.694.854.032.362**	**32.940.684.187.448**	**(1.761.470.155.086)**
421211	Pendapatan Gas Alam	29.484.360.000.000	31.179.214.032.362	1.694.854.032.362	32.940.684.187.448	(1.761.470.155.086)
4213	**Pendapatan Pertambangan Umum**	**4.843.253.200.000**	**5.877.885.712.092**	**1.034.632.512.092**	**6.781.369.889.324**	**(903.484.177.232)**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE MAP	URAIAN MAP	TAHUN ANGGARAN 2007			REALISASI 2006	KENAIKAN (PENURUNAN)
		ANGGARAN (UU APBN-P TA 2007)	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 4 - 6
421311	Pendapatan Iuran Tetap	59.246.200.000	540.639.312.054	481.393.112.054	171.336.260.553	369.303.051.501
421312	Pendapatan Royalti Batubara	4.784.007.000.000	5.337.246.400.038	553.239.400.038	6.610.033.628.771	(1.272.787.228.733)
4214	**Pendapatan Kehutanan**	**2.291.100.000.000**	**2.114.762.626.831**	**(176.337.373.169)**	**2.409.460.598.313**	**(294.697.971.482)**
42141	**Pendapatan Dana Reboisasi**	**1.288.000.000.000**	**1.367.864.042.187**	**79.864.042.187**	**1.690.536.332.311**	**(322.672.290.124)**
421411	Pendapatan Dana Reboisasi		1.367.864.042.187	1.367.864.042.187	1.690.536.332.311	(322.672.290.124)
42142	**Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan**	**972.100.000.000**	**670.102.746.180**	**(301.997.253.820)**	**575.439.653.644**	**94.663.092.536**
421421	Pendapatan Provisi Sumber Daya Hutan		670.102.746.180	670.102.746.180	575.439.653.644	94.663.092.536
42143	**Pendapatan Iuran Hak Pengusahaan Hutan**	**31.000.000.000**	**67.701.429.315**	**36.701.429.315**	**112.282.363.093**	**(44.580.933.778)**
421431	Pendapatan IHPH Tanaman Industri		-	-	103.267.563.893	(103.267.563.893)
421432	Pendapatan IHPH Bambu		-	-	9.014.799.200	(9.014.799.200)
421433	Pendapatan IHPH Tanaman Rotan		67.629.860.415	67.629.860.415	-	67.629.860.415
421434	Pendapatan IHPH Hutan Alam		71.568.900	71.568.900		71.568.900
42144	**Pendapatan Dana Pengamanan Hutan**	-	**392.578.194**	**392.578.194**	**25.612.016.770**	**(25.219.438.576)**
421441	Pendapatan Dana Pengamanan Hutan		392.578.194	392.578.194	25.612.016.770	(25.219.438.576)
42145	**Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi**	-	**1.960.722.005**	**1.960.722.005**	**2.150.385.547**	**(189.663.542)**
421451	Pendapatan Denda Pelanggaran Eksploitasi		1.960.722.005	1.960.722.005	2.150.385.547	(189.663.542)
42146	**Pendapatan Iuran Menangkap Satwa Liar**	-	**6.741.108.950**	**6.741.108.950**	**3.439.846.948**	**3.301.262.002**
421461	Pendapatan Iuran Menangkap, Mengambil dan Mengangkut Satwa Liar		3.987.797.936	3.987.797.936	2.776.630.808	1.211.167.128
421462	Pungutan Izin Pengusahaan Pariwisata Alam (PIPPA)		-	-	300.000	(300.000)
421465	Pungutan Masuk Obyek Wisata Alam		2.753.311.014	2.753.311.014	662876140	2090434874
421466	Iuran Hasil Usaha Pengusahaan Pariwisata Alam (IHUPA)		-	-	40000	-40000
4215	**Pendapatan Perikanan**	**200.000.000.000**	**116.259.535.371**	**(83.740.464.629)**	**196.882.873.358**	**(80.623.337.987)**
42151	**Pendapatan Perikanan**	**200.000.000.000**	116.259.535.371	(83.740.464.629)	**196.882.873.358**	**(80.623.337.987)**
421511	Pendapatan Perikanan	200.000.000.000	116.245.074.656	(83.754.925.344)	196.882.873.358	(80.637.798.702)
421512	Pendapatan Penerimaan Dana Kompensasi Pelestarian Sumber Daya Alam Kelautan		14.460.715	14.460.715	0	14460715
422	**Pendapatan Bagian Laba BUMN**	**21.800.000.000.000**	**23.222.505.531.880**	**1.422.505.531.880**	**22.973.056.234.957**	**249.449.296.923**
4221	**Pendapatan Bagian Pemerintah atas Laba BUMN**	**21.800.000.000.000**	**23.222.505.531.880**	**1.422.505.531.880**	**22.973.056.234.957**	**249.449.296.923**
42211	**Pendapatan Laba BUMN Perbankan**		**3.304.642.991.498**	**3.304.642.991.498**	**1.197.294.246.778**	**2.107.348.744.720**
422111	Pendapatan Laba BUMN Perbankan		3.304.642.991.498	3.304.642.991.498	1.197.294.246.778	2.107.348.744.720
42212	**Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan**	-	**19.917.862.540.382**	**19.917.862.540.382**	**21.775.761.988.179**	**(1.857.899.447.797)**
422121	Pendapatan Laba BUMN Non-Perbankan		19.917.862.540.382	19.917.862.540.382	2,17758E+13	-1,8579E+12
423	**Penerimaan Negara Bukan Pajak Lainnya**	**47.710.966.905.000**	**42.859.013.117.933**	**(4.851.953.787.067)**	**36.495.725.463.517**	**6.363.287.654.416**
42311	**Penjualan Hasil Produksi/Sitaan**	**8.424.198.383.000**	**4.148.228.101.298**	**(4.275.970.281.702)**	**388.908.924.399**	**3.759.319.176.899**
423111	Penjualan Hasil Pertanian, Kehutanan dan Perkebunan	3.040.379.000	15.108.471.987	12.068.092.987	17.567.426.702	(2.458.954.715)
423112	Penjualan Hasil Peternakan dan Perikanan	8.448.074.000	14.512.480.737	6.064.406.737	8.466.962.378	6.045.518.359
423113	Penjualan Hasil Tambang	6.396.603.363.000	2.852.285.708.894	(3.544.317.654.106)	117.096.670	2.852.168.612.224
423114	Penjualan Hasil Sitaan/Rampasan dan Harta Peninggalan	2.008.061.143.000	118.960.590.185	(1.889.100.552.815)	99.294.877.121	19.665.713.064

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE MAP	URAIAN MAP	TAHUN ANGGARAN 2007			REALISASI 2006	KENAIKAN (PENURUNAN)
		ANGGARAN (UU APBN-P TA 2007)	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 4 - 6
423115	Penjualan Obat-Obatan dan Hasil Farmasi Lainnya	206.253.000	1.459.933.824	1.253.680.824	1.310.875.377	149.058.447
423116	Penjualan Informasi, Penerbitan, Film, dan Hasil Cetakan Lainnya	5.047.337.000	5.654.304.739	606.967.739	4.546.474.591	1.107.830.148
423117	Penjualan Dokumen-Dokumen Pelelangan	322.678.000	5.925.594.007	5.602.916.007	8.457.383.696	(2.531.789.689)
423118	Penjualan Cadangan Beras Pemerintah Dalam Rangka Operasi Pasar Murni		1.126.389.171.093	1.126.389.171.093	194.242.022.944	932.147.148.149
423119	Penjualan Lainnya	2.469.156.000	7.931.845.832	5.462.689.832	54.905.804.920	(46.973.959.088)
42312	**Penjualan Aset**	**52.042.398.000**	**82.193.749.036**	**30.151.351.036**	**35.611.899.217**	**46.581.849.819**
423121	Penjualan Rumah, Gedung, Bangunan, dan Tanah	103.287.000	1.974.658.389	1.871.371.389	6.733.832.867	(4.759.174.478)
423122	Penjualan Kendaraan Bermotor	623.240.000	1.265.464.239	642.224.239	(31.301.675.591)	32.567.139.830
423123	Penjualan Sewa Beli	25.035.073.000	50.683.153.605	25.648.080.605	45.853.104.158	4.830.049.447
423124	Penjualan Aset Bekas Milik Asing	25.000.000.000	2.769.299.900	(22.230.700.100)	664.490.355	2.104.809.545
423129	Penjualan Aset Lainnya yang Berlebih / Rusak / Dihapuskan	1.280.798.000	25.501.172.903	24.220.374.903	13.662.147.428	11.839.025.475
42313	**Pendapatan Sewa**	**34.818.181.000**	**61.897.671.664**	**27.079.490.664**	**69.889.864.639**	**(7.992.192.975)**
423131	Sewa Rumah Dinas, Rumah Negeri	13.037.085.000	23.303.870.609	10.266.785.609	37.983.321.354	(14.679.450.745)
423132	Sewa Gedung, Bangunan, Gudang	19.358.201.000	30.783.526.905	11.425.325.905	26.193.589.334	4.589.937.571
423133	Sewa Benda-Benda Bergerak	1.862.672.000	2.661.672.986	799.000.986	2.476.482.270	185.190.716
423139	Sewa Benda-Benda Tak Bergerak Lainnya	560.223.000	5.148.601.164	4.588.378.164	3.236.471.681	1.912.129.483
42314	**Pendapatan Jasa I**	**10.780.556.083.000**	**8.943.864.512.783**	**(1.836.691.570.217)**	**7.513.299.974.785**	**1.430.564.537.998**
423141	Pendapatan Rumah Sakit dan Instansi Kesehatan Lainnya	2.306.475.918.000	145.719.523.512	(2.160.756.394.488)	211.600.340.116	(65.880.816.604)
423142	Pendapatan Tempat Hiburan/ Taman/ Museum dan Pungutan Usaha Pariwisata Alam (PUPA)	20.669.382.000	9.323.712.714	(11.345.669.286)	10.031.012.788	(707.300.074)
423143	Pendapatan Surat Keterangan, Visa/Paspor dan SIM, STNK, dan BPKB	2.352.176.070.000	2.236.077.586.999	(116.098.483.001)	1.605.974.555.579	630.103.031.420
423144	Pendapatan Hak dan Perijinan	3.406.710.346.000	4.313.477.218.034	906.766.872.034	2.959.693.622.522	1.353.783.595.512
423145	Pendapatan Sensor/Karantina, Pengawasan/Pemeriksaan	54.418.800.000	102.415.726.295	47.996.926.295	542.811.169.050	(440.395.442.755)
423146	Pendapatan Jasa Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan, Teknologi, Pendapatan BPN, Pendapatan DJBC	2.156.240.196.000	1.624.941.870.246	(531.298.325.754)	1.579.908.818.587	45.033.051.659
423147	Pendapatan Jasa Kantor Urusan Agama	67.721.100.000	56.356.444.777	(11.364.655.223)	63.425.213.320	(7.068.768.543)
423148	Pendapatan Jasa Bandar Udara, Kepelabuhanan dan Kenavigasian	414.559.438.000	402.001.459.436	(12.557.978.564)	282.181.154.941	119.820.304.495
423149	Pendapatan Jasa I Lainnya	1.584.833.000	53.550.970.770	51.966.137.770	257.674.087.882	(204.123.117.112)
42315	**Pendapatan Jasa II**	**2.261.441.591.000**	**2.086.862.409.125**	**(174.579.181.875)**	**2.294.966.137.767**	**(208.103.728.642)**
423151	Pendapatan Jasa Lembaga Keuangan (Jasa Giro)	481.826.380.000	680.590.318.369	198.763.938.369	1.021.436.208.567	(340.845.890.198)
423152	Pendapatan Jasa Penyelenggaraan Telekomunikasi	926.600.000.000	970.390.895.744	43.790.895.744	609.942.083.878	360.448.811.866
423153	Pendapatan Iuran Lelang Untuk Fakir Miskin	5.469.068.000	57.544.198	(5.411.523.802)	5.368.631.610	(5.311.087.412)
423154	Pendapatan Jasa Catatan Sipil		1.204.690	1.204.690	48.324.025	(47.119.335)
423155	Pendapatan Biaya Penagihan Pajak-Pajak Negara Dengan Surat Paksa	3.025.600.000	2.789.911.302	(235.688.698)	19.976.277.055	(17.186.365.753)
423156	Pendapatan Uang Pewarganegaraan		7.480.366.186	7.480.366.186	7.655.726.398	(175.360.212)
423157	Pendapatan Bea Lelang	28.528.711.000	56.525.794.490	27.997.083.490	57.136.315.339	(610.520.849)
423158	Pendapatan Biaya Pengurusan Piutang Negara dan Lelang Negara	52.836.688.000	38.731.986.775	(14.104.701.225)	49.467.463.876	(10.735.477.101)
423159	Pendapatan Jasa II Lainnya	763.155.144.000	330.294.387.371	(432.860.756.629)	523.935.107.019	(193.640.719.648)
42316	**Pendapatan Bukan Pajak Dari Luar Negeri**	**364.040.214.000**	**254.407.935.947**	**(109.632.278.053)**	**353.011.168.545**	**(98.603.232.598)**

DAFTAR 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE MAP	URAIAN MAP	TAHUN ANGGARAN 2007			REALISASI 2006	KENAIKAN (PENURUNAN)
		ANGGARAN (UU APBN-P TA 2007)	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 4 - 6
423161	Pendapatan Dari Pemberian Surat Perjalanan Republik Indonesia	56.648.876.000	78.334.012.493	21.685.136.493	185.571.062.374	(107.237.049.881)
423162	Pendapatan Dari Jasa Pengurusan Dokumen Konsuler	307.391.338.000	175.665.634.297	(131.725.703.703)	139.213.407.947	36.452.226.350
423169	Pendapatan Rutin Lainnya Dari Luar Negeri		408.289.157	408.289.157	28.226.698.224	(27.818.409.067)
42317	**Pendapatan Bunga**	**149.169.803.000**	**47.954.230.569**	**(101.215.572.431)**	**4.785.279.335**	**43.168.951.234**
423171	Pendapatan Bunga atas Investasi Dalam Obligasi		15.214.651	15.214.651	13.654.735	1.559.916
423172	Pendapatan BPPN atas Bunga Obligasi		555.000	555.000	126.006.789	(125.451.789)
423173	Pendapatan Bunga Dari Piutang dan Penerusan Pinjaman		94.020	94.020	-	94.020
423179	Pendapatan Bunga Lainnya	149.169.803.000	47.938.366.898	(101.231.436.102)	4.645.617.811	43.292.749.087
42318	**Pendapatan Gain On Bond Redemption**	-	**283.000.000**	**283.000.000**	**51.575.792.275**	**(51.292.792.275)**
423181	Pendapatan Gain On Bond Redemption atas Pembelian Kembali Obligasi Dalam Negeri Jangka Panjang		283.000.000	283.000.000	51.575.792.275	(51.292.792.275)
42319	**Pendapatan Premium atas Obligasi Negara**	-	**639.299.403.000**	**639.299.403.000**	**1.731.248.733.000**	**(1.091.949.330.000)**
423191	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Negeri/Rupiah		639.299.326.000	639.299.326.000	488.906.373.000	150.392.953.000
423192	Pendapatan Premium Obligasi Negara Dalam Valuta Asing		77.000	77.000	1.242.342.360.000	(1.242.342.283.000)
42321	**Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan**	**27.573.415.000**	**78.312.985.638**	**50.739.570.638**	**74.413.840.000**	**3.899.145.638**
423211	Pendapatan Legalisasi Tanda Tangan	1.057.856.000	264.371.791	(793.484.209)	422.475.326	(158.103.535)
423212	Pendapatan Pengesahan Surat di Bawah Tangan	250.459.000	56.091.300	(194.367.700)	35.490.170	20.601.130
423213	Pendapatan Uang Meja (Leges) dan Upah Pada Panitera Badan Pengadilan (Peradilan)	615.300.000	779.822.156	164.522.156	1.172.011.717	(392.189.561)
423214	Pendapatan Hasil Denda/Denda Tilang dan Sebagainya	15.759.000.000	68.983.111.866	53.224.111.866	51.435.705.260	17.547.406.606
423215	Pendapatan Ongkos Perkara	8.525.600.000	3.314.504.078	(5.211.095.922)	8.941.756.707	(5.627.252.629)
423219	Pendapatan Kejaksaan dan Peradilan Lainnya	1.365.200.000	4.915.084.447	3.549.884.447	12.406.400.820	(7.491.316.373)
42331	**Pendapatan Pendidikan**	**3.835.463.559.000**	**3.326.172.118.270**	**(509.291.440.730)**	**2.357.826.811.004**	**968.345.307.266**
423311	Pendapatan Uang Pendidikan	3.727.903.214.000	2.989.157.192.006	(738.746.021.994)	2.143.329.266.426	845.827.925.580
423312	Pendapatan Uang Ujian Masuk, Kenaikan Tingkat, dan Akhir Pendidikan	31.289.646.000	45.163.557.441	13.873.911.441	14.042.261.608	31.121.295.833
423313	Pendapatan Uang Ujian Untuk Menjalankan Praktek	15.510.000	5.488.785.750	5.473.275.750	2.569.668.471	2.919.117.279
423319	Pendapatan Pendidikan Lainnya	76.255.189.000	286.362.583.073	210.107.394.073	197.885.614.499	88.476.968.574
4234	**Pendapatan Lain-Lain**	**21.781.663.278.000**	**23.189.537.000.603**	**1.407.873.722.603**	**21.620.187.038.551**	**1.569.349.962.052**
42341	**Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran Berjalan**	**6.573.556.000**	-	**(6.573.556.000)**	-	-
423411	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat	5.114.712.000	-	(5.114.712.000)	-	-
423412	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun	1.310.027.000	-	(1.310.027.000)	-	-
423413	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni	148.817.000	-	(148.817.000)	-	-
42342	**Pendapatan Dari Penerimaan Kembali Belanja Tahun Anggaran yang Lalu**	**8.136.521.000**	**1.006.652.732.884**	**998.516.211.884**	**2.536.250.061.753**	**(1.529.597.328.869)**
423421	Penerimaan Kembali Belanja Pegawai Pusat TAYL	2.137.467.000	37.514.365.807	35.376.898.807	30.911.181.966	6.603.183.841
423422	Penerimaan Kembali Belanja Pensiun		79.976.083.317	79.976.083.317	333.131.433.548	(253.155.350.231)
423423	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Rupiah Murni TAYL	5.991.591.000	882.351.906.000	876.360.315.000	2.168.950.835.018	(1.286.598.929.018)
423424	Penerimaan Kembali Belanja Lain Pinjaman Luar Negeri TAYL	7.463.000	3.481.361.332	3.473.898.332	2.727.687.460	753.673.872
423425	Penerimaan Kembali Belanja Lainnya Hibah		1.612.577.353	1.612.577.353	411.865.258	1.200.712.095
423426	Penerimaan Kembali Belanja Swadana TAYL		1.716.439.075	1.716.439.075	117.058.503	1.599.380.572

DAFTAR 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE MAP	URAIAN MAP	TAHUN ANGGARAN 2007			REALISASI 2006	KENAIKAN (PENURUNAN)
		ANGGARAN (UU APBN-P TA 2007)	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 4 - 6
42343	**Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan BBM**	**6.176.410.000.000**	**8.831.615.131.904**	**2.655.205.131.904**	**7.328.702.216.238**	**1.502.912.915.666**
423431	Pendapatan Laba Bersih Hasil Penjualan BBM		106.266.900.432	106.266.900.432	981.337.464	105.285.562.968
423432	Pendapatan Minyak Mentah (DMO)	6.176.410.000.000	8.624.500.074.720	2.448.090.074.720	7.327.720.878.774	1.296.779.195.946
423439	Pendapatan Lainnya dari Kegiatan Hulu Migas		100.848.156.752	100.848.156.752		1,00848E+11
42344	**Pendapatan Pelunasan Piutang**	**7.851.331.349.000**	**7.886.331.574.258**	**35.000.225.258**	**7.426.686.860.621**	**459.644.713.637**
423441	Pendapatan Pelunasan Piutang Non-Bendahara	7.850.000.000.000	7.865.988.974.966	15.988.974.966	7.397.609.249.284	468.379.725.682
423442	Pendapatan Pelunasan Ganti Rugi atas Kerugian yang Diderita Oleh Negara(Masuk TP/TGR) Bendahara	1.331.349.000	20.342.599.292	19.011.250.292	29.077.611.337	(8.735.012.045)
42345	**Pembetulan Pembukuan Belanja Tahun Anggaran Berjalan**		**7.486.393**	**7.486.393**	1.095.940.230	(1.088.453.837)
423451	Pembetulan Pembukuan Belanja Rupiah Murni TAB		7.486.393	7.486.393	1.085.604.150	(1.078.117.757)
423452	Pembetulan Pembukuan Belanja Dari Pinjaman Luar Negeri TAB		-	-	4.566.280	(4.566.280)
423453	Pembetulan Pembukuan Belanja Dari Hibah TAB		-	-	5.769.800	(5.769.800)
423454	Pembetulan Pembukuan Belanja Swadana TAB		-	-	-	-
423455	Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Pajak TAB		-	-	-	-
423456	Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Bea Masuk TAB		-	-	-	-
42346	**Pembetulan Pembukuan Belanja Tahun Anggaran yang Lalu**	-	**168.530.829**	**168.530.829**	**508.527.685**	**(339.996.856)**
423461	Pembetulan Pembukuan Belanja Rupiah Murni TAYL		12.587.938	12.587.938	294.608.728	(282.020.790)
423462	Pembetulan Pembukuan Belanja Dari Pinjaman Luar Negeri TAYL		43.854.241	43.854.241	170.136.620	(126.282.379)
423463	Pembetulan Pembukuan Belanja Dari Hibah TAYL		-	-	-	-
423464	Pembetulan Pembukuan Belanja Swadana TAYL		-	-	8.469.607	(8.469.607)
423465	Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Pajak TAYL		112.034.900	112.034.900	34.693.750	77.341.150
423466	Pembetulan Pembukuan Belanja Subsidi Bea Masuk TAYL		53.750	53.750	618980	-565230
42347	**Pendapatan Lain-Lain**	**7.739.211.852.000**	**5.050.724.925.162**	**(2.688.486.926.838)**	**4.101.433.232.493**	**949.291.692.669**
423471	Penerimaan Kembali Persekot/ Uang Muka Gaji	2.299.071.000	7.578.434.980	5.279.363.980	6.885.433.961	693.001.019
423472	Penerimaan Denda Keterlambatan Penyelesaian Pekerjaan Pemerintah	1.757.643.000	42.061.163.240	40.303.520.240	51.192.229.587	(9.131.066.347)
423473	Pendapatan atas Denda Administrasi BPHTB	1.818.676.000	820.967.832	(997.708.168)	258.237.947	562.729.885
423474	Penerimaan Premi Penjaminan Perbankan Nasional		470.761.800	470.761.800	30.098.821	440.662.979
423475	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Pasar Modal DAN Lembaga Keuangan	13.000.000.000	15.909.992.277	2.909.992.277	4.327.117.213	11.582.875.064
423476	Pendapatan dari Gerakan Nasional Rehabilitasi Hutan dan Lahan (GNRHL)	5.379.915.529.000	3.878.520.930.816	(1.501.394.598.184)	5.898.000	3.878.515.032.816
423477	Pendapatan Registrasi Dokter dan Dokter Gigi	9.250.000.000	-	(9.250.000.000)	4.000.030.000	(4.000.030.000)
423478	Pendapatan dari Biaya Pengawasan HET Minyak Tanah		1.214.034.057	1.214.034.057	2.099.070.000	(885.035.943)
423479	Pendapatan Anggaran Lain-Lain	2.331.170.933.000	1.104.148.640.160	(1.227.022.292.840)	**4.032.635.116.964**	**(2.928.486.476.804)**
42348	**Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM**	-	**411.521.619.173**	**411.521.619.173**	**225.510.199.531**	**186.011.419.642**
423481	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha penyediaan dan pendistribusian BBM		358.743.915.682	358.743.915.682	217.410.494.314	141.333.421.368
423482	Pendapatan Iuran Badan Usaha dari kegiatan usaha pengangkutan Gas Bumi melalui Pipa		14.974.384.638	14.974.384.638	8.099.705.217	6.874.679.421
423483	Pendapatan Iuran Badan Usaha di Bidang Pasar Modal dan Lembaga Keuangan		37.803.318.853	37.803.318.853		37.803.318.853
42349	**Pendapatan Lain-lain II**		**2.515.000.000**	**2.515.000.000**		**2.515.000.000**
423491	Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha		2.515.000.000	2.515.000.000		2.515.000.000

DAFTAR 1

LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN NEGARA DAN HIBAH
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE MAP	URAIAN MAP	TAHUN ANGGARAN 2007			REALISASI 2006	KENAIKAN (PENURUNAN)
		ANGGARAN (UU APBN-P TA 2007)	REALISASI	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN		
1	2	3	4	5 = 4 - 3	6	7 = 4 - 6
424	**Pendapatan PNBP Lainnya I**	**13.689.430.724.000**	**14.014.361.540.394**	**324.930.816.394**	**7.483.742.079**	**14.006.877.798.315**
4241	**Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi**	**20.110.000.000**	**47.324.054.456**	**27.214.054.456**	**7.483.742.079**	**39.840.312.377**
42411	**Pendapatan Gratifikasi dan Uang Sitaan Hasil Korupsi**	**20.110.000.000**	**47.324.054.456**	**27.214.054.456**	**7.483.742.079**	**39.840.312.377**
424111	Pendapatan Uang Sitaan Hasil Korupsi yang Telah Ditetapkan Pengadilan	20.000.000.000	20.195.887.635	195.887.635	**7.375.936.569**	**12.819.951.066**
424112	Pendapatan Gratifikasi yang Ditetapkan KPK Menjadi Milik Negara	110.000.000	26.880.054.157	26.770.054.157	107.805.510	26.772.248.647
424113	Pendapatan dari pengembalian penyalahgunaan penyelenggaraan keuangan negara		300.000	300.000		300.000
424114	Pendapatan Uang Pengganti Tindak Pidana Korupsi yang ditetapkan Pengadilan		247.812.664	247.812.664		247.812.664
4242	**Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia**	**13.669.320.724.000**	**13.669.328.115.429**	**7.391.429**	-	**13.669.328.115.429**
424211	Pendapatan Bagian Pemerintah dari Sisa Surplus Bank Indonesia	13.669.320.724.000	13.669.328.115.429	7.391.429		13.669.328.115.429
4243	**Pendapatan dari Penutupan Rekening**	-	**297.709.370.509**	**297.709.370.509**	-	**297.709.370.509**
424311	Pendapatan dari Penutupan Rekening		297.709.370.509	297.709.370.509		297.709.370.509
425	**Pendapatan Badan Layanan Umum**	-	**2.131.236.268.266**	**2.131.236.268.266**	-	**2.131.236.268.266**
42511	**Pendapatan Penyediaan Barang dan Jasa Masyarakat**	-	**2.019.622.198.247**	**2.019.622.198.247**	-	**2.019.622.198.247**
425111	Pendapatan Jasa Pelayanan Rumah Sakit		1.976.405.530.760	1.976.405.530.760		1.976.405.530.760
425112	Pendapatan Jasa Pelayanan Pendidikan		15.247.309.380	15.247.309.380		15.247.309.380
425113	Pendapatan Jasa Pelayanan Tenaga, Pekerjaan, Informasi, Pelatihan dan Teknologi		12.105.531.885	12.105.531.885		12.105.531.885
425117	Pendapatan Jasa Pelayanan Pemasaran		11.310.697.084	11.310.697.084		11.310.697.084
425119	Pendapatan Jasa Penyediaan Barang dan Jasa Lainnya		4.553.129.138	4.553.129.138		4.553.129.138
42513	**Pengelolaan Dana Khusus untuk Masyarakat**	-	**111.614.070.019**	**111.614.070.019**	-	**111.614.070.019**
425131	Pendapatan Program Dana Penjaminan		12.740.174.409	12.740.174.409		12.740.174.409
425136	Pendapatan investasi		98.873.895.610	98.873.895.610		98.873.895.610
43	**Penerimaan Hibah**	**3.823.317.683.000**	**1.697.747.939.503**	**(2.125.569.743.497)**	**1.834.050.785.735**	**(136.302.846.232)**
4311	**Pendapatan Hibah Dalam Negeri**	**3.823.317.683.000**	**344.529.058**	**(3.822.973.153.942)**	**54.240.263.652**	**(53.895.734.594)**
43111	**Pendapatan Hibah Dalam Negeri**	**3.823.317.683.000**	**344.529.058**	**(3.822.973.153.942)**	**54.240.263.652**	**(53.895.734.594)**
431111	Pendapatan Hibah Dalam Negeri-Perorangan		33.481.000	33.481.000	12.982.000	20.499.000
431112	Pendapatan Hibah Dalam Negeri - Lembaga/Badan Usaha		273.181.058	273.181.058	2.435.310.356	(2.162.129.298)
431119	Pendapatan Hibah Dalam Negeri Lainnya		37.867.000	37.867.000	51.791.971.296	(51.754.104.296)
4312	**Pendapatan Hibah Luar Negeri**	-	**1.697.403.410.445**	**1.697.403.410.445**	**1.779.810.522.083**	**(82.407.111.638)**
43121	**Pendapatan Hibah Luar Negeri**	-	**1.697.403.410.445**	**1.697.403.410.445**	**1.779.810.522.083**	**(82.407.111.638)**
431211	Pendapatan Hibah Luar Negeri-Perorangan		-	-	-	-
431212	Pendapatan Hibah Luar Negeri - Bilateral		251.067.417.683	251.067.417.683	**26.869.412.948**	**224.198.004.735**
431213	Pendapatan Hibah Multilateral		1.445.596.798.554	1.445.596.798.554	**1.746.459.165.126**	**(300.862.366.572)**
431219	Pendapatan Hibah Luar Negeri Lainnya		739.194.208	739.194.208	6.481.944.009	(5.742.749.801)
	Jumlah Penerimaan	**694.087.881.512.000**	**707.806.088.304.925**	**13.718.206.792.925**	**637.987.136.507.056**	**69.818.951.797.869**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN (UU APBN-P TA 2007)	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
001	**MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT**	**176.544.779.639**	**142.519.539.584**	**703.960.285**	**141.815.579.299**	**(34.729.200.340)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	52.216.666.311	35.269.901.092	3.992.585	35.265.908.507	(16.950.757.804)
02	MAJELIS	124.328.113.327	107.249.638.492	699.967.700	106.549.670.792	(17.778.442.535)
002	**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT**	**1.367.532.577.244**	**1.074.126.082.336**	**5.381.218.836**	**1.068.744.863.500**	**(298.787.713.744)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	411.777.387.918	330.193.014.177	63.491.096	330.129.523.081	(81.647.864.837)
02	DEWAN	955.755.189.327	743.933.068.159	5.317.727.740	738.615.340.419	(217.139.848.908)
004	**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**	**1.081.867.924.090**	**847.885.710.365**	**452.323.933**	**847.433.386.432**	**(234.434.537.658)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	880.841.901.428	752.238.475.672	449.603.933	751.788.871.739	(129.053.029.689)
02	B.P.K. PUSAT	201.026.022.662	95.647.234.693	2.720.000	95.644.514.693	(105.381.507.969)
005	**MAHKAMAH AGUNG**	**2.854.856.175.949**	**2.665.172.034.039**	**1.574.582.805**	**2.663.597.451.234**	**(191.258.724.715)**
01	SEKRETARIAT MAHKAMAH AGUNG	2.201.937.787.464	2.221.212.204.873	1.379.185.599	2.219.833.019.274	17.895.231.810
02	KEPANITERAAN	87.319.721.935	61.920.248.563	43.099.111	61.877.149.452	(25.442.572.483)
03	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN UMUM	54.556.295.524	37.065.827.204	36.890.253	37.028.936.951	(17.527.358.573)
04	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN AGAMA	32.688.531.314	33.834.427.140	7.769.773	33.826.657.367	1.138.126.053
05	DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TUN	11.387.327.809	7.776.324.294	-	7.776.324.294	(3.611.003.515)
06	BADAN URUSAN ADMINISTRASI	417.119.188.895	259.880.159.044	70.270.369	259.809.888.675	(157.309.300.220)
07	BADAN DIKLAT LITBANG	36.344.601.189	31.677.526.345	-	31.677.526.345	(4.667.074.844)
08	BADAN PENGAWASAN MAHKAMAH AGUNG	13.502.721.821	11.805.316.576	37.367.700	11.767.948.876	(1.734.772.945)
006	**KEJAKSAAN AGUNG**	**1.571.837.987.952**	**1.591.125.497.463**	**319.437.847**	**1.590.806.059.616**	**18.968.071.664**
01	KEJAKSAAN AGUNG	1.571.837.987.952	1.591.125.497.463	319.437.847	1.590.806.059.616	18.968.071.664
007	**SEKRETARIAT NEGARA**	**1.435.630.449.121**	**1.175.412.019.070**	**913.000.947**	**1.174.499.018.123**	**(261.131.430.998)**
01	SEKRETARIAT NEGARA	797.329.404.237	649.890.665.039	233.801.020	649.656.864.019	(147.672.540.218)
02	SEKRETARIAT KABINET	22.189.742.913	18.789.134.186		18.789.134.186	(3.400.608.727)
03	RUMAH TANGGA KEPRESIDENAN	374.786.200.793	326.356.000.751	62.228.421	326.293.772.330	(48.492.428.463)
04	SEKRETARIAT WAKIL PRESIDEN	172.101.147.310	108.409.121.350	616.355.906	107.792.765.444	(64.308.381.866)
05	SEKRETARIAT MILITER	18.003.629.094	17.660.626.822	615.600	17.660.011.222	(343.617.872)
06	PASUKAN PENGAMANAN PRESIDEN	51.220.324.773	54.306.470.922		54.306.470.922	3.086.146.149
010	**DEPARTEMEN DALAM NEGERI**	**3.892.629.148.068**	**3.118.860.545.046**	**668.651.691**	**3.118.191.893.355**	**(774.437.254.713)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	363.534.332.290	313.642.417.577	597.685.130	313.044.732.447	(50.489.599.843)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	63.524.393.775	39.588.848.258	189.600	39.588.658.658	(23.935.735.117)
03	DITJEN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK	103.427.796.631	88.260.216.084	2.183.099	88.258.032.985	(15.169.763.646)
04	DITJEN PEMERINTAHAN UMUM	135.839.272.797	111.597.140.405	367	111.597.140.038	(24.242.132.759)
05	DITJEN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA	1.939.714.192.457	1.746.293.237.493	1.692.750	1.746.291.544.743	(193.422.647.714)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN (UU APBN-P TA 2007)	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
06	DITJEN BINA PEMBANGUNAN DAERAH	273.378.432.050	277.563.054.889	6.395.840	277.556.659.049	4.178.226.999
07	DITJEN OTONOMI DAERAH	486.545.271.306	190.859.598.267	-	190.859.598.267	(295.685.673.039)
08	DITJEN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	306.093.410.695	215.911.438.739	17.747.583	215.893.691.156	(90.199.719.539)
09	DITJEN BINA ADMINISTRASI KEUANGAN DAERAH	109.212.922.572	34.165.991.250	13.131.300	34.152.859.950	(75.060.062.622)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	30.200.515.290	24.710.110.974	17.323.114	24.692.787.860	(5.507.727.430)
12	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN	81.158.608.204	76.268.491.110	12.302.908	76.256.188.202	(4.902.420.002)
011	**DEPARTEMEN LUAR NEGERI**	**4.891.085.467.305**	**3.377.563.920.144**	**1.350.411.875**	**3.376.213.508.269**	**(1.514.871.959.036)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	4.432.090.540.179	3.048.066.483.803	321.058.070	3.047.745.425.733	(1.384.345.114.446)
02	DITJEN ASIA PASIFIK DAN AFRIKA	21.466.088.842	20.367.411.026	111.988.745	20.255.422.281	(1.210.666.561)
03	DITJEN AMERIKA DAN EROPA	19.961.755.105	15.671.299.979	202.692.798	15.468.607.181	(4.493.147.924)
04	DITJEN KERJASAMA ASEAN	14.731.179.648	13.334.307.273	91.518.214	13.242.789.059	(1.488.390.589)
05	DIREKTORAT JENDERAL MULTILATERAL	299.453.498.550	206.537.001.275	78.088.068	206.458.913.207	(92.994.585.343)
06	DIREKTORAT JENDERAL INFORMASI DAN DIPLOMASI PUBLIK	25.285.545.252	19.446.101.254	92.022.393	19.354.078.861	(5.931.466.391)
07	DIREKTORAT JENDERAL HUKUM DAN PERJANJIAN INTERNASIONAL	25.323.770.557	16.324.326.130	99.820.477	16.224.505.653	(9.099.264.904)
08	DIREKTORAT JENDERAL PROTOKOL DAN KONSULER	27.133.203.695	15.565.114.974	109.424.137	15.455.690.837	(11.677.512.858)
09	INSPEKTORAT JENDERAL	14.456.203.019	12.406.370.183	209.146.743	12.197.223.440	(2.258.979.579)
11	BADAN PENGKAJIAN DAN PENGEMBANGAN KEBIJAKAN	11.183.682.459	9.845.504.247	34.652.230	9.810.852.017	(1.372.830.442)
012	**DEPARTEMEN PERTAHANAN**	**29.773.230.211.694**	**30.611.147.947.963**	-	**30.611.147.947.963**	**837.917.736.269**
01	DEPARTEMEN PERTAHANAN	5.691.846.152.606			-	(5.691.846.152.606)
21	MARKAS BESAR TNI	4.158.223.937.025			-	(4.158.223.937.025)
22	MARKAS BESAR TNI AD	12.165.976.639.228			-	(12.165.976.639.228)
23	MARKAS BESAR TNI AL	4.443.940.492.841			-	(4.443.940.492.841)
24	MARKAS BESAR TNI AU	3.313.242.989.994			-	(3.313.242.989.994)
013	**DEPARTEMEN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI**	**3.780.351.535.229**	**3.576.350.372.128**	**2.025.290.125**	**3.574.325.082.003**	**(206.026.453.226)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	3.116.792.716.592	3.040.758.393.467	1.210.961.917	3.039.547.431.550	(77.245.285.042)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	18.839.768.040	18.592.360.274	8.448	18.592.351.826	(247.416.214)
03	DITJEN ADMINISTRASI HUKUM UMUM	53.821.283.863	46.419.049.258	255.732	46.418.793.526	(7.402.490.337)
05	DITJEN PEMASYARAKATAN	143.658.727.809	149.045.333.062	5.514.564	149.039.818.498	5.381.090.689
06	DITJEN IMIGRASI	273.913.556.619	170.083.108.395	623.118.351	169.459.990.044	(104.453.566.575)
07	DITJEN HAK ATAS KEKAYAAN INTELEKTUAL	50.713.489.307	49.897.959.837	3.898.996	49.894.060.841	(819.428.466)
08	DITJEN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	37.476.013.154	29.063.609.451	82.034.662	28.981.574.789	(8.494.438.365)
09	DITJEN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA	26.593.156.034	21.519.305.850		21.519.305.850	(5.073.850.184)
10	BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL	39.842.318.343	34.970.216.135	86.052.255	34.884.163.880	(4.958.154.463)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN (UU APBN-P TA 2007)	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANAN HAM	18.700.505.468	16.001.036.399	13.445.200	15.987.591.199	(2.712.914.269)
015	**DEPARTEMEN KEUANGAN**	**8.883.242.404.658**	**7.008.849.602.572**	**9.650.763.684**	**6.999.198.838.888**	**(1.884.043.565.770)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	586.880.795.211	570.503.726.830	65.468.714	570.438.258.116	(16.442.537.095)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	60.623.336.692	53.707.119.919	119.266.650	53.587.853.269	(7.035.483.423)
03	DITJEN ANGGARAN	64.148.924.365	46.759.375.265	20.274.318	46.739.100.947	(17.409.823.418)
04	DITJEN PAJAK	4.301.483.615.296	3.823.069.533.071	7.461.973.982	3.815.607.559.089	(485.876.056.207)
05	DITJEN BEA DAN CUKAI	2.003.684.410.099	1.138.858.518.925	497.135.496	1.138.361.383.429	(865.323.026.670)
06	DITJEN PERIMBANGAN KEUANGAN	173.375.869.963	32.042.169.900	108.632.253	31.933.537.647	(141.442.332.316)
07	DITJEN PENGELOLAAN UTANG	53.197.238.471	44.050.808.642	4.890.018	44.045.918.624	(9.151.319.847)
08	DITJEN PERBENDAHARAAN	1.071.722.512.722	826.797.263.484	771.692.030	826.025.571.454	(245.696.941.268)
09	DITJEN KEKAYAAN NEGARA	250.388.077.653	227.423.304.633	141.578.406	227.281.726.227	(23.106.351.426)
10	BADAN PENGAWAS PASAR MODAL DAN LEMBAGA KEUANGAN	94.896.920.114	77.958.960.230	340.012.991	77.618.947.239	(17.277.972.875)
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PELATIHAN KEUANGAN	132.935.484.564	110.097.817.657	81.958.526	110.015.859.131	(22.919.625.433)
12	BADAN KEBIJAKAN FISKAL	89.905.219.508	57.581.004.016	37.880.300	57.543.123.716	(32.362.095.792)
018	**DEPARTEMEN PERTANIAN**	**8.078.186.182.181**	**6.652.864.240.335**	**120.574.266.489**	**6.532.289.973.846**	**(1.545.896.208.335)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.341.123.017.719	649.032.416.629	262.984.993	648.769.431.636	(692.353.586.083)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	51.444.521.266	33.606.126.277	18.671.659	33.587.454.618	(17.857.066.648)
03	DITJEN TANAMAN PANGAN	2.200.838.002.474	1.951.832.170.125	435.492.325	1.951.396.677.800	(249.441.324.674)
04	DITJEN HOLTIKULTURA	428.887.075.615	411.365.833.706	26.915.000	411.338.918.706	(17.548.156.909)
05	DITJEN PERKEBUNAN	494.793.068.662	452.787.765.935	182.781.517	452.604.984.418	(42.188.084.244)
06	DITJEN PETERNAKAN	623.440.143.687	632.605.483.389	694.989.626	631.910.493.763	8.470.350.076
07	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERTANIAN	296.409.370.228	280.217.953.922	182.516.458	280.035.437.464	(16.373.932.764)
08	DITJEN PENGELOLAAN LAHAN DAN AIR	136.019.722.272	106.035.200.835	68.647.700	105.966.553.135	(30.053.169.137)
09	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTANIAN	747.565.530.749	694.564.116.121	1.796.179.637	692.767.936.484	(54.797.594.265)
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA PERTANIAN	875.338.533.183	617.781.080.265	1.322.204.124	616.458.876.141	(258.879.657.042)
11	BADAN KETAHANAN PANGAN	528.774.040.000	512.669.336.139	115.278.622.483	397.390.713.656	(131.383.326.344)
12	BADAN KARANTINA PERTANIAN	353.553.156.327	310.366.756.992	304.260.967	310.062.496.025	(43.490.660.302)
019	**DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN**	**1.743.359.182.558**	**1.484.836.986.992**	**300.427.318**	**1.484.536.559.674**	**(258.822.622.884)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	380.995.123.161	341.481.800.627	138.039.793	341.343.760.834	(39.651.362.327)
02	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI AGRO DAN KIMIA	171.012.701.006	157.847.624.891	11.992.118	157.835.632.773	(13.177.068.233)
03	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI LOGAM, MESIN,TEKSTIL DAN ANEKA	321.384.124.232	239.050.261.557	185.176	239.050.076.381	(82.334.047.851)
04	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI ALAT TRANSPORTASI DAN TELEMATIKA	87.600.171.666	82.949.582.833	6.796	82.949.576.037	(4.650.595.629)
05	DIREKTORAT JENDERAL INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	433.742.021.554	353.119.769.395	42.861.074	353.076.908.321	(80.665.113.233)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN (UU APBN-P TA 2007)	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
06	INSPEKTORAT JENDERAL	18.470.941.193	18.731.063.947	3.256.930	18.727.807.017	256.865.824
07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN INDUSTRI	330.154.099.746	291.656.883.742	104.085.431	291.552.798.311	(38.601.301.435)
020	**DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL**	**5.963.361.943.593**	**5.142.594.076.400**	**1.010.727.000**	**5.141.583.349.400**	**(821.778.594.193)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	649.451.154.175	530.092.080.485	9.371.364	530.082.709.121	(119.368.445.054)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	40.958.672.973	37.813.855.354	60.123.600	37.753.731.754	(3.204.941.219)
04	DITJEN MINYAK DAN GAS BUMI	443.265.980.053	330.201.614.135	3.341.100	330.198.273.035	(113.067.707.018)
05	DITJEN LISTRIK DAN PEMANFAATAN ENERGI	3.181.912.344.427	2.751.706.370.018	170.955.430	2.751.535.414.588	(430.376.929.839)
06	DITJEN MINERAL, BATUBARA DAN PANAS BUMI	341.293.694.917	258.806.914.079	7.669.636	258.799.244.443	(82.494.450.474)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN ESDM	588.827.198.158	536.783.388.449	266.200.103	536.517.188.346	(52.310.009.812)
12	BADAN DIKLAT ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	327.911.885.470	334.917.319.783	310.751.469	334.606.568.314	6.694.682.844
13	BADAN GEOLOGI	389.741.013.420	362.272.534.097	182.314.298	362.090.219.799	(27.650.793.621)
022	**DEPARTEMEN PERHUBUNGAN**	**10.091.591.169.313**	**9.073.461.287.705**	**3.040.447.496**	**9.070.420.840.209**	**(1.021.170.329.104)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	250.875.769.860	223.553.063.468	153.166.749	223.399.896.719	(27.475.873.141)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	34.341.996.312	34.482.266.498	1.520.228	34.480.746.270	138.749.958
03	DITJEN PERHUBUNGAN DARAT	1.185.999.227.831	1.235.730.573.785	9.147.610	1.235.721.426.175	49.722.198.344
04	DITJEN PERHUBUNGAN LAUT	2.689.690.132.787	2.427.994.808.582	1.124.553.384	2.426.870.255.198	(262.819.877.589)
05	DITJEN PERHUBUNGAN UDARA	2.147.467.201.817	2.180.054.642.907	656.111.688	2.179.398.531.219	31.931.329.402
08	DIREKTORAT JENDERAL PERKERETAAPIAN	2.742.354.922.929	2.173.923.032.954	858.046.083	2.173.064.986.871	(569.289.936.058)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	67.855.153.250	67.985.716.824	98.017.131	67.887.699.693	32.546.443
12	BADAN PENDIDIKAN DAN LATIHAN PERHUBUNGAN	735.500.430.218	538.244.375.782	125.667.382	538.118.708.400	(197.381.721.818)
13	BADAN SAR NASIONAL	237.506.334.307	191.492.806.905	14.217.241	191.478.589.664	(46.027.744.643)
023	**DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL**	**40.074.346.474.075**	**40.524.417.671.567**	**48.620.811.529**	**40.475.796.860.038**	**401.450.385.963**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.830.707.126.081	1.929.241.715.296	993.754.322	1.928.247.960.974	97.540.834.893
02	INSPEKTORAT JENDERAL	97.049.462.814	95.717.660.435	9.037	95.717.651.398	(1.331.811.416)
03	DITJEN MANAJEMEN PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH	18.124.944.628.806	19.385.224.845.378	11.600.108.691	19.373.624.736.687	1.248.680.107.881
04	DITJEN PENDIDIKAN TINGGI	11.907.374.876.595	10.678.286.222.010	11.567.189.666	10.666.719.032.344	(1.240.655.844.251)
05	DITJEN PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH	2.216.263.844.949	2.287.368.553.737	533.310.461	2.286.835.243.276	70.571.398.327
08	DITJEN PENINGKATAN MUTU PENDIDIK DAN TENAGA KEPENDIDIKAN	5.089.575.174.708	5.310.169.267.494	10.504.612.412	5.299.664.655.082	210.089.480.374
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DIKBUD	808.431.360.122	838.409.407.217	13.421.826.940	824.987.580.277	16.556.220.155
024	**DEPARTEMEN KESEHATAN**	**16.880.092.388.137**	**15.537.452.930.161**	**6.841.015.452**	**15.530.611.914.709**	**(1.349.480.473.428)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.924.834.903.254	1.602.411.963.522	2.227.210.106	1.600.184.753.416	(324.650.149.838)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	47.899.472.570	36.710.658.912	-	36.710.658.912	(11.188.813.658)
03	DITJEN BINA KESEHATAN MASYARAKAT	2.685.322.541.487	2.314.347.001.861	2.728.195.014	2.311.618.806.847	(373.703.734.640)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN (UU APBN-P TA 2007)	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
04	DITJEN BINA PELAYANAN MEDIK	8.566.254.397.576	8.464.306.588.645	568.711.336	8.463.737.877.309	(102.516.520.267)
05	DITJEN PENGENDALIAAN PENYAKIT DAN PENYEHATAN LINGKUNGAN	1.469.168.127.902	1.264.178.513.363	665.020.965	1.263.513.492.398	(205.654.635.504)
07	DITJEN BINA KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN	880.986.574.991	643.248.800.124	33.161.363	643.215.638.761	(237.770.936.230)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	249.881.190.877	243.501.815.139	61.684.684	243.440.130.455	(6.441.060.422)
12	BADAN PENGEMBANGAN DAN PEMBERDAYAAN SDM KESEHATAN	1.055.745.179.480	968.747.588.595	557.031.984	968.190.556.611	(87.554.622.869)
025	**DEPARTEMEN AGAMA**	**13.376.473.550.997**	**13.335.799.009.727**	**36.854.074.711**	**13.298.944.935.016**	**(77.528.615.981)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	11.729.858.736.354	11.963.964.283.892	36.819.777.750	11.927.144.506.142	197.285.769.788
02	INSPEKTORAT JENDERAL	50.033.180.774	43.945.011.616		43.945.011.616	(6.088.169.158)
03	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT ISLAM	99.318.252.247	97.306.727.207	139.580	97.306.587.627	(2.011.664.620)
04	DITJEN PENDIDIKAN ISLAM	1.143.999.207.848	890.972.261.933	10.307.902	890.961.954.031	(253.037.253.817)
05	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KRISTEN	37.925.141.587	39.184.542.591		39.184.542.591	1.259.401.004
06	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT KHATOLIK	30.710.061.202	30.265.092.974	4.750.564	30.260.342.410	(449.718.792)
07	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT HINDU	23.447.882.423	24.931.336.335	18.654.519	24.912.681.816	1.464.799.393
08	DITJEN BIMBINGAN MASYARAKAT BUDDHA	18.059.903.938	19.460.410.159	2.513	19.460.407.646	1.400.503.708
09	DITJEN PENYELENGGARAAN HAJI DAN UMRAH	125.919.148.041	124.778.597.346	2.340	124.778.595.006	(1.140.553.035)
11	BADAN PENELITIAN PENGEMBANGAN DAN PENDIDIKAN PELATIHAN	117.202.036.583	100.990.745.674	439.543	100.990.306.131	(16.211.730.452)
026	**DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI**	**2.682.696.771.595**	**2.452.407.665.933**	**1.263.092.963**	**2.451.144.572.970**	**(231.552.198.625)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	366.590.491.537	330.062.378.852	49.866.918	330.012.511.934	(36.577.979.603)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	37.080.504.929	36.731.787.532	172	36.731.787.360	(348.717.569)
03	DITJEN PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA LUAR NEGERI	122.254.685.775	114.363.711.781	42.235.334	114.321.476.447	(7.933.209.328)
04	DITJEN PEMBINAAN DAN PENEMPATAN TENAGA KERJA DALAM NEGERI	298.402.859.867	250.007.977.014	1.764.086	250.006.212.928	(48.396.646.939)
05	DITJEN PEMBINAAN HUBUNGAN INDUSTRIAL & JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJ	85.762.841.005	74.570.210.010	30.148.512	74.540.061.498	(11.222.779.507)
06	DITJEN PEMBINAAN PENYIAPAN PERMUKIMAN DAN PENEMPATAN TRANSMIGRASI	562.806.448.607	539.211.309.100	749.400.560	538.461.908.540	(24.344.540.067)
07	DITJEN PEMBINAAN PENGEMBANGAN MASYARAKAT DAN KAWASAN TRANSMIGRASI	502.622.886.563	490.265.520.299	174.901.032	490.090.619.267	(12.532.267.296)
08	DITJEN PEMBINAAN PENGAWASAN KETENAGAKERJAAN	79.910.747.865	69.982.136.361	48.935.069	69.933.201.292	(9.977.546.573)
11	BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN INFORMASI	49.033.159.294	47.302.767.816	27.069.675	47.275.698.141	(1.757.461.153)
13	DITJEN PEMBINAAN PELATIHAN DAN PRODUKTIVITAS	578.232.146.153	499.909.867.168	138.771.605	499.771.095.563	(78.461.050.590)
027	**DEPARTEMEN SOSIAL**	**3.040.949.272.096**	**2.767.892.000.718**	**1.861.448.147**	**2.766.030.552.571**	**(274.918.719.525)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	157.065.717.133	134.590.831.225	105.297.914	134.485.533.311	(22.580.183.822)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	11.960.315.809	11.373.457.944		11.373.457.944	(586.857.865)
03	DITJEN PEMBERDAYAAN SOSIAL	738.405.595.729	719.387.654.098	624.735.274	718.762.918.824	(19.642.676.905)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN (UU APBN-P TA 2007)	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
04	DITJEN PELAYANAN DAN REHABILITASI SOSIAL	606.470.580.035	597.360.538.451	274.702.695	597.085.835.756	(9.384.744.279)
05	DITJEN BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.386.454.544.453	1.165.107.285.878	256.610.834	1.164.850.675.044	(221.603.869.409)
11	BADAN PENDIDIKAN DAN PENELITIAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	140.592.518.936	140.072.233.122	600.101.430	139.472.131.692	(1.120.387.244)
029	**DEPARTEMEN KEHUTANAN**	**3.564.826.941.607**	**1.763.375.906.591**	**2.373.023.815**	**1.761.002.882.776**	**(1.803.824.058.831)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	1.762.469.934.921	433.750.881.775	212.448.370	433.538.433.405	(1.328.931.501.516)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	30.723.463.104	24.748.318.701	43.910.700	24.704.408.001	(6.019.055.103)
03	DITJEN BINA PRODUKSI KEHUTANAN	288.238.393.458	193.613.755.343	160.432.501	193.453.322.842	(94.785.070.616)
04	DITJEN REHABILITASI LAHAN DAN PERHUTANAN SOSIAL	312.943.322.571	240.680.961.717	471.449.302	240.209.512.415	(72.733.810.156)
05	DITJEN PERLINDUNGAN HUTAN DAN KONSERVASI ALAM	647.077.916.688	518.689.136.429	788.869.971	517.900.266.458	(129.177.650.230)
06	BADAN PLANOLOGI KEHUTANAN	306.594.711.845	186.664.923.409	284.210.071	186.380.713.338	(120.213.998.507)
07	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KEHUTANAN	216.779.199.020	165.227.929.217	411.702.900	164.816.226.317	(51.962.972.703)
032	**DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN**	**3.001.438.264.637**	**2.344.115.041.607**	**1.003.705.115**	**2.343.111.336.492**	**(658.326.928.145)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	362.712.955.420	331.706.507.087	164.501.000	331.542.006.087	(31.170.949.333)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	30.977.522.216	31.816.572.347	740.000	31.815.832.347	838.310.131
03	DITJEN PERIKANAN TANGKAP	574.679.351.396	483.326.023.565	184.350.219	483.141.673.346	(91.537.678.050)
04	DITJEN PERIKANAN BUDIDAYA	555.051.794.957	321.711.858.154	234.909.083	321.476.949.071	(233.574.845.886)
05	DITJEN PENGAWASAN DAN PENGENDALIAN SUMBER DAYA KELAUTAN & PERIKANAN	229.998.526.615	186.860.832.817	13.662.775	186.847.170.042	(43.151.356.573)
06	DITJEN PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PERIKANAN (P2HP)	180.160.604.201	150.073.536.969	23.391.671	150.050.145.298	(30.110.458.903)
07	DITJEN KELAUTAN, PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL (KP3K)	623.832.557.088	497.151.925.730	114.015.770	497.037.909.960	(126.794.647.128)
11	BADAN RISET KELAUTAN DAN PERIKANAN (BRKP)	148.094.765.307	136.406.327.601	105.947.719	136.300.379.882	(11.794.385.425)
12	BADAN PENGEMBANGAN SDM KELAUTAN DAN PERIKANAN	295.930.187.436	205.061.457.337	162.186.878	204.899.270.459	(91.030.916.977)
033	**DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM**	**24.891.415.293.706**	**22.775.149.363.170**	**5.685.681.269**	**22.769.463.681.901**	**(2.121.951.611.805)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	370.843.059.451	296.275.197.175	36.401.279	296.238.795.896	(74.604.263.555)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	33.648.142.748	27.590.898.953	147.717.126	27.443.181.827	(6.204.960.921)
03	DITJEN PENATAAN RUANG	208.501.828.903	210.123.121.544	5.097.842	210.118.023.702	1.616.194.799
04	DITJEN BINA MARGA	9.724.617.133.862	9.277.007.011.283	2.398.419.324	9.274.608.591.959	(450.008.541.903)
05	DITJEN CIPTA KARYA	5.607.303.599.381	5.416.025.582.302	321.025.387	5.415.704.556.915	(191.599.042.466)
06	DITJEN SUMBER DAYA AIR	8.441.440.213.269	7.117.157.023.671	2.466.488.792	7.114.690.534.879	(1.326.749.678.390)
11	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN	285.559.269.811	241.621.829.877	191.559.137	241.430.270.740	(44.128.999.071)
13	BADAN PEMBINAAN KONSTRUKSI DAN SUMBER DAYA MANUSIA	163.923.042.903	147.060.025.135	118.972.382	146.941.052.753	(16.981.990.150)
14	BADAN PENGELOLA JALAN TOL	33.585.770.075	21.441.665.619		21.441.665.619	(12.144.104.456)
15	BADAN PENDUKUNG PENGELOLAAN SISTEM PENYEDIAAN AIR MINUM	21.993.233.302	20.847.007.611		20.847.007.611	(1.146.225.691)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN (UU APBN-P TA 2007)	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
034	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN**	**180.900.203.186**	**179.979.267.367**	**51.898.804**	**179.927.368.563**	**(972.834.623)**
01	MENKO BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	180.900.203.186	179.979.267.367	51.898.804	179.927.368.563	(972.834.623)
035	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN**	**128.764.375.870**	**58.926.778.613**	**263.810.459**	**58.662.968.154**	**(70.101.407.716)**
01	MENKO BIDANG PEREKONOMIAN	128.764.375.870	58.926.778.613	263.810.459	58.662.968.154	(70.101.407.716)
036	**KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT**	**94.112.897.174**	**92.263.288.559**	**167.276**	**92.263.121.283**	**(1.849.775.891)**
01	MENKO BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	94.112.897.174	92.263.288.559	167.276	92.263.121.283	(1.849.775.891)
040	**DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA**	**923.043.212.787**	**883.260.620.845**	**445.415.428**	**882.815.205.417**	**(40.228.007.370)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	244.907.846.772	239.896.977.070	48.750.035	239.848.227.035	(5.059.619.737)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	16.074.228.774	15.526.360.586		15.526.360.586	(547.868.188)
03	DIREKTORAT JENDERAL NILAI BUDAYA, SENI DAN PERFILMAN	127.568.457.802	122.852.889.214	7.948.487	122.844.940.727	(4.723.517.075)
04	DIREKTORAT JENDERAL SEJARAH DAN PURBAKALA	159.909.338.138	148.474.490.607	265.467.332	148.209.023.275	(11.700.314.863)
05	DIREKTORAT JENDERAL PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	80.948.265.504	75.081.422.662		75.081.422.662	(5.866.842.842)
06	DIREKTORAT JENDERAL PEMASARAN	157.222.157.867	154.253.237.744		154.253.237.744	(2.968.920.123)
10	BADAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	136.412.917.930	127.175.242.962	123.249.574	127.051.993.388	(9.360.924.542)
041	**KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA**	**316.250.994.317**	**261.949.890.005**	**103.486.314**	**261.846.403.691**	**(54.404.590.626)**
01	KEMENTERIAN BADAN USAHA MILIK NEGARA	316.250.994.317	261.949.890.005	103.486.314	261.846.403.691	(54.404.590.626)
042	**KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI**	**433.198.813.357**	**437.301.919.182**	**153.890.175**	**437.148.029.007**	**3.949.215.650**
01	MENTERI NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	433.198.813.357	437.301.919.182	153.890.175	437.148.029.007	3.949.215.650
043	**KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP**	**491.669.114.049**	**414.338.587.454**	**111.475.317**	**414.227.112.137**	**(77.442.001.912)**
01	MENTERI NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	491.669.114.049	414.338.587.454	111.475.317	414.227.112.137	(77.442.001.912)
044	**KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM**	**1.395.050.603.110**	**1.280.888.249.602**	**95.617.773**	**1.280.792.631.829**	**(114.257.971.281)**
01	MENTERI NEGARA KOPERASI DAN PENGUSAHA KECIL DAN MENENGAH	1.395.050.603.110	1.280.888.249.602	95.617.773	1.280.792.631.829	(114.257.971.281)
047	**KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**150.459.337.647**	**143.681.122.114**	**96.412.998**	**143.584.709.116**	**(6.874.628.531)**
01	MENTERI NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	150.459.337.647	143.681.122.114	96.412.998	143.584.709.116	(6.874.628.531)
048	**KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA**	**222.803.085.489**	**79.756.340.340**	**73.238.500**	**79.683.101.840**	**(143.119.983.649)**
01	MENTERI NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	222.803.085.489	79.756.340.340	73.238.500	79.683.101.840	(143.119.983.649)
050	**BADAN INTELIJEN NEGARA**	**965.549.075.336**	**1.048.098.530.543**	**84.588.346**	**1.048.013.942.197**	**82.464.866.861**
01	BADAN INTELIJEN NEGARA	965.549.075.336	1.048.098.530.543	84.588.346	1.048.013.942.197	82.464.866.861
051	**LEMBAGA SANDI NEGARA**	**966.742.652.032**	**1.042.717.243.985**	**319.526.252**	**1.042.397.717.733**	**75.655.065.701**
01	LEMBAGA SANDI NEGARA	966.742.652.032	1.042.717.243.985	319.526.252	1.042.397.717.733	75.655.065.701
52	**DEWAN KETAHANAN NASIONAL**	**27.168.201.849**	**27.616.339.353**	**73.553.126**	**27.542.786.227**	**374.584.378**
01	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	27.168.201.849	27.616.339.353	73.553.126	27.542.786.227	374.584.378
054	**BADAN PUSAT STATISTIK**	**1.170.502.529.374**	**1.174.142.336.511**	**577.573.568**	**1.173.564.762.943**	**3.062.233.569**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN (UU APBN-P TA 2007)	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	BADAN PUSAT STATISTIK	1.170.502.529.374	1.174.142.336.511	577.573.568	1.173.564.762.943	3.062.233.569
055	**KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS**	**374.872.295.047**	**252.662.688.598**	**57.542.995**	**252.605.145.603**	**(122.267.149.444)**
01	MENTERI NEGARA PERENCANAAN PEMBANGUNAN/BAPPENAS	374.872.295.047	252.662.688.598	57.542.995	252.605.145.603	(122.267.149.444)
056	**BADAN PERTANAHAN NASIONAL**	**2.017.687.704.823**	**1.604.223.163.951**	**1.337.446.608**	**1.602.885.717.343**	**(414.801.987.480)**
01	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.017.687.704.823	1.604.223.163.951	1.337.446.608	1.602.885.717.343	(414.801.987.480)
057	**PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**	**268.116.380.849**	**271.833.561.909**	**6.216.656**	**271.827.345.253**	**3.710.964.404**
01	PERPUSTAKAAN NASIONAL	268.116.380.849	271.833.561.909	6.216.656	271.827.345.253	3.710.964.404
059	**DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**2.341.226.775.240**	**1.021.863.802.206**	**5.848.794.995**	**1.016.015.007.211**	**(1.325.211.768.029)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL	254.702.040.644	153.967.168.642	23.828.420	153.943.340.222	(100.758.700.422)
02	INSPEKTORAT JENDERAL	23.205.336.632	16.887.216.435		16.887.216.435	(6.318.120.197)
03	DITJEN POS DAN TELEKOMUNIKASI	1.301.811.444.561	405.308.091.848	5.293.806.056	400.014.285.792	(901.797.158.769)
04	DITJEN APLIKASI TELEMATIKA	155.556.486.409	85.513.690.989	18.469.175	85.495.221.814	(70.061.264.595)
05	DITJEN SARANA KOMUNIKASI DAN DISEMINASI INFORMASI	293.565.439.561	153.504.430.033	507.664.347	152.996.765.686	(140.568.673.875)
06	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	182.108.382.626	121.865.386.569	5.026.997	121.860.359.572	(60.248.023.054)
07	BADAN INFORMASI PUBLIK	130.277.644.808	84.817.817.690		84.817.817.690	(45.459.827.118)
060	**KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA**	**18.424.174.025.383**	**19.945.448.468.601**	**23.028.541.028**	**19.922.419.927.573**	**1.498.245.902.190**
01	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	18.424.174.025.383	19.945.448.468.601	23.028.541.028	19.922.419.927.573	1.498.245.902.190
063	**BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN**	**410.959.649.581**	**378.014.664.825**	**403.564.682**	**377.611.100.143**	**(33.348.549.438)**
01	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	410.959.649.581	378.014.664.825	403.564.682	377.611.100.143	(33.348.549.438)
064	**LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL**	**136.357.611.682**	**126.333.191.757**	**29.377.125**	**126.303.814.632**	**(10.053.797.050)**
01	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL RI	136.357.611.682	126.333.191.757	29.377.125	126.303.814.632	(10.053.797.050)
065	**BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL**	**348.464.498.077**	**258.400.721.886**	**167.603.498**	**258.233.118.388**	**(90.231.379.689)**
01	SEKRETARIAT UTAMA	152.503.218.544	123.101.005.073	71.574.098	123.029.430.975	(29.473.787.569)
02	DEPUTI BIDANG PENGEMBANGAN IKLIM PENANAMAN MODAL	29.047.865.344	20.123.411.322	2.362.500	20.121.048.822	(8.926.816.522)
03	DEPUTI BIDANG PROMOSI PENANAMAN MODAL	121.652.454.479	88.697.008.167	74.992.900	88.622.015.267	(33.030.439.212)
04	DEPUTI BIDANG KERJA SAMA PENANAMAN MODAL	15.032.567.600	8.821.005.258		8.821.005.258	(6.211.562.342)
88	DEPUTI BIDANG PELAYANAN PENANAMAN MODAL	6.825.490.853	4.108.716.151		4.108.716.151	(2.716.774.702)
06	DEPUTI BIDANG PENGENDALIAN PELAKSANAAN PENANAMAN MODAL	23.402.901.256	13.549.575.915	18.674.000	13.530.901.915	(9.871.999.341)
066	**BADAN NARKOTIKA NASIONAL**	**250.433.940.098**	**234.464.590.882**	-	**234.464.590.882**	**(15.969.349.216)**
01	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	250.433.940.098	234.464.590.882	-	234.464.590.882	(15.969.349.216)
067	**KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL**	**628.724.968.579**	**384.853.734.601**	**15.086.671**	**384.838.647.930**	**(243.886.320.649)**
01	MENTERI NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	628.724.968.579	384.853.734.601	15.086.671	384.838.647.930	(243.886.320.649)
068	**BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL**	**965.777.364.954**	**994.537.009.923**	**370.906.073**	**994.166.103.850**	**28.388.738.896**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN (UU APBN-P TA 2007)	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	965.777.364.954	994.537.009.923	370.906.073	994.166.103.850	28.388.738.896
074	**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA**	**53.755.493.201**	**28.639.835.979**	**181.663.510**	**28.458.172.469**	**(25.297.320.732)**
01	KOMNASHAM	53.755.493.201	28.639.835.979	181.663.510	28.458.172.469	(25.297.320.732)
075	**BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA**	**597.595.835.102**	**610.679.726.753**	**235.862.175**	**610.443.864.578**	**12.848.029.476**
01	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	597.595.835.102	610.679.726.753	235.862.175	610.443.864.578	12.848.029.476
076	**KOMISI PEMILIHAN UMUM**	**703.514.838.000**	**469.319.016.738**	**716.716.752**	**468.602.299.986**	**(234.912.538.014)**
01	KOMISI PEMILIHAN UMUM	703.514.838.000	469.319.016.738	716.716.752	468.602.299.986	(234.912.538.014)
077	**MAHKAMAH KONSTITUSI RI**	**177.116.220.227**	**149.715.980.627**	**2.386.836**	**149.713.593.791**	**(27.402.626.436)**
01	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	177.116.220.227	149.715.980.627	2.386.836	149.713.593.791	(27.402.626.436)
078	**PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN**	**88.221.830.678**	**77.065.735.719**	**109.262.360**	**76.956.473.359**	**(11.265.357.319)**
01	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	88.221.830.678	77.065.735.719	109.262.360	76.956.473.359	(11.265.357.319)
079	**LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA**	**594.074.373.861**	**570.949.519.158**	**428.374.691**	**570.521.144.467**	**(23.553.229.394)**
01	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	594.074.373.861	570.949.519.158	428.374.691	570.521.144.467	(23.553.229.394)
080	**BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL**	**300.568.872.883**	**309.007.300.985**	**384.968.998**	**308.622.331.987**	**8.053.459.104**
01	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	300.568.872.883	309.007.300.985	384.968.998	308.622.331.987	8.053.459.104
081	**BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI**	**554.304.712.764**	**502.313.473.603**	**19.369.303**	**502.294.104.300**	**(52.010.608.464)**
01	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	554.304.712.764	502.313.473.603	19.369.303	502.294.104.300	(52.010.608.464)
082	**LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL**	**183.977.749.845**	**174.625.754.745**	**206.182.241**	**174.419.572.504**	**(9.558.177.341)**
01	L A P A N	183.977.749.845	174.625.754.745	206.182.241	174.419.572.504	(9.558.177.341)
083	**BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL**	**230.901.479.729**	**224.046.284.533**	**36.658.221**	**224.009.626.312**	**(6.891.853.417)**
01	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	230.901.479.729	224.046.284.533	36.658.221	224.009.626.312	(6.891.853.417)
084	**BADAN STANDARISASI NASIONAL**	**59.436.849.825**	**36.022.049.101**	**52.456.410**	**35.969.592.691**	**(23.467.257.134)**
01	BADAN STANDARISASI NASIONAL	59.436.849.825	36.022.049.101	52.456.410	35.969.592.691	(23.467.257.134)
085	**BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR**	**56.894.575.364**	**53.443.509.290**	**7.404.054**	**53.436.105.236**	**(3.458.470.128)**
01	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	56.894.575.364	53.443.509.290	7.404.054	53.436.105.236	(3.458.470.128)
086	**LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA**	**183.541.425.592**	**157.661.238.616**	**470.790.725**	**157.190.447.891**	**(26.350.977.701)**
01	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	183.541.425.592	157.661.238.616	470.790.725	157.190.447.891	(26.350.977.701)
087	**ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA**	**102.645.756.791**	**95.925.900.645**	**199.316.038**	**95.726.584.607**	**(6.919.172.184)**
01	ARSIP NASIONAL	102.645.756.791	95.925.900.645	199.316.038	95.726.584.607	(6.919.172.184)
088	**BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA**	**343.189.576.981**	**288.685.200.129**	**289.292.959**	**288.395.907.170**	**(54.793.669.811)**
01	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	343.189.576.981	288.685.200.129	289.292.959	288.395.907.170	(54.793.669.811)
089	**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**	**505.899.679.385**	**482.617.108.574**	**529.302.095**	**482.087.806.479**	**(23.811.872.906)**
01	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	505.899.679.385	482.617.108.574	529.302.095	482.087.806.479	(23.811.872.906)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN (UU APBN-P TA 2007)	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
090	**DEPARTEMEN PERDAGANGAN**	**1.488.907.999.981**	**1.234.340.557.950**	**755.510.769**	**1.233.585.047.181**	**(255.322.952.800)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL DEPARTEMEN PERDAGANGAN	535.905.038.036	460.048.791.967	441.739.975	459.607.051.992	(76.297.986.044)
02	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN DALAM NEGERI	332.323.196.783	282.648.087.491	35.148.014	282.612.939.477	(49.710.257.306)
03	DIREKTORAT JENDERAL PERDAGANGAN LUAR NEGERI	207.626.852.529	171.176.334.897	23.397.192	171.152.937.705	(36.473.914.824)
04	DIREKTORAT JENDERAL KERJASAMA PERDAGANGAN INTERNASIONAL	83.715.975.107	69.377.869.768	230.664.999	69.147.204.769	(14.568.770.338)
05	INSPEKTORAT JENDERAL DEPARTEMEN PERDAGANGAN	19.407.912.164	14.854.771.715	9.066.764	14.845.704.951	(4.562.207.213)
06	BADAN PENGEMBANGAN EKSPOR NASIONAL	203.388.078.095	144.036.900.898	3.407	144.036.897.491	(59.351.180.604)
07	BADAN PENGAWAS PERDAGANGAN BERJANGKA KOMODITI	57.431.576.811	50.124.746.824	1.810.514	50.122.936.310	(7.308.640.501)
08	BADAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERDAGANGAN	49.109.370.456	42.073.054.390	13.679.904	42.059.374.486	(7.049.995.970)
091	**KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT**	**479.485.632.455**	**419.648.910.858**	**59.725.003**	**419.589.185.855**	**(59.896.446.600)**
01	SEKRETARIAT KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	350.849.702.576	297.323.907.287	59.725.003	297.264.182.284	(53.585.520.292)
02	DEPUTI PEMBIAYAAN	41.408.346.917	37.514.058.326		37.514.058.326	(3.894.288.591)
03	DEPUTI PENGEMBANGAN KAWASAN	23.269.690.604	23.485.692.893		23.485.692.893	216.002.289
04	DEPUTI PERUMAHAN FORMAL	38.752.811.625	38.726.177.331		38.726.177.331	(26.634.294)
05	DEPUTI PERUMAHAN SWADAYA	25.205.080.732	22.599.075.021		22.599.075.021	(2.606.005.711)
092	**KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA**	**606.180.031.168**	**641.521.298.832**	**306.660.230**	**641.214.638.602**	**35.034.607.434**
01	MENTERI NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	606.180.031.168	641.521.298.832	306.660.230	641.214.638.602	35.034.607.434
093	**KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI**	**311.688.873.805**	**164.050.598.734**	**284.562.036**	**163.766.036.698**	**(147.922.837.107)**
01	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	311.688.873.805	164.050.598.734	284.562.036	163.766.036.698	(147.922.837.107)
094	**BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS**	**9.381.170.294.923**	**6.533.498.992.454**	**656.280.558**	**6.532.842.711.896**	**(2.848.327.583.027)**
01	BIDANG PENGAWASAN	14.178.578.057	9.223.933.491	8.510.000	9.215.423.491	(4.963.154.566)
02	BIDANG KEUANGAN DAN PERENCANAAN	92.215.284.961	35.850.667.764	20.400.000	35.830.267.764	(56.385.017.197)
03	BIDANG AGAMA, SOSIAL DAN BUDAYA	222.589.820.800	199.955.080.434	1.800.000	199.953.280.434	(22.636.540.366)
04	BIDANG EKONOMI DAN USAHA	890.541.576.247	653.532.600.135	33.900.000	653.498.700.135	(237.042.876.112)
05	BIDANG PENDIDIKAN, KESEHATAN DAN PERAN PEREMPUAN	1.244.989.710.080	950.772.047.852	189.098.032	950.582.949.820	(294.406.760.260)
06	BIDANG PERUMAHAN DAN PERMUKIMAN	3.067.584.021.014	1.976.845.181.194	57.738.000	1.976.787.443.194	(1.090.796.577.820)
07	BIDANG INFRASTRUKTUR, LINGKUNGAN DAN PEMELIHARAAN	2.638.542.215.009	1.695.563.420.745	18.484.900	1.695.544.935.845	(942.997.279.164)
08	BIDANG KELEMBAGAAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA	612.807.515.407	439.013.157.307		439.013.157.307	(173.794.358.100)
09	SEKRETARIAT, KOMUNIKASI DAN INFORMASI	387.628.624.214	384.085.080.475	326.349.626	383.758.730.849	(3.869.893.365)
10	BIDANG OPERASI	210.092.949.135	188.657.823.057		188.657.823.057	(21.435.126.078)
095	**DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)**	**253.489.757.277**	**202.040.120.852**	**121.663.718**	**201.918.457.134**	**(51.571.300.143)**
01	SEKRETARIAT JENDERAL DPD RI	59.435.566.166	30.280.170.640	111.718	30.280.058.922	(29.155.507.244)
02	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	194.054.191.111	171.759.950.212	121.552.000	171.638.398.212	(22.415.792.899)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN ESELON I
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE BA ESELON I	BAGIAN ANGGARAN & ESELON I	ANGGARAN (UU APBN-P TA 2007)	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
100	**KOMISI YUDISIAL RI**	**101.638.667.986**	**79.157.402.412**	**81.036.400**	**79.076.366.012**	**(22.562.301.974)**
01	KOMISI YUDISIAL RI	101.638.667.986	79.157.402.412	81.036.400	79.076.366.012	(22.562.301.974)
103	**BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA**	**55.352.339.487**	**46.751.595.653**	**43.276.400**	**46.708.319.253**	**(8.644.020.234)**
01	BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA	55.352.339.487	46.751.595.653	43.276.400	46.708.319.253	(8.644.020.234)
105	**BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO**	**450.090.727.356**	**114.183.343.657**	**264.531.705**	**113.918.811.952**	**(336.171.915.404)**
01	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	450.090.727.356	114.183.343.657	264.531.705	113.918.811.952	(336.171.915.404)
61	**CICILAN BUNGA UTANG**	**83.555.140.000.000**	**79.197.728.903.074**	**-**	**79.197.728.903.074**	**(4.357.411.096.926)**
62	**SUBSIDI DAN TRANSFER**	**137.836.443.472.000**	**179.664.516.567.212**	**10.108.265.723**	**179.654.408.301.489**	**41.817.964.829.489**
69	**BELANJA LAIN LAIN**	**32.186.378.378.000**	**20.786.693.852.451**	**29.786.139.621**	**20.756.907.712.830**	**(11.429.470.665.170)**
	TOTAL BELANJA PEMERINTAH PUSAT	**498.172.161.850.000**	**504.955.785.344.562**	**332.521.757.530**	**504.623.263.587.032**	**6.451.101.737.032**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BAGIAN ANGGARAN	ANGGARAN (UU APBN-P TA 2007)	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bunga Utang	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bansos	Belanja Lain-lain	Total Belanja
			51	52	53	54	55	56	57	58	
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	176.544.779.639	56.394.405.347	69.292.444.412	16.128.729.540	-	-	-	-	-	141.815.579.299
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.367.532.577.244	415.084.173.071	583.928.832.524	69.731.857.905	-	-	-	-	-	1.068.744.863.500
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.081.867.924.090	182.157.996.093	329.923.054.490	335.352.335.849	-	-	-	-	-	847.433.386.432
005	MAHKAMAH AGUNG	2.854.856.175.949	1.241.004.072.954	393.218.213.742	1.029.375.164.538	-	-	-	-	-	2.663.597.451.234
006	KEJAKSAAN AGUNG	1.571.837.987.952	605.268.206.592	450.890.032.477	534.647.820.547	-	-	-	-	-	1.590.806.059.616
007	SEKRETARIAT NEGARA	1.435.630.449.121	117.803.659.863	716.181.278.136	339.614.080.124	-	-	-	900.000.000	-	1.174.499.018.123
010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	3.892.629.148.068	328.458.378.068	959.100.804.417	572.233.721.506	-	-	-	1.258.398.989.364	-	3.118.191.893.355
011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	4.891.085.467.305	1.670.276.267.039	1.523.231.987.190	182.705.254.040	-	-	-	-	-	3.376.213.508.269
012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	29.773.230.211.694	14.473.856.478.359	7.772.966.289.484	8.364.325.180.120	-	-	-	-	-	30.611.147.947.963
013	DEPARTEMEN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI	3.780.351.535.229	1.305.365.770.643	1.323.060.354.211	945.898.957.149	-	-	-	-	-	3.574.325.082.003
015	DEPARTEMEN KEUANGAN	8.883.242.404.658	1.778.481.089.394	1.998.584.110.900	2.613.485.006.915	608.648.631.679	-	-	-	-	6.999.198.838.888
018	DEPARTEMEN PERTANIAN	8.078.186.182.181	1.159.191.734.119	1.990.404.022.298	958.474.827.580	-	-	-	2.424.219.389.849	-	6.532.289.973.846
019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	1.743.359.182.558	311.483.604.900	637.177.102.119	318.026.290.325	-	-	-	217.849.565.660	(3.330)	1.484.536.559.674
020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.963.361.943.593	472.838.377.203	1.426.936.711.936	3.241.808.260.261	-	-	-	-	-	5.141.583.349.400
022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	10.091.591.169.313	825.014.408.514	1.460.144.392.381	6.767.791.347.608	-	-	-	17.470.691.706	-	9.070.420.840.209
023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	40.074.346.474.075	5.522.750.097.279	5.484.310.455.279	2.743.674.344.615	-	-	-	26.725.061.962.865	-	40.475.796.860.038
024	DEPARTEMEN KESEHATAN	16.880.092.388.137	1.712.624.590.851	4.912.252.290.930	3.819.516.586.794	-	-	-	5.086.218.446.134	-	15.530.611.914.709
025	DEPARTEMEN AGAMA	13.376.473.550.997	6.295.529.006.858	1.305.192.355.728	1.221.624.331.764	-	-	-	4.476.599.240.666	-	13.298.944.935.016
026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.682.696.771.595	446.693.157.246	981.951.289.047	830.250.218.156	-	-	-	192.249.908.521	-	2.451.144.572.970
027	DEPARTEMEN SOSIAL	3.040.949.272.096	233.694.676.282	605.288.753.122	143.572.734.848	-	-	-	1.783.474.388.319	-	2.766.030.552.571
029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	3.564.826.941.607	571.770.231.945	929.073.196.134	250.159.454.697	-	-	-	10.000.000.000	-	1.761.002.882.776
032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.001.438.264.637	360.578.984.015	965.429.920.525	781.612.428.998	-	-	-	235.490.002.954	-	2.343.111.336.492
033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	24.891.415.293.706	801.046.370.570	2.670.262.276.610	17.279.896.284.405	-	-	-	2.018.258.750.316	-	22.769.463.681.901
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	180.900.203.186	13.035.442.216	88.995.950.086	77.895.976.261	-	-	-	-	-	179.927.368.563
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	128.764.375.870	14.830.250.515	40.669.931.997	3.162.785.642	-	-	-	-	-	58.662.968.154
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	94.112.897.174	11.947.453.482	53.801.530.701	10.514.611.700	-	-	-	15.999.525.400	-	92.263.121.283
040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	923.043.212.787	206.518.713.048	552.993.564.192	123.302.928.177	-	-	-	-	-	882.815.205.417
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	316.250.994.317	17.467.272.740	32.233.748.207	212.145.382.744	-	-	-	-	-	261.846.403.691
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	433.198.813.357	82.625.616.085	208.400.730.865	146.121.682.057	-	-	-	-	-	437.148.029.007
043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	491.669.114.049	59.158.507.568	313.611.884.865	41.456.719.704	-	-	-	-	-	414.227.112.137
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	1.395.050.603.110	63.079.645.879	353.046.128.659	486.576.703.691	-	-	-	378.090.153.600	-	1.280.792.631.829
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	150.459.337.647	15.320.847.369	123.514.769.877	4.749.091.870	-	-	-	-	-	143.584.709.116
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	222.803.085.489	23.117.233.228	48.803.352.980	7.762.515.632	-	-	-	-	-	79.683.101.840
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	965.549.075.336	47.600.442.871	524.503.028.232	475.910.471.094	-	-	-	-	-	1.048.013.942.197
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	966.742.652.032	21.861.653.080	25.205.940.303	995.330.124.350	-	-	-	-	-	1.042.397.717.733
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	27.168.201.849	14.071.406.529	12.043.174.698	1.428.205.000	-	-	-	-	-	27.542.786.227
054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.170.502.529.374	592.320.217.625	499.385.944.087	81.904.547.231	-	-	-	-	(45.946.000)	1.173.564.762.943
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	374.872.295.047	65.650.223.699	155.233.823.329	31.721.098.575	-	-	-	-	-	252.605.145.603
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.017.687.704.823	657.422.094.782	755.373.648.545	190.089.974.016	-	-	-	-	-	1.602.885.717.343
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	268.116.380.849	42.912.358.510	63.849.064.170	165.065.922.573	-	-	-	-	-	271.827.345.253
059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.341.226.775.240	174.769.474.933	600.518.192.170	240.727.340.108	-	-	-	-	-	1.016.015.007.211
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	18.424.174.025.383	12.563.733.189.645	4.985.426.330.593	2.373.260.407.335	-	-	-	-	-	19.922.419.927.573
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	410.959.649.581	114.084.793.354	143.015.184.748	120.511.122.041	-	-	-	-	-	377.611.100.143
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	136.357.611.682	39.715.811.725	50.493.660.904	36.094.342.003	-	-	-	-	-	126.303.814.632
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	348.464.498.077	33.032.934.126	165.426.157.762	59.774.026.500	-	-	-	-	-	258.233.118.388
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	250.433.940.098	20.492.431.415	108.942.686.122	105.029.473.345	-	-	-	-	-	234.464.590.882
067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	628.724.968.579	20.247.041.238	147.536.526.066	6.279.554.891	-	-	-	210.775.525.735	-	384.838.647.930
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	965.777.364.954	165.878.103.050	774.268.358.770	44.019.642.030	-	-	-	10.000.000.000	-	994.166.103.850
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	53.755.493.201	12.969.387.689	13.972.444.730	1.516.340.050	-	-	-	-	-	28.458.172.469
075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	597.595.835.102	117.132.608.899	141.910.355.618	351.400.900.061	-	-	-	-	-	610.443.864.578
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	703.514.838.000	209.198.179.460	228.717.466.966	30.686.653.560	-	-	-	-	-	468.602.299.986

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT BAGIAN ANGGARAN DAN JENIS BELANJA
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BAGIAN ANGGARAN	ANGGARAN (UU APBN-P TA 2007)	Belanja Pegawai	Belanja Barang	Belanja Modal	Bunga Utang	Belanja Subsidi	Belanja Hibah	Belanja Bansos	Belanja Lain-lain	Total Belanja
			51	52	53	54	55	56	57	58	
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	177.116.220.227	9.739.941.200	59.388.415.790	80.585.236.801	-	-	-	-	-	149.713.593.791
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	88.221.830.678	9.356.552.202	9.325.389.092	58.274.532.065	-	-	-	-	-	76.956.473.359
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	594.074.373.861	166.958.822.340	241.434.806.565	162.127.515.562	-	-	-	-	-	570.521.144.467
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	300.568.872.883	162.840.436.333	106.851.712.327	38.930.183.327	-	-	-	-	-	308.622.331.987
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	554.304.712.764	166.183.797.610	160.577.163.616	175.533.143.074	-	-	-	-	-	502.294.104.300
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	183.977.749.845	69.182.981.059	70.398.576.148	34.838.015.297	-	-	-	-	-	174.419.572.504
083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	230.901.479.729	51.221.062.274	58.105.784.955	114.682.779.083	-	-	-	-	-	224.009.626.312
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	59.436.849.825	9.049.300.570	24.734.545.521	2.185.746.600	-	-	-	-	-	35.969.592.691
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	56.894.575.364	15.560.670.495	27.349.950.280	10.525.484.461	-	-	-	-	-	53.436.105.236
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	183.541.425.592	58.473.635.331	57.287.140.355	41.429.672.205	-	-	-	-	-	157.190.447.891
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	102.645.756.791	22.020.848.843	38.986.764.670	34.718.971.094	-	-	-	-	-	95.726.584.607
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	343.189.576.981	112.390.980.906	80.610.486.812	95.394.439.452	-	-	-	-	-	288.395.907.170
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	505.899.679.385	205.229.904.322	199.342.126.478	77.515.775.679	-	-	-	-	-	482.087.806.479
090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	1.488.907.999.981	218.273.840.506	572.615.909.871	439.866.060.272	-	-	-	2.829.236.532	-	1.233.585.047.181
091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	479.485.632.455	30.752.966.548	198.858.613.593	164.400.192.104	-	-	-	25.577.413.610	-	419.589.185.855
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	606.180.031.168	25.565.000.639	360.309.338.030	43.176.512.750	-	-	-	212.163.787.183	-	641.214.638.602
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	311.688.873.805	65.449.940.197	51.203.825.695	47.112.270.806	-	-	-	-	-	163.766.036.698
094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	9.381.170.294.923	506.148.376.195	744.741.346.252	2.716.239.195.740	-	-	-	2.565.713.793.709	-	6.532.842.711.896
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	253.489.757.277	98.515.531.231	88.828.479.323	14.574.446.580	-	-	-	-	-	201.918.457.134
100	KOMISI YUDISIAL RI	101.638.667.986	4.325.643.264	26.623.144.090	48.127.578.658	-	-	-	-	-	79.076.366.012
103	BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA	55.352.339.487	2.055.420.000	40.808.194.263	3.844.704.990	-	-	-	-	-	46.708.319.253
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	450.090.727.356	3.708.976.543	9.917.226.804	100.242.833.605	-	-	-	49.775.000	-	113.918.811.952
061	CICILAN BUNGA UTANG	83.555.140.000.000	-	-	-	79.197.728.903.074	-	-	-	-	79.197.728.903.074
062	SUBSIDI DAN TRANSFER	137.836.443.472.000	28.166.184.605.899	-	-	-	150.214.443.691.269	-	-	1.273.780.004.321	179.654.408.301.489
069	BELANJA LAIN LAIN	32.186.378.378.000	3.938.198.658.061	582.372.780.574	-	-	-	-	1.888.890.902.500	14.347.445.371.695	20.756.907.712.830
	TOTAL BELANJA PEMERINTAH PUSAT	**498.172.161.850.000**	**90.424.946.964.533**	**54.511.365.469.438**	**64.288.669.050.730**	**79.806.377.534.753**	**150.214.443.691.269**	**-**	**49.756.281.449.623**	**15.621.179.426.686**	**504.623.263.587.032**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI	FUNGSI/SUBFUNGSI	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	**PELAYANAN UMUM**	**300.027.736.113.850**	**316.209.273.542.677**	**70.012.634.140**	**316.139.260.908.537**	**16.111.524.794.687**
01.01	LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI	19.304.503.978.315	14.988.586.081.949	13.801.303.648	14.974.784.778.301	(4.329.719.200.014)
01.02	BANTUAN LUAR NEGERI	-	-	18.852.060	(18.852.060)	(18.852.060)
01.03	PELAYANAN UMUM	1.203.152.817.459	712.323.619.003	253.917.004	712.069.701.999	(491.083.115.460)
01.04	PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK	1.751.438.235.498	1.543.946.846.487	562.187.307	1.543.384.659.180	(208.053.576.318)
01.05	PINJAMAN PEMERINTAH	83.555.140.000.000	79.197.728.903.074	557.000	79.197.728.346.074	(4.357.411.653.926)
01.06	PEMBANGUNAN DAERAH	1.581.242.010.609	1.089.112.755.230	29.401.782	1.089.083.353.448	(492.158.657.161)
01.90	PELAYANAN UMUM PEMERINTAH LAINNYA	192.632.259.071.968	218.677.575.336.934	55.086.151.523	218.622.489.185.411	25.990.230.113.443
01.00	SUBFUNGSI TIDAK ADA	-	-	260.263.816	(260.263.816)	(260.263.816)
01.07	SUBFUNGSI TIDAK ADA	-	-	-	-	-
02	**PERTAHANAN**	**29.847.052.744.323**	**30.685.937.868.726**	**77.113.820**	**30.685.860.754.906**	**838.808.010.583**
02.01	PERTAHANAN NEGARA	7.738.061.661.841	8.985.003.688.122	4.450.000	8.984.999.238.122	1.246.937.576.281
02.02	DUKUNGAN PERTAHANAN	4.759.788.700.067	2.604.835.288.213	65.583.820	2.604.769.704.393	(2.155.018.995.674)
02.03	BANTUAN MILITER LUAR NEGERI	28.356.336.949	31.500.686.087	-	31.500.686.087	3.144.349.138
02.04	LITBANG PERTAHANAN	89.751.908.704	93.375.017.052	7.080.000	93.367.937.052	3.616.028.348
02.90	PERTAHANAN LAINNYA	17.231.094.136.762	18.971.223.189.252	-	18.971.223.189.252	1.740.129.052.490
03	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**27.126.135.562.622**	**28.325.913.246.490**	**10.035.278.016**	**28.315.877.968.474**	**1.189.742.405.852**
03.01	KEPOLISIAN	9.291.077.413.687	8.945.199.751.104	4.536.861.893	8.940.662.889.211	(350.414.524.476)
03.02	PENANGGULANGAN BENCANA	139.116.427.492	90.624.758.137	-	90.624.758.137	(48.491.669.355)
03.03	PEMBINAAN HUKUM	3.579.699.061.765	3.385.443.447.915	762.195.397	3.384.681.252.518	(195.017.809.247)
03.90	KETERTIBAN, KEAMANAN DAN HUKUM LAINNYA	14.116.242.659.677	15.904.645.289.334	4.694.213.633	15.899.951.075.701	1.783.708.416.024
03.00	SUBFUNGSI TIDAK ADA	-	-	20.500.000	(20.500.000)	(20.500.000)
03.04	SUBFUNGSI TIDAK ADA	-	-	21.507.093	(21.507.093)	(21.507.093)
04	**EKONOMI**	**50.795.994.911.162**	**42.356.828.175.883**	**134.884.883.859**	**42.221.943.292.024**	**(8.574.051.619.138)**
04.01	PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM	2.008.392.907.318	1.766.314.354.882	619.552.585	1.765.694.802.297	(242.698.105.021)
04.02	TENAGA KERJA	1.095.436.237.633	970.378.750.359	214.420.503	970.164.329.856	(125.271.907.777)
04.03	PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN	11.059.631.142.189	7.688.753.369.443	118.483.860.302	7.570.269.509.141	(3.489.361.633.048)
04.04	PENGAIRAN	5.035.476.188.467	4.233.495.916.193	1.689.694.394	4.231.806.221.799	(803.669.966.668)
04.05	BAHAN BAKAR DAN ENERGI	3.336.988.044.820	2.900.740.136.474	51.794.200	2.900.688.342.274	(436.299.702.546)
04.06	PERTAMBANGAN	1.344.341.891.066	1.086.760.700.593	88.796.800	1.086.671.903.793	(257.669.987.273)
04.07	INDUSTRI DAN KONSTRUKSI	1.507.071.075.516	1.270.095.533.534	131.569.300	1.269.963.964.234	(237.107.111.282)
04.08	TRANSPORTASI	18.145.597.009.424	16.652.087.425.485	4.470.711.558	16.647.616.713.927	(1.497.980.295.497)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

04.09	TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.532.245.673.403	475.583.510.042	2.831.140.555	472.752.369.487	(1.059.493.303.916)
04.90	EKONOMI LAINNYA	5.730.814.741.326	5.312.618.478.878	6.237.406.046	5.306.381.072.832	(424.433.668.494)
04.00	SUBFUNGSI TIDAK ADA	-	-	65.937.616	(65.937.616)	(65.937.616)
05	**LINGKUNGAN HIDUP**	**6.319.503.020.782**	**4.953.890.229.832**	**1.310.654.118**	**4.952.579.575.714**	**(1.366.923.445.068)**
05.01	MANAJEMEN LIMBAH	342.419.213.395	348.055.467.734	15.990.000	348.039.477.734	5.620.264.339
05.03	PENANGGULANGAN POLUSI	267.052.916.380	189.870.340.627	7.624.140	189.862.716.487	(77.190.199.893)
05.04	KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	3.935.729.608.374	3.177.013.086.694	455.867.490	3.176.557.219.204	(759.172.389.170)
05.05	TATA RUANG DAN PERTANAHAN	1.446.288.495.824	962.223.834.225	571.488.461	961.652.345.764	(484.636.150.060)
05.90	PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA	328.012.786.809	276.727.500.552	259.684.027	276.467.816.525	(51.544.970.284)
06	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**10.067.387.507.142**	**9.135.899.186.959**	**1.291.838.646**	**9.134.607.348.313**	**(932.780.158.829)**
06.01	PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.183.476.975.207	1.130.941.873.897	32.041.170	1.130.909.832.727	(52.567.142.480)
06.02	PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEMUKIMAN	2.730.928.132.066	2.435.464.239.740	208.278.943	2.435.255.960.797	(295.672.171.269)
06.03	PENYEDIAAN AIR MINUM	1.570.425.343.097	1.425.706.864.619	32.210.000	1.425.674.654.619	(144.750.688.478)
06.90	PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA	4.582.557.056.773	4.143.786.208.703	1.013.276.533	4.142.772.932.170	(439.784.124.603)
06.06	SUBFUNGSI TIDAK ADA	-	-	6.032.000	(6.032.000)	(6.032.000)
07	**KESEHATAN**	**17.159.011.722.399**	**16.009.074.308.104**	**4.617.379.919**	**16.004.456.928.185**	**(1.154.554.794.214)**
07.01	OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	1.139.350.872.456	884.937.503.041	309.093.343	884.628.409.698	(254.722.462.758)
07.02	PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN	8.171.225.951.438	8.070.449.896.643	114.115.037	8.070.335.781.606	(100.890.169.832)
07.03	PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT	3.762.789.662.982	3.349.362.952.153	1.281.340.100	3.348.081.612.053	(414.708.050.929)
07.04	KELUARGA BERENCANA	421.308.196.797	433.845.336.024	78.200.800	433.767.135.224	12.458.938.427
07.05	LITBANG KESEHATAN	203.743.740.688	197.664.769.138	12.357.225	197.652.411.913	(6.091.328.775)
07.90	KESEHATAN LAINNYA	3.460.593.298.037	3.072.813.851.105	2.816.542.840	3.069.997.308.265	(390.595.989.772)
07.00	SUBFUNGSI TIDAK ADA	-	-	119.000	(119.000)	(119.000)
07.07	SUBFUNGSI TIDAK ADA	-	-	3.731.574	(3.731.574)	(3.731.574)
07.09	SUBFUNGSI TIDAK ADA	-	-	1.880.000	(1.880.000)	(1.880.000)
07.99	SUBFUNGSI TIDAK ADA	-	-	-	-	-
08	**PARIWISATA DAN BUDAYA**	**1.669.281.227.388**	**1.852.222.020.040**	**991.342.234**	**1.851.230.677.806**	**181.949.450.418**
08.01	PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA	520.921.614.942	492.916.453.729	138.651.991	492.777.801.738	(28.143.813.204)
08.02	PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA	503.949.393.955	536.945.098.197	306.653.432	536.638.444.765	32.689.050.810
08.03	PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN	251.921.818.865	443.057.124.256	247.584.229	442.809.540.027	190.887.721.162
08.90	PARIWISATA DAN BUDAYA LAINNYA	392.488.399.626	379.303.343.858	295.666.980	379.007.676.878	(13.480.722.748)
08.08	SUBFUNGSI TIDAK ADA	-	-	2.785.602	(2.785.602)	(2.785.602)
09	**AGAMA**	**1.893.308.043.505**	**1.885.685.898.794**	**1.492.338.796**	**1.884.193.559.998**	**(9.114.483.507)**
09.01	PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA	424.095.545.659	419.704.047.030	151.888.870	419.552.158.160	(4.543.387.499)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI SUBFUNGSI
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

09.02	KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA	24.437.032.412	24.445.503.874	34.200	24.445.469.674	8.437.262
09.03	LITBANG AGAMA	19.704.775.804	20.039.898.215	2.122.800	20.037.775.415	332.999.611
09.90	PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA	1.425.070.689.630	1.421.496.449.675	1.337.004.926	1.420.159.444.749	(4.911.244.881)
09.09	SUBFUNGSI TIDAK ADA	-	-	1.288.000	(1.288.000)	(1.288.000)
10	**PENDIDIKAN**	**50.345.470.881.427**	**50.889.501.546.130**	**46.133.577.215**	**50.843.367.968.915**	**497.897.087.488**
10.01	PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	425.960.586.606	444.447.469.289	309.152.360	444.138.316.929	18.177.730.323
10.02	PENDIDIKAN DASAR	21.346.244.094.120	22.511.479.434.630	16.993.519.017	22.494.485.915.613	1.148.241.821.494
10.03	PENDIDIKAN MENENGAH	4.062.717.371.722	4.119.152.760.315	855.638.184	4.118.297.122.131	55.579.750.409
10.04	PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL	1.155.429.913.600	1.202.904.222.140	112.138.000	1.202.792.084.140	47.362.170.540
10.05	PENDIDIKAN KEDINASAN	233.999.827.780	213.155.901.073	66.061.089	213.089.839.984	(20.909.987.796)
10.06	PENDIDIKAN TINGGI	8.446.578.414.806	6.911.136.240.481	6.709.562.821	6.904.426.677.660	(1.542.151.737.146)
10.07	PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN	4.828.094.267.210	5.080.262.585.009	1.907.614.078	5.078.354.970.931	250.260.703.721
10.08	PEMBINAAN KEAGAMAAN	191.391.704.618	192.427.938.975	10.882.625	192.417.056.350	1.025.351.732
10.09	LITBANG PENDIDIKAN	550.983.688.626	564.904.633.547	14.058.253.433	550.846.380.114	(137.308.512)
10.90	PENDIDIKAN LAINNYA	9.104.071.012.340	9.649.630.360.671	5.060.523.558	9.644.569.837.113	540.498.824.773
10.00	SUBFUNGSI TIDAK ADA	-	-	50.232.050	(50.232.050)	(50.232.050)
11	**KEPENDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL**	**2.921.280.115.401**	**2.651.544.675.847**	**1.173.906.324**	**2.650.370.769.523**	**(270.909.345.878)**
11.04	KEPENDUDUKAN, KELUARGA BERENCANA DAN PERLINDUNGAN ANAK	726.646.739.629	720.284.470.502	425.602.955	719.858.867.547	(6.787.872.082)
11.05	PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	116.716.311.273	116.428.068.222	28.700.925	116.399.367.297	(316.943.976)
11.06	PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL	505.969.787.317	480.315.811.646	54.100.100	480.261.711.546	(25.708.075.771)
11.08	BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL	1.359.840.961.502	1.149.187.354.838	368.572.394	1.148.818.782.444	(211.022.179.058)
11.09	LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL	97.910.183.014	87.283.208.057	258.027.600	87.025.180.457	(10.885.002.557)
11.90	PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA	114.196.132.666	98.045.762.582	38.902.350	98.006.860.232	(16.189.272.434)
00	**FUNGSI TIDAK ADA**	**-**	**14.645.080**	**60.416.246.836**	**(60.401.601.756)**	**(60.401.601.756)**
00.00	SUBFUNGSI TIDAK ADA	-	14.645.080	60.416.246.836	(60.401.601.756)	(60.401.601.756)
99	**FUNGSI TIDAK ADA**		**-**	**84.563.607**	**(84.563.607)**	**(84.563.607)**
99.99	SUBFUNGSI TIDAK ADA	-	-	84.563.607	(84.563.607)	(84.563.607)
JUMLAH		**498.172.161.850.000**	**504.955.785.344.562**	**332.521.757.530**	**504.623.263.587.032**	**6.451.101.737.032**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE FUNGSI/ SUBFUNGSI/ PROGRAM	FUNGSI/SUBFUNGSI/PROGRAM	ANGGARAN	REALISASI BELANJA BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI BELANJA NETTO	REALISASI DI ATAS (DI BAWAH) ANGGARAN
01	**PELAYANAN UMUM**	**300.027.736.113.850**	**316.209.273.542.677**	**70.012.634.140**	**316.139.260.908.537**	**16.111.524.794.687**
01.01	**LEMBAGA EKSEKUTIF DAN LEGISLATIF, KEUANGAN DAN FISKAL, SERTA URUSAN LUAR NEGERI**	**19.304.503.978.315**	**14.988.586.081.949**	**13.801.303.648**	**14.974.784.778.301**	**(4.329.719.200.014)**
01	PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGUATAN KELEMBAGAAN DEMOKRASI	828.900.479.099	580.671.510.295	5.552.370.545	575.119.139.750	(253.781.339.349)
02	PROGRAM PEMANTAPAN POLITIK LUAR NEGERI DAN OPTIMALISASI DIPLOMASI INDONESIA	702.755.892.315	435.613.003.796	180.419.192	435.432.584.604	(267.323.307.711)
03	PROGRAM PERBAIKAN PROSES POLITIK	67.276.485.105	36.464.343.176	9.231.150	36.455.112.026	(30.821.373.079)
04	PROGRAM PENEGASAN KOMITMEN PERDAMAIAN DUNIA	8.425.788.434	4.753.156.706	1.625.000	4.751.531.706	(3.674.256.728)
05	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA INTERNASIONAL	135.820.908.195	69.533.135.736	11.081.556	69.522.054.180	(66.298.854.015)
06	PROGRAM PENINGKATAN KOMITMEN PERSATUAN DAN KESATUAN NASIONAL	106.936.656.232	104.404.618.222	82.854.798	104.321.763.424	(2.614.892.808)
07	PROGRAM PENATAAN HUBUNGAN NEGARA DAN MASYARAKAT	3.848.275.719	3.466.773.000	-	3.466.773.000	(381.502.719)
08	PROGRAM PENATAAN PERAN NEGARA DAN MASYARAKAT	-	-	-	-	-
09	PROGRAM PENERAPAN KEPEMERINTAHAN YANG BAIK	49.605.264.216	46.450.940.202	18.314.245	46.432.625.957	(3.172.638.259)
10	PROGRAM PENINGKATAN PENGAWASAN DAN AKUNTABILITAS APARATUR NEGARA	828.178.899.946	624.604.398.090	762.271.941	623.842.126.149	(204.336.773.797)
11	PROGRAM PENGAWASAN APARATUR NEGARA	-	-	-	-	-
12	PROGRAM PENATAAN KELEMBAGAAN DAN KETATALAKSANAAN	689.334.222.833	501.857.134.482	72.243.380	501.784.891.102	(187.549.331.731)
13	PROGRAM PENGELOLAAN SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR	1.839.854.722.314	1.315.161.958.171	905.718.516	1.314.256.239.655	(525.598.482.659)
14	PROGRAM PENGELOLAAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR DAN PENDIDIKAN KEDINASAN	-	-	-	-	-
15	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK	351.435.528.065	276.468.774.088	139.606.850	276.329.167.238	(75.106.360.827)
16	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN INFORMASI PUBLIK	163.577.227.395	119.661.397.438	-	119.661.397.438	(43.915.829.957)
17	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA APARATUR NEGARA	4.870.493.888.543	3.929.492.674.031	142.586.830	3.929.350.087.201	(941.143.801.342)
18	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA	-	-	-	-	-
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	5.121.310.332.845	3.822.948.208.433	2.117.454.599	3.820.830.753.834	(1.300.479.579.011)
20	PROGRAM PENINGKATAN PENERIMAAN DAN PENGAMANAN KEUANGAN NEGARA	2.080.210.209.241	2.099.992.482.379	2.638.352.083	2.097.354.130.296	17.143.921.055
21	PROGRAM PENINGKATAN EFEKTIVITAS PENGELUARAN NEGARA	546.514.034.752	175.747.511.139	449.475.267	175.298.035.872	(371.215.998.880)
22	PROGRAM PEMBINAAN AKUNTANSI KEUANGAN NEGARA	36.082.394.534	18.176.624.910	31.897.500	18.144.727.410	(17.937.667.124)
23	PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN KEUANGAN	42.158.277.284	34.765.932.454	77.542.263	34.688.390.191	(7.469.887.093)
24	PROGRAM STABILISASI EKONOMI DAN SEKTOR KEUANGAN	196.077.934.948	126.170.768.961	388.357.490	125.782.411.471	(70.295.523.477)
25	PROGRAM PENGELOLAAN DAN PEMBIAYAAN HUTANG	24.319.361.592	21.116.800.261	-	21.116.800.261	(3.202.561.331)
26	PROGRAM PEMANTAPAN PELAKSANAAN SISTEM PENGANGGARAN	6.108.273.980	2.218.875.620	15.131.100	2.203.744.520	(3.904.529.460)
27	PROGRAM PENYEMPURNAAN DAN PENGEMBANGAN STATISTIK	605.278.920.726	638.845.060.359	91.847.453	638.753.212.906	33.474.292.180

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

28	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI DAN HUBUNGAN ANTAR LEMBAGA	-	-	-	-	-
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	43.361.700	(43.361.700)	(43.361.700)
90	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	69.560.190	(69.560.190)	(69.560.190)
01.02	**BANTUAN LUAR NEGERI**	**-**	**-**	**18.852.060**	**(18.852.060)**	**(18.852.060)**
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	912.000	(912.000)	(912.000)
01	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	1.857.980	(1.857.980)	(1.857.980)
05	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	4.656.700	(4.656.700)	(4.656.700)
07	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	5.876.580	(5.876.580)	(5.876.580)
19	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	5.548.800	(5.548.800)	(5.548.800)
01.03	**PELAYANAN UMUM**	**1.203.152.817.459**	**712.323.619.003**	**253.917.004**	**712.069.701.999**	**(491.083.115.460)**
01	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN KEPENDUDUKAN	8.592.231.985	6.905.306.900	22.612.997	6.882.693.903	(1.709.538.082)
02	PROGRAM PENATAAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN	257.019.808.949	172.024.299.803	15.714.000	172.008.585.803	(85.011.223.146)
03	PROGRAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT	937.540.776.525	533.394.012.300	12.136.500	533.381.875.800	(404.158.900.725)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	118.937.321	(118.937.321)	(118.937.321)
04	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	2.230.320	(2.230.320)	(2.230.320)
05	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	2.378.100	(2.378.100)	(2.378.100)
06	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	46.716.000	(46.716.000)	(46.716.000)
07	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	9.820.000	(9.820.000)	(9.820.000)
08	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	23.371.750	(23.371.750)	(23.371.750)
10	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	16	(16)	(16)
01.04	**PENELITIAN DASAR DAN PENGEMBANGAN IPTEK**	**1.751.438.235.498**	**1.543.946.846.487**	**562.187.307**	**1.543.384.659.180**	**(208.053.576.318)**
01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN IPTEK	1.290.516.072.988	1.086.860.051.665	487.375.641	1.086.372.676.024	(204.143.396.964)
02	PROGRAM DIFUSI DAN PEMANFAATAN IPTEK	246.764.880.605	248.440.711.470	64.899.066	248.375.812.404	1.610.931.799
03	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN IPTEK	214.157.281.905	208.646.083.352	9.912.600	208.636.170.752	(5.521.111.153)
01.05	**PINJAMAN PEMERINTAH**	**83.555.140.000.000**	**79.197.728.903.074**	**557.000**	**79.197.728.346.074**	**(4.357.411.653.926)**
01	PROGRAM PEMBAYARAN BUNGA UTANG	83.555.140.000.000	79.197.728.903.074	-	79.197.728.903.074	(4.357.411.096.926)
07	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	557.000	(557.000)	(557.000)
01.06	**PEMBANGUNAN DAERAH**	**1.581.242.010.609**	**1.089.112.755.230**	**29.401.782**	**1.089.083.353.448**	**(492.158.657.161)**
01	PROGRAM PENATAAN DAERAH OTONOMI BARU	164.508.160.849	167.726.334.226	-	167.726.334.226	3.218.173.377
02	MENGENAI DESENTRALISASI DAN OTONOMI DAERAH	31.200.289.220	22.508.589.519	46.400	22.508.543.119	(8.691.746.101)
04	PROGRAM PENINGKATAN KERJASAMA ANTAR PEMERINTAH DAERAH	12.467.513.148	10.212.662.170	-	10.212.662.170	(2.254.850.978)
05	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KELEMBAGAAN PEMERINTAH DAERAH	484.773.615.184	217.520.663.883	2.664.000	217.517.999.883	(267.255.615.301)
06	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS KEUANGAN PEMERINTAH DAERAH	88.511.839.437	21.336.814.502	7.054.400	21.329.760.102	(67.182.079.335)
07	PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI LOKAL	175.818.041.546	187.198.703.932	13.286.382	187.185.417.550	11.367.376.004

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

08	PROGRAM PENINGKATAN PROFESIONALISME APARAT PEMERINTAH DAERAH	40.644.673.479	34.430.904.038	-	34.430.904.038	(6.213.769.441)
09	PROGRAM PEMULIHAN KAWASAN KONFLIK	-	-	-	-	-
10	PROGRAM PEMULIHAN WILAYAH PASCA KONFLIK	45.932.658.908	43.458.164.019	-	43.458.164.019	(2.474.494.889)
11	PROGRAM PEMULIHAN DAERAH YANG TERKENA BENCANA NASIONAL	37.548.728.912	33.742.050.297	6.350.600	33.735.699.697	(3.813.029.215)
12	PROGRAM PENGEMBANGAN OTONOMI DAERAH	-	-	-	-	-
13	PROGRAM PEMBINAAN DAERAH	2.430.489.928	920.024.200	-	920.024.200	(1.510.465.728)
14	PROGRAM PENGEMBANGAN DAERAH KHUSUS	497.406.000.000	346.044.923.813	-	346.044.923.813	(151.361.076.187)
03	PROGRAM TIDAK ADA	-	4.012.920.631	-	4.012.920.631	4.012.920.631
01.90	**PELAYANAN UMUM PEMERINTAH LAINNYA**	**192.632.259.071.968**	**218.677.575.336.934**	**55.086.151.523**	**218.622.489.185.411**	**25.990.230.113.443**
01	PROGRAM SUBSIDI DAN TRANSFER LAINNYA	142.847.040.472.000	180.409.967.255.229	10.002.483.691	180.399.964.771.538	37.552.924.299.538
02	PROGRAM PEMBIAYAAN LAIN-LAIN	25.512.627.867.660	18.711.176.906.239	29.378.780.171	18.681.798.126.068	(6.830.829.741.592)
03	REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD DAN NIAS	9.003.654.559.423	6.163.457.951.460	649.463.558	6.162.808.487.902	(2.840.846.071.521)
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	15.268.936.172.886	13.392.969.884.006	15.016.054.731	13.377.953.829.275	(1.890.982.343.611)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	22.147.122	(22.147.122)	(22.147.122)
07	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	10.089.350	(10.089.350)	(10.089.350)
10	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	-	-	-
15	PROGRAM TIDAK ADA	-	3.340.000	5.542.900	(2.202.900)	(2.202.900)
16	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	1.590.000	(1.590.000)	(1.590.000)
01.00	**SUBFUNGSI TIDAK ADA**	**-**	**-**	**260.263.816**	**(260.263.816)**	**(260.263.816)**
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	260.263.816	(260.263.816)	(260.263.816)
01.07	**SUBFUNGSI TIDAK ADA**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
00	PROGRAM TIDAK ADA		-	-	-	-
02	**PERTAHANAN**	**29.847.052.744.323**	**30.685.937.868.726**	**77.113.820**	**30.685.860.754.906**	**838.808.010.583**
02.01	**PERTAHANAN NEGARA**	**7.738.061.661.841**	**8.985.003.688.122**	**4.450.000**	**8.984.999.238.122**	**1.246.937.576.281**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN INTEGRATIF	1.588.816.268.961	1.939.236.120.072	-	1.939.236.120.072	350.419.851.111
02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA DARAT	1.591.998.350.991	1.849.906.515.633	-	1.849.906.515.633	257.908.164.642
03	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA LAUT	1.531.446.288.867	1.771.203.500.659	-	1.771.203.500.659	239.757.211.792
04	PROGRAM PENGEMBANGAN PERTAHANAN MATRA UDARA	1.437.993.216.598	1.667.354.075.290	-	1.667.354.075.290	229.360.858.692
05	PROGRAM PENEGAKAN KEDAULATAN DAN PENJAGAAN KEUTUHAN WILAYAH NKRI	1.072.055.444.833	1.190.509.646.935	-	1.190.509.646.935	118.454.202.102
06	PROGRAM PENGEMBANGAN BELA NEGARA	515.752.091.592	566.793.829.533	-	566.793.829.533	51.041.737.941
07	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	4.450.000	(4.450.000)	(4.450.000)
02.02	**DUKUNGAN PERTAHANAN**	**4.759.788.700.067**	**2.604.835.288.213**	**65.583.820**	**2.604.769.704.393**	**(2.155.018.995.674)**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM DAN STRATEGI PERTAHANAN	69.835.706.382	76.215.726.641	65.583.820	76.150.142.821	6.314.436.439
02	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI PERTAHANAN	4.689.952.993.685	2.528.619.561.572	-	2.528.619.561.572	(2.161.333.432.113)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

03	PROGRAM PENGEMBANGAN POTENSI DUKUNGAN PERTAHANAN	-	-	-	-	-
02.03	**BANTUAN MILITER LUAR NEGERI**	**28.356.336.949**	**31.500.686.087**	**-**	**31.500.686.087**	**3.144.349.138**
01	PROGRAM KERJASAMA MILITER INTERNASIONAL	28.356.336.949	31.500.686.087	-	31.500.686.087	3.144.349.138
02.04	**LITBANG PERTAHANAN**	**89.751.908.704**	**93.375.017.052**	**7.080.000**	**93.367.937.052**	**3.616.028.348**
01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERTAHANAN	35.065.883.530	38.900.024.309	-	38.900.024.309	3.834.140.779
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KETAHANAN NASIONAL	54.686.025.174	54.474.992.743	6.860.000	54.468.132.743	(217.892.431)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	220.000	(220.000)	(220.000)
02.90	**PERTAHANAN LAINNYA**	**17.231.094.136.762**	**18.971.223.189.252**	**-**	**18.971.223.189.252**	**1.740.129.052.490**
01	PROGRAM OPERASI BHAKTI TNI	26.934.779.397	29.919.634.500	-	29.919.634.500	2.984.855.103
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	17.204.159.357.365	18.941.303.554.752	-	18.941.303.554.752	1.737.144.197.387
03	**KETERTIBAN DAN KEAMANAN**	**27.126.135.562.622**	**28.325.913.246.490**	**10.035.278.016**	**28.315.877.968.474**	**1.189.742.405.852**
03.01	**KEPOLISIAN**	**9.291.077.413.687**	**8.945.199.751.104**	**4.536.861.893**	**8.940.662.889.211**	**(350.414.524.476)**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN SDM KEPOLISIAN	351.374.177.098	333.148.058.018	239.097.248	332.908.960.770	(18.465.216.328)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN SARANA DAN PRASARANA KEPOLISIAN	3.144.549.194.223	2.393.443.917.864	144.016.263	2.393.299.901.601	(751.249.292.622)
03	PROGRAM PENGEMBANGAN STRATEGI KEAMANAN DAN KETERTIBAN	44.524.987.556	49.290.024.795	907.000	49.289.117.795	4.764.130.239
04	PROGRAM PEMBERDAYAAN POTENSI KEAMANAN	193.823.920.194	208.834.913.255	6.859.250	208.828.054.005	15.004.133.811
05	PROGRAM PEMELIHARAAN KAMTIBMAS	3.195.368.608.783	3.474.939.854.567	3.570.724.353	3.471.369.130.214	276.000.521.431
06	PROGRAM PENGEMBANGAN PENYELIDIKAN, PENGAMANAN DAN PENGGALANGAN KEAMANAN NEGARA	814.816.696.451	882.713.560.394	-	882.713.560.394	67.896.863.943
07	PROGRAM PENGEMBANGAN PENGAMANAN RAHASIA NEGARA	913.473.921.150	990.035.825.100	-	990.035.825.100	76.561.903.950
08	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOBA	199.662.947.200	195.395.857.108	-	195.395.857.108	(4.267.090.092)
09	PROGRAM PEMANTAPAN KEAMANAN DALAM NEGERI	178.641.214.929	156.645.291.380	46.413.200	156.598.878.180	(22.042.336.749)
10	PROGRAM PENYELIDIKAN DAN PENYIDIKAN TINDAK PIDANA	190.614.969.547	195.377.542.009	225.630.910	195.151.911.099	4.536.941.552
12	PROGRAM KERJASAMA KEAMANAN DAN KETERTIBAN	64.226.776.558	65.374.906.614	4.140.000	65.370.766.614	1.143.990.056
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	29.850.000	(29.850.000)	(29.850.000)
18	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	250.476.253	(250.476.253)	(250.476.253)
19	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	18.747.416	(18.747.416)	(18.747.416)
03.02	**PENANGGULANGAN BENCANA**	**139.116.427.492**	**90.624.758.137**	**-**	**90.624.758.137**	**(48.491.669.355)**
01	PROGRAM PENCARIAN DAN PENYELAMATAN	139.116.427.492	90.624.758.137	-	90.624.758.137	(48.491.669.355)
03.03	**PEMBINAAN HUKUM**	**3.579.699.061.765**	**3.385.443.447.915**	**762.195.397**	**3.384.681.252.518**	**(195.017.809.247)**
01	PROGRAM PERENCANAAN HUKUM	24.202.144.464	14.791.714.764	42.123.950	14.749.590.814	(9.452.553.650)
02	PROGRAM PEMBENTUKAN HUKUM	86.028.492.654	60.982.817.530	120.616.234	60.862.201.296	(25.166.291.358)
03	PROGRAM PENINGKATAN KESADARAN HUKUM DAN HAM	509.642.539.355	488.572.801.464	181.705.672	488.391.095.792	(21.251.443.563)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

04	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN DAN BANTUAN HUKUM	267.725.050.366	184.858.754.158	61.002.293	184.797.751.865	(82.927.298.501)
05	PROGRAM PENINGKATAN KINERJA LEMBAGA PERADILAN DAN LEMBAGA PENEGAK HUKUM LAINNYA	2.446.953.816.243	2.444.034.278.776	279.622.095	2.443.754.656.681	(3.199.159.562)
06	PROGRAM PENEGAKAN HUKUM DAN HAM	201.038.127.402	151.770.958.597	72.758.753	151.698.199.844	(49.339.927.558)
07	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PROFESI HUKUM	44.108.891.281	40.432.122.626	2.404.000	40.429.718.626	(3.679.172.655)
08	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN HUKUM DAN HAM	-	-	1.486.400	(1.486.400)	(1.486.400)
09	PROGRAM PEMBINAAN SARANA DAN PRASARANA HUKUM	-	-	-	-	-
10	PROGRAM PEMBINAAN PERADILAN	-	-	-	-	-
12	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	20.000	(20.000)	(20.000)
19	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	-	-	-
90	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	456.000	(456.000)	(456.000)
03.04	**SUBFUNGSI TIDAK ADA**		**-**	**21.507.093**	**(21.507.093)**	**(21.507.093)**
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	19.636.218	(19.636.218)	(19.636.218)
01	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	166.875	(166.875)	(166.875)
03	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	1.204.000	(1.204.000)	(1.204.000)
04	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	296.000	(296.000)	(296.000)
19	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	204.000	(204.000)	(204.000)
03.90	**KETERTIBAN, KEAMANAN DAN HUKUM LAINNYA**	**14.116.242.659.677**	**15.904.645.289.334**	**4.694.213.633**	**15.899.951.075.701**	**1.783.708.416.024**
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	14.116.242.659.677	15.904.645.289.334	4.660.114.047	15.899.985.175.287	1.783.742.515.610
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	33.299.586	(33.299.586)	(33.299.586)
03	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	800.000	(800.000)	(800.000)
03.00	**SUBFUNGSI TIDAK ADA**	**-**	**-**	**20.500.000**	**(20.500.000)**	**(20.500.000)**
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	20.500.000	(20.500.000)	(20.500.000)
04	**EKONOMI**	**50.795.994.911.162**	**42.356.828.175.883**	**134.884.883.859**	**42.221.943.292.024**	**(8.574.051.619.138)**
04.01	**PERDAGANGAN, PENGEMBANGAN USAHA, KOPERASI, DAN UKM**	**2.008.392.907.318**	**1.766.314.354.882**	**619.552.585**	**1.765.694.802.297**	**(242.698.105.021)**
01	PROGRAM PERSAINGAN USAHA	11.746.272.463	6.223.019.842	116.364.950	6.106.654.892	(5.639.617.571)
02	PROGRAM PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PENGAMANAN PERDAGANGAN	82.761.228.253	118.086.733.734	12.003.700	118.074.730.034	35.313.501.781
03	INTERNASIONAL	71.178.336.023	1.332.361.319	250.480.490	1.081.880.829	(70.096.455.194)
04	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA KUKM	-	-	-	-	-
05	PROGRAM PENCIPTAAN IKLIM USAHA UMKM	51.520.085.198	47.448.582.568	5.455.000	47.443.127.568	(4.076.957.630)
06	PROGRAM PENINGKATAN DAN PENGEMBANGAN EKSPOR	328.822.976.224	240.708.665.191	12.798.000	240.695.867.191	(88.127.109.033)
07	PROGRAM PENGEMBANGAN EKSPOR	-	-	160.000	(160.000)	(160.000)
08	PROGRAM PENGEMBANGAN KEWIRAUSAHAAN DAN KEUNGGULAN KOMPETITIF UKM	314.973.491.004	321.775.468.960	17.072.445	321.758.396.515	6.784.905.511
09	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PENDUKUNG USAHA BAGI UMKM	647.948.094.194	567.364.989.533	40.056.750	567.324.932.783	(80.623.161.411)
10	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS KELEMBAGAAN KOPERASI	31.281.305.551	31.234.815.712	446.250	31.234.369.462	(46.936.089)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

11	PROGRAM PEMBERDAYAAN USAHA SKALA MIKRO	238.314.848.484	232.025.720.420	-	232.025.720.420	(6.289.128.064)
12	PROGRAM PENINGKATAN EFISIENSI PERDAGANGAN DALAM NEGERI	229.846.269.924	200.113.997.603	22.840.000	200.091.157.603	(29.755.112.321)
49	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	141.875.000	(141.875.000)	(141.875.000)
04.02	**TENAGA KERJA**	**1.095.436.237.633**	**970.378.750.359**	**214.420.503**	**970.164.329.856**	**(125.271.907.777)**
01	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN PRODUKTIVITAS TENAGA KERJA	503.060.627.701	431.218.245.641	82.588.821	431.135.656.820	(71.924.970.881)
02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS TENAGA KERJA	-	-	40.000	(40.000)	(40.000)
03	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENGEMBANGAN LEMBAGA TENAGA KERJA	229.142.493.660	216.803.163.771	109.289.041	216.693.874.730	(12.448.618.930)
04	PROGRAM PERLUASAN DAN PENGEMBANGAN KESEMPATAN KERJA	363.233.116.272	322.357.340.947	22.502.641	322.334.838.306	(40.898.277.966)
05	PROGRAM PERLUASAN KESEMPATAN KERJA YANG DILAKUKAN PEMERINTAH	-	-	-	-	-
06	PROGRAM PENDUKUNG PASAR KERJA	-	-	-	-	-
04.03	**PERTANIAN, KEHUTANAN, PERIKANAN DAN KELAUTAN**	**11.059.631.142.189**	**7.688.753.369.443**	**118.483.860.302**	**7.570.269.509.141**	**(3.489.361.633.048)**
01	PROGRAM PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	1.504.052.835.512	156.492.464.134	290.480.267	156.201.983.867	(1.347.850.851.645)
02	PROGRAM PEMANTAPAN PEMANFAATAN POTENSI SUMBER DAYA HUTAN	125.444.786.621	58.435.964.566	55.739.200	58.380.225.366	(67.064.561.255)
03	PROGRAM PENGEMBANGAN AGRIBISNIS	2.167.988.758.200	1.981.145.583.965	1.069.459.798	1.980.076.124.167	(187.912.634.033)
04	PROGRAM PENINGKATAN KETAHANAN PANGAN	3.066.560.051.107	2.758.223.811.987	107.347.795.246	2.650.876.016.741	(415.684.034.366)
05	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN SUMBER DAYA KELAUTAN	503.566.148.002	412.718.250.654	141.353.770	412.576.896.884	(90.989.251.118)
06	PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PERIKANAN	1.745.548.069.184	1.267.399.071.805	453.994.784	1.266.945.077.021	(478.602.992.163)
07	PROGRAM PENINGKATAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT PERTANIAN	-	-	1.525.000	(1.525.000)	(1.525.000)
08	PROGRAM PENINGKATAN KESEJAHTERAAN PETANI	1.946.470.493.564	1.054.338.222.332	536.773.587	1.053.801.448.745	(892.669.044.819)
09	PROGRAM PEMBINAAN PRODUKSI KEHUTANAN	-	-	34.375.000	(34.375.000)	(34.375.000)
10	PROGRAM PEMBANGUNAN DAN PEMBINAAN KEHUTANAN	-	-	-	-	-
11	PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA	-	-	-	-	-
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	75.522.450	(75.522.450)	(75.522.450)
15	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	8.460.000.000	(8.460.000.000)	(8.460.000.000)
19	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	11.100.000	(11.100.000)	(11.100.000)
25	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	3.753.200	(3.753.200)	(3.753.200)
90	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	1.988.000	(1.988.000)	(1.988.000)
04.04	**PENGAIRAN**	**5.035.476.188.467**	**4.233.495.916.193**	**1.689.694.394**	**4.231.806.221.799**	**(803.669.966.668)**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DANAU DAN SUMBER AIR LAINNYA	1.913.840.977.246	1.610.499.245.270	6.699.800	1.610.492.545.470	(303.348.431.776)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN, PENGELOLAAN, DAN KONSERVASI SUNGAI, DAN SUMBER AIR LAINNYA	-	-	-	-	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

03	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PENGELOLAAN JARINGAN IRIGASI, RAWA DAN JARINGAN PENGAIRAN LAINNYA	3.121.635.211.221	2.622.996.670.923	1.682.840.268	2.621.313.830.655	(500.321.380.566)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	34.326	(34.326)	(34.326)
90	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	120.000	(120.000)	(120.000)
04.05	**BAHAN BAKAR DAN ENERGI**	**3.336.988.044.820**	**2.900.740.136.474**	**51.794.200**	**2.900.688.342.274**	**(436.299.702.546)**
01	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN	3.027.714.732.334	2.654.090.352.723	-	2.654.090.352.723	(373.624.379.611)
02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI	95.982.721.685	83.719.761.589	-	83.719.761.589	(12.262.960.096)
03	PROGRAM PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI SERTA TEKNOLOGI ENERGI	18.134.195.913	15.606.822.136	280.000	15.606.542.136	(2.527.653.777)
04	PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SARANA DAN PRASARANA ENERGI	51.589.399.170	45.341.655.485	3.764.000	45.337.891.485	(6.251.507.685)
05	PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PEMERINTAH DAERAH, KOPERASI DAN MASYARAKAT TERHADAP JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA ENERGI	43.505.315.115	36.613.297.072	-	36.613.297.072	(6.892.018.043)
06	PROGRAM PENYEMPURNAAN RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN	57.397.389.719	27.689.891.624	16.526.600	27.673.365.024	(29.724.024.695)
07	PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PEMERINTAH DAERAH, KOPERASI DAN MASYARAKAT TERHADAP JASA PELAYANAN SARANA DAN PRASARANA KETENAGALISTRIKAN	877.676.918	854.718.700	-	854.718.700	(22.958.218)
08	PROGRAM PENGUASAAN DAN PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI SERTA BISNIS KETENAGALISTRIKAN	41.786.613.966	36.823.637.145	30.449.400	36.793.187.745	(4.993.426.221)
09	KETENAGALISTRIKAN, USAHA ENERGI TERBARUKAN DAN KONSERVASI	-	-	-	-	-
10	PROGRAM PENGEMBANGAN USAHA DAN PEMANFAATAN MIGAS	-	-	-	-	-
11	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN SDA DAN BATUBARA	-	-	-	-	-
12	PROGRAM PENGELOLAAN USAHA PERTAMBANGAN MIGAS	-	-	-	-	-
17	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	774.200	(774.200)	(774.200)
04.06	**PERTAMBANGAN**	**1.344.341.891.066**	**1.086.760.700.593**	**88.796.800**	**1.086.671.903.793**	**(257.669.987.273)**
01	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MINERAL DAN BATUBARA	692.810.059.277	544.764.981.553	74.953.750	544.690.027.803	(148.120.031.474)
02	PROGRAM PEMBINAAN USAHA PERTAMBANGAN MIGAS	651.531.831.789	541.995.719.040	13.843.050	541.981.875.990	(109.549.955.799)
04.07	**INDUSTRI DAN KONSTRUKSI**	**1.507.071.075.516**	**1.270.095.533.534**	**131.569.300**	**1.269.963.964.234**	**(237.107.111.282)**
01	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS IPTEK SISTEM PRODUKSI	242.892.372.902	235.117.659.879	55.883.300	235.061.776.579	(7.830.596.323)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN INDUSTRI KECIL DAN MENENGAH	418.708.680.698	339.484.264.223	35.123.000	339.449.141.223	(79.259.539.475)
03	PROGRAM PENINGKATAN KEMAMPUAN TEKNOLOGI INDUSTRI	308.560.987.199	273.797.053.653	34.984.250	273.762.069.403	(34.798.917.796)
04	PROGRAM PENATAAN STRUKTUR INDUSTRI	536.909.034.718	421.696.315.779	-	421.696.315.779	(115.212.718.939)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	5.578.750	(5.578.750)	(5.578.750)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

05	PROGRAM TIDAK ADA	-	240.000	-	240.000	240.000
04.08	**TRANSPORTASI**	**18.145.597.009.424**	**16.652.087.425.485**	**4.470.711.558**	**16.647.616.713.927**	**(1.497.980.295.497)**
01	PROGRAM REHABILITASI/PEMELIHARAAN JALAN DAN JEMBATAN	2.440.008.941.525	2.626.726.738.667	184.389.708	2.626.542.348.959	186.533.407.434
02	PROGRAM PENINGKATAN/PEMBANGUNAN JALAN DAN JEMBATAN	7.535.352.511.401	6.548.759.208.916	237.100.702	6.548.522.108.214	(986.830.403.187)
03	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	218.664.452.641	230.119.206.692	-	230.119.206.692	11.454.754.051
04	LLAJ	103.861.320.419	114.003.161.202	-	114.003.161.202	10.141.840.783
05	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA DAN FASILITAS LLAJ	5.401.088.728	5.976.196.998	-	5.976.196.998	575.108.270
06	PROGRAM PENINGKATAN AKSESIBILITAS PELAYANAN ANGKUTAN PERKERETAAPIAN	253.223.339.573	189.184.657.517	-	189.184.657.517	(64.038.682.056)
07	PROGRAM PENINGKATAN DAN PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA KERETA API	2.392.810.794.025	1.900.696.385.514	628.523.022	1.900.067.862.492	(492.742.931.533)
08	PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DAN SARANA KERETA API	5.432.595.079	5.981.454.000	-	5.981.454.000	548.858.921
09	PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI KELEMBAGAAN PERKERETAAPIAN	39.080.450.669	39.155.607.779	771.400	39.154.836.379	74.385.710
10	PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PRASARANA LLAJ	47.564.446.637	48.442.196.820	-	48.442.196.820	877.750.183
11	PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI LAUT	1.576.226.045.778	1.333.198.285.348	50.184.417	1.333.148.100.931	(243.077.944.847)
12	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA TRANSPORTASI LAUT	164.516.947.520	177.411.360.485	665.496.500	176.745.863.985	12.228.916.465
13	PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PERATURAN TRANSPORTASI LAUT	254.457.906.932	249.908.436.943	26.813.044	249.881.623.899	(4.576.283.033)
14	PROGRAM PEMBANGUNAN PRASARANA DAN SARANA ASDP	673.234.857.392	717.885.309.770	-	717.885.309.770	44.650.452.378
15	PROGRAM REHABILITASI PRASARANA DERMAGA SUNGAI, DANAU DAN PENYEBERANGAN	41.784.076.355	45.818.919.430	-	45.818.919.430	4.034.843.075
16	PROGRAM RESTRUKTURISASI DAN REFORMASI KELEMBAGAAN ASDP	20.290.315.035	22.100.082.500	-	22.100.082.500	1.809.767.465
17	PROGRAM PEMBANGUNAN TRANSPORTASI UDARA	1.607.460.901.966	1.620.759.989.738	328.040.705	1.620.431.949.033	12.971.047.067
18	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMELIHARAAN PRASARANA TRANSPORTASI UDARA	177.697.383.676	196.121.764.504	4.200.000	196.117.564.504	18.420.180.828
19	PROGRAM RESTRUKTURISASI KELEMBAGAAN DAN PERATURAN TRANSPORTASI UDARA	103.722.188.373	97.056.496.927	1.838.864.507	95.217.632.420	(8.504.555.953)
20	PROGRAM PENGEMBANGAN TRANSPORTASI ANTARMODA	67.943.272.913	52.621.966.279	32.564.868	52.589.401.411	(15.353.871.502)
21	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PERHUBUNGAN	44.079.531.863	45.377.495.318	75.461.087	45.302.034.231	1.222.502.368
22	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN PEMBINAAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	372.783.640.926	384.782.504.138	47.349.355	384.735.154.783	11.951.513.857
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	350.472.243	(350.472.243)	(350.472.243)
90	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	480.000	(480.000)	(480.000)
04.09	**TELEKOMUNIKASI DAN INFORMATIKA**	**1.532.245.673.403**	**475.583.510.042**	**2.831.140.555**	**472.752.369.487**	**(1.059.493.303.916)**
01	PROGRAM PENYELESAIAN RESTRUKTURISASI POS DAN TELEMATIKA	252.450.847.958	47.663.745.696	25.000.840	47.638.744.856	(204.812.103.102)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

02	PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA POS DAN TELEMATIKA	1.134.220.901.279	369.798.804.054	2.715.207.086	367.083.596.968	(767.137.304.311)
03	PROGRAM PENGUASAAN SERTA PENGEMBANGAN APLIKASI DAN TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	145.573.924.167	58.107.179.096	1.305.000	58.105.874.096	(87.468.050.071)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	57.706.029	(57.706.029)	(57.706.029)
09	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	5.666.600	(5.666.600)	(5.666.600)
19	PROGRAM TIDAK ADA	-	13.781.196	8.725.000	5.056.196	5.056.196
59	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	17.530.000	(17.530.000)	(17.530.000)
04.90	**EKONOMI LAINNYA**	**5.730.814.741.326**	**5.312.618.478.878**	**6.237.406.046**	**5.306.381.072.832**	**(424.433.668.494)**
01	PROGRAM PENINGKATAN IKLIM INVESTASI DAN REALISASI INVESTASI	61.664.590.083	41.019.952.327	26.356.100	40.993.596.227	(20.670.993.856)
02	PROGRAM PENINGKATAN PROMOSI DAN KERJASAMA INVESTASI	154.113.880.814	114.005.847.002	300.261.413	113.705.585.589	(40.408.295.225)
03	PROGRAM PENGEMBANGAN STANDARDISASI NASIONAL	27.438.342.703	18.217.088.407	-	18.217.088.407	(9.221.254.296)
04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN BUMN	95.135.941.695	27.373.818.249	40.723.000	27.333.095.249	(67.802.846.446)
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	5.392.461.986.031	5.112.001.772.893	5.798.718.533	5.106.203.054.360	(286.258.931.671)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	3.985.500	(3.985.500)	(3.985.500)
06	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	250.000	(250.000)	(250.000)
09	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	62.201.500	(62.201.500)	(62.201.500)
90	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	4.910.000	(4.910.000)	(4.910.000)
04.00	**SUB FUNGSI TIDAK ADA**	**-**	**-**	**65.937.616**	**(65.937.616)**	**(65.937.616)**
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	65.937.616	(65.937.616)	(65.937.616)
05	**LINGKUNGAN HIDUP**	**6.319.503.020.782**	**4.953.890.229.832**	**1.310.654.118**	**4.952.579.575.714**	**(1.366.923.445.068)**
05.01	**MANAJEMEN LIMBAH**	**342.419.213.395**	**348.055.467.734**	**15.990.000**	**348.039.477.734**	**5.620.264.339**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN PERSAMPAHAN DAN DRAINASE	316.313.951.208	323.859.826.259	15.990.000	323.843.836.259	7.529.885.051
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KELEMBAGAAN	26.105.262.187	24.195.641.475	-	24.195.641.475	(1.909.620.712)
05.03	**PENANGGULANGAN POLUSI**	**267.052.916.380**	**189.870.340.627**	**7.624.140**	**189.862.716.487**	**(77.190.199.893)**
01	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN LINGKUNGAN HIDUP	5.596.653.149	4.866.396.180	5.434.800	4.860.961.380	(735.691.769)
02	PROGRAM PENGENDALIAN PENCEMARAN DAN PERUSAKAN LINGKUNGAN HIDUP	261.456.263.231	185.003.944.447	1.989.340	185.001.955.107	(76.454.308.124)
10	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	200.000	(200.000)	(200.000)
05.04	**KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM**	**3.935.729.608.374**	**3.177.013.086.694**	**455.867.490**	**3.176.557.219.204**	**(759.172.389.170)**
01	PROGRAM PERLINDUNGAN DAN KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM	371.689.694.513	277.663.630.278	158.980.540	277.504.649.738	(94.185.044.775)
02	PROGRAM REHABILITASI DAN PEMULIHAN CADANGAN SUMBER DAYA ALAM	398.534.245.122	287.774.743.925	141.645.350	287.633.098.575	(110.901.146.547)
03	PROGRAM PENGEMBANGAN KAPASITAS PENGELOLAAN SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	351.815.697.197	312.182.304.000	148.484.100	312.033.819.900	(39.781.877.297)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

04	PROGRAM PENGENDALIAN BANJIR DAN PENGAMANAN PANTAI	2.813.689.971.542	2.299.392.408.491	1.957.500	2.299.390.450.991	(514.299.520.551)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	4.800.000	(4.800.000)	(4.800.000)
05.05	**TATA RUANG DAN PERTANAHAN**	**1.446.288.495.824**	**962.223.834.225**	**571.488.461**	**961.652.345.764**	**(484.636.150.060)**
01	PROGRAM PENATAAN RUANG	213.694.435.607	211.899.853.086	1.099.250	211.898.753.836	(1.795.681.771)
02	PROGRAM PENATAAN RUANG NASIONAL	-	-	-	-	-
03	PROGRAM PENGELOLAAN PERTANAHAN	1.232.594.060.218	750.323.981.139	559.203.461	749.764.777.678	(482.829.282.540)
05	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	2.086.750	(2.086.750)	(2.086.750)
26	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	9.099.000	(9.099.000)	(9.099.000)
05.90	**PERLINDUNGAN LINGKUNGAN HIDUP LAINNYA**	**328.012.786.809**	**276.727.500.552**	**259.684.027**	**276.467.816.525**	**(51.544.970.284)**
01	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS DAN AKSES INFORMASI SUMBER DAYA ALAM DAN LINGKUNGAN HIDUP	168.760.555.028	121.337.415.668	156.714.850	121.180.700.818	(47.579.854.210)
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	159.252.231.781	155.390.084.884	102.929.177	155.287.155.707	(3.965.076.074)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	40.000	(40.000)	(40.000)
06	**PERUMAHAN DAN FASILITAS UMUM**	**10.067.387.507.142**	**9.135.899.186.959**	**1.291.838.646**	**9.134.607.348.313**	**(932.780.158.829)**
06.01	**PENGEMBANGAN PERUMAHAN**	**1.183.476.975.207**	**1.130.941.873.897**	**32.041.170**	**1.130.909.832.727**	**(52.567.142.480)**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN PERUMAHAN	1.183.476.975.207	1.130.941.873.897	32.041.170	1.130.909.832.727	(52.567.142.480)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN PERMUKIMAN	-	-	-	-	-
06.02	**PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PEMUKIMAN**	**2.730.928.132.066**	**2.435.464.239.740**	**208.278.943**	**2.435.255.960.797**	**(295.672.171.269)**
01	PROGRAM LINGKUNGAN SEHAT	354.625.622.610	203.360.643.261	70.826.393	203.289.816.868	(151.335.805.742)
02	PROGRAM PEMBERDAYAAN KOMUNITAS PERUMAHAN	2.376.302.509.456	2.232.103.596.479	129.397.550	2.231.974.198.929	(144.328.310.527)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	8.055.000	(8.055.000)	(8.055.000)
06.03	**PENYEDIAAN AIR MINUM**	**1.570.425.343.097**	**1.425.706.864.619**	**32.210.000**	**1.425.674.654.619**	**(144.750.688.478)**
01	PROGRAM PENYEDIAAN DAN PENGELOLAAN AIR BAKU	441.815.932.658	460.120.165.583	-	460.120.165.583	18.304.232.925
02	PROGRAM PENGEMBANGAN KINERJA PENGELOLAAN AIR MINUM DAN AIR LIMBAH	1.128.609.410.438	965.586.699.036	32.190.000	965.554.509.036	(163.054.901.402)
09	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	20.000	(20.000)	(20.000)
06.90	**PERUMAHAN DAN PEMUKIMAN LAINNYA**	**4.582.557.056.773**	**4.143.786.208.703**	**1.013.276.533**	**4.142.772.932.170**	**(439.784.124.603)**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH PERBATASAN	180.129.009.632	168.131.305.702	9.353.908	168.121.951.794	(12.007.057.838)
02	TUMBUH	417.856.362.791	383.298.885.731	3.254.100	383.295.631.631	(34.560.731.160)
03	PROGRAM PENGEMBANGAN WILAYAH TERTINGGAL	587.176.174.452	580.984.543.138	921.464.360	580.063.078.778	(7.113.095.674)
04	PROGRAM PENGEMBANGAN KAWASAN TERTINGGAL	337.088.878.029	91.004.144.902	-	91.004.144.902	(246.084.733.127)
05	PROGRAM PENGEMBANGAN PERKOTAAN	-	-	-	-	-
06	PROGRAM PENGENDALIAN PEMBANGUNAN KOTA-KOTA BESAR DAN METROPOLITAN	51.618.204.976	58.765.019.701	-	58.765.019.701	7.146.814.725
07	PROGRAM PENINGKATAN PRASARANA DAN SARANA PERDESAAN	876.124.519.418	952.908.972.579	8.305.625	952.900.666.954	76.776.147.536

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

08	PROGRAM PENGEMBANGAN KETERKAITAN PEMBANGUNAN ANTAR KOTA	15.753.175.457	23.312.251.138	-	23.312.251.138	7.559.075.681
09	PROGRAM PENINGKATAN KEBERDAYAAN MASYARAKAT PERDESAAN	1.929.920.581.903	1.732.685.436.953	-	1.732.685.436.953	(197.235.144.950)
10	PROGRAM PENGEMBANGAN KOTA-KOTA KECIL DAN MENENGAH	11.072.231.893	11.176.852.110	-	11.176.852.110	104.620.217
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	175.817.918.221	141.518.796.749	70.898.540	141.447.898.209	(34.370.020.012)
06.06	**SUBFUNGSI TIDAK ADA**	**-**	**-**	**6.032.000**	**(6.032.000)**	**(6.032.000)**
20	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	6.032.000	(6.032.000)	(6.032.000)
07	**KESEHATAN**	**17.159.011.722.399**	**16.009.074.308.104**	**4.617.379.919**	**16.004.456.928.185**	**(1.154.554.794.214)**
07.01	**OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN**	**1.139.350.872.456**	**884.937.503.041**	**309.093.343**	**884.628.409.698**	**(254.722.462.758)**
01	PROGRAM OBAT DAN PERBEKALAN KESEHATAN	869.692.088.297	634.682.840.806	34.972.258	634.647.868.548	(235.044.219.749)
02	PROGRAM PENGAWASAN OBAT DAN MAKANAN	261.557.151.067	242.865.092.668	253.971.885	242.611.120.783	(18.946.030.284)
03	PROGRAM PENGEMBANGAN OBAT ASLI INDONESIA	8.101.633.092	7.389.569.567	1.920.000	7.387.649.567	(713.983.525)
06	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	12.172.000	(12.172.000)	(12.172.000)
14	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	4.090.000	(4.090.000)	(4.090.000)
19	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	1.967.200	(1.967.200)	(1.967.200)
07.02	**PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN**	**8.171.225.951.438**	**8.070.449.896.643**	**114.115.037**	**8.070.335.781.606**	**(100.890.169.832)**
01	PROGRAM UPAYA KESEHATAN PERORANGAN	8.171.225.951.438	8.070.449.896.643	109.844.015	8.070.340.052.628	(100.885.898.810)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	4.271.022	(4.271.022)	(4.271.022)
07.03	**PELAYANAN KESEHATAN MASYARAKAT**	**3.762.789.662.982**	**3.349.362.952.153**	**1.281.340.100**	**3.348.081.612.053**	**(414.708.050.929)**
02	MASYARAKAT	170.779.811.461	145.735.680.365	76.295.607	145.659.384.758	(25.120.426.703)
03	PROGRAM UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	2.188.604.932.584	1.903.622.615.138	860.029.973	1.902.762.585.165	(285.842.347.419)
04	PROGRAM PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYAKIT	972.996.746.406	932.120.201.912	299.525.044	931.820.676.868	(41.176.069.538)
05	PROGRAM PERBAIKAN GIZI MASYARAKAT	430.408.172.531	367.884.454.738	25.186.576	367.859.268.162	(62.548.904.369)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	18.172.900	(18.172.900)	(18.172.900)
06	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	2.130.000	(2.130.000)	(2.130.000)
07.04	**KELUARGA BERENCANA**	**421.308.196.797**	**433.845.336.024**	**78.200.800**	**433.767.135.224**	**12.458.938.427**
01	PROGRAM KELUARGA BERENCANA	321.050.814.945	333.329.938.678	62.050.200	333.267.888.478	12.217.073.533
02	PROGRAM KESEHATAN REPRODUKSI REMAJA	17.005.180.231	15.716.762.125	1.212.000	15.715.550.125	(1.289.630.106)
03	BERKUALITAS	83.252.201.621	84.798.635.221	14.938.600	84.783.696.621	1.531.495.000
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	-	-	-
07.05	**LITBANG KESEHATAN**	**203.743.740.688**	**197.664.769.138**	**12.357.225**	**197.652.411.913**	**(6.091.328.775)**
01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN KESEHATAN	203.743.740.688	197.664.769.138	12.357.225	197.652.411.913	(6.091.328.775)
07.90	**KESEHATAN LAINNYA**	**3.460.593.298.037**	**3.072.813.851.105**	**2.816.542.840**	**3.069.997.308.265**	**(390.595.989.772)**
01	PROGRAM SUMBER DAYA KESEHATAN	694.209.916.154	623.191.708.448	342.728.200	622.848.980.248	(71.360.935.906)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

02	PROGRAM KEBIJAKAN DAN MANAJEMEN PEMBANGUNAN KESEHATAN	578.977.339.766	513.983.792.933	1.401.053.324	512.582.739.609	(66.394.600.157)
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	2.187.406.042.117	1.935.638.349.724	966.199.965	1.934.672.149.759	(252.733.892.358)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	102.768.351	(102.768.351)	(102.768.351)
06	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	3.723.000	(3.723.000)	(3.723.000)
09	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	70.000	(70.000)	(70.000)
07.00	**SUBFUNGSI TIDAK ADA**	**-**	**-**	**119.000**	**(119.000)**	**(119.000)**
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	119.000	(119.000)	(119.000)
07.09	**SUBFUNGSI TIDAK ADA**	**-**	**-**	**1.880.000**	**(1.880.000)**	**(1.880.000)**
01	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	1.880.000	(1.880.000)	(1.880.000)
07.07	**SUBFUNGSI TIDAK ADA**	**-**	**-**	**3.731.574**	**(3.731.574)**	**(3.731.574)**
20	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	3.731.574	(3.731.574)	(3.731.574)
07.99	**SUBFUNGSI TIDAK ADA**		**-**	**-**	**-**	**-**
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	-	-	-
08	**PARIWISATA DAN BUDAYA**	**1.669.281.227.388**	**1.852.222.020.040**	**991.342.234**	**1.851.230.677.806**	**181.949.450.418**
08.01	**PENGEMBANGAN PARIWISATA DAN BUDAYA**	**520.921.614.942**	**492.916.453.729**	**138.651.991**	**492.777.801.738**	**(28.143.813.204)**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN NILAI BUDAYA	73.706.853.011	72.943.969.505	-	72.943.969.505	(762.883.506)
02	PROGRAM PENGELOLAAN KEKAYAAN BUDAYA	97.361.958.105	83.579.456.730	91.970.086	83.487.486.644	(13.874.471.461)
03	PROGRAM PENGELOLAAN KERAGAMAN BUDAYA	45.018.375.211	45.360.660.822	-	45.360.660.822	342.285.611
04	PROGRAM PENGEMBANGAN PEMASARAN PARIWISATA	147.456.172.082	146.708.111.887	-	146.708.111.887	(748.060.195)
05	PROGRAM PENGEMBANGAN DESTINASI PARIWISATA	72.208.415.462	68.383.918.269	-	68.383.918.269	(3.824.497.193)
06	PROGRAM PENGEMBANGAN KEMITRAAN	85.169.841.071	75.898.386.516	39.107.733	75.859.278.783	(9.310.562.288)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	7.574.172	(7.574.172)	(7.574.172)
09	PROGRAM TIDAK ADA	-	4.400.000	-	4.400.000	4.400.000
16	PROGRAM TIDAK ADA	-	37.550.000	-	37.550.000	37.550.000
08.02	**PEMBINAAN KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA**	**503.949.393.955**	**536.945.098.197**	**306.653.432**	**536.638.444.765**	**32.689.050.810**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN PEMUDA	14.402.903.275	13.934.778.840	-	13.934.778.840	(468.124.435)
02	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENINGKATAN PARTISIPASI PEMUDA	84.707.074.888	89.756.468.218	26.590.000	89.729.878.218	5.022.803.330
03	RAGA	18.903.810.549	19.686.078.949	5.120.000	19.680.958.949	777.148.400
04	PROGRAM PEMBINAAN DAN PEMASYARAKATAN OLAH RAGA	272.339.997.127	291.026.718.850	274.943.432	290.751.775.418	18.411.778.291
05	PROGRAM PENINGKATAN SARANA DAN PRASARANA OLAH RAGA	113.595.608.115	122.541.053.340	-	122.541.053.340	8.945.445.225
08.03	**PEMBINAAN PENERBITAN DAN PENYIARAN**	**251.921.818.865**	**443.057.124.256**	**247.584.229**	**442.809.540.027**	**190.887.721.162**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

01	PROGRAM PENGEMBANGAN KOMUNIKASI, INFORMASI DAN MEDIA MASSA	251.921.818.865	443.057.124.256	247.584.229	442.809.540.027	190.887.721.162
02	PROGRAM PENGEMBANGAN, PEMERATAAN DAN PENINGKATAN KUALITAS SARANA DAN PRASARANA TEKNOLOGI INFORMASI	-	-	-	-	-
08.90	**PARIWISATA DAN BUDAYA LAINNYA**	**392.488.399.626**	**379.303.343.858**	**295.666.980**	**379.007.676.878**	**(13.480.722.748)**
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	392.488.399.626	379.260.885.093	295.666.980	378.965.218.113	(13.523.181.513)
09	PROGRAM TIDAK ADA	-	42.458.765	-	42.458.765	42.458.765
08.08	**FUNGSI SUBFUNGSI TIDAK ADA**		**-**	**2.785.602**	**(2.785.602)**	**(2.785.602)**
20	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	2.785.602	(2.785.602)	(2.785.602)
09	**AGAMA**	**1.893.308.043.505**	**1.885.685.898.794**	**1.492.338.796**	**1.884.193.559.998**	**(9.114.483.507)**
09.01	**PENINGKATAN KEHIDUPAN BERAGAMA**	**424.095.545.659**	**419.704.047.030**	**151.888.870**	**419.552.158.160**	**(4.543.387.499)**
01	PROGRAM PENINGKATAN PELAYANAN KEHIDUPAN BERAGAMA	291.315.010.229	292.368.974.262	8.753.810	292.360.220.452	1.045.210.223
02	PROGRAM PENINGKATAN PEMAHAMAN, PENGHAYATAN, PENGAMALAN DAN PENGEMBANGAN NILAI-NILAI KEAGAMAAN	132.780.535.430	127.335.072.768	21.398.860	127.313.673.908	(5.466.861.522)
03	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	-	-	-
04	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	115.000.000	(115.000.000)	(115.000.000)
19	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	6.736.200	(6.736.200)	(6.736.200)
09.02	**KERUKUNAN HIDUP BERAGAMA**	**24.437.032.412**	**24.445.503.874**	**34.200**	**24.445.469.674**	**8.437.262**
01	PROGRAM PENINGKATAN KERUKUNAN UMAT BERAGAMA	24.437.032.412	24.445.503.874	34.200	24.445.469.674	8.437.262
09.03	**LITBANG AGAMA**	**19.704.775.804**	**20.039.898.215**	**2.122.800**	**20.037.775.415**	**332.999.611**
01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN AGAMA	19.704.775.804	20.039.898.215	2.122.800	20.037.775.415	332.999.611
09.90	**PELAYANAN KEAGAMAAN LAINNYA**	**1.425.070.689.630**	**1.421.496.449.675**	**1.337.004.926**	**1.420.159.444.749**	**(4.911.244.881)**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN LEMBAGA-LEMBAGA SOSIAL KEAGAMAAN DAN LEMBAGA PENDIDIKAN KEAGAMAAN	103.812.124.602	110.815.985.956	401.714.800	110.414.271.156	6.602.146.554
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	1.321.258.565.028	1.310.680.463.719	928.313.286	1.309.752.150.433	(11.506.414.595)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	6.976.840	(6.976.840)	(6.976.840)
09.09	**SUBFUNGSI TIDAK ADA**		**-**	**1.288.000**	**(1.288.000)**	**(1.288.000)**
20	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	1.288.000	(1.288.000)	(1.288.000)
10	**PENDIDIKAN**	**50.345.470.881.427**	**50.889.501.546.130**	**46.133.577.215**	**50.843.367.968.915**	**497.897.087.488**
10.01	**PENDIDIKAN ANAK USIA DINI**	**425.960.586.606**	**444.447.469.289**	**309.152.360**	**444.138.316.929**	**18.177.730.323**
01	PROGRAM PENDIDIKAN ANAK USIA DINI	425.960.586.606	444.641.657.777	309.113.880	444.332.543.897	18.371.957.291
11	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	38.480	(38.480)	(38.480)
19	PROGRAM TIDAK ADA	-	(194.188.488)	-	(194.188.488)	(194.188.488)

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

10.02	**PENDIDIKAN DASAR**	**21.346.244.094.120**	**22.511.479.434.630**	**16.993.519.017**	**22.494.485.915.613**	**1.148.241.821.494**
01	PROGRAM WAJIB BELAJAR PENDIDIKAN DASAR SEMBILAN TAHUN	21.346.244.094.120	22.511.463.970.230	16.940.492.470	22.494.523.477.760	1.148.279.383.641
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	46.065.000	(46.065.000)	(46.065.000)
02	PROGRAM TIDAK ADA	-	3.556.000	-	3.556.000	3.556.000
09	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	2.469.900	(2.469.900)	(2.469.900)
10	PROGRAM TIDAK ADA	-	11.908.400	-	11.908.400	11.908.400
19	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	331.500	(331.500)	(331.500)
45	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	4.160.147	(4.160.147)	(4.160.147)
10.03	**PENDIDIKAN MENENGAH**	**4.062.717.371.722**	**4.119.152.760.315**	**855.638.184**	**4.118.297.122.131**	**55.579.750.409**
01	PROGRAM PENDIDIKAN MENENGAH	4.062.717.371.722	4.119.129.200.046	705.586.565	4.118.423.613.481	55.706.241.759
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	6.897.000	(6.897.000)	(6.897.000)
06	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	20.863.192	(20.863.192)	(20.863.192)
19	PROGRAM TIDAK ADA	-	23.560.269	1.571.427	21.988.842	21.988.842
46	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	120.720.000	(120.720.000)	(120.720.000)
10.04	**PENDIDIKAN NON FORMAL DAN INFORMAL**	**1.155.429.913.600**	**1.202.904.222.140**	**112.138.000**	**1.202.792.084.140**	**47.362.170.540**
01	PROGRAM PENDIDIKAN NON FORMAL	1.155.429.913.600	1.202.904.222.140	112.138.000	1.202.792.084.140	47.362.170.540
10.05	**PENDIDIKAN KEDINASAN**	**233.999.827.780**	**213.155.901.073**	**66.061.089**	**213.089.839.984**	**(20.909.987.796)**
01	PROGRAM PENDIDIKAN KEDINASAN	233.999.827.780	212.856.004.373	63.920.060	212.792.084.313	(21.207.743.467)
02	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	2.041.029	(2.041.029)	(2.041.029)
05	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	100.000	(100.000)	(100.000)
10	PROGRAM TIDAK ADA	-	299.896.700	-	299.896.700	299.896.700
10.06	**PENDIDIKAN TINGGI**	**8.446.578.414.806**	**6.911.136.240.481**	**6.709.562.821**	**6.904.426.677.660**	**(1.542.151.737.146)**
01	PROGRAM PENDIDIKAN TINGGI	8.446.578.414.806	6.911.136.240.481	6.638.954.957	6.904.497.285.524	(1.542.081.129.282)
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	63.215.450	(63.215.450)	(63.215.450)
06	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	7.030.500	(7.030.500)	(7.030.500)
10	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	123.280	(123.280)	(123.280)
19	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	238.634	(238.634)	(238.634)
10.07	**PELAYANAN BANTUAN TERHADAP PENDIDIKAN**	**4.828.094.267.210**	**5.080.262.585.009**	**1.907.614.078**	**5.078.354.970.931**	**250.260.703.721**
01	KEPENDIDIKAN	3.554.937.498.635	3.753.524.754.475	1.764.724.990	3.751.760.029.485	196.822.530.850
02	PROGRAM PENGEMBANGAN BUDAYA BACA DAN PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	292.833.144.648	301.275.312.016	45.662.485	301.229.649.531	8.396.504.883
03	PROGRAM MANAJEMEN PELAYANAN PENDIDIKAN	980.323.623.926	1.025.462.518.518	82.738.703	1.025.379.779.815	45.056.155.889
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	987.900	(987.900)	(987.900)
50	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	13.500.000	(13.500.000)	(13.500.000)
10.08	**PEMBINAAN KEAGAMAAN**	**191.391.704.618**	**192.427.938.975**	**10.882.625**	**192.417.056.350**	**1.025.351.732**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

01	PROGRAM PENINGKATAN PENDIDIKAN AGAMA DAN PENDIDIKAN KEAGAMAAN	191.391.704.618	192.427.938.975	10.882.625	192.417.056.350	1.025.351.732
10.09	**LITBANG PENDIDIKAN**	**550.983.688.626**	**564.904.633.547**	**14.058.253.433**	**550.846.380.114**	**(137.308.512)**
01	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN PENDIDIKAN	550.983.688.626	564.891.783.547	13.683.068.416	551.208.715.131	225.026.505
04	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	9.460.000	(9.460.000)	(9.460.000)
10	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	119.200.000	(119.200.000)	(119.200.000)
19	PROGRAM TIDAK ADA	-	12.850.000	246.525.017	(233.675.017)	(233.675.017)
10.90	**PENDIDIKAN LAINNYA**	**9.104.071.012.340**	**9.649.630.360.671**	**5.060.523.558**	**9.644.569.837.113**	**540.498.824.773**
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	9.104.071.012.340	9.649.626.904.311	4.920.172.906	9.644.706.731.405	540.635.719.065
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	132.686.912	(132.686.912)	(132.686.912)
01	PROGRAM TIDAK ADA	-	600.000	4.225.340	(3.625.340)	(3.625.340)
06	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	3.438.400	(3.438.400)	(3.438.400)
07	PROGRAM TIDAK ADA	-	2.114.360	-	2.114.360	2.114.360
10	PROGRAM TIDAK ADA	-	742.000	-	742.000	742.000
11	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	-	-	-
16	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	-	-	-
10.00	**SUBFUNGSI TIDAK ADA**	**-**	**-**	**50.232.050**	**(50.232.050)**	**(50.232.050)**
00	PROGRAM TIDAK ADA		-	50.232.050	(50.232.050)	(50.232.050)
11	**KEPENDUDUKAN DAN PERLINDUNGAN SOSIAL**	**2.921.280.115.401**	**2.651.544.675.847**	**1.173.906.324**	**2.650.370.769.523**	**(270.909.345.878)**
11.04	**ANAK**	**726.646.739.629**	**720.284.470.502**	**425.602.955**	**719.858.867.547**	**(6.787.872.082)**
01	PROGRAM PEMBERDAYAAN FAKIR MISKIN, KOMUNITAS ADAT TERPENCIL (KAT) DAN PENYANDANG MASALAH KESEJAHTER	621.125.203.751	621.930.191.411	419.943.355	621.510.248.056	385.044.305
02	ANAK	7.651.542.365	5.846.762.000	-	5.846.762.000	(1.804.780.365)
03	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS PEREMPUAN	-	-	-	-	-
04	PROGRAM KESERASIAN KEBIJAKAN PENINGKATAN KUALITAS ANAK DAN PEREMPUAN	19.237.073.027	11.157.151.877	1.268.600	11.155.883.277	(8.081.189.750)
05	PROGRAM KETAHANAN DAN PEMBERDAYAAN KELUARGA	78.632.920.486	81.350.365.214	1.040.000	81.349.325.214	2.716.404.728
53	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	3.351.000	(3.351.000)	(3.351.000)
11.05	**PEMBERDAYAAN PEREMPUAN**	**116.716.311.273**	**116.428.068.222**	**28.700.925**	**116.399.367.297**	**(316.943.976)**
01	PROGRAM PENGUATAN KELEMBAGAAN PENGARUSUTAMAAN GENDER DAN ANAK	102.029.850.839	101.213.857.198	8.314.500	101.205.542.698	(824.308.141)
02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS HIDUP DAN PERLINDUNGAN PEREMPUAN	14.686.460.434	15.214.211.024	20.386.425	15.193.824.599	507.364.165
11.06	**PENYULUHAN DAN BIMBINGAN SOSIAL**	**505.969.787.317**	**480.315.811.646**	**54.100.100**	**480.261.711.546**	**(25.708.075.771)**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
MENURUT FUNGSI, SUBFUNGSI, PROGRAM
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

01	PROGRAM PELAYANAN DAN REHABILITASI KESEJAHTERAAN SOSIAL	476.117.937.509	460.011.664.082	54.100.100	459.957.563.982	(16.160.373.527)
02	PROGRAM PENINGKATAN KUALITAS PENYULUHAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	29.851.849.808	20.304.147.564	-	20.304.147.564	(9.547.702.244)
11.08	**BANTUAN DAN JAMINAN SOSIAL**	**1.359.840.961.502**	**1.149.187.354.838**	**368.572.394**	**1.148.818.782.444**	**(211.022.179.058)**
01	PROGRAM BANTUAN DAN JAMINAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	1.359.840.961.502	1.149.187.354.838	368.572.394	**1.148.818.782.444**	(211.022.179.058)
11.09	**LITBANG PERLINDUNGAN SOSIAL**	**97.910.183.014**	**87.283.208.057**	**258.027.600**	**87.025.180.457**	**(10.885.002.557)**
01	SOSIAL	34.239.538.559	27.546.413.310	258.027.600	**27.288.385.710**	(6.951.152.849)
02	PROGRAM PENGEMBANGAN DAN KESERASIAN KEBIJAKAN KESEJAHTERAAN RAKYAT	63.670.644.455	59.736.794.747	-	**59.736.794.747**	(3.933.849.708)
11.90	**PERLINDUNGAN SOSIAL LAINNYA**	**114.196.132.666**	**98.045.762.582**	**38.902.350**	**98.006.860.232**	**(16.189.272.434)**
01	PROGRAM PENGEMBANGAN SISTEM PERLINDUNGAN SOSIAL	4.500.907.274	4.056.605.074	24.159.600	4.032.445.474	(468.461.800)
02	PROGRAM PEMBERDAYAAN KELEMBAGAAN KESEJAHTERAAN SOSIAL	104.421.048.747	90.406.627.226	14.742.750	90.391.884.476	(14.029.164.271)
19	PROGRAM PENYELENGGARAAN PIMPINAN KENEGARAAN DAN KEPEMERINTAHAN	5.274.176.646	3.582.530.282	-	3.582.530.282	(1.691.646.364)
06	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	-	-	-
00	**FUNGSI TIDAK ADA**		**14.645.080**	**60.416.246.836**	**(60.401.601.756)**	**(60.401.601.756)**
00.00	**SUBFUNGSI TIDAK ADA**		**14.645.080**	**60.416.246.836**	**(60.401.601.756)**	**(60.401.601.756)**
00	PROGRAM TIDAK ADA	-	14.645.080	60.416.246.836	(60.401.601.756)	(60.401.601.756)
99	**FUNGSI TIDAK ADA**		**-**	**84.563.607**	**(84.563.607)**	**(84.563.607)**
99.99	**SUBFUNGSI TIDAK ADA**		**-**	**84.563.607**	**(84.563.607)**	**(84.563.607)**
99	PROGRAM TIDAK ADA	-	-	84.563.607	(84.563.607)	(84.563.607)
JUMLAH		**498.172.161.850.000**	**504.955.785.344.562**	**332.521.757.530**	**504.623.263.587.032**	**6.451.101.737.032**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
URUTAN REALISASI BELANJA MENURUT BAGIAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BAGIAN ANGGARAN	ANGGARAN (UU APBN-P TA 2007)	REALISASI
062	SUBSIDI DAN TRANSFER	137.836.443.472.000	179.654.408.301.489
061	CICILAN BUNGA UTANG	83.555.140.000.000	79.197.728.903.074
023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	40.074.346.474.075	40.475.796.860.038
012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	29.773.230.211.694	30.611.147.947.963
033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	24.891.415.293.706	22.769.463.681.901
069	BELANJA LAIN LAIN	32.186.378.378.000	20.756.907.712.830
060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	18.424.174.025.383	19.922.419.927.573
024	DEPARTEMEN KESEHATAN	16.880.092.388.137	15.530.611.914.709
025	DEPARTEMEN AGAMA	13.376.473.550.997	13.298.944.935.016
022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	10.091.591.169.313	9.070.420.840.209
015	DEPARTEMEN KEUANGAN	8.883.242.404.658	6.999.198.838.888
094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	9.381.170.294.923	6.532.842.711.896
018	DEPARTEMEN PERTANIAN	8.078.186.182.181	6.532.289.973.846
020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	5.963.361.943.593	5.141.583.349.400
013	DEPARTEMEN HUKUMDAN HAK ASASI MANUSIA RI	3.780.351.535.229	3.574.325.082.003
011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	4.891.085.467.305	3.376.213.508.269
010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	3.892.629.148.068	3.118.191.893.355
027	DEPARTEMEN SOSIAL	3.040.949.272.096	2.766.030.552.571
005	MAHKAMAH AGUNG	2.854.856.175.949	2.663.597.451.234
026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.682.696.771.595	2.451.144.572.970
032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.001.438.264.637	2.343.111.336.492
029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	3.564.826.941.607	1.761.002.882.776
056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	2.017.687.704.823	1.602.885.717.343
006	KEJAKSAAN AGUNG	1.571.837.987.952	1.590.806.059.616
019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	1.743.359.182.558	1.484.536.559.674
044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	1.395.050.603.110	1.280.792.631.829
090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	1.488.907.999.981	1.233.585.047.181
007	SEKRETARIAT NEGARA	1.435.630.449.121	1.174.499.018.123
054	BADAN PUSAT STATISTIK	1.170.502.529.374	1.173.564.762.943
002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.367.532.577.244	1.068.744.863.500
050	BADAN INTELIJEN NEGARA	965.549.075.336	1.048.013.942.197
051	LEMBAGA SANDI NEGARA	966.742.652.032	1.042.397.717.733
059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	2.341.226.775.240	1.016.015.007.211
068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	965.777.364.954	994.166.103.850
040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	923.043.212.787	882.815.205.417
004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.081.867.924.090	847.433.386.432
092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	606.180.031.168	641.214.638.602
075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	597.595.835.102	610.443.864.578
079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	594.074.373.861	570.521.144.467
081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	554.304.712.764	502.294.104.300
089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	505.899.679.385	482.087.806.479
076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	703.514.838.000	468.602.299.986
042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	433.198.813.357	437.148.029.007
091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	479.485.632.455	419.589.185.855
043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	491.669.114.049	414.227.112.137
067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	628.724.968.579	384.838.647.930
063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	410.959.649.581	377.611.100.143
080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	300.568.872.883	308.622.331.987
088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	343.189.576.981	288.395.907.170
057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	268.116.380.849	271.827.345.253
041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	316.250.994.317	261.846.403.691
065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	348.464.498.077	258.233.118.388
055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	374.872.295.047	252.605.145.603
066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	250.433.940.098	234.464.590.882

LAPORAN REALISASI ANGGARAN BELANJA PEMERINTAH PUSAT
URUTAN REALISASI BELANJA MENURUT BAGIAN ANGGARAN
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE BA	URAIAN BAGIAN ANGGARAN	ANGGARAN (UU APBN-P TA 2007)	REALISASI
083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	230.901.479.729	224.009.626.312
095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	253.489.757.277	201.918.457.134
034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	180.900.203.186	179.927.368.563
082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	183.977.749.845	174.419.572.504
093	KOMISI PEMBERATASAN KORUPSI	311.688.873.805	163.766.036.698
086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	183.541.425.592	157.190.447.891
077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	177.116.220.227	149.713.593.791
047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	150.459.337.647	143.584.709.116
001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	176.544.779.639	141.815.579.299
064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	136.357.611.682	126.303.814.632
105	BADAN PENANGGULANGAN LUMPUR SIDOARJO	450.090.727.356	113.918.811.952
087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	102.645.756.791	95.726.584.607
036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	94.112.897.174	92.263.121.283
048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	222.803.085.489	79.683.101.840
100	KOMISI YUDISIAL RI	101.638.667.986	79.076.366.012
078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	88.221.830.678	76.956.473.359
035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	128.764.375.870	58.662.968.154
085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	56.894.575.364	53.436.105.236
103	BADAN KOORDINASI NASIONAL PENANGANAN BENCANA	55.352.339.487	46.708.319.253
084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	59.436.849.825	35.969.592.691
074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	53.755.493.201	28.458.172.469
052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	27.168.201.849	27.542.786.227
	TOTAL BELANJA PEMERINTAH PUSAT	**498.172.161.850.000**	**504.623.263.587.032**

DAFTAR 3.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2007
(Dalam Rupiah)

KODE	NAMA WILAYAH	DANA BAGI HASIL			DANA ALOKASI UMUM	DANA ALOKASI KHUSUS	TOTAL DANA PERIMBANGAN
		PERPAJAKAN	SDA	JUMLAH			
PBB Bagian Daerah		19.344.035.033.288	-	19.344.035.033.288	-	-	19.344.035.033.288
BPHTB Bagian Deaerah		3.636.993.650.509	-	3.636.993.650.509	-	-	3.636.993.650.509
Biaya Pungut PBB		957.867.618.138	-	957.867.618.138	-	-	957.867.618.138
DBH Pajak Bagian Pusat:							-
01	Instansi Pusat (Rekening Cadangan 2007)	-	1.604.726.104.260	1.604.726.104.260	-	-	1.604.726.104.260
01	Provinsi DKI Jakarta	4.142.514.287.002	127.105.597.007	4.269.619.884.009	119.943.000.000	-	4.389.562.884.009
02	Provinsi Jawa Barat	887.589.270.855	200.613.926.846	1.088.203.197.701	15.733.864.988.000	811.057.405.435	17.633.125.591.136
03	Provinsi Jawa Tengah	544.889.872.324	38.039.734.143	582.929.606.467	17.457.003.991.988	1.289.300.343.472	19.329.233.941.927
04	Provinsi D.I. Yogyakarta	79.859.912.320	967.451.717	80.827.364.037	2.704.390.000.000	175.934.000.000	2.961.151.364.037
05	Provinsi Jawa Timur	769.705.996.515	117.485.515.130	887.191.511.645	18.760.737.999.996	1.340.044.500.000	20.987.974.011.641
06	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	253.695.043.872	2.267.327.464.976	2.521.022.508.848	5.666.370.995.999	729.149.530.000	8.916.543.034.847
07	Provinsi Sumatera Utara	369.025.706.423	17.908.848.820	386.934.555.243	9.511.977.000.000	973.103.373.243	10.872.014.928.486
08	Provinsi Sumatera Barat	192.178.526.911	20.692.774.974	212.871.301.885	5.779.339.999.996	691.364.355.000	6.683.575.656.881
09	Provinsi Riau	307.302.625.082	7.366.629.836.464	7.673.932.461.546	2.629.987.000.000	167.478.400.000	10.471.397.861.546
10	Provinsi Jambi	94.838.570.226	657.956.780.710	752.795.350.936	3.133.538.792.000	343.534.800.000	4.229.868.942.936
11	Provinsi Sumatera Selatan	252.258.276.387	2.266.070.773.141	2.518.329.049.528	4.947.886.000.000	443.019.500.000	7.909.234.549.528
12	Provinsi Lampung	128.267.434.647	314.839.245.566	443.106.680.213	4.718.764.000.000	454.643.300.000	5.616.513.980.213
13	Provinsi Kalimantan Barat	111.929.514.666	54.947.294.800	166.876.809.466	5.079.791.000.000	565.268.000.000	5.811.935.809.466
14	Provinsi Kalimantan Tengah	116.576.810.679	298.893.900.711	415.470.711.390	4.851.376.999.996	485.951.136.364	5.752.798.847.750
15	Provinsi Kalimantan Selatan	144.004.000.769	457.396.043.478	601.400.044.247	3.744.115.992.000	401.084.558.862	4.746.600.595.109
16	Provinsi Kalimantan Timur	491.451.162.027	9.210.060.111.023	9.701.511.273.050	2.994.739.999.984	174.152.900.000	12.870.404.173.034
17	Provinsi Sulawesi Utara	94.020.737.996	8.120.010.061	102.140.748.057	3.071.624.000.000	490.077.100.000	3.663.841.848.058
18	Provinsi Sulawesi Tengah	85.800.492.711	21.611.163.824	107.411.656.535	3.608.223.996.000	449.562.400.000	4.165.198.052.535
19	Provinsi Sulawesi Selatan	280.001.033.392	210.001.968.257	490.003.001.649	7.351.855.000.000	967.257.468.181	8.809.115.469.830
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	88.285.131.040	98.043.454.893	186.328.585.933	3.243.449.599.997	489.628.300.000	3.919.406.485.930
21	Provinsi Maluku	59.804.194.939	20.068.887.903	79.873.082.842	2.782.040.000.000	348.826.700.000	3.210.739.782.842
22	Provinsi Bali	133.700.713.344	1.864.251.720	135.564.965.064	3.292.773.999.996	347.999.200.000	3.776.338.165.060
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	111.255.264.269	149.355.322.410	260.610.586.679	3.478.868.000.000	402.568.700.000	4.142.047.286.679
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	138.428.650.804	3.454.454.872	141.883.105.676	5.059.361.000.000	706.897.900.000	5.908.142.005.676
25	Provinsi Papua	279.944.705.994	1.251.931.065.802	1.531.875.771.796	7.863.524.996.000	842.228.000.000	10.237.628.767.796
26	Provinsi Bengkulu	68.715.001.935	4.732.109.818	73.447.111.753	2.550.302.000.000	407.076.500.000	3.030.825.611.753

DAFTAR 3.A

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL, DANA ALOKASI UMUM, DAN DANA ALOKASI KHUSUS
TAHUN ANGGARAN 2007
(Dalam Rupiah)

KODE	NAMA WILAYAH	DANA BAGI HASIL			DANA ALOKASI UMUM	DANA ALOKASI KHUSUS	TOTAL DANA PERIMBANGAN
		PERPAJAKAN	SDA	JUMLAH			
28	Provinsi Maluku Utara	63.784.645.461	247.620.562.826	311.405.208.287	2.149.096.999.200	355.035.000.000	2.815.537.207.487
29	Provinsi Banten	366.427.395.715	3.832.651.245	370.260.046.960	3.261.483.000.000	234.381.600.000	3.866.124.646.960
30	Provinsi Bangka Belitung	58.215.573.146	190.980.269.498	249.195.842.644	1.736.835.998.000	229.109.000.000	2.215.140.840.644
31	Provinsi Gorontalo	46.717.794.672	2.137.503.633	48.855.298.305	1.420.678.000.000	220.918.000.000	1.690.451.298.305
32	Provinsi Kepulauan Riau	157.460.631.631	755.546.457.852	913.007.089.483	1.456.491.999.200	113.070.250.000	2.482.569.338.683
33	Provinsi Papua Barat	90.351.141.070	101.764.058.628	192.115.199.698	3.159.167.000.000	388.330.100.000	3.739.612.299.698
34	Provinsi Sulawesi Barat	42.181.516.896	3.917.591.327	46.099.108.223	1.467.798.000.000	202.373.900.000	1.716.271.008.223
JUMLAH BRUTO		**34.990.077.937.656**	**28.096.643.188.335**	**63.086.721.125.992**	**164.787.401.348.352**	**16.240.426.220.557**	**244.114.548.694.901**
Pengambalian		(62.156.516)	(144.705.184.931)	(144.767.341.447)	(1.420.000)	(2.606.767.483)	(147.375.528.930)
JUMLAH NETO		**34.990.015.781.140**	**27.951.938.003.404**	**62.941.953.784.545**	**164.787.399.928.352**	**16.237.819.453.074**	**243.967.173.165.971**

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2007
(Dalam Rupiah)

KODE	NAMA WILAYAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
PBB Bagian Daerah		19.344.035.033.288	19.344.035.033.288	-
BPHTB Bagian Deaerah		3.636.993.650.509	3.636.993.650.509	-
Biaya Pungut PBB		957.867.618.138	957.867.618.138	-
DBH Pajak Bagian Pusat :				
01	Provinsi DKI Jakarta	4.142.514.287.003	4.142.514.287.002	1
02	Provinsi Jawa Barat	888.990.375.794	887.589.270.855	1.401.104.938
03	Provinsi Jawa Tengah	548.170.568.781	544.889.872.324	3.280.696.457
04	Provinsi D.I. Yogyakarta	79.859.912.321	79.859.912.320	1
05	Provinsi Jawa Timur	760.208.139.333	769.705.996.515	(9.497.857.180)
06	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	253.896.376.179	253.695.043.872	201.332.305
07	Provinsi Sumatera Utara	369.025.706.427	369.025.706.423	2
08	Provinsi Sumatera Barat	196.783.424.914	192.178.526.911	4.604.898.002
09	Provinsi Riau	308.082.909.151	307.302.625.082	780.284.068
10	Provinsi Jambi	95.310.413.402	94.838.570.226	471.843.176
11	Provinsi Sumatera Selatan	252.263.279.392	252.258.276.387	5.003.004
12	Provinsi Lampung	129.921.205.327	128.267.434.647	1.653.770.679
13	Provinsi Kalimantan Barat	112.077.560.730	111.929.514.666	148.046.066
14	Provinsi Kalimantan Tengah	117.672.751.015	116.576.810.679	1.095.940.335
15	Provinsi Kalimantan Selatan	144.004.000.772	144.004.000.769	1
16	Provinsi Kalimantan Timur	491.451.162.031	491.451.162.027	2
17	Provinsi Sulawesi Utara	94.177.414.419	94.020.737.996	156.676.423
18	Provinsi Sulawesi Tengah	85.916.605.882	85.800.492.711	116.113.172
19	Provinsi Sulawesi Selatan	280.001.033.401	280.001.033.392	6
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	91.486.369.360	88.285.131.040	3.201.238.320
21	Provinsi Maluku	64.206.043.179	59.804.194.939	4.401.848.240
22	Provinsi Bali	133.700.713.542	133.700.713.344	198
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	111.255.264.270	111.255.264.269	2
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	138.613.747.049	138.428.650.804	185.096.246
25	Provinsi Papua	288.412.698.443	279.944.705.994	8.467.992.449
26	Provinsi Bengkulu	69.757.407.993	68.715.001.935	1.042.406.058
28	Provinsi Maluku Utara	71.899.108.375	63.784.645.461	8.114.462.914
29	Provinsi Banten	366.427.395.716	366.427.395.715	1
30	Provinsi Bangka Belitung	58.215.664.147	58.215.573.146	91.002
31	Provinsi Gorontalo	46.717.794.672	46.717.794.672	-
32	Provinsi Kepulauan Riau	157.460.631.631	157.460.631.631	1
33	Provinsi Papua Barat	90.351.141.071	90.351.141.070	(0)
34	Provinsi Sulawesi Barat	42.181.516.895	42.181.516.896	(1)
JUMLAH BRUTO		**35.019.908.924.551**	**34.990.077.937.656**	**29.830.986.895**
Pengembalian			**(62.156.516)**	**62.156.516**
JUMLAH NETO		**35.019.908.924.551**	**34.990.015.781.140**	**29.893.143.411**

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL PAJAK
TAHUN ANGGARAN 2007
(Dalam Rupiah)

KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
PBB Bagian Daerah		19.344.035.033.288	19.344.035.033.288	.
BPHTB Bagian Deaerah		3.636.993.650.509	3.636.993.650.509	-
Biaya Pungut PBB		957.867.618.138	957.867.618.138	-
DBH Pajak Bagian Pusat :				
990015	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	37.233.016.053	37.233.016.053	-
990078	Kab. Aceh Barat	9.245.430.830	9.245.430.830	1
990022	Kab. Aceh Besar	10.746.836.345	10.746.836.345	-
990061	Kab. Aceh Selatan	8.575.439.569	8.575.439.569	-
980007	Kab. Singkil	8.776.139.853	8.776.139.853	-
990082	Kab. Aceh Tengah	8.157.477.965	8.157.477.965	1
990099	Kab. Aceh Tenggara	8.446.912.641	8.446.912.641	-
990057	Kab. Aceh Timur	7.961.321.453	7.961.321.453	-
990040	Kab. Aceh Utara	11.514.755.657	11.514.755.657	-
980053	Kab. Bireuen	8.376.030.351	8.376.030.351	-
990036	Kab. Pidie	10.366.411.664	10.366.411.663	-
993372	Kab. Simeulue	11.787.135.053	11.787.135.053	-
990104	Kota Banda Aceh	22.882.983.611	22.882.983.612	(1)
990111	Kota Sabang	9.684.937.755	9.684.937.754	1
994672	Kota Langsa	9.726.674.417	9.726.674.417	-
994686	Kota Lhokseumawe	14.496.179.505	14.496.179.504	-
997451	Kab. Nagan Raya	8.856.315.537	8.654.983.234	201.332.303
997447	Kab. Aceh Jaya	10.680.741.877	10.680.741.876	1
997426	Kab. Aceh Barat Daya	8.616.691.110	8.616.691.111	-
997430	Kab. Gayo Lues	8.465.905.574	8.465.905.574	-
997468	Kab. Aceh Tamiang	10.761.462.969	10.761.462.969	-
987532	Kab. Bener Meriah	8.537.576.388	8.537.576.388	-
990125	Provinsi Sumatera Utara	69.344.146.890	69.344.146.889	1
990221	Kab. Asahan	11.842.715.582	11.842.715.582	-
990192	Kab. Dairi	6.920.314.237	6.920.314.238	-
990132	Kab. Deli Serdang	14.703.587.605	14.703.587.605	-
990146	Kab. Tanah Karo	9.064.265.689	9.064.265.689	-
990188	Kab. Labuhan Batu	12.807.479.755	12.807.479.755	-
990150	Kab. Langkat	15.900.287.246	15.900.287.246	-
941915	Kab. Mandailing Natal	9.900.326.325	9.900.326.325	-
990235	Kab. Nias	9.712.689.911	9.712.689.910	-
990171	Kab. Simalungun	10.674.460.169	10.674.460.168	1
990214	Kab. Tapanuli Selatan	10.580.599.764	10.580.599.764	(1)
990167	Kab. Tapanuli Tengah	9.415.219.991	9.415.219.990	-
990200	Kab. Tapanuli Utara	9.165.942.324	9.165.942.323	1
941922	Kab. Toba Samosir	10.579.907.177	10.579.907.176	-
990260	Kota Binjai	8.755.295.979	8.755.295.979	-
990242	Kota Medan	51.757.395.632	51.757.395.632	-
990277	Kota Pematang siantar	13.617.846.116	13.617.846.116	-
990298	Kota Sibolga	8.649.635.349	8.649.635.350	-
990281	Kota Tanjung Balai	8.300.018.237	8.300.018.237	-
990256	Kota Tebing Tinggi	8.689.333.396	8.689.333.395	1
994690	Kota Padang Sidimpuan	9.984.120.902	9.984.120.902	1
998147	Kab. Pakpak Bharat	8.848.603.969	8.848.603.970	(1)
998130	Kab. Nias Selatan	12.195.787.612	12.195.787.611	-
998151	Kab. Humbang Hasundutan	8.913.868.549	8.913.868.550	(1)
987418	Kab. Serdang Bedagai	9.928.137.277	9.928.137.276	-
987528	Kab. Samosir	8.773.720.745	8.773.720.744	1
990303	Provinsi Sumatera Barat	25.554.212.856	25.554.230.856	(17.999)
990331	Kab. Limapuluh Koto	6.425.481.533	6.425.481.533	-
990310	Kab. Agam	6.725.295.547	6.725.295.547	-
980060	Kab. Kepulauan Mentawai	8.451.630.268	8.451.630.268	-
990352	Kab. Padang Pariaman	8.387.467.694	8.387.467.693	-
990324	Kab. Pasaman	7.970.361.457	7.970.361.457	-

KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
990366	Kab. Pesisir Selatan	8.409.684.639	8.409.684.639	-
990387	Kab. Sawahlunto Sijunjung	8.088.726.575	8.088.726.574	-
990345	Kab. Solok	8.650.731.747	8.650.731.747	-
990370	Kab. Tanah Datar	8.196.345.078	8.196.345.078	-
990391	Kota Bukit Tinggi	9.508.495.139	9.508.495.139	-
990409	Kota Padang Panjang	7.757.736.281	7.757.736.281	-
990434	Kota Padang	27.757.246.882	27.757.246.882	-
990441	Kota Payakumbuh	6.375.913.310	6.375.913.309	-
990420	Kota Sawahlunto	7.735.797.754	7.735.797.754	-
990413	Kota Solok	7.662.037.163	7.662.037.163	-
997611	Kota Pariaman	7.985.541.754	7.985.541.754	-
987595	Kab. Pasaman Barat	6.171.763.507	6.171.763.508	-
987574	Kab. Dharmasraya	10.547.232.781	5.942.316.779	4.604.916.002
987581	Kab. Solok Selatan	8.421.722.948	8.421.722.949	(1)
990455	Provinsi Riau	89.086.541.779	89.086.541.779	-
990476	Kab. Bengkalis	39.163.766.900	39.163.766.900	-
990502	Kab. Indragiri Hilir	12.791.289.686	12.791.289.686	-
990497	Kab. Indragiri Hulu	10.462.111.746	10.462.111.746	(1)
990462	Kab. Kampar	9.377.994.855	9.342.412.402	35.582.453
980138	Kab. Kuantan Singingi	9.525.564.637	9.525.564.637	-
980074	Kab. Pelalawan	14.344.022.869	14.344.022.869	-
980095	Kab. Rokan Hilir	10.159.559.102	10.159.559.102	(1)
980081	Kab. Rokan Hulu	12.364.965.058	11.620.263.443	744.701.615
980100	Kab. Siak	17.324.968.974	17.324.968.974	-
980142	Kota Dumai	40.922.962.286	40.922.962.285	1
990519	Kota Pekanbaru	42.559.161.260	42.559.161.259	1
998840	Provinsi Kepulauan Riau	48.868.976.367	48.868.976.367	-
990480	Kab. Bintan	12.775.812.129	12.775.812.130	(1)
980121	Kab. Natuna	12.121.964.985	12.121.964.984	1
980117	Kab. Karimun	9.875.988.624	9.875.988.625	-
990523	Kota Batam	51.588.881.708	51.588.881.707	1
994708	Kota Tanjung Pinang	11.434.581.109	11.434.581.109	-
987464	Kab. Lingga	10.794.426.708	10.794.426.708	-
990530	Provinsi Jambi	13.740.417.686	13.740.417.686	-
990544	Kab. Batanghari	10.074.325.349	10.074.325.348	1
990565	Kab. Bungo	6.997.932.258	6.997.932.259	(1)
990586	Kab. Kerinci	6.213.321.650	6.213.321.649	-
990572	Kab. Merangin	6.723.907.704	6.723.907.704	-
980184	Kab. Muaro Jambi	8.991.934.667	8.991.934.666	-
980163	Kab. Sarolangun	6.250.226.688	6.056.679.792	193.546.896
990551	Kab. Tanjung Jabung Barat	6.228.508.913	6.228.508.913	-
980522	Kab. Tanjung Jabung Timur	8.865.975.198	8.587.678.924	278.296.275
980170	Kab. Tebo	7.462.955.340	7.462.955.336	4
990590	Kota Jambi	13.760.907.949	13.760.907.948	1
990608	Provinsi Sumatera Selatan	61.389.585.859	61.389.585.859	-
990661	Kab. Lahat	10.373.013.562	10.373.013.563	-
990633	Kab. Musi Banyuasin	14.228.975.469	14.228.975.469	-
990675	Kab. Musi Rawas	10.406.658.075	10.406.658.074	-
990654	Kab. Muara Enim	16.499.392.790	16.499.392.789	-
990682	Kab. Ogan Komering Ilir	14.092.766.655	14.092.766.656	(1)
990640	Kab. Ogan Komering Ulu	8.664.034.375	8.664.034.374	1
990696	Kota Palembang	47.157.065.332	47.157.065.333	-
994729	Kota Pagar Alam	8.926.207.105	8.926.204.102	3.003
994733	Kota Lubuk Linggau	10.842.787.162	10.842.787.162	-
994712	Kota Prabumulih	11.449.597.973	11.449.597.973	-
997557	Kab. Banyuasin	12.817.608.089	12.817.608.090	(1)
987560	Kab. Ogan Ilir	8.780.012.930	8.780.012.930	-
987549	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	9.229.559.842	9.224.559.841	5.000.001
987553	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	7.406.014.173	7.406.014.172	1
993813	Provinsi Bangka Belitung	7.810.548.356	7.810.548.356	-
990629	Kab. Bangka	6.288.941.448	6.288.941.448	-
990612	Kab. Belitung	6.465.708.877	6.465.708.877	-
990701	Kota Pangkal Pinang	13.139.431.755	13.139.340.755	91.000
998189	Kab. Bangka Selatan	6.077.386.267	6.077.386.264	3

KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
998172	Kab. Bangka Tengah	6.612.225.846	6.612.225.847	(1)
998168	Kab. Bangka Barat	5.859.608.816	5.859.608.816	-
998193	Kab. Belitung Timur	5.961.812.782	5.961.812.782	-
990718	Provinsi Bengkulu	6.308.676.890	6.308.676.889	1
990739	Kab. Bengkulu Selatan	5.740.161.881	5.740.161.880	-
990722	Kab. Bengkulu Utara	6.119.678.088	5.943.095.755	176.582.333
990743	Kab. Rejang Lebong	6.119.567.477	6.119.567.477	-
990750	Kota Bengkulu	9.805.892.428	8.940.068.703	865.823.725
998215	Kab. Kaur	7.949.100.406	7.949.100.406	-
998201	Kab. Seluma	6.303.473.853	6.303.473.853	(1)
998503	Kab. Mukomuko	5.948.949.068	5.948.949.068	-
987600	Kab. Lebong	7.356.467.172	7.356.467.172	(1)
987617	Kab. Kepahiang	8.105.440.730	8.105.440.730	-
990764	Provinsi Lampung	25.753.851.334	25.753.851.335	(1)
990807	Kab. Lampung Barat	8.688.068.732	8.688.068.733	-
990771	Kab. Lampung Selatan	9.122.051.415	9.122.051.415	-
990785	Kab. Lampung Tengah	7.933.744.706	7.933.744.705	1
990792	Kab. Lampung Utara	9.433.120.584	9.433.120.584	-
980191	Kab. Lampung Timur	7.298.057.653	7.298.057.653	-
993351	Kab. Tanggamus	7.288.892.184	7.288.892.184	(1)
993347	Kab. Tulang Bawang	14.321.129.159	12.667.358.480	1.653.770.680
980206	Kab. Way Kanan	11.689.869.574	11.689.869.574	-
990811	Kota Bandar Lampung	17.335.997.769	17.335.997.769	-
980210	Kota Metro	11.056.422.216	11.056.422.216	-
990828	Provinsi DKI Jakarta	4.142.514.287.003	4.142.514.287.002	1
990881	Provinsi Jawa Barat	290.820.081.568	290.820.081.569	(1)
991003	Kab. Bandung	20.530.547.342	19.129.444.748	1.401.102.595
990963	Kab. Bekasi	112.689.717.068	112.689.717.067	-
990938	Kab. Bogor	35.268.835.769	35.268.835.768	1
991045	Kab. Ciamis	14.539.662.943	14.539.662.942	-
990959	Kab. Cianjur	12.703.272.150	12.703.272.150	-
991052	Kab. Cirebon	15.067.878.319	15.067.878.319	-
991024	Kab. Garut	15.255.267.022	15.255.267.023	(1)
991070	Kab. Indramayu	25.662.110.737	25.662.110.737	-
990970	Kab. Karawang	38.145.410.288	38.145.410.289	-
991066	Kab. Kuningan	14.330.688.892	14.330.688.892	-
991087	Kab. Majalengka	14.674.993.547	14.674.993.547	-
990984	Kab. Purwakarta	17.928.198.202	17.928.198.201	-
990991	Kab. Subang	12.239.888.673	12.239.888.673	-
990942	Kab. Sukabumi	10.773.322.329	10.773.322.330	-
991010	Kab. Sumedang	12.184.656.646	12.184.656.646	-
991031	Kab. Tasikmalaya	15.339.747.192	15.339.747.192	(1)
991091	Kota Bandung	62.489.102.414	62.489.102.376	38
993330	Kota Bekasi	33.624.188.442	33.624.186.135	2.307
991109	Kota Bogor	20.157.353.963	20.157.353.962	1
991120	Kota Cirebon	16.371.139.458	16.371.139.458	-
980032	Kota Depok	24.798.491.295	24.798.491.295	-
991113	Kota Sukabumi	10.698.061.015	10.698.061.015	-
994754	Kota Cimahi	13.298.704.594	13.298.704.594	-
994740	Kota Tasikmalaya	16.542.818.112	16.542.818.112	-
998126	Kota Banjar	12.856.237.816	12.856.237.817	(1)
993809	Provinsi Banten	131.715.972.811	131.715.972.811	-
990917	Kab. Lebak	16.514.360.069	16.514.360.068	1
990900	Kab. Pandeglang	16.355.686.809	16.355.686.808	-
990895	Kab. Serang	29.871.383.137	29.871.383.137	-
990921	Kab. Tangerang	65.877.906.117	65.877.906.117	-
980049	Kota Cilegon	40.231.434.959	40.231.434.959	-
991134	Kota Tangerang	65.860.651.814	65.860.651.815	-
991141	Provinsi Jawa Tengah	115.699.245.585	115.699.245.586	(1)
991329	Kab. Banjarnegara	10.613.309.967	10.613.309.967	-
991290	Kab. Banyumas	13.413.800.294	13.413.800.294	-
991202	Kab. Batang	10.057.578.979	10.057.578.979	-
991286	Kab. Blora	11.252.739.024	11.252.738.735	289
991396	Kab. Boyolali	10.351.234.876	10.351.234.875	1

KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
991223	Kab. Brebes	12.070.296.543	12.070.296.543	-
991308	Kab. Cilacap	27.716.523.496	27.716.523.493	3
991176	Kab. Demak	10.696.510.111	10.696.510.111	-
991180	Kab. Grobogan	17.110.612.913	17.110.612.913	-
991265	Kab. Jepara	10.857.668.912	10.857.668.781	131
991422	Kab. Karanganyar	8.267.288.115	8.267.288.115	-
991375	Kab. Kebumen	11.942.416.854	11.942.416.853	1
991162	Kab. Kendal	8.396.679.620	8.396.679.620	-
991382	Kab. Klaten	9.098.228.431	9.098.228.284	147
991244	Kab. Kudus	24.915.139.492	24.915.139.086	406
991333	Kab. Magelang	12.147.822.610	12.147.822.611	-
991230	Kab. Pati	8.664.237.971	8.664.237.968	3
991197	Kab. Pekalongan	10.820.950.020	10.820.950.020	-
991251	Kab. Pemalang	9.881.216.791	9.881.216.791	-
991312	Kab. Purbalingga	11.181.384.895	11.181.384.574	321
991361	Kab. Purworejo	11.099.295.285	10.620.807.629	478.487.656
991272	Kab. Rembang	9.903.997.712	9.903.995.663	2.050
991155	Kab. Semarang	9.156.147.339	6.353.942.150	2.802.205.189
991401	Kab. Sragen	10.589.429.999	10.589.430.000	-
991418	Kab. Sukoharjo	9.048.695.034	9.048.695.033	1
991219	Kab. Tegal	7.863.046.795	7.863.046.795	1
991340	Kab. Temanggung	9.949.113.309	9.949.113.309	-
991439	Kab. Wonogiri	10.898.341.320	10.898.341.062	258
991354	Kab. Wonosobo	9.818.477.193	9.818.477.193	-
991485	Kota Magelang	10.242.553.102	10.242.553.102	1
991464	Kota Pekalongan	9.919.976.060	9.919.976.060	1
991450	Kota Salatiga	8.593.418.308	8.593.418.309	-
991443	Kota Semarang	40.943.652.286	40.943.652.285	1
991492	Kota Surakarta	13.899.575.088	13.899.575.088	-
991471	Kota Tegal	11.089.964.449	11.089.964.449	-
991507	Provinsi D.I. Yogyakarta	19.905.193.389	19.905.193.389	1
991511	Kab. Bantul	8.894.102.507	8.894.102.507	-
991532	Kab. Gunung Kidul	9.771.793.294	9.771.793.294	-
991549	Kab. Kulon Progo	9.914.072.743	9.914.072.743	-
991528	Kab. Sleman	16.181.163.436	16.181.163.436	-
991553	Kota Yogyakarta	15.193.586.950	15.193.586.950	-
991560	Provinsi Jawa Timur	195.551.077.910	195.551.077.910	-
991642	Kab. Bangkalan	10.353.460.135	10.353.460.135	-
991670	Kab. Banyuwangi	10.115.153.645	10.115.153.646	(1)
991773	Kab. Blitar	10.660.450.661	10.660.450.659	2
991837	Kab. Bojonegoro	12.910.854.531	12.910.854.532	-
991659	Kab. Bondowoso	10.314.931.049	10.314.931.049	-
991574	Kab. Gresik	25.054.618.636	25.054.618.636	-
991684	Kab. Jember	11.666.208.169	11.666.208.170	(1)
991600	Kab. Jombang	12.051.177.403	12.051.177.403	-
991731	Kab. Kediri	11.889.432.545	11.889.432.545	-
991858	Kab. Lamongan	11.018.805.478	11.018.805.477	1
991727	Kab. Lumajang	8.239.891.713	7.589.627.771	650.263.942
991780	Kab. Madiun	10.426.376.661	10.426.376.661	-
991802	Kab. Magetan	10.947.932.672	10.947.932.672	-
991691	Kab. Malang	12.735.164.729	12.735.164.729	-
991581	Kab. Mojokerto	11.327.396.809	11.327.396.809	-
991752	Kab. Nganjuk	11.603.333.670	11.603.333.671	-
991794	Kab. Ngawi	10.927.716.329	10.927.716.327	2
991820	Kab. Pacitan	10.414.691.015	10.414.691.015	(1)
991621	Kab. Pamekasan	11.730.394.134	11.730.394.134	-
991706	Kab. Pasuruan	16.229.039.739	16.229.039.740	(1)
991816	Kab. Ponorogo	11.213.699.413	11.213.699.413	-
991710	Kab. Probolinggo	9.862.877.320	9.862.877.320	-
991617	Kab. Sampang	10.441.442.784	10.441.442.785	(1)
991595	Kab. Sidoarjo	32.822.301.747	42.970.422.925	(10.148.121.178)
991663	Kab. Situbondo	9.399.725.143	9.399.725.143	-
991638	Kab. Sumenep	10.556.252.993	10.556.252.993	-
991769	Kab. Trenggalek	10.949.233.514	10.949.233.514	-

KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
991841	Kab. Tuban	14.438.203.848	14.438.203.848	-
991748	Kab. Tulungagung	11.601.519.370	11.601.519.370	-
991912	Kota Blitar	10.769.505.206	10.769.505.206	-
991926	Kota Kediri	14.668.923.715	14.668.923.715	-
991930	Kota Madiun	12.141.819.824	12.141.819.769	55
991883	Kota Malang	18.238.984.536	18.238.984.536	-
991879	Kota Mojokerto	10.916.157.856	10.916.157.857	(1)
991890	Kota Pasuruan	8.870.864.997	8.870.864.997	-
991905	Kota Probolinggo	10.539.703.934	10.539.703.934	-
991862	Kota Surabaya	108.435.456.295	108.435.456.295	-
994761	Kota Batu	8.173.359.202	8.173.359.202	-
991947	Provinsi Kalimantan Barat	15.028.328.588	15.028.328.577	11
980227	Kab. Bengkayang	5.997.845.547	5.849.799.493	148.046.053
980231	Kab. Landak	6.348.174.320	6.348.174.320	-
991993	kab. Kapuas Hulu	9.030.598.169	9.030.598.170	-
992008	Kab. Ketapang	9.775.442.182	9.775.442.182	-
991989	Kab. Pontianak	7.019.632.274	7.019.632.273	1
991951	Kab. Sambas	6.317.970.823	6.317.970.823	1
991968	Kab. Sanggau	9.065.731.860	9.065.731.860	-
991972	Kab. Sintang	6.454.468.937	6.454.468.938	-
992012	Kota Pontianak	14.073.930.686	14.073.930.686	-
994775	Kota Singkawang	6.999.692.874	6.999.692.874	-
987507	Kab. Sekadau	7.893.069.556	7.893.069.556	-
987492	Kab. Melawi	8.072.674.914	8.072.674.915	-
992029	Provinsi Kalimantan Tengah	8.961.644.902	8.961.644.902	-
992054	Kab. Barito Selatan	8.345.800.679	8.221.391.445	124.409.234
992040	Kab. Barito Utara	8.370.723.673	8.370.723.673	-
992033	Kab. Kapuas	8.812.655.455	8.812.655.455	-
992075	Kab. Kotawaringin Barat	7.158.420.303	7.158.420.303	-
992061	Kab. Kotawaringin Timur	7.435.644.988	7.435.644.988	-
992082	Kota Palangkaraya	8.297.746.289	11.764.668.403	(3.466.922.114)
997540	Kab. Barito Timur	6.098.508.645	6.098.508.646	(1)
997536	Kab. Murung Raya	8.789.509.709	8.789.509.709	-
997522	Kab. Pulang Pisau	8.265.485.592	8.265.485.592	-
997515	Kab. Gunung Mas	7.755.096.975	3.316.643.759	4.438.453.216
997501	Kab. Lamandau	7.625.814.340	7.625.814.340	-
997493	Kab. Sukamara	8.041.096.050	8.041.096.050	-
997472	Kab. Katingan	5.835.037.816	5.835.037.816	-
997489	Kab. Seruyan	7.879.565.597	7.879.565.597	-
992164	Provinsi Kalimantan Selatan	22.154.103.980	22.154.103.980	(1)
992171	Kab. Banjar	6.864.918.219	6.864.918.218	1
992228	Kab. Barito Kuala	8.123.643.873	8.123.643.873	-
992207	Kab. Hulu Sungai Selatan	8.078.541.755	8.078.541.755	-
992211	Kab. Hulu Sungai Tengah	8.937.689.606	8.937.689.606	-
992253	Kab. Hulu Sungai Utara	8.135.249.365	8.135.249.364	1
992249	Kab. Kota Baru	12.723.848.155	12.723.848.155	-
992232	Kab. Tabalong	10.330.004.472	10.330.004.472	-
992185	Kab. Tanah Laut	9.363.897.536	9.363.897.535	1
992192	Kab. Tapin	8.728.786.016	8.728.786.016	-
980248	Kota Banjar Baru	9.340.866.518	9.340.866.519	(1)
992260	Kota Banjarmasin	16.134.881.413	16.134.881.413	-
998236	Kab. Balangan	8.510.580.242	8.510.580.242	-
998222	Kab. Tanah Bumbu	6.576.989.622	6.576.989.622	-
992096	Provinsi Kalimantan Timur	154.808.474.305	154.808.474.306	-
992139	Kab. Berau	12.506.381.377	12.506.381.377	-
992122	Kab. Bulungan	12.096.109.843	12.096.109.842	-
992101	Kab. Kutai Kartanegara	23.524.573.598	23.524.573.597	-
980273	Kab. Kutai Barat	14.886.558.930	14.886.558.929	1
980280	Kab. Kutai Timur	28.715.991.416	28.715.991.416	(1)
980269	Kab. Malinau	14.730.132.074	14.730.132.073	-
980252	Kab. Nunukan	13.396.753.890	13.396.753.889	1
992118	Kab. Pasir	13.173.184.232	13.173.184.232	-
992150	Kota Balikpapan	115.250.473.368	115.250.473.368	1
980294	Kota Bontang	37.526.900.562	37.526.900.562	1

KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
992143	Kota Samarinda	18.594.335.548	18.594.335.548	-
941901	Kota Tarakan	16.170.683.570	16.170.683.570	-
997561	Kab. Penajam Paser Utara	16.070.609.317	16.070.609.317	-
993021	Provinsi Sulawesi Utara	14.319.397.845	14.319.395.220	2.624
993059	Kab. Bolaang Mongondow	6.453.276.475	6.453.276.475	-
993042	Kab. Minahasa	6.367.735.089	6.367.735.089	-
993063	Kab. Sangihe	8.334.011.179	8.334.011.180	-
993091	Kota Bitung	9.034.377.278	9.034.377.279	-
993070	Kota Manado	15.881.638.037	15.881.638.037	-
997412	Kab. Kepulauan Talaud	8.267.478.273	8.110.804.477	156.673.796
998240	Kab. Minahasa Selatan	8.167.270.224	8.167.270.224	-
998257	Kota Tomohon	10.840.004.507	10.840.004.506	1
987485	Kab. Minahasa Utara	6.512.225.512	6.512.225.511	1
993820	Provinsi Gorontalo	3.338.515.089	3.338.515.089	-
980302	Kab. Boalemo	9.029.549.176	9.029.549.176	-
993038	Kab. Gorontalo	8.632.470.286	8.632.470.287	-
993084	Kota Gorontalo	9.281.035.558	9.281.035.558	-
998261	Kab. Pohuwato	8.065.645.840	8.065.645.840	-
998278	Kab. Bone Bolango	8.370.578.723	8.370.578.723	-
992960	Provinsi Sulawesi Tengah	7.871.441.047	7.871.441.043	4
993000	Kab. Banggai	8.797.199.234	8.797.199.234	-
980337	Kab. Banggai Kepulauan	7.882.544.438	7.882.544.437	1
980316	Kab. Buol	8.340.263.166	8.224.149.999	116.113.167
992998	Kab. Toli-Toli	6.009.360.799	6.009.360.799	-
992981	Kab. Donggala	5.795.053.206	5.795.053.206	-
980320	Kab. Morowali	8.371.499.418	8.371.499.418	-
992977	Kab. Poso	7.959.260.095	7.959.260.095	-
993017	Kota Palu	10.311.029.144	10.311.029.145	-
997582	Kab. Parigi Moutong	6.539.467.217	6.539.467.217	-
987471	Kab. Tojo Una Una	8.039.488.117	8.039.488.117	-
992722	Provinsi Sulawesi Selatan	43.531.573.200	43.531.573.198	2
992846	Kab. Bantaeng	7.853.318.000	7.853.318.000	-
992888	Kab. Barru	8.078.961.500	8.078.961.500	-
992778	Kab. Bone	9.688.317.786	9.688.317.786	-
992832	Kab. Bulukumba	8.544.718.189	8.544.718.190	-
992935	Kab. Enrekang	8.744.015.657	8.744.015.657	-
992740	Kab. Gowa	8.997.684.797	8.997.684.797	-
992850	Kab. Jeneponto	8.996.690.522	8.996.690.521	-
992811	Kab. Luwu	8.700.282.851	8.700.282.848	3
980341	Kab. Luwu Utara	11.358.507.096	11.358.507.096	-
992799	Kab. Maros	8.893.293.576	8.893.293.575	1
992900	Kab. Pangkajene Kepulauan	9.809.841.024	9.809.841.023	-
992736	Kab. Pinrang	8.529.815.693	8.529.815.693	-
992867	Kab. Selayar	8.165.994.494	8.165.994.493	1
992892	Kab. Sidenreng Rappang	8.769.162.737	8.769.162.738	(1)
992825	Kab. Sinjai	8.056.794.174	8.056.794.173	-
992914	Kab. Soppeng	8.432.916.362	8.432.916.361	-
992871	Kab. Takalar	8.461.784.186	8.461.784.186	-
992782	Kab. Tana Toraja	9.447.685.424	9.447.685.424	-
992757	Kab. Wajo	8.775.895.840	8.775.895.839	-
992956	Kota Pare-Pare	10.046.703.052	10.046.703.052	-
992942	Kota Makassar	32.799.553.711	32.799.553.711	-
997604	Kota Palopo	9.400.758.643	9.400.758.643	1
928282	Kab. Luwu Timur	15.916.764.887	15.916.764.887	-
955383	Provinsi Sulawesi Barat	3.368.845.541	3.368.845.540	-
992804	Kab. Majene	7.627.573.541	7.627.573.542	-
992761	Kab. Mamuju	8.875.093.490	8.875.093.490	-
992921	Kab. Polewali Mandar	8.006.031.943	8.006.031.944	-
997599	Kab. Mamasa	8.260.756.053	8.260.756.054	(1)
998299	Kab. Mamuju Utara	6.043.216.327	6.043.216.326	-
993106	Provinsi Sulawesi Tenggara	8.196.964.156	8.196.964.155	1
993127	Kab. Buton	7.965.192.558	7.965.192.558	-
993110	Kab. Konawe	8.110.163.377	8.110.163.377	-
993148	Kab. Kolaka	10.517.449.447	10.010.988.065	506.461.381

KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
993131	Kab. Muna	8.243.984.392	8.243.984.393	(1)
993326	Kota Kendari	9.266.865.046	8.413.739.584	853.125.462
994782	Kota Bau-Bau	8.266.918.856	8.266.918.857	(1)
998304	Kab. Konawe Selatan	7.736.042.754	7.736.042.755	(1)
987642	Kab. Bombana	7.676.946.451	7.676.946.452	-
987638	Kab. Wakatobi	8.223.908.510	8.223.908.509	-
987443	Kab. Kolaka Utara	7.281.933.813	5.440.282.335	1.841.651.478
992274	Provinsi Bali	32.642.389.415	32.642.389.414	1
992342	Kab. Badung	17.953.125.240	17.953.125.240	-
992338	Kab. Bangli	8.488.502.306	8.488.502.307	-
992281	Kab. Buleleng	8.446.079.797	8.446.079.796	-
992317	Kab. Gianyar	10.378.095.355	10.378.095.355	-
992295	Kab. Jembrana	7.286.356.419	7.286.356.419	-
992321	Kab. Karangasem	9.777.143.544	9.777.143.543	-
992300	Kab. Klungkung	8.495.232.332	8.495.232.135	197
992359	Kab. Tabanan	7.452.793.889	7.452.793.889	-
992363	Kota Denpasar	22.780.995.246	22.780.995.246	-
992370	Provinsi Nusa Tenggara Barat	23.990.426.614	23.990.426.615	-
992410	Kab. Bima	6.566.770.144	6.566.770.145	(1)
992431	Kab. Dompu	6.777.486.455	6.777.486.455	-
992384	Kab. Lombok Barat	7.614.774.943	7.614.774.942	1
992391	Kab. Lombok Tengah	7.316.748.806	7.316.748.806	1
992406	Kab. Lombok Timur	7.316.748.806	7.316.748.806	1
992427	Kab. Sumbawa	7.116.044.187	7.116.044.186	1
992448	Kota Mataram	15.363.454.501	15.363.454.500	-
997625	Kota Bima	8.979.299.258	8.979.299.258	-
987450	Kab. Sumbawa Barat	20.213.510.557	20.213.510.557	-
992452	Provinsi Nusa Tenggara Timur	10.528.161.897	10.528.161.897	-
992502	Kab. Alor	8.045.074.289	8.045.074.288	1
992473	Kab. Belu	8.252.952.957	8.252.952.957	-
992537	Kab. Ende	8.070.593.752	8.070.593.751	1
992520	Kab. Flores Timur	7.956.363.129	7.956.363.129	-
992469	Kab. Kupang	7.939.221.373	7.939.221.373	-
980379	Kab. Lembata	8.197.878.091	8.197.878.090	1
992558	Kab. Manggarai	8.461.754.701	8.461.754.701	-
992541	Kab. Ngada	7.663.447.807	7.663.447.807	1
992516	Kab. Sikka	7.538.686.657	7.538.676.657	10.000
992579	Kab. Sumba Barat	7.845.959.672	7.845.959.672	-
992562	Kab. Sumba Timur	5.880.137.737	5.880.137.736	1
992494	Kab. Timor Tengah Selatan	8.520.843.964	8.520.843.964	(1)
992480	Kab. Timor Tengah Utara	7.655.810.918	7.556.390.049	99.420.868
993368	Kota Kupang	10.456.286.891	10.456.286.891	-
997578	Kab. Rote Ndao	7.606.406.505	7.606.406.505	-
998510	Kab. Manggarai Barat	7.994.166.710	7.908.501.337	85.665.373
993152	Provinsi Maluku	3.671.556.834	3.671.556.834	-
980358	Kab. Maluku Tenggara Barat	5.528.183.601	5.528.183.600	-
993169	Kab. Maluku Tengah	7.379.852.867	7.376.758.493	3.094.374
993173	Kab. Maluku Tenggara	8.175.586.160	8.175.586.160	-
980362	Kab. Pulau Buru	7.700.110.290	7.700.110.291	(1)
993202	Kota Ambon	12.369.613.580	12.369.613.578	2
987439	Kab. Seram Bagian Barat	5.751.427.364	1.352.673.501	4.398.753.863
987422	Kab. Seram Bagian Timur	5.630.818.586	5.630.818.587	-
987621	Kab. Kepulauan Aru	7.998.893.898	7.998.893.898	1
980011	Provinsi Maluku Utara	5.233.797.150	5.233.797.150	-
993194	Kab. Halmahera Tengah	7.775.818.162	7.775.818.162	-
993180	Kab. Halmahera Barat	7.113.715.944	7.113.715.945	-
980028	Kota Ternate	10.879.014.164	10.879.014.164	-
998346	Kab. Halmahera Timur	7.374.352.793	7.374.352.793	(1)
998350	Kota Tidore Kepulauan	7.263.777.680	7.263.777.680	-
998332	Kab. Kepulauan Sula	8.042.727.270	5.240.522.081	2.802.205.189
998325	Kab. Halmahera Selatan	8.297.655.037	8.297.655.037	-
998311	Kab. Halmahera Utara	9.918.250.175	4.605.992.449	5.312.257.726
993216	Provinsi Papua	52.114.004.810	52.114.004.810	-
993237	Kab. Biak Numfor	7.159.718.901	1.861.891.638	5.297.827.263

KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
993220	Kab. Jayapura	10.090.796.234	9.762.135.296	328.660.938
993290	Kab. Jayawijaya	9.199.499.904	9.199.499.903	1
993283	Kab. Merauke	13.019.633.649	13.019.633.649	-
993401	Kab. Mimika	48.051.239.724	48.051.239.724	-
993305	Kab. Nabire	10.185.123.652	10.185.123.651	-
993393	Kab. Paniai	8.970.859.790	8.970.857.790	2.000
993389	Kab. Puncak Jaya	8.700.840.232	8.700.840.232	-
993258	Kab. Yapen Waropen	8.998.310.823	8.998.310.824	-
993312	Kota Jayapura	19.106.056.285	16.974.011.358	2.132.044.927
998392	Kab. Sarmi	10.426.976.753	10.177.378.585	249.598.168
998400	Kab. Keerom	9.136.395.700	9.136.395.700	-
998477	Kab. Yahukimo	8.787.212.571	8.560.673.921	226.538.651
998421	Kab. Pegunungan Bintang	9.645.687.338	9.645.687.338	-
998414	Kab. Tolikara	8.355.149.000	8.121.828.498	233.320.502
998388	Kab. Boven Digoel	9.138.647.867	9.138.647.867	-
998367	Kab. Mappi	10.127.294.162	10.127.294.162	(1)
998371	Kab. Asmat	9.637.875.073	9.637.875.073	-
998460	Kab. Waropen	8.959.067.137	8.959.067.137	-
987511	Kab. Supiori	8.602.308.839	8.602.308.839	-
998854	Provinsi Papua Barat	7.837.956.908	7.837.956.908	(1)
993262	Kab. Sorong	8.861.995.381	8.861.995.381	-
993241	Kab. Manokwari	9.595.000.164	9.595.000.163	1
993279	Kab. Fak Fak	8.979.616.362	8.979.616.363	(1)
980383	Kota Sorong	13.237.190.607	13.237.190.607	-
998442	Kab. Sorong Selatan	8.836.108.923	8.836.108.922	-
998456	Kab. Raja Ampat	7.778.739.077	7.778.739.077	1
998481	Kab. Teluk Bintuni	9.473.344.481	9.473.344.482	(1)
998498	Kab. Teluk Wondama	8.197.849.953	8.197.849.953	-
998435	Kab. Kaimana	7.553.339.215	7.553.339.215	-
Jumlah Bruto		**35.019.908.924.551**	**34.990.077.937.656**	**29.830.986.895**
Pengembalian			**(62.156.516)**	**62.156.516**
Jumlah Neto		**35.019.908.924.551**	**34.990.015.781.140**	**29.893.143.411**

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK PENGHASILAN PASAL 21
& KURANG BAYAR PPH PSL.21 YANG DISALURKAN PADA TAHUN 2007
TAHUN ANGGARAN 2007
(Dalam Rupiah)

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	990015	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	37.082.439.461	37.082.439.462	-
2	990078	Kab. Aceh Barat	1.695.357.620	1.695.357.619	-
3	990022	Kab. Aceh Besar	2.912.300.676	2.912.300.676	-
4	990061	Kab. Aceh Selatan	1.465.954.016	1.465.954.016	-
5	980007	Kab. Singkil	1.104.000.209	1.104.000.209	-
6	990082	Kab. Aceh Tengah	1.168.107.258	1.168.107.258	-
7	990099	Kab. Aceh Tenggara	1.081.260.914	1.081.260.914	-
8	990057	Kab. Aceh Timur	861.526.113	861.526.113	-
9	990040	Kab. Aceh Utara	4.378.715.520	4.378.715.519	-
10	980053	Kab. Bireuen	1.195.317.065	1.195.317.066	-
11	990036	Kab. Pidie	2.607.130.331	2.607.130.331	-
12	993372	Kab. Simeulue	1.300.473.550	1.300.473.550	-
13	990104	Kota Banda Aceh	15.381.584.643	15.381.584.643	-
14	990111	Kota Sabang	2.085.945.311	2.085.945.311	-
15	994672	Kota Langsa	2.933.177.041	2.933.177.041	-
16	994686	Kota Lhokseumawe	7.221.328.190	7.221.328.190	-
17	997451	Kab. Nagan Raya	1.075.497.754	875.067.853	200.429.900
18	997447	Kab. Aceh Jaya	840.006.261	840.006.260	-
19	997426	Kab. Aceh Barat Daya	1.156.854.223	1.156.854.223	-
20	997430	Kab. Gayo Lues	1.026.443.652	1.026.443.652	-
21	997468	Kab. Aceh Tamiang	3.161.413.031	3.161.413.032	-
22	987532	Kab. Bener Meriah	971.265.812	971.265.813	-
23	990125	Provinsi Sumatera Utara	64.741.872.443	64.741.872.443	-
24	990221	Kab. Asahan	4.223.405.151	4.223.405.151	-
25	990192	Kab. Dairi	1.604.993.130	1.604.993.130	-
26	990132	Kab. Deli Serdang	6.401.365.008	6.401.365.008	-
27	990146	Kab. Tanah Karo	1.345.236.901	1.345.236.901	-
28	990188	Kab. Labuhan Batu	4.532.782.078	4.532.782.078	-
29	990150	Kab. Langkat	4.571.850.840	4.571.850.840	-
30	941915	Kab. Mandailing Natal	1.887.929.367	1.887.929.366	-
31	990235	Kab. Nias	1.750.801.994	1.750.801.994	-
32	990171	Kab. Simalungun	3.028.221.340	3.028.221.339	-
33	990214	Kab. Tapanuli Selatan	2.130.088.192	2.130.088.192	-
34	990167	Kab. Tapanuli Tengah	1.419.418.178	1.419.418.177	-
35	990200	Kab. Tapanuli Utara	1.641.924.145	1.641.924.145	-
36	941922	Kab. Toba Samosir	2.800.491.149	2.800.491.149	-
37	990260	Kota Binjai	1.895.081.896	1.895.081.896	-
38	990242	Kota Medan	36.447.720.409	36.447.720.409	-
39	990277	Kota Pematang siantar	6.155.926.862	6.155.926.862	-
40	990298	Kota Sibolga	1.881.174.714	1.881.174.715	-
41	990281	Kota Tanjung Balai	1.477.224.150	1.477.224.150	-
42	990256	Kota Tebing Tinggi	1.650.102.505	1.650.102.505	-
43	994690	Kota Padang Sidimpuan	2.577.011.098	2.577.011.098	-
44	998147	Kab. Pakpak Bharat	1.278.955.690	1.278.955.690	-
45	998130	Kab. Nias Selatan	1.368.437.014	1.368.437.014	-
46	998151	Kab. Humbang Hasundutan	1.379.854.577	1.379.854.577	-
47	987418	Kab. Serdang Bedagai	2.366.832.865	2.366.832.864	-
48	987528	Kab. Samosir	1.285.513.148	1.285.513.148	-
49	990303	Provinsi Sumatera Barat	24.706.912.776	24.706.912.775	-
50	990331	Kab. Limapuluh Koto	1.177.017.889	1.177.017.889	-
51	990310	Kab. Agam	1.474.517.812	1.474.517.812	-
52	980060	Kab. Kepulauan Mentawai	851.501.120	851.501.120	-
53	990352	Kab. Padang Pariaman	1.248.198.468	1.248.198.468	-
54	990324	Kab. Pasaman	1.004.290.980	1.004.290.979	-
55	990366	Kab. Pesisir Selatan	1.106.148.399	1.106.148.399	-
56	990387	Kab. Sawahlunto Sijunjung	1.176.749.769	1.176.749.769	-
57	990345	Kab. Solok	1.074.511.127	1.074.511.128	-
58	990370	Kab. Tanah Datar	1.097.235.340	1.097.235.341	-

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
59	990391	Kota Bukit Tinggi	2.435.704.075	2.435.704.075	-
60	990409	Kota Padang Panjang	843.930.072	843.930.071	-
61	990434	Kota Padang	16.849.570.638	16.849.570.638	-
62	990441	Kota Payakumbuh	1.102.588.288	1.102.588.288	-
63	990420	Kota Sawahlunto	932.377.641	932.377.641	-
64	990413	Kota Solok	988.063.684	988.063.685	-
65	997611	Kota Pariaman	813.028.412	813.028.412	-
66	987595	Kab. Pasaman Barat	925.668.241	925.668.241	-
67	987574	Kab. Dharmasraya	686.883.951	302.860.603	384.023.347
68	987581	Kab. Solok Selatan	1.272.383.258	1.272.383.258	-
69	990455	Provinsi Riau	86.221.283.524	86.221.283.524	-
70	990476	Kab. Bengkalis	30.062.115.490	30.062.115.490	-
71	990502	Kab. Indragiri Hilir	5.136.988.608	5.136.988.608	-
72	990497	Kab. Indragiri Hulu	5.069.049.976	5.069.049.976	-
73	990462	Kab. Kampar	4.027.130.726	4.027.130.727	-
74	980138	Kab. Kuantan Singingi	4.171.668.872	4.171.668.872	-
75	980074	Kab. Pelalawan	6.717.948.611	6.717.948.611	-
76	980095	Kab. Rokan Hilir	4.769.689.834	4.769.689.834	-
77	980081	Kab. Rokan Hulu	3.811.816.580	3.101.445.947	710.370.633
78	980100	Kab. Siak	9.936.875.901	9.936.875.901	-
79	980142	Kota Dumai	22.611.971.600	22.611.971.600	-
80	990519	Kota Pekanbaru	33.016.669.087	33.016.669.086	-
81	998840	Provinsi Kepulauan Riau	47.184.481.204	47.184.481.204	-
82	990480	Kab. Bintan	7.381.798.842	7.381.798.842	-
83	980121	Kab. Natuna	4.557.436.715	4.557.436.715	-
84	980117	Kab. Karimun	4.507.405.042	4.507.405.042	-
85	990523	Kota Batam	44.882.893.340	44.882.893.340	-
86	994708	Kota Tanjung Pinang	5.828.409.417	5.828.409.417	-
87	987464	Kab. Lingga	3.618.778.450	3.618.778.450	-
88	990530	Provinsi Jambi	13.296.334.506	13.296.334.505	-
89	990544	Kab. Batanghari	2.209.753.488	2.209.753.487	-
90	990565	Kab. Bungo	1.695.982.452	1.695.982.452	-
91	990586	Kab. Kerinci	958.457.977	958.457.977	-
92	990572	Kab. Merangin	1.472.875.993	1.472.875.994	-
93	980184	Kab. Muaro Jambi	1.104.187.944	1.104.187.944	-
94	980163	Kab. Sarolangun	1.002.412.375	815.602.674	186.809.701
95	990551	Kab. Tanjung Jabung Barat	968.786.313	968.786.313	-
96	980522	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.459.214.043	1.187.274.724	271.939.319
97	980170	Kab. Tebo	893.284.216	893.284.213	2
98	990590	Kota Jambi	8.179.546.957	8.179.546.957	-
99	990608	Provinsi Sumatera Selatan	60.361.954.798	60.361.954.798	-
100	990661	Kab. Lahat	2.999.219.625	2.999.219.626	-
101	990633	Kab. Musi Banyuasin	6.256.441.678	6.256.441.678	-
102	990675	Kab. Musi Rawas	2.339.873.846	2.339.873.846	-
103	990654	Kab. Muara Enim	11.190.134.276	11.190.134.276	-
104	990682	Kab. Ogan Komering Ilir	5.716.981.994	5.716.981.994	-
105	990640	Kab. Ogan Komering Ulu	3.390.310.791	3.390.310.791	1
106	990696	Kota Palembang	36.070.841.955	36.070.841.956	-
107	994729	Kota Pagar Alam	2.027.411.893	2.027.411.894	-
108	994733	Kota Lubuk Linggau	3.677.152.627	3.677.152.627	-
109	994712	Kota Prabumulih	4.387.910.267	4.387.910.267	-
110	997557	Kab. Banyuasin	4.555.740.700	4.555.740.701	-
111	987560	Kab. Ogan Ilir	3.519.479.415	3.519.479.415	-
112	987549	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	2.167.471.648	2.167.471.647	-
113	987553	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	2.147.909.236	2.147.909.236	-
114	993813	Provinsi Bangka Belitung	7.435.259.770	7.435.259.770	-
115	990629	Kab. Bangka	1.008.613.878	1.008.613.878	-
116	990612	Kab. Belitung	1.170.949.159	1.170.949.158	-
117	990701	Kota Pangkal Pinang	5.735.246.342	5.735.246.343	-
118	998189	Kab. Bangka Selatan	601.807.969	601.807.967	1
119	998172	Kab. Bangka Tengah	1.331.191.653	1.331.191.654	-
120	998168	Kab. Bangka Barat	597.479.486	597.479.485	-
121	998193	Kab. Belitung Timur	707.601.169	707.601.169	-
122	990718	Provinsi Bengkulu	6.069.163.550	6.069.163.549	-

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
123	990739	Kab. Bengkulu Selatan	496.309.174	496.309.174	-
124	990722	Kab. Bengkulu Utara	787.004.808	640.338.488	146.666.319
125	990743	Kab. Rejang Lebong	872.035.350	872.035.350	-
126	990750	Kota Bengkulu	4.446.970.315	3.618.232.348	828.737.967
127	998215	Kab. Kaur	399.163.512	399.163.512	-
128	998201	Kab. Seluma	411.438.199	411.438.199	-
129	998503	Kab. Mukomuko	711.666.159	711.666.159	-
130	987600	Kab. Lebong	414.201.857	414.201.857	-
131	987617	Kab. Kepahiang	564.955.952	564.955.952	-
132	990764	Provinsi Lampung	20.693.852.108	20.693.852.109	-
133	990807	Kab. Lampung Barat	1.285.358.994	1.285.358.994	-
134	990771	Kab. Lampung Selatan	3.649.802.828	3.649.802.828	-
135	990785	Kab. Lampung Tengah	2.390.966.023	2.390.966.023	-
136	990792	Kab. Lampung Utara	1.875.715.827	1.875.715.825	2
137	980191	Kab. Lampung Timur	1.794.599.834	1.794.599.833	-
138	993351	Kab. Tanggamus	1.799.374.298	1.799.374.299	-
139	993347	Kab. Tulang Bawang	2.739.540.916	2.228.999.714	510.541.202
140	980206	Kab. Way Kanan	1.295.457.906	1.295.457.906	-
141	990811	Kota Bandar Lampung	10.894.019.065	10.894.019.065	-
142	980210	Kota Metro	3.315.942.471	3.315.942.471	-
143	990828	Provinsi DKI Jakarta	3.861.715.171.111	3.861.715.171.111	-
144	990881	Provinsi Jawa Barat	281.127.739.057	281.127.739.057	-
145	991003	Kab. Bandung	14.227.281.812	14.227.281.811	-
146	990963	Kab. Bekasi	106.359.171.053	106.359.171.053	-
147	990938	Kab. Bogor	29.598.273.142	29.598.273.142	-
148	991045	Kab. Ciamis	6.293.601.503	6.293.601.503	-
149	990959	Kab. Cianjur	7.182.649.427	7.182.649.427	-
150	991052	Kab. Cirebon	9.590.977.124	9.590.977.124	-
151	991024	Kab. Garut	6.930.269.790	6.930.269.790	-
152	991070	Kab. Indramayu	14.105.890.164	14.105.890.164	-
153	990970	Kab. Karawang	31.834.940.058	31.834.940.059	-
154	991066	Kab. Kuningan	6.449.342.399	6.449.342.399	-
155	991087	Kab. Majalengka	6.390.515.300	6.390.515.300	-
156	990984	Kab. Purwakarta	12.183.114.111	12.183.114.110	-
157	990991	Kab. Subang	6.738.405.353	6.738.405.353	-
158	990942	Kab. Sukabumi	5.368.079.385	5.368.079.385	-
159	991010	Kab. Sumedang	6.750.683.183	6.750.683.183	-
160	991031	Kab. Tasikmalaya	6.115.781.384	6.115.781.385	-
161	991091	Kota Bandung	48.346.737.320	48.346.737.296	23
162	993330	Kota Bekasi	25.689.692.923	25.689.692.923	-
163	991109	Kota Bogor	14.180.274.072	14.180.274.071	-
164	991120	Kota Cirebon	10.687.687.081	10.687.687.081	-
165	980032	Kota Depok	18.909.840.417	18.909.840.416	-
166	991113	Kota Sukabumi	5.236.412.013	5.236.412.013	-
167	994754	Kota Cimahi	7.836.481.150	7.836.481.150	-
168	994740	Kota Tasikmalaya	9.017.683.584	9.017.683.584	-
169	998126	Kota Banjar	5.559.888.794	5.559.888.795	-
170	993809	Provinsi Banten	128.221.918.699	128.221.918.698	-
171	990917	Kab. Lebak	11.004.343.116	11.004.343.115	-
172	990900	Kab. Pandeglang	10.854.368.187	10.854.368.186	-
173	990895	Kab. Serang	20.903.422.791	20.903.422.791	-
174	990921	Kab. Tangerang	59.261.763.473	59.261.763.472	-
175	980049	Kota Cilegon	31.645.866.745	31.645.866.745	-
176	991134	Kota Tangerang	58.663.113.736	58.663.113.736	-
177	991141	Provinsi Jawa Tengah	110.028.166.439	110.028.166.439	-
178	991329	Kab. Banjarnegara	2.429.255.997	2.429.255.997	-
179	991290	Kab. Banyumas	4.673.234.603	4.673.234.604	-
180	991202	Kab. Batang	2.590.894.330	2.590.894.330	-
181	991286	Kab. Blora	3.871.125.508	3.871.125.288	220
182	991396	Kab. Boyolali	2.499.125.215	2.499.125.215	-
183	991223	Kab. Brebes	2.859.557.743	2.859.557.743	-
184	991308	Kab. Cilacap	11.973.129.392	11.973.129.391	1
185	991176	Kab. Demak	2.985.927.153	2.985.927.152	-
186	991180	Kab. Grobogan	7.887.738.501	7.887.738.501	-

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
187	991265	Kab. Jepara	5.477.958.157	5.477.958.027	131
188	991422	Kab. Karanganyar	2.912.329.188	2.912.329.188	-
189	991375	Kab. Kebumen	2.849.949.999	2.849.949.999	-
190	991162	Kab. Kendal	3.004.582.531	3.004.582.532	-
191	991382	Kab. Klaten	3.720.710.095	3.720.709.977	118
192	991244	Kab. Kudus	16.183.164.974	16.183.164.968	6
193	991333	Kab. Magelang	3.122.828.999	3.122.828.999	-
194	991230	Kab. Pati	3.229.879.989	3.229.879.987	2
195	991197	Kab. Pekalongan	3.403.052.753	3.403.052.753	-
196	991251	Kab. Pemalang	1.728.606.838	1.728.606.838	-
197	991312	Kab. Purbalingga	2.306.115.081	2.306.114.996	85
198	991361	Kab. Purworejo	2.427.404.900	1.986.856.485	440.548.415
199	991272	Kab. Rembang	2.059.415.644	2.059.414.874	769
200	991155	Kab. Semarang	3.813.272.334	3.813.272.334	-
201	991401	Kab. Sragen	2.865.393.171	2.865.393.172	-
202	991418	Kab. Sukoharjo	3.670.502.475	3.670.502.474	-
203	991219	Kab. Tegal	2.307.769.661	2.307.769.661	-
204	991340	Kab. Temanggung	2.452.179.328	2.452.179.327	-
205	991439	Kab. Wonogiri	2.280.681.797	2.280.681.762	35
206	991354	Kab. Wonosobo	2.229.484.640	2.229.484.639	-
207	991485	Kota Magelang	2.985.312.464	2.985.312.463	-
208	991464	Kota Pekalongan	2.733.682.520	2.733.682.520	-
209	991450	Kota Salatiga	3.224.136.497	3.224.136.497	-
210	991443	Kota Semarang	29.788.510.123	29.788.510.123	-
211	991492	Kota Surakarta	8.025.687.575	8.025.687.575	-
212	991471	Kota Tegal	3.685.016.165	3.685.016.164	-
213	991507	Provinsi D.I. Yogyakarta	19.006.814.467	19.006.814.467	-
214	991511	Kab. Bantul	3.518.670.073	3.518.670.073	-
215	991532	Kab. Gunung Kidul	2.486.167.833	2.486.167.832	-
216	991549	Kab. Kulon Progo	2.571.888.023	2.571.888.022	-
217	991528	Kab. Sleman	10.592.431.807	10.592.431.807	-
218	991553	Kota Yogyakarta	9.341.063.966	9.341.063.967	-
219	991560	Provinsi Jawa Timur	185.047.421.966	185.047.421.966	-
220	991642	Kab. Bangkalan	2.669.429.740	2.669.429.740	-
221	991670	Kab. Banyuwangi	4.059.179.709	4.059.179.709	-
222	991773	Kab. Blitar	2.579.231.208	2.579.231.207	-
223	991837	Kab. Bojonegoro	4.477.999.829	4.477.999.829	-
224	991659	Kab. Bondowoso	2.968.823.889	2.968.823.889	-
225	991574	Kab. Gresik	19.480.098.820	19.480.098.820	-
226	991684	Kab. Jember	6.172.384.737	6.172.384.737	-
227	991600	Kab. Jombang	4.074.689.969	4.074.689.969	-
228	991731	Kab. Kediri	3.631.807.121	3.631.807.121	-
229	991858	Kab. Lamongan	3.295.115.624	3.295.115.623	-
230	991727	Kab. Lumajang	2.834.544.961	2.243.333.130	591.211.831
231	991780	Kab. Madiun	2.829.461.338	2.829.461.338	-
232	991802	Kab. Magetan	3.148.516.500	3.148.516.500	-
233	991691	Kab. Malang	7.187.920.687	7.187.920.687	-
234	991581	Kab. Mojokerto	5.734.674.265	5.734.674.264	-
235	991752	Kab. Nganjuk	3.589.632.044	3.589.632.044	-
236	991794	Kab. Ngawi	3.084.705.470	3.084.705.469	-
237	991820	Kab. Pacitan	2.574.217.230	2.574.217.230	-
238	991621	Kab. Pamekasan	4.077.911.234	4.077.911.234	-
239	991706	Kab. Pasuruan	10.557.777.101	10.557.777.102	-
240	991816	Kab. Ponorogo	3.148.516.500	3.148.516.500	-
241	991710	Kab. Probolinggo	4.484.211.189	4.484.211.190	-
242	991617	Kab. Sampang	2.697.145.467	2.697.145.468	-
243	991595	Kab. Sidoarjo	22.739.182.923	32.765.161.094	(10.025.978.171)
244	991663	Kab. Situbondo	3.052.710.618	3.052.710.618	-
245	991638	Kab. Sumenep	2.782.792.802	2.782.792.802	-
246	991769	Kab. Trenggalek	3.170.322.365	3.170.322.365	-
247	991841	Kab. Tuban	6.006.068.364	6.006.068.365	-
248	991748	Kab. Tulungagung	3.859.047.085	3.859.047.085	-
249	991912	Kota Blitar	3.744.922.125	3.744.922.125	-
250	991926	Kota Kediri	6.494.064.913	6.494.064.913	-

DAFTAR 3.D

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
251	991930	Kota Madiun	4.743.792.250	4.743.792.247	4
252	991883	Kota Malang	12.204.189.353	12.204.189.353	-
253	991879	Kota Mojokerto	3.857.649.634	3.857.649.634	-
254	991890	Kota Pasuruan	3.484.674.584	3.484.674.584	-
255	991905	Kota Probolinggo	5.018.977.897	5.018.977.897	-
256	991862	Kota Surabaya	83.877.429.441	83.877.429.442	-
257	994761	Kota Batu	2.815.600.210	2.815.600.210	-
258	991947	Provinsi Kalimantan Barat	14.177.531.149	14.177.531.149	-
259	980227	Kab. Bengkayang	732.367.600	595.883.478	136.484.122
260	980231	Kab. Landak	1.091.964.031	1.091.964.031	-
261	991993	kab. Kapuas Hulu	1.133.035.516	1.133.035.516	-
262	992008	Kab. Ketapang	1.396.474.108	1.396.474.108	-
263	991989	Kab. Pontianak	1.739.174.272	1.739.174.272	-
264	991951	Kab. Sambas	1.017.226.325	1.017.226.325	-
265	991968	Kab. Sanggau	1.603.221.965	1.603.221.964	-
266	991972	Kab. Sintang	1.184.179.744	1.184.179.744	-
267	992012	Kota Pontianak	8.175.878.219	8.175.878.219	-
268	994775	Kota Singkawang	1.656.278.858	1.656.278.858	-
269	987507	Kab. Sekadau	639.074.176	639.074.176	-
270	987492	Kab. Melawi	897.421.909	897.421.910	-
271	992029	Provinsi Kalimantan Tengah	8.830.569.584	8.830.569.584	-
272	992054	Kab. Barito Selatan	658.068.746	535.430.969	122.637.777
273	992040	Kab. Barito Utara	758.906.633	758.906.633	-
274	992033	Kab. Kapuas	670.187.408	670.187.408	-
275	992075	Kab. Kotawaringin Barat	1.903.215.306	1.903.215.306	-
276	992061	Kab. Kotawaringin Timur	2.167.175.255	2.167.175.255	-
277	992082	Kota Palangkaraya	3.018.850.160	6.394.410.014	(3.375.559.854)
278	997540	Kab. Barito Timur	579.329.456	579.329.456	-
279	997536	Kab. Murung Raya	512.144.814	512.144.814	-
280	997522	Kab. Pulang Pisau	512.386.383	512.386.383	-
281	997515	Kab. Gunung Mas	413.977.943	182.530.993	231.446.950
282	997501	Kab. Lamandau	328.287.235	328.287.236	-
283	997493	Kab. Sukamara	516.583.000	516.582.999	-
284	997472	Kab. Katingan	607.485.471	607.485.470	-
285	997489	Kab. Seruyan	599.256.566	599.256.566	-
286	992164	Provinsi Kalimantan Selatan	21.247.017.968	21.247.017.969	-
287	992171	Kab. Banjar	1.594.656.965	1.594.656.965	-
288	992228	Kab. Barito Kuala	1.255.004.939	1.255.004.938	-
289	992207	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.241.530.033	1.241.530.033	-
290	992211	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.440.431.379	1.440.431.379	-
291	992253	Kab. Hulu Sungai Utara	1.227.794.546	1.227.794.545	-
292	992249	Kab. Kota Baru	4.762.007.549	4.762.007.549	-
293	992232	Kab. Tabalong	2.634.628.460	2.634.628.460	-
294	992185	Kab. Tanah Laut	1.565.410.176	1.565.410.176	-
295	992192	Kab. Tapin	1.154.854.868	1.154.854.868	-
296	980248	Kota Banjar Baru	2.351.259.348	2.351.259.348	-
297	992260	Kota Banjarmasin	10.094.603.490	10.094.603.490	-
298	998236	Kab. Balangan	1.230.650.606	1.230.650.607	-
299	998222	Kab. Tanah Bumbu	1.317.694.594	1.317.694.593	-
300	992096	Provinsi Kalimantan Timur	153.470.159.922	153.470.159.922	-
301	992139	Kab. Berau	7.189.506.470	7.189.506.470	-
302	992122	Kab. Bulungan	6.810.211.839	6.810.211.838	-
303	992101	Kab. Kutai Kartanegara	14.680.864.343	14.680.864.343	-
304	980273	Kab. Kutai Barat	6.761.022.838	6.761.022.838	-
305	980280	Kab. Kutai Timur	20.385.697.905	20.385.697.905	-
306	980269	Kab. Malinau	5.945.024.808	5.945.024.807	-
307	980252	Kab. Nunukan	6.114.129.929	6.114.129.929	-
308	992118	Kab. Pasir	7.892.659.421	7.892.659.421	-
309	992150	Kota Balikpapan	97.609.542.467	97.609.542.467	-
310	980294	Kota Bontang	30.531.751.176	30.531.751.175	-
311	992143	Kota Samarinda	12.671.025.594	12.671.025.594	-
312	941901	Kota Tarakan	7.411.777.346	7.411.777.346	-
313	997561	Kab. Penajam Paser Utara	5.749.784.895	5.749.784.895	-
314	993021	Provinsi Sulawesi Utara	13.704.201.899	13.704.199.876	2.023

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
315	993059	Kab. Bolaang Mongondow	1.168.518.942	1.168.518.941	-
316	993042	Kab. Minahasa	1.096.138.576	1.096.138.576	-
317	993063	Kab. Sangihe	842.627.691	842.627.692	-
318	993091	Kota Bitung	1.350.125.211	1.350.125.210	-
319	993070	Kota Manado	10.219.294.992	10.219.294.992	-
320	997412	Kab. Kepulauan Talaud	800.042.288	650.944.333	149.097.955
321	998240	Kab. Minahasa Selatan	1.136.688.315	1.136.688.315	-
322	998257	Kota Tomohon	959.081.664	959.081.664	-
323	987485	Kab. Minahasa Utara	1.252.651.670	1.252.651.670	-
324	993820	Provinsi Gorontalo	3.161.594.129	3.161.594.129	-
325	980302	Kab. Boalemo	600.839.770	600.839.769	-
326	993038	Kab. Gorontalo	906.860.476	906.860.476	-
327	993084	Kota Gorontalo	2.088.719.600	2.088.719.600	-
328	998261	Kab. Pohuwato	526.717.834	526.717.834	-
329	998278	Kab. Bone Bolango	619.253.515	619.253.515	-
330	992960	Provinsi Sulawesi Tengah	7.554.567.902	7.554.567.902	-
331	993000	Kab. Banggai	1.289.017.855	1.289.017.855	-
332	980337	Kab. Banggai Kepulauan	708.660.762	708.660.761	-
333	980316	Kab. Buol	598.689.819	487.117.907	111.571.912
334	992998	Kab. Toli-Toli	662.554.005	662.554.005	-
335	992981	Kab. Donggala	522.484.957	522.484.957	-
336	980320	Kab. Morowali	739.154.713	739.154.713	-
337	992977	Kab. Poso	746.249.779	746.249.779	-
338	993017	Kota Palu	4.893.874.557	4.893.874.558	-
339	997582	Kab. Parigi Moutong	708.437.907	708.437.907	-
340	987471	Kab. Tojo Una Una	462.727.499	462.727.499	-
341	992722	Provinsi Sulawesi Selatan	41.229.121.115	41.229.121.114	1
342	992846	Kab. Bantaeng	1.039.102.934	1.039.102.934	-
343	992888	Kab. Barru	1.230.776.188	1.230.776.188	-
344	992778	Kab. Bone	2.283.369.648	2.283.369.648	-
345	992832	Kab. Bulukumba	1.533.181.863	1.533.181.863	-
346	992935	Kab. Enrekang	1.054.119.762	1.054.119.762	-
347	992740	Kab. Gowa	1.404.561.076	1.404.561.076	-
348	992850	Kab. Jeneponto	1.188.521.228	1.188.521.227	-
349	992811	Kab. Luwu	1.277.027.563	1.277.027.561	2
350	980341	Kab. Luwu Utara	3.572.600.397	3.572.600.396	-
351	992799	Kab. Maros	1.819.267.220	1.819.267.220	-
352	992900	Kab. Pangkajene Kepulauan	2.490.653.620	2.490.653.620	-
353	992736	Kab. Pinrang	1.438.488.404	1.438.488.404	-
354	992867	Kab. Selayar	1.025.900.169	1.025.900.168	-
355	992892	Kab. Sidenreng Rappang	1.411.679.016	1.411.679.016	-
356	992825	Kab. Sinjai	1.175.254.086	1.175.254.085	-
357	992914	Kab. Soppeng	1.476.369.820	1.476.369.820	-
358	992871	Kab. Takalar	1.135.035.396	1.135.035.396	-
359	992782	Kab. Tana Toraja	1.460.254.030	1.460.254.030	-
360	992757	Kab. Wajo	1.679.780.355	1.679.780.355	-
361	992956	Kota Pare-Pare	2.572.957.497	2.572.957.497	-
362	992942	Kota Makassar	20.774.937.098	20.774.937.098	-
363	997604	Kota Palopo	1.754.064.860	1.754.064.860	-
364	928282	Kab. Luwu Timur	7.460.539.154	7.460.539.154	-
365	955383	Provinsi Sulawesi Barat	2.611.615.749	2.611.615.749	-
366	992804	Kab. Majene	649.138.297	649.138.297	-
367	992761	Kab. Mamuju	1.142.441.456	1.142.441.456	-
368	992921	Kab. Polewali Mandar	775.731.282	775.731.282	-
369	997599	Kab. Mamasa	559.371.783	559.371.783	-
370	998299	Kab. Mamuju Utara	790.740.806	790.740.806	-
371	993106	Provinsi Sulawesi Tenggara	7.875.091.101	7.875.091.100	-
372	993127	Kab. Buton	572.002.288	572.002.288	-
373	993110	Kab. Konawe	691.708.561	691.708.561	-
374	993148	Kab. Kolaka	2.959.237.314	2.468.721.764	490.515.550
375	993131	Kab. Muna	762.401.027	762.401.028	-
376	993326	Kota Kendari	3.813.087.947	3.036.838.497	776.249.450
377	994782	Kota Bau-Bau	1.121.178.617	1.121.178.618	-
378	998304	Kab. Konawe Selatan	483.786.649	483.786.649	-

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
379	987642	Kab. Bombana	445.742.552	445.742.552	-
380	987638	Kab. Wakatobi	568.588.328	568.588.328	-
381	987443	Kab. Kolaka Utara	394.903.368	394.903.368	-
382	992274	Provinsi Bali	31.055.954.389	31.055.954.389	-
383	992342	Kab. Badung	12.210.418.462	12.210.418.462	-
384	992338	Kab. Bangli	1.699.415.284	1.699.415.284	-
385	992281	Kab. Buleleng	2.995.692.943	2.995.692.943	-
386	992317	Kab. Gianyar	4.959.335.211	4.959.335.211	-
387	992295	Kab. Jembrana	1.958.959.830	1.958.959.830	-
388	992321	Kab. Karangasem	2.426.004.531	2.426.004.531	-
389	992300	Kab. Klungkung	1.683.383.343	1.683.383.343	-
390	992359	Kab. Tabanan	2.062.275.881	2.062.275.881	-
391	992363	Kota Denpasar	16.588.446.098	16.588.446.099	-
392	992370	Provinsi Nusa Tenggara Barat	23.541.795.586	23.541.795.586	-
393	992410	Kab. Bima	1.317.491.316	1.317.491.316	-
394	992431	Kab. Dompu	1.523.977.255	1.523.977.255	-
395	992384	Kab. Lombok Barat	2.331.795.391	2.331.795.391	-
396	992391	Kab. Lombok Tengah	2.043.118.988	2.043.118.988	-
397	992406	Kab. Lombok Timur	2.043.118.988	2.043.118.988	-
398	992427	Kab. Sumbawa	1.816.778.417	1.816.778.417	-
399	992448	Kota Mataram	9.837.381.868	9.837.381.868	-
400	997625	Kota Bima	1.869.392.094	1.869.392.094	-
401	987450	Kab. Sumbawa Barat	12.529.639.062	12.529.639.062	-
402	992452	Provinsi Nusa Tenggara Timur	10.112.844.864	10.112.844.863	-
403	992502	Kab. Alor	861.180.906	861.180.906	-
404	992473	Kab. Belu	1.130.254.105	1.130.254.104	-
405	992537	Kab. Ende	814.160.753	814.160.753	-
406	992520	Kab. Flores Timur	818.022.306	818.022.307	-
407	992469	Kab. Kupang	536.954.554	536.954.554	-
408	980379	Kab. Lembata	533.261.895	533.261.894	-
409	992558	Kab. Manggarai	561.525.792	561.525.792	-
410	992541	Kab. Ngada	559.331.975	559.331.975	-
411	992516	Kab. Sikka	676.872.361	676.872.361	-
412	992579	Kab. Sumba Barat	569.325.936	569.325.936	-
413	992562	Kab. Sumba Timur	625.956.969	625.956.968	1
414	992494	Kab. Timor Tengah Selatan	1.059.729.010	1.059.729.010	-
415	992480	Kab. Timor Tengah Utara	507.964.061	413.299.812	94.664.249
416	993368	Kota Kupang	5.070.088.565	5.070.088.565	-
417	997578	Kab. Rote Ndao	408.053.043	408.053.043	-
418	998510	Kab. Manggarai Barat	436.585.064	355.223.014	81.362.050
419	993152	Provinsi Maluku	3.571.023.533	3.571.023.533	-
420	980358	Kab. Maluku Tenggara Barat	268.155.331	268.155.331	-
421	993169	Kab. Maluku Tengah	347.621.443	344.527.069	3.094.374
422	993173	Kab. Maluku Tenggara	464.861.755	464.861.754	-
423	980362	Kab. Pulau Buru	300.121.007	300.121.007	-
424	993202	Kota Ambon	3.142.824.224	3.142.824.222	2
425	987439	Kab. Seram Bagian Barat	340.222.032	150.010.565	190.211.467
426	987422	Kab. Seram Bagian Timur	243.388.294	243.388.295	-
427	987621	Kab. Kepulauan Aru	249.341.214	249.341.214	-
428	980011	Provinsi Maluku Utara	5.129.925.992	5.129.925.992	-
429	993194	Kab. Halmahera Tengah	453.002.856	453.002.856	-
430	993180	Kab. Halmahera Barat	327.160.310	327.160.310	-
431	980028	Kota Ternate	3.333.202.003	3.333.202.003	-
432	998346	Kab. Halmahera Timur	396.133.945	396.133.945	-
433	998350	Kota Tidore Kepulauan	400.847.643	400.847.643	-
434	998332	Kab. Kepulauan Sula	396.717.271	396.717.271	-
435	998325	Kab. Halmahera Selatan	430.203.577	430.203.577	-
436	998311	Kab. Halmahera Utara	1.957.621.383	863.153.655	1.094.467.728
437	993216	Provinsi Papua	51.642.364.225	51.642.364.225	-
438	993237	Kab. Biak Numfor	1.891.165.490	833.851.949	1.057.313.541
439	993220	Kab. Jayapura	1.723.966.753	1.402.688.084	321.278.669
440	993290	Kab. Jayawijaya	1.391.625.064	1.391.625.064	1
441	993283	Kab. Merauke	3.619.038.405	3.619.038.405	-
442	993401	Kab. Mimika	39.763.731.840	39.763.731.839	-

DAFTAR 3.D

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
443	993305	Kab. Nabire	1.521.638.315	1.521.638.314	-
444	993393	Kab. Paniai	1.233.830.528	1.233.828.527	2.000
445	993389	Kab. Puncak Jaya	1.292.982.898	1.292.982.898	-
446	993258	Kab. Yapen Waropen	1.215.551.302	1.215.551.302	-
447	993312	Kota Jayapura	11.135.982.193	9.060.679.102	2.075.303.091
448	998392	Kab. Sarmi	1.322.089.333	1.075.704.593	246.384.740
449	998400	Kab. Keerom	1.376.513.256	1.376.513.256	-
450	998477	Kab. Yahukimo	1.198.137.234	974.852.223	223.285.011
451	998421	Kab. Pegunungan Bintang	1.339.241.086	1.339.241.085	-
452	998414	Kab. Tolikara	1.234.835.342	1.004.711.267	230.124.075
453	998388	Kab. Boven Digoel	1.200.135.156	1.200.135.156	-
454	998367	Kab. Mappi	1.196.489.437	1.196.489.437	-
455	998371	Kab. Asmat	1.204.837.330	1.204.837.330	-
456	998460	Kab. Waropen	1.238.463.512	1.238.463.512	-
457	987511	Kab. Supiori	1.363.291.864	1.363.291.864	-
458	998854	Provinsi Papua Barat	7.715.178.975	7.715.178.976	-
459	993262	Kab. Sorong	675.567.525	675.567.525	-
460	993241	Kab. Manokwari	1.516.812.617	1.516.812.616	-
461	993279	Kab. Fak Fak	931.799.519	931.799.519	-
462	980383	Kota Sorong	5.208.029.810	5.208.029.810	-
463	998442	Kab. Sorong Selatan	532.598.287	532.598.287	-
464	998456	Kab. Raja Ampat	449.026.151	449.026.151	-
465	998481	Kab. Teluk Bintuni	1.338.920.229	1.338.920.229	-
466	998498	Kab. Teluk Wondama	429.236.334	429.236.334	-
467	998435	Kab. Kaimana	490.777.991	490.777.991	-
JUMLAH			**7.603.226.186.967**	**7.604.720.948.205**	**(1.494.761.238)**

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK PENGHASILAN PASAL 25/29 OPDN
& KURANG BAYAR PPH PSL.25/29 YANG DISALURKAN PADA TAHUN 2007
TAHUN ANGGARAN 2007
(Dalam Rupiah)

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	990015	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	150.576.591	150.576.591	-
2	990078	Kab. Aceh Barat	6.870.266	6.870.265	-
3	990022	Kab. Aceh Besar	3.478.399	3.478.399	-
4	990061	Kab. Aceh Selatan	5.206.195	5.206.195	-
5	980007	Kab. Singkil	3.544.627	3.544.627	-
6	990082	Kab. Aceh Tengah	11.773.906	11.773.906	-
7	990099	Kab. Aceh Tenggara	6.132.932	6.132.932	-
8	990057	Kab. Aceh Timur	4.298.784	4.298.784	-
9	990040	Kab. Aceh Utara	7.513.030	7.513.031	-
10	980053	Kab. Bireuen	17.202.004	17.202.004	-
11	990036	Kab. Pidie	4.375.682	4.375.682	-
12	993372	Kab. Simeulue	896.574.857	896.574.857	-
13	990104	Kota Banda Aceh	30.197.331	30.197.331	-
14	990111	Kota Sabang	11.898.087	11.898.087	-
15	994672	Kota Langsa	19.630.018	19.630.018	-
16	994686	Kota Lhokseumawe	39.608.765	39.608.765	-
17	997451	Kab. Nagan Raya	3.303.753	2.401.350	902.403
18	997447	Kab. Aceh Jaya	364.191.875	364.191.875	-
19	997426	Kab. Aceh Barat Daya	5.665.578	5.665.579	-
20	997430	Kab. Gayo Lues	3.287.331	3.287.331	-
21	997468	Kab. Aceh Tamiang	32.022.560	32.022.560	-
22	987532	Kab. Bener Meriah	3.365.911	3.365.911	-
23	990125	Provinsi Sumatera Utara	4.602.274.447	4.602.274.446	1
24	990221	Kab. Asahan	171.719.262	171.719.262	-
25	990192	Kab. Dairi	92.172.043	92.172.043	-
26	990132	Kab. Deli Serdang	207.185.785	207.185.785	-
27	990146	Kab. Tanah Karo	131.017.741	131.017.741	-
28	990188	Kab. Labuhan Batu	194.456.334	194.456.334	-
29	990150	Kab. Langkat	109.140.190	109.140.190	-
30	941915	Kab. Mandailing Natal	87.780.391	87.780.391	-
31	990235	Kab. Nias	89.908.980	89.908.980	-
32	990171	Kab. Simalungun	116.448.006	116.448.006	-
33	990214	Kab. Tapanuli Selatan	90.662.504	90.662.504	-
34	990167	Kab. Tapanuli Tengah	84.657.732	84.657.732	-
35	990200	Kab. Tapanuli Utara	118.322.697	118.322.697	-
36	941922	Kab. Toba Samosir	84.933.375	84.933.375	-
37	990260	Kota Binjai	128.518.585	128.518.585	-
38	990242	Kota Medan	4.002.907.282	4.002.907.282	-
39	990277	Kota Pematang siantar	286.017.673	286.017.673	-
40	990298	Kota Sibolga	117.512.381	117.512.381	-
41	990281	Kota Tanjung Balai	130.728.929	130.728.929	-
42	990256	Kota Tebing Tinggi	174.718.504	174.718.504	-
43	994690	Kota Padang Sidimpuan	108.023.832	108.023.832	-
44	998147	Kab. Pakpak Bharat	82.865.963	82.865.963	-
45	998130	Kab. Nias Selatan	856.105.146	856.105.146	-
46	998151	Kab. Humbang Hasundutan	86.467.125	86.467.125	-
47	987418	Kab. Serdang Bedagai	114.798.354	114.798.354	-
48	987528	Kab. Samosir	83.113.206	83.113.206	-
49	990303	Provinsi Sumatera Barat	847.300.081	847.318.081	(18.000)
50	990331	Kab. Limapuluh Koto	25.314.579	25.314.579	-
51	990310	Kab. Agam	27.628.670	27.628.671	-
52	980060	Kab. Kepulauan Mentawai	20.067.633	20.067.634	-
53	990352	Kab. Padang Pariaman	22.153.890	22.153.889	-
54	990324	Kab. Pasaman	24.388.848	24.388.848	-
55	990366	Kab. Pesisir Selatan	21.003.680	21.003.680	-
56	990387	Kab. Sawahlunto Sijunjung	22.126.701	22.126.701	-
57	990345	Kab. Solok	21.123.728	21.123.728	-
58	990370	Kab. Tanah Datar	35.598.221	35.598.221	-

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
59	990391	Kota Bukit Tinggi	236.173.740	236.173.740	-
60	990409	Kota Padang Panjang	37.070.575	37.070.575	-
61	990434	Kota Padang	3.304.549.356	3.304.549.356	-
62	990441	Kota Payakumbuh	50.175.957	50.175.956	1
63	990420	Kota Sawahlunto	20.630.919	20.630.919	-
64	990413	Kota Solok	24.928.964	24.928.964	-
65	997611	Kota Pariaman	22.130.424	22.130.424	-
66	987595	Kab. Pasaman Barat	22.946.202	22.946.202	-
67	987574	Kab. Dharmasraya	21.459.736	3.874.864	17.584.872
68	987581	Kab. Solok Selatan	20.131.203	20.131.203	-
69	990455	Provinsi Riau	2.865.258.255	2.865.258.255	-
70	990476	Kab. Bengkalis	355.739.647	355.739.647	-
71	990502	Kab. Indragiri Hilir	144.632.111	144.632.111	-
72	990497	Kab. Indragiri Hulu	169.912.705	169.912.705	-
73	990462	Kab. Kampar	127.715.064	92.132.611	35.582.453
74	980138	Kab. Kuantan Singingi	130.746.700	130.746.700	-
75	980074	Kab. Pelalawan	126.776.451	126.776.451	-
76	980095	Kab. Rokan Hilir	166.720.203	166.720.203	-
77	980081	Kab. Rokan Hulu	125.687.659	91.356.678	34.330.982
78	980100	Kab. Siak	144.217.888	144.217.888	-
79	980142	Kota Dumai	252.228.999	252.228.999	-
80	990519	Kota Pekanbaru	2.553.509.956	2.553.509.955	-
81	998840	Provinsi Kepulauan Riau	1.684.495.163	1.684.495.163	-
82	990480	Kab. Bintan	170.864.222	170.864.223	-
83	980121	Kab. Natuna	131.429.258	131.429.258	-
84	980117	Kab. Karimun	145.434.518	145.434.518	-
85	990523	Kota Batam	1.482.839.303	1.482.839.302	1
86	994708	Kota Tanjung Pinang	383.022.627	383.022.627	-
87	987464	Kab. Lingga	213.152.816	213.152.816	-
88	990530	Provinsi Jambi	444.083.181	444.083.181	-
89	990544	Kab. Batanghari	29.824.869	29.824.869	-
90	990565	Kab. Bungo	78.800.741	78.800.742	-
91	990586	Kab. Kerinci	31.714.607	31.714.607	-
92	990572	Kab. Merangin	27.882.645	27.882.645	-
93	980184	Kab. Muaro Jambi	27.946.096	27.946.096	-
94	980163	Kab. Sarolangun	24.665.248	17.928.053	6.737.195
95	990551	Kab. Tanjung Jabung Barat	36.573.535	36.573.536	-
96	980522	Kab. Tanjung Jabung Timur	23.273.166	16.916.211	6.356.955
97	980170	Kab. Tebo	378.110.182	378.110.180	2
98	990590	Kota Jambi	358.211.927	358.211.927	-
99	990608	Provinsi Sumatera Selatan	1.027.631.061	1.027.631.061	-
100	990661	Kab. Lahat	64.926.673	64.926.673	-
101	990633	Kab. Musi Banyuasin	45.618.970	45.618.970	-
102	990675	Kab. Musi Rawas	36.303.048	36.303.048	-
103	990654	Kab. Muara Enim	86.109.449	86.109.449	-
104	990682	Kab. Ogan Komering Ilir	60.369.310	60.369.310	-
105	990640	Kab. Ogan Komering Ulu	50.574.519	50.574.519	1
106	990696	Kota Palembang	836.046.802	836.046.802	-
107	994729	Kota Pagar Alam	34.616.405	34.616.404	1
108	994733	Kota Lubuk Linggau	194.263.602	194.263.602	-
109	994712	Kota Prabumulih	79.441.739	79.441.739	-
110	997557	Kab. Banyuasin	41.144.425	41.144.425	-
111	987560	Kab. Ogan Ilir	37.384.450	37.384.450	-
112	987549	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	36.043.689	36.043.689	-
113	987553	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	34.955.872	34.955.871	1
114	993813	Provinsi Bangka Belitung	375.288.586	375.288.586	-
115	990629	Kab. Bangka	57.178.505	57.178.505	-
116	990612	Kab. Belitung	71.610.654	71.610.654	-
117	990701	Kota Pangkal Pinang	271.780.017	271.780.017	-
118	998189	Kab. Bangka Selatan	252.429.233	252.429.232	1
119	998172	Kab. Bangka Tengah	57.885.127	57.885.128	-
120	998168	Kab. Bangka Barat	38.980.265	38.980.265	-
121	998193	Kab. Belitung Timur	31.062.549	31.062.549	-
122	990718	Provinsi Bengkulu	239.513.340	239.513.340	-

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
123	990739	Kab. Bengkulu Selatan	20.703.641	20.703.641	-
124	990722	Kab. Bengkulu Utara	109.524.215	79.608.202	29.916.014
125	990743	Kab. Rejang Lebong	24.383.062	24.383.062	-
126	990750	Kota Bengkulu	135.773.048	98.687.291	37.085.757
127	998215	Kab. Kaur	73.130.512	73.130.513	-
128	998201	Kab. Seluma	668.886.589	668.886.590	-
129	998503	Kab. Mukomuko	14.133.844	14.133.845	-
130	987600	Kab. Lebong	12.123.474	12.123.475	-
131	987617	Kab. Kepahiang	17.279.221	17.279.221	-
132	990764	Provinsi Lampung	5.059.999.226	5.059.999.226	-
133	990807	Kab. Lampung Barat	228.356.258	228.356.258	-
134	990771	Kab. Lampung Selatan	249.099.522	249.099.521	-
135	990785	Kab. Lampung Tengah	319.629.618	319.629.617	-
136	990792	Kab. Lampung Utara	345.578.048	345.578.050	(2)
137	980191	Kab. Lampung Timur	256.961.129	256.961.129	-
138	993351	Kab. Tanggamus	266.368.820	266.368.821	-
139	993347	Kab. Tulang Bawang	4.185.427.540	3.042.198.062	1.143.229.478
140	980206	Kab. Way Kanan	228.267.974	228.267.974	-
141	990811	Kota Bandar Lampung	1.218.829.639	1.218.829.639	-
142	980210	Kota Metro	291.480.291	291.480.291	-
143	990828	Provinsi DKI Jakarta	193.525.175.220	193.525.175.219	-
144	990881	Provinsi Jawa Barat	9.692.342.511	9.692.342.511	-
145	991003	Kab. Bandung	333.742.321	333.742.320	-
146	990963	Kab. Bekasi	1.107.396.950	1.107.396.949	-
147	990938	Kab. Bogor	447.413.562	447.413.561	-
148	991045	Kab. Ciamis	205.979.032	205.979.031	-
149	990959	Kab. Cianjur	297.473.659	297.473.658	-
150	991052	Kab. Cirebon	253.752.130	253.752.130	-
151	991024	Kab. Garut	219.262.223	219.262.224	-
152	991070	Kab. Indramayu	207.284.097	207.284.098	-
153	990970	Kab. Karawang	1.087.321.165	1.087.321.165	-
154	991066	Kab. Kuningan	208.716.746	208.716.746	-
155	991087	Kab. Majalengka	196.222.138	196.222.138	-
156	990984	Kab. Purwakarta	521.935.026	521.935.026	-
157	990991	Kab. Subang	278.334.255	278.334.255	-
158	990942	Kab. Sukabumi	182.093.880	182.093.880	-
159	991010	Kab. Sumedang	210.824.398	210.824.398	-
160	991031	Kab. Tasikmalaya	186.983.253	186.983.254	-
161	991091	Kota Bandung	3.142.426.944	3.142.426.928	15
162	993330	Kota Bekasi	2.711.346.454	2.711.344.147	2.307
163	991109	Kota Bogor	753.930.826	753.930.826	-
164	991120	Kota Cirebon	460.303.312	460.303.312	-
165	980032	Kota Depok	665.501.813	665.501.813	-
166	991113	Kota Sukabumi	238.499.937	238.499.937	-
167	994754	Kota Cimahi	239.074.379	239.074.379	-
168	994740	Kota Tasikmalaya	297.119.962	297.119.962	-
169	998126	Kota Banjar	193.511.353	193.511.353	-
170	993809	Provinsi Banten	3.494.054.113	3.494.054.112	-
171	990917	Kab. Lebak	286.867.888	286.867.888	-
172	990900	Kab. Pandeglang	278.169.557	278.169.557	-
173	990895	Kab. Serang	3.744.811.281	3.744.811.281	-
174	990921	Kab. Tangerang	1.392.993.579	1.392.993.579	-
175	980049	Kota Cilegon	754.046.981	754.046.981	-
176	991134	Kota Tangerang	1.974.389.013	1.974.389.013	-
177	991141	Provinsi Jawa Tengah	5.671.079.147	5.671.079.147	-
178	991329	Kab. Banjarnegara	96.694.800	96.694.799	-
179	991290	Kab. Banyumas	435.878.912	435.878.912	-
180	991202	Kab. Batang	95.273.169	95.273.169	-
181	991286	Kab. Blora	154.362.742	154.362.673	69
182	991396	Kab. Boyolali	88.650.650	88.650.649	-
183	991223	Kab. Brebes	142.168.165	142.168.165	-
184	991308	Kab. Cilacap	182.080.059	182.080.057	2
185	991176	Kab. Demak	95.609.495	95.609.496	-
186	991180	Kab. Grobogan	828.440.627	828.440.627	-

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
187	991265	Kab. Jepara	156.561.690	156.561.690	-
188	991422	Kab. Karanganyar	131.809.863	131.809.863	-
189	991375	Kab. Kebumen	144.620.247	144.620.246	1
190	991162	Kab. Kendal	168.948.024	168.948.024	-
191	991382	Kab. Klaten	154.369.271	154.369.242	29
192	991244	Kab. Kudus	869.902.226	869.901.928	298
193	991333	Kab. Magelang	647.201.759	647.201.759	-
194	991230	Kab. Pati	211.208.917	211.208.916	1
195	991197	Kab. Pekalongan	247.172.949	247.172.950	-
196	991251	Kab. Pemalang	105.527.954	105.527.954	-
197	991312	Kab. Purbalingga	114.950.930	114.950.694	236
198	991361	Kab. Purworejo	138.918.991	100.979.750	37.939.241
199	991272	Kab. Rembang	430.819.676	430.818.395	1.280
200	991155	Kab. Semarang	119.725.940	119.725.940	-
201	991401	Kab. Sragen	102.749.341	102.749.341	-
202	991418	Kab. Sukoharjo	155.043.494	155.043.494	-
203	991219	Kab. Tegal	332.128.069	332.128.069	-
204	991340	Kab. Temanggung	155.610.652	155.610.652	-
205	991439	Kab. Wonogiri	104.945.634	104.945.594	40
206	991354	Kab. Wonosobo	205.881.962	205.881.962	-
207	991485	Kota Magelang	252.224.346	252.224.346	-
208	991464	Kota Pekalongan	255.223.311	255.223.311	-
209	991450	Kota Salatiga	146.132.747	146.132.746	-
210	991443	Kota Semarang	1.574.852.990	1.574.852.990	-
211	991492	Kota Surakarta	650.738.447	650.738.447	-
212	991471	Kota Tegal	399.398.384	399.398.384	-
213	991507	Provinsi D.I. Yogyakarta	898.378.922	898.378.922	-
214	991511	Kab. Bantul	152.283.370	152.283.370	-
215	991532	Kab. Gunung Kidul	102.256.621	102.256.621	-
216	991549	Kab. Kulon Progo	98.071.910	98.071.910	-
217	991528	Kab. Sleman	365.582.564	365.582.564	-
218	991553	Kota Yogyakarta	629.373.918	629.373.918	-
219	991560	Provinsi Jawa Timur	10.503.655.944	10.503.655.944	-
220	991642	Kab. Bangkalan	155.520.854	155.520.854	-
221	991670	Kab. Banyuwangi	250.602.361	250.602.361	-
222	991773	Kab. Blitar	143.197.134	143.197.132	2
223	991837	Kab. Bojonegoro	288.799.363	288.799.363	-
224	991659	Kab. Bondowoso	146.547.756	146.547.755	-
225	991574	Kab. Gresik	351.370.751	351.370.751	-
226	991684	Kab. Jember	270.674.367	270.674.368	-
227	991600	Kab. Jombang	285.629.908	285.629.908	-
228	991731	Kab. Kediri	184.407.097	184.407.097	-
229	991858	Kab. Lamongan	161.986.081	161.986.081	-
230	991727	Kab. Lumajang	182.197.687	123.145.576	59.052.111
231	991780	Kab. Madiun	154.197.288	154.197.288	-
232	991802	Kab. Magetan	153.789.971	153.789.971	-
233	991691	Kab. Malang	324.094.977	324.094.977	-
234	991581	Kab. Mojokerto	369.573.479	369.573.480	-
235	991752	Kab. Nganjuk	206.232.818	206.232.818	-
236	991794	Kab. Ngawi	157.882.059	157.882.057	2
237	991820	Kab. Pacitan	139.817.076	139.817.076	-
238	991621	Kab. Pamekasan	177.188.489	177.188.489	-
239	991706	Kab. Pasuruan	448.113.573	448.113.573	-
240	991816	Kab. Ponorogo	194.700.665	194.700.665	-
241	991710	Kab. Probolinggo	155.517.066	155.517.065	-
242	991617	Kab. Sampang	129.634.292	129.634.292	-
243	991595	Kab. Sidoarjo	737.364.026	859.507.032	(122.143.006)
244	991663	Kab. Situbondo	155.453.583	155.453.583	-
245	991638	Kab. Sumenep	147.102.039	147.102.039	-
246	991769	Kab. Trenggalek	137.370.600	137.370.599	-
247	991841	Kab. Tuban	185.079.849	185.079.849	-
248	991748	Kab. Tulungagung	220.760.471	220.760.471	-
249	991912	Kota Blitar	174.378.934	174.378.935	-
250	991926	Kota Kediri	1.195.134.781	1.195.134.780	-

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
251	991930	Kota Madiun	274.965.935	274.965.884	51
252	991883	Kota Malang	811.646.118	811.646.118	-
253	991879	Kota Mojokerto	331.977.137	331.977.138	-
254	991890	Kota Pasuruan	163.041.348	163.041.348	-
255	991905	Kota Probolinggo	297.576.972	297.576.972	-
256	991862	Kota Surabaya	6.119.060.840	6.119.060.840	-
257	994761	Kota Batu	134.609.927	134.609.927	-
258	991947	Provinsi Kalimantan Barat	850.797.438	850.797.428	11
259	980227	Kab. Bengkayang	42.328.881	30.766.950	11.561.931
260	980231	Kab. Landak	33.061.224	33.061.224	-
261	991993	kab. Kapuas Hulu	42.426.411	42.426.411	-
262	992008	Kab. Ketapang	41.785.744	41.785.744	-
263	991989	Kab. Pontianak	57.308.937	57.308.936	-
264	991951	Kab. Sambas	77.595.433	77.595.433	-
265	991968	Kab. Sanggau	60.853.207	60.853.207	-
266	991972	Kab. Sintang	47.140.129	47.140.129	-
267	992012	Kota Pontianak	674.903.402	674.903.402	-
268	994775	Kota Singkawang	120.264.951	120.264.951	-
269	987507	Kab. Sekadau	38.090.294	38.090.294	-
270	987492	Kab. Melawi	40.437.545	40.437.545	-
271	992029	Provinsi Kalimantan Tengah	131.075.318	131.075.318	-
272	992054	Kab. Barito Selatan	6.485.404	4.713.947	1.771.457
273	992040	Kab. Barito Utara	7.815.999	7.815.999	-
274	992033	Kab. Kapuas	10.712.346	10.712.346	-
275	992075	Kab. Kotawaringin Barat	32.055.932	32.055.932	-
276	992061	Kab. Kotawaringin Timur	45.320.668	45.320.668	-
277	992082	Kota Palangkaraya	55.747.064	147.109.324	(91.362.260)
278	997540	Kab. Barito Timur	296.030.124	296.030.124	-
279	997536	Kab. Murung Raya	4.747.861	4.747.860	-
280	997522	Kab. Pulang Pisau	4.641.314	4.641.314	-
281	997515	Kab. Gunung Mas	118.779.019	115.080.536	3.698.483
282	997501	Kab. Lamandau	4.449.049	4.449.049	-
283	997493	Kab. Sukamara	4.998.581	4.998.581	-
284	997472	Kab. Katingan	4.403.280	4.403.281	-
285	997489	Kab. Seruyan	6.229.937	6.229.938	-
286	992164	Provinsi Kalimantan Selatan	907.086.011	907.086.012	-
287	992171	Kab. Banjar	47.112.189	47.112.188	1
288	992228	Kab. Barito Kuala	31.955.148	31.955.148	-
289	992207	Kab. Hulu Sungai Selatan	33.580.890	33.580.889	-
290	992211	Kab. Hulu Sungai Tengah	40.142.381	40.142.381	-
291	992253	Kab. Hulu Sungai Utara	34.449.606	34.449.606	-
292	992249	Kab. Kota Baru	55.309.972	55.309.971	-
293	992232	Kab. Tabalong	36.067.993	36.067.993	-
294	992185	Kab. Tanah Laut	120.294.131	120.294.131	-
295	992192	Kab. Tapin	32.094.254	32.094.254	-
296	980248	Kota Banjar Baru	391.956.812	391.956.812	-
297	992260	Kota Banjarmasin	817.128.858	817.128.858	-
298	998236	Kab. Balangan	31.655.454	31.655.454	-
299	998222	Kab. Tanah Bumbu	36.145.963	36.145.963	-
300	992096	Provinsi Kalimantan Timur	1.338.314.384	1.338.314.384	-
301	992139	Kab. Berau	93.725.842	93.725.843	-
302	992122	Kab. Bulungan	62.748.939	62.748.939	-
303	992101	Kab. Kutai Kartanegara	51.814.013	51.814.013	-
304	980273	Kab. Kutai Barat	46.541.532	46.541.532	-
305	980280	Kab. Kutai Timur	79.614.240	79.614.240	-
306	980269	Kab. Malinau	48.139.917	48.139.917	-
307	980252	Kab. Nunukan	65.035.101	65.035.100	1
308	992118	Kab. Pasir	57.375.746	57.375.746	-
309	992150	Kota Balikpapan	802.925.885	802.925.884	-
310	980294	Kota Bontang	189.310.679	189.310.679	-
311	992143	Kota Samarinda	700.160.889	700.160.889	-
312	941901	Kota Tarakan	249.489.860	249.489.860	-
313	997561	Kab. Penajam Paser Utara	50.402.280	50.402.279	-
314	993021	Provinsi Sulawesi Utara	615.195.946	615.195.344	602

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
315	993059	Kab. Bolaang Mongondow	61.608.469	61.608.469	-
316	993042	Kab. Minahasa	48.447.448	48.447.448	-
317	993063	Kab. Sangihe	41.339.750	41.339.750	-
318	993091	Kota Bitung	133.671.708	133.671.708	-
319	993070	Kota Manado	439.193.980	439.193.980	1
320	997412	Kab. Kepulauan Talaud	27.734.993	20.159.152	7.575.841
321	998240	Kab. Minahasa Selatan	125.933.362	125.933.363	-
322	998257	Kota Tomohon	36.234.925	36.234.925	-
323	987485	Kab. Minahasa Utara	36.424.777	36.424.776	1
324	993820	Provinsi Gorontalo	176.920.959	176.920.959	-
325	980302	Kab. Boalemo	17.053.210	17.053.210	-
326	993038	Kab. Gorontalo	22.623.467	22.623.467	-
327	993084	Kota Gorontalo	188.071.931	188.071.931	-
328	998261	Kab. Pohuwato	21.298.284	21.298.284	-
329	998278	Kab. Bone Bolango	64.597.413	64.597.413	-
330	992960	Provinsi Sulawesi Tengah	316.873.146	316.873.142	4
331	993000	Kab. Banggai	73.416.291	73.416.291	-
332	980337	Kab. Banggai Kepulauan	20.480.352	20.480.352	-
333	980316	Kab. Buol	16.625.786	12.084.531	4.541.255
334	992998	Kab. Toli-Toli	123.657.729	123.657.729	-
335	992981	Kab. Donggala	49.419.184	49.419.184	-
336	980320	Kab. Morowali	15.082.947	15.082.947	-
337	992977	Kab. Poso	20.789.573	20.789.573	-
338	993017	Kota Palu	194.005.522	194.005.522	-
339	997582	Kab. Parigi Moutong	25.657.735	25.657.735	-
340	987471	Kab. Tojo Una Una	17.975.775	17.975.775	-
341	992722	Provinsi Sulawesi Selatan	2.302.452.085	2.302.452.084	1
342	992846	Kab. Bantaeng	59.943.843	59.943.843	-
343	992888	Kab. Barru	49.265.253	49.265.253	-
344	992778	Kab. Bone	77.735.682	77.735.682	-
345	992832	Kab. Bulukumba	68.893.439	68.893.439	-
346	992935	Kab. Enrekang	45.455.094	45.455.094	-
347	992740	Kab. Gowa	67.985.202	67.985.202	-
348	992850	Kab. Jeneponto	46.397.666	46.397.666	-
349	992811	Kab. Luwu	51.407.959	51.407.958	1
350	980341	Kab. Luwu Utara	49.893.811	49.893.811	-
351	992799	Kab. Maros	56.352.253	56.352.253	-
352	992900	Kab. Pangkajene Kepulauan	55.966.030	55.966.030	-
353	992736	Kab. Pinrang	64.451.184	64.451.184	-
354	992867	Kab. Selayar	52.824.020	52.824.020	-
355	992892	Kab. Sidenreng Rappang	60.923.354	60.923.354	-
356	992825	Kab. Sinjai	56.700.624	56.700.624	-
357	992914	Kab. Soppeng	50.997.319	50.997.319	-
358	992871	Kab. Takalar	47.801.780	47.801.780	-
359	992782	Kab. Tana Toraja	585.344.553	585.344.553	-
360	992757	Kab. Wajo	63.676.039	63.676.039	-
361	992956	Kota Pare-Pare	139.564.324	139.564.324	-
362	992942	Kota Makassar	1.985.649.188	1.985.649.188	-
363	997604	Kota Palopo	117.156.415	117.156.415	-
364	928282	Kab. Luwu Timur	121.249.097	121.249.097	-
365	955383	Provinsi Sulawesi Barat	757.229.792	757.229.792	-
366	992804	Kab. Majene	24.074.798	24.074.799	-
367	992761	Kab. Mamuju	42.370.090	42.370.089	-
368	992921	Kab. Polewali Mandar	28.769.793	28.769.793	-
369	997599	Kab. Mamasa	20.745.599	20.745.600	-
370	998299	Kab. Mamuju Utara	29.326.456	29.326.455	-
371	993106	Provinsi Sulawesi Tenggara	321.873.055	321.873.055	-
372	993127	Kab. Buton	15.384.688	15.384.688	-
373	993110	Kab. Konawe	25.871.364	25.871.364	-
374	993148	Kab. Kolaka	47.837.491	31.891.660	15.945.831
375	993131	Kab. Muna	28.374.965	28.374.965	-
376	993326	Kota Kendari	230.628.034	153.752.022	76.876.012
377	994782	Kota Bau-Bau	71.128.288	71.128.288	-
378	998304	Kab. Konawe Selatan	18.104.519	18.104.519	-

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
379	987642	Kab. Bombana	242.223.324	242.223.324	-
380	987638	Kab. Wakatobi	170.252.276	170.252.276	-
381	987443	Kab. Kolaka Utara	15.178.007	15.178.007	-
382	992274	Provinsi Bali	1.586.435.025	1.586.435.025	-
383	992342	Kab. Badung	519.557.712	519.557.713	-
384	992338	Kab. Bangli	82.758.110	82.758.110	-
385	992281	Kab. Buleleng	227.237.789	227.237.788	-
386	992317	Kab. Gianyar	195.611.079	195.611.079	-
387	992295	Kab. Jembrana	104.247.525	104.247.524	-
388	992321	Kab. Karangasem	94.793.799	94.793.799	-
389	992300	Kab. Klungkung	86.656.485	86.656.288	197
390	992359	Kab. Tabanan	167.368.943	167.368.944	-
391	992363	Kota Denpasar	969.400.083	969.400.082	-
392	992370	Provinsi Nusa Tenggara Barat	448.631.028	448.631.028	-
393	992410	Kab. Bima	26.129.763	26.129.763	-
394	992431	Kab. Dompu	30.360.135	30.360.135	-
395	992384	Kab. Lombok Barat	59.830.487	59.830.486	-
396	992391	Kab. Lombok Tengah	50.480.753	50.480.753	-
397	992406	Kab. Lombok Timur	50.480.753	50.480.753	-
398	992427	Kab. Sumbawa	76.116.705	76.116.704	-
399	992448	Kota Mataram	302.923.568	302.923.568	-
400	997625	Kota Bima	48.294.671	48.294.671	-
401	987450	Kab. Sumbawa Barat	28.329.708	28.329.708	-
402	992452	Provinsi Nusa Tenggara Timur	415.317.033	415.317.034	-
403	992502	Kab. Alor	34.767.327	34.767.327	-
404	992473	Kab. Belu	145.658.855	145.658.855	-
405	992537	Kab. Ende	47.689.119	47.689.118	1
406	992520	Kab. Flores Timur	28.101.664	28.101.664	-
407	992469	Kab. Kupang	16.396.703	16.396.702	-
408	980379	Kab. Lembata	15.588.938	15.588.938	-
409	992558	Kab. Manggarai	58.100.289	58.100.289	-
410	992541	Kab. Ngada	25.282.294	25.282.294	-
411	992516	Kab. Sikka	57.352.810	57.342.810	10.000
412	992579	Kab. Sumba Barat	34.664.007	34.664.007	-
413	992562	Kab. Sumba Timur	31.031.703	31.031.703	-
414	992494	Kab. Timor Tengah Selatan	19.119.981	19.119.981	-
415	992480	Kab. Timor Tengah Utara	17.414.253	12.657.634	4.756.620
416	993368	Kota Kupang	163.049.260	163.049.261	-
417	997578	Kab. Rote Ndao	12.491.240	12.491.240	-
418	998510	Kab. Manggarai Barat	15.754.706	11.451.383	4.303.323
419	993152	Provinsi Maluku	100.533.301	100.533.301	-
420	980358	Kab. Maluku Tenggara Barat	36.879.205	36.879.204	-
421	993169	Kab. Maluku Tengah	5.664.338	5.664.338	-
422	993173	Kab. Maluku Tenggara	9.947.535	9.947.535	-
423	980362	Kab. Pulau Buru	6.039.716	6.039.717	-
424	993202	Kota Ambon	858.019.325	858.019.325	-
425	987439	Kab. Seram Bagian Barat	188.056.267	182.821.653	5.234.614
426	987422	Kab. Seram Bagian Timur	164.281.227	164.281.227	-
427	987621	Kab. Kepulauan Aru	14.537.718	14.537.718	-
428	980011	Provinsi Maluku Utara	103.871.158	103.871.158	-
429	993194	Kab. Halmahera Tengah	5.845.334	5.845.334	-
430	993180	Kab. Halmahera Barat	8.620.509	8.620.509	-
431	980028	Kota Ternate	95.162.847	95.162.847	-
432	998346	Kab. Halmahera Timur	6.398.838	6.398.838	-
433	998350	Kota Tidore Kepulauan	6.965.055	6.965.055	-
434	998332	Kab. Kepulauan Sula	6.922.815	6.922.815	-
435	998325	Kab. Halmahera Selatan	8.217.938	8.217.938	-
436	998311	Kab. Halmahera Utara	197.982.466	183.500.251	14.482.215
437	993216	Provinsi Papua	471.640.585	471.640.586	-
438	993237	Kab. Biak Numfor	45.404.346	8.198.407	37.205.939
439	993220	Kab. Jayapura	27.026.903	19.644.634	7.382.269
440	993290	Kab. Jayawijaya	21.781.141	21.781.140	1
441	993283	Kab. Merauke	62.250.343	62.250.343	-
442	993401	Kab. Mimika	126.097.540	126.097.541	-

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
443	993305	Kab. Nabire	45.039.384	45.039.384	-
444	993393	Kab. Paniai	10.611.913	10.611.913	-
445	993389	Kab. Puncak Jaya	11.887.353	11.887.352	-
446	993258	Kab. Yapen Waropen	84.405.879	84.405.878	-
447	993312	Kota Jayapura	207.735.054	150.993.218	56.741.835
448	998392	Kab. Sarmi	285.006.540	281.793.112	3.213.428
449	998400	Kab. Keerom	593.215.777	593.215.777	-
450	998477	Kab. Yahukimo	11.911.759	8.658.119	3.253.640
451	998421	Kab. Pegunungan Bintang	10.611.913	10.611.913	-
452	998414	Kab. Tolikara	11.702.299	8.505.872	3.196.426
453	998388	Kab. Boven Digoel	11.985.957	11.985.957	-
454	998367	Kab. Mappi	507.794.422	507.794.422	-
455	998371	Kab. Asmat	10.611.913	10.611.913	-
456	998460	Kab. Waropen	10.611.913	10.611.913	-
457	987511	Kab. Supiori	10.611.913	10.611.913	-
458	998854	Provinsi Papua Barat	122.777.932	122.777.933	-
459	993262	Kab. Sorong	180.133.599	180.133.599	-
460	993241	Kab. Manokwari	31.121.602	31.121.602	-
461	993279	Kab. Fak Fak	13.278.626	13.278.627	-
462	980383	Kota Sorong	96.996.933	96.996.933	-
463	998442	Kab. Sorong Selatan	6.355.417	6.355.417	-
464	998456	Kab. Raja Ampat	6.452.056	6.452.055	-
465	998481	Kab. Teluk Bintuni	6.702.587	6.702.588	-
466	998498	Kab. Teluk Wondama	6.138.897	6.138.897	-
467	998435	Kab. Kaimana	9.611.321	9.611.321	-
JUMLAH			**355.639.389.811**	**354.182.439.332**	**1.456.950.476**

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - PAJAK BUMI DAN BANGUNAN BAGIAN PUSAT
& KURANG BAYAR PBB DISALURKAN PADA TAHUN 2007
TAHUN ANGGARAN 2007
(Dalam Rupiah)

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	990078	Kab. Aceh Barat	5.695.566.955	5.695.566.955	-
2	990022	Kab. Aceh Besar	5.983.421.280	5.983.421.280	-
3	990061	Kab. Aceh Selatan	5.256.643.368	5.256.643.368	-
4	980007	Kab. Singkil	5.820.959.027	5.820.959.027	-
5	990082	Kab. Aceh Tengah	5.129.960.811	5.129.960.811	-
6	990099	Kab. Aceh Tenggara	5.511.882.805	5.511.882.805	-
7	990057	Kab. Aceh Timur	5.247.860.565	5.247.860.565	-
8	990040	Kab. Aceh Utara	5.280.891.117	5.280.891.117	-
9	980053	Kab. Bireuen	5.315.875.291	5.315.875.291	-
10	990036	Kab. Pidie	5.907.269.660	5.907.269.660	-
11	993372	Kab. Simeulue	7.713.103.030	7.713.103.030	-
12	990104	Kota Banda Aceh	5.623.565.647	5.623.565.647	-
13	990111	Kota Sabang	5.739.458.367	5.739.458.367	-
14	994672	Kota Langsa	4.926.231.368	4.926.231.368	-
15	994686	Kota Lhokseumawe	5.387.606.559	5.387.606.559	-
16	997451	Kab. Nagan Raya	5.929.878.041	5.929.878.041	-
17	997447	Kab. Aceh Jaya	7.027.429.619	7.027.429.619	-
18	997426	Kab. Aceh Barat Daya	5.606.535.319	5.606.535.319	-
19	997430	Kab. Gayo Lues	5.588.538.601	5.588.538.601	-
20	997468	Kab. Aceh Tamiang	5.720.391.388	5.720.391.388	-
21	987532	Kab. Bener Meriah	5.715.308.675	5.715.308.675	-
22	990221	Kab. Asahan	5.599.955.179	5.599.955.179	-
23	990192	Kab. Dairi	3.375.513.075	3.375.513.075	-
24	990132	Kab. Deli Serdang	6.247.400.822	6.247.400.822	-
25	990146	Kab. Tanah Karo	5.740.375.057	5.740.375.057	-
26	990188	Kab. Labuhan Batu	6.232.605.353	6.232.605.353	-
27	990150	Kab. Langkat	9.371.660.226	9.371.660.226	-
28	941915	Kab. Mandailing Natal	6.076.980.578	6.076.980.578	-
29	990235	Kab. Nias	6.024.342.946	6.024.342.946	-
30	990171	Kab. Simalungun	5.682.154.833	5.682.154.833	-
31	990214	Kab. Tapanuli Selatan	6.512.213.078	6.512.213.078	-
32	990167	Kab. Tapanuli Tengah	6.063.508.091	6.063.508.091	-
33	990200	Kab. Tapanuli Utara	5.558.059.491	5.558.059.491	-
34	941922	Kab. Toba Samosir	5.846.846.662	5.846.846.662	-
35	990260	Kota Binjai	4.884.059.508	4.884.059.508	-
36	990242	Kota Medan	9.459.131.951	9.459.131.951	-
37	990277	Kota Pematang siantar	5.328.265.591	5.328.265.591	-
38	990298	Kota Sibolga	4.803.312.264	4.803.312.264	-
39	990281	Kota Tanjung Balai	4.844.429.168	4.844.429.168	-
40	990256	Kota Tebing Tinggi	5.016.876.396	5.016.876.396	-
41	994690	Kota Padang Sidimpuan	5.451.449.982	5.451.449.982	-
42	998147	Kab. Pakpak Bharat	5.639.146.327	5.639.146.327	-
43	998130	Kab. Nias Selatan	6.920.853.197	6.920.853.197	-
44	998151	Kab. Humbang Hasundutan	5.599.910.858	5.599.910.858	-
45	987418	Kab. Serdang Bedagai	5.598.870.068	5.598.870.068	-
46	987528	Kab. Samosir	5.557.458.400	5.557.458.400	-
47	990331	Kab. Limapuluh Koto	3.375.513.075	3.375.513.075	-
48	990310	Kab. Agam	3.375.513.075	3.375.513.075	-
49	980060	Kab. Kepulauan Mentawai	5.732.425.524	5.732.425.524	-
50	990352	Kab. Padang Pariaman	5.269.479.346	5.269.479.346	-
51	990324	Kab. Pasaman	5.094.045.639	5.094.045.639	-
52	990366	Kab. Pesisir Selatan	5.434.896.570	5.434.896.570	-
53	990387	Kab. Sawahlunto Sijunjung	5.042.214.114	5.042.214.114	-
54	990345	Kab. Solok	5.707.460.902	5.707.460.902	-
55	990370	Kab. Tanah Datar	5.215.875.527	5.215.875.527	-
56	990391	Kota Bukit Tinggi	4.988.981.334	4.988.981.334	-
57	990409	Kota Padang Panjang	5.029.099.644	5.029.099.644	-
58	990434	Kota Padang	5.755.490.898	5.755.490.898	-
59	990441	Kota Payakumbuh	3.375.513.075	3.375.513.075	-
60	990420	Kota Sawahlunto	4.935.153.204	4.935.153.204	-
61	990413	Kota Solok	4.801.408.525	4.801.408.525	-
62	997611	Kota Pariaman	5.302.746.928	5.302.746.928	-
63	987595	Kab. Pasaman Barat	3.375.513.075	3.375.513.075	-
64	987574	Kab. Dharmasraya	6.788.496.841	4.426.840.536	2.361.656.305
65	987581	Kab. Solok Selatan	5.281.572.498	5.281.572.498	-
66	990476	Kab. Bengkalis	6.898.275.773	6.898.275.773	-
67	990502	Kab. Indragiri Hilir	5.662.032.977	5.662.032.977	-
68	990497	Kab. Indragiri Hulu	3.375.513.075	3.375.513.075	-

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
69	990462	Kab. Kampar	3.375.513.075	3.375.513.075	-
70	980138	Kab. Kuantan Singingi	3.375.513.075	3.375.513.075	-
71	980074	Kab. Pelalawan	5.651.661.817	5.651.661.817	-
72	980095	Kab. Rokan Hilir	3.375.513.075	3.375.513.075	-
73	980081	Kab. Rokan Hulu	6.579.824.828	6.579.824.828	-
74	980100	Kab. Siak	5.396.239.195	5.396.239.195	-
75	980142	Kota Dumai	16.211.125.697	16.211.125.697	-
76	990519	Kota Pekanbaru	4.539.968.095	4.539.968.095	-
77	990480	Kab. Bintan	3.375.513.075	3.375.513.075	-
78	980121	Kab. Natuna	5.585.463.021	5.585.463.021	-
79	980117	Kab. Karimun	3.375.513.075	3.375.513.075	-
80	990523	Kota Batam	3.375.513.075	3.375.513.075	-
81	994708	Kota Tanjung Pinang	3.375.513.075	3.375.513.075	-
82	987464	Kab. Lingga	5.114.859.452	5.114.859.452	-
83	990544	Kab. Batanghari	5.987.111.002	5.987.111.002	-
84	990565	Kab. Bungo	3.375.513.075	3.375.513.075	-
85	990586	Kab. Kerinci	3.375.513.075	3.375.513.075	-
86	990572	Kab. Merangin	3.375.513.075	3.375.513.075	-
87	980184	Kab. Muaro Jambi	6.012.164.636	6.012.164.636	-
88	980163	Kab. Sarolangun	3.375.513.075	3.375.513.075	-
89	990551	Kab. Tanjung Jabung Barat	3.375.513.075	3.375.513.075	-
90	980522	Kab. Tanjung Jabung Timur	5.535.851.999	5.535.851.999	-
91	980170	Kab. Tebo	4.320.577.326	4.320.577.326	-
92	990590	Kota Jambi	3.375.513.075	3.375.513.075	-
93	990661	Kab. Lahat	5.461.231.274	5.461.231.274	-
94	990633	Kab. Musi Banyuasin	6.079.278.831	6.079.278.831	-
95	990675	Kab. Musi Rawas	6.182.845.190	6.182.845.190	-
96	990654	Kab. Muara Enim	3.375.513.075	3.375.513.075	-
97	990682	Kab. Ogan Komering Ilir	5.791.354.372	5.791.354.372	-
98	990640	Kab. Ogan Komering Ulu	3.375.513.075	3.375.513.075	-
99	990696	Kota Palembang	8.402.540.585	8.402.540.585	-
100	994729	Kota Pagar Alam	5.016.542.816	5.016.542.815	1
101	994733	Kota Lubuk Linggau	5.123.734.943	5.123.734.943	-
102	994712	Kota Prabumulih	5.134.609.977	5.134.609.977	-
103	997557	Kab. Banyuasin	6.373.086.974	6.373.086.974	-
104	987560	Kab. Ogan Ilir	3.375.513.075	3.375.513.075	-
105	987549	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	5.178.408.515	5.178.408.515	-
106	987553	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	3.375.513.075	3.375.513.075	-
107	990629	Kab. Bangka	3.375.513.075	3.375.513.075	-
108	990612	Kab. Belitung	3.375.513.075	3.375.513.075	-
109	990701	Kota Pangkal Pinang	5.284.769.406	5.284.769.406	-
110	998189	Kab. Bangka Selatan	3.375.513.075	3.375.513.075	-
111	998172	Kab. Bangka Tengah	3.375.513.075	3.375.513.075	-
112	998168	Kab. Bangka Barat	3.375.513.075	3.375.513.075	-
113	998193	Kab. Belitung Timur	3.375.513.075	3.375.513.075	-
114	990739	Kab. Bengkulu Selatan	3.375.513.075	3.375.513.075	-
115	990722	Kab. Bengkulu Utara	3.375.513.075	3.375.513.075	-
116	990743	Kab. Rejang Lebong	3.375.513.075	3.375.513.075	-
117	990750	Kota Bengkulu	3.375.513.075	3.375.513.075	-
118	998215	Kab. Kaur	5.629.170.392	5.629.170.392	-
119	998201	Kab. Seluma	3.375.513.075	3.375.513.075	-
120	998503	Kab. Mukomuko	3.375.513.075	3.375.513.075	-
121	987600	Kab. Lebong	5.082.505.851	5.082.505.851	-
122	987617	Kab. Kepahiang	5.675.569.568	5.675.569.568	-
123	990807	Kab. Lampung Barat	5.326.717.490	5.326.717.490	-
124	990771	Kab. Lampung Selatan	3.375.513.075	3.375.513.075	-
125	990785	Kab. Lampung Tengah	3.375.513.075	3.375.513.075	-
126	990792	Kab. Lampung Utara	5.364.190.719	5.364.190.719	-
127	980191	Kab. Lampung Timur	3.375.513.075	3.375.513.075	-
128	993351	Kab. Tanggamus	3.375.513.075	3.375.513.075	-
129	993347	Kab. Tulang Bawang	5.548.524.713	5.548.524.713	-
130	980206	Kab. Way Kanan	8.295.160.078	8.295.160.078	-
131	990811	Kota Bandar Lampung	3.375.513.075	3.375.513.075	-
132	980210	Kota Metro	5.601.363.465	5.601.363.465	-
133	990828	Provinsi DKI Jakarta	78.035.760.717	78.035.760.717	-
134	991003	Kab. Bandung	3.755.748.268	2.968.529.500	787.218.768
135	990963	Kab. Bekasi	3.375.513.075	3.375.513.075	-
136	990938	Kab. Bogor	3.375.513.075	3.375.513.075	-
137	991045	Kab. Ciamis	6.192.446.418	6.192.446.418	-
138	990959	Kab. Cianjur	3.375.513.075	3.375.513.075	-
139	991052	Kab. Cirebon	3.375.513.075	3.375.513.075	-
140	991024	Kab. Garut	6.258.099.019	6.258.099.019	-
141	991070	Kab. Indramayu	9.501.300.486	9.501.300.486	-
142	990970	Kab. Karawang	3.375.513.075	3.375.513.075	-
143	991066	Kab. Kuningan	5.824.993.757	5.824.993.757	-

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
144	991087	Kab. Majalengka	6.240.620.119	6.240.620.119	-
145	990984	Kab. Purwakarta	3.375.513.075	3.375.513.075	-
146	990991	Kab. Subang	3.375.513.075	3.375.513.075	-
147	990942	Kab. Sukabumi	3.375.513.075	3.375.513.075	-
148	991010	Kab. Sumedang	3.375.513.075	3.375.513.075	-
149	991031	Kab. Tasikmalaya	7.189.346.564	7.189.346.564	-
150	991091	Kota Bandung	9.152.302.161	9.152.302.161	-
151	993330	Kota Bekasi	3.375.513.075	3.375.513.075	-
152	991109	Kota Bogor	3.375.513.075	3.375.513.075	-
153	991120	Kota Cirebon	3.375.513.075	3.375.513.075	-
154	980032	Kota Depok	3.375.513.075	3.375.513.075	-
155	991113	Kota Sukabumi	3.375.513.075	3.375.513.075	-
156	994754	Kota Cimahi	3.375.513.075	3.375.513.075	-
157	994740	Kota Tasikmalaya	5.380.378.576	5.380.378.576	-
158	998126	Kota Banjar	5.255.201.679	5.255.201.679	-
159	990917	Kab. Lebak	3.375.513.075	3.375.513.075	-
160	990900	Kab. Pandeglang	3.375.513.075	3.375.513.075	-
161	990895	Kab. Serang	3.375.513.075	3.375.513.075	-
162	990921	Kab. Tangerang	3.375.513.075	3.375.513.075	-
163	980049	Kota Cilegon	5.983.885.243	5.983.885.243	-
164	991134	Kota Tangerang	3.375.513.075	3.375.513.075	-
165	991329	Kab. Banjarnegara	6.239.723.180	6.239.723.180	-
166	991290	Kab. Banyumas	6.457.050.789	6.457.050.789	-
167	991202	Kab. Batang	5.523.775.490	5.523.775.490	-
168	991286	Kab. Blora	5.379.614.784	5.379.614.784	-
169	991396	Kab. Boyolali	5.915.823.021	5.915.823.021	-
170	991223	Kab. Brebes	7.220.934.645	7.220.934.645	-
171	991308	Kab. Cilacap	13.713.678.055	13.713.678.055	-
172	991176	Kab. Demak	5.767.337.473	5.767.337.473	-
173	991180	Kab. Grobogan	6.546.797.795	6.546.797.795	-
174	991265	Kab. Jepara	3.375.513.075	3.375.513.075	-
175	991422	Kab. Karanganyar	3.375.513.075	3.375.513.075	-
176	991375	Kab. Kebumen	7.100.210.618	7.100.210.618	-
177	991162	Kab. Kendal	3.375.513.075	3.375.513.075	-
178	991382	Kab. Klaten	3.375.513.075	3.375.513.075	-
179	991244	Kab. Kudus	6.014.436.302	6.014.436.227	75
180	991333	Kab. Magelang	6.530.155.862	6.530.155.862	-
181	991230	Kab. Pati	3.375.513.075	3.375.513.075	-
182	991197	Kab. Pekalongan	5.323.088.328	5.323.088.328	-
183	991251	Kab. Pemalang	6.199.446.009	6.199.446.009	-
184	991312	Kab. Purbalingga	6.912.682.894	6.912.682.894	-
185	991361	Kab. Purworejo	6.685.335.404	6.685.335.404	-
186	991272	Kab. Rembang	5.566.126.403	5.566.126.403	-
187	991155	Kab. Semarang	3.375.513.075	1.801.075.538	1.574.437.537
188	991401	Kab. Sragen	5.773.651.497	5.773.651.497	-
189	991418	Kab. Sukoharjo	3.375.513.075	3.375.513.075	-
190	991219	Kab. Tegal	3.375.513.075	3.375.513.075	-
191	991340	Kab. Temanggung	5.493.687.339	5.493.687.339	-
192	991439	Kab. Wonogiri	6.665.077.899	6.665.077.794	105
193	991354	Kab. Wonosobo	5.535.474.602	5.535.474.602	-
194	991485	Kota Magelang	5.157.380.303	5.157.380.303	-
195	991464	Kota Pekalongan	5.083.434.239	5.083.434.239	-
196	991450	Kota Salatiga	3.375.513.075	3.375.513.075	-
197	991443	Kota Semarang	7.732.653.182	7.732.653.182	-
198	991492	Kota Surakarta	3.375.513.075	3.375.513.075	-
199	991471	Kota Tegal	5.157.913.910	5.157.913.910	-
200	991511	Kab. Bantul	3.375.513.075	3.375.513.075	-
201	991532	Kab. Gunung Kidul	5.335.732.851	5.335.732.851	-
202	991549	Kab. Kulon Progo	5.396.476.821	5.396.476.821	-
203	991528	Kab. Sleman	3.375.513.075	3.375.513.075	-
204	991553	Kota Yogyakarta	3.375.513.075	3.375.513.075	-
205	991642	Kab. Bangkalan	5.680.873.551	5.680.873.551	-
206	991670	Kab. Banyuwangi	3.957.735.585	3.957.735.585	-
207	991773	Kab. Blitar	6.090.386.330	6.090.386.330	-
208	991837	Kab. Bojonegoro	6.296.419.350	6.296.419.350	-
209	991659	Kab. Bondowoso	5.351.923.414	5.351.923.414	-
210	991574	Kab. Gresik	3.375.513.075	3.375.513.075	-
211	991684	Kab. Jember	3.375.513.075	3.375.513.075	-
212	991600	Kab. Jombang	5.843.221.536	5.843.221.536	-
213	991731	Kab. Kediri	6.225.582.337	6.225.582.337	-
214	991858	Kab. Lamongan	5.714.067.783	5.714.067.783	-
215	991727	Kab. Lumajang	3.375.513.075	3.375.513.075	-
216	991780	Kab. Madiun	5.595.082.045	5.595.082.045	-
217	991802	Kab. Magetan	5.797.990.211	5.797.990.211	-
218	991691	Kab. Malang	3.375.513.075	3.375.513.075	-

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
219	991581	Kab. Mojokerto	3.375.513.075	3.375.513.075	-
220	991752	Kab. Nganjuk	5.959.832.818	5.959.832.818	-
221	991794	Kab. Ngawi	5.837.492.811	5.837.492.811	-
222	991820	Kab. Pacitan	5.853.020.719	5.853.020.719	-
223	991621	Kab. Pamekasan	5.627.658.421	5.627.658.421	-
224	991706	Kab. Pasuruan	3.375.513.075	3.375.513.075	-
225	991816	Kab. Ponorogo	6.022.846.258	6.022.846.258	-
226	991710	Kab. Probolinggo	3.375.513.075	3.375.513.075	-
227	991617	Kab. Sampang	5.767.027.035	5.767.027.035	-
228	991595	Kab. Sidoarjo	7.498.118.809	7.498.118.809	-
229	991663	Kab. Situbondo	4.320.577.326	4.320.577.326	-
230	991638	Kab. Sumenep	5.778.722.162	5.778.722.162	-
231	991769	Kab. Trenggalek	5.793.904.560	5.793.904.560	-
232	991841	Kab. Tuban	6.399.419.645	6.399.419.645	-
233	991748	Kab. Tulungagung	5.674.075.824	5.674.075.824	-
234	991912	Kota Blitar	5.002.568.157	5.002.568.157	-
235	991926	Kota Kediri	5.132.088.032	5.132.088.032	-
236	991930	Kota Madiun	5.275.425.649	5.275.425.649	-
237	991883	Kota Malang	3.375.513.075	3.375.513.075	-
238	991879	Kota Mojokerto	4.878.895.095	4.878.895.095	-
239	991890	Kota Pasuruan	3.375.513.075	3.375.513.075	-
240	991905	Kota Probolinggo	3.375.513.075	3.375.513.075	-
241	991862	Kota Surabaya	16.591.330.024	16.591.330.024	-
242	994761	Kota Batu	3.375.513.075	3.375.513.075	-
243	980227	Kab. Bengkayang	3.375.513.075	3.375.513.075	-
244	980231	Kab. Landak	3.375.513.075	3.375.513.075	-
245	991993	kab. Kapuas Hulu	6.007.500.252	6.007.500.252	-
246	992008	Kab. Ketapang	6.489.546.340	6.489.546.340	-
247	991989	Kab. Pontianak	3.375.513.075	3.375.513.075	-
248	991951	Kab. Sambas	3.375.513.075	3.375.513.075	-
249	991968	Kab. Sanggau	5.554.020.698	5.554.020.698	-
250	991972	Kab. Sintang	3.375.513.075	3.375.513.075	-
251	992012	Kota Pontianak	3.375.513.075	3.375.513.075	-
252	994775	Kota Singkawang	3.375.513.075	3.375.513.075	-
253	987507	Kab. Sekadau	5.368.269.096	5.368.269.096	-
254	987492	Kab. Melawi	5.287.179.470	5.287.179.470	-
255	992054	Kab. Barito Selatan	5.833.610.539	5.833.610.539	-
256	992040	Kab. Barito Utara	5.756.365.051	5.756.365.051	-
257	992033	Kab. Kapuas	6.284.119.711	6.284.119.711	-
258	992075	Kab. Kotawaringin Barat	3.375.513.075	3.375.513.075	-
259	992061	Kab. Kotawaringin Timur	3.375.513.075	3.375.513.075	-
260	992082	Kota Palangkaraya	3.375.513.075	3.375.513.075	-
261	997540	Kab. Barito Timur	3.375.513.075	3.375.513.075	-
262	997536	Kab. Murung Raya	6.424.981.044	6.424.981.044	-
263	997522	Kab. Pulang Pisau	5.900.821.905	5.900.821.905	-
264	997515	Kab. Gunung Mas	5.374.704.023	3.013.047.718	2.361.656.305
265	997501	Kab. Lamandau	5.445.442.066	5.445.442.066	-
266	997493	Kab. Sukamara	5.671.878.480	5.671.878.480	-
267	997472	Kab. Katingan	3.375.513.075	3.375.513.075	-
268	997489	Kab. Seruyan	5.426.443.103	5.426.443.103	-
269	992171	Kab. Banjar	3.375.513.075	3.375.513.075	-
270	992228	Kab. Barito Kuala	4.989.047.796	4.989.047.796	-
271	992207	Kab. Hulu Sungai Selatan	4.955.794.843	4.955.794.843	-
272	992211	Kab. Hulu Sungai Tengah	5.609.479.856	5.609.479.856	-
273	992253	Kab. Hulu Sungai Utara	5.025.369.223	5.025.369.223	-
274	992249	Kab. Kota Baru	6.058.894.644	6.058.894.644	-
275	992232	Kab. Tabalong	5.811.672.029	5.811.672.029	-
276	992185	Kab. Tanah Laut	5.830.557.238	5.830.557.238	-
277	992192	Kab. Tapin	5.694.200.904	5.694.200.904	-
278	980248	Kota Banjar Baru	4.750.014.369	4.750.014.369	-
279	992260	Kota Banjarmasin	3.375.513.075	3.375.513.075	-
280	998236	Kab. Balangan	5.400.638.191	5.400.638.191	-
281	998222	Kab. Tanah Bumbu	3.375.513.075	3.375.513.075	-
282	992139	Kab. Berau	3.375.513.075	3.375.513.075	-
283	992122	Kab. Bulungan	3.375.513.075	3.375.513.075	-
284	992101	Kab. Kutai Kartanegara	6.944.259.251	6.944.259.251	-
285	980273	Kab. Kutai Barat	6.231.358.569	6.231.358.569	-
286	980280	Kab. Kutai Timur	6.403.043.281	6.403.043.281	-
287	980269	Kab. Malinau	6.889.331.359	6.889.331.359	-
288	980252	Kab. Nunukan	5.369.952.870	5.369.952.870	-
289	992118	Kab. Pasir	3.375.513.075	3.375.513.075	-
290	992150	Kota Balikpapan	14.990.369.026	14.990.369.026	-
291	980294	Kota Bontang	4.958.202.717	4.958.202.717	-
292	992143	Kota Samarinda	3.375.513.075	3.375.513.075	-
293	941901	Kota Tarakan	5.901.310.374	5.901.310.374	-

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
294	997561	Kab. Penajam Paser Utara	8.422.786.153	8.422.786.153	-
295	993059	Kab. Bolaang Mongondow	3.375.513.075	3.375.513.075	-
296	993042	Kab. Minahasa	3.375.513.075	3.375.513.075	-
297	993063	Kab. Sangihe	5.602.407.748	5.602.407.748	-
298	993091	Kota Bitung	5.702.944.370	5.702.944.370	-
299	993070	Kota Manado	3.375.513.075	3.375.513.075	-
300	997412	Kab. Kepulauan Talaud	5.592.065.002	5.592.065.002	-
301	998240	Kab. Minahasa Selatan	5.057.012.557	5.057.012.557	-
302	998257	Kota Tomohon	6.794.295.664	6.794.295.664	-
303	987485	Kab. Minahasa Utara	3.375.513.075	3.375.513.075	-
304	980302	Kab. Boalemo	5.887.596.206	5.887.596.206	-
305	993038	Kab. Gorontalo	5.855.350.354	5.855.350.354	-
306	993084	Kota Gorontalo	5.156.608.037	5.156.608.037	-
307	998261	Kab. Pohuwato	5.669.993.732	5.669.993.732	-
308	998278	Kab. Bone Bolango	5.839.091.805	5.839.091.805	-
309	993000	Kab. Banggai	5.587.129.098	5.587.129.098	-
310	980337	Kab. Banggai Kepulauan	5.305.767.334	5.305.767.334	-
311	980316	Kab. Buol	5.877.311.571	5.877.311.571	-
312	992998	Kab. Toli-Toli	3.375.513.075	3.375.513.075	-
313	992981	Kab. Donggala	3.375.513.075	3.375.513.075	-
314	980320	Kab. Morowali	5.769.625.768	5.769.625.768	-
315	992977	Kab. Poso	5.344.584.753	5.344.584.753	-
316	993017	Kota Palu	3.375.513.075	3.375.513.075	-
317	997582	Kab. Parigi Moutong	3.957.735.585	3.957.735.585	-
318	987471	Kab. Tojo Una Una	5.711.148.854	5.711.148.854	-
319	992846	Kab. Bantaeng	4.906.635.233	4.906.635.233	-
320	992888	Kab. Barru	4.951.284.069	4.951.284.069	-
321	992778	Kab. Bone	5.479.576.466	5.479.576.466	-
322	992832	Kab. Bulukumba	5.095.006.898	5.095.006.898	-
323	992935	Kab. Enrekang	5.796.804.811	5.796.804.811	-
324	992740	Kab. Gowa	5.677.502.529	5.677.502.529	-
325	992850	Kab. Jeneponto	5.914.135.638	5.914.135.638	-
326	992811	Kab. Luwu	5.524.211.339	5.524.211.339	-
327	980341	Kab. Luwu Utara	5.888.376.899	5.888.376.899	-
328	992799	Kab. Maros	5.170.038.113	5.170.038.112	1
329	992900	Kab. Pangkajene Kepulauan	5.415.585.383	5.415.585.383	-
330	992736	Kab. Pinrang	5.179.240.115	5.179.240.115	-
331	992867	Kab. Selayar	5.239.634.315	5.239.634.315	-
332	992892	Kab. Sidenreng Rappang	5.448.924.378	5.448.924.378	-
333	992825	Kab. Sinjai	4.977.203.474	4.977.203.474	-
334	992914	Kab. Soppeng	5.057.913.232	5.057.913.232	-
335	992871	Kab. Takalar	5.431.311.020	5.431.311.020	-
336	992782	Kab. Tana Toraja	5.554.450.851	5.554.450.851	-
337	992757	Kab. Wajo	5.184.803.455	5.184.803.455	-
338	992956	Kota Pare-Pare	5.486.545.241	5.486.545.241	-
339	992942	Kota Makassar	8.191.331.435	8.191.331.435	-
340	997604	Kota Palopo	5.681.901.378	5.681.901.378	-
341	928282	Kab. Luwu Timur	6.487.340.646	6.487.340.646	-
342	992804	Kab. Majene	5.106.724.456	5.106.724.456	-
343	992761	Kab. Mamuju	5.842.645.955	5.842.645.955	-
344	992921	Kab. Polewali Mandar	5.353.894.879	5.353.894.879	-
345	997599	Kab. Mamasa	5.833.002.681	5.833.002.681	-
346	998299	Kab. Mamuju Utara	3.375.513.075	3.375.513.075	-
347	993127	Kab. Buton	5.530.169.592	5.530.169.592	-
348	993110	Kab. Konawe	5.544.947.462	5.544.947.462	-
349	993148	Kab. Kolaka	5.662.738.651	5.662.738.651	-
350	993131	Kab. Muna	5.605.572.410	5.605.572.410	-
351	993326	Kota Kendari	3.375.513.075	3.375.513.075	-
352	994782	Kota Bau-Bau	5.226.975.961	5.226.975.961	-
353	998304	Kab. Konawe Selatan	5.386.515.597	5.386.515.597	-
354	987642	Kab. Bombana	5.141.344.586	5.141.344.586	-
355	987638	Kab. Wakatobi	5.637.431.915	5.637.431.915	-
356	987443	Kab. Kolaka Utara	5.024.216.448	5.024.216.448	-
357	992342	Kab. Badung	3.375.513.075	3.375.513.075	-
358	992338	Kab. Bangli	4.858.692.922	4.858.692.922	-
359	992281	Kab. Buleleng	3.375.513.075	3.375.513.075	-
360	992317	Kab. Gianyar	3.375.513.075	3.375.513.075	-
361	992295	Kab. Jembrana	3.375.513.075	3.375.513.075	-
362	992321	Kab. Karangasem	5.408.709.223	5.408.709.223	-
363	992300	Kab. Klungkung	4.877.556.514	4.877.556.514	-
364	992359	Kab. Tabanan	3.375.513.075	3.375.513.075	-
365	992363	Kota Denpasar	3.375.513.075	3.375.513.075	-
366	992410	Kab. Bima	3.375.513.075	3.375.513.075	-
367	992431	Kab. Dompu	3.375.513.075	3.375.513.075	-
368	992384	Kab. Lombok Barat	3.375.513.075	3.375.513.075	-

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
369	992391	Kab. Lombok Tengah	3.375.513.075	3.375.513.075	-
370	992406	Kab. Lombok Timur	3.375.513.075	3.375.513.075	-
371	992427	Kab. Sumbawa	3.375.513.075	3.375.513.075	-
372	992448	Kota Mataram	3.375.513.075	3.375.513.075	-
373	997625	Kota Bima	5.213.976.503	5.213.976.503	-
374	987450	Kab. Sumbawa Barat	5.807.905.797	5.807.905.797	-
375	992502	Kab. Alor	5.301.490.066	5.301.490.066	-
376	992473	Kab. Belu	5.129.404.008	5.129.404.008	-
377	992537	Kab. Ende	5.361.107.890	5.361.107.890	-
378	992520	Kab. Flores Timur	5.262.603.168	5.262.603.168	-
379	992469	Kab. Kupang	5.538.234.126	5.538.234.126	-
380	980379	Kab. Lembata	5.801.391.268	5.801.391.268	-
381	992558	Kab. Manggarai	5.994.492.630	5.994.492.630	-
382	992541	Kab. Ngada	5.231.197.548	5.231.197.548	-
383	992516	Kab. Sikka	4.956.825.495	4.956.825.495	-
384	992579	Kab. Sumba Barat	5.394.333.739	5.394.333.739	-
385	992562	Kab. Sumba Timur	3.375.513.075	3.375.513.075	-
386	992494	Kab. Timor Tengah Selatan	5.594.358.983	5.594.358.983	-
387	992480	Kab. Timor Tengah Utara	5.282.796.613	5.282.796.613	-
388	993368	Kota Kupang	3.375.513.075	3.375.513.075	-
389	997578	Kab. Rote Ndao	5.338.226.232	5.338.226.232	-
390	998510	Kab. Manggarai Barat	5.694.190.950	5.694.190.950	-
391	980358	Kab. Maluku Tenggara Barat	3.375.513.075	3.375.513.075	-
392	993169	Kab. Maluku Tengah	5.178.931.096	5.178.931.096	-
393	993173	Kab. Maluku Tenggara	5.853.140.880	5.853.140.880	-
394	980362	Kab. Pulau Buru	5.546.313.577	5.546.313.577	-
395	993202	Kota Ambon	6.154.996.041	6.154.996.041	-
396	987439	Kab. Seram Bagian Barat	3.375.513.075	1.013.856.770	2.361.656.305
397	987422	Kab. Seram Bagian Timur	3.375.513.075	3.375.513.075	-
398	987621	Kab. Kepulauan Aru	5.887.378.976	5.887.378.976	-
399	993194	Kab. Halmahera Tengah	5.469.333.982	5.469.333.982	-
400	993180	Kab. Halmahera Barat	4.930.299.136	4.930.299.136	-
401	980028	Kota Ternate	5.603.013.324	5.603.013.324	-
402	998346	Kab. Halmahera Timur	5.124.184.020	5.124.184.020	-
403	998350	Kota Tidore Kepulauan	5.008.328.992	5.008.328.992	-
404	998332	Kab. Kepulauan Sula	5.791.451.194	4.217.013.657	1.574.437.537
405	998325	Kab. Halmahera Selatan	6.011.597.532	6.011.597.532	-
406	998311	Kab. Halmahera Utara	5.915.010.336	3.553.354.031	2.361.656.305
407	993237	Kab. Biak Numfor	3.375.513.075	1.013.856.770	2.361.656.305
408	993220	Kab. Jayapura	6.492.166.588	6.492.166.588	-
409	993290	Kab. Jayawijaya	5.938.457.709	5.938.457.709	-
410	993283	Kab. Merauke	7.490.708.911	7.490.708.911	-
411	993401	Kab. Mimika	6.313.774.354	6.313.774.354	-
412	993305	Kab. Nabire	6.404.671.011	6.404.671.011	-
413	993393	Kab. Paniai	5.878.781.359	5.878.781.359	-
414	993389	Kab. Puncak Jaya	5.548.333.991	5.548.333.991	-
415	993258	Kab. Yapen Waropen	5.850.717.653	5.850.717.653	-
416	993312	Kota Jayapura	5.914.703.048	5.914.703.048	-
417	998392	Kab. Sarmi	6.972.244.890	6.972.244.890	-
418	998400	Kab. Keerom	5.319.030.677	5.319.030.677	-
419	998477	Kab. Yahukimo	5.729.527.588	5.729.527.588	-
420	998421	Kab. Pegunungan Bintang	6.448.198.349	6.448.198.349	-
421	998414	Kab. Tolikara	5.260.975.369	5.260.975.369	-
422	998388	Kab. Boven Digoel	6.078.890.764	6.078.890.764	-
423	998367	Kab. Mappi	6.575.374.313	6.575.374.313	-
424	998371	Kab. Asmat	6.574.789.840	6.574.789.840	-
425	998460	Kab. Waropen	5.862.355.722	5.862.355.722	-
426	987511	Kab. Supiori	5.380.769.071	5.380.769.071	-
427	993262	Kab. Sorong	6.158.658.267	6.158.658.267	-
428	993241	Kab. Manokwari	6.199.429.955	6.199.429.955	-
429	993279	Kab. Fak Fak	6.186.902.227	6.186.902.227	-
430	980383	Kota Sorong	6.084.527.874	6.084.527.874	-
431	998442	Kab. Sorong Selatan	6.449.519.229	6.449.519.229	-
432	998456	Kab. Raja Ampat	5.475.624.880	5.475.624.880	-
433	998481	Kab. Teluk Bintuni	6.280.085.675	6.280.085.675	-
434	998498	Kab. Teluk Wondama	5.914.838.732	5.914.838.732	-
435	998435	Kab. Kaimana	5.205.313.913	5.205.313.913	-
JUMLAH			**2.302.889.248.144**	**2.287.144.872.595**	**15.744.375.549**

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL - BEA PEROLEHAN HAK ATAS TANAH DAN BANGUNAN (BPHTB) BAGIAN PUSAT
& KURANG BAYAR BPHTB DISALURKAN PADA TAHUN 2007
TAHUN ANGGARAN 2007
(Dalam Rupiah)

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
1	990078	Kab. Aceh Barat	1.847.635.990	1.847.635.990	-
2	990022	Kab. Aceh Besar	1.847.635.990	1.847.635.990	-
3	990061	Kab. Aceh Selatan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
4	980007	Kab. Singkil	1.847.635.990	1.847.635.990	-
5	990082	Kab. Aceh Tengah	1.847.635.990	1.847.635.990	-
6	990099	Kab. Aceh Tenggara	1.847.635.990	1.847.635.990	-
7	990057	Kab. Aceh Timur	1.847.635.990	1.847.635.990	-
8	990040	Kab. Aceh Utara	1.847.635.990	1.847.635.990	-
9	980053	Kab. Bireuen	1.847.635.990	1.847.635.990	-
10	990036	Kab. Pidie	1.847.635.990	1.847.635.990	-
11	993372	Kab. Simeulue	1.876.983.616	1.876.983.616	-
12	990104	Kota Banda Aceh	1.847.635.990	1.847.635.990	-
13	990111	Kota Sabang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
14	994672	Kota Langsa	1.847.635.990	1.847.635.990	-
15	994686	Kota Lhokseumawe	1.847.635.990	1.847.635.990	-
16	997451	Kab. Nagan Raya	1.847.635.990	1.847.635.990	-
17	997447	Kab. Aceh Jaya	2.449.114.122	2.449.114.122	-
18	997426	Kab. Aceh Barat Daya	1.847.635.990	1.847.635.990	-
19	997430	Kab. Gayo Lues	1.847.635.990	1.847.635.990	-
20	997468	Kab. Aceh Tamiang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
21	987532	Kab. Bener Meriah	1.847.635.990	1.847.635.990	-
22	990221	Kab. Asahan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
23	990192	Kab. Dairi	1.847.635.990	1.847.635.990	-
24	990132	Kab. Deli Serdang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
25	990146	Kab. Tanah Karo	1.847.635.990	1.847.635.990	-
26	990188	Kab. Labuhan Batu	1.847.635.990	1.847.635.990	-
27	990150	Kab. Langkat	1.847.635.990	1.847.635.990	-
28	941915	Kab. Mandailing Natal	1.847.635.990	1.847.635.990	-
29	990235	Kab. Nias	1.847.635.990	1.847.635.990	-
30	990171	Kab. Simalungun	1.847.635.990	1.847.635.990	-
31	990214	Kab. Tapanuli Selatan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
32	990167	Kab. Tapanuli Tengah	1.847.635.990	1.847.635.990	-
33	990200	Kab. Tapanuli Utara	1.847.635.990	1.847.635.990	-
34	941922	Kab. Toba Samosir	1.847.635.990	1.847.635.990	-
35	990260	Kota Binjai	1.847.635.990	1.847.635.990	-
36	990242	Kota Medan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
37	990277	Kota Pematang siantar	1.847.635.990	1.847.635.990	-
38	990298	Kota Sibolga	1.847.635.990	1.847.635.990	-
39	990281	Kota Tanjung Balai	1.847.635.990	1.847.635.990	-
40	990256	Kota Tebing Tinggi	1.847.635.990	1.847.635.990	-
41	994690	Kota Padang Sidimpuan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
42	998147	Kab. Pakpak Bharat	1.847.635.990	1.847.635.990	-
43	998130	Kab. Nias Selatan	3.050.392.254	3.050.392.254	-
44	998151	Kab. Humbang Hasundutan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
45	987418	Kab. Serdang Bedagai	1.847.635.990	1.847.635.990	-
46	987528	Kab. Samosir	1.847.635.990	1.847.635.990	-
47	990331	Kab. Limapuluh Koto	1.847.635.990	1.847.635.990	-
48	990310	Kab. Agam	1.847.635.990	1.847.635.990	-
49	980060	Kab. Kepulauan Mentawai	1.847.635.990	1.847.635.990	-
50	990352	Kab. Padang Pariaman	1.847.635.990	1.847.635.990	-
51	990324	Kab. Pasaman	1.847.635.990	1.847.635.990	-
52	990366	Kab. Pesisir Selatan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
53	990387	Kab. Sawahlunto Sijunjung	1.847.635.990	1.847.635.990	-
54	990345	Kab. Solok	1.847.635.990	1.847.635.990	-
55	990370	Kab. Tanah Datar	1.847.635.990	1.847.635.990	-
56	990391	Kota Bukit Tinggi	1.847.635.990	1.847.635.990	-
57	990409	Kota Padang Panjang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
58	990434	Kota Padang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
59	990441	Kota Payakumbuh	1.847.635.990	1.847.635.990	-
60	990420	Kota Sawahlunto	1.847.635.990	1.847.635.990	-
61	990413	Kota Solok	1.847.635.990	1.847.635.990	-
62	997611	Kota Pariaman	1.847.635.990	1.847.635.990	-
63	987595	Kab. Pasaman Barat	1.847.635.990	1.847.635.990	-
64	987574	Kab. Dharmasraya	3.050.392.254	1.208.740.776	1.841.651.478

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
65	987581	Kab. Solok Selatan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
66	990476	Kab. Bengkalis	1.847.635.990	1.847.635.990	-
67	990502	Kab. Indragiri Hilir	1.847.635.990	1.847.635.990	-
68	990497	Kab. Indragiri Hulu	1.847.635.990	1.847.635.990	-
69	990462	Kab. Kampar	1.847.635.990	1.847.635.990	-
70	980138	Kab. Kuantan Singingi	1.847.635.990	1.847.635.990	-
71	980074	Kab. Pelalawan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
72	980095	Kab. Rokan Hilir	1.847.635.990	1.847.635.990	-
73	980081	Kab. Rokan Hulu	1.847.635.990	1.847.635.990	-
74	980100	Kab. Siak	1.847.635.990	1.847.635.990	-
75	980142	Kota Dumai	1.847.635.990	1.847.635.990	-
76	990519	Kota Pekanbaru	2.449.014.122	2.449.014.122	-
77	990480	Kab. Bintan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
78	980121	Kab. Natuna	1.847.635.990	1.847.635.990	-
79	980117	Kab. Karimun	1.847.635.990	1.847.635.990	-
80	990523	Kota Batam	1.847.635.990	1.847.635.990	-
81	994708	Kota Tanjung Pinang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
82	987464	Kab. Lingga	1.847.635.990	1.847.635.990	-
83	990544	Kab. Batanghari	1.847.635.990	1.847.635.990	-
84	990565	Kab. Bungo	1.847.635.990	1.847.635.990	-
85	990586	Kab. Kerinci	1.847.635.990	1.847.635.990	-
86	990572	Kab. Merangin	1.847.635.990	1.847.635.990	-
87	980184	Kab. Muaro Jambi	1.847.635.990	1.847.635.990	-
88	980163	Kab. Sarolangun	1.847.635.990	1.847.635.990	-
89	990551	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.847.635.990	1.847.635.990	-
90	980522	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.847.635.990	1.847.635.990	-
91	980170	Kab. Tebo	1.870.983.616	1.870.983.616	-
92	990590	Kota Jambi	1.847.635.990	1.847.635.990	-
93	990661	Kab. Lahat	1.847.635.990	1.847.635.990	-
94	990633	Kab. Musi Banyuasin	1.847.635.990	1.847.635.990	-
95	990675	Kab. Musi Rawas	1.847.635.990	1.847.635.990	-
96	990654	Kab. Muara Enim	1.847.635.990	1.847.635.990	-
97	990682	Kab. Ogan Komering Ilir	2.524.060.980	2.524.060.980	-
98	990640	Kab. Ogan Komering Ulu	1.847.635.990	1.847.635.990	-
99	990696	Kota Palembang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
100	994729	Kota Pagar Alam	1.847.635.990	1.847.632.989	3.001
101	994733	Kota Lubuk Linggau	1.847.635.990	1.847.635.990	-
102	994712	Kota Prabumulih	1.847.635.990	1.847.635.990	-
103	997557	Kab. Banyuasin	1.847.635.990	1.847.635.990	-
104	987560	Kab. Ogan Ilir	1.847.635.990	1.847.635.990	-
105	987549	Kab. Ogan Komering Ulu Timur	1.847.635.990	1.842.635.990	5.000.000
106	987553	Kab. Ogan Komering Ulu Selatan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
107	990629	Kab. Bangka	1.847.635.990	1.847.635.990	-
108	990612	Kab. Belitung	1.847.635.990	1.847.635.990	-
109	990701	Kota Pangkal Pinang	1.847.635.990	1.847.544.990	91.000
110	998189	Kab. Bangka Selatan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
111	998172	Kab. Bangka Tengah	1.847.635.990	1.847.635.990	-
112	998168	Kab. Bangka Barat	1.847.635.990	1.847.635.990	-
113	998193	Kab. Belitung Timur	1.847.635.990	1.847.635.990	-
114	990739	Kab. Bengkulu Selatan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
115	990722	Kab. Bengkulu Utara	1.847.635.990	1.847.635.990	-
116	990743	Kab. Rejang Lebong	1.847.635.990	1.847.635.990	-
117	990750	Kota Bengkulu	1.847.635.990	1.847.635.990	-
118	998215	Kab. Kaur	1.847.635.990	1.847.635.990	-
119	998201	Kab. Seluma	1.847.635.990	1.847.635.990	-
120	998503	Kab. Mukomuko	1.847.635.990	1.847.635.990	-
121	987600	Kab. Lebong	1.847.635.990	1.847.635.990	-
122	987617	Kab. Kepahiang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
123	990807	Kab. Lampung Barat	1.847.635.990	1.847.635.990	-
124	990771	Kab. Lampung Selatan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
125	990785	Kab. Lampung Tengah	1.847.635.990	1.847.635.990	-
126	990792	Kab. Lampung Utara	1.847.635.990	1.847.635.990	-
127	980191	Kab. Lampung Timur	1.870.983.616	1.870.983.616	-
128	993351	Kab. Tanggamus	1.847.635.990	1.847.635.990	-
129	993347	Kab. Tulang Bawang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
130	980206	Kab. Way Kanan	1.870.983.616	1.870.983.616	-
131	990811	Kota Bandar Lampung	1.847.635.990	1.847.635.990	-
132	980210	Kota Metro	1.847.635.990	1.847.635.990	-
133	990828	Provinsi DKI Jakarta	9.238.179.955	9.238.179.955	-
134	991003	Kab. Bandung	2.213.774.942	1.599.891.116	613.883.826

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
135	990963	Kab. Bekasi	1.847.635.990	1.847.635.990	-
136	990938	Kab. Bogor	1.847.635.990	1.847.635.990	-
137	991045	Kab. Ciamis	1.847.635.990	1.847.635.990	-
138	990959	Kab. Cianjur	1.847.635.990	1.847.635.990	-
139	991052	Kab. Cirebon	1.847.635.990	1.847.635.990	-
140	991024	Kab. Garut	1.847.635.990	1.847.635.990	-
141	991070	Kab. Indramayu	1.847.635.990	1.847.635.990	-
142	990970	Kab. Karawang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
143	991066	Kab. Kuningan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
144	991087	Kab. Majalengka	1.847.635.990	1.847.635.990	-
145	990984	Kab. Purwakarta	1.847.635.990	1.847.635.990	-
146	990991	Kab. Subang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
147	990942	Kab. Sukabumi	1.847.635.990	1.847.635.990	-
148	991010	Kab. Sumedang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
149	991031	Kab. Tasikmalaya	1.847.635.990	1.847.635.990	-
150	991091	Kota Bandung	1.847.635.990	1.847.635.990	-
151	993330	Kota Bekasi	1.847.635.990	1.847.635.990	-
152	991109	Kota Bogor	1.847.635.990	1.847.635.990	-
153	991120	Kota Cirebon	1.847.635.990	1.847.635.990	-
154	980032	Kota Depok	1.847.635.990	1.847.635.990	-
155	991113	Kota Sukabumi	1.847.635.990	1.847.635.990	-
156	994754	Kota Cimahi	1.847.635.990	1.847.635.990	-
157	994740	Kota Tasikmalaya	1.847.635.990	1.847.635.990	-
158	998126	Kota Banjar	1.847.635.990	1.847.635.990	-
159	990917	Kab. Lebak	1.847.635.990	1.847.635.990	-
160	990900	Kab. Pandeglang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
161	990895	Kab. Serang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
162	990921	Kab. Tangerang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
163	980049	Kota Cilegon	1.847.635.990	1.847.635.990	-
164	991134	Kota Tangerang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
165	991329	Kab. Banjarnegara	1.847.635.990	1.847.635.990	-
166	991290	Kab. Banyumas	1.847.635.990	1.847.635.990	-
167	991202	Kab. Batang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
168	991286	Kab. Blora	1.847.635.990	1.847.635.990	-
169	991396	Kab. Boyolali	1.847.635.990	1.847.635.990	-
170	991223	Kab. Brebes	1.847.635.990	1.847.635.990	-
171	991308	Kab. Cilacap	1.847.635.990	1.847.635.990	-
172	991176	Kab. Demak	1.847.635.990	1.847.635.990	-
173	991180	Kab. Grobogan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
174	991265	Kab. Jepara	1.847.635.990	1.847.635.990	-
175	991422	Kab. Karanganyar	1.847.635.990	1.847.635.990	-
176	991375	Kab. Kebumen	1.847.635.990	1.847.635.990	-
177	991162	Kab. Kendal	1.847.635.990	1.847.635.990	-
178	991382	Kab. Klaten	1.847.635.990	1.847.635.990	-
179	991244	Kab. Kudus	1.847.635.990	1.847.635.962	28
180	991333	Kab. Magelang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
181	991230	Kab. Pati	1.847.635.990	1.847.635.990	-
182	991197	Kab. Pekalongan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
183	991251	Kab. Pemalang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
184	991312	Kab. Purbalingga	1.847.635.990	1.847.635.990	-
185	991361	Kab. Purworejo	1.847.635.990	1.847.635.990	-
186	991272	Kab. Rembang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
187	991155	Kab. Semarang	1.847.635.990	619.868.338	1.227.767.652
188	991401	Kab. Sragen	1.847.635.990	1.847.635.990	-
189	991418	Kab. Sukoharjo	1.847.635.990	1.847.635.990	-
190	991219	Kab. Tegal	1.847.635.990	1.847.635.990	-
191	991340	Kab. Temanggung	1.847.635.990	1.847.635.990	-
192	991439	Kab. Wonogiri	1.847.635.990	1.847.635.912	78
193	991354	Kab. Wonosobo	1.847.635.990	1.847.635.990	-
194	991485	Kota Magelang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
195	991464	Kota Pekalongan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
196	991450	Kota Salatiga	1.847.635.990	1.847.635.990	-
197	991443	Kota Semarang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
198	991492	Kota Surakarta	1.847.635.990	1.847.635.990	-
199	991471	Kota Tegal	1.847.635.990	1.847.635.990	-
200	991511	Kab. Bantul	1.847.635.990	1.847.635.990	-
201	991532	Kab. Gunung Kidul	1.847.635.990	1.847.635.990	-
202	991549	Kab. Kulon Progo	1.847.635.990	1.847.635.990	-
203	991528	Kab. Sleman	1.847.635.990	1.847.635.990	-
204	991553	Kota Yogyakarta	1.847.635.990	1.847.635.990	-

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
205	991642	Kab. Bangkalan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
206	991670	Kab. Banyuwangi	1.847.635.990	1.847.635.990	-
207	991773	Kab. Blitar	1.847.635.990	1.847.635.990	-
208	991837	Kab. Bojonegoro	1.847.635.990	1.847.635.990	-
209	991659	Kab. Bondowoso	1.847.635.990	1.847.635.990	-
210	991574	Kab. Gresik	1.847.635.990	1.847.635.990	-
211	991684	Kab. Jember	1.847.635.990	1.847.635.990	-
212	991600	Kab. Jombang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
213	991731	Kab. Kediri	1.847.635.990	1.847.635.990	-
214	991858	Kab. Lamongan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
215	991727	Kab. Lumajang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
216	991780	Kab. Madiun	1.847.635.990	1.847.635.990	-
217	991802	Kab. Magetan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
218	991691	Kab. Malang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
219	991581	Kab. Mojokerto	1.847.635.990	1.847.635.990	-
220	991752	Kab. Nganjuk	1.847.635.990	1.847.635.990	-
221	991794	Kab. Ngawi	1.847.635.990	1.847.635.990	-
222	991820	Kab. Pacitan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
223	991621	Kab. Pamekasan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
224	991706	Kab. Pasuruan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
225	991816	Kab. Ponorogo	1.847.635.990	1.847.635.990	-
226	991710	Kab. Probolinggo	1.847.635.990	1.847.635.990	-
227	991617	Kab. Sampang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
228	991595	Kab. Sidoarjo	1.847.635.990	1.847.635.990	-
229	991663	Kab. Situbondo	1.870.983.616	1.870.983.616	-
230	991638	Kab. Sumenep	1.847.635.990	1.847.635.990	-
231	991769	Kab. Trenggalek	1.847.635.990	1.847.635.990	-
232	991841	Kab. Tuban	1.847.635.990	1.847.635.990	-
233	991748	Kab. Tulungagung	1.847.635.990	1.847.635.990	-
234	991912	Kota Blitar	1.847.635.990	1.847.635.990	-
235	991926	Kota Kediri	1.847.635.990	1.847.635.990	-
236	991930	Kota Madiun	1.847.635.990	1.847.635.990	-
237	991883	Kota Malang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
238	991879	Kota Mojokerto	1.847.635.990	1.847.635.990	-
239	991890	Kota Pasuruan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
240	991905	Kota Probolinggo	1.847.635.990	1.847.635.990	-
241	991862	Kota Surabaya	1.847.635.990	1.847.635.990	-
242	994761	Kota Batu	1.847.635.990	1.847.635.990	-
243	980227	Kab. Bengkayang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
244	980231	Kab. Landak	1.847.635.990	1.847.635.990	-
245	991993	kab. Kapuas Hulu	1.847.635.990	1.847.635.990	-
246	992008	Kab. Ketapang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
247	991989	Kab. Pontianak	1.847.635.990	1.847.635.990	-
248	991951	Kab. Sambas	1.847.635.990	1.847.635.990	-
249	991968	Kab. Sanggau	1.847.635.990	1.847.635.990	-
250	991972	Kab. Sintang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
251	992012	Kota Pontianak	1.847.635.990	1.847.635.990	-
252	994775	Kota Singkawang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
253	987507	Kab. Sekadau	1.847.635.990	1.847.635.990	-
254	987492	Kab. Melawi	1.847.635.990	1.847.635.990	-
255	992054	Kab. Barito Selatan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
256	992040	Kab. Barito Utara	1.847.635.990	1.847.635.990	-
257	992033	Kab. Kapuas	1.847.635.990	1.847.635.990	-
258	992075	Kab. Kotawaringin Barat	1.847.635.990	1.847.635.990	-
259	992061	Kab. Kotawaringin Timur	1.847.635.990	1.847.635.990	-
260	992082	Kota Palangkaraya	1.847.635.990	1.847.635.990	-
261	997540	Kab. Barito Timur	1.847.635.990	1.847.635.990	-
262	997536	Kab. Murung Raya	1.847.635.990	1.847.635.990	-
263	997522	Kab. Pulang Pisau	1.847.635.990	1.847.635.990	-
264	997515	Kab. Gunung Mas	1.847.635.990	5.984.512	1.841.651.478
265	997501	Kab. Lamandau	1.847.635.990	1.847.635.990	-
266	997493	Kab. Sukamara	1.847.635.990	1.847.635.990	-
267	997472	Kab. Katingan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
268	997489	Kab. Seruyan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
269	992171	Kab. Banjar	1.847.635.990	1.847.635.990	-
270	992228	Kab. Barito Kuala	1.847.635.990	1.847.635.990	-
271	992207	Kab. Hulu Sungai Selatan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
272	992211	Kab. Hulu Sungai Tengah	1.847.635.990	1.847.635.990	-
273	992253	Kab. Hulu Sungai Utara	1.847.635.990	1.847.635.990	-
274	992249	Kab. Kota Baru	1.847.635.990	1.847.635.990	-

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
275	992232	Kab. Tabalong	1.847.635.990	1.847.635.990	-
276	992185	Kab. Tanah Laut	1.847.635.990	1.847.635.990	-
277	992192	Kab. Tapin	1.847.635.990	1.847.635.990	-
278	980248	Kota Banjar Baru	1.847.635.990	1.847.635.990	-
279	992260	Kota Banjarmasin	1.847.635.990	1.847.635.990	-
280	998236	Kab. Balangan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
281	998222	Kab. Tanah Bumbu	1.847.635.990	1.847.635.990	-
282	992139	Kab. Berau	1.847.635.990	1.847.635.990	-
283	992122	Kab. Bulungan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
284	992101	Kab. Kutai Kartanegara	1.847.635.990	1.847.635.990	-
285	980273	Kab. Kutai Barat	1.847.635.990	1.847.635.990	-
286	980280	Kab. Kutai Timur	1.847.635.990	1.847.635.990	-
287	980269	Kab. Malinau	1.847.635.990	1.847.635.990	-
288	980252	Kab. Nunukan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
289	992118	Kab. Pasir	1.847.635.990	1.847.635.990	-
290	992150	Kota Balikpapan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
291	980294	Kota Bontang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
292	992143	Kota Samarinda	1.847.635.990	1.847.635.990	-
293	941901	Kota Tarakan	2.608.105.990	2.608.105.990	-
294	997561	Kab. Penajam Paser Utara	1.847.635.990	1.847.635.990	-
295	993059	Kab. Bolaang Mongondow	1.847.635.990	1.847.635.990	-
296	993042	Kab. Minahasa	1.847.635.990	1.847.635.990	-
297	993063	Kab. Sangihe	1.847.635.990	1.847.635.990	-
298	993091	Kota Bitung	1.847.635.990	1.847.635.990	-
299	993070	Kota Manado	1.847.635.990	1.847.635.990	-
300	997412	Kab. Kepulauan Talaud	1.847.635.990	1.847.635.990	-
301	998240	Kab. Minahasa Selatan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
302	998257	Kota Tomohon	3.050.392.254	3.050.392.254	-
303	987485	Kab. Minahasa Utara	1.847.635.990	1.847.635.990	-
304	980302	Kab. Boalemo	2.524.059.990	2.524.059.990	-
305	993038	Kab. Gorontalo	1.847.635.990	1.847.635.990	-
306	993084	Kota Gorontalo	1.847.635.990	1.847.635.990	-
307	998261	Kab. Pohuwato	1.847.635.990	1.847.635.990	-
308	998278	Kab. Bone Bolango	1.847.635.990	1.847.635.990	-
309	993000	Kab. Banggai	1.847.635.990	1.847.635.990	-
310	980337	Kab. Banggai Kepulauan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
311	980316	Kab. Buol	1.847.635.990	1.847.635.990	-
312	992998	Kab. Toli-Toli	1.847.635.990	1.847.635.990	-
313	992981	Kab. Donggala	1.847.635.990	1.847.635.990	-
314	980320	Kab. Morowali	1.847.635.990	1.847.635.990	-
315	992977	Kab. Poso	1.847.635.990	1.847.635.990	-
316	993017	Kota Palu	1.847.635.990	1.847.635.990	-
317	997582	Kab. Parigi Moutong	1.847.635.990	1.847.635.990	-
318	987471	Kab. Tojo Una Una	1.847.635.990	1.847.635.990	-
319	992846	Kab. Bantaeng	1.847.635.990	1.847.635.990	-
320	992888	Kab. Barru	1.847.635.990	1.847.635.990	-
321	992778	Kab. Bone	1.847.635.990	1.847.635.990	-
322	992832	Kab. Bulukumba	1.847.635.990	1.847.635.990	-
323	992935	Kab. Enrekang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
324	992740	Kab. Gowa	1.847.635.990	1.847.635.990	-
325	992850	Kab. Jeneponto	1.847.635.990	1.847.635.990	-
326	992811	Kab. Luwu	1.847.635.990	1.847.635.990	-
327	980341	Kab. Luwu Utara	1.847.635.990	1.847.635.990	-
328	992799	Kab. Maros	1.847.635.990	1.847.635.990	-
329	992900	Kab. Pangkajene Kepulauan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
330	992736	Kab. Pinrang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
331	992867	Kab. Selayar	1.847.635.990	1.847.635.990	-
332	992892	Kab. Sidenreng Rappang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
333	992825	Kab. Sinjai	1.847.635.990	1.847.635.990	-
334	992914	Kab. Soppeng	1.847.635.990	1.847.635.990	-
335	992871	Kab. Takalar	1.847.635.990	1.847.635.990	-
336	992782	Kab. Tana Toraja	1.847.635.990	1.847.635.990	-
337	992757	Kab. Wajo	1.847.635.990	1.847.635.990	-
338	992956	Kota Pare-Pare	1.847.635.990	1.847.635.990	-
339	992942	Kota Makassar	1.847.635.990	1.847.635.990	-
340	997604	Kota Palopo	1.847.635.990	1.847.635.990	-
341	928282	Kab. Luwu Timur	1.847.635.990	1.847.635.990	-
342	992804	Kab. Majene	1.847.635.990	1.847.635.990	-
343	992761	Kab. Mamuju	1.847.635.990	1.847.635.990	-
344	992921	Kab. Polewali Mandar	1.847.635.990	1.847.635.990	-

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
345	997599	Kab. Mamasa	1.847.635.990	1.847.635.990	-
346	998299	Kab. Mamuju Utara	1.847.635.990	1.847.635.990	-
347	993127	Kab. Buton	1.847.635.990	1.847.635.990	-
348	993110	Kab. Konawe	1.847.635.990	1.847.635.990	-
349	993148	Kab. Kolaka	1.847.635.990	1.847.635.990	-
350	993131	Kab. Muna	1.847.635.990	1.847.635.990	-
351	993326	Kota Kendari	1.847.635.990	1.847.635.990	-
352	994782	Kota Bau-Bau	1.847.635.990	1.847.635.990	-
353	998304	Kab. Konawe Selatan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
354	987642	Kab. Bombana	1.847.635.990	1.847.635.990	-
355	987638	Kab. Wakatobi	1.847.635.990	1.847.635.990	-
356	987443	Kab. Kolaka Utara	1.847.635.990	5.984.512	1.841.651.478
357	992342	Kab. Badung	1.847.635.990	1.847.635.990	-
358	992338	Kab. Bangli	1.847.635.990	1.847.635.990	-
359	992281	Kab. Buleleng	1.847.635.990	1.847.635.990	-
360	992317	Kab. Gianyar	1.847.635.990	1.847.635.990	-
361	992295	Kab. Jembrana	1.847.635.990	1.847.635.990	-
362	992321	Kab. Karangasem	1.847.635.990	1.847.635.990	-
363	992300	Kab. Klungkung	1.847.635.990	1.847.635.990	-
364	992359	Kab. Tabanan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
365	992363	Kota Denpasar	1.847.635.990	1.847.635.990	-
366	992410	Kab. Bima	1.847.635.990	1.847.635.990	-
367	992431	Kab. Dompu	1.847.635.990	1.847.635.990	-
368	992384	Kab. Lombok Barat	1.847.635.990	1.847.635.990	-
369	992391	Kab. Lombok Tengah	1.847.635.990	1.847.635.990	-
370	992406	Kab. Lombok Timur	1.847.635.990	1.847.635.990	-
371	992427	Kab. Sumbawa	1.847.635.990	1.847.635.990	-
372	992448	Kota Mataram	1.847.635.990	1.847.635.990	-
373	997625	Kota Bima	1.847.635.990	1.847.635.990	-
374	987450	Kab. Sumbawa Barat	1.847.635.990	1.847.635.990	-
375	992502	Kab. Alor	1.847.635.990	1.847.635.990	-
376	992473	Kab. Belu	1.847.635.990	1.847.635.990	-
377	992537	Kab. Ende	1.847.635.990	1.847.635.990	-
378	992520	Kab. Flores Timur	1.847.635.990	1.847.635.990	-
379	992469	Kab. Kupang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
380	980379	Kab. Lembata	1.847.635.990	1.847.635.990	-
381	992558	Kab. Manggarai	1.847.635.990	1.847.635.990	-
382	992541	Kab. Ngada	1.847.635.990	1.847.635.990	-
383	992516	Kab. Sikka	1.847.635.990	1.847.635.990	-
384	992579	Kab. Sumba Barat	1.847.635.990	1.847.635.990	-
385	992562	Kab. Sumba Timur	1.847.635.990	1.847.635.990	-
386	992494	Kab. Timor Tengah Selatan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
387	992480	Kab. Timor Tengah Utara	1.847.635.990	1.847.635.990	-
388	993368	Kota Kupang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
389	997578	Kab. Rote Ndao	1.847.635.990	1.847.635.990	-
390	998510	Kab. Manggarai Barat	1.847.635.990	1.847.635.990	-
391	980358	Kab. Maluku Tenggara Barat	1.847.635.990	1.847.635.990	-
392	993169	Kab. Maluku Tengah	1.847.635.990	1.847.635.990	-
393	993173	Kab. Maluku Tenggara	1.847.635.990	1.847.635.990	-
394	980362	Kab. Pulau Buru	1.847.635.990	1.847.635.990	-
395	993202	Kota Ambon	2.213.773.990	2.213.773.990	-
396	987439	Kab. Seram Bagian Barat	1.847.635.990	5.984.512	1.841.651.478
397	987422	Kab. Seram Bagian Timur	1.847.635.990	1.847.635.990	-
398	987621	Kab. Kepulauan Aru	1.847.635.990	1.847.635.990	-
399	993194	Kab. Halmahera Tengah	1.847.635.990	1.847.635.990	-
400	993180	Kab. Halmahera Barat	1.847.635.990	1.847.635.990	-
401	980028	Kota Ternate	1.847.635.990	1.847.635.990	-
402	998346	Kab. Halmahera Timur	1.847.635.990	1.847.635.990	-
403	998350	Kota Tidore Kepulauan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
404	998332	Kab. Kepulauan Sula	1.847.635.990	619.868.338	1.227.767.652
405	998325	Kab. Halmahera Selatan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
406	998311	Kab. Halmahera Utara	1.847.635.990	5.984.512	1.841.651.478
407	993237	Kab. Biak Numfor	1.847.635.990	5.984.512	1.841.651.478
408	993220	Kab. Jayapura	1.847.635.990	1.847.635.990	-
409	993290	Kab. Jayawijaya	1.847.635.990	1.847.635.990	-
410	993283	Kab. Merauke	1.847.635.990	1.847.635.990	-
411	993401	Kab. Mimika	1.847.635.990	1.847.635.990	-
412	993305	Kab. Nabire	2.213.774.942	2.213.774.942	-
413	993393	Kab. Paniai	1.847.635.990	1.847.635.990	-
414	993389	Kab. Puncak Jaya	1.847.635.990	1.847.635.990	-

NO	KODE SATKER	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI	SISA ANGGARAN
415	993258	Kab. Yapen Waropen	1.847.635.990	1.847.635.990	-
416	993312	Kota Jayapura	1.847.635.990	1.847.635.990	-
417	998392	Kab. Sarmi	1.847.635.990	1.847.635.990	-
418	998400	Kab. Keerom	1.847.635.990	1.847.635.990	-
419	998477	Kab. Yahukimo	1.847.635.990	1.847.635.990	-
420	998421	Kab. Pegunungan Bintang	1.847.635.990	1.847.635.990	-
421	998414	Kab. Tolikara	1.847.635.990	1.847.635.990	-
422	998388	Kab. Boven Digoel	1.847.635.990	1.847.635.990	-
423	998367	Kab. Mappi	1.847.635.990	1.847.635.990	-
424	998371	Kab. Asmat	1.847.635.990	1.847.635.990	-
425	998460	Kab. Waropen	1.847.635.990	1.847.635.990	-
426	987511	Kab. Supiori	1.847.635.990	1.847.635.990	-
427	993262	Kab. Sorong	1.847.635.990	1.847.635.990	-
428	993241	Kab. Manokwari	1.847.635.990	1.847.635.990	-
429	993279	Kab. Fak Fak	1.847.635.990	1.847.635.990	-
430	980383	Kota Sorong	1.847.635.990	1.847.635.990	-
431	998442	Kab. Sorong Selatan	1.847.635.990	1.847.635.990	-
432	998456	Kab. Raja Ampat	1.847.635.990	1.847.635.990	-
433	998481	Kab. Teluk Bintuni	1.847.635.990	1.847.635.990	-
434	998498	Kab. Teluk Wondama	1.847.635.990	1.847.635.990	-
435	998435	Kab. Kaimana	1.847.635.990	1.847.635.990	-
JUMLAH			**819.257.797.695**	**805.133.375.590**	**14.124.422.105**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM
(dalam rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0100	Prov. DKI Jakarta	127.105.597.007	127.105.597.007	-	127.105.597.007	-
0199	Instansi Pusat (Rekening Cadanga	1.604.726.104.260	1.604.726.104.260	-	1.604.726.104.260	-
0200	Prov. Jawa Barat	53.567.313.062	53.567.313.062	-	53.567.313.062	-
0205	Kab. Bogor	12.768.184.747	12.768.184.747	-	12.768.184.747	-
0206	Kab. Sukabumi	4.658.841.801	4.658.841.801	-	4.658.841.801	-
0207	Kab. Cianjur	5.486.677.745	6.090.154.127	603.476.382	5.486.677.745	-
0208	Kab. Bekasi	15.340.205.528	15.340.205.528	-	15.340.205.528	-
0209	Kab. Karawang	9.017.942.636	9.017.942.636	-	9.017.942.636	-
0210	Kab. Purwakarta	4.729.723.128	5.333.199.510	603.476.382	4.729.723.128	-
0211	Kab. Subang	4.324.731.259	4.324.731.259	-	4.324.731.259	-
0212	Kab. Bandung	4.518.173.208	4.518.173.208	-	4.518.173.208	-
0213	Kab. Sumedang	4.660.919.220	4.660.919.220	-	4.660.919.220	-
0214	Kab. Garut	4.523.637.305	5.127.113.687	603.476.382	4.523.637.305	-
0215	Kab. Tasikmalaya	4.559.249.923	5.162.726.305	603.476.382	4.559.249.923	-
0216	Kab. Ciamis	4.577.500.040	4.577.500.040	809.843.163	3.767.656.877	809.843.163
0217	Kab. Cirebon	4.517.291.474	4.517.291.474	-	4.517.291.474	-
0218	Kab. Kuningan	4.545.240.151	4.545.240.151	-	4.545.240.151	-
0219	Kab. Indramayu	9.005.541.089	9.005.541.089	-	9.005.541.089	-
0220	Kab. Majalengka	4.403.594.398	4.403.594.398	-	4.403.594.398	-
0251	Kota Bandung	4.516.914.002	5.120.390.384	603.476.382	4.516.914.002	-
0252	Kota Bogor	4.516.914.002	5.120.390.384	603.476.382	4.516.914.002	-
0253	Kota Sukabumi	4.517.573.344	4.517.573.344	-	4.517.573.344	-
0254	Kota Cirebon	4.516.914.002	4.516.914.002	-	4.516.914.002	-
0257	Kota Bekasi	4.436.652.613	5.040.128.995	603.476.382	4.436.652.613	-
0258	Kota Depok	4.516.914.002	5.133.323.330	616.409.328	4.516.914.002	-
0260	Kota Tasikmalaya	4.516.914.002	4.516.914.002	-	4.516.914.002	-
0261	Kota Cimahi	4.516.914.002	4.516.914.002	-	4.516.914.002	-
0262	Kota Banjar	4.512.706.161	4.512.706.161	-	4.512.706.161	-
0300	Prov. Jawa Tengah	6.145.521.637	6.145.521.637	-	6.145.521.637	-
0301	Kab. Semarang	557.491.712	557.491.712	-	557.491.712	-
0302	Kab. Kendal	913.847.986	913.847.986	-	913.847.986	-
0303	Kab. Demak	548.267.418	548.267.418	-	548.267.418	-
0304	Kab. Grobogan	1.109.400.989	1.109.400.989	-	1.109.400.989	-
0305	Kab. Pekalongan	595.312.815	595.312.815	-	595.312.815	-
0306	Kab. Batang	1.094.363.970	1.094.363.970	-	1.094.363.970	-
0307	Kab. Tegal	876.865.027	876.865.027	-	876.865.027	-
0308	Kab. Brebes	923.253.594	923.253.594	-	923.253.594	-
0309	Kab. Pati	627.215.066	627.215.066	-	627.215.066	-
0310	Kab. Kudus	548.055.144	548.055.144	-	548.055.144	-
0311	Kab. Pemalang	998.864.959	998.864.959	-	998.864.959	-
0312	Kab. Jepara	548.387.186	548.387.185	-	548.387.185	1
0313	Kab. Rembang	1.355.195.047	1.677.388.539	322.193.492	1.355.195.047	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0314	Kab. Blora	8.454.746.888	8.454.746.888	-	8.454.746.888	-
0315	Kab. Banyumas	595.562.060	595.562.060	-	595.562.060	-
0316	Kab. Cilacap	621.964.634	621.964.634	-	621.964.634	-
0317	Kab. Purbalingga	571.909.509	571.909.509	-	571.909.509	-
0318	Kab. Banjarnegara	666.564.749	809.110.234	142.545.485	666.564.749	-
0319	Kab. Magelang	550.889.256	550.889.256	-	550.889.256	-
0320	Kab. Temanggung	617.557.778	617.557.778	-	617.557.778	-
0321	Kab. Wonosobo	559.795.547	702.341.032	142.545.485	559.795.547	-
0322	Kab. Purworejo	601.251.819	601.251.819	-	601.251.819	-
0323	Kab. Kebumen	558.974.827	558.974.827	-	558.974.827	-
0324	Kab. Klaten	548.055.144	548.055.144	-	548.055.144	-
0325	Kab. Boyolali	609.202.903	609.202.903	-	609.202.903	-
0326	Kab. Sragen	548.436.592	548.436.592	-	548.436.592	-
0327	Kab. Sukoharjo	548.055.144	548.055.144	-	548.055.144	-
0328	Kab. Karanganyar	550.741.599	550.741.599	-	550.741.599	-
0329	Kab. Wonogiri	554.221.145	554.221.145	-	554.221.145	-
0351	Kota Semarang	549.656.333	692.201.818	142.545.485	549.656.333	-
0352	Kota Salatiga	548.055.144	548.055.144	-	548.055.144	-
0353	Kota Pekalongan	548.055.144	548.055.144	-	548.055.144	-
0354	Kota Tegal	548.055.144	548.055.144	-	548.055.144	-
0355	Kota Magelang	548.055.144	548.055.144	-	548.055.144	-
0356	Kota Surakarta	548.055.144	548.055.144	-	548.055.144	-
0400	Prov. DI Yogyakarta	6.053.212	6.053.212	-	6.053.212	-
0401	Kab. Bantul	188.483.634	188.483.634	-	188.483.634	-
0402	Kab. Sleman	188.180.785	188.180.785	-	188.180.785	-
0403	Kab. Gunung Kidul	190.040.009	190.040.009	-	190.040.009	-
0404	Kab. Kulon Progo	206.513.292	206.513.292	-	206.513.292	-
0451	Kota Yogyakarta	188.180.785	188.180.785	-	188.180.785	-
0500	Prov. Jawa Timur	21.971.861.191	21.971.861.191	-	21.971.861.191	-
0501	Kab. Gresik	1.374.170.289	1.374.170.289	-	1.374.170.289	-
0502	Kab. Mojokerto	1.382.319.928	1.382.319.928	-	1.382.319.928	-
0503	Kab. Sidoarjo	1.311.214.998	1.311.214.998	-	1.311.214.998	-
0504	Kab. Jombang	1.448.287.524	1.448.287.524	-	1.448.287.524	-
0505	Kab. Sampang	1.372.191.060	1.372.191.060	-	1.372.191.060	-
0506	Kab. Pamekasan	1.372.191.060	1.372.191.060	-	1.372.191.060	-
0507	Kab. Sumenep	2.511.829.814	3.978.255.282	1.466.425.468	2.511.829.814	-
0508	Kab. Bangkalan	12.451.591.965	12.451.591.965	-	12.451.591.965	-
0509	Kab. Bondowoso	1.532.618.314	1.532.618.314	-	1.532.618.314	-
0510	Kab. Situbondo	1.442.271.724	1.442.271.724	-	1.442.271.724	-
0511	Kab. Banyuwangi	2.301.370.642	2.628.584.876	327.214.234	2.301.370.642	-
0512	Kab. Jember	1.760.820.868	1.760.820.868	-	1.760.820.868	-
0513	Kab. Malang	1.375.643.363	1.375.643.363	-	1.375.643.363	-
0514	Kab. Pasuruan	1.380.413.150	1.380.413.150	-	1.380.413.150	-
0515	Kab. Probolinggo	1.507.648.503	1.507.648.503	-	1.507.648.503	-
0516	Kab. Lumajang	1.480.681.730	1.480.681.730	-	1.480.681.730	-
0517	Kab. Kediri	1.648.974.356	1.648.974.356	-	1.648.974.356	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0518	Kab. Tulungagung	1.411.856.204	1.411.856.204	-	1.411.856.204	-
0519	Kab. Nganjuk	1.889.939.046	1.889.939.046	-	1.889.939.046	-
0520	Kab. Trenggalek	1.436.070.928	1.762.857.642	326.786.714	1.436.070.928	-
0521	Kab. Blitar	1.524.523.022	1.524.523.022	-	1.524.523.022	-
0522	Kab. Madiun	2.255.275.938	2.255.275.938	-	2.255.275.938	-
0523	Kab. Ngawi	1.540.524.455	1.540.524.455	-	1.540.524.455	-
0524	Kab. Magetan	1.385.640.773	1.385.640.773	-	1.385.640.773	-
0525	Kab. Ponorogo	1.461.068.364	1.461.068.364	-	1.461.068.364	-
0526	Kab. Pacitan	1.413.094.652	1.413.094.652	-	1.413.094.652	-
0527	Kab. Bojonegoro	13.649.284.929	13.649.284.929	-	13.649.284.929	-
0528	Kab. Tuban	12.967.906.850	12.967.906.850	-	12.967.906.850	-
0529	Kab. Lamongan	1.447.771.611	1.447.771.611	-	1.447.771.611	-
0551	Kota Surabaya	1.372.191.060	1.372.191.060	-	1.372.191.060	-
0552	Kota Mojokerto	1.372.191.060	1.372.191.060	-	1.372.191.060	-
0553	Kota Malang	1.372.191.060	1.698.977.774	326.786.714	1.372.191.060	-
0554	Kota Pasuruan	1.372.191.060	1.372.191.060	-	1.372.191.060	-
0555	Kota Probollinggo	1.372.191.060	1.372.191.060	-	1.372.191.060	-
0556	Kota Blitar	1.372.191.060	1.698.977.774	326.786.714	1.372.191.060	-
0557	Kota Kediri	1.372.191.060	1.698.977.774	326.786.714	1.372.191.060	-
0558	Kota Madiun	1.372.191.060	1.372.191.060	-	1.372.191.060	-
0559	Kota Batu	1.398.142.841	1.398.142.841	-	1.398.142.841	-
0600	Prov. Nanggroe Aceh Darussalam	1.582.921.357.640	1.582.921.357.640	-	1.582.921.357.640	-
0601	Kab. Aceh Besar	16.587.602.729	16.587.602.729	-	16.587.602.729	-
0602	Kab. Aceh Pidie	16.597.641.276	20.816.736.119	4.219.094.843	16.597.641.276	-
0603	Kab. Aceh Utara	325.592.302.177	325.592.302.177	-	325.592.302.177	-
0604	Kab. Aceh Timur	17.479.971.369	17.479.971.369	-	17.479.971.369	-
0605	Kab. Aceh Selatan	16.552.634.922	16.552.634.922	-	16.552.634.922	-
0606	Kab. Aceh Barat	16.610.337.516	20.806.262.313	4.195.924.797	16.610.337.516	-
0607	Kab. Aceh Tengah	16.625.468.147	20.764.346.165	4.138.878.018	16.625.468.147	-
0608	Kab. Aceh Tenggara	16.718.918.393	20.917.008.285	4.198.089.892	16.718.918.393	-
0609	Kab. Simeulue	16.564.654.637	16.566.480.919	1.826.282	16.564.654.637	-
0610	Kab. Aceh Singkil	17.192.320.018	21.388.244.815	4.195.924.797	17.192.320.018	-
0611	Kab. Bireun	16.587.410.152	16.587.410.152	-	16.587.410.152	-
0612	Kab. Aceh Barat Daya	19.567.747.046	19.567.747.046	-	19.567.747.046	-
0613	Kab. Gayo Lues	16.552.634.922	20.748.559.719	8.332.743.747	12.415.815.972	4.136.818.950
0614	Kab. Aceh Jaya	10.553.277.882	10.553.277.882	-	10.553.277.882	-
0615	Kab. Nagan Raya	16.566.568.710	16.566.568.710	-	16.566.568.710	-
0616	Kab. Aceh Tamiang	20.145.416.169	20.145.416.169	-	20.145.416.169	-
0617	Kab. Bener Meriah	16.554.998.157	16.554.998.157	-	16.554.998.157	-
0651	Kota Banda Aceh	16.552.634.922	16.552.634.922	-	16.552.634.922	-
0652	Kota Sabang	16.552.634.922	16.552.634.922	-	16.552.634.922	-
0653	Kota Langsa	16.552.634.922	16.552.634.922	-	16.552.634.922	-
0654	Kota Lhokseumawe	16.552.634.922	16.552.634.922	-	16.552.634.922	-
0700	Prov. Sumatera Utara	2.009.926.254	2.023.938.474	14.012.220	2.009.926.254	-
0701	Kab. Deli Serdang	340.948.475	340.948.475	-	340.948.475	-
0702	Kab. Tanah Karo	1.158.209.996	1.159.377.681	1.167.685	1.158.209.996	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0703	Kab. Langkat	1.636.079.904	1.696.353.436	60.273.532	1.636.079.904	-
0704	Kab. Tapanuli Tengah	498.808.864	498.808.864	-	498.808.864	-
0705	Kab. Simalungun	353.619.214	353.619.214	-	353.619.214	-
0706	Kab. Labuhan Batu	567.270.666	649.753.068	82.482.402	567.270.666	-
0707	Kab. Dairi	567.681.039	567.681.039	-	567.681.039	-
0708	Kab. Tapanuli Utara	435.762.499	435.762.499	-	435.762.499	-
0709	Kab. Tapanuli Selatan	2.060.597.940	2.060.597.940	-	2.060.597.940	-
0710	Kab. Asahan	344.625.145	344.625.145	-	344.625.145	-
0711	Kab. Nias	586.401.775	586.401.775	-	586.401.775	-
0712	Kab. Toba Samosir	395.621.368	395.621.368	-	395.621.368	-
0713	Kab. Mandailing Natal	787.446.606	787.446.606	-	787.446.606	-
0714	Kab. Nias Selatan	301.161.189	361.434.721	60.273.532	301.161.189	-
0715	Kab. Pakpak Bharat	303.963.651	303.963.651	-	303.963.651	-
0716	Kab. Humbang Hasundutan	1.502.425.151	1.502.425.151	-	1.502.425.151	-
0717	Kab. Samosir	612.984.694	673.258.226	60.273.532	612.984.694	-
0718	Kab. Serdang Berdagai	301.161.189	301.161.189	-	301.161.189	-
0751	Kota Medan	344.625.145	404.898.677	60.273.532	344.625.145	-
0752	Kota Tebing Tinggi	344.625.145	344.625.145	-	344.625.145	-
0753	Kota Binjai	499.491.679	559.765.211	60.273.532	499.491.679	-
0754	Kota Pematang Siantar	344.625.145	344.625.145	-	344.625.145	-
0755	Kota Tanjung Balai	344.625.145	344.625.145	-	344.625.145	-
0756	Kota Sibolga	344.625.145	404.898.677	60.273.532	344.625.145	-
0757	Kota Padang Sidempuan	401.958.766	462.232.298	60.273.532	401.958.766	-
0800	Prov. Sumatera Barat	2.557.542.019	3.650.699.633	1.093.157.614	2.557.542.019	-
0801	Kab. Agam	403.730.464	403.730.464	-	403.730.464	-
0802	Kab. Pasaman	865.006.972	865.006.972	-	865.006.972	-
0803	Kab. Limapuluh Kota	475.252.933	475.252.933	-	475.252.933	-
0804	Kab. Solok	452.799.784	452.799.784	-	452.799.784	-
0805	Kab. Padang Pariaman	403.003.303	469.418.313	66.415.010	403.003.303	-
0806	Kab. Pesisir Selatan	424.563.191	424.563.191	-	424.563.191	-
0807	Kab. Tanah Datar	405.420.392	405.420.392	-	405.420.392	-
0808	Kab. Sawahlunto Sijunjung	810.475.858	810.475.858	-	810.475.858	-
0809	Kab. Kepulauan Mentawai	5.914.845.225	5.983.315.348	68.470.123	5.914.845.225	-
0810	Kab. Dharmasraya	517.797.661	517.797.661	-	517.797.661	-
0811	Kab. Solok Selatan	1.342.131.095	1.342.131.095	-	1.342.131.095	-
0812	Kab. Pasaman Barat	361.606.733	429.511.850	67.905.117	361.606.733	-
0851	Kota Bukit Tinggi	402.833.517	402.833.517	-	402.833.517	-
0852	Kota Padang Panjang	552.950.385	552.950.385	-	552.950.385	-
0853	Kota Solok	402.884.025	402.884.025	-	402.884.025	-
0854	Kota Sawahlunto	1.914.117.815	1.914.117.815	-	1.914.117.815	-
0855	Kota Padang	402.908.184	402.908.184	-	402.908.184	-
0856	Kota Payakumbuh	402.833.517	402.833.517	-	402.833.517	-
0857	Kota Pariaman	384.124.037	384.124.037	-	384.124.037	-
0900	Prov. Riau	1.464.918.789.600	1.464.918.789.600	-	1.464.918.789.600	-
0901	Kab. Kampar	624.310.311.675	624.310.311.675	-	624.310.311.675	-
0902	Kab. Bengkalis	1.336.484.741.502	1.336.484.741.502	-	1.336.484.741.502	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0904	Kab. Indragiri Hulu	309.943.898.126	309.943.898.126	-	309.943.898.126	-
0905	Kab. Indragiri Hilir	299.210.526.556	299.210.526.556	-	299.210.526.556	-
0906	Kab. Pelalawan	319.377.299.562	319.377.299.562	-	319.377.299.562	-
0907	Kab. Rokan Hulu	308.956.543.901	308.956.543.901	-	308.956.543.901	-
0908	Kab. Rokan Hilir	895.747.301.824	895.747.301.824	-	895.747.301.824	-
0909	Kab. Siak	924.544.506.658	924.544.506.658	-	924.544.506.658	-
0912	Kab. Kuantan Singingi	295.359.006.600	295.359.006.600	-	295.359.006.600	-
0951	Kota Pekanbaru	293.083.283.097	293.083.283.097	-	293.083.283.097	-
0953	Kota Dumai	294.693.627.363	294.693.627.363	-	294.693.627.363	-
1000	Prov. Jambi	123.226.461.395	123.226.461.395	-	123.226.461.395	-
1001	Kab. Batanghari	43.375.363.706	49.858.323.703	6.482.959.994	43.375.363.709	(3)
1002	Kab. Tanjung Jabung Barat	162.936.199.954	162.936.199.954	-	162.936.199.954	-
1003	Kab. Bungo	29.906.558.180	29.906.558.180	-	29.906.558.180	-
1004	Kab. Sarolangun	29.449.916.696	36.451.818.313	7.001.901.617	29.449.916.696	-
1005	Kab. Kerinci	27.481.016.398	34.816.660.223	7.335.643.825	27.481.016.398	-
1006	Kab. Merangin	28.360.610.035	28.360.610.035	-	28.360.610.035	-
1007	Kab. Tanjung Jabung Timur	108.024.360.152	108.024.360.152	-	108.024.360.152	-
1008	Kab. Tebo	28.060.860.663	28.060.860.663	-	28.060.860.663	-
1009	Kab. Muaro Jambi	28.914.511.484	28.914.511.484	-	28.914.511.484	-
1051	Kota Jambi	27.400.416.608	27.400.416.608	-	27.400.416.608	-
1100	Prov. Sumatera Selatan	452.493.262.031	452.493.262.031	-	452.493.262.031	-
1103	Kab. Musi Banyuasin	770.447.460.992	770.447.460.989	-	770.447.460.989	3
1104	Kab. Ogan Komering Ulu	81.775.121.269	81.775.121.269	-	81.775.121.269	-
1105	Kab. Muara Enim	126.055.349.907	126.055.349.907	-	126.055.349.907	-
1106	Kab. Lahat	91.465.813.551	91.465.813.551	-	91.465.813.551	-
1107	Kab. Musi Rawas	101.048.832.392	101.048.832.392	-	101.048.832.392	-
1108	Kab. Ogan Komering Ilir	69.710.348.418	69.710.348.418	-	69.710.348.418	-
1109	Kab. Banyuasin	85.012.215.869	85.012.215.869	-	85.012.215.869	-
1110	Kab. OKU Timur	69.679.114.845	69.679.114.845	-	69.679.114.845	-
1111	Kab. OKU Selatan	69.652.820.855	69.652.820.855	-	69.652.820.855	-
1112	Kab. Ogan Ilir	69.850.687.885	69.850.687.885	-	69.850.687.885	-
1151	Kota Palembang	69.711.869.334	69.711.869.334	-	69.711.869.334	-
1153	Kota Prabumulih	69.747.178.960	69.747.178.960	-	69.747.178.960	-
1154	Kota Pagar Alam	69.710.348.418	69.710.348.418	-	69.710.348.418	-
1155	Kota Lubuk Linggau	69.710.348.418	69.710.348.418	-	69.710.348.418	-
1200	Prov. Lampung	82.847.515.510	103.033.084.329	20.185.568.819	82.847.515.510	-
1201	Kab. Lampung Selatan	17.151.858.914	21.343.939.137	4.192.080.223	17.151.858.914	-
1202	Kab. Lampung Tengah	17.136.517.233	21.328.597.456	4.192.080.223	17.136.517.233	-
1203	Kab. Lampung Utara	17.136.517.233	17.136.517.233	-	17.136.517.233	-
1204	Kab. Lampung Barat	17.195.418.228	17.195.418.228	-	17.195.418.228	-
1205	Kab. Tulang Bawang	17.411.740.688	17.411.740.688	-	17.411.740.688	-
1206	Kab. Tanggamus	17.407.586.976	17.407.586.976	-	17.407.586.976	-
1207	Kab. Lampung Timur	48.490.502.189	48.490.502.189	-	48.490.502.189	-
1208	Kab. Way Kanan	17.218.824.864	17.218.824.864	-	17.218.824.864	-
1251	Kota Bandar Lampung	17.136.517.233	17.136.517.233	-	17.136.517.233	-
1252	Kota Metro	17.136.517.233	17.136.517.233	-	17.136.517.233	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
1300	Prov. Kalimantan Barat	8.604.025.949	8.604.025.949	-	8.604.025.949	-
1301	Kab. Sambas	1.592.620.657	1.766.276.668	173.656.011	1.592.620.657	-
1302	Kab. Sanggau	1.933.819.545	1.933.819.545	-	1.933.819.545	-
1303	Kab. Sintang	9.266.824.239	9.266.824.239	-	9.266.824.239	-
1304	Kab. Pontianak	1.839.713.036	1.839.713.036	-	1.839.713.036	-
1305	Kab. Kapuas Hulu	4.172.406.996	4.172.406.996	-	4.172.406.996	-
1306	Kab. Ketapang	17.548.572.277	17.548.572.277	-	17.548.572.277	-
1307	Kab. Bengkayang	1.544.145.012	1.544.145.012	-	1.544.145.012	-
1308	Kab. Landak	1.606.667.031	1.606.667.031	-	1.606.667.031	-
1309	Kab. Melawi	2.214.361.877	2.214.361.877	-	2.214.361.877	-
1310	Kab. Sekadau	1.192.919.611	1.366.498.822	173.579.211	1.192.919.611	-
1351	Kota Pontianak	1.541.991.674	1.541.991.674	-	1.541.991.674	-
1352	Kota Singkawang	1.541.991.674	1.541.991.674	-	1.541.991.674	-
1400	Prov. Kalimantan Tengah	34.660.248.185	34.660.248.185	-	34.660.248.185	-
1401	Kab. Kapuas	12.347.279.462	12.347.279.462	-	12.347.279.462	-
1402	Kab. Barito Utara	23.138.318.377	23.138.318.377	-	23.138.318.377	-
1403	Kab. Barito Selatan	6.326.930.834	6.326.930.834	-	6.326.930.834	-
1404	Kab. Kotawaringin Timur	34.661.021.714	51.220.312.794	16.559.291.080	34.661.021.714	-
1405	Kab. Kotawaringin Barat	14.643.232.843	14.643.232.843	-	14.643.232.843	-
1406	Kab. Katingan	49.554.379.135	49.554.379.135	-	49.554.379.135	-
1407	Kab. Seruyan	33.143.095.163	33.143.095.163	-	33.143.095.163	-
1408	Kab. Sukamara	5.032.137.642	5.032.137.642	-	5.032.137.642	-
1409	Kab. Lamandau	9.005.935.609	9.582.762.794	576.827.185	9.005.935.609	-
1410	Kab. Gunung Mas	6.046.110.905	6.046.110.905	-	6.046.110.905	-
1411	Kab. Pulang Pisau	5.032.267.261	5.032.267.261	-	5.032.267.261	-
1412	Kab. Murung Raya	38.024.723.271	38.024.723.271	-	38.024.723.271	-
1413	Kab. Barito Timur	5.084.698.188	5.084.698.188	-	5.084.698.188	-
1451	Kota Palangkaraya	5.057.403.857	5.057.403.857	-	5.057.403.857	-
1500	Prov. Kalimantan Selatan	89.475.734.296	89.475.734.296	-	89.475.734.296	-
1501	Kab. Banjar	31.415.377.401	35.592.380.814	4.177.003.413	31.415.377.401	-
1502	Kab. Tanah Laut	37.585.348.517	37.585.348.517	-	37.585.348.517	-
1503	Kab. Tapin	19.841.592.663	19.841.592.663	-	19.841.592.663	-
1504	Kab. Hulu Sungai Selatan	15.577.657.840	15.577.657.840	-	15.577.657.840	-
1505	Kab. Hulu Sungai Tengah	14.929.104.956	14.988.210.803	59.105.847	14.929.104.956	-
1506	Kab. Barito Kuala	15.086.573.448	15.086.573.448	-	15.086.573.448	-
1507	Kab. Tabalong	48.980.106.922	48.980.106.922	-	48.980.106.922	-
1508	Kab. Kota Baru	49.360.733.984	49.360.733.984	-	49.360.733.984	-
1509	Kab. Hulu Sungai Utara	16.251.260.622	16.251.260.622	-	16.251.260.622	-
1510	Kab. Tanah Bumbu	38.722.548.283	38.722.548.283	-	38.722.548.283	-
1511	Kab. Balangan	45.432.225.903	45.432.225.903	-	45.432.225.903	-
1551	Kota Banjarmasin	14.896.494.841	14.896.494.841	-	14.896.494.841	-
1552	Kota Banjar Baru	15.605.174.542	15.605.174.542	-	15.605.174.542	-
1600	Prov. Kalimantan Timur	2.238.037.640.824	2.238.037.640.824	-	2.238.037.640.824	-
1601	Kab. Kutai Kartanegara	1.963.090.785.142	1.963.090.785.142	-	1.963.090.785.142	-
1602	Kab. Pasir	412.952.948.935	412.952.948.935	-	412.952.948.935	-
1603	Kab. Bulungan	393.185.631.004	393.185.631.004	-	393.185.631.004	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
1604	Kab. Berau	419.561.809.377	419.561.809.377	-	419.561.809.377	-
1605	Kab. Nunukan	379.799.379.426	379.799.379.426	-	379.799.379.426	-
1606	Kab. Malinau	378.720.908.861	378.720.908.861	-	378.720.908.861	-
1607	Kab. Kutai Barat	463.112.448.234	463.112.448.234	-	463.112.448.234	-
1608	Kab. Kutai Timur	718.172.663.173	718.172.663.173	-	718.172.663.173	-
1609	Kab. Penajam Paser Utara	373.438.012.707	373.438.012.707	-	373.438.012.707	-
1651	Kota Samarinda	376.117.948.872	376.117.948.872	-	376.117.948.872	-
1652	Kota Balikpapan	358.677.323.904	358.677.323.904	-	358.677.323.904	-
1653	Kota Tarakan	369.050.301.577	369.050.301.577	-	369.050.301.577	-
1654	Kota Bontang	366.142.308.987	366.142.308.987	-	366.142.308.987	-
1700	Prov. Sulawesi Utara	1.089.595.045	1.092.510.159	2.915.114	1.089.595.045	-
1702	Kab. Minahasa	387.769.523	447.604.148	59.834.625	387.769.523	-
1703	Kab. Bolaang Mongondow	3.474.315.471	3.539.251.548	64.936.077	3.474.315.471	-
1704	Kab. Sangihe	387.769.523	447.604.148	59.834.625	387.769.523	-
1705	Kab. Kepulauan Talaud	387.769.523	387.769.523	-	387.769.523	-
1706	Kab. Minahasa Selatan	425.504.645	485.339.270	59.834.625	425.504.645	-
1707	Kota Tomohon	387.176.094	387.176.094	-	387.176.094	-
1708	Kab. Minahasa Utara	430.250.068	490.084.693	59.834.625	430.250.068	-
1751	Kota Manado	388.353.867	448.188.492	59.834.625	388.353.867	-
1753	Kota Bitung	394.481.986	394.481.986	-	394.481.986	-
1800	Prov. Sulawesi Tengah	2.624.299.262	2.624.299.262	-	2.624.299.262	-
1801	Kab. Poso	686.601.222	686.601.222	-	686.601.222	-
1802	Kab. Donggala	880.998.866	1.133.004.211	252.005.345	880.998.866	-
1803	Kab. Toli-Toli	3.579.644.848	3.579.644.848	-	3.579.644.848	-
1804	Kab. Banggai	2.704.538.397	2.951.521.963	246.983.566	2.704.538.397	-
1805	Kab. Buol	861.343.419	861.343.419	-	861.343.419	-
1806	Kab. Morowali	5.018.764.557	6.619.608.599	1.600.844.042	5.018.764.557	-
1807	Kab. Banggai Kepulauan	572.653.422	810.249.894	237.596.472	572.653.422	-
1808	Kab. Parigi Moutong	1.025.063.730	1.025.063.730	-	1.025.063.730	-
1809	Kab. Tojo Una Una	709.046.759	709.046.759	-	709.046.759	-
1851	Kota Palu	610.779.917	610.779.917	-	610.779.917	-
1900	Prov. Sulawesi Selatan	41.274.600.696	41.281.588.575	6.987.879	41.274.600.696	-
1901	Kab. Pinrang	3.915.289.090	3.915.289.090	-	3.915.289.090	-
1902	Kab. G o w a	3.934.185.743	3.993.508.558	59.322.815	3.934.185.743	-
1903	Kab. Wajo	3.905.134.136	3.905.134.136	-	3.905.134.136	-
1905	Kab. Bone	3.902.371.541	3.902.371.541	-	3.902.371.541	-
1906	Kab. Tana Toraja	3.902.933.556	3.902.933.556	-	3.902.933.556	-
1907	Kab. M a r o s	3.902.443.005	3.961.765.820	59.322.815	3.902.443.005	-
1909	Kab. Luwu	4.013.567.122	4.013.567.122	-	4.013.567.122	-
1910	Kab. Sinjai	3.902.041.185	3.961.364.000	59.322.815	3.902.041.185	-
1911	Kab. Bulukumba	3.902.041.185	3.961.364.000	59.322.815	3.902.041.185	-
1912	Kab. Bantaeng	3.902.041.185	3.961.364.000	59.322.815	3.902.041.185	-
1913	Kab. Jeneponto	3.902.448.801	3.961.771.616	59.322.815	3.902.448.801	-
1914	Kab. Selayar	3.916.343.653	3.916.343.653	-	3.916.343.653	-
1915	Kab. Takalar	3.902.232.935	3.961.555.750	59.322.815	3.902.232.935	-
1916	Kab. Barru	3.908.855.952	3.968.178.767	59.322.815	3.908.855.952	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
1917	Kab. Sidenreng Rappang	3.959.675.717	3.959.675.717	-	3.959.675.717	-
1918	Kab. Pangkajene Kepulauan	3.902.041.185	3.902.041.185	-	3.902.041.185	-
1919	Kab. Soppeng	3.905.481.228	4.050.985.207	145.503.979	3.905.481.228	-
1921	Kab. Enrekang	3.915.643.804	3.974.966.619	59.322.815	3.915.643.804	-
1922	Kab. Luwu Utara	4.999.765.174	4.999.765.174	-	4.999.765.174	-
1924	Kab. Luwu Timur	80.839.920.022	80.839.920.022	-	80.839.920.022	-
1951	Kota Makassar	3.902.041.185	3.902.041.185	-	3.902.041.185	-
1952	Kota Pare-pare	3.902.431.779	3.902.431.779	-	3.902.431.779	-
1953	Kota Palopo	3.902.041.185	3.902.041.185	-	3.902.041.185	-
2000	Prov. Sulawesi Tenggara	18.856.437.862	18.856.437.862	-	18.856.437.862	-
2001	Kab. Konawe	6.317.595.939	6.317.595.939	-	6.317.595.939	-
2002	Kab. Buton	4.768.818.057	4.768.818.057	-	4.768.818.057	-
2003	Kab. Muna	4.445.178.115	4.445.178.115	-	4.445.178.115	-
2004	Kab. Kolaka	37.095.854.785	37.095.854.785	-	37.095.854.785	-
2005	Kab. Konawe Selatan	4.358.887.522	4.358.887.522	-	4.358.887.522	-
2006	Kab. Wakatobi	4.283.153.016	4.283.153.016	-	4.283.153.016	-
2007	Kab. Bombana	4.297.784.535	4.297.784.535	-	4.297.784.535	-
2008	Kab. Kolaka Utara	4.348.579.778	4.908.523.028	559.943.250	4.348.579.778	-
2051	Kota Kendari	4.355.611.017	4.355.611.017	-	4.355.611.017	-
2052	Kota Bau-bau	4.355.611.017	4.355.611.017	-	4.355.611.017	-
2100	Prov. Maluku	1.752.848.117	1.752.848.117	-	1.752.848.117	-
2101	Kab. Maluku Tengah	1.611.697.801	1.611.697.801	-	1.611.697.801	-
2102	Kab. Maluku Tenggara	647.321.305	773.269.140	125.947.835	647.321.305	-
2103	Kab. Maluku Tenggara Barat	675.416.592	675.416.592	-	675.416.592	-
2104	Kab. Pulau Buru	11.127.863.000	11.127.863.000	-	11.127.863.000	-
2105	Kab. Kepulauan Aru	828.687.292	954.273.125	125.585.833	828.687.292	-
2106	Kab. Seram Bagian Barat	845.351.496	996.360.323	151.008.827	845.351.496	-
2107	Kab. Seram Bagian Timur	1.406.077.380	1.406.077.380	-	1.406.077.380	-
2151	Kota Ambon	645.496.592	771.082.425	125.585.833	645.496.592	-
2200	Prov. Bali	-	-	-	-	-
2201	Kab. Buleleng	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2202	Kab. Jembrana	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2203	Kab. Klungkung	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2204	Kab. Gianyar	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2205	Kab. Karangasem	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2206	Kab. Bangli	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2207	Kab. Badung	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2208	Kab. Tabanan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2251	Kota Denpasar	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2300	Prov. Nusa Tenggara Barat	29.352.426.181	29.354.890.648	2.464.467	29.352.426.181	-
2301	Kab. Lombok Barat	7.447.420.736	7.447.420.736	-	7.447.420.736	-
2302	Kab. Lombok Tengah	7.428.774.529	7.428.774.529	-	7.428.774.529	-
2303	Kab. Lombok Timur	7.428.774.529	7.428.774.529	-	7.428.774.529	-
2304	Kab. Bima	8.137.467.639	8.196.573.486	59.105.847	8.137.467.639	-
2305	Kab. Sumbawa	8.086.383.969	8.150.788.989	64.405.020	8.086.383.969	-
2306	Kab. Dompu	7.444.239.187	7.513.202.903	68.963.716	7.444.239.187	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
2307	Kab. Sumbawa Barat	58.918.241.685	58.918.241.685	-	58.918.241.685	-
2351	Kota Mataram	7.428.774.529	7.487.880.376	59.105.847	7.428.774.529	-
2352	Kota Bima	7.428.774.529	7.428.774.529	-	7.428.774.529	-
2400	Prov. Nusa Tenggara Timur	8.119.481	8.119.481	-	8.119.481	-
2401	Kab. Kupang	188.306.875	188.306.875	-	188.306.875	-
2402	Kab. Belu	188.306.875	188.306.875	-	188.306.875	-
2403	Kab. Timor Tengah Utara	188.306.875	188.306.875	-	188.306.875	-
2404	Kab. Timor Tengah Selatan	188.306.875	188.306.875	-	188.306.875	-
2405	Kab. Alor	188.306.875	247.536.327	59.229.452	188.306.875	-
2406	Kab. Sikka	188.681.373	248.044.444	59.363.071	188.681.373	-
2407	Kab. Flores Timur	188.306.875	188.306.875	-	188.306.875	-
2408	Kab. Ende	188.306.875	247.536.327	59.229.452	188.306.875	-
2409	Kab. Ngada	188.306.875	188.306.875	-	188.306.875	-
2410	Kab. Manggarai	194.692.447	194.692.447	-	194.692.447	-
2411	Kab. Sumba Timur	188.306.875	247.536.327	59.229.452	188.306.875	-
2412	Kab. Sumba Barat	198.467.384	198.590.989	123.605	198.467.384	-
2413	Kab. Lembata	188.323.362	188.323.362	-	188.323.362	-
2414	Kab. Rote Ndao	188.306.875	247.536.327	59.229.452	188.306.875	-
2415	Kab. Manggarai Barat	188.306.875	247.536.327	59.229.452	188.306.875	-
2451	Kota Kupang	189.931.812	249.161.264	59.229.452	189.931.812	-
2500	Prov. Papua	246.287.658.869	246.351.453.835	63.794.966	246.287.658.869	-
2501	Kab. Jayapura	27.956.821.832	27.956.821.832	-	27.956.821.832	-
2502	Kab. Biak Numfor	26.109.924.939	26.175.746.046	65.821.107	26.109.924.939	-
2504	Kab. Yapen Waropen	26.163.705.450	26.163.705.450	-	26.163.705.450	-
2507	Kab. Merauke	27.261.456.654	27.261.456.654	-	27.261.456.654	-
2508	Kab. Jayawijaya	26.133.852.338	26.133.852.338	-	26.133.852.338	-
2509	Kab. Paniai	26.689.337.983	26.755.159.090	65.821.107	26.689.337.983	-
2510	Kab. Nabire	27.202.546.270	27.202.546.270	-	27.202.546.270	-
2511	Kab. Puncak Jaya	26.205.157.113	26.270.978.220	65.821.107	26.205.157.113	-
2512	Kab. Mimika	484.377.296.866	484.739.535.687	362.238.821	484.377.296.866	-
2513	Kab. Mappi	25.811.481.334	25.811.481.334	-	25.811.481.334	-
2514	Kab. Asmat	26.124.359.552	26.190.180.659	65.821.107	26.124.359.552	-
2515	Kab. Boven Digoel	38.241.309.684	38.241.309.684	-	38.241.309.684	-
2516	Kab. Sarmi	33.754.037.907	33.754.037.907	-	33.754.037.907	-
2517	Kab. Keerom	27.213.527.231	27.213.527.231	-	27.213.527.231	-
2518	Kab. Tolikara	25.971.977.565	25.971.977.565	-	25.971.977.565	-
2519	Kab. Pegunungan Bintang	25.877.419.101	25.877.419.101	-	25.877.419.101	-
2523	Kab. Waropen	26.007.253.585	26.007.253.585	-	26.007.253.585	-
2524	Kab. Yahukimo	25.811.419.308	25.877.240.415	65.821.107	25.811.419.308	-
2525	Kab. Supiori	25.811.419.308	25.811.419.308	-	25.811.419.308	-
2551	Kota Jayapura	26.098.142.484	26.163.963.591	65.821.107	26.098.142.484	-
2600	Prov. Bengkulu	590.118.738	590.118.738	-	590.118.738	-
2601	Kab. Bengkulu Utara	1.242.241.596	1.242.241.596	-	1.242.241.596	-
2602	Kab. Bengkulu Selatan	321.334.174	321.334.174	-	321.334.174	-
2603	Kab. Rejang Lebong	327.170.665	327.170.665	-	327.170.665	-
2604	Kab. Seluma	547.411.756	547.411.756	-	547.411.756	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
2605	Kab. Kaur	324.979.578	324.979.578	-	324.979.578	-
2606	Kab. Mukomuko	309.004.021	309.004.021	-	309.004.021	-
2607	Kab. Lebong	337.167.774	337.167.774	-	337.167.774	-
2608	Kab. Kepahiang	321.334.174	411.347.342	90.013.168	321.334.174	-
2651	Kota Bengkulu	321.334.174	321.334.174	-	321.334.174	-
2800	Prov. Maluku Utara	39.736.915.815	44.317.436.203	4.580.520.388	39.736.915.815	-
2801	Kab. Halmahera Barat	12.744.839.675	14.127.983.144	1.383.143.469	12.744.839.675	-
2802	Kab. Halmahera Tengah	17.646.887.882	17.646.887.882	-	17.646.887.882	-
2803	Kab. Halmahera Utara	24.208.050.791	34.359.435.714	10.151.384.923	24.208.050.791	-
2804	Kab. Halmahera Selatan	28.158.749.148	29.693.380.979	1.534.631.831	28.158.749.148	-
2805	Kab. Kepulauan Sula	15.218.590.922	15.218.590.922	-	15.218.590.922	-
2806	Kab. Halmahera Timur	67.706.106.273	67.706.106.273	-	67.706.106.273	-
2851	Kota Ternate	11.449.000.472	11.449.000.472	-	11.449.000.472	-
2852	Kota Tidore Kepulauan	11.734.604.697	13.101.741.237	1.367.136.540	11.734.604.697	-
2900	Prov. Banten	540.837.021	544.680.384	3.843.363	540.837.021	-
2901	Kab. Serang	415.404.711	415.404.711	-	415.404.711	-
2902	Kab. Pandeglang	1.030.355.684	1.030.355.684	-	1.030.355.684	-
2903	Kab. Lebak	650.627.076	650.627.076	-	650.627.076	-
2904	Kab. Tangerang	397.125.026	397.125.026	-	397.125.026	-
2951	Kota Tangerang	396.432.382	396.432.382	-	396.432.382	-
2952	Kota Cilegon	398.025.982	398.025.982	-	398.025.982	-
3000	Prov. Bangka Belitung	42.198.392.106	42.198.392.106	-	42.198.392.106	-
3001	Kab. Belitung	19.971.332.590	19.971.332.590	-	19.971.332.590	-
3002	Kab. Bangka	25.748.576.908	25.748.576.908	-	25.748.576.908	-
3003	Kab. Bangka Barat	19.006.158.093	19.006.158.093	-	19.006.158.093	-
3004	Kab. Bangka Tengah	26.445.351.089	26.445.351.089	-	26.445.351.089	-
3005	Kab. Bangka Selatan	24.212.360.157	24.212.360.157	-	24.212.360.157	-
3006	Kab. Belitung Timur	18.225.495.491	18.225.495.490	-	18.225.495.490	1
3051	Kota Pangkal Pinang	15.172.603.065	15.172.603.065	-	15.172.603.065	-
3100	Prov. Gorontalo	139.730.224	139.730.224	-	139.730.224	-
3101	Kab. Gorontalo	313.590.693	376.914.292	63.323.599	313.590.693	-
3102	Kab. Boalemo	346.970.788	346.970.788	-	346.970.788	-
3103	Kab. Pohuwato	752.793.405	752.793.405	-	752.793.405	-
3104	Kab. Bone Bolango	239.348.363	239.348.363	-	239.348.363	-
3151	Kota Gorontalo	281.746.561	281.746.561	-	281.746.561	-
3200	Prov. Kepulauan Riau	167.389.343.849	167.389.343.849	-	167.389.343.849	-
3201	Kab. Bintan	66.782.331.010	66.782.331.010	-	66.782.331.010	-
3202	Kab. Karimun	68.492.957.160	68.492.957.160	-	68.492.957.160	-
3203	Kab. Natuna	254.543.909.472	254.543.909.472	-	254.543.909.472	-
3204	Kab. Lingga	64.700.330.161	69.921.037.099	5.220.706.938	64.700.330.161	-
3251	Kota Batam	64.230.670.084	64.230.670.084	-	64.230.670.084	-
3252	Kota Tanjung Pinang	64.186.209.178	64.186.209.178	-	64.186.209.178	-
3300	Prov. Irian Jaya Barat	15.418.861.023	17.016.348.530	1.597.487.507	15.418.861.023	-
3301	Kab. Manokwari	5.653.073.866	5.653.073.866	-	5.653.073.866	-
3302	Kab. Sorong	12.785.791.173	12.785.791.173	-	12.785.791.173	-
3303	Kab. Fak Fak	5.785.342.061	5.785.342.061	-	5.785.342.061	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
3304	Kab. Sorong Selatan	4.104.459.155	4.372.581.722	268.122.567	4.104.459.155	-
3305	Kab. Raja Ampat	19.992.411.551	19.992.411.551	-	19.992.411.551	-
3306	Kab. Teluk Bintuni	12.951.708.263	13.205.360.867	253.652.604	12.951.708.263	-
3307	Kab. Teluk Wondama	5.102.339.371	5.370.461.938	268.122.567	5.102.339.371	-
3308	Kab. Kaimana	13.386.815.474	13.386.815.474	-	13.386.815.474	-
3351	Kota Sorong	4.195.871.446	4.195.871.446	-	4.195.871.446	-
3400	Prov. Sulawesi Barat	175.547.026	175.547.026	-	175.547.026	-
3401	Kab. Majene	359.148.044	359.148.044	-	359.148.044	-
3402	Kab. Mamuju	2.077.296.360	2.077.296.360	-	2.077.296.360	-
3403	Kab. Mamuju Utara	515.639.583	515.639.583	-	515.639.583	-
3404	Kab. Polewali Mandar	363.930.238	363.930.238	-	363.930.238	-
3405	Kab. Mamasa	357.951.765	426.030.076	68.078.311	357.951.765	-
TOTAL		**27.956.884.665.519**	**28.096.643.188.335**	**144.705.184.931**	**27.951.938.003.404**	**4.946.662.115**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM MINYAK BUMI
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0100	Prov. DKI Jakarta	114.543.462.590	114.543.462.590	-	114.543.462.590	-
0199	Instansi Pusat (Rekening Cadangan 2007)	-	-	-	-	-
0200	Prov. Jawa Barat	45.915.565.487	45.915.565.487	-	45.915.565.487	-
0205	Kab. Bogor	3.706.697.354	3.706.697.354	-	3.706.697.354	-
0206	Kab. Sukabumi	3.706.697.354	3.706.697.354	-	3.706.697.354	-
0207	Kab. Cianjur	3.706.697.354	4.147.750.502	441.053.148	3.706.697.354	-
0208	Kab. Bekasi	14.590.011.359	14.590.011.359	-	14.590.011.359	-
0209	Kab. Karawang	7.708.465.952	7.708.465.952	-	7.708.465.952	-
0210	Kab. Purwakarta	3.706.697.354	4.147.750.502	441.053.148	3.706.697.354	-
0211	Kab. Subang	3.703.121.562	3.703.121.562	-	3.703.121.562	-
0212	Kab. Bandung	3.706.697.353	3.706.697.353	-	3.706.697.353	-
0213	Kab. Sumedang	3.706.697.354	3.706.697.354	-	3.706.697.354	-
0214	Kab. Garut	3.706.697.354	4.147.750.502	441.053.148	3.706.697.354	-
0215	Kab. Tasikmalaya	3.706.697.354	4.147.750.502	441.053.148	3.706.697.354	-
0216	Kab. Ciamis	3.706.697.354	3.706.697.354	809.843.163	2.896.854.191	809.843.163
0217	Kab. Cirebon	3.706.697.354	3.706.697.354	-	3.706.697.354	-
0218	Kab. Kuningan	3.706.697.354	3.706.697.354	-	3.706.697.354	-
0219	Kab. Indramayu	8.149.919.232	8.149.919.232	-	8.149.919.232	-
0220	Kab. Majalengka	3.610.444.522	3.610.444.522	-	3.610.444.522	-
0251	Kota Bandung	3.706.697.354	4.147.750.502	441.053.148	3.706.697.354	-
0252	Kota Bogor	3.706.697.354	4.147.750.502	441.053.148	3.706.697.354	-
0253	Kota Sukabumi	3.706.697.354	3.706.697.354	-	3.706.697.354	-
0254	Kota Cirebon	3.706.697.354	3.706.697.354	-	3.706.697.354	-
0257	Kota Bekasi	3.706.697.354	4.147.750.502	441.053.148	3.706.697.354	-
0258	Kota Depok	3.706.697.354	4.147.750.502	441.053.148	3.706.697.354	-
0260	Kota Tasikmalaya	3.706.697.354	3.706.697.354	-	3.706.697.354	-
0261	Kota Cimahi	3.706.697.354	3.706.697.354	-	3.706.697.354	-
0262	Kota Banjar	3.706.697.354	3.706.697.354	-	3.706.697.354	-
0300	Prov. Jawa Tengah	1.722.997.455	1.722.997.455	-	1.722.997.455	-
0301	Kab. Semarang	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0302	Kab. Kendal	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0303	Kab. Demak	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0304	Kab. Grobogan	100.161.514	100.161.514	-	100.161.514	-
0305	Kab. Pekalongan	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0306	Kab. Batang	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0307	Kab. Tegal	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0308	Kab. Brebes	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0309	Kab. Pati	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0310	Kab. Kudus	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0311	Kab. Pemalang	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0312	Kab. Jepara	101.411.512	101.411.511	-	101.411.511	1
0313	Kab. Rembang	101.411.511	175.831.028	74.419.517	101.411.511	-
0314	Kab. Blora	3.447.244.896	3.447.244.896	-	3.447.244.896	-
0315	Kab. Banyumas	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0316	Kab. Cilacap	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0317	Kab. Purbalingga	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0318	Kab. Banjarnegara	101.411.511	175.831.028	74.419.517	101.411.511	-
0319	Kab. Magelang	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0320	Kab. Temanggung	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0321	Kab. Wonosobo	101.411.511	175.831.028	74.419.517	101.411.511	-
0322	Kab. Purworejo	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0323	Kab. Kebumen	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0324	Kab. Klaten	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0325	Kab. Boyolali	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0326	Kab. Sragen	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0327	Kab. Sukoharjo	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0328	Kab. Karanganyar	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0329	Kab. Wonogiri	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0351	Kota Semarang	101.411.511	175.831.028	74.419.517	101.411.511	-
0352	Kota Salatiga	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0353	Kota Pekalongan	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0354	Kota Tegal	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0355	Kota Magelang	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0356	Kota Surakarta	101.411.511	101.411.511	-	101.411.511	-
0400	Prov. DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
0401	Kab. Bantul	-	-	-	-	-
0402	Kab. Sleman	-	-	-	-	-
0403	Kab. Gunung Kidul	-	-	-	-	-
0404	Kab. Kulon Progo	-	-	-	-	-
0451	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-
0500	Prov. Jawa Timur	17.882.070.739	17.882.070.739	-	17.882.070.739	-
0501	Kab. Gresik	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0502	Kab. Mojokerto	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0503	Kab. Sidoarjo	905.520.950	905.520.950	-	905.520.950	-
0504	Kab. Jombang	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0505	Kab. Sampang	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0506	Kab. Pamekasan	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0507	Kab. Sumenep	2.106.135.766	3.513.455.387	1.407.319.621	2.106.135.766	-
0508	Kab. Bangkalan	12.045.897.917	12.045.897.917	-	12.045.897.917	-
0509	Kab. Bondowoso	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0510	Kab. Situbondo	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0511	Kab. Banyuwangi	966.497.012	1.234.177.879	267.680.867	966.497.012	-
0512	Kab. Jember	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0513	Kab. Malang	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0514	Kab. Pasuruan	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0515	Kab. Probolinggo	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0516	Kab. Lumajang	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0517	Kab. Kediri	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0518	Kab. Tulungagung	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0519	Kab. Nganjuk	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0520	Kab. Trenggalek	966.497.012	1.234.177.879	267.680.867	966.497.012	-
0521	Kab. Blitar	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0522	Kab. Madiun	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0523	Kab. Ngawi	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0524	Kab. Magetan	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0525	Kab. Ponorogo	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0526	Kab. Pacitan	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0527	Kab. Bojonegoro	12.754.142.620	12.754.142.620	-	12.754.142.620	-
0528	Kab. Tuban	11.891.968.781	11.891.968.781	-	11.891.968.781	-
0529	Kab. Lamongan	893.460.020	893.460.020	-	893.460.020	-
0551	Kota Surabaya	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0552	Kota Mojokerto	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0553	Kota Malang	966.497.012	1.234.177.879	267.680.867	966.497.012	-
0554	Kota Pasuruan	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0555	Kota Probollinggo	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0556	Kota Blitar	966.497.012	1.234.177.879	267.680.867	966.497.012	-
0557	Kota Kediri	966.497.012	1.234.177.879	267.680.867	966.497.012	-
0558	Kota Madiun	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0559	Kota Batu	966.497.012	966.497.012	-	966.497.012	-
0600	Prov. Nanggroe Aceh Darussalam	513.150.378.779	513.150.378.779	-	513.150.378.779	-
0601	Kab. Aceh Besar	2.688.799.737	2.688.799.737	-	2.688.799.737	-
0602	Kab. Aceh Pidie	2.688.799.737	3.250.581.214	561.781.477	2.688.799.737	-
0603	Kab. Aceh Utara	53.031.696.248	53.031.696.248	-	53.031.696.248	-
0604	Kab. Aceh Timur	2.841.818.301	2.841.818.301	-	2.841.818.301	-
0605	Kab. Aceh Selatan	2.688.799.737	2.688.799.737	-	2.688.799.737	-
0606	Kab. Aceh Barat	2.688.799.737	3.250.581.214	561.781.477	2.688.799.737	-
0607	Kab. Aceh Tengah	2.688.799.737	3.250.581.214	561.781.477	2.688.799.737	-
0608	Kab. Aceh Tenggara	2.688.799.737	3.250.581.214	561.781.477	2.688.799.737	-
0609	Kab. Simeulue	2.688.799.737	2.688.799.737	-	2.688.799.737	-
0610	Kab. Aceh Singkil	2.688.799.737	3.250.581.214	561.781.477	2.688.799.737	-
0611	Kab. Bireun	2.688.799.737	2.688.799.737	-	2.688.799.737	-
0612	Kab. Aceh Barat Daya	2.688.799.737	2.688.799.737	-	2.688.799.737	-
0613	Kab. Gayo Lues	2.688.799.737	3.250.581.214	1.123.562.954	2.127.018.260	561.781.477
0614	Kab. Aceh Jaya	2.688.799.737	2.688.799.737	-	2.688.799.737	-
0615	Kab. Nagan Raya	2.688.799.737	2.688.799.737	-	2.688.799.737	-
0616	Kab. Aceh Tamiang	3.281.580.984	3.281.580.984	-	3.281.580.984	-
0617	Kab. Bener Meriah	2.688.799.737	2.688.799.737	-	2.688.799.737	-
0651	Kota Banda Aceh	2.688.799.737	2.688.799.737	-	2.688.799.737	-
0652	Kota Sabang	2.688.799.737	2.688.799.737	-	2.688.799.737	-
0653	Kota Langsa	2.688.799.737	2.688.799.737	-	2.688.799.737	-
0654	Kota Lhokseumawe	2.688.799.737	2.688.799.737	-	2.688.799.737	-
0700	Prov. Sumatera Utara	752.966.529	752.966.529	-	752.966.529	-
0701	Kab. Deli Serdang	59.112.018	59.112.018	-	59.112.018	-
0702	Kab. Tanah Karo	62.788.688	62.788.688	-	62.788.688	-
0703	Kab. Langkat	1.354.243.447	1.354.243.447	-	1.354.243.447	-
0704	Kab. Tapanuli Tengah	62.788.688	62.788.688	-	62.788.688	-
0705	Kab. Simalungun	62.788.688	62.788.688	-	62.788.688	-
0706	Kab. Labuhan Batu	62.788.688	62.788.688	-	62.788.688	-
0707	Kab. Dairi	62.788.688	62.788.688	-	62.788.688	-
0708	Kab. Tapanuli Utara	62.788.688	62.788.688	-	62.788.688	-
0709	Kab. Tapanuli Selatan	62.788.688	62.788.688	-	62.788.688	-
0710	Kab. Asahan	62.788.688	62.788.688	-	62.788.688	-
0711	Kab. Nias	62.788.688	62.788.688	-	62.788.688	-
0712	Kab. Toba Samosir	62.788.688	62.788.688	-	62.788.688	-
0713	Kab. Mandailing Natal	62.788.688	62.788.688	-	62.788.688	-
0714	Kab. Nias Selatan	62.788.688	62.788.688	-	62.788.688	-
0715	Kab. Pakpak Bharat	62.788.688	62.788.688	-	62.788.688	-
0716	Kab. Humbang Hasundutan	62.788.688	62.788.688	-	62.788.688	-
0717	Kab. Samosir	62.788.688	62.788.688	-	62.788.688	-
0718	Kab. Serdang Berdagai	62.788.688	62.788.688	-	62.788.688	-
0751	Kota Medan	62.788.688	62.788.688	-	62.788.688	-
0752	Kota Tebing Tinggi	62.788.688	62.788.688	-	62.788.688	-
0753	Kota Binjai	217.655.222	217.655.222	-	217.655.222	-
0754	Kota Pematang Siantar	62.788.688	62.788.688	-	62.788.688	-
0755	Kota Tanjung Balai	62.788.688	62.788.688	-	62.788.688	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0756	Kota Sibolga	62.788.688	62.788.688	-	62.788.688	-
0757	Kota Padang Sidempuan	62.788.688	62.788.688	-	62.788.688	-
0800	Prov. Sumatera Barat	-	-	-	-	-
0801	Kab. Agam	-	-	-	-	-
0802	Kab. Pasaman	-	-	-	-	-
0803	Kab. Limapuluh Kota	-	-	-	-	-
0804	Kab. Solok	-	-	-	-	-
0805	Kab. Padang Pariaman	-	-	-	-	-
0806	Kab. Pesisir Selatan	-	-	-	-	-
0807	Kab. Tanah Datar	-	-	-	-	-
0808	Kab. Sawahlunto Sijunjung	-	-	-	-	-
0809	Kab. Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-
0810	Kab. Dharmasraya	-	-	-	-	-
0811	Kab. Solok Selatan	-	-	-	-	-
0812	Kab. Pasaman Barat	-	-	-	-	-
0851	Kota Bukit Tinggi	-	-	-	-	-
0852	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-
0853	Kota Solok	-	-	-	-	-
0854	Kota Sawahlunto	-	-	-	-	-
0855	Kota Padang	-	-	-	-	-
0856	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-
0857	Kota Pariaman	-	-	-	-	-
0900	Prov. Riau	1.453.666.279.638	1.453.666.279.638	-	1.453.666.279.638	-
0901	Kab. Kampar	620.361.591.583	620.361.591.583	-	620.361.591.583	-
0902	Kab. Bengkalis	1.331.358.773.784	1.331.358.773.784	-	1.331.358.773.784	-
0904	Kab. Indragiri Hulu	292.601.009.943	292.601.009.943	-	292.601.009.943	-
0905	Kab. Indragiri Hilir	290.733.355.777	290.733.355.777	-	290.733.355.777	-
0906	Kab. Pelalawan	298.455.749.226	298.455.749.226	-	298.455.749.226	-
0907	Kab. Rokan Hulu	305.844.129.538	305.844.129.538	-	305.844.129.538	-
0908	Kab. Rokan Hilir	886.832.259.191	886.832.259.191	-	886.832.259.191	-
0909	Kab. Siak	916.278.930.924	916.278.930.924	-	916.278.930.924	-
0912	Kab. Kuantan Singingi	290.733.355.777	290.733.355.777	-	290.733.355.777	-
0951	Kota Pekanbaru	290.733.355.777	290.733.355.777	-	290.733.355.777	-
0953	Kota Dumai	290.733.355.777	290.733.355.777	-	290.733.355.777	-
1000	Prov. Jambi	49.598.942.594	49.598.942.594	-	49.598.942.594	-
1001	Kab. Batanghari	10.947.961.239	12.914.033.243	1.966.072.004	10.947.961.239	-
1002	Kab. Tanjung Jabung Barat	60.632.048.401	60.632.048.401	-	60.632.048.401	-
1003	Kab. Bungo	11.021.931.464	11.021.931.464	-	11.021.931.464	-
1004	Kab. Sarolangun	12.073.079.846	14.711.630.710	2.638.550.864	12.073.079.846	-
1005	Kab. Kerinci	11.021.931.464	14.064.128.728	3.042.197.264	11.021.931.464	-
1006	Kab. Merangin	11.021.931.464	11.021.931.464	-	11.021.931.464	-
1007	Kab. Tanjung Jabung Timur	48.589.073.480	48.589.073.480	-	48.589.073.480	-
1008	Kab. Tebo	10.590.270.462	10.590.270.462	-	10.590.270.462	-
1009	Kab. Muaro Jambi	11.555.666.698	11.555.666.698	-	11.555.666.698	-
1051	Kota Jambi	10.941.874.349	10.941.874.349	-	10.941.874.349	-
1100	Prov. Sumatera Selatan	172.395.804.579	172.395.804.579	-	172.395.804.579	-
1103	Kab. Musi Banyuasin	269.182.636.037	269.182.636.037	-	269.182.636.037	-
1104	Kab. Ogan Komering Ulu	37.450.617.804	37.450.617.804	-	37.450.617.804	-
1105	Kab. Muara Enim	42.888.329.787	42.888.329.787	-	42.888.329.787	-
1106	Kab. Lahat	32.563.037.540	32.563.037.540	-	32.563.037.540	-
1107	Kab. Musi Rawas	52.347.327.009	52.347.327.009	-	52.347.327.009	-
1108	Kab. Ogan Komering Ilir	26.522.546.857	26.522.546.857	-	26.522.546.857	-
1109	Kab. Banyuasin	41.766.420.819	41.766.420.819	-	41.766.420.819	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
1110	Kab. OKU Timur	26.522.546.857	26.522.546.857	-	26.522.546.857	-
1111	Kab. OKU Selatan	26.522.546.857	26.522.546.857	-	26.522.546.857	-
1112	Kab. Ogan Ilir	26.720.413.887	26.720.413.887	-	26.720.413.887	-
1151	Kota Palembang	26.522.546.857	26.522.546.857	-	26.522.546.857	-
1153	Kota Prabumulih	26.690.892.405	26.690.892.405	-	26.690.892.405	-
1154	Kota Pagar Alam	26.522.546.857	26.522.546.857	-	26.522.546.857	-
1155	Kota Lubuk Linggau	26.522.546.857	26.522.546.857	-	26.522.546.857	-
1200	Prov. Lampung	82.557.692.049	102.743.260.868	20.185.568.819	82.557.692.049	-
1201	Kab. Lampung Selatan	16.903.435.069	21.036.409.445	4.132.974.376	16.903.435.069	-
1202	Kab. Lampung Tengah	16.903.435.069	21.036.409.445	4.132.974.376	16.903.435.069	-
1203	Kab. Lampung Utara	16.903.435.069	16.903.435.069	-	16.903.435.069	-
1204	Kab. Lampung Barat	16.903.435.069	16.903.435.069	-	16.903.435.069	-
1205	Kab. Tulang Bawang	16.903.435.069	16.903.435.069	-	16.903.435.069	-
1206	Kab. Tanggamus	16.903.435.069	16.903.435.069	-	16.903.435.069	-
1207	Kab. Lampung Timur	48.257.420.025	48.257.420.025	-	48.257.420.025	-
1208	Kab. Way Kanan	16.903.435.069	16.903.435.069	-	16.903.435.069	-
1251	Kota Bandar Lampung	16.903.435.069	16.903.435.069	-	16.903.435.069	-
1252	Kota Metro	16.903.435.069	16.903.435.069	-	16.903.435.069	-
1300	Prov. Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
1301	Kab. Sambas	-	-	-	-	-
1302	Kab. Sanggau	-	-	-	-	-
1303	Kab. Sintang	-	-	-	-	-
1304	Kab. Pontianak	-	-	-	-	-
1305	Kab. Kapuas Hulu	-	-	-	-	-
1306	Kab. Ketapang	-	-	-	-	-
1307	Kab. Bengkayang	-	-	-	-	-
1308	Kab. Landak	-	-	-	-	-
1309	Kab. Melawi	-	-	-	-	-
1310	Kab. Sekadau	-	-	-	-	-
1351	Kota Pontianak	-	-	-	-	-
1352	Kota Singkawang	-	-	-	-	-
1400	Prov. Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
1401	Kab. Kapuas	-	-	-	-	-
1402	Kab. Barito Utara	-	-	-	-	-
1403	Kab. Barito Selatan	-	-	-	-	-
1404	Kab. Kotawaringin Timur	-	-	-	-	-
1405	Kab. Kotawaringin Barat	-	-	-	-	-
1406	Kab. Katingan	-	-	-	-	-
1407	Kab. Seruyan	-	-	-	-	-
1408	Kab. Sukamara	-	-	-	-	-
1409	Kab. Lamandau	-	-	-	-	-
1410	Kab. Gunung Mas	-	-	-	-	-
1411	Kab. Pulang Pisau	-	-	-	-	-
1412	Kab. Murung Raya	-	-	-	-	-
1413	Kab. Barito Timur	-	-	-	-	-
1451	Kota Palangkaraya	-	-	-	-	-
1500	Prov. Kalimantan Selatan	781.913.576	781.913.576	-	781.913.576	-
1501	Kab. Banjar	130.360.471	130.360.471	-	130.360.471	-
1502	Kab. Tanah Laut	130.360.471	130.360.471	-	130.360.471	-
1503	Kab. Tapin	130.360.471	130.360.471	-	130.360.471	-
1504	Kab. Hulu Sungai Selatan	130.360.471	130.360.471	-	130.360.471	-
1505	Kab. Hulu Sungai Tengah	130.360.471	130.360.471	-	130.360.471	-
1506	Kab. Barito Kuala	130.360.471	130.360.471	-	130.360.471	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
1507	Kab. Tabalong	1.146.627.709	1.146.627.709	-	1.146.627.709	-
1508	Kab. Kota Baru	130.360.471	130.360.471	-	130.360.471	-
1509	Kab. Hulu Sungai Utara	130.360.471	130.360.471	-	130.360.471	-
1510	Kab. Tanah Bumbu	130.360.471	130.360.471	-	130.360.471	-
1511	Kab. Balangan	547.559.914	547.559.914	-	547.559.914	-
1551	Kota Banjarmasin	130.360.471	130.360.471	-	130.360.471	-
1552	Kota Banjar Baru	130.360.471	130.360.471	-	130.360.471	-
1600	Prov. Kalimantan Timur	499.327.325.730	499.327.325.730	-	499.327.325.730	-
1601	Kab. Kutai Kartanegara	539.295.560.194	539.295.560.194	-	539.295.560.194	-
1602	Kab. Pasir	80.259.052.741	80.259.052.741	-	80.259.052.741	-
1603	Kab. Bulungan	80.425.550.727	80.425.550.727	-	80.425.550.727	-
1604	Kab. Berau	80.259.052.742	80.259.052.742	-	80.259.052.742	-
1605	Kab. Nunukan	80.291.380.489	80.291.380.489	-	80.291.380.489	-
1606	Kab. Malinau	80.259.052.741	80.259.052.741	-	80.259.052.741	-
1607	Kab. Kutai Barat	80.259.052.741	80.259.052.741	-	80.259.052.741	-
1608	Kab. Kutai Timur	80.634.494.943	80.634.494.943	-	80.634.494.943	-
1609	Kab. Penajam Paser Utara	93.474.118.478	93.474.118.478	-	93.474.118.478	-
1651	Kota Samarinda	82.558.569.112	82.558.569.112	-	82.558.569.112	-
1652	Kota Balikpapan	80.259.052.741	80.259.052.741	-	80.259.052.741	-
1653	Kota Tarakan	90.056.939.557	90.056.939.557	-	90.056.939.557	-
1654	Kota Bontang	87.192.948.453	87.192.948.453	-	87.192.948.453	-
1700	Prov. Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
1702	Kab. Minahasa	-	-	-	-	-
1703	Kab. Bolaang Mongondow	-	-	-	-	-
1704	Kab. Sangihe	-	-	-	-	-
1705	Kab. Kepulauan Talaud	-	-	-	-	-
1706	Kab. Minahasa Selatan	-	-	-	-	-
1707	Kota Tomohon	-	-	-	-	-
1708	Kab. Minahasa Utara	-	-	-	-	-
1751	Kota Manado	-	-	-	-	-
1753	Kota Bitung	-	-	-	-	-
1800	Prov. Sulawesi Tengah	766.889.005	766.889.005	-	766.889.005	-
1801	Kab. Poso	170.530.695	170.530.695	-	170.530.695	-
1802	Kab. Donggala	170.530.695	341.061.390	170.530.695	170.530.695	-
1803	Kab. Toli-Toli	170.530.695	170.530.695	-	170.530.695	-
1804	Kab. Banggai	170.530.695	341.061.390	170.530.695	170.530.695	-
1805	Kab. Buol	170.530.695	170.530.695	-	170.530.695	-
1806	Kab. Morowali	1.533.778.265	3.067.556.530	1.533.778.265	1.533.778.265	-
1807	Kab. Banggai Kepulauan	170.530.695	341.061.390	170.530.695	170.530.695	-
1808	Kab. Parigi Moutong	170.530.695	170.530.695	-	170.530.695	-
1809	Kab. Tojo Una Una	170.530.695	170.530.695	-	170.530.695	-
1851	Kota Palu	170.530.695	170.530.695	-	170.530.695	-
1900	Prov. Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
1901	Kab. Pinrang	-	-	-	-	-
1902	Kab. G o w a	-	-	-	-	-
1903	Kab. Wajo	-	-	-	-	-
1905	Kab. Bone	-	-	-	-	-
1906	Kab. Tana Toraja	-	-	-	-	-
1907	Kab. M a r o s	-	-	-	-	-
1909	Kab. Luwu	-	-	-	-	-
1910	Kab. Sinjai	-	-	-	-	-
1911	Kab. Bulukumba	-	-	-	-	-
1912	Kab. Bantaeng	-	-	-	-	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
1913	Kab. Jeneponto	-	-	-	-	-
1914	Kab. Selayar	-	-	-	-	-
1915	Kab. Takalar	-	-	-	-	-
1916	Kab. Barru	-	-	-	-	-
1917	Kab. Sidenreng Rappang	-	-	-	-	-
1918	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	-	-	-	-
1919	Kab. Soppeng	-	-	-	-	-
1921	Kab. Enrekang	-	-	-	-	-
1922	Kab. Luwu Utara	-	-	-	-	-
1924	Kab. Luwu Timur	-	-	-	-	-
1951	Kota Makassar	-	-	-	-	-
1952	Kota Pare-pare	-	-	-	-	-
1953	Kota Palopo	-	-	-	-	-
2000	Prov. Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
2001	Kab. Konawe	-	-	-	-	-
2002	Kab. Buton	-	-	-	-	-
2003	Kab. Muna	-	-	-	-	-
2004	Kab. Kolaka	-	-	-	-	-
2005	Kab. Konawe Selatan	-	-	-	-	-
2006	Kab. Wakatobi	-	-	-	-	-
2007	Kab. Bombana	-	-	-	-	-
2008	Kab. Kolaka Utara	-	-	-	-	-
2051	Kota Kendari	-	-	-	-	-
2052	Kota Bau-bau	-	-	-	-	-
2100	Prov. Maluku	-	-	-	-	-
2101	Kab. Maluku Tengah	-	-	-	-	-
2102	Kab. Maluku Tenggara	-	-	-	-	-
2103	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	-	-	-	-
2104	Kab. Pulau Buru	-	-	-	-	-
2105	Kab. Kepulauan Aru	-	-	-	-	-
2106	Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-	-	-
2107	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	-	-	-
2151	Kota Ambon	-	-	-	-	-
2200	Prov. Bali	-	-	-	-	-
2201	Kab. Buleleng	-	-	-	-	-
2202	Kab. Jembrana	-	-	-	-	-
2203	Kab. Klungkung	-	-	-	-	-
2204	Kab. Gianyar	-	-	-	-	-
2205	Kab. Karangasem	-	-	-	-	-
2206	Kab. Bangli	-	-	-	-	-
2207	Kab. Badung	-	-	-	-	-
2208	Kab. Tabanan	-	-	-	-	-
2251	Kota Denpasar	-	-	-	-	-
2300	Prov. Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
2301	Kab. Lombok Barat	-	-	-	-	-
2302	Kab. Lombok Tengah	-	-	-	-	-
2303	Kab. Lombok Timur	-	-	-	-	-
2304	Kab. Bima	-	-	-	-	-
2305	Kab. Sumbawa	-	-	-	-	-
2306	Kab. Dompu	-	-	-	-	-
2307	Kab. Sumbawa Barat	-	-	-	-	-
2351	Kota Mataram	-	-	-	-	-
2352	Kota Bima	-	-	-	-	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
2400	Prov. Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
2401	Kab. Kupang	-	-	-	-	-
2402	Kab. Belu	-	-	-	-	-
2403	Kab. Timor Tengah Utara	-	-	-	-	-
2404	Kab. Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	-
2405	Kab. Alor	-	-	-	-	-
2406	Kab. Sikka	-	-	-	-	-
2407	Kab. Flores Timur	-	-	-	-	-
2408	Kab. Ende	-	-	-	-	-
2409	Kab. Ngada	-	-	-	-	-
2410	Kab. Manggarai	-	-	-	-	-
2411	Kab. Sumba Timur	-	-	-	-	-
2412	Kab. Sumba Barat	-	-	-	-	-
2413	Kab. Lembata	-	-	-	-	-
2414	Kab. Rote Ndao	-	-	-	-	-
2415	Kab. Manggarai Barat	-	-	-	-	-
2451	Kota Kupang	-	-	-	-	-
2500	Prov. Papua	-	-	-	-	-
2501	Kab. Jayapura	-	-	-	-	-
2502	Kab. Biak Numfor	-	-	-	-	-
2504	Kab. Yapen Waropen	-	-	-	-	-
2507	Kab. Merauke	-	-	-	-	-
2508	Kab. Jayawijaya	-	-	-	-	-
2509	Kab. Paniai	-	-	-	-	-
2510	Kab. Nabire	-	-	-	-	-
2511	Kab. Puncak Jaya	-	-	-	-	-
2512	Kab. Mimika	-	-	-	-	-
2513	Kab. Mappi	-	-	-	-	-
2514	Kab. Asmat	-	-	-	-	-
2515	Kab. Boven Digoel	-	-	-	-	-
2516	Kab. Sarmi	-	-	-	-	-
2517	Kab. Keerom	-	-	-	-	-
2518	Kab. Tolikara	-	-	-	-	-
2519	Kab. Pegunungan Bintang	-	-	-	-	-
2523	Kab. Waropen	-	-	-	-	-
2524	Kab. Yahukimo	-	-	-	-	-
2525	Kab. Supiori	-	-	-	-	-
2551	Kota Jayapura	-	-	-	-	-
2600	Prov. Bengkulu	-	-	-	-	-
2601	Kab. Bengkulu Utara	-	-	-	-	-
2602	Kab. Bengkulu Selatan	-	-	-	-	-
2603	Kab. Rejang Lebong	-	-	-	-	-
2604	Kab. Seluma	-	-	-	-	-
2605	Kab. Kaur	-	-	-	-	-
2606	Kab. Mukomuko	-	-	-	-	-
2607	Kab. Lebong	-	-	-	-	-
2608	Kab. Kepahiang	-	-	-	-	-
2651	Kota Bengkulu	-	-	-	-	-
2800	Prov. Maluku Utara	-	-	-	-	-
2801	Kab. Halmahera Barat	-	-	-	-	-
2802	Kab. Halmahera Tengah	-	-	-	-	-
2803	Kab. Halmahera Utara	-	-	-	-	-
2804	Kab. Halmahera Selatan	-	-	-	-	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
2805	Kab. Kepulauan Sula	-	-	-	-	-
2806	Kab. Halmahera Timur	-	-	-	-	-
2851	Kota Ternate	-	-	-	-	-
2852	Kota Tidore Kepulauan	-	-	-	-	-
2900	Prov. Banten	-	-	-	-	-
2901	Kab. Serang	-	-	-	-	-
2902	Kab. Pandeglang	-	-	-	-	-
2903	Kab. Lebak	-	-	-	-	-
2904	Kab. Tangerang	-	-	-	-	-
2951	Kota Tangerang	-	-	-	-	-
2952	Kota Cilegon	-	-	-	-	-
3000	Prov. Bangka Belitung	11.082.655.783	11.082.655.783	-	11.082.655.783	-
3001	Kab. Belitung	3.166.580.115	3.166.580.115	-	3.166.580.115	-
3002	Kab. Bangka	3.166.580.115	3.166.580.115	-	3.166.580.115	-
3003	Kab. Bangka Barat	3.166.580.116	3.166.580.116	-	3.166.580.116	-
3004	Kab. Bangka Tengah	3.166.580.116	3.166.580.116	-	3.166.580.116	-
3005	Kab. Bangka Selatan	3.166.580.116	3.166.580.116	-	3.166.580.116	-
3006	Kab. Belitung Timur	3.166.580.116	3.166.580.115	-	3.166.580.115	1
3051	Kota Pangkal Pinang	3.166.580.116	3.166.580.116	-	3.166.580.116	-
3100	Prov. Gorontalo	-	-	-	-	-
3101	Kab. Gorontalo	-	-	-	-	-
3102	Kab. Boalemo	-	-	-	-	-
3103	Kab. Pohuwato	-	-	-	-	-
3104	Kab. Bone Bolango	-	-	-	-	-
3151	Kota Gorontalo	-	-	-	-	-
3200	Prov. Kepulauan Riau	83.959.194.450	83.959.194.450	-	83.959.194.450	-
3201	Kab. Bintan	33.125.827.295	33.125.827.295	-	33.125.827.295	-
3202	Kab. Karimun	33.125.827.295	33.125.827.295	-	33.125.827.295	-
3203	Kab. Natuna	156.472.378.057	156.472.378.057	-	156.472.378.057	-
3204	Kab. Lingga	33.125.827.295	33.125.827.295	-	33.125.827.295	-
3251	Kota Batam	33.125.827.295	33.125.827.295	-	33.125.827.295	-
3252	Kota Tanjung Pinang	33.125.827.295	33.125.827.295	-	33.125.827.295	-
3300	Prov. Irian Jaya Barat	10.077.374.932	11.663.381.886	1.586.006.954	10.077.374.932	-
3301	Kab. Manokwari	2.519.343.544	2.519.343.544	-	2.519.343.544	-
3302	Kab. Sorong	6.009.970.131	6.009.970.131	-	6.009.970.131	-
3303	Kab. Fak Fak	2.519.343.544	2.519.343.544	-	2.519.343.544	-
3304	Kab. Sorong Selatan	2.519.343.544	2.728.360.264	209.016.720	2.519.343.544	-
3305	Kab. Raja Ampat	16.288.191.837	16.288.191.837	-	16.288.191.837	-
3306	Kab. Teluk Bintuni	2.895.275.484	3.089.822.241	194.546.757	2.895.275.484	-
3307	Kab. Teluk Wondama	2.519.343.544	2.728.360.264	209.016.720	2.519.343.544	-
3308	Kab. Kaimana	2.519.343.544	2.519.343.544	-	2.519.343.544	-
3351	Kota Sorong	2.519.343.544	2.519.343.544	-	2.519.343.544	-
3400	Prov. Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
3401	Kab. Majene	-	-	-	-	-
3402	Kab. Mamuju	-	-	-	-	-
3403	Kab. Mamuju Utara	-	-	-	-	-
3404	Kab. Polewali Mandar	-	-	-	-	-
3405	Kab. Mamasa	-	-	-	-	-
JUMLAH DANA SDA MINYAK BUMI		**12.187.255.828.236**	**12.237.540.639.508**	**51.656.435.914**	**12.185.884.203.594**	**1.371.624.642**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM GAS BUMI
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0100	Prov. DKI Jakarta	11.437.511.627	11.437.511.627	-	11.437.511.627	-
0199	Instansi Pusat (Rekening Cadangan 2007)	803.317.658.506	803.317.658.506	-	803.317.658.506	-
0200	Prov. Jawa Barat	2.413.101.679	2.413.101.679	-	2.413.101.679	-
0205	Kab. Bogor	188.606.951	188.606.951	-	188.606.951	-
0206	Kab. Sukabumi	188.606.951	188.606.951	-	188.606.951	-
0207	Kab. Cianjur	188.606.951	188.606.951	-	188.606.951	-
0208	Kab. Bekasi	46.406.443	46.406.443	-	46.406.443	-
0209	Kab. Karawang	687.866.987	687.866.987	-	687.866.987	-
0210	Kab. Purwakarta	188.606.951	188.606.951	-	188.606.951	-
0211	Kab. Subang	-	-	-	-	-
0212	Kab. Bandung	188.606.951	188.606.951	-	188.606.951	-
0213	Kab. Sumedang	188.606.951	188.606.951	-	188.606.951	-
0214	Kab. Garut	188.606.951	188.606.951	-	188.606.951	-
0215	Kab. Tasikmalaya	188.606.951	188.606.951	-	188.606.951	-
0216	Kab. Ciamis	188.606.951	188.606.951	-	188.606.951	-
0217	Kab. Cirebon	188.606.951	188.606.951	-	188.606.951	-
0218	Kab. Kuningan	188.606.951	188.606.951	-	188.606.951	-
0219	Kab. Indramayu	-	-	-	-	-
0220	Kab. Majalengka	163.035.812	163.035.812	-	163.035.812	-
0251	Kota Bandung	188.606.951	188.606.951	-	188.606.951	-
0252	Kota Bogor	188.606.951	188.606.951	-	188.606.951	-
0253	Kota Sukabumi	188.606.951	188.606.951	-	188.606.951	-
0254	Kota Cirebon	188.606.951	188.606.951	-	188.606.951	-
0257	Kota Bekasi	188.606.951	188.606.951	-	188.606.951	-
0258	Kota Depok	188.606.951	188.606.951	-	188.606.951	-
0260	Kota Tasikmalaya	188.606.951	188.606.951	-	188.606.951	-
0261	Kota Cimahi	188.606.951	188.606.951	-	188.606.951	-
0262	Kota Banjar	188.606.951	188.606.951	-	188.606.951	-
0300	Prov. Jawa Tengah	-	-	-	-	-
0301	Kab. Semarang	-	-	-	-	-
0302	Kab. Kendal	-	-	-	-	-
0303	Kab. Demak	-	-	-	-	-
0304	Kab. Grobogan	-	-	-	-	-
0305	Kab. Pekalongan	-	-	-	-	-
0306	Kab. Batang	-	-	-	-	-
0307	Kab. Tegal	-	-	-	-	-
0308	Kab. Brebes	-	-	-	-	-
0309	Kab. Pati	-	-	-	-	-
0310	Kab. Kudus	-	-	-	-	-
0311	Kab. Pemalang	-	-	-	-	-
0312	Kab. Jepara	-	-	-	-	-
0313	Kab. Rembang	-	-	-	-	-
0314	Kab. Blora	-	-	-	-	-
0315	Kab. Banyumas	-	-	-	-	-
0316	Kab. Cilacap	-	-	-	-	-
0317	Kab. Purbalingga	-	-	-	-	-
0318	Kab. Banjarnegara	-	-	-	-	-
0319	Kab. Magelang	-	-	-	-	-
0320	Kab. Temanggung	-	-	-	-	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0321	Kab. Wonosobo	-	-	-	-	-
0322	Kab. Purworejo	-	-	-	-	-
0323	Kab. Kebumen	-	-	-	-	-
0324	Kab. Klaten	-	-	-	-	-
0325	Kab. Boyolali	-	-	-	-	-
0326	Kab. Sragen	-	-	-	-	-
0327	Kab. Sukoharjo	-	-	-	-	-
0328	Kab. Karanganyar	-	-	-	-	-
0329	Kab. Wonogiri	-	-	-	-	-
0351	Kota Semarang	-	-	-	-	-
0352	Kota Salatiga	-	-	-	-	-
0353	Kota Pekalongan	-	-	-	-	-
0354	Kota Tegal	-	-	-	-	-
0355	Kota Magelang	-	-	-	-	-
0356	Kota Surakarta	-	-	-	-	-
0400	Prov. DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
0401	Kab. Bantul	-	-	-	-	-
0402	Kab. Sleman	-	-	-	-	-
0403	Kab. Gunung Kidul	-	-	-	-	-
0404	Kab. Kulon Progo	-	-	-	-	-
0451	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-
0500	Prov. Jawa Timur	1.296.967.899	1.296.967.899	-	1.296.967.899	-
0501	Kab. Gresik	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0502	Kab. Mojokerto	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0503	Kab. Sidoarjo	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0504	Kab. Jombang	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0505	Kab. Sampang	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0506	Kab. Pamekasan	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0507	Kab. Sumenep	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0508	Kab. Bangkalan	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0509	Kab. Bondowoso	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0510	Kab. Situbondo	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0511	Kab. Banyuwangi	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0512	Kab. Jember	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0513	Kab. Malang	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0514	Kab. Pasuruan	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0515	Kab. Probolinggo	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0516	Kab. Lumajang	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0517	Kab. Kediri	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0518	Kab. Tulungagung	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0519	Kab. Nganjuk	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0520	Kab. Trenggalek	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0521	Kab. Blitar	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0522	Kab. Madiun	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0523	Kab. Ngawi	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0524	Kab. Magetan	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0525	Kab. Ponorogo	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0526	Kab. Pacitan	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0527	Kab. Bojonegoro	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0528	Kab. Tuban	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0529	Kab. Lamongan	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0551	Kota Surabaya	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0552	Kota Mojokerto	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0553	Kota Malang	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0554	Kota Pasuruan	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0555	Kota Probollinggo	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0556	Kota Blitar	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0557	Kota Kediri	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0558	Kota Madiun	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0559	Kota Batu	68.261.468	68.261.468	-	68.261.468	-
0600	Prov. Nanggroe Aceh Darussalam	1.069.424.072.814	1.069.424.072.814	-	1.069.424.072.814	-
0601	Kab. Aceh Besar	13.656.254.649	13.656.254.649	-	13.656.254.649	-
0602	Kab. Aceh Pidie	13.656.254.649	17.229.465.840	3.573.211.191	13.656.254.649	-
0603	Kab. Aceh Utara	272.353.025.393	272.353.025.393	-	272.353.025.393	-
0604	Kab. Aceh Timur	14.430.572.532	14.430.572.532	-	14.430.572.532	-
0605	Kab. Aceh Selatan	13.656.254.649	13.656.254.649	-	13.656.254.649	-
0606	Kab. Aceh Barat	13.656.254.649	17.229.465.840	3.573.211.191	13.656.254.649	-
0607	Kab. Aceh Tengah	13.656.254.649	17.229.465.840	3.573.211.191	13.656.254.649	-
0608	Kab. Aceh Tenggara	13.656.254.649	17.229.465.840	3.573.211.191	13.656.254.649	-
0609	Kab. Simeulue	13.656.254.649	13.656.254.649	-	13.656.254.649	-
0610	Kab. Aceh Singkil	13.656.254.649	17.229.465.840	3.573.211.191	13.656.254.649	-
0611	Kab. Bireun	13.656.254.649	13.656.254.649	-	13.656.254.649	-
0612	Kab. Aceh Barat Daya	16.656.254.649	16.656.254.649	-	16.656.254.649	-
0613	Kab. Gayo Lues	13.656.254.649	17.229.465.840	7.146.422.382	10.083.043.458	3.573.211.191
0614	Kab. Aceh Jaya	7.656.254.649	7.656.254.649	-	7.656.254.649	-
0615	Kab. Nagan Raya	13.656.254.649	13.656.254.649	-	13.656.254.649	-
0616	Kab. Aceh Tamiang	16.656.254.649	16.656.254.649	-	16.656.254.649	-
0617	Kab. Bener Meriah	13.656.254.649	13.656.254.649	-	13.656.254.649	-
0651	Kota Banda Aceh	13.656.254.649	13.656.254.649	-	13.656.254.649	-
0652	Kota Sabang	13.656.254.649	13.656.254.649	-	13.656.254.649	-
0653	Kota Langsa	13.656.254.649	13.656.254.649	-	13.656.254.649	-
0654	Kota Lhokseumawe	13.656.254.649	13.656.254.649	-	13.656.254.649	-
0700	Prov. Sumatera Utara	-	-	-	-	-
0701	Kab. Deli Serdang	-	-	-	-	-
0702	Kab. Tanah Karo	-	-	-	-	-
0703	Kab. Langkat	-	-	-	-	-
0704	Kab. Tapanuli Tengah	-	-	-	-	-
0705	Kab. Simalungun	-	-	-	-	-
0706	Kab. Labuhan Batu	-	-	-	-	-
0707	Kab. Dairi	-	-	-	-	-
0708	Kab. Tapanuli Utara	-	-	-	-	-
0709	Kab. Tapanuli Selatan	-	-	-	-	-
0710	Kab. Asahan	-	-	-	-	-
0711	Kab. Nias	-	-	-	-	-
0712	Kab. Toba Samosir	-	-	-	-	-
0713	Kab. Mandailing Natal	-	-	-	-	-
0714	Kab. Nias Selatan	-	-	-	-	-
0715	Kab. Pakpak Bharat	-	-	-	-	-
0716	Kab. Humbang Hasundutan	-	-	-	-	-
0717	Kab. Samosir	-	-	-	-	-
0718	Kab. Serdang Berdagai	-	-	-	-	-
0751	Kota Medan	-	-	-	-	-
0752	Kota Tebing Tinggi	-	-	-	-	-
0753	Kota Binjai	-	-	-	-	-
0754	Kota Pematang Siantar	-	-	-	-	-
0755	Kota Tanjung Balai	-	-	-	-	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0756	Kota Sibolga	-	-	-	-	-
0757	Kota Padang Sidempuan	-	-	-	-	-
0800	Prov. Sumatera Barat	-	-	-	-	-
0801	Kab. Agam	-	-	-	-	-
0802	Kab. Pasaman	-	-	-	-	-
0803	Kab. Limapuluh Kota	-	-	-	-	-
0804	Kab. Solok	-	-	-	-	-
0805	Kab. Padang Pariaman	-	-	-	-	-
0806	Kab. Pesisir Selatan	-	-	-	-	-
0807	Kab. Tanah Datar	-	-	-	-	-
0808	Kab. Sawahlunto Sijunjung	-	-	-	-	-
0809	Kab. Kepulauan Mentawai	-	-	-	-	-
0810	Kab. Dharmasraya	-	-	-	-	-
0811	Kab. Solok Selatan	-	-	-	-	-
0812	Kab. Pasaman Barat	-	-	-	-	-
0851	Kota Bukit Tinggi	-	-	-	-	-
0852	Kota Padang Panjang	-	-	-	-	-
0853	Kota Solok	-	-	-	-	-
0854	Kota Sawahlunto	-	-	-	-	-
0855	Kota Padang	-	-	-	-	-
0856	Kota Payakumbuh	-	-	-	-	-
0857	Kota Pariaman	-	-	-	-	-
0900	Prov. Riau	-	-	-	-	-
0901	Kab. Kampar	-	-	-	-	-
0902	Kab. Bengkalis	-	-	-	-	-
0904	Kab. Indragiri Hulu	-	-	-	-	-
0905	Kab. Indragiri Hilir	-	-	-	-	-
0906	Kab. Pelalawan	-	-	-	-	-
0907	Kab. Rokan Hulu	-	-	-	-	-
0908	Kab. Rokan Hilir	-	-	-	-	-
0909	Kab. Siak	-	-	-	-	-
0912	Kab. Kuantan Singingi	-	-	-	-	-
0951	Kota Pekanbaru	-	-	-	-	-
0953	Kota Dumai	-	-	-	-	-
1000	Prov. Jambi	70.278.170.863	70.278.170.863	-	70.278.170.863	-
1001	Kab. Batanghari	17.024.794.797	20.918.039.949	3.893.245.149	17.024.794.800	(3)
1002	Kab. Tanjung Jabung Barat	97.705.931.918	97.705.931.918	-	97.705.931.918	-
1003	Kab. Bungo	15.617.260.023	15.617.260.023	-	15.617.260.023	-
1004	Kab. Sarolangun	15.617.260.023	19.816.205.038	4.198.945.015	15.617.260.023	-
1005	Kab. Kerinci	15.617.260.023	19.816.205.038	4.198.945.015	15.617.260.023	-
1006	Kab. Merangin	15.617.260.023	15.617.260.023	-	15.617.260.023	-
1007	Kab. Tanjung Jabung Timur	57.060.135.059	57.060.135.059	-	57.060.135.059	-
1008	Kab. Tebo	15.617.260.023	15.617.260.023	-	15.617.260.023	-
1009	Kab. Muaro Jambi	15.617.260.023	15.617.260.023	-	15.617.260.023	-
1051	Kota Jambi	15.617.260.023	15.617.260.023	-	15.617.260.023	-
1100	Prov. Sumatera Selatan	251.606.346.945	251.606.346.945	-	251.606.346.945	-
1103	Kab. Musi Banyuasin	493.390.784.662	493.390.784.659	-	493.390.784.659	3
1104	Kab. Ogan Komering Ulu	39.563.576.915	39.563.576.915	-	39.563.576.915	-
1105	Kab. Muara Enim	39.115.040.023	39.115.040.023	-	39.115.040.023	-
1106	Kab. Lahat	42.501.406.370	42.501.406.370	-	42.501.406.370	-
1107	Kab. Musi Rawas	43.607.979.984	43.607.979.984	-	43.607.979.984	-
1108	Kab. Ogan Komering Ilir	38.708.707.202	38.708.707.202	-	38.708.707.202	-
1109	Kab. Banyuasin	38.708.707.202	38.708.707.202	-	38.708.707.202	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
1110	Kab. OKU Timur	38.708.707.202	38.708.707.202	-	38.708.707.202	-
1111	Kab. OKU Selatan	38.708.707.202	38.708.707.202	-	38.708.707.202	-
1112	Kab. Ogan Ilir	38.708.707.202	38.708.707.202	-	38.708.707.202	-
1151	Kota Palembang	38.708.707.202	38.708.707.202	-	38.708.707.202	-
1153	Kota Prabumulih	38.577.192.196	38.577.192.196	-	38.577.192.196	-
1154	Kota Pagar Alam	38.708.707.202	38.708.707.202	-	38.708.707.202	-
1155	Kota Lubuk Linggau	38.708.707.202	38.708.707.202	-	38.708.707.202	-
1200	Prov. Lampung	-	-	-	-	-
1201	Kab. Lampung Selatan	-	-	-	-	-
1202	Kab. Lampung Tengah	-	-	-	-	-
1203	Kab. Lampung Utara	-	-	-	-	-
1204	Kab. Lampung Barat	-	-	-	-	-
1205	Kab. Tulang Bawang	-	-	-	-	-
1206	Kab. Tanggamus	-	-	-	-	-
1207	Kab. Lampung Timur	-	-	-	-	-
1208	Kab. Way Kanan	-	-	-	-	-
1251	Kota Bandar Lampung	-	-	-	-	-
1252	Kota Metro	-	-	-	-	-
1300	Prov. Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
1301	Kab. Sambas	-	-	-	-	-
1302	Kab. Sanggau	-	-	-	-	-
1303	Kab. Sintang	-	-	-	-	-
1304	Kab. Pontianak	-	-	-	-	-
1305	Kab. Kapuas Hulu	-	-	-	-	-
1306	Kab. Ketapang	-	-	-	-	-
1307	Kab. Bengkayang	-	-	-	-	-
1308	Kab. Landak	-	-	-	-	-
1309	Kab. Melawi	-	-	-	-	-
1310	Kab. Sekadau	-	-	-	-	-
1351	Kota Pontianak	-	-	-	-	-
1352	Kota Singkawang	-	-	-	-	-
1400	Prov. Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
1401	Kab. Kapuas	-	-	-	-	-
1402	Kab. Barito Utara	-	-	-	-	-
1403	Kab. Barito Selatan	-	-	-	-	-
1404	Kab. Kotawaringin Timur	-	-	-	-	-
1405	Kab. Kotawaringin Barat	-	-	-	-	-
1406	Kab. Katingan	-	-	-	-	-
1407	Kab. Seruyan	-	-	-	-	-
1408	Kab. Sukamara	-	-	-	-	-
1409	Kab. Lamandau	-	-	-	-	-
1410	Kab. Gunung Mas	-	-	-	-	-
1411	Kab. Pulang Pisau	-	-	-	-	-
1412	Kab. Murung Raya	-	-	-	-	-
1413	Kab. Barito Timur	-	-	-	-	-
1451	Kota Palangkaraya	-	-	-	-	-
1500	Prov. Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
1501	Kab. Banjar	-	-	-	-	-
1502	Kab. Tanah Laut	-	-	-	-	-
1503	Kab. Tapin	-	-	-	-	-
1504	Kab. Hulu Sungai Selatan	-	-	-	-	-
1505	Kab. Hulu Sungai Tengah	-	-	-	-	-
1506	Kab. Barito Kuala	-	-	-	-	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
1507	Kab. Tabalong	-	-	-	-	-
1508	Kab. Kota Baru	-	-	-	-	-
1509	Kab. Hulu Sungai Utara	-	-	-	-	-
1510	Kab. Tanah Bumbu	-	-	-	-	-
1511	Kab. Balangan	-	-	-	-	-
1551	Kota Banjarmasin	-	-	-	-	-
1552	Kota Banjar Baru	-	-	-	-	-
1600	Prov. Kalimantan Timur	1.392.838.781.104	1.392.838.781.104	-	1.392.838.781.104	-
1601	Kab. Kutai Kartanegara	1.274.571.252.069	1.274.571.252.069	-	1.274.571.252.069	-
1602	Kab. Pasir	221.678.019.903	221.678.019.903	-	221.678.019.903	-
1603	Kab. Bulungan	221.651.074.680	221.651.074.680	-	221.651.074.680	-
1604	Kab. Berau	221.678.019.903	221.678.019.903	-	221.678.019.903	-
1605	Kab. Nunukan	221.678.019.903	221.678.019.903	-	221.678.019.903	-
1606	Kab. Malinau	221.678.019.903	221.678.019.903	-	221.678.019.903	-
1607	Kab. Kutai Barat	221.678.019.903	221.678.019.903	-	221.678.019.903	-
1608	Kab. Kutai Timur	221.678.019.903	221.678.019.903	-	221.678.019.903	-
1609	Kab. Penajam Paser Utara	222.289.716.812	222.289.716.812	-	222.289.716.812	-
1651	Kota Samarinda	224.580.307.645	224.580.307.645	-	224.580.307.645	-
1652	Kota Balikpapan	221.678.019.903	221.678.019.903	-	221.678.019.903	-
1653	Kota Tarakan	222.253.938.316	222.253.938.316	-	222.253.938.316	-
1654	Kota Bontang	222.206.506.259	222.206.506.259	-	222.206.506.259	-
1700	Prov. Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
1702	Kab. Minahasa	-	-	-	-	-
1703	Kab. Bolaang Mongondow	-	-	-	-	-
1704	Kab. Sangihe	-	-	-	-	-
1705	Kab. Kepulauan Talaud	-	-	-	-	-
1706	Kab. Minahasa Selatan	-	-	-	-	-
1707	Kota Tomohon	-	-	-	-	-
1708	Kab. Minahasa Utara	-	-	-	-	-
1751	Kota Manado	-	-	-	-	-
1753	Kota Bitung	-	-	-	-	-
1800	Prov. Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
1801	Kab. Poso	-	-	-	-	-
1802	Kab. Donggala	-	-	-	-	-
1803	Kab. Toli-Toli	-	-	-	-	-
1804	Kab. Banggai	-	-	-	-	-
1805	Kab. Buol	-	-	-	-	-
1806	Kab. Morowali	-	-	-	-	-
1807	Kab. Banggai Kepulauan	-	-	-	-	-
1808	Kab. Parigi Moutong	-	-	-	-	-
1809	Kab. Tojo Una Una	-	-	-	-	-
1851	Kota Palu	-	-	-	-	-
1900	Prov. Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
1901	Kab. Pinrang	-	-	-	-	-
1902	Kab. G o w a	-	-	-	-	-
1903	Kab. Wajo	-	-	-	-	-
1905	Kab. Bone	-	-	-	-	-
1906	Kab. Tana Toraja	-	-	-	-	-
1907	Kab. M a r o s	-	-	-	-	-
1909	Kab. Luwu	-	-	-	-	-
1910	Kab. Sinjai	-	-	-	-	-
1911	Kab. Bulukumba	-	-	-	-	-
1912	Kab. Bantaeng	-	-	-	-	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
1913	Kab. Jeneponto	-	-	-	-	-
1914	Kab. Selayar	-	-	-	-	-
1915	Kab. Takalar	-	-	-	-	-
1916	Kab. Barru	-	-	-	-	-
1917	Kab. Sidenreng Rappang	-	-	-	-	-
1918	Kab. Pangkajene Kepulauan	-	-	-	-	-
1919	Kab. Soppeng	-	-	-	-	-
1921	Kab. Enrekang	-	-	-	-	-
1922	Kab. Luwu Utara	-	-	-	-	-
1924	Kab. Luwu Timur	-	-	-	-	-
1951	Kota Makassar	-	-	-	-	-
1952	Kota Pare-pare	-	-	-	-	-
1953	Kota Palopo	-	-	-	-	-
2000	Prov. Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
2001	Kab. Konawe	-	-	-	-	-
2002	Kab. Buton	-	-	-	-	-
2003	Kab. Muna	-	-	-	-	-
2004	Kab. Kolaka	-	-	-	-	-
2005	Kab. Konawe Selatan	-	-	-	-	-
2006	Kab. Wakatobi	-	-	-	-	-
2007	Kab. Bombana	-	-	-	-	-
2008	Kab. Kolaka Utara	-	-	-	-	-
2051	Kota Kendari	-	-	-	-	-
2052	Kota Bau-bau	-	-	-	-	-
2100	Prov. Maluku	-	-	-	-	-
2101	Kab. Maluku Tengah	-	-	-	-	-
2102	Kab. Maluku Tenggara	-	-	-	-	-
2103	Kab. Maluku Tenggara Barat	-	-	-	-	-
2104	Kab. Pulau Buru	-	-	-	-	-
2105	Kab. Kepulauan Aru	-	-	-	-	-
2106	Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-	-	-
2107	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	-	-	-
2151	Kota Ambon	-	-	-	-	-
2200	Prov. Bali	-	-	-	-	-
2201	Kab. Buleleng	-	-	-	-	-
2202	Kab. Jembrana	-	-	-	-	-
2203	Kab. Klungkung	-	-	-	-	-
2204	Kab. Gianyar	-	-	-	-	-
2205	Kab. Karangasem	-	-	-	-	-
2206	Kab. Bangli	-	-	-	-	-
2207	Kab. Badung	-	-	-	-	-
2208	Kab. Tabanan	-	-	-	-	-
2251	Kota Denpasar	-	-	-	-	-
2300	Prov. Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
2301	Kab. Lombok Barat	-	-	-	-	-
2302	Kab. Lombok Tengah	-	-	-	-	-
2303	Kab. Lombok Timur	-	-	-	-	-
2304	Kab. Bima	-	-	-	-	-
2305	Kab. Sumbawa	-	-	-	-	-
2306	Kab. Dompu	-	-	-	-	-
2307	Kab. Sumbawa Barat	-	-	-	-	-
2351	Kota Mataram	-	-	-	-	-
2352	Kota Bima	-	-	-	-	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
2400	Prov. Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
2401	Kab. Kupang	-	-	-	-	-
2402	Kab. Belu	-	-	-	-	-
2403	Kab. Timor Tengah Utara	-	-	-	-	-
2404	Kab. Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	-
2405	Kab. Alor	-	-	-	-	-
2406	Kab. Sikka	-	-	-	-	-
2407	Kab. Flores Timur	-	-	-	-	-
2408	Kab. Ende	-	-	-	-	-
2409	Kab. Ngada	-	-	-	-	-
2410	Kab. Manggarai	-	-	-	-	-
2411	Kab. Sumba Timur	-	-	-	-	-
2412	Kab. Sumba Barat	-	-	-	-	-
2413	Kab. Lembata	-	-	-	-	-
2414	Kab. Rote Ndao	-	-	-	-	-
2415	Kab. Manggarai Barat	-	-	-	-	-
2451	Kota Kupang	-	-	-	-	-
2500	Prov. Papua	-	-	-	-	-
2501	Kab. Jayapura	-	-	-	-	-
2502	Kab. Biak Numfor	-	-	-	-	-
2504	Kab. Yapen Waropen	-	-	-	-	-
2507	Kab. Merauke	-	-	-	-	-
2508	Kab. Jayawijaya	-	-	-	-	-
2509	Kab. Paniai	-	-	-	-	-
2510	Kab. Nabire	-	-	-	-	-
2511	Kab. Puncak Jaya	-	-	-	-	-
2512	Kab. Mimika	-	-	-	-	-
2513	Kab. Mappi	-	-	-	-	-
2514	Kab. Asmat	-	-	-	-	-
2515	Kab. Boven Digoel	-	-	-	-	-
2516	Kab. Sarmi	-	-	-	-	-
2517	Kab. Keerom	-	-	-	-	-
2518	Kab. Tolikara	-	-	-	-	-
2519	Kab. Pegunungan Bintang	-	-	-	-	-
2523	Kab. Waropen	-	-	-	-	-
2524	Kab. Yahukimo	-	-	-	-	-
2525	Kab. Supiori	-	-	-	-	-
2551	Kota Jayapura	-	-	-	-	-
2600	Prov. Bengkulu	-	-	-	-	-
2601	Kab. Bengkulu Utara	-	-	-	-	-
2602	Kab. Bengkulu Selatan	-	-	-	-	-
2603	Kab. Rejang Lebong	-	-	-	-	-
2604	Kab. Seluma	-	-	-	-	-
2605	Kab. Kaur	-	-	-	-	-
2606	Kab. Mukomuko	-	-	-	-	-
2607	Kab. Lebong	-	-	-	-	-
2608	Kab. Kepahiang	-	-	-	-	-
2651	Kota Bengkulu	-	-	-	-	-
2800	Prov. Maluku Utara	-	-	-	-	-
2801	Kab. Halmahera Barat	-	-	-	-	-
2802	Kab. Halmahera Tengah	-	-	-	-	-
2803	Kab. Halmahera Utara	-	-	-	-	-
2804	Kab. Halmahera Selatan	-	-	-	-	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
2805	Kab. Kepulauan Sula	-	-	-	-	-
2806	Kab. Halmahera Timur	-	-	-	-	-
2851	Kota Ternate	-	-	-	-	-
2852	Kota Tidore Kepulauan	-	-	-	-	-
2900	Prov. Banten	-	-	-	-	-
2901	Kab. Serang	-	-	-	-	-
2902	Kab. Pandeglang	-	-	-	-	-
2903	Kab. Lebak	-	-	-	-	-
2904	Kab. Tangerang	-	-	-	-	-
2951	Kota Tangerang	-	-	-	-	-
2952	Kota Cilegon	-	-	-	-	-
3000	Prov. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
3001	Kab. Belitung	-	-	-	-	-
3002	Kab. Bangka	-	-	-	-	-
3003	Kab. Bangka Barat	-	-	-	-	-
3004	Kab. Bangka Tengah	-	-	-	-	-
3005	Kab. Bangka Selatan	-	-	-	-	-
3006	Kab. Belitung Timur	-	-	-	-	-
3051	Kota Pangkal Pinang	-	-	-	-	-
3100	Prov. Gorontalo	-	-	-	-	-
3101	Kab. Gorontalo	-	-	-	-	-
3102	Kab. Boalemo	-	-	-	-	-
3103	Kab. Pohuwato	-	-	-	-	-
3104	Kab. Bone Bolango	-	-	-	-	-
3151	Kota Gorontalo	-	-	-	-	-
3200	Prov. Kepulauan Riau	78.589.831.144	78.589.831.144	-	78.589.831.144	-
3201	Kab. Bintan	28.988.751.903	28.988.751.903	-	28.988.751.903	-
3202	Kab. Karimun	28.988.751.903	28.988.751.903	-	28.988.751.903	-
3203	Kab. Natuna	95.999.901.435	95.999.901.435	-	95.999.901.435	-
3204	Kab. Lingga	28.988.751.903	33.506.456.024	4.517.704.121	28.988.751.903	-
3251	Kota Batam	28.988.751.903	28.988.751.903	-	28.988.751.903	-
3252	Kota Tanjung Pinang	28.988.751.903	28.988.751.903	-	28.988.751.903	-
3300	Prov. Irian Jaya Barat	100.948.728	112.429.281	11.480.553	100.948.728	-
3301	Kab. Manokwari	25.362.118	25.362.118	-	25.362.118	-
3302	Kab. Sorong	202.147.458	202.147.458	-	202.147.458	-
3303	Kab. Fak Fak	25.362.118	25.362.118	-	25.362.118	-
3304	Kab. Sorong Selatan	25.362.118	25.362.118	-	25.362.118	-
3305	Kab. Raja Ampat	25.362.118	25.362.118	-	25.362.118	-
3306	Kab. Teluk Bintuni	25.362.118	25.362.118	-	25.362.118	-
3307	Kab. Teluk Wondama	25.362.118	25.362.118	-	25.362.118	-
3308	Kab. Kaimana	25.362.118	25.362.118	-	25.362.118	-
3351	Kota Sorong	25.362.118	25.362.118	-	25.362.118	-
3400	Prov. Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
3401	Kab. Majene	-	-	-	-	-
3402	Kab. Mamuju	-	-	-	-	-
3403	Kab. Mamuju Utara	-	-	-	-	-
3404	Kab. Polewali Mandar	-	-	-	-	-
3405	Kab. Mamasa	-	-	-	-	-
JUMLAH DANA SDA MINYAK BUMI		**9.703.004.171.766**	**9.741.263.758.765**	**41.832.798.190**	**9.699.430.960.575**	**3.573.211.191**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERTAMBANGAN UMUM
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0100	Prov. DKI Jakarta	-	-	-	-	-
0199	Instansi Pusat (Rekening Cadangan 2007)	-	-	-	-	-
0200	Prov. Jawa Barat	4.287.864.745	4.287.864.745	-	4.287.864.745	-
0205	Kab. Bogor	8.542.071.967	8.542.071.967	-	8.542.071.967	-
0206	Kab. Sukabumi	439.098.918	439.098.918	-	439.098.918	-
0207	Kab. Cianjur	354.979.246	458.296.633	103.317.387	354.979.246	-
0208	Kab. Bekasi	436.943.507	436.943.507	-	436.943.507	-
0209	Kab. Karawang	354.765.478	354.765.478	-	354.765.478	-
0210	Kab. Purwakarta	354.765.478	458.082.865	103.317.387	354.765.478	-
0211	Kab. Subang	354.765.478	354.765.478	-	354.765.478	-
0212	Kab. Bandung	355.753.894	355.753.894	-	355.753.894	-
0213	Kab. Sumedang	354.765.478	354.765.478	-	354.765.478	-
0214	Kab. Garut	354.765.478	458.082.865	103.317.387	354.765.478	-
0215	Kab. Tasikmalaya	354.765.478	458.082.865	103.317.387	354.765.478	-
0216	Kab. Ciamis	361.951.270	361.951.270	-	361.951.270	-
0217	Kab. Cirebon	355.142.950	355.142.950	-	355.142.950	-
0218	Kab. Kuningan	354.765.478	354.765.478	-	354.765.478	-
0219	Kab. Indramayu	354.765.478	354.765.478	-	354.765.478	-
0220	Kab. Majalengka	354.765.478	354.765.478	-	354.765.478	-
0251	Kota Bandung	354.765.478	458.082.865	103.317.387	354.765.478	-
0252	Kota Bogor	354.765.478	458.082.865	103.317.387	354.765.478	-
0253	Kota Sukabumi	354.765.478	354.765.478	-	354.765.478	-
0254	Kota Cirebon	354.765.478	354.765.478	-	354.765.478	-
0257	Kota Bekasi	274.504.089	377.821.476	103.317.387	274.504.089	-
0258	Kota Depok	354.765.478	458.082.865	103.317.387	354.765.478	-
0260	Kota Tasikmalaya	354.765.478	354.765.478	-	354.765.478	-
0261	Kota Cimahi	354.765.478	354.765.478	-	354.765.478	-
0262	Kota Banjar	354.765.478	354.765.478	-	354.765.478	-
0300	Prov. Jawa Tengah	16.013.635	16.013.635	-	16.013.635	-
0301	Kab. Semarang	-	-	-	-	-
0302	Kab. Kendal	-	-	-	-	-
0303	Kab. Demak	-	-	-	-	-
0304	Kab. Grobogan	-	-	-	-	-
0305	Kab. Pekalongan	8.988.800	8.988.800	-	8.988.800	-
0306	Kab. Batang	-	-	-	-	-
0307	Kab. Tegal	-	-	-	-	-
0308	Kab. Brebes	-	-	-	-	-
0309	Kab. Pati	-	-	-	-	-
0310	Kab. Kudus	-	-	-	-	-
0311	Kab. Pemalang	-	-	-	-	-
0312	Kab. Jepara	-	-	-	-	-
0313	Kab. Rembang	-	-	-	-	-
0314	Kab. Blora	-	-	-	-	-
0315	Kab. Banyumas	-	-	-	-	-
0316	Kab. Cilacap	13.280.590	13.280.590	-	13.280.590	-
0317	Kab. Purbalingga	-	-	-	-	-
0318	Kab. Banjarnegara	-	-	-	-	-
0319	Kab. Magelang	-	-	-	-	-
0320	Kab. Temanggung	-	-	-	-	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0321	Kab. Wonosobo	-	-	-	-	-
0322	Kab. Purworejo	39.296.320	39.296.320	-	39.296.320	-
0323	Kab. Kebumen	-	-	-	-	-
0324	Kab. Klaten	-	-	-	-	-
0325	Kab. Boyolali	-	-	-	-	-
0326	Kab. Sragen	290.048	290.048	-	290.048	-
0327	Kab. Sukoharjo	-	-	-	-	-
0328	Kab. Karanganyar	2.198.784	2.198.784	-	2.198.784	-
0329	Kab. Wonogiri	-	-	-	-	-
0351	Kota Semarang	-	-	-	-	-
0352	Kota Salatiga	-	-	-	-	-
0353	Kota Pekalongan	-	-	-	-	-
0354	Kota Tegal	-	-	-	-	-
0355	Kota Magelang	-	-	-	-	-
0356	Kota Surakarta	-	-	-	-	-
0400	Prov. DI Yogyakarta	4.565.904	4.565.904	-	4.565.904	-
0401	Kab. Bantul	-	-	-	-	-
0402	Kab. Sleman	-	-	-	-	-
0403	Kab. Gunung Kidul	-	-	-	-	-
0404	Kab. Kulon Progo	18.263.616	18.263.616	-	18.263.616	-
0451	Kota Yogyakarta	-	-	-	-	-
0500	Prov. Jawa Timur	22.444.678	22.444.678	-	22.444.678	-
0501	Kab. Gresik	245.294	245.294	-	245.294	-
0502	Kab. Mojokerto	245.294	245.294	-	245.294	-
0503	Kab. Sidoarjo	245.294	245.294	-	245.294	-
0504	Kab. Jombang	245.294	245.294	-	245.294	-
0505	Kab. Sampang	245.294	245.294	-	245.294	-
0506	Kab. Pamekasan	245.294	245.294	-	245.294	-
0507	Kab. Sumenep	245.294	245.294	-	245.294	-
0508	Kab. Bangkalan	245.294	245.294	-	245.294	-
0509	Kab. Bondowoso	245.294	245.294	-	245.294	-
0510	Kab. Situbondo	245.294	245.294	-	245.294	-
0511	Kab. Banyuwangi	9.503.407	9.930.927	427.520	9.503.407	-
0512	Kab. Jember	1.903.214	1.903.214	-	1.903.214	-
0513	Kab. Malang	245.294	245.294	-	245.294	-
0514	Kab. Pasuruan	245.294	245.294	-	245.294	-
0515	Kab. Probolinggo	245.294	245.294	-	245.294	-
0516	Kab. Lumajang	8.315.694	8.315.694	-	8.315.694	-
0517	Kab. Kediri	245.294	245.294	-	245.294	-
0518	Kab. Tulungagung	338.606	338.606	-	338.606	-
0519	Kab. Nganjuk	245.294	245.294	-	245.294	-
0520	Kab. Trenggalek	31.998.927	31.998.927	-	31.998.927	-
0521	Kab. Blitar	245.294	245.294	-	245.294	-
0522	Kab. Madiun	15.072.264	15.072.264	-	15.072.264	-
0523	Kab. Ngawi	1.614.382	1.614.382	-	1.614.382	-
0524	Kab. Magetan	245.294	245.294	-	245.294	-
0525	Kab. Ponorogo	13.541.298	13.541.298	-	13.541.298	-
0526	Kab. Pacitan	377.387	377.387	-	377.387	-
0527	Kab. Bojonegoro	245.294	245.294	-	245.294	-
0528	Kab. Tuban	245.294	245.294	-	245.294	-
0529	Kab. Lamongan	245.294	245.294	-	245.294	-
0551	Kota Surabaya	245.294	245.294	-	245.294	-
0552	Kota Mojokerto	245.294	245.294	-	245.294	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0553	Kota Malang	245.294	245.294	-	245.294	-
0554	Kota Pasuruan	245.294	245.294	-	245.294	-
0555	Kota Probollinggo	245.294	245.294	-	245.294	-
0556	Kota Blitar	245.294	245.294	-	245.294	-
0557	Kota Kediri	245.294	245.294	-	245.294	-
0558	Kota Madiun	245.294	245.294	-	245.294	-
0559	Kota Batu	245.294	245.294	-	245.294	-
0600	Prov. Nanggroe Aceh Darussalam	10.246.763	10.246.763	-	10.246.763	-
0601	Kab. Aceh Besar	3.643.104	3.643.104	-	3.643.104	-
0602	Kab. Aceh Pidie	9.654.713	9.654.713	-	9.654.713	-
0603	Kab. Aceh Utara	-	-	-	-	-
0604	Kab. Aceh Timur	-	-	-	-	-
0605	Kab. Aceh Selatan	-	-	-	-	-
0606	Kab. Aceh Barat	27.148.310	27.148.310	-	27.148.310	-
0607	Kab. Aceh Tengah	-	-	-	-	-
0608	Kab. Aceh Tenggara	-	-	-	-	-
0609	Kab. Simeulue	-	-	-	-	-
0610	Kab. Aceh Singkil	540.927	540.927	-	540.927	-
0611	Kab. Bireun	-	-	-	-	-
0612	Kab. Aceh Barat Daya	-	-	-	-	-
0613	Kab. Gayo Lues	-	-	-	-	-
0614	Kab. Aceh Jaya	-	-	-	-	-
0615	Kab. Nagan Raya	-	-	-	-	-
0616	Kab. Aceh Tamiang	-	-	-	-	-
0617	Kab. Bener Meriah	-	-	-	-	-
0651	Kota Banda Aceh	-	-	-	-	-
0652	Kota Sabang	-	-	-	-	-
0653	Kota Langsa	-	-	-	-	-
0654	Kota Lhokseumawe	-	-	-	-	-
0700	Prov. Sumatera Utara	231.900.010	231.900.010	-	231.900.010	-
0701	Kab. Deli Serdang	-	-	-	-	-
0702	Kab. Tanah Karo	-	-	-	-	-
0703	Kab. Langkat	-	-	-	-	-
0704	Kab. Tapanuli Tengah	151.869.108	151.869.108	-	151.869.108	-
0705	Kab. Simalungun	-	-	-	-	-
0706	Kab. Labuhan Batu	-	-	-	-	-
0707	Kab. Dairi	75.551.388	75.551.388	-	75.551.388	-
0708	Kab. Tapanuli Utara	68.627.045	68.627.045	-	68.627.045	-
0709	Kab. Tapanuli Selatan	314.692.152	314.692.152	-	314.692.152	-
0710	Kab. Asahan	-	-	-	-	-
0711	Kab. Nias	1.485.760	1.485.760	-	1.485.760	-
0712	Kab. Toba Samosir	-	-	-	-	-
0713	Kab. Mandailing Natal	255.238.500	255.238.500	-	255.238.500	-
0714	Kab. Nias Selatan	-	-	-	-	-
0715	Kab. Pakpak Bharat	2.802.462	2.802.462	-	2.802.462	-
0716	Kab. Humbang Hasundutan	-	-	-	-	-
0717	Kab. Samosir	-	-	-	-	-
0718	Kab. Serdang Berdagai	-	-	-	-	-
0751	Kota Medan	-	-	-	-	-
0752	Kota Tebing Tinggi	-	-	-	-	-
0753	Kota Binjai	-	-	-	-	-
0754	Kota Pematang Siantar	-	-	-	-	-
0755	Kota Tanjung Balai	-	-	-	-	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0756	Kota Sibolga	-	-	-	-	-
0757	Kota Padang Sidempuan	57.333.621	57.333.621	-	57.333.621	-
0800	Prov. Sumatera Barat	1.039.920.524	1.223.050.170	183.129.646	1.039.920.524	-
0801	Kab. Agam	116.283.284	116.283.284	-	116.283.284	-
0802	Kab. Pasaman	115.386.337	115.386.337	-	115.386.337	-
0803	Kab. Limapuluh Kota	187.775.924	187.775.924	-	187.775.924	-
0804	Kab. Solok	165.352.604	165.352.604	-	165.352.604	-
0805	Kab. Padang Pariaman	115.386.337	120.072.463	4.686.126	115.386.337	-
0806	Kab. Pesisir Selatan	115.386.337	115.386.337	-	115.386.337	-
0807	Kab. Tanah Datar	115.386.337	115.386.337	-	115.386.337	-
0808	Kab. Sawahlunto Sijunjung	373.085.468	373.085.468	-	373.085.468	-
0809	Kab. Kepulauan Mentawai	115.386.337	120.072.463	4.686.126	115.386.337	-
0810	Kab. Dharmasraya	96.676.857	96.676.857	-	96.676.857	-
0811	Kab. Solok Selatan	96.676.857	96.676.857	-	96.676.857	-
0812	Kab. Pasaman Barat	96.676.857	101.362.983	4.686.126	96.676.857	-
0851	Kota Bukit Tinggi	115.386.337	115.386.337	-	115.386.337	-
0852	Kota Padang Panjang	265.503.205	265.503.205	-	265.503.205	-
0853	Kota Solok	115.386.337	115.386.337	-	115.386.337	-
0854	Kota Sawahlunto	1.626.497.084	1.626.497.084	-	1.626.497.084	-
0855	Kota Padang	115.386.337	115.386.337	-	115.386.337	-
0856	Kota Payakumbuh	115.386.337	115.386.337	-	115.386.337	-
0857	Kota Pariaman	96.676.857	96.676.857	-	96.676.857	-
0900	Prov. Riau	3.727.555.930	3.727.555.930	-	3.727.555.930	-
0901	Kab. Kampar	677.982.927	677.982.927	-	677.982.927	-
0902	Kab. Bengkalis	679.070.607	679.070.607	-	679.070.607	-
0904	Kab. Indragiri Hulu	6.654.526.117	6.654.526.117	-	6.654.526.117	-
0905	Kab. Indragiri Hilir	709.274.055	709.274.055	-	709.274.055	-
0906	Kab. Pelalawan	680.404.572	680.404.572	-	680.404.572	-
0907	Kab. Rokan Hulu	677.982.927	677.982.927	-	677.982.927	-
0908	Kab. Rokan Hilir	677.982.927	677.982.927	-	677.982.927	-
0909	Kab. Siak	816.805.234	816.805.234	-	816.805.234	-
0912	Kab. Kuantan Singingi	1.210.565.964	1.210.565.964	-	1.210.565.964	-
0951	Kota Pekanbaru	677.982.927	677.982.927	-	677.982.927	-
0953	Kota Dumai	677.982.927	677.982.927	-	677.982.927	-
1000	Prov. Jambi	240.365.283	240.365.283	-	240.365.283	-
1001	Kab. Batanghari	478.162.234	736.325.503	258.163.269	478.162.234	-
1002	Kab. Tanjung Jabung Barat	24.535.348	24.535.348	-	24.535.348	-
1003	Kab. Bungo	176.089.795	176.089.795	-	176.089.795	-
1004	Kab. Sarolangun	135.461.644	204.541.695	69.080.051	135.461.644	-
1005	Kab. Kerinci	24.535.348	30.147.445	5.612.097	24.535.348	-
1006	Kab. Merangin	24.535.348	24.535.348	-	24.535.348	-
1007	Kab. Tanjung Jabung Timur	24.535.348	24.535.348	-	24.535.348	-
1008	Kab. Tebo	24.535.348	24.535.348	-	24.535.348	-
1009	Kab. Muaro Jambi	24.535.348	24.535.348	-	24.535.348	-
1051	Kota Jambi	24.535.348	24.535.348	-	24.535.348	-
1100	Prov. Sumatera Selatan	27.436.170.535	27.436.170.535	-	27.436.170.535	-
1103	Kab. Musi Banyuasin	4.895.459.126	4.895.459.126	-	4.895.459.126	-
1104	Kab. Ogan Komering Ulu	4.373.501.180	4.373.501.180	-	4.373.501.180	-
1105	Kab. Muara Enim	42.870.408.459	42.870.408.459	-	42.870.408.459	-
1106	Kab. Lahat	15.980.927.612	15.980.927.612	-	15.980.927.612	-
1107	Kab. Musi Rawas	4.494.148.078	4.494.148.078	-	4.494.148.078	-
1108	Kab. Ogan Komering Ilir	4.127.762.196	4.127.762.196	-	4.127.762.196	-
1109	Kab. Banyuasin	4.183.259.855	4.183.259.855	-	4.183.259.855	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
1110	Kab. OKU Timur	4.116.642.448	4.116.642.448	-	4.116.642.448	-
1111	Kab. OKU Selatan	4.095.762.196	4.095.762.196	-	4.095.762.196	-
1112	Kab. Ogan Ilir	4.095.762.196	4.095.762.196	-	4.095.762.196	-
1151	Kota Palembang	4.127.762.196	4.127.762.196	-	4.127.762.196	-
1153	Kota Prabumulih	4.127.762.196	4.127.762.196	-	4.127.762.196	-
1154	Kota Pagar Alam	4.127.762.196	4.127.762.196	-	4.127.762.196	-
1155	Kota Lubuk Linggau	4.127.762.196	4.127.762.196	-	4.127.762.196	-
1200	Prov. Lampung	88.874.749	88.874.749	-	88.874.749	-
1201	Kab. Lampung Selatan	16.331.445	16.331.445	-	16.331.445	-
1202	Kab. Lampung Tengah	989.764	989.764	-	989.764	-
1203	Kab. Lampung Utara	989.764	989.764	-	989.764	-
1204	Kab. Lampung Barat	59.890.759	59.890.759	-	59.890.759	-
1205	Kab. Tulang Bawang	989.764	989.764	-	989.764	-
1206	Kab. Tanggamus	272.059.507	272.059.507	-	272.059.507	-
1207	Kab. Lampung Timur	989.764	989.764	-	989.764	-
1208	Kab. Way Kanan	1.278.697	1.278.697	-	1.278.697	-
1251	Kota Bandar Lampung	989.764	989.764	-	989.764	-
1252	Kota Metro	989.764	989.764	-	989.764	-
1300	Prov. Kalimantan Barat	4.117.363.365	4.117.363.365	-	4.117.363.365	-
1301	Kab. Sambas	725.742.604	813.475.127	87.732.523	725.742.604	-
1302	Kab. Sanggau	1.042.913.742	1.042.913.742	-	1.042.913.742	-
1303	Kab. Sintang	764.222.936	764.222.936	-	764.222.936	-
1304	Kab. Pontianak	695.744.346	695.744.346	-	695.744.346	-
1305	Kab. Kapuas Hulu	741.994.830	741.994.830	-	741.994.830	-
1306	Kab. Ketapang	8.322.545.656	8.322.545.656	-	8.322.545.656	-
1307	Kab. Bengkayang	694.976.142	694.976.142	-	694.976.142	-
1308	Kab. Landak	701.247.415	701.247.415	-	701.247.415	-
1309	Kab. Melawi	693.377.742	693.377.742	-	693.377.742	-
1310	Kab. Sekadau	699.932.545	787.588.268	87.655.723	699.932.545	-
1351	Kota Pontianak	693.377.742	693.377.742	-	693.377.742	-
1352	Kota Singkawang	693.377.742	693.377.742	-	693.377.742	-
1400	Prov. Kalimantan Tengah	8.811.720.458	8.811.720.458	-	8.811.720.458	-
1401	Kab. Kapuas	1.464.711.764	1.464.711.764	-	1.464.711.764	-
1402	Kab. Barito Utara	2.059.083.622	2.059.083.622	-	2.059.083.622	-
1403	Kab. Barito Selatan	1.288.661.485	1.288.661.485	-	1.288.661.485	-
1404	Kab. Kotawaringin Timur	2.067.017.250	2.327.640.630	260.623.380	2.067.017.250	-
1405	Kab. Kotawaringin Barat	1.797.840.658	1.797.840.658	-	1.797.840.658	-
1406	Kab. Katingan	1.403.434.504	1.403.434.504	-	1.403.434.504	-
1407	Kab. Seruyan	1.249.660.885	1.249.660.885	-	1.249.660.885	-
1408	Kab. Sukamara	1.244.223.221	1.244.223.221	-	1.244.223.221	-
1409	Kab. Lamandau	1.244.223.221	1.363.810.851	119.587.630	1.244.223.221	-
1410	Kab. Gunung Mas	1.366.540.300	1.366.540.300	-	1.366.540.300	-
1411	Kab. Pulang Pisau	1.244.223.221	1.244.223.221	-	1.244.223.221	-
1412	Kab. Murung Raya	16.253.639.846	16.253.639.846	-	16.253.639.846	-
1413	Kab. Barito Timur	1.296.783.767	1.296.783.767	-	1.296.783.767	-
1451	Kota Palangkaraya	1.266.838.064	1.266.838.064	-	1.266.838.064	-
1500	Prov. Kalimantan Selatan	87.672.987.485	87.672.987.485	-	87.672.987.485	-
1501	Kab. Banjar	30.693.599.054	34.756.213.433	4.062.614.379	30.693.599.054	-
1502	Kab. Tanah Laut	36.861.473.967	36.861.473.967	-	36.861.473.967	-
1503	Kab. Tapin	19.314.151.156	19.314.151.156	-	19.314.151.156	-
1504	Kab. Hulu Sungai Selatan	15.059.177.169	15.059.177.169	-	15.059.177.169	-
1505	Kab. Hulu Sungai Tengah	14.427.671.363	14.427.671.363	-	14.427.671.363	-
1506	Kab. Barito Kuala	14.384.288.320	14.384.288.320	-	14.384.288.320	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
1507	Kab. Tabalong	45.306.325.825	45.306.325.825	-	45.306.325.825	-
1508	Kab. Kota Baru	47.358.116.049	47.358.116.049	-	47.358.116.049	-
1509	Kab. Hulu Sungai Utara	14.986.975.533	14.986.975.533	-	14.986.975.533	-
1510	Kab. Tanah Bumbu	38.218.034.089	38.218.034.089	-	38.218.034.089	-
1511	Kab. Balangan	44.594.575.582	44.594.575.582	-	44.594.575.582	-
1551	Kota Banjarmasin	14.384.288.320	14.384.288.320	-	14.384.288.320	-
1552	Kota Banjar Baru	15.103.273.465	15.103.273.465	-	15.103.273.465	-
1600	Prov. Kalimantan Timur	301.937.489.572	301.937.489.572	-	301.937.489.572	-
1601	Kab. Kutai Kartanegara	131.813.318.382	131.813.318.382	-	131.813.318.382	-
1602	Kab. Pasir	88.412.025.384	88.412.025.384	-	88.412.025.384	-
1603	Kab. Bulungan	50.128.615.023	50.128.615.023	-	50.128.615.023	-
1604	Kab. Berau	66.901.062.462	66.901.062.462	-	66.901.062.462	-
1605	Kab. Nunukan	60.123.135.996	60.123.135.996	-	60.123.135.996	-
1606	Kab. Malinau	52.237.171.683	52.237.171.683	-	52.237.171.683	-
1607	Kab. Kutai Barat	116.478.618.605	116.478.618.605	-	116.478.618.605	-
1608	Kab. Kutai Timur	379.091.458.921	379.091.458.921	-	379.091.458.921	-
1609	Kab. Penajam Paser Utara	50.331.178.016	50.331.178.016	-	50.331.178.016	-
1651	Kota Samarinda	62.237.015.221	62.237.015.221	-	62.237.015.221	-
1652	Kota Balikpapan	49.998.194.366	49.998.194.366	-	49.998.194.366	-
1653	Kota Tarakan	49.997.366.810	49.997.366.810	-	49.997.366.810	-
1654	Kota Bontang	50.000.797.381	50.000.797.381	-	50.000.797.381	-
1700	Prov. Sulawesi Utara	958.596.524	958.596.524	-	958.596.524	-
1702	Kab. Minahasa	167.086.935	167.086.935	-	167.086.935	-
1703	Kab. Bolaang Mongondow	2.409.369.964	2.409.369.964	-	2.409.369.964	-
1704	Kab. Sangihe	167.086.935	167.086.935	-	167.086.935	-
1705	Kab. Kepulauan Talaud	167.086.935	167.086.935	-	167.086.935	-
1706	Kab. Minahasa Selatan	206.873.042	206.873.042	-	206.873.042	-
1707	Kota Tomohon	167.086.935	167.086.935	-	167.086.935	-
1708	Kab. Minahasa Utara	210.889.687	210.889.687	-	210.889.687	-
1751	Kota Manado	167.179.887	167.179.887	-	167.179.887	-
1753	Kota Bitung	171.725.773	171.725.773	-	171.725.773	-
1800	Prov. Sulawesi Tengah	246.852.984	246.852.984	-	246.852.984	-
1801	Kab. Poso	27.464.504	27.464.504	-	27.464.504	-
1802	Kab. Donggala	31.063.085	40.538.744	9.475.659	31.063.085	-
1803	Kab. Toli-Toli	29.106.094	29.106.094	-	29.106.094	-
1804	Kab. Banggai	100.584.281	100.584.281	-	100.584.281	-
1805	Kab. Buol	14.512.208	14.512.208	-	14.512.208	-
1806	Kab. Morowali	673.729.560	673.729.560	-	673.729.560	-
1807	Kab. Banggai Kepulauan	-	-	-	-	-
1808	Kab. Parigi Moutong	72.345.708	72.345.708	-	72.345.708	-
1809	Kab. Tojo Una Una	480.000	480.000	-	480.000	-
1851	Kota Palu	38.126.495	38.126.495	-	38.126.495	-
1900	Prov. Sulawesi Selatan	40.084.959.468	40.089.560.702	4.601.234	40.084.959.468	-
1901	Kab. Pinrang	3.625.259.653	3.625.259.653	-	3.625.259.653	-
1902	Kab. G o w a	3.625.259.653	3.625.259.653	-	3.625.259.653	-
1903	Kab. Wajo	3.628.352.604	3.628.352.604	-	3.628.352.604	-
1905	Kab. Bone	3.625.259.653	3.625.259.653	-	3.625.259.653	-
1906	Kab. Tana Toraja	3.625.259.653	3.625.259.653	-	3.625.259.653	-
1907	Kab. M a r o s	3.625.259.653	3.625.259.653	-	3.625.259.653	-
1909	Kab. Luwu	3.730.592.842	3.730.592.842	-	3.730.592.842	-
1910	Kab. Sinjai	3.625.259.653	3.625.259.653	-	3.625.259.653	-
1911	Kab. Bulukumba	3.625.259.653	3.625.259.653	-	3.625.259.653	-
1912	Kab. Bantaeng	3.625.259.653	3.625.259.653	-	3.625.259.653	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
1913	Kab. Jeneponto	3.625.667.269	3.625.667.269	-	3.625.667.269	-
1914	Kab. Selayar	3.625.259.653	3.625.259.653	-	3.625.259.653	-
1915	Kab. Takalar	3.625.451.403	3.625.451.403	-	3.625.451.403	-
1916	Kab. Barru	3.625.259.653	3.625.259.653	-	3.625.259.653	-
1917	Kab. Sidenreng Rappang	3.669.461.287	3.669.461.287	-	3.669.461.287	-
1918	Kab. Pangkajene Kepulauan	3.625.259.653	3.625.259.653	-	3.625.259.653	-
1919	Kab. Soppeng	3.625.259.653	3.625.259.653	-	3.625.259.653	-
1921	Kab. Enrekang	3.636.335.808	3.636.335.808	-	3.636.335.808	-
1922	Kab. Luwu Utara	3.685.594.677	3.685.594.677	-	3.685.594.677	-
1924	Kab. Luwu Timur	80.359.487.166	80.359.487.166	-	80.359.487.166	-
1951	Kota Makassar	3.625.259.653	3.625.259.653	-	3.625.259.653	-
1952	Kota Pare-pare	3.625.259.653	3.625.259.653	-	3.625.259.653	-
1953	Kota Palopo	3.625.259.653	3.625.259.653	-	3.625.259.653	-
2000	Prov. Sulawesi Tenggara	18.425.623.409	18.425.623.409	-	18.425.623.409	-
2001	Kab. Konawe	4.705.660.638	4.705.660.638	-	4.705.660.638	-
2002	Kab. Buton	4.039.677.235	4.039.677.235	-	4.039.677.235	-
2003	Kab. Muna	4.037.370.643	4.037.370.643	-	4.037.370.643	-
2004	Kab. Kolaka	36.523.027.396	36.523.027.396	-	36.523.027.396	-
2005	Kab. Konawe Selatan	4.113.733.804	4.113.733.804	-	4.113.733.804	-
2006	Kab. Wakatobi	4.043.812.717	4.043.812.717	-	4.043.812.717	-
2007	Kab. Bombana	4.055.230.412	4.055.230.412	-	4.055.230.412	-
2008	Kab. Kolaka Utara	4.109.239.479	4.610.076.882	500.837.403	4.109.239.479	-
2051	Kota Kendari	4.037.370.643	4.037.370.643	-	4.037.370.643	-
2052	Kota Bau-bau	4.037.370.643	4.037.370.643	-	4.037.370.643	-
2100	Prov. Maluku	7.480.000	7.480.000	-	7.480.000	-
2101	Kab. Maluku Tengah	-	-	-	-	-
2102	Kab. Maluku Tenggara	-	-	-	-	-
2103	Kab. Maluku Tenggara Barat	29.920.000	29.920.000	-	29.920.000	-
2104	Kab. Pulau Buru	-	-	-	-	-
2105	Kab. Kepulauan Aru	-	-	-	-	-
2106	Kab. Seram Bagian Barat	-	-	-	-	-
2107	Kab. Seram Bagian Timur	-	-	-	-	-
2151	Kota Ambon	-	-	-	-	-
2200	Prov. Bali	-	-	-	-	-
2201	Kab. Buleleng	-	-	-	-	-
2202	Kab. Jembrana	-	-	-	-	-
2203	Kab. Klungkung	-	-	-	-	-
2204	Kab. Gianyar	-	-	-	-	-
2205	Kab. Karangasem	-	-	-	-	-
2206	Kab. Bangli	-	-	-	-	-
2207	Kab. Badung	-	-	-	-	-
2208	Kab. Tabanan	-	-	-	-	-
2251	Kota Denpasar	-	-	-	-	-
2300	Prov. Nusa Tenggara Barat	29.296.591.738	29.299.056.205	2.464.467	29.296.591.738	-
2301	Kab. Lombok Barat	7.227.378.788	7.227.378.788	-	7.227.378.788	-
2302	Kab. Lombok Tengah	7.227.378.788	7.227.378.788	-	7.227.378.788	-
2303	Kab. Lombok Timur	7.227.378.788	7.227.378.788	-	7.227.378.788	-
2304	Kab. Bima	7.231.733.877	7.231.733.877	-	7.231.733.877	-
2305	Kab. Sumbawa	7.858.049.741	7.858.049.741	-	7.858.049.741	-
2306	Kab. Dompu	7.242.843.446	7.252.701.315	9.857.869	7.242.843.446	-
2307	Kab. Sumbawa Barat	58.716.845.944	58.716.845.944	-	58.716.845.944	-
2351	Kota Mataram	7.227.378.788	7.227.378.788	-	7.227.378.788	-
2352	Kota Bima	7.227.378.788	7.227.378.788	-	7.227.378.788	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
2400	Prov. Nusa Tenggara Timur	1.596.393	1.596.393	-	1.596.393	-
2401	Kab. Kupang	-	-	-	-	-
2402	Kab. Belu	-	-	-	-	-
2403	Kab. Timor Tengah Utara	-	-	-	-	-
2404	Kab. Timor Tengah Selatan	-	-	-	-	-
2405	Kab. Alor	-	-	-	-	-
2406	Kab. Sikka	-	-	-	-	-
2407	Kab. Flores Timur	-	-	-	-	-
2408	Kab. Ende	-	-	-	-	-
2409	Kab. Ngada	-	-	-	-	-
2410	Kab. Manggarai	6.385.572	6.385.572	-	6.385.572	-
2411	Kab. Sumba Timur	-	-	-	-	-
2412	Kab. Sumba Barat	-	-	-	-	-
2413	Kab. Lembata	-	-	-	-	-
2414	Kab. Rote Ndao	-	-	-	-	-
2415	Kab. Manggarai Barat	-	-	-	-	-
2451	Kota Kupang	-	-	-	-	-
2500	Prov. Papua	240.510.298.485	240.510.298.485	-	240.510.298.485	-
2501	Kab. Jayapura	25.430.368.929	25.430.368.929	-	25.430.368.929	-
2502	Kab. Biak Numfor	25.240.164.100	25.240.164.100	-	25.240.164.100	-
2504	Kab. Yapen Waropen	25.240.164.100	25.240.164.100	-	25.240.164.100	-
2507	Kab. Merauke	25.240.164.100	25.240.164.100	-	25.240.164.100	-
2508	Kab. Jayawijaya	25.275.873.954	25.275.873.954	-	25.275.873.954	-
2509	Kab. Paniai	25.831.359.599	25.831.359.599	-	25.831.359.599	-
2510	Kab. Nabire	25.695.961.905	25.695.961.905	-	25.695.961.905	-
2511	Kab. Puncak Jaya	25.347.178.729	25.347.178.729	-	25.347.178.729	-
2512	Kab. Mimika	480.141.426.899	480.141.426.899	-	480.141.426.899	-
2513	Kab. Mappi	25.240.164.100	25.240.164.100	-	25.240.164.100	-
2514	Kab. Asmat	25.240.164.100	25.240.164.100	-	25.240.164.100	-
2515	Kab. Boven Digoel	25.240.164.100	25.240.164.100	-	25.240.164.100	-
2516	Kab. Sarmi	25.716.127.364	25.716.127.364	-	25.716.127.364	-
2517	Kab. Keerom	25.411.109.018	25.411.109.018	-	25.411.109.018	-
2518	Kab. Tolikara	25.400.722.357	25.400.722.357	-	25.400.722.357	-
2519	Kab. Pegunungan Bintang	25.306.163.893	25.306.163.893	-	25.306.163.893	-
2523	Kab. Waropen	25.323.424.376	25.323.424.376	-	25.323.424.376	-
2524	Kab. Yahukimo	25.240.164.100	25.240.164.100	-	25.240.164.100	-
2525	Kab. Supiori	25.240.164.100	25.240.164.100	-	25.240.164.100	-
2551	Kota Jayapura	25.240.164.100	25.240.164.100	-	25.240.164.100	-
2600	Prov. Bengkulu	587.996.818	587.996.818	-	587.996.818	-
2601	Kab. Bengkulu Utara	1.054.273.985	1.054.273.985	-	1.054.273.985	-
2602	Kab. Bengkulu Selatan	133.366.563	133.366.563	-	133.366.563	-
2603	Kab. Rejang Lebong	133.366.563	133.366.563	-	133.366.563	-
2604	Kab. Seluma	359.444.145	359.444.145	-	359.444.145	-
2605	Kab. Kaur	134.566.307	134.566.307	-	134.566.307	-
2606	Kab. Mukomuko	121.036.410	121.036.410	-	121.036.410	-
2607	Kab. Lebong	149.200.163	149.200.163	-	149.200.163	-
2608	Kab. Kepahiang	133.366.563	164.273.884	30.907.321	133.366.563	-
2651	Kota Bengkulu	133.366.563	133.366.563	-	133.366.563	-
2800	Prov. Maluku Utara	35.248.691.470	39.591.971.237	4.343.279.767	35.248.691.470	-
2801	Kab. Halmahera Barat	10.015.285.392	11.255.533.051	1.240.247.659	10.015.285.392	-
2802	Kab. Halmahera Tengah	11.687.175.460	11.687.175.460	-	11.687.175.460	-
2803	Kab. Halmahera Utara	16.895.099.654	22.372.190.836	5.477.091.182	16.895.099.654	-
2804	Kab. Halmahera Selatan	10.100.435.472	11.340.683.131	1.240.247.659	10.100.435.472	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
2805	Kab. Kepulauan Sula	10.008.966.672	10.008.966.672	-	10.008.966.672	-
2806	Kab. Halmahera Timur	62.269.869.879	62.269.869.879	-	62.269.869.879	-
2851	Kota Ternate	10.008.966.672	10.008.966.672	-	10.008.966.672	-
2852	Kota Tidore Kepulauan	10.008.966.672	11.249.214.331	1.240.247.659	10.008.966.672	-
2900	Prov. Banten	18.348.888	18.348.888	-	18.348.888	-
2901	Kab. Serang	18.972.329	18.972.329	-	18.972.329	-
2902	Kab. Pandeglang	-	-	-	-	-
2903	Kab. Lebak	52.136.979	52.136.979	-	52.136.979	-
2904	Kab. Tangerang	692.644	692.644	-	692.644	-
2951	Kota Tangerang	-	-	-	-	-
2952	Kota Cilegon	1.593.600	1.593.600	-	1.593.600	-
3000	Prov. Bangka Belitung	30.967.986.163	30.967.986.163	-	30.967.986.163	-
3001	Kab. Belitung	16.561.658.639	16.561.658.639	-	16.561.658.639	-
3002	Kab. Bangka	22.318.925.483	22.318.925.483	-	22.318.925.483	-
3003	Kab. Bangka Barat	15.603.301.460	15.603.301.460	-	15.603.301.460	-
3004	Kab. Bangka Tengah	21.954.668.472	21.954.668.472	-	21.954.668.472	-
3005	Kab. Bangka Selatan	20.808.443.368	20.808.443.368	-	20.808.443.368	-
3006	Kab. Belitung Timur	14.822.638.858	14.822.638.858	-	14.822.638.858	-
3051	Kota Pangkal Pinang	11.769.746.432	11.769.746.432	-	11.769.746.432	-
3100	Prov. Gorontalo	22.039.129	22.039.129	-	22.039.129	-
3101	Kab. Gorontalo	54.955.474	54.955.474	-	54.955.474	-
3102	Kab. Boalemo	-	-	-	-	-
3103	Kab. Pohuwato	33.201.042	33.201.042	-	33.201.042	-
3104	Kab. Bone Bolango	-	-	-	-	-
3151	Kota Gorontalo	-	-	-	-	-
3200	Prov. Kepulauan Riau	4.827.514.315	4.827.514.315	-	4.827.514.315	-
3201	Kab. Bintan	4.461.673.401	4.461.673.401	-	4.461.673.401	-
3202	Kab. Karimun	6.185.819.256	6.185.819.256	-	6.185.819.256	-
3203	Kab. Natuna	1.879.071.274	1.879.071.274	-	1.879.071.274	-
3204	Kab. Lingga	2.390.958.529	3.034.855.499	643.896.970	2.390.958.529	-
3251	Kota Batam	1.880.170.154	1.880.170.154	-	1.880.170.154	-
3252	Kota Tanjung Pinang	1.879.071.274	1.879.071.274	-	1.879.071.274	-
3300	Prov. Irian Jaya Barat	807.537.188	807.537.188	-	807.537.188	-
3301	Kab. Manokwari	179.617.434	179.617.434	-	179.617.434	-
3302	Kab. Sorong	179.617.434	179.617.434	-	179.617.434	-
3303	Kab. Fak Fak	179.617.434	179.617.434	-	179.617.434	-
3304	Kab. Sorong Selatan	179.617.434	179.617.434	-	179.617.434	-
3305	Kab. Raja Ampat	1.510.360.533	1.510.360.533	-	1.510.360.533	-
3306	Kab. Teluk Bintuni	179.617.434	179.617.434	-	179.617.434	-
3307	Kab. Teluk Wondama	179.617.434	179.617.434	-	179.617.434	-
3308	Kab. Kaimana	462.466.175	462.466.175	-	462.466.175	-
3351	Kota Sorong	179.617.434	179.617.434	-	179.617.434	-
3400	Prov. Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
3401	Kab. Majene	-	-	-	-	-
3402	Kab. Mamuju	-	-	-	-	-
3403	Kab. Mamuju Utara	-	-	-	-	-
3404	Kab. Polewali Mandar	-	-	-	-	-
3405	Kab. Mamasa	-	-	-	-	-
JUMLAH DANA SDA MINYAK BUMI		**4.206.852.464.846**	**4.227.570.843.387**	**20.718.378.541**	**4.206.852.464.846**	-

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM KEHUTANAN
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0100	Prov. DKI Jakarta	-	-	-	-	-
0199	Instansi Pusat (Rekening Cadangan 2007)	723.880.783.418	723.880.783.418	-	723.880.783.418	-
0200	Prov. Jawa Barat	950.781.151	950.781.151	-	950.781.151	-
0205	Kab. Bogor	143.371.344	143.371.344	-	143.371.344	-
0206	Kab. Sukabumi	137.001.447	137.001.447	-	137.001.447	-
0207	Kab. Cianjur	1.048.957.063	1.048.957.063	-	1.048.957.063	-
0208	Kab. Bekasi	79.407.088	79.407.088	-	79.407.088	-
0209	Kab. Karawang	79.407.088	79.407.088	-	79.407.088	-
0210	Kab. Purwakarta	292.216.214	292.216.214	-	292.216.214	-
0211	Kab. Subang	79.407.088	79.407.088	-	79.407.088	-
0212	Kab. Bandung	79.677.879	79.677.879	-	79.677.879	-
0213	Kab. Sumedang	223.412.306	223.412.306	-	223.412.306	-
0214	Kab. Garut	86.130.391	86.130.391	-	86.130.391	-
0215	Kab. Tasikmalaya	121.743.009	121.743.009	-	121.743.009	-
0216	Kab. Ciamis	132.807.334	132.807.334	-	132.807.334	-
0217	Kab. Cirebon	79.407.088	79.407.088	-	79.407.088	-
0218	Kab. Kuningan	107.733.237	107.733.237	-	107.733.237	-
0219	Kab. Indramayu	313.419.248	313.419.248	-	313.419.248	-
0220	Kab. Majalengka	87.911.455	87.911.455	-	87.911.455	-
0251	Kota Bandung	79.407.088	79.407.088	-	79.407.088	-
0252	Kota Bogor	79.407.088	79.407.088	-	79.407.088	-
0253	Kota Sukabumi	80.066.430	80.066.430	-	80.066.430	-
0254	Kota Cirebon	79.407.088	79.407.088	-	79.407.088	-
0257	Kota Bekasi	79.407.088	79.407.088	-	79.407.088	-
0258	Kota Depok	79.407.088	92.340.034	12.932.946	79.407.088	-
0260	Kota Tasikmalaya	79.407.088	79.407.088	-	79.407.088	-
0261	Kota Cimahi	79.407.088	79.407.088	-	79.407.088	-
0262	Kota Banjar	75.199.247	75.199.247	-	75.199.247	-
0300	Prov. Jawa Tengah	4.406.510.547	4.406.510.547	-	4.406.510.547	-
0301	Kab. Semarang	268.643.070	268.643.070	-	268.643.070	-
0302	Kab. Kendal	624.999.344	624.999.344	-	624.999.344	-
0303	Kab. Demak	259.418.776	259.418.776	-	259.418.776	-
0304	Kab. Grobogan	821.802.344	821.802.344	-	821.802.344	-
0305	Kab. Pekalongan	297.475.373	297.475.373	-	297.475.373	-
0306	Kab. Batang	805.515.328	805.515.328	-	805.515.328	-
0307	Kab. Tegal	588.016.385	588.016.385	-	588.016.385	-
0308	Kab. Brebes	634.404.952	634.404.952	-	634.404.952	-
0309	Kab. Pati	338.366.424	338.366.424	-	338.366.424	-
0310	Kab. Kudus	259.206.502	259.206.502	-	259.206.502	-
0311	Kab. Pemalang	710.016.317	710.016.317	-	710.016.317	-
0312	Kab. Jepara	259.538.543	259.538.543	-	259.538.543	-
0313	Kab. Rembang	1.066.346.405	1.255.014.533	188.668.128	1.066.346.405	-
0314	Kab. Blora	4.820.064.861	4.820.064.861	-	4.820.064.861	-
0315	Kab. Banyumas	306.713.418	306.713.418	-	306.713.418	-
0316	Kab. Cilacap	319.835.402	319.835.402	-	319.835.402	-
0317	Kab. Purbalingga	283.060.867	283.060.867	-	283.060.867	-
0318	Kab. Banjarnegara	377.716.107	386.736.228	9.020.121	377.716.107	-
0319	Kab. Magelang	262.040.614	262.040.614	-	262.040.614	-
0320	Kab. Temanggung	328.709.136	328.709.136	-	328.709.136	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0321	Kab. Wonosobo	270.946.905	279.967.026	9.020.121	270.946.905	-
0322	Kab. Purworejo	273.106.857	273.106.857	-	273.106.857	-
0323	Kab. Kebumen	270.126.185	270.126.185	-	270.126.185	-
0324	Kab. Klaten	259.206.502	259.206.502	-	259.206.502	-
0325	Kab. Boyolali	320.354.261	320.354.261	-	320.354.261	-
0326	Kab. Sragen	259.297.902	259.297.902	-	259.297.902	-
0327	Kab. Sukoharjo	259.206.502	259.206.502	-	259.206.502	-
0328	Kab. Karanganyar	259.694.173	259.694.173	-	259.694.173	-
0329	Kab. Wonogiri	265.372.503	265.372.503	-	265.372.503	-
0351	Kota Semarang	260.807.691	269.827.812	9.020.121	260.807.691	-
0352	Kota Salatiga	259.206.502	259.206.502	-	259.206.502	-
0353	Kota Pekalongan	259.206.502	259.206.502	-	259.206.502	-
0354	Kota Tegal	259.206.502	259.206.502	-	259.206.502	-
0355	Kota Magelang	259.206.502	259.206.502	-	259.206.502	-
0356	Kota Surakarta	259.206.502	259.206.502	-	259.206.502	-
0400	Prov. DI Yogyakarta	1.487.308	1.487.308	-	1.487.308	-
0401	Kab. Bantul	1.046.503	1.046.503	-	1.046.503	-
0402	Kab. Sleman	743.654	743.654	-	743.654	-
0403	Kab. Gunung Kidul	2.602.878	2.602.878	-	2.602.878	-
0404	Kab. Kulon Progo	812.545	812.545	-	812.545	-
0451	Kota Yogyakarta	743.654	743.654	-	743.654	-
0500	Prov. Jawa Timur	2.770.377.875	2.770.377.875	-	2.770.377.875	-
0501	Kab. Gresik	151.729.384	151.729.384	-	151.729.384	-
0502	Kab. Mojokerto	159.879.023	159.879.023	-	159.879.023	-
0503	Kab. Sidoarjo	149.750.155	149.750.155	-	149.750.155	-
0504	Kab. Jombang	225.846.619	225.846.619	-	225.846.619	-
0505	Kab. Sampang	149.750.155	149.750.155	-	149.750.155	-
0506	Kab. Pamekasan	149.750.155	149.750.155	-	149.750.155	-
0507	Kab. Sumenep	149.750.155	149.750.155	-	149.750.155	-
0508	Kab. Bangkalan	149.750.155	149.750.155	-	149.750.155	-
0509	Kab. Bondowoso	310.177.409	310.177.409	-	310.177.409	-
0510	Kab. Situbondo	219.830.819	219.830.819	-	219.830.819	-
0511	Kab. Banyuwangi	1.069.671.624	1.069.671.624	-	1.069.671.624	-
0512	Kab. Jember	536.722.043	536.722.043	-	536.722.043	-
0513	Kab. Malang	153.202.458	153.202.458	-	153.202.458	-
0514	Kab. Pasuruan	157.972.245	157.972.245	-	157.972.245	-
0515	Kab. Probolinggo	285.207.598	285.207.598	-	285.207.598	-
0516	Kab. Lumajang	250.170.425	250.170.425	-	250.170.425	-
0517	Kab. Kediri	426.533.451	426.533.451	-	426.533.451	-
0518	Kab. Tulungagung	189.321.987	189.321.987	-	189.321.987	-
0519	Kab. Nganjuk	667.498.141	667.498.141	-	667.498.141	-
0520	Kab. Trenggalek	181.876.390	181.876.390	-	181.876.390	-
0521	Kab. Blitar	302.082.117	302.082.117	-	302.082.117	-
0522	Kab. Madiun	1.018.008.063	1.018.008.063	-	1.018.008.063	-
0523	Kab. Ngawi	316.714.462	316.714.462	-	316.714.462	-
0524	Kab. Magetan	163.199.868	163.199.868	-	163.199.868	-
0525	Kab. Ponorogo	225.331.455	225.331.455	-	225.331.455	-
0526	Kab. Pacitan	190.521.654	190.521.654	-	190.521.654	-
0527	Kab. Bojonegoro	639.198.416	639.198.416	-	639.198.416	-
0528	Kab. Tuban	819.994.176	819.994.176	-	819.994.176	-
0529	Kab. Lamongan	298.367.698	298.367.698	-	298.367.698	-
0551	Kota Surabaya	149.750.155	149.750.155	-	149.750.155	-
0552	Kota Mojokerto	149.750.155	149.750.155	-	149.750.155	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0553	Kota Malang	149.750.155	149.750.155	-	149.750.155	-
0554	Kota Pasuruan	149.750.155	149.750.155	-	149.750.155	-
0555	Kota Probollinggo	149.750.155	149.750.155	-	149.750.155	-
0556	Kota Blitar	149.750.155	149.750.155	-	149.750.155	-
0557	Kota Kediri	149.750.155	149.750.155	-	149.750.155	-
0558	Kota Madiun	149.750.155	149.750.155	-	149.750.155	-
0559	Kota Batu	175.701.936	175.701.936	-	175.701.936	-
0600	Prov. Nanggroe Aceh Darussalam	336.659.284	336.659.284	-	336.659.284	-
0601	Kab. Aceh Besar	51.468.108	51.468.108	-	51.468.108	-
0602	Kab. Aceh Pidie	55.495.046	80.491.374	24.996.328	55.495.046	-
0603	Kab. Aceh Utara	20.143.405	20.143.405	-	20.143.405	-
0604	Kab. Aceh Timur	20.143.405	20.143.405	-	20.143.405	-
0605	Kab. Aceh Selatan	20.143.405	20.143.405	-	20.143.405	-
0606	Kab. Aceh Barat	50.697.689	52.523.971	1.826.282	50.697.689	-
0607	Kab. Aceh Tengah	92.976.630	96.861.980	3.885.350	92.976.630	-
0608	Kab. Aceh Tenggara	186.426.876	190.418.253	3.991.377	186.426.876	-
0609	Kab. Simeulue	32.163.120	33.989.402	1.826.282	32.163.120	-
0610	Kab. Aceh Singkil	659.287.574	661.113.856	1.826.282	659.287.574	-
0611	Kab. Bireun	54.918.635	54.918.635	-	54.918.635	-
0612	Kab. Aceh Barat Daya	35.255.529	35.255.529	-	35.255.529	-
0613	Kab. Gayo Lues	20.143.405	21.969.687	3.652.564	18.317.123	1.826.282
0614	Kab. Aceh Jaya	20.786.365	20.786.365	-	20.786.365	-
0615	Kab. Nagan Raya	34.077.193	34.077.193	-	34.077.193	-
0616	Kab. Aceh Tamiang	20.143.405	20.143.405	-	20.143.405	-
0617	Kab. Bener Meriah	22.506.640	22.506.640	-	22.506.640	-
0651	Kota Banda Aceh	20.143.405	20.143.405	-	20.143.405	-
0652	Kota Sabang	20.143.405	20.143.405	-	20.143.405	-
0653	Kota Langsa	20.143.405	20.143.405	-	20.143.405	-
0654	Kota Lhokseumawe	20.143.405	20.143.405	-	20.143.405	-
0700	Prov. Sumatera Utara	1.025.059.715	1.039.071.935	14.012.220	1.025.059.715	-
0701	Kab. Deli Serdang	94.399.326	94.399.326	-	94.399.326	-
0702	Kab. Tanah Karo	907.984.177	909.151.862	1.167.685	907.984.177	-
0703	Kab. Langkat	94.399.326	95.567.011	1.167.685	94.399.326	-
0704	Kab. Tapanuli Tengah	96.713.937	96.713.937	-	96.713.937	-
0705	Kab. Simalungun	103.393.395	103.393.395	-	103.393.395	-
0706	Kab. Labuhan Batu	317.044.847	340.421.402	23.376.555	317.044.847	-
0707	Kab. Dairi	241.903.832	241.903.832	-	241.903.832	-
0708	Kab. Tapanuli Utara	116.909.635	116.909.635	-	116.909.635	-
0709	Kab. Tapanuli Selatan	1.495.679.969	1.495.679.969	-	1.495.679.969	-
0710	Kab. Asahan	94.399.326	94.399.326	-	94.399.326	-
0711	Kab. Nias	334.690.196	334.690.196	-	334.690.196	-
0712	Kab. Toba Samosir	145.395.549	145.395.549	-	145.395.549	-
0713	Kab. Mandailing Natal	281.982.287	281.982.287	-	281.982.287	-
0714	Kab. Nias Selatan	50.935.370	52.103.055	1.167.685	50.935.370	-
0715	Kab. Pakpak Bharat	50.935.370	50.935.370	-	50.935.370	-
0716	Kab. Humbang Hasundutan	1.252.199.332	1.252.199.332	-	1.252.199.332	-
0717	Kab. Samosir	362.758.875	363.926.560	1.167.685	362.758.875	-
0718	Kab. Serdang Berdagai	50.935.370	50.935.370	-	50.935.370	-
0751	Kota Medan	94.399.326	95.567.011	1.167.685	94.399.326	-
0752	Kota Tebing Tinggi	94.399.326	94.399.326	-	94.399.326	-
0753	Kota Binjai	94.399.326	95.567.011	1.167.685	94.399.326	-
0754	Kota Pematang Siantar	94.399.326	94.399.326	-	94.399.326	-
0755	Kota Tanjung Balai	94.399.326	94.399.326	-	94.399.326	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0756	Kota Sibolga	94.399.326	95.567.011	1.167.685	94.399.326	-
0757	Kota Padang Sidempuan	94.399.326	95.567.011	1.167.685	94.399.326	-
0800	Prov. Sumatera Barat	1.517.621.495	2.427.649.463	910.027.968	1.517.621.495	-
0801	Kab. Agam	100.010.049	100.010.049	-	100.010.049	-
0802	Kab. Pasaman	562.183.504	562.183.504	-	562.183.504	-
0803	Kab. Limapuluh Kota	100.039.878	100.039.878	-	100.039.878	-
0804	Kab. Solok	100.010.049	100.010.049	-	100.010.049	-
0805	Kab. Padang Pariaman	100.179.835	102.802.872	2.623.037	100.179.835	-
0806	Kab. Pesisir Selatan	121.739.723	121.739.723	-	121.739.723	-
0807	Kab. Tanah Datar	102.596.924	102.596.924	-	102.596.924	-
0808	Kab. Sawahlunto Sijunjung	249.953.259	249.953.259	-	249.953.259	-
0809	Kab. Kepulauan Mentawai	5.612.021.757	5.616.699.907	4.678.150	5.612.021.757	-
0810	Kab. Dharmasraya	233.683.673	233.683.673	-	233.683.673	-
0811	Kab. Solok Selatan	1.058.017.107	1.058.017.107	-	1.058.017.107	-
0812	Kab. Pasaman Barat	77.492.745	81.605.889	4.113.144	77.492.745	-
0851	Kota Bukit Tinggi	100.010.049	100.010.049	-	100.010.049	-
0852	Kota Padang Panjang	100.010.049	100.010.049	-	100.010.049	-
0853	Kota Solok	100.060.557	100.060.557	-	100.060.557	-
0854	Kota Sawahlunto	100.183.600	100.183.600	-	100.183.600	-
0855	Kota Padang	100.084.716	100.084.716	-	100.084.716	-
0856	Kota Payakumbuh	100.010.049	100.010.049	-	100.010.049	-
0857	Kota Pariaman	100.010.049	100.010.049	-	100.010.049	-
0900	Prov. Riau	7.524.954.032	7.524.954.032	-	7.524.954.032	-
0901	Kab. Kampar	3.083.300.034	3.083.300.034	-	3.083.300.034	-
0902	Kab. Bengkalis	4.259.459.980	4.259.459.980	-	4.259.459.980	-
0904	Kab. Indragiri Hulu	10.500.924.935	10.500.924.935	-	10.500.924.935	-
0905	Kab. Indragiri Hilir	7.580.459.593	7.580.459.593	-	7.580.459.593	-
0906	Kab. Pelalawan	20.053.708.633	20.053.708.633	-	20.053.708.633	-
0907	Kab. Rokan Hulu	2.246.994.305	2.246.994.305	-	2.246.994.305	-
0908	Kab. Rokan Hilir	8.049.622.575	8.049.622.575	-	8.049.622.575	-
0909	Kab. Siak	7.261.333.369	7.261.333.369	-	7.261.333.369	-
0912	Kab. Kuantan Singingi	3.227.647.728	3.227.647.728	-	3.227.647.728	-
0951	Kota Pekanbaru	1.484.507.262	1.484.507.262	-	1.484.507.262	-
0953	Kota Dumai	3.094.851.528	3.094.851.528	-	3.094.851.528	-
1000	Prov. Jambi	3.108.982.655	3.108.982.655	-	3.108.982.655	-
1001	Kab. Batanghari	14.737.008.305	15.043.382.030	306.373.725	14.737.008.305	-
1002	Kab. Tanjung Jabung Barat	4.386.247.156	4.386.247.156	-	4.386.247.156	-
1003	Kab. Bungo	2.903.839.767	2.903.839.767	-	2.903.839.767	-
1004	Kab. Sarolangun	1.436.678.052	1.472.897.892	36.219.840	1.436.678.052	-
1005	Kab. Kerinci	629.852.432	659.636.034	29.783.602	629.852.432	-
1006	Kab. Merangin	1.509.446.069	1.509.446.069	-	1.509.446.069	-
1007	Kab. Tanjung Jabung Timur	2.163.179.134	2.163.179.134	-	2.163.179.134	-
1008	Kab. Tebo	1.641.357.699	1.641.357.699	-	1.641.357.699	-
1009	Kab. Muaro Jambi	1.529.612.284	1.529.612.284	-	1.529.612.284	-
1051	Kota Jambi	629.309.757	629.309.757	-	629.309.757	-
1100	Prov. Sumatera Selatan	1.054.939.972	1.054.939.972	-	1.054.939.972	-
1103	Kab. Musi Banyuasin	2.791.144.036	2.791.144.036	-	2.791.144.036	-
1104	Kab. Ogan Komering Ulu	199.988.239	199.988.239	-	199.988.239	-
1105	Kab. Muara Enim	994.134.507	994.134.507	-	994.134.507	-
1106	Kab. Lahat	233.004.898	233.004.898	-	233.004.898	-
1107	Kab. Musi Rawas	411.940.190	411.940.190	-	411.940.190	-
1108	Kab. Ogan Komering Ilir	163.895.032	163.895.032	-	163.895.032	-
1109	Kab. Banyuasin	166.390.862	166.390.862	-	166.390.862	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
1110	Kab. OKU Timur	143.781.207	143.781.207	-	143.781.207	-
1111	Kab. OKU Selatan	138.367.469	138.367.469	-	138.367.469	-
1112	Kab. Ogan Ilir	138.367.469	138.367.469	-	138.367.469	-
1151	Kota Palembang	165.415.948	165.415.948	-	165.415.948	-
1153	Kota Prabumulih	163.895.032	163.895.032	-	163.895.032	-
1154	Kota Pagar Alam	163.895.032	163.895.032	-	163.895.032	-
1155	Kota Lubuk Linggau	163.895.032	163.895.032	-	163.895.032	-
1200	Prov. Lampung	200.948.712	200.948.712	-	200.948.712	-
1201	Kab. Lampung Selatan	44.655.269	44.655.269	-	44.655.269	-
1202	Kab. Lampung Tengah	44.655.269	44.655.269	-	44.655.269	-
1203	Kab. Lampung Utara	44.655.269	44.655.269	-	44.655.269	-
1204	Kab. Lampung Barat	44.655.269	44.655.269	-	44.655.269	-
1205	Kab. Tulang Bawang	319.878.724	319.878.724	-	319.878.724	-
1206	Kab. Tanggamus	44.655.269	44.655.269	-	44.655.269	-
1207	Kab. Lampung Timur	44.655.269	44.655.269	-	44.655.269	-
1208	Kab. Way Kanan	126.673.967	126.673.967	-	126.673.967	-
1251	Kota Bandar Lampung	44.655.269	44.655.269	-	44.655.269	-
1252	Kota Metro	44.655.269	44.655.269	-	44.655.269	-
1300	Prov. Kalimantan Barat	4.486.662.584	4.486.662.584	-	4.486.662.584	-
1301	Kab. Sambas	679.440.922	706.258.563	26.817.641	679.440.922	-
1302	Kab. Sanggau	703.468.672	703.468.672	-	703.468.672	-
1303	Kab. Sintang	8.315.164.172	8.315.164.172	-	8.315.164.172	-
1304	Kab. Pontianak	956.531.559	956.531.559	-	956.531.559	-
1305	Kab. Kapuas Hulu	3.242.975.035	3.242.975.035	-	3.242.975.035	-
1306	Kab. Ketapang	9.038.589.490	9.038.589.490	-	9.038.589.490	-
1307	Kab. Bengkayang	661.731.739	661.731.739	-	661.731.739	-
1308	Kab. Landak	717.982.485	717.982.485	-	717.982.485	-
1309	Kab. Melawi	1.333.547.004	1.333.547.004	-	1.333.547.004	-
1310	Kab. Sekadau	305.549.935	332.367.576	26.817.641	305.549.935	-
1351	Kota Pontianak	661.176.801	661.176.801	-	661.176.801	-
1352	Kota Singkawang	661.176.801	661.176.801	-	661.176.801	-
1400	Prov. Kalimantan Tengah	25.848.527.727	25.848.527.727	-	25.848.527.727	-
1401	Kab. Kapuas	10.695.130.567	10.695.130.567	-	10.695.130.567	-
1402	Kab. Barito Utara	20.891.797.624	20.891.797.624	-	20.891.797.624	-
1403	Kab. Barito Selatan	4.850.832.218	4.850.832.218	-	4.850.832.218	-
1404	Kab. Kotawaringin Timur	32.406.567.333	48.646.129.186	16.239.561.853	32.406.567.333	-
1405	Kab. Kotawaringin Barat	12.657.955.054	12.657.955.054	-	12.657.955.054	-
1406	Kab. Katingan	47.963.507.500	47.963.507.500	-	47.963.507.500	-
1407	Kab. Seruyan	31.705.997.147	31.705.997.147	-	31.705.997.147	-
1408	Kab. Sukamara	3.600.477.290	3.600.477.290	-	3.600.477.290	-
1409	Kab. Lamandau	7.574.275.257	7.972.408.965	398.133.708	7.574.275.257	-
1410	Kab. Gunung Mas	4.492.133.474	4.492.133.474	-	4.492.133.474	-
1411	Kab. Pulang Pisau	3.600.606.909	3.600.606.909	-	3.600.606.909	-
1412	Kab. Murung Raya	21.583.646.294	21.583.646.294	-	21.583.646.294	-
1413	Kab. Barito Timur	3.600.477.290	3.600.477.290	-	3.600.477.290	-
1451	Kota Palangkaraya	3.603.128.662	3.603.128.662	-	3.603.128.662	-
1500	Prov. Kalimantan Selatan	1.020.833.235	1.020.833.235	-	1.020.833.235	-
1501	Kab. Banjar	403.980.745	459.263.932	55.283.187	403.980.745	-
1502	Kab. Tanah Laut	406.076.948	406.076.948	-	406.076.948	-
1503	Kab. Tapin	209.643.905	209.643.905	-	209.643.905	-
1504	Kab. Hulu Sungai Selatan	200.683.069	200.683.069	-	200.683.069	-
1505	Kab. Hulu Sungai Tengah	183.635.991	183.635.991	-	183.635.991	-
1506	Kab. Barito Kuala	384.487.526	384.487.526	-	384.487.526	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
1507	Kab. Tabalong	2.339.716.257	2.339.716.257	-	2.339.716.257	-
1508	Kab. Kota Baru	1.684.820.333	1.684.820.333	-	1.684.820.333	-
1509	Kab. Hulu Sungai Utara	946.487.487	946.487.487	-	946.487.487	-
1510	Kab. Tanah Bumbu	186.716.592	186.716.592	-	186.716.592	-
1511	Kab. Balangan	102.653.276	102.653.276	-	102.653.276	-
1551	Kota Banjarmasin	194.408.919	194.408.919	-	194.408.919	-
1552	Kota Banjar Baru	184.103.475	184.103.475	-	184.103.475	-
1600	Prov. Kalimantan Timur	43.934.044.418	43.934.044.418	-	43.934.044.418	-
1601	Kab. Kutai Kartanegara	17.223.217.366	17.223.217.366	-	17.223.217.366	-
1602	Kab. Pasir	22.416.413.776	22.416.413.776	-	22.416.413.776	-
1603	Kab. Bulungan	40.792.953.443	40.792.953.443	-	40.792.953.443	-
1604	Kab. Berau	50.536.237.139	50.536.237.139	-	50.536.237.139	-
1605	Kab. Nunukan	17.519.405.907	17.519.405.907	-	17.519.405.907	-
1606	Kab. Malinau	24.359.227.403	24.359.227.403	-	24.359.227.403	-
1607	Kab. Kutai Barat	44.509.319.854	44.509.319.854	-	44.509.319.854	-
1608	Kab. Kutai Timur	36.581.252.275	36.581.252.275	-	36.581.252.275	-
1609	Kab. Penajam Paser Utara	7.155.562.270	7.155.562.270	-	7.155.562.270	-
1651	Kota Samarinda	6.554.619.763	6.554.619.763	-	6.554.619.763	-
1652	Kota Balikpapan	6.554.619.763	6.554.619.763	-	6.554.619.763	-
1653	Kota Tarakan	6.554.619.763	6.554.619.763	-	6.554.619.763	-
1654	Kota Bontang	6.554.619.763	6.554.619.763	-	6.554.619.763	-
1700	Prov. Sulawesi Utara	130.998.521	133.913.635	2.915.114	130.998.521	-
1702	Kab. Minahasa	33.245.457	33.974.235	728.778	33.245.457	-
1703	Kab. Bolaang Mongondow	877.508.376	883.338.606	5.830.230	877.508.376	-
1704	Kab. Sangihe	33.245.457	33.974.235	728.778	33.245.457	-
1705	Kab. Kepulauan Talaud	33.245.457	33.245.457	-	33.245.457	-
1706	Kab. Minahasa Selatan	31.194.472	31.923.250	728.778	31.194.472	-
1707	Kota Tomohon	32.652.028	32.652.028	-	32.652.028	-
1708	Kab. Minahasa Utara	31.923.250	32.652.028	728.778	31.923.250	-
1751	Kota Manado	33.736.849	34.465.627	728.778	33.736.849	-
1753	Kota Bitung	35.319.082	35.319.082	-	35.319.082	-
1800	Prov. Sulawesi Tengah	1.610.557.273	1.610.557.273	-	1.610.557.273	-
1801	Kab. Poso	301.168.892	301.168.892	-	301.168.892	-
1802	Kab. Donggala	491.967.955	504.861.099	12.893.144	491.967.955	-
1803	Kab. Toli-Toli	3.192.570.928	3.192.570.928	-	3.192.570.928	-
1804	Kab. Banggai	2.245.986.290	2.263.333.314	17.347.024	2.245.986.290	-
1805	Kab. Buol	488.863.385	488.863.385	-	488.863.385	-
1806	Kab. Morowali	2.623.819.601	2.631.779.531	7.959.930	2.623.819.601	-
1807	Kab. Banggai Kepulauan	214.685.596	222.645.526	7.959.930	214.685.596	-
1808	Kab. Parigi Moutong	594.750.196	594.750.196	-	594.750.196	-
1809	Kab. Tojo Una Una	350.598.933	350.598.933	-	350.598.933	-
1851	Kota Palu	214.685.596	214.685.596	-	214.685.596	-
1900	Prov. Sulawesi Selatan	1.189.641.228	1.192.027.873	2.386.645	1.189.641.228	-
1901	Kab. Pinrang	102.592.306	102.592.306	-	102.592.306	-
1902	Kab. G o w a	121.488.959	121.705.927	216.968	121.488.959	-
1903	Kab. Wajo	89.344.401	89.344.401	-	89.344.401	-
1905	Kab. Bone	89.674.757	89.674.757	-	89.674.757	-
1906	Kab. Tana Toraja	90.236.772	90.236.772	-	90.236.772	-
1907	Kab. M a r o s	89.746.221	89.963.189	216.968	89.746.221	-
1909	Kab. Luwu	95.537.149	95.537.149	-	95.537.149	-
1910	Kab. Sinjai	89.344.401	89.561.369	216.968	89.344.401	-
1911	Kab. Bulukumba	89.344.401	89.561.369	216.968	89.344.401	-
1912	Kab. Bantaeng	89.344.401	89.561.369	216.968	89.344.401	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
1913	Kab. Jeneponto	89.344.401	89.561.369	216.968	89.344.401	-
1914	Kab. Selayar	103.646.869	103.646.869	-	103.646.869	-
1915	Kab. Takalar	89.344.401	89.561.369	216.968	89.344.401	-
1916	Kab. Barru	96.159.168	96.376.136	216.968	96.159.168	-
1917	Kab. Sidenreng Rappang	102.777.299	102.777.299	-	102.777.299	-
1918	Kab. Pangkajene Kepulauan	89.344.401	89.344.401	-	89.344.401	-
1919	Kab. Soppeng	92.784.444	179.182.576	86.398.132	92.784.444	-
1921	Kab. Enrekang	91.870.865	92.087.833	216.968	91.870.865	-
1922	Kab. Luwu Utara	1.126.733.366	1.126.733.366	-	1.126.733.366	-
1924	Kab. Luwu Timur	292.995.725	292.995.725	-	292.995.725	-
1951	Kota Makassar	89.344.401	89.344.401	-	89.344.401	-
1952	Kota Pare-pare	89.734.995	89.734.995	-	89.734.995	-
1953	Kota Palopo	89.344.401	89.344.401	-	89.344.401	-
2000	Prov. Sulawesi Tenggara	430.814.453	430.814.453	-	430.814.453	-
2001	Kab. Konawe	1.424.498.170	1.424.498.170	-	1.424.498.170	-
2002	Kab. Buton	541.703.691	541.703.691	-	541.703.691	-
2003	Kab. Muna	220.370.341	220.370.341	-	220.370.341	-
2004	Kab. Kolaka	385.390.258	385.390.258	-	385.390.258	-
2005	Kab. Konawe Selatan	57.716.587	57.716.587	-	57.716.587	-
2006	Kab. Wakatobi	51.903.168	51.903.168	-	51.903.168	-
2007	Kab. Bombana	55.116.992	55.116.992	-	55.116.992	-
2008	Kab. Kolaka Utara	51.903.168	51.903.168	-	51.903.168	-
2051	Kota Kendari	130.803.243	130.803.243	-	130.803.243	-
2052	Kota Bau-bau	130.803.243	130.803.243	-	130.803.243	-
2100	Prov. Maluku	1.745.368.117	1.745.368.117	-	1.745.368.117	-
2101	Kab. Maluku Tengah	1.424.260.670	1.424.260.670	-	1.424.260.670	-
2102	Kab. Maluku Tenggara	459.884.174	526.726.162	66.841.988	459.884.174	-
2103	Kab. Maluku Tenggara Barat	458.059.461	458.059.461	-	458.059.461	-
2104	Kab. Pulau Buru	10.940.425.869	10.940.425.869	-	10.940.425.869	-
2105	Kab. Kepulauan Aru	641.250.161	707.730.147	66.479.986	641.250.161	-
2106	Kab. Seram Bagian Barat	657.914.365	749.817.345	91.902.980	657.914.365	-
2107	Kab. Seram Bagian Timur	1.218.640.249	1.218.640.249	-	1.218.640.249	-
2151	Kota Ambon	458.059.461	524.539.447	66.479.986	458.059.461	-
2200	Prov. Bali	-	-	-	-	-
2201	Kab. Buleleng	-	-	-	-	-
2202	Kab. Jembrana	-	-	-	-	-
2203	Kab. Klungkung	-	-	-	-	-
2204	Kab. Gianyar	-	-	-	-	-
2205	Kab. Karangasem	-	-	-	-	-
2206	Kab. Bangli	-	-	-	-	-
2207	Kab. Badung	-	-	-	-	-
2208	Kab. Tabanan	-	-	-	-	-
2251	Kota Denpasar	-	-	-	-	-
2300	Prov. Nusa Tenggara Barat	55.834.443	55.834.443	-	55.834.443	-
2301	Kab. Lombok Barat	32.604.817	32.604.817	-	32.604.817	-
2302	Kab. Lombok Tengah	13.958.610	13.958.610	-	13.958.610	-
2303	Kab. Lombok Timur	13.958.610	13.958.610	-	13.958.610	-
2304	Kab. Bima	718.296.631	718.296.631	-	718.296.631	-
2305	Kab. Sumbawa	40.897.097	40.897.097	-	40.897.097	-
2306	Kab. Dompu	13.958.610	13.958.610	-	13.958.610	-
2307	Kab. Sumbawa Barat	13.958.610	13.958.610	-	13.958.610	-
2351	Kota Mataram	13.958.610	13.958.610	-	13.958.610	-
2352	Kota Bima	13.958.610	13.958.610	-	13.958.610	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
2400	Prov. Nusa Tenggara Timur	6.523.088	6.523.088	-	6.523.088	-
2401	Kab. Kupang	869.744	869.744	-	869.744	-
2402	Kab. Belu	869.744	869.744	-	869.744	-
2403	Kab. Timor Tengah Utara	869.744	869.744	-	869.744	-
2404	Kab. Timor Tengah Selatan	869.744	869.744	-	869.744	-
2405	Kab. Alor	869.744	993.349	123.605	869.744	-
2406	Kab. Sikka	1.244.242	1.501.466	257.224	1.244.242	-
2407	Kab. Flores Timur	869.744	869.744	-	869.744	-
2408	Kab. Ende	869.744	993.349	123.605	869.744	-
2409	Kab. Ngada	869.744	869.744	-	869.744	-
2410	Kab. Manggarai	869.744	869.744	-	869.744	-
2411	Kab. Sumba Timur	869.744	993.349	123.605	869.744	-
2412	Kab. Sumba Barat	11.030.253	11.153.858	123.605	11.030.253	-
2413	Kab. Lembata	886.231	886.231	-	886.231	-
2414	Kab. Rote Ndao	869.744	993.349	123.605	869.744	-
2415	Kab. Manggarai Barat	869.744	993.349	123.605	869.744	-
2451	Kota Kupang	2.494.681	2.618.286	123.605	2.494.681	-
2500	Prov. Papua	5.777.360.384	5.841.155.350	63.794.966	5.777.360.384	-
2501	Kab. Jayapura	2.339.015.772	2.339.015.772	-	2.339.015.772	-
2502	Kab. Biak Numfor	682.323.708	689.038.968	6.715.260	682.323.708	-
2504	Kab. Yapen Waropen	736.104.219	736.104.219	-	736.104.219	-
2507	Kab. Merauke	1.833.855.423	1.833.855.423	-	1.833.855.423	-
2508	Kab. Jayawijaya	670.541.253	670.541.253	-	670.541.253	-
2509	Kab. Paniai	670.541.253	677.256.513	6.715.260	670.541.253	-
2510	Kab. Nabire	1.319.147.234	1.319.147.234	-	1.319.147.234	-
2511	Kab. Puncak Jaya	670.541.253	677.256.513	6.715.260	670.541.253	-
2512	Kab. Mimika	4.048.432.836	4.351.565.810	303.132.974	4.048.432.836	-
2513	Kab. Mappi	383.880.103	383.880.103	-	383.880.103	-
2514	Kab. Asmat	696.758.321	703.473.581	6.715.260	696.758.321	-
2515	Kab. Boven Digoel	12.813.708.453	12.813.708.453	-	12.813.708.453	-
2516	Kab. Sarmi	7.850.473.412	7.850.473.412	-	7.850.473.412	-
2517	Kab. Keerom	1.614.981.082	1.614.981.082	-	1.614.981.082	-
2518	Kab. Tolikara	383.818.077	383.818.077	-	383.818.077	-
2519	Kab. Pegunungan Bintang	383.818.077	383.818.077	-	383.818.077	-
2523	Kab. Waropen	496.392.078	496.392.078	-	496.392.078	-
2524	Kab. Yahukimo	383.818.077	390.533.337	6.715.260	383.818.077	-
2525	Kab. Supiori	383.818.077	383.818.077	-	383.818.077	-
2551	Kota Jayapura	670.541.253	677.256.513	6.715.260	670.541.253	-
2600	Prov. Bengkulu	2.121.920	2.121.920	-	2.121.920	-
2601	Kab. Bengkulu Utara	530.480	530.480	-	530.480	-
2602	Kab. Bengkulu Selatan	530.480	530.480	-	530.480	-
2603	Kab. Rejang Lebong	6.366.971	6.366.971	-	6.366.971	-
2604	Kab. Seluma	530.480	530.480	-	530.480	-
2605	Kab. Kaur	2.976.140	2.976.140	-	2.976.140	-
2606	Kab. Mukomuko	530.480	530.480	-	530.480	-
2607	Kab. Lebong	530.480	530.480	-	530.480	-
2608	Kab. Kepahiang	530.480	530.480	-	530.480	-
2651	Kota Bengkulu	530.480	530.480	-	530.480	-
2800	Prov. Maluku Utara	4.488.224.345	4.725.464.966	237.240.621	4.488.224.345	-
2801	Kab. Halmahera Barat	2.542.117.152	2.625.907.115	83.789.963	2.542.117.152	-
2802	Kab. Halmahera Tengah	5.772.275.291	5.772.275.291	-	5.772.275.291	-
2803	Kab. Halmahera Utara	7.125.514.006	11.714.313.800	4.588.799.794	7.125.514.006	-
2804	Kab. Halmahera Selatan	17.870.876.545	18.106.154.870	235.278.325	17.870.876.545	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
2805	Kab. Kepulauan Sula	5.022.187.119	5.022.187.119	-	5.022.187.119	-
2806	Kab. Halmahera Timur	5.248.799.263	5.248.799.263	-	5.248.799.263	-
2851	Kota Ternate	1.252.596.669	1.252.596.669	-	1.252.596.669	-
2852	Kota Tidore Kepulauan	1.538.200.894	1.605.983.928	67.783.034	1.538.200.894	-
2900	Prov. Banten	522.488.133	526.331.496	3.843.363	522.488.133	-
2901	Kab. Serang	208.995.251	208.995.251	-	208.995.251	-
2902	Kab. Pandeglang	842.918.553	842.918.553	-	842.918.553	-
2903	Kab. Lebak	411.052.966	411.052.966	-	411.052.966	-
2904	Kab. Tangerang	208.995.251	208.995.251	-	208.995.251	-
2951	Kota Tangerang	208.995.251	208.995.251	-	208.995.251	-
2952	Kota Cilegon	208.995.251	208.995.251	-	208.995.251	-
3000	Prov. Bangka Belitung	147.750.160	147.750.160	-	147.750.160	-
3001	Kab. Belitung	55.656.705	55.656.705	-	55.656.705	-
3002	Kab. Bangka	75.634.179	75.634.179	-	75.634.179	-
3003	Kab. Bangka Barat	48.839.386	48.839.386	-	48.839.386	-
3004	Kab. Bangka Tengah	1.136.665.370	1.136.665.370	-	1.136.665.370	-
3005	Kab. Bangka Selatan	49.899.542	49.899.542	-	49.899.542	-
3006	Kab. Belitung Timur	48.839.386	48.839.386	-	48.839.386	-
3051	Kota Pangkal Pinang	48.839.386	48.839.386	-	48.839.386	-
3100	Prov. Gorontalo	117.691.095	117.691.095	-	117.691.095	-
3101	Kab. Gorontalo	71.198.088	75.415.840	4.217.752	71.198.088	-
3102	Kab. Boalemo	159.533.657	159.533.657	-	159.533.657	-
3103	Kab. Pohuwato	532.155.232	532.155.232	-	532.155.232	-
3104	Kab. Bone Bolango	51.911.232	51.911.232	-	51.911.232	-
3151	Kota Gorontalo	94.309.430	94.309.430	-	94.309.430	-
3200	Prov. Kepulauan Riau	12.803.940	12.803.940	-	12.803.940	-
3201	Kab. Bintan	18.641.280	18.641.280	-	18.641.280	-
3202	Kab. Karimun	5.121.575	5.121.575	-	5.121.575	-
3203	Kab. Natuna	5.121.575	5.121.575	-	5.121.575	-
3204	Kab. Lingga	7.355.303	7.355.303	-	7.355.303	-
3251	Kota Batam	48.483.601	48.483.601	-	48.483.601	-
3252	Kota Tanjung Pinang	5.121.575	5.121.575	-	5.121.575	-
3300	Prov. Irian Jaya Barat	4.433.000.175	4.433.000.175	-	4.433.000.175	-
3301	Kab. Manokwari	2.741.313.639	2.741.313.639	-	2.741.313.639	-
3302	Kab. Sorong	6.206.619.019	6.206.619.019	-	6.206.619.019	-
3303	Kab. Fak Fak	2.873.581.834	2.873.581.834	-	2.873.581.834	-
3304	Kab. Sorong Selatan	1.192.698.928	1.192.698.928	-	1.192.698.928	-
3305	Kab. Raja Ampat	1.981.059.932	1.981.059.932	-	1.981.059.932	-
3306	Kab. Teluk Bintuni	9.664.016.096	9.664.016.096	-	9.664.016.096	-
3307	Kab. Teluk Wondama	2.190.579.144	2.190.579.144	-	2.190.579.144	-
3308	Kab. Kaimana	10.192.206.506	10.192.206.506	-	10.192.206.506	-
3351	Kota Sorong	1.284.111.219	1.284.111.219	-	1.284.111.219	-
3400	Prov. Sulawesi Barat	175.547.026	175.547.026	-	175.547.026	-
3401	Kab. Majene	171.710.913	171.710.913	-	171.710.913	-
3402	Kab. Mamuju	1.889.859.229	1.889.859.229	-	1.889.859.229	-
3403	Kab. Mamuju Utara	328.202.452	328.202.452	-	328.202.452	-
3404	Kab. Polewali Mandar	176.493.107	176.493.107	-	176.493.107	-
3405	Kab. Mamasa	170.514.634	212.204.845	41.690.211	170.514.634	-
JUMLAH DANA SDA MINYAK BUMI		**1.699.772.200.691**	**1.724.240.180.775**	**24.469.806.366**	**1.699.770.374.409**	**1.826.282**

LAPORAN REALISASI ANGGARAN DANA PERIMBANGAN
DANA BAGI HASIL SUMBER DAYA ALAM PERIKANAN
TAHUN ANGGARAN 2007
(dalam rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0100	Prov. DKI Jakarta	1.124.622.790	1.124.622.790	-	1.124.622.790	-
0199	Instansi Pusat (Rekening Cadangan 2007)	77.527.662.336	77.527.662.336	-	77.527.662.336	-
0200	Prov. Jawa Barat	-	-	-	-	-
0205	Kab. Bogor	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0206	Kab. Sukabumi	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0207	Kab. Cianjur	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0208	Kab. Bekasi	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0209	Kab. Karawang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0210	Kab. Purwakarta	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0211	Kab. Subang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0212	Kab. Bandung	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0213	Kab. Sumedang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0214	Kab. Garut	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0215	Kab. Tasikmalaya	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0216	Kab. Ciamis	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0217	Kab. Cirebon	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0218	Kab. Kuningan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0219	Kab. Indramayu	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0220	Kab. Majalengka	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0251	Kota Bandung	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0252	Kota Bogor	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0253	Kota Sukabumi	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0254	Kota Cirebon	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0257	Kota Bekasi	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0258	Kota Depok	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0260	Kota Tasikmalaya	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0261	Kota Cimahi	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0262	Kota Banjar	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0300	Prov. Jawa Tengah	-	-	-	-	-
0301	Kab. Semarang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0302	Kab. Kendal	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0303	Kab. Demak	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0304	Kab. Grobogan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0305	Kab. Pekalongan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0306	Kab. Batang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0307	Kab. Tegal	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0308	Kab. Brebes	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0309	Kab. Pati	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0310	Kab. Kudus	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0311	Kab. Pemalang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0312	Kab. Jepara	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0313	Kab. Rembang	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0314	Kab. Blora	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0315	Kab. Banyumas	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0316	Kab. Cilacap	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0317	Kab. Purbalingga	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0318	Kab. Banjarnegara	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0319	Kab. Magelang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0320	Kab. Temanggung	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0321	Kab. Wonosobo	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0322	Kab. Purworejo	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0323	Kab. Kebumen	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0324	Kab. Klaten	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0325	Kab. Boyolali	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0326	Kab. Sragen	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0327	Kab. Sukoharjo	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0328	Kab. Karanganyar	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0329	Kab. Wonogiri	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0351	Kota Semarang	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0352	Kota Salatiga	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0353	Kota Pekalongan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0354	Kota Tegal	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0355	Kota Magelang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0356	Kota Surakarta	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0400	Prov. DI Yogyakarta	-	-	-	-	-
0401	Kab. Bantul	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0402	Kab. Sleman	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0403	Kab. Gunung Kidul	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0404	Kab. Kulon Progo	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0451	Kota Yogyakarta	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0500	Prov. Jawa Timur	-	-	-	-	-
0501	Kab. Gresik	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0502	Kab. Mojokerto	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0503	Kab. Sidoarjo	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0504	Kab. Jombang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0505	Kab. Sampang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0506	Kab. Pamekasan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0507	Kab. Sumenep	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0508	Kab. Bangkalan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0509	Kab. Bondowoso	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0510	Kab. Situbondo	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0511	Kab. Banyuwangi	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0512	Kab. Jember	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0513	Kab. Malang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0514	Kab. Pasuruan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0515	Kab. Probolinggo	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0516	Kab. Lumajang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0517	Kab. Kediri	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0518	Kab. Tulungagung	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0519	Kab. Nganjuk	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0520	Kab. Trenggalek	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0521	Kab. Blitar	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0522	Kab. Madiun	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0523	Kab. Ngawi	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0524	Kab. Magetan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0525	Kab. Ponorogo	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0526	Kab. Pacitan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0527	Kab. Bojonegoro	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0528	Kab. Tuban	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0529	Kab. Lamongan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0551	Kota Surabaya	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0552	Kota Mojokerto	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0553	Kota Malang	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0554	Kota Pasuruan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0555	Kota Probollinggo	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0556	Kota Blitar	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0557	Kota Kediri	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0558	Kota Madiun	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0559	Kota Batu	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0600	Prov. Nanggroe Aceh Darussalam	-	-	-	-	-
0601	Kab. Aceh Besar	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0602	Kab. Aceh Pidie	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0603	Kab. Aceh Utara	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0604	Kab. Aceh Timur	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0605	Kab. Aceh Selatan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0606	Kab. Aceh Barat	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0607	Kab. Aceh Tengah	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0608	Kab. Aceh Tenggara	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0609	Kab. Simeulue	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0610	Kab. Aceh Singkil	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0611	Kab. Bireun	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0612	Kab. Aceh Barat Daya	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0613	Kab. Gayo Lues	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0614	Kab. Aceh Jaya	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0615	Kab. Nagan Raya	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0616	Kab. Aceh Tamiang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0617	Kab. Bener Meriah	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0651	Kota Banda Aceh	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0652	Kota Sabang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0653	Kota Langsa	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0654	Kota Lhokseumawe	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0700	Prov. Sumatera Utara	-	-	-	-	-
0701	Kab. Deli Serdang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0702	Kab. Tanah Karo	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0703	Kab. Langkat	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0704	Kab. Tapanuli Tengah	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0705	Kab. Simalungun	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0706	Kab. Labuhan Batu	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0707	Kab. Dairi	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0708	Kab. Tapanuli Utara	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0709	Kab. Tapanuli Selatan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0710	Kab. Asahan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0711	Kab. Nias	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0712	Kab. Toba Samosir	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0713	Kab. Mandailing Natal	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0714	Kab. Nias Selatan	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0715	Kab. Pakpak Bharat	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0716	Kab. Humbang Hasundutan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0717	Kab. Samosir	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0718	Kab. Serdang Berdagai	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0751	Kota Medan	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0752	Kota Tebing Tinggi	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0753	Kota Binjai	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0754	Kota Pematang Siantar	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0755	Kota Tanjung Balai	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0756	Kota Sibolga	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0757	Kota Padang Sidempuan	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0800	Prov. Sumatera Barat	-	-	-	-	-
0801	Kab. Agam	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0802	Kab. Pasaman	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0803	Kab. Limapuluh Kota	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0804	Kab. Solok	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0805	Kab. Padang Pariaman	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0806	Kab. Pesisir Selatan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0807	Kab. Tanah Datar	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0808	Kab. Sawahlunto Sijunjung	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0809	Kab. Kepulauan Mentawai	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0810	Kab. Dharmasraya	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0811	Kab. Solok Selatan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0812	Kab. Pasaman Barat	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
0851	Kota Bukit Tinggi	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0852	Kota Padang Panjang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0853	Kota Solok	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0854	Kota Sawahlunto	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0855	Kota Padang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0856	Kota Payakumbuh	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0857	Kota Pariaman	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0900	Prov. Riau	-	-	-	-	-
0901	Kab. Kampar	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0902	Kab. Bengkalis	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0904	Kab. Indragiri Hulu	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0905	Kab. Indragiri Hilir	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0906	Kab. Pelalawan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0907	Kab. Rokan Hulu	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0908	Kab. Rokan Hilir	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0909	Kab. Siak	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0912	Kab. Kuantan Singingi	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0951	Kota Pekanbaru	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
0953	Kota Dumai	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1000	Prov. Jambi	-	-	-	-	-
1001	Kab. Batanghari	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1002	Kab. Tanjung Jabung Barat	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1003	Kab. Bungo	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1004	Kab. Sarolangun	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1005	Kab. Kerinci	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1006	Kab. Merangin	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1007	Kab. Tanjung Jabung Timur	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1008	Kab. Tebo	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1009	Kab. Muaro Jambi	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1051	Kota Jambi	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1100	Prov. Sumatera Selatan	-	-	-	-	-
1103	Kab. Musi Banyuasin	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1104	Kab. Ogan Komering Ulu	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1105	Kab. Muara Enim	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1106	Kab. Lahat	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
1107	Kab. Musi Rawas	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1108	Kab. Ogan Komering Ilir	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1109	Kab. Banyuasin	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1110	Kab. OKU Timur	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1111	Kab. OKU Selatan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1112	Kab. Ogan Ilir	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1151	Kota Palembang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1153	Kota Prabumulih	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1154	Kota Pagar Alam	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1155	Kota Lubuk Linggau	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1200	Prov. Lampung	-	-	-	-	-
1201	Kab. Lampung Selatan	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1202	Kab. Lampung Tengah	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1203	Kab. Lampung Utara	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1204	Kab. Lampung Barat	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1205	Kab. Tulang Bawang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1206	Kab. Tanggamus	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1207	Kab. Lampung Timur	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1208	Kab. Way Kanan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1251	Kota Bandar Lampung	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1252	Kota Metro	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1300	Prov. Kalimantan Barat	-	-	-	-	-
1301	Kab. Sambas	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1302	Kab. Sanggau	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1303	Kab. Sintang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1304	Kab. Pontianak	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1305	Kab. Kapuas Hulu	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1306	Kab. Ketapang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1307	Kab. Bengkayang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1308	Kab. Landak	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1309	Kab. Melawi	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1310	Kab. Sekadau	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1351	Kota Pontianak	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1352	Kota Singkawang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1400	Prov. Kalimantan Tengah	-	-	-	-	-
1401	Kab. Kapuas	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1402	Kab. Barito Utara	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1403	Kab. Barito Selatan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1404	Kab. Kotawaringin Timur	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1405	Kab. Kotawaringin Barat	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1406	Kab. Katingan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1407	Kab. Seruyan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1408	Kab. Sukamara	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1409	Kab. Lamandau	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1410	Kab. Gunung Mas	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1411	Kab. Pulang Pisau	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1412	Kab. Murung Raya	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1413	Kab. Barito Timur	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1451	Kota Palangkaraya	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1500	Prov. Kalimantan Selatan	-	-	-	-	-
1501	Kab. Banjar	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1502	Kab. Tanah Laut	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
1503	Kab. Tapin	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1504	Kab. Hulu Sungai Selatan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1505	Kab. Hulu Sungai Tengah	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1506	Kab. Barito Kuala	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1507	Kab. Tabalong	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1508	Kab. Kota Baru	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1509	Kab. Hulu Sungai Utara	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1510	Kab. Tanah Bumbu	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1511	Kab. Balangan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1551	Kota Banjarmasin	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1552	Kota Banjar Baru	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1600	Prov. Kalimantan Timur	-	-	-	-	-
1601	Kab. Kutai Kartanegara	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1602	Kab. Pasir	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1603	Kab. Bulungan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1604	Kab. Berau	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1605	Kab. Nunukan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1606	Kab. Malinau	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1607	Kab. Kutai Barat	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1608	Kab. Kutai Timur	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1609	Kab. Penajam Paser Utara	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1651	Kota Samarinda	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1652	Kota Balikpapan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1653	Kota Tarakan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1654	Kota Bontang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1700	Prov. Sulawesi Utara	-	-	-	-	-
1702	Kab. Minahasa	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1703	Kab. Bolaang Mongondow	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1704	Kab. Sangihe	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1705	Kab. Kepulauan Talaud	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1706	Kab. Minahasa Selatan	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1707	Kota Tomohon	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1708	Kab. Minahasa Utara	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1751	Kota Manado	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1753	Kota Bitung	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1800	Prov. Sulawesi Tengah	-	-	-	-	-
1801	Kab. Poso	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1802	Kab. Donggala	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1803	Kab. Toli-Toli	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1804	Kab. Banggai	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1805	Kab. Buol	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1806	Kab. Morowali	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1807	Kab. Banggai Kepulauan	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1808	Kab. Parigi Moutong	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1809	Kab. Tojo Una Una	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1851	Kota Palu	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1900	Prov. Sulawesi Selatan	-	-	-	-	-
1901	Kab. Pinrang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1902	Kab. G o w a	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1903	Kab. Wajo	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1905	Kab. Bone	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1906	Kab. Tana Toraja	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
1907	Kab. M a r o s	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1909	Kab. Luwu	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1910	Kab. Sinjai	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1911	Kab. Bulukumba	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1912	Kab. Bantaeng	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1913	Kab. Jeneponto	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1914	Kab. Selayar	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1915	Kab. Takalar	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1916	Kab. Barru	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1917	Kab. Sidenreng Rappang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1918	Kab. Pangkajene Kepulauan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1919	Kab. Soppeng	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1921	Kab. Enrekang	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
1922	Kab. Luwu Utara	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1924	Kab. Luwu Timur	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1951	Kota Makassar	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1952	Kota Pare-pare	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
1953	Kota Palopo	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2000	Prov. Sulawesi Tenggara	-	-	-	-	-
2001	Kab. Konawe	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2002	Kab. Buton	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2003	Kab. Muna	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2004	Kab. Kolaka	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2005	Kab. Konawe Selatan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2006	Kab. Wakatobi	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2007	Kab. Bombana	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2008	Kab. Kolaka Utara	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2051	Kota Kendari	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2052	Kota Bau-bau	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2100	Prov. Maluku	-	-	-	-	-
2101	Kab. Maluku Tengah	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2102	Kab. Maluku Tenggara	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2103	Kab. Maluku Tenggara Barat	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2104	Kab. Pulau Buru	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2105	Kab. Kepulauan Aru	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2106	Kab. Seram Bagian Barat	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2107	Kab. Seram Bagian Timur	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2151	Kota Ambon	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2200	Prov. Bali	-	-	-	-	-
2201	Kab. Buleleng	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2202	Kab. Jembrana	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2203	Kab. Klungkung	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2204	Kab. Gianyar	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2205	Kab. Karangasem	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2206	Kab. Bangli	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2207	Kab. Badung	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2208	Kab. Tabanan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2251	Kota Denpasar	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2300	Prov. Nusa Tenggara Barat	-	-	-	-	-
2301	Kab. Lombok Barat	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2302	Kab. Lombok Tengah	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2303	Kab. Lombok Timur	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
2304	Kab. Bima	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2305	Kab. Sumbawa	187.437.131	251.842.151	64.405.020	187.437.131	-
2306	Kab. Dompu	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2307	Kab. Sumbawa Barat	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2351	Kota Mataram	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2352	Kota Bima	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2400	Prov. Nusa Tenggara Timur	-	-	-	-	-
2401	Kab. Kupang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2402	Kab. Belu	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2403	Kab. Timor Tengah Utara	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2404	Kab. Timor Tengah Selatan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2405	Kab. Alor	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2406	Kab. Sikka	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2407	Kab. Flores Timur	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2408	Kab. Ende	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2409	Kab. Ngada	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2410	Kab. Manggarai	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2411	Kab. Sumba Timur	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2412	Kab. Sumba Barat	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2413	Kab. Lembata	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2414	Kab. Rote Ndao	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2415	Kab. Manggarai Barat	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2451	Kota Kupang	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2500	Prov. Papua	-	-	-	-	-
2501	Kab. Jayapura	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2502	Kab. Biak Numfor	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2504	Kab. Yapen Waropen	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2507	Kab. Merauke	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2508	Kab. Jayawijaya	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2509	Kab. Paniai	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2510	Kab. Nabire	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2511	Kab. Puncak Jaya	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2512	Kab. Mimika	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2513	Kab. Mappi	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2514	Kab. Asmat	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2515	Kab. Boven Digoel	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2516	Kab. Sarmi	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2517	Kab. Keerom	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2518	Kab. Tolikara	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2519	Kab. Pegunungan Bintang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2523	Kab. Waropen	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2524	Kab. Yahukimo	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2525	Kab. Supiori	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2551	Kota Jayapura	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2600	Prov. Bengkulu	-	-	-	-	-
2601	Kab. Bengkulu Utara	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2602	Kab. Bengkulu Selatan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2603	Kab. Rejang Lebong	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2604	Kab. Seluma	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2605	Kab. Kaur	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2606	Kab. Mukomuko	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2607	Kab. Lebong	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
2608	Kab. Kepahiang	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2651	Kota Bengkulu	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2800	Prov. Maluku Utara	-	-	-	-	-
2801	Kab. Halmahera Barat	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2802	Kab. Halmahera Tengah	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2803	Kab. Halmahera Utara	187.437.131	272.931.078	85.493.947	187.437.131	-
2804	Kab. Halmahera Selatan	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2805	Kab. Kepulauan Sula	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2806	Kab. Halmahera Timur	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2851	Kota Ternate	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2852	Kota Tidore Kepulauan	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
2900	Prov. Banten	-	-	-	-	-
2901	Kab. Serang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2902	Kab. Pandeglang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2903	Kab. Lebak	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2904	Kab. Tangerang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2951	Kota Tangerang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
2952	Kota Cilegon	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3000	Prov. Bangka Belitung	-	-	-	-	-
3001	Kab. Belitung	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3002	Kab. Bangka	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3003	Kab. Bangka Barat	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3004	Kab. Bangka Tengah	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3005	Kab. Bangka Selatan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3006	Kab. Belitung Timur	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3051	Kota Pangkal Pinang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3100	Prov. Gorontalo	-	-	-	-	-
3101	Kab. Gorontalo	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
3102	Kab. Boalemo	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3103	Kab. Pohuwato	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3104	Kab. Bone Bolango	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3151	Kota Gorontalo	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3200	Prov. Kepulauan Riau	-	-	-	-	-
3201	Kab. Bintan	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3202	Kab. Karimun	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3203	Kab. Natuna	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3204	Kab. Lingga	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
3251	Kota Batam	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3252	Kota Tanjung Pinang	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3300	Prov. Irian Jaya Barat	-	-	-	-	-
3301	Kab. Manokwari	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3302	Kab. Sorong	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3303	Kab. Fak Fak	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3304	Kab. Sorong Selatan	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
3305	Kab. Raja Ampat	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3306	Kab. Teluk Bintuni	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
3307	Kab. Teluk Wondama	187.437.131	246.542.978	59.105.847	187.437.131	-
3308	Kab. Kaimana	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3351	Kota Sorong	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3400	Prov. Sulawesi Barat	-	-	-	-	-
3401	Kab. Majene	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3402	Kab. Mamuju	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-

KODE WILAYAH	NAMA DAERAH	ANGGARAN	REALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
3403	Kab. Mamuju Utara	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3404	Kab. Polewali Mandar	187.437.131	187.437.131	-	187.437.131	-
3405	Kab. Mamasa	187.437.131	213.825.231	26.388.100	187.437.131	-
JUMLAH DANA SDA MINYAK BUMI		**159.999.999.980**	**166.027.765.900**	**6.027.765.920**	**159.999.999.980**	**-**

REKAPITULASI REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI UMUM PER PROVINSI
TAHUN ANGGARAN 2007
(Dalam Rupiah)

NO	PROVINSI*)	REALISASI
01	Provinsi DKI Jakarta	119.943.000.000
02	Provinsi Jawa Barat	15.733.864.988.000
03	Provinsi Jawa Tengah	17.457.003.991.988
04	Provinsi D.I. Yogyakarta	2.704.390.000.000
05	Provinsi Jawa Timur	18.760.737.999.996
06	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	5.666.370.995.999
07	Provinsi Sumatera Utara	9.511.977.000.000
08	Provinsi Sumatera Barat	5.779.339.999.996
09	Provinsi R iau	2.629.987.000.000
10	Provinsi Jambi	3.133.538.792.000
11	Provinsi Sumatera Selatan	4.947.886.000.000
12	Provinsi Lampung	4.718.764.000.000
13	Provinsi Kalimantan Barat	5.079.791.000.000
14	Provinsi Kalimantan Tengah	4.851.376.999.996
15	Provinsi Kalimantan Selatan	3.744.115.992.000
16	Provinsi Kalimantan Timur	2.994.739.999.984
17	Provinsi Sulawesi Utara	3.071.624.000.000
18	Provinsi Sulawesi Tengah	3.608.223.996.000
19	Provinsi Sulawesi Selatan	7.351.855.000.000
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	3.243.449.599.997
21	Provinsi Maluku	2.782.040.000.000
22	Provinsi Bali	3.292.773.999.996
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	3.478.868.000.000
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	5.059.361.000.000
25	Provinsi Papua	7.863.524.996.000
26	Provinsi Bengkulu	2.550.302.000.000
28	Provinsi Maluku Utara	2.149.096.999.200
29	Provinsi Banten	3.261.483.000.000
30	Provinsi Bangka Belitung	1.736.835.998.000
31	Provinsi Gorontalo	1.420.678.000.000
32	Provinsi Kepulauan Riau	1.456.491.999.200
33	Provinsi Irian Jaya Barat	3.159.167.000.000
34	Provinsi Sulawesi Barat	1.467.798.000.000
JUMLAH DAU NASIONAL		**164.787.401.348.352**
Pengembalian		**(1.420.000)**
JUMLAH DAU NASIONAL		**164.787.399.928.352**

*) Ikhtisar menurut provinsi (meliputi Pemerintah Provinsi, dan Pemerintah Kabupaten/Kota

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA ALOKASI KHUSUS PER KABUPATEN/KOTA
TAHUN ANGGARAN 2007
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	KODE SATKER	NAMA PEMDA	ANGGARAN	RALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0205	991003	Kab. Bandung	11.012.000.000	9.488.100.000		9.488.100.000	1.523.900.000
0206	990963	Kab. Bekasi	8.992.000.000	8.992.000.000		8.992.000.000	0
0207	990938	Kab. Bogor	10.289.000.000	10.289.000.000		10.289.000.000	0
0208	991045	Kab. Ciamis	73.344.000.000	73.344.000.000		73.344.000.000	0
0209	990959	Kab. Cianjur	67.674.000.000	67.674.000.000		67.674.000.000	0
0210	991052	Kab. Cirebon	9.931.000.000	9.931.000.000		9.931.000.000	0
0211	991024	Kab. Garut	71.055.000.000	71.055.000.000		71.055.000.000	0
0212	991070	Kab. Indramayu	12.397.000.000	12.396.600.000		12.396.600.000	400.000
0213	990970	Kab. Karawang	9.491.000.000	9.491.000.000		9.491.000.000	0
0214	991066	Kab. Kuningan	49.743.000.000	49.743.000.000		49.743.000.000	0
0215	991087	Kab. Majalengka	49.558.000.000	49.512.000.000		49.512.000.000	46.000.000
0216	990984	Kab. Purwakarta	32.648.000.000	32.648.000.000		32.648.000.000	0
0217	990991	Kab. Subang	63.697.000.000	63.697.000.000		63.697.000.000	0
0218	990942	Kab. Sukabumi	71.667.000.000	71.667.000.000		71.667.000.000	0
0219	991010	Kab. Sumedang	43.785.000.000	43.785.000.000		43.785.000.000	0
0220	991031	Kab. Tasikmalaya	69.774.000.000	69.774.000.000		69.774.000.000	0
0251	991091	Kota Bandung	8.166.000.000	6.408.000.000		6.408.000.000	1.758.000.000
0252	993330	Kota Bekasi	7.974.000.000	5.354.905.435		5.354.905.435	2.619.094.565
0253	991109	Kota Bogor	7.820.000.000	7.587.700.000		7.587.700.000	232.300.000
0254	991120	Kota Cirebon	29.207.000.000	29.207.000.000		29.207.000.000	0
0257	980032	Kota Depok	11.877.000.000	11.877.000.000		11.877.000.000	0
0258	991113	Kota Sukabumi	21.715.000.000	21.715.000.000		21.715.000.000	0
0260	994754	Kota Cimahi	19.612.000.000	18.759.100.000		18.759.100.000	852.900.000
0261	994740	Kota Tasikmalaya	24.424.000.000	24.424.000.000		24.424.000.000	0
0262	998126	Kota Banjar	32.238.000.000	32.238.000.000		32.238.000.000	0
0301	991329	Kab. Banjarnegara	44.339.000.000	44.339.000.000		44.339.000.000	0
0302	991290	Kab. Banyumas	10.146.000.000	10.130.700.000		10.130.700.000	15.300.000
0303	991202	Kab. Batang	44.628.000.000	44.628.000.000		44.628.000.000	0
0304	991286	Kab. Blora	43.376.000.000	43.376.000.000		43.376.000.000	0
0305	991396	Kab. Boyolali	41.165.000.000	41.165.000.000		41.165.000.000	0
0306	991223	Kab. Brebes	10.334.000.000	10.334.000.000		10.334.000.000	0
0307	991308	Kab. Cilacap	61.168.000.000	61.168.000.000		61.168.000.000	0
0308	991176	Kab. Demak	52.117.000.000	52.117.000.000		52.117.000.000	0
0309	991180	Kab. Grobogan	10.325.000.000	10.325.000.000		10.325.000.000	0
0310	991265	Kab. Jepara	48.406.000.000	48.406.000.000		48.406.000.000	0
0311	991422	Kab. Karanganyar	43.137.000.000	43.137.000.000		43.137.000.000	0
0312	991375	Kab. Kebumen	52.203.000.000	52.203.000.000		52.203.000.000	0
0313	991162	Kab. Kendal	46.741.000.000	46.728.891.563		46.728.891.563	12.108.437
0314	991382	Kab. Klaten	50.867.000.000	50.867.000.000		50.867.000.000	0
0315	991244	Kab. Kudus	38.218.000.000	38.218.000.000		38.218.000.000	0
0316	991333	Kab. Magelang	48.654.000.000	48.654.000.000		48.654.000.000	0
0317	991230	Kab. Pati	49.976.000.000	49.976.000.000		49.976.000.000	0
0318	991197	Kab. Pekalongan	46.428.000.000	46.428.000.000		46.428.000.000	0
0319	991251	Kab. Pemalang	9.871.000.000	9.871.000.000		9.871.000.000	0
0320	991312	Kab. Purbalingga	39.606.000.000	39.606.000.000		39.606.000.000	0
0321	991361	Kab. Purworejo	44.401.000.000	44.401.000.000		44.401.000.000	0
0322	991272	Kab. Rembang	41.005.000.000	41.005.000.000		41.005.000.000	0

KODE WILAYAH	KODE SATKER	NAMA PEMDA	ANGGARAN	RALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0323	991155	Kab. Semarang	45.884.000.000	43.714.141.909		43.714.141.909	2.169.858.091
0324	991401	Kab. Sragen	44.709.000.000	44.709.000.000		44.709.000.000	0
0325	991418	Kab. Sukoharjo	41.524.000.000	41.524.000.000		41.524.000.000	0
0326	991219	Kab. Tegal	9.880.000.000	9.880.000.000		9.880.000.000	0
0327	991340	Kab. Temanggung	39.674.000.000	39.674.000.000		39.674.000.000	0
0328	991439	Kab. Wonogiri	54.306.000.000	54.306.000.000		54.306.000.000	0
0329	991354	Kab. Wonosobo	45.548.000.000	45.472.700.000		45.472.700.000	75.300.000
0351	991485	Kota Magelang	22.923.000.000	22.923.000.000		22.923.000.000	0
0352	991464	Kota Pekalongan	28.681.000.000	28.681.000.000		28.681.000.000	0
0353	991450	Kota Salatiga	23.660.000.000	22.196.510.000		22.196.510.000	1.463.490.000
0354	991443	Kota Semarang	8.500.000.000	8.500.000.000		8.500.000.000	0
0355	991492	Kota Surakarta	26.533.000.000	25.900.400.000		25.900.400.000	632.600.000
0356	991471	Kota Tegal	24.736.000.000	24.736.000.000		24.736.000.000	0
0401	991511	Kab. Bantul	47.709.000.000	47.709.000.000		47.709.000.000	0
0402	991532	Kab. Gunung Kidul	49.167.000.000	49.167.000.000		49.167.000.000	0
0403	991549	Kab. Kulon Progo	42.119.000.000	42.119.000.000		42.119.000.000	0
0404	991528	Kab. Sleman	10.151.000.000	10.151.000.000		10.151.000.000	0
0451	991553	Kota Yogyakarta	26.788.000.000	26.788.000.000		26.788.000.000	0
0501	991642	Kab. Bangkalan	41.518.000.000	41.518.000.000		41.518.000.000	0
0502	991670	Kab. Banyuwangi	62.582.000.000	60.136.800.000		60.136.800.000	2.445.200.000
0503	991773	Kab. Blitar	50.935.000.000	50.935.000.000		50.935.000.000	0
0504	991837	Kab. Bojonegoro	10.042.000.000	10.042.000.000		10.042.000.000	0
0505	991659	Kab. Bondowoso	36.561.000.000	36.561.000.000		36.561.000.000	0
0506	991574	Kab. Gresik	9.338.000.000	9.338.000.000		9.338.000.000	0
0507	991684	Kab. Jember	66.485.000.000	66.222.800.000		66.222.800.000	262.200.000
0508	991600	Kab. Jombang	9.893.000.000	9.893.000.000		9.893.000.000	0
0509	991731	Kab. Kediri	10.032.000.000	10.032.000.000		10.032.000.000	0
0510	991858	Kab. Lamongan	59.862.000.000	59.862.000.000		59.862.000.000	0
0511	991727	Kab. Lumajang	47.043.000.000	47.043.000.000		47.043.000.000	0
0512	991780	Kab. Madiun	38.347.000.000	38.276.400.000		38.276.400.000	70.600.000
0513	991802	Kab. Magetan	45.495.000.000	44.993.300.000		44.993.300.000	501.700.000
0514	991691	Kab. Malang	68.184.000.000	68.184.000.000		68.184.000.000	0
0515	991581	Kab. Mojokerto	44.985.000.000	44.985.000.000		44.985.000.000	0
0516	991752	Kab. Nganjuk	45.041.000.000	45.041.000.000		45.041.000.000	0
0517	991794	Kab. Ngawi	41.461.000.000	28.355.800.000		28.355.800.000	13.105.200.000
0518	991820	Kab. Pacitan	49.112.000.000	49.112.000.000		49.112.000.000	0
0519	991621	Kab. Pamekasan	42.622.000.000	42.622.000.000		42.622.000.000	0
0520	991706	Kab. Pasuruan	56.901.000.000	53.612.900.000		53.612.900.000	3.288.100.000
0521	991816	Kab. Ponorogo	48.708.000.000	48.708.000.000		48.708.000.000	0
0522	991710	Kab. Probolinggo	52.388.000.000	52.388.000.000		52.388.000.000	0
0523	991617	Kab. Sampang	43.856.000.000	43.856.000.000		43.856.000.000	0
0524	991595	Kab. Sidoarjo	8.946.000.000	8.946.000.000		8.946.000.000	0
0525	991663	Kab. Situbondo	37.683.000.000	37.683.000.000		37.683.000.000	0
0526	991638	Kab. Sumenep	10.222.000.000	10.222.000.000		10.222.000.000	0
0527	991769	Kab. Trenggalek	51.011.000.000	51.011.000.000		51.011.000.000	0
0528	991841	Kab. Tuban	9.685.000.000	9.685.000.000		9.685.000.000	0
0529	991748	Kab. Tulungagung	52.278.000.000	52.278.000.000		52.278.000.000	0
0551	991912	Kota Blitar	26.958.000.000	26.958.000.000		26.958.000.000	0
0552	991926	Kota Kediri	23.891.000.000	23.891.000.000		23.891.000.000	0
0553	991930	Kota Madiun	18.613.000.000	18.613.000.000		18.613.000.000	0
0554	991883	Kota Malang	26.934.000.000	26.934.000.000		26.934.000.000	0

KODE WILAYAH	KODE SATKER	NAMA PEMDA	ANGGARAN	RALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0555	991879	Kota Mojokerto	22.232.000.000	20.558.000.000		20.558.000.000	1.674.000.000
0556	991890	Kota Pasuruan	30.757.000.000	30.757.000.000		30.757.000.000	0
0557	991905	Kota Probolinggo	26.669.000.000	26.669.000.000		26.669.000.000	0
0558	991862	Kota Surabaya	8.075.000.000	7.408.900.000		7.408.900.000	666.100.000
0559	994761	Kota Batu	26.805.000.000	26.712.600.000		26.712.600.000	92.400.000
0601	990078	Kab. Aceh Barat	40.158.000.000	33.889.200.000		33.889.200.000	6.268.800.000
0602	990022	Kab. Aceh Besar	43.994.000.000	43.994.000.000		43.994.000.000	0
0603	990061	Kab. Aceh Selatan	38.994.000.000	38.994.000.000		38.994.000.000	0
0604	980007	Kab. Aceh Singkil	40.534.000.000	40.533.700.000		40.533.700.000	300.000
0605	990082	Kab. Aceh Tengah	42.534.000.000	42.534.000.000		42.534.000.000	0
0606	990099	Kab. Aceh Tenggara	35.961.000.000	35.961.000.000		35.961.000.000	0
0607	990057	Kab. Aceh Timur	49.676.000.000	34.964.800.000		34.964.800.000	14.711.200.000
0608	990040	Kab. Aceh Utara	47.267.000.000	37.070.000.000		37.070.000.000	10.197.000.000
0609	980053	Kab. Bireun	46.509.000.000	44.420.200.000		44.420.200.000	2.088.800.000
0610	990036	Kab. Aceh Pidie	50.051.000.000	50.051.000.000		50.051.000.000	0
0611	993372	Kab. Simeulue	43.959.000.000	43.959.000.000		43.959.000.000	0
0612	990104	Kota Banda Aceh	34.098.000.000	34.098.000.000		34.098.000.000	0
0613	990111	Kota Sabang	31.220.000.000	31.220.000.000		31.220.000.000	0
0614	994672	Kota Langsa	28.322.000.000	27.934.000.000		27.934.000.000	388.000.000
0615	994686	Kota Lhokseumawe	25.703.000.000	24.414.700.000		24.414.700.000	1.288.300.000
0616	997451	Kab. Nagan Raya	37.663.000.000	37.663.000.000		37.663.000.000	0
0617	997447	Kab. Aceh Jaya	32.351.000.000	18.312.500.000		18.312.500.000	14.038.500.000
0651	997426	Kab. Aceh Barat Daya	33.707.000.000	33.703.500.000		33.703.500.000	3.500.000
0652	997430	Kab. Gayo Lues	26.679.000.000	26.679.000.000		26.679.000.000	0
0653	997468	Kab. Aceh Tamiang	34.261.000.000	11.706.930.000		11.706.930.000	22.554.070.000
0654	987532	Kab. Bener Meriah	37.047.000.000	37.047.000.000		37.047.000.000	0
0701	990221	Kab. Asahan	61.445.000.000	47.598.500.000		47.598.500.000	13.846.500.000
0702	990192	Kab. Dairi	46.832.000.000	46.832.000.000		46.832.000.000	0
0703	990132	Kab. Deli Serdang	58.200.000.000	57.249.427.000		57.249.427.000	950.573.000
0704	990146	Kab. Tanah Karo	47.999.000.000	47.921.400.000		47.921.400.000	77.600.000
0705	990188	Kab. Labuhan Batu	10.616.000.000	10.616.000.000		10.616.000.000	0
0706	990150	Kab. Langkat	50.441.000.000	50.441.000.000		50.441.000.000	0
0707	941915	Kab. Mandailing Natal	52.844.000.000	52.844.000.000		52.844.000.000	0
0708	990235	Kab. Nias	63.350.000.000	61.778.800.000		61.778.800.000	1.571.200.000
0709	990171	Kab. Simalungun	59.279.000.000	59.279.000.000		59.279.000.000	0
0710	990214	Kab. Tapanuli Selatan	66.721.000.000	66.721.000.000		66.721.000.000	0
0711	990167	Kab. Tapanuli Tengah	37.692.000.000	37.692.000.000		37.692.000.000	0
0712	990200	Kab. Tapanuli Utara	45.213.000.000	45.213.000.000		45.213.000.000	0
0713	941922	Kab. Toba Samosir	55.361.000.000	54.552.000.000		54.552.000.000	809.000.000
0714	990260	Kota Binjai	22.386.000.000	22.386.000.000		22.386.000.000	0
0715	990242	Kota Medan	8.514.000.000	8.514.000.000		8.514.000.000	0
0716	990277	Kota Pematang Siantar	25.278.000.000	25.278.000.000		25.278.000.000	0
0717	990298	Kota Sibolga	26.739.000.000	25.084.900.000		25.084.900.000	1.654.100.000
0718	990281	Kota Tanjung Balai	25.515.000.000	16.243.500.000		16.243.500.000	9.271.500.000
0751	990256	Kota Tebing Tinggi	24.474.000.000	24.474.000.000		24.474.000.000	0
0752	994690	Kota Padang Sidempuan	25.566.000.000	25.566.000.000		25.566.000.000	0
0753	998147	Kab. Pakpak Bharat	35.286.000.000	34.188.800.000		34.188.800.000	1.097.200.000
0754	998130	Kab. Nias Selatan	50.281.000.000	32.545.746.243		32.545.746.243	17.735.253.757
0755	998151	Kab. Humbang Hasundutan	32.792.000.000	32.792.000.000		32.792.000.000	0
0756	987418	Kab. Serdang Bedagai	39.038.000.000	39.038.000.000		39.038.000.000	0
0757	987528	Kab. Samosir	48.337.000.000	48.254.300.000		48.254.300.000	82.700.000

KODE WILAYAH	KODE SATKER	NAMA PEMDA	ANGGARAN	RALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
0801	990331	Kab. Limapuluh Koto	49.165.000.000	49.165.000.000		49.165.000.000	0
0802	990310	Kab. Agam	49.736.000.000	49.736.000.000		49.736.000.000	0
0803	980060	Kab. Kepulauan Mentawai	47.179.000.000	21.545.100.000		21.545.100.000	25.633.900.000
0804	990352	Kab. Padang Pariaman	59.170.000.000	52.782.200.000		52.782.200.000	6.387.800.000
0805	990324	Kab. Pasaman	39.988.000.000	37.051.600.000		37.051.600.000	2.936.400.000
0806	990366	Kab. Pesisir Selatan	59.012.000.000	53.769.500.000		53.769.500.000	5.242.500.000
0807	990387	Kab. Sawahlunto Sijunjung	35.626.000.000	35.626.000.000		35.626.000.000	0
0808	990345	Kab. Solok	46.778.000.000	46.110.000.000		46.110.000.000	668.000.000
0809	990370	Kab. Tanah Datar	44.308.000.000	44.231.200.000		44.231.200.000	76.800.000
0810	990391	Kota Bukit Tinggi	28.008.000.000	27.534.800.000		27.534.800.000	473.200.000
0811	990409	Kota Padang Panjang	23.596.000.000	22.769.800.000		22.769.800.000	826.200.000
0812	990434	Kota Padang	35.574.000.000	32.293.800.000		32.293.800.000	3.280.200.000
0851	990441	Kota Payakumbuh	23.991.000.000	20.192.655.000		20.192.655.000	3.798.345.000
0852	990420	Kota Sawahlunto	28.176.000.000	28.176.000.000		28.176.000.000	0
0853	990413	Kota Solok	28.393.000.000	26.618.600.000		26.618.600.000	1.774.400.000
0854	997611	Kota Pariaman	35.552.000.000	32.922.100.000		32.922.100.000	2.629.900.000
0855	987595	Kab. Pasaman Barat	40.213.000.000	40.213.000.000		40.213.000.000	0
0856	987574	Kab. Dharmasraya	36.487.000.000	36.487.000.000		36.487.000.000	0
0857	987581	Kab. Solok Selatan	35.993.000.000	34.140.000.000		34.140.000.000	1.853.000.000
0901	990476	Kab. Bengkalis	9.899.000.000	2.913.300.000		2.913.300.000	6.985.700.000
0902	990502	Kab. Indragiri Hilir	10.604.000.000	10.445.800.000		10.445.800.000	158.200.000
0904	990497	Kab. Indragiri Hulu	9.690.000.000	9.501.900.000		9.501.900.000	188.100.000
0905	990462	Kab. Kampar	10.153.000.000	10.153.000.000		10.153.000.000	0
0906	980138	Kab. Kuantan Singingi	38.429.000.000	38.429.000.000		38.429.000.000	0
0907	980074	Kab. Pelalawan	13.329.000.000	11.747.500.000		11.747.500.000	1.581.500.000
0908	980095	Kab. Rokan Hilir	48.166.000.000	18.994.200.000		18.994.200.000	29.171.800.000
0909	980081	Kab. Rokan Hulu	38.194.000.000	38.194.000.000		38.194.000.000	0
0912	980100	Kab. Siak	11.453.000.000	11.453.000.000		11.453.000.000	0
0951	980142	Kota Dumai	13.423.000.000	7.617.700.000	(52.465.000)	7.670.165.000	5.752.835.000
0953	990519	Kota Pekanbaru	8.029.000.000	8.029.000.000		8.029.000.000	0
1001	990544	Kab. Batanghari	33.758.000.000	33.657.000.000		33.657.000.000	101.000.000
1002	990565	Kab. Bungo	33.659.000.000	30.188.100.000		30.188.100.000	3.470.900.000
1003	990586	Kab. Kerinci	45.102.000.000	45.102.000.000		45.102.000.000	0
1004	990572	Kab. Merangin	37.086.000.000	36.584.500.000		36.584.500.000	501.500.000
1005	980184	Kab. Muaro Jambi	48.705.000.000	46.837.100.000		46.837.100.000	1.867.900.000
1006	980163	Kab. Sarolangun	41.000.000.000	36.621.300.000		36.621.300.000	4.378.700.000
1007	990551	Kab. Tanjung Jabung Barat	9.877.000.000	9.771.100.000		9.771.100.000	105.900.000
1008	980522	Kab. Tanjung Jabung Timur	44.066.000.000	42.551.900.000		42.551.900.000	1.514.100.000
1009	980170	Kab. Tebo	43.129.000.000	33.385.800.000		33.385.800.000	9.743.200.000
1051	990590	Kota Jambi	28.836.000.000	28.836.000.000		28.836.000.000	0
1103	990661	Kab. Lahat	41.764.000.000	41.764.000.000		41.764.000.000	0
1104	990633	Kab. Musi Banyuasin	49.136.000.000	49.136.000.000		49.136.000.000	0
1105	990675	Kab. Musi Rawas	53.297.000.000	53.297.000.000		53.297.000.000	0
1106	990654	Kab. Muara Enim	10.623.000.000	10.623.000.000		10.623.000.000	0
1107	990682	Kab. Ogan Komering Ilir	45.257.000.000	45.257.000.000		45.257.000.000	0
1108	990640	Kab. Ogan Komering Ulu	39.018.000.000	39.018.000.000		39.018.000.000	0
1109	990696	Kota Palembang	8.387.000.000	8.310.100.000		8.310.100.000	76.900.000
1110	994729	Kota Pagar Alam	24.230.000.000	23.646.200.000		23.646.200.000	583.800.000
1111	994733	Kota Lubuk Linggau	22.828.000.000	15.283.000.000		15.283.000.000	7.545.000.000
1112	994712	Kota Prabumulih	20.192.000.000	13.253.600.000		13.253.600.000	6.938.400.000
1151	997557	Kab. Banyuasin	41.178.000.000	41.178.000.000		41.178.000.000	0

KODE WILAYAH	KODE SATKER	NAMA PEMDA	ANGGARAN	RALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
1153	987560	Kab. Ogan Ilir	36.088.000.000	34.404.500.000		34.404.500.000	1.683.500.000
1154	987549	Kab. OKU Timur	37.210.000.000	37.210.000.000		37.210.000.000	0
1155	987553	Kab. OKU Selatan	30.640.000.000	30.639.100.000		30.639.100.000	900.000
1201	990807	Kab. Lampung Barat	39.759.000.000	39.759.000.000		39.759.000.000	0
1202	990771	Kab. Lampung Selatan	59.110.000.000	59.110.000.000		59.110.000.000	0
1203	990785	Kab. Lampung Tengah	63.352.000.000	63.352.000.000		63.352.000.000	0
1204	990792	Kab. Lampung Utara	38.482.000.000	38.482.000.000		38.482.000.000	0
1205	980191	Kab. Lampung Timur	61.058.000.000	61.058.000.000		61.058.000.000	0
1206	993351	Kab. Tanggamus	46.616.000.000	46.616.000.000		46.616.000.000	0
1207	993347	Kab. Tulang Bawang	45.142.000.000	45.142.000.000		45.142.000.000	0
1208	980206	Kab. Way Kanan	39.617.000.000	39.617.000.000		39.617.000.000	0
1251	990811	Kota Bandar Lampung	34.276.000.000	34.276.000.000		34.276.000.000	0
1252	980210	Kota Metro	27.963.000.000	27.231.300.000		27.231.300.000	731.700.000
1301	980227	Kab. Bengkayang	47.220.000.000	47.220.000.000		47.220.000.000	0
1302	980231	Kab. Landak	44.370.000.000	44.370.000.000		44.370.000.000	0
1303	991993	Kab. Kapuas Hulu	49.045.000.000	49.045.000.000		49.045.000.000	0
1304	992008	Kab. Ketapang	58.965.000.000	58.965.000.000		58.965.000.000	0
1305	991989	Kab. Pontianak	54.387.000.000	54.387.000.000		54.387.000.000	0
1306	991951	Kab. Sambas	60.181.000.000	60.181.000.000		60.181.000.000	0
1307	991968	Kab. Sanggau	56.794.000.000	56.794.000.000		56.794.000.000	0
1308	991972	Kab. Sintang	46.429.000.000	46.429.000.000		46.429.000.000	0
1309	992012	Kota Pontianak	33.667.000.000	33.667.000.000		33.667.000.000	0
1310	994775	Kota Singkawang	36.951.000.000	36.951.000.000		36.951.000.000	0
1351	987507	Kab. Sekadau	40.009.000.000	40.009.000.000		40.009.000.000	0
1352	987492	Kab. Melawi	37.250.000.000	37.250.000.000		37.250.000.000	0
1401	992054	Kab. Barito Selatan	34.856.000.000	34.531.100.000		34.531.100.000	324.900.000
1402	992040	Kab. Barito Utara	35.950.000.000	35.950.000.000		35.950.000.000	0
1403	992033	Kab. Kapuas	56.561.000.000	56.561.000.000		56.561.000.000	0
1404	992075	Kab. Kotawaringin Barat	47.827.000.000	47.827.000.000		47.827.000.000	0
1405	992061	Kab. Kotawaringin Timur	11.143.000.000	11.143.000.000		11.143.000.000	0
1406	992082	Kota Palangkaraya	35.212.000.000	35.212.000.000		35.212.000.000	0
1407	997540	Kab. Barito Timur	30.291.000.000	30.493.500.000		30.493.500.000	-202.500.000
1408	997536	Kab. Murung Raya	29.904.000.000	29.456.236.364		29.456.236.364	447.763.636
1409	997522	Kab. Pulang Pisau	44.911.000.000	44.911.000.000		44.911.000.000	0
1410	997515	Kab. Gunung Mas	30.318.000.000	28.785.900.000		28.785.900.000	1.532.100.000
1411	997501	Kab. Lamandau	27.334.000.000	25.536.500.000		25.536.500.000	1.797.500.000
1412	997493	Kab. Sukamara	32.698.000.000	32.698.000.000		32.698.000.000	0
1413	997472	Kab. Katingan	39.330.000.000	36.689.700.000		36.689.700.000	2.640.300.000
1451	997489	Kab. Seruyan	37.057.000.000	36.156.200.000		36.156.200.000	900.800.000
1501	992171	Kab. Banjar	52.479.000.000	50.325.558.862		50.325.558.862	2.153.441.138
1502	992228	Kab. Barito Kuala	49.656.000.000	49.618.500.000		49.618.500.000	37.500.000
1503	992207	Kab. Hulu Sungai Selatan	39.716.000.000	39.716.000.000		39.716.000.000	0
1504	992211	Kab. Hulu Sungai Tengah	39.325.000.000	39.325.000.000		39.325.000.000	0
1505	992253	Kab. Hulu Sungai Utara	32.043.000.000	31.551.400.000		31.551.400.000	491.600.000
1506	992249	Kab. Kota Baru	9.951.000.000	9.645.700.000		9.645.700.000	305.300.000
1507	992232	Kab. Tabalong	9.672.000.000	9.598.800.000		9.598.800.000	73.200.000
1508	992185	Kab. Tanah Laut	9.776.000.000	9.411.300.000		9.411.300.000	364.700.000
1509	992192	Kab. Tapin	39.550.000.000	39.550.000.000		39.550.000.000	0
1510	980248	Kota Banjar Baru	34.975.000.000	33.093.200.000		33.093.200.000	1.881.800.000
1511	992260	Kota Banjarmasin	35.330.000.000	28.366.000.000		28.366.000.000	6.964.000.000
1551	998236	Kab. Balangan	28.361.000.000	27.494.700.000		27.494.700.000	866.300.000

KODE WILAYAH	KODE SATKER	NAMA PEMDA	ANGGARAN	RALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
1552	998222	Kab. Tanah Bumbu	35.261.000.000	33.388.400.000		33.388.400.000	1.872.600.000
1601	992139	Kab. Berau	9.853.000.000	8.012.300.000		8.012.300.000	1.840.700.000
1602	992122	Kab. Bulungan	9.321.000.000	5.592.600.000		5.592.600.000	3.728.400.000
1603	992101	Kab. Kutai Kartanegara	9.474.000.000	3.090.600.000		3.090.600.000	6.383.400.000
1604	980273	Kab. Kutai Barat	48.836.000.000	19.187.000.000		19.187.000.000	29.649.000.000
1605	980280	Kab. Kutai Timur	52.491.000.000	17.992.800.000		17.992.800.000	34.498.200.000
1606	980269	Kab. Malinau	46.183.000.000	46.183.000.000		46.183.000.000	0
1607	980252	Kab. Nunukan	42.501.000.000	42.501.000.000		42.501.000.000	0
1608	992118	Kab. Pasir	9.149.000.000	6.710.700.000		6.710.700.000	2.438.300.000
1609	992150	Kota Balikpapan	7.601.000.000	4.021.600.000		4.021.600.000	3.579.400.000
1651	980294	Kota Bontang	12.325.000.000	5.326.500.000		5.326.500.000	6.998.500.000
1652	992143	Kota Samarinda	8.162.000.000	5.877.800.000		5.877.800.000	2.284.200.000
1653	941901	Kota Tarakan	7.053.000.000	7.005.000.000		7.005.000.000	48.000.000
1654	997561	Kab. Penajam Paser Utara	8.840.000.000	2.652.000.000		2.652.000.000	6.188.000.000
1702	993059	Kab. Bolaang Mongondow	59.429.000.000	56.111.000.000		56.111.000.000	3.318.000.000
1703	993042	Kab. Minahasa	59.189.000.000	59.189.000.000		59.189.000.000	0
1704	993063	Kab. Sangihe	57.399.000.000	53.653.600.000		53.653.600.000	3.745.400.000
1705	993091	Kota Bitung	32.450.000.000	32.450.000.000		32.450.000.000	0
1706	993070	Kota Manado	35.379.000.000	30.898.500.000		30.898.500.000	4.480.500.000
1707	997412	Kab. Kepulauan Talaud	52.277.000.000	52.277.000.000		52.277.000.000	0
1708	998240	Kab. Minahasa Selatan	55.122.000.000	55.122.000.000		55.122.000.000	0
1751	998257	Kota Tomohon	68.710.000.000	68.710.000.000		68.710.000.000	0
1753	987485	Kab. Minahasa Utara	81.666.000.000	81.666.000.000		81.666.000.000	0
1801	993000	Kab. Banggai	50.672.000.000	50.672.000.000		50.672.000.000	0
1802	980337	Kab. Banggai Kepulauan	49.779.000.000	48.607.000.000		48.607.000.000	1.172.000.000
1803	980316	Kab. Buol	43.074.000.000	25.844.400.000		25.844.400.000	17.229.600.000
1804	992998	Kab. Toli-Toli	41.063.000.000	41.063.000.000		41.063.000.000	0
1805	992981	Kab. Donggala	64.240.000.000	64.240.000.000		64.240.000.000	0
1806	980320	Kab. Morowali	46.840.000.000	46.840.000.000		46.840.000.000	0
1807	992977	Kab. Poso	46.410.000.000	46.410.000.000		46.410.000.000	0
1808	993017	Kota Palu	35.755.000.000	35.755.000.000		35.755.000.000	0
1809	997582	Kab. Parigi Moutong	46.287.000.000	46.287.000.000		46.287.000.000	0
1851	987471	Kab. Tojo Una Una	43.844.000.000	43.844.000.000		43.844.000.000	0
1901	992846	Kab. Bantaeng	39.875.000.000	39.875.000.000		39.875.000.000	0
1902	992888	Kab. Barru	37.003.000.000	37.003.000.000		37.003.000.000	0
1903	992778	Kab. Bone	57.838.000.000	57.838.000.000		57.838.000.000	0
1905	992832	Kab. Bulukumba	45.519.000.000	45.519.000.000		45.519.000.000	0
1906	992935	Kab. Enrekang	37.202.000.000	37.202.000.000		37.202.000.000	0
1907	992740	Kab. Gowa	50.874.000.000	50.874.000.000		50.874.000.000	0
1909	992850	Kab. Jeneponto	41.391.000.000	41.391.000.000		41.391.000.000	0
1910	992811	Kab. Luwu	52.413.000.000	50.633.700.000		50.633.700.000	1.779.300.000
1911	980341	Kab. Luwu Utara	55.983.000.000	47.112.168.181		47.112.168.181	8.870.831.819
1912	992799	Kab. Maros	49.634.000.000	49.634.000.000		49.634.000.000	0
1913	992900	Kab. Pangkajene Kepulauan	41.866.000.000	41.792.200.000		41.792.200.000	73.800.000
1914	992736	Kab. Pinrang	41.652.000.000	41.652.000.000		41.652.000.000	0
1915	992867	Kab. Selayar	41.089.000.000	41.089.000.000		41.089.000.000	0
1916	992892	Kab. Sidenreng Rappang	43.606.000.000	43.606.000.000		43.606.000.000	0
1917	992825	Kab. Sinjai	53.769.000.000	50.563.800.000		50.563.800.000	3.205.200.000
1918	992914	Kab. Soppeng	40.100.000.000	40.100.000.000		40.100.000.000	0
1919	992871	Kab. Takalar	44.979.000.000	44.979.000.000		44.979.000.000	0
1921	992782	Kab. Tana Toraja	46.041.000.000	46.041.000.000		46.041.000.000	0

KODE WILAYAH	KODE SATKER	NAMA PEMDA	ANGGARAN	RALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
1922	992757	Kab. Wajo	44.938.000.000	44.938.000.000		44.938.000.000	0
1924	992956	Kota Pare-pare	32.399.000.000	32.399.000.000		32.399.000.000	0
1951	992942	Kota Makassar	8.535.000.000	8.535.000.000		8.535.000.000	0
1952	997604	Kota Palopo	32.080.000.000	32.080.000.000		32.080.000.000	0
1953	928282	Kab. Luwu Timur	44.098.000.000	42.400.600.000		42.400.600.000	1.697.400.000
2001	993127	Kab. Buton	58.108.000.000	58.108.000.000		58.108.000.000	0
2002	993110	Kab. Konawe	53.173.000.000	53.173.000.000		53.173.000.000	0
2003	993148	Kab. Kolaka	47.976.000.000	47.976.000.000		47.976.000.000	0
2004	993131	Kab. Muna	51.072.000.000	47.655.700.000		47.655.700.000	3.416.300.000
2005	993326	Kota Kendari	36.879.000.000	36.879.000.000		36.879.000.000	0
2006	994782	Kota Bau-bau	36.422.000.000	36.422.000.000		36.422.000.000	0
2007	998304	Kab. Konawe Selatan	55.506.000.000	55.506.000.000		55.506.000.000	0
2008	987642	Kab. Bombana	51.059.000.000	51.059.000.000		51.059.000.000	0
2051	987638	Kab. Wakatobi	75.962.000.000	67.477.600.000		67.477.600.000	8.484.400.000
2052	987443	Kab. Kolaka Utara	35.372.000.000	35.372.000.000		35.372.000.000	0
2101	980358	Kab. Maluku Tenggara Barat	58.183.000.000	24.314.900.000		24.314.900.000	33.868.100.000
2102	993169	Kab. Maluku Tengah	56.107.000.000	46.201.500.000		46.201.500.000	9.905.500.000
2103	993173	Kab. Maluku Tenggara	49.444.000.000	49.444.000.000		49.444.000.000	0
2104	980362	Kab. Pulau Buru	41.111.000.000	41.111.000.000		41.111.000.000	0
2105	993202	Kota Ambon	37.129.000.000	37.129.000.000		37.129.000.000	0
2106	987439	Kab. Seram Bagian Barat	83.127.000.000	76.883.900.000		76.883.900.000	6.243.100.000
2107	987422	Kab. Seram Bagian Timur	40.400.000.000	34.490.800.000		34.490.800.000	5.909.200.000
2151	987621	Kab. Kepulauan Aru	43.407.000.000	39.251.600.000		39.251.600.000	4.155.400.000
2201	992342	Kab. Badung	35.795.000.000	35.795.000.000		35.795.000.000	0
2202	992338	Kab. Bangli	36.465.000.000	36.465.000.000		36.465.000.000	0
2203	992281	Kab. Buleleng	49.861.000.000	49.861.000.000		49.861.000.000	0
2204	992317	Kab. Gianyar	43.147.000.000	43.147.000.000		43.147.000.000	0
2205	992295	Kab. Jembrana	42.697.000.000	42.697.000.000		42.697.000.000	0
2206	992321	Kab. Karangasem	46.776.000.000	46.776.000.000		46.776.000.000	0
2207	992300	Kab. Klungkung	39.472.000.000	39.171.900.000		39.171.900.000	300.100.000
2208	992359	Kab. Tabanan	46.229.000.000	46.229.000.000		46.229.000.000	0
2251	992363	Kota Denpasar	7.935.000.000	7.857.300.000		7.857.300.000	77.700.000
2301	992410	Kab. Bima	56.051.000.000	56.051.000.000		56.051.000.000	0
2302	992431	Kab. Dompu	35.882.000.000	35.882.000.000		35.882.000.000	0
2303	992384	Kab. Lombok Barat	51.480.000.000	51.480.000.000		51.480.000.000	0
2304	992391	Kab. Lombok Tengah	54.131.000.000	52.728.600.000		52.728.600.000	1.402.400.000
2305	992406	Kab. Lombok Timur	57.772.000.000	57.772.000.000		57.772.000.000	0
2306	992427	Kab. Sumbawa	54.927.000.000	54.927.000.000		54.927.000.000	0
2307	992448	Kota Mataram	33.028.000.000	31.979.900.000		31.979.900.000	1.048.100.000
2351	997625	Kota Bima	32.658.000.000	32.658.000.000		32.658.000.000	0
2352	987450	Kab. Sumbawa Barat	30.263.000.000	29.090.200.000		29.090.200.000	1.172.800.000
2401	992502	Kab. Alor	45.125.000.000	35.435.100.000		35.435.100.000	9.689.900.000
2402	992473	Kab. Belu	45.684.000.000	45.684.000.000		45.684.000.000	0
2403	992537	Kab. Ende	47.326.000.000	44.240.200.000		44.240.200.000	3.085.800.000
2404	992520	Kab. Flores Timur	46.695.000.000	46.695.000.000		46.695.000.000	0
2405	992469	Kab. Kupang	58.295.000.000	58.295.000.000		58.295.000.000	0
2406	980379	Kab. Lembata	47.822.000.000	47.822.000.000		47.822.000.000	0
2407	992558	Kab. Manggarai	52.103.000.000	50.270.500.000		50.270.500.000	1.832.500.000
2408	992541	Kab. Ngada	52.727.000.000	47.454.200.000		47.454.200.000	5.272.800.000
2409	992516	Kab. Sikka	44.825.000.000	44.825.000.000		44.825.000.000	0
2410	992579	Kab. Sumba Barat	47.241.000.000	43.927.400.000		43.927.400.000	3.313.600.000

KODE WILAYAH	KODE SATKER	NAMA PEMDA	ANGGARAN	RALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
2411	992562	Kab. Sumba Timur	49.289.000.000	48.983.000.000		48.983.000.000	306.000.000
2412	992494	Kab. Timor Tengah Selatan	45.302.000.000	34.783.700.000		34.783.700.000	10.518.300.000
2413	992480	Kab. Timor Tengah Utara	44.418.000.000	42.764.900.000		42.764.900.000	1.653.100.000
2414	993368	Kota Kupang	32.299.000.000	32.299.000.000		32.299.000.000	0
2415	997578	Kab. Rote Ndao	39.789.000.000	37.698.900.000		37.698.900.000	2.090.100.000
2451	998510	Kab. Manggarai Barat	49.400.000.000	45.720.000.000		45.720.000.000	3.680.000.000
2501	993237	Kab. Biak Numfor	52.180.000.000	37.316.800.000		37.316.800.000	14.863.200.000
2502	993220	Kab. Jayapura	52.435.000.000	52.435.000.000		52.435.000.000	0
2504	993290	Kab. Jayawijaya	56.113.000.000	35.427.900.000		35.427.900.000	20.685.100.000
2507	993283	Kab. Merauke	73.181.000.000	73.181.000.000		73.181.000.000	0
2508	993401	Kab. Mimika	44.027.000.000	44.027.000.000		44.027.000.000	0
2509	993305	Kab. Nabire	44.663.000.000	44.663.000.000		44.663.000.000	0
2510	993393	Kab. Paniai	58.720.000.000	58.720.000.000		58.720.000.000	0
2511	993389	Kab. Puncak Jaya	53.253.000.000	53.253.000.000		53.253.000.000	0
2512	993258	Kab. Yapen Waropen	41.860.000.000	36.698.400.000		36.698.400.000	5.161.600.000
2513	993312	Kota Jayapura	47.926.000.000	47.926.000.000		47.926.000.000	0
2514	998392	Kab. Sarmi	38.763.000.000	37.683.200.000		37.683.200.000	1.079.800.000
2515	998400	Kab. Keerom	49.644.000.000	49.644.000.000		49.644.000.000	0
2516	998477	Kab. Yahukimo	47.804.000.000	14.341.200.000		14.341.200.000	33.462.800.000
2517	998421	Kab. Pegunungan Bintang	57.574.000.000	57.574.000.000		57.574.000.000	0
2518	998414	Kab. Tolikara	52.664.000.000	31.598.400.000		31.598.400.000	21.065.600.000
2519	998388	Kab. Boven Digoel	50.385.000.000	34.527.200.000		34.527.200.000	15.857.800.000
2523	998367	Kab. Mappi	47.195.000.000	14.158.500.000	(1.920.000.000)	16.078.500.000	31.116.500.000
2524	998371	Kab. Asmat	58.038.000.000	17.411.400.000		17.411.400.000	40.626.600.000
2525	998460	Kab. Waropen	45.133.000.000	45.133.000.000		45.133.000.000	0
2551	987511	Kab. Supiori	56.509.000.000	56.509.000.000		56.509.000.000	0
2601	990739	Kab. Bengkulu Selatan	56.920.000.000	56.920.000.000		56.920.000.000	0
2602	990722	Kab. Bengkulu Utara	57.798.000.000	57.798.000.000		57.798.000.000	0
2603	990743	Kab. Rejang Lebong	48.366.000.000	48.366.000.000		48.366.000.000	0
2604	990750	Kota Bengkulu	35.591.000.000	35.591.000.000		35.591.000.000	0
2605	998215	Kab. Kaur	40.738.000.000	40.738.000.000		40.738.000.000	0
2606	998201	Kab. Seluma	42.336.000.000	42.336.000.000		42.336.000.000	0
2607	998503	Kab. Mukomuko	37.049.000.000	37.049.000.000		37.049.000.000	0
2608	987600	Kab. Lebong	35.255.000.000	34.948.500.000		34.948.500.000	306.500.000
2651	987617	Kab. Kepahiang	53.330.000.000	53.330.000.000		53.330.000.000	0
2801	993194	Kab. Halmahera Tengah	48.019.000.000	48.019.000.000		48.019.000.000	0
2802	993180	Kab. Halmahera Barat	51.252.000.000	51.252.000.000		51.252.000.000	0
2803	980028	Kota Ternate	45.530.000.000	45.530.000.000		45.530.000.000	0
2804	998346	Kab. Halmahera Timur	38.106.000.000	38.106.000.000		38.106.000.000	0
2805	998350	Kota Tidore Kepulauan	41.449.000.000	41.449.000.000		41.449.000.000	0
2806	998332	Kab. Kepulauan Sula	43.028.000.000	43.028.000.000		43.028.000.000	0
2851	998325	Kab. Halmahera Selatan	44.320.000.000	44.320.000.000		44.320.000.000	0
2852	998311	Kab. Halmahera Utara	46.275.000.000	43.331.000.000		43.331.000.000	2.944.000.000
2901	990917	Kab. Lebak	55.467.000.000	51.176.000.000		51.176.000.000	4.291.000.000
2902	990900	Kab. Pandeglang	51.052.000.000	51.052.000.000		51.052.000.000	0
2903	990895	Kab. Serang	57.978.000.000	57.978.000.000		57.978.000.000	0
2904	990921	Kab. Tangerang	55.057.000.000	55.057.000.000		55.057.000.000	0
2951	980049	Kota Cilegon	12.927.000.000	12.927.000.000		12.927.000.000	0
2952	991134	Kota Tangerang	7.433.000.000	6.191.600.000		6.191.600.000	1.241.400.000
3001	990629	Kab. Bangka	44.355.000.000	43.610.000.000		43.610.000.000	745.000.000
3002	990612	Kab. Belitung	42.826.000.000	42.073.300.000		42.073.300.000	752.700.000

KODE WILAYAH	KODE SATKER	NAMA PEMDA	ANGGARAN	RALISASI BRUTO	PENGEMBALIAN	REALISASI NETO	SISA ANGGARAN
3003	990701	Kota Pangkal Pinang	31.927.000.000	31.306.100.000		31.306.100.000	620.900.000
3004	998189	Kab. Bangka Selatan	37.761.000.000	24.446.700.000		24.446.700.000	13.314.300.000
3005	998172	Kab. Bangka Tengah	34.060.000.000	25.000.600.000		25.000.600.000	9.059.400.000
3006	998168	Kab. Bangka Barat	40.921.000.000	27.765.300.000		27.765.300.000	13.155.700.000
3051	998193	Kab. Belitung Timur	34.907.000.000	34.907.000.000		34.907.000.000	0
3101	980302	Kab. Boalemo	45.121.000.000	45.121.000.000		45.121.000.000	0
3102	993038	Kab. Gorontalo	55.544.000.000	55.544.000.000		55.544.000.000	0
3103	993084	Kota Gorontalo	32.745.000.000	32.745.000.000		32.745.000.000	0
3104	998261	Kab. Pohuwato	44.832.000.000	44.832.000.000	(620.700.000)	45.452.700.000	-620.700.000
3151	998278	Kab. Bone Bolango	42.676.000.000	42.676.000.000		42.676.000.000	0
3201	990480	Kab. Bintan	16.044.000.000	9.783.400.000		9.783.400.000	6.260.600.000
3202	980121	Kab. Natuna	36.961.000.000	36.961.000.000		36.961.000.000	0
3203	980117	Kab. Karimun	13.905.000.000	13.905.000.000		13.905.000.000	0
3204	990523	Kota Batam	13.791.000.000	13.791.000.000		13.791.000.000	0
3251	994708	Kota Tanjung Pinang	29.211.000.000	27.297.700.000		27.297.700.000	1.913.300.000
3252	987464	Kab. Lingga	39.512.000.000	11.332.150.000		11.332.150.000	28.179.850.000
3301	993262	Kab. Sorong	38.497.000.000	38.497.000.000		38.497.000.000	0
3302	993241	Kab. Manokwari	50.012.000.000	50.010.000.000		50.010.000.000	2.000.000
3303	993279	Kab. Fak Fak	43.879.000.000	43.879.000.000		43.879.000.000	0
3304	980383	Kota Sorong	36.915.000.000	36.915.000.000		36.915.000.000	0
3305	998442	Kab. Sorong Selatan	50.222.000.000	41.838.100.000		41.838.100.000	8.383.900.000
3306	998456	Kab. Raja Ampat	54.180.000.000	54.180.000.000		54.180.000.000	0
3307	998481	Kab. Teluk Bintuni	37.877.000.000	37.877.000.000		37.877.000.000	0
3308	998498	Kab. Teluk Wondama	46.761.000.000	46.761.000.000		46.761.000.000	0
3351	998435	Kab. Kaimana	38.373.000.000	38.373.000.000		38.373.000.000	0
3401	992804	Kab. Majene	33.710.000.000	33.710.000.000		33.710.000.000	0
3402	992761	Kab. Mamuju	55.391.000.000	55.391.000.000		55.391.000.000	0
3403	992921	Kab. Polewali Mandar	45.789.000.000	45.789.000.000		45.789.000.000	0
3404	997599	Kab. Mamasa	29.599.000.000	29.599.000.000		29.599.000.000	0
3405	998299	Kab. Mamuju Utara	40.609.000.000	37.884.900.000		37.884.900.000	2.724.100.000
		Lain-lain			(13.602.483)	13.602.483	(13.602.483)
		TOTAL	17.094.100.000.000	16.240.426.220.557	(2.606.767.483)	16.243.032.988.040	851.067.011.960

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN DANA PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2007
(Dalam Rupiah)

KODE	NAMA WILAYAH	DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA	DANA PENYESUAIAN MURNI	DANA PENYESUAIAN TUNJANGAN KEPENDIDIKAN	DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR	TOTAL BA 071
01	Provinsi DKI Jakarta	-	653.081.500.000	30.844.546.200		683.926.046.200
02	Provinsi Jawa Barat	-	-	133.776.453.200	212.055.238.652	345.831.691.852
03	Provinsi Jawa Tengah	-	-	147.491.783.400	182.472.442.000	329.964.225.400
04	Provinsi D.I. Yogyakarta	-	-	22.438.855.400	37.650.000.000	60.088.855.400
05	Provinsi Jawa Timur	-	8.754.900.000	156.023.501.400	221.200.000.000	385.978.401.400
06	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	-	-	36.193.235.000	48.200.000.000	84.393.235.000
07	Provinsi Sumatera Utara	-	-	71.433.811.800	293.392.661.481	364.826.473.281
08	Provinsi Sumatera Barat	-	-	40.945.125.000	57.500.000.000	98.445.125.000
09	Provinsi Riau	-	-	25.665.486.600	114.600.000.000	140.265.486.600
10	Provinsi Jambi	-	-	19.353.942.400	83.743.055.000	103.096.997.400
11	Provinsi Sumatera Selatan	-	-	35.423.908.000	137.720.000.000	173.143.908.000
12	Provinsi Lampung	-	-	42.811.917.200	65.600.000.000	108.411.917.200
13	Provinsi Kalimantan Barat	-	-	25.137.905.000	69.900.000.000	95.037.905.000
14	Provinsi Kalimantan Tengah	-	-	17.718.469.600	212.644.246.600	230.362.716.200
15	Provinsi Kalimantan Selatan	-	-	21.890.180.000	79.690.000.000	101.580.180.000
16	Provinsi Kalimantan Timur	-	21.365.200.000	19.303.107.200	44.400.000.000	85.068.307.200
17	Provinsi Sulawesi Utara	-	6.023.500.000	17.309.195.800	149.950.000.000	173.282.695.800
18	Provinsi Sulawesi Tengah	-	-	20.385.315.600	86.450.000.000	106.835.315.600
19	Provinsi Sulawesi Selatan	-	29.262.900.000	50.842.833.600	123.700.000.000	203.805.733.600
20	Provinsi Sulawesi Tenggara	-	-	18.643.705.600	95.600.000.000	114.243.705.600
21	Provinsi Maluku	-	-	15.875.553.200	42.605.000.000	58.480.553.200
22	Provinsi Bali	-	-	20.751.767.400	75.000.000.000	95.751.767.400
23	Provinsi Nusa Tenggara Barat	-	-	25.351.235.000	40.000.000.000	65.351.235.000
24	Provinsi Nusa Tenggara Timur	-	-	29.300.754.600	141.860.000.000	171.160.754.600
25	Provinsi Papua	4.045.748.000.000	24.429.000.000	13.278.657.600	232.400.000.000	4.315.855.657.600
26	Provinsi Bengkulu	-	-	13.551.109.000	42.000.000.000	55.551.109.000
28	Provinsi Maluku Utara	-	-	9.704.242.600	73.500.000.000	83.204.242.600
29	Provinsi Banten	-	-	28.014.134.200	0	28.014.134.200

LAPORAN REALISASI DANA PERIMBANGAN
DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA DAN DANA PENYESUAIAN
TAHUN ANGGARAN 2007
(Dalam Rupiah)

KODE	NAMA WILAYAH	DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA	DANA PENYESUAIAN MURNI	DANA PENYESUAIAN TUNJANGAN KEPENDIDIKAN	DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR	TOTAL BA 071
30	Provinsi Bangka Belitung	-	-	5.918.283.800	9.000.000.000	14.918.283.800
31	Provinsi Gorontalo	-	99.996.500.000	8.457.267.000	42.500.000.000	150.953.767.000
32	Provinsi Kepulauan Riau	-	-	5.301.036.000	121.500.000.000	126.801.036.000
33	Provinsi Papua Barat	-	-	5.269.365.400	81.150.000.000	86.419.365.400
34	Provinsi Sulawesi Barat	-	-	6.954.092.600	48.000.000.000	54.954.092.600
JUMLAH		**4.045.748.000.000**	**842.913.500.000**	**1.141.360.776.400**	**3.265.982.643.733**	**9.296.004.920.133**

LAPORAN REALISASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
MENURUT PROVINSI/ KABUPATEN/ KOTA
TAHUN ANGGARAN 2007
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN
A. DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA				
2500	Provinsi Papua	4.045.748.000.000	4.045.748.000.000	0
JUMLAH DANA OTONOMI KHUSUS PAPUA		**4.045.748.000.000**	**4.045.748.000.000**	**0**
B. DANA PENYESUAIAN MURNI UNTUK PROPINSI				
0100	Provinsi DKI Jakarta	653.081.500.000	653.081.500.000	0
1600	Provinsi Kalimantan Timur	21.365.200.000	21.365.200.000	0
3100	Provinsi Gorontalo	99.996.500.000	99.996.500.000	0
JUMLAH DANA PENYESUAIAN MURNI UNTUK PROPINSI		**774.443.200.000**	**774.443.200.000**	**0**
C. DANA PENYESUAIAN MURNI UNTUK KAB/KOTA				
0557	Kota Kediri	8.754.900.000	8.754.900.000	0
1708	Kab. Minahasa Utara	6.023.500.000	6.023.500.000	0
1910	Kab. Sinjai	29.262.900.000	29.262.900.000	0
2501	Kab. Jayapura	11.972.000.000	11.972.000.000	0
2512	Kab. Mimika	12.457.000.000	12.457.000.000	0
JUMLAH DANA PENYESUAIAN MURNI UNTUK KAB/KOTA		**68.470.300.000**	**68.470.300.000**	**0**
D. DANA PENYESUAIAN TUNJANGAN KEPENDIDIKAN				
0100	Provinsi DKI Jakarta	30.844.546.200	30.844.546.200	0
0200	Provinsi Jawa Barat	254.108.400	254.108.400	0
0205	Kab. Bogor	7.152.295.800	7.152.295.800	0
0206	Kab. Sukabumi	6.640.753.600	6.640.753.600	0
0207	Kab. Cianjur	7.325.583.200	7.325.583.200	0
0208	Kab. Bekasi	7.459.410.400	7.459.410.400	0
0209	Kab. Karawang	5.975.065.200	5.975.065.200	0
0210	Kab. Purwakarta	3.531.255.000	3.531.255.000	0
0211	Kab. Subang	5.472.074.400	5.472.074.400	0
0212	Kab. Bandung	8.703.546.800	8.703.546.800	0
0213	Kab. Sumedang	5.648.674.200	5.648.674.200	0
0214	Kab. Garut	8.181.336.800	8.181.336.800	0
0215	Kab. Tasikmalaya	5.523.804.000	5.523.804.000	0
0216	Kab. Ciamis	8.572.054.400	8.572.054.400	0
0217	Kab. Cirebon	8.506.903.600	8.506.903.600	0
0218	Kab. Kuningan	5.957.395.600	5.957.395.600	0
0219	Kab. Indramayu	5.848.798.800	5.848.798.800	0
0220	Kab. Majalengka	6.163.427.400	6.163.427.400	0
0251	Kota Bandung	5.712.174.000	5.712.174.000	0
0252	Kota Bogor	3.800.513.600	3.800.513.600	0
0253	Kota Sukabumi	1.327.305.200	1.327.305.200	0
0254	Kota Cirebon	1.929.070.000	1.929.070.000	0
0257	Kota Bekasi	3.878.071.600	3.878.071.600	0
0258	Kota Depok	2.792.943.400	2.792.943.400	0
0260	Kota Tasikmalaya	3.919.708.000	3.919.708.000	0
0261	Kota Cimahi	2.376.517.000	2.376.517.000	0
0262	Kota Banjar	1.123.662.800	1.123.662.800	0
0300	Provinsi Jawa Tengah	153.316.800	153.316.800	0

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN
0301	Kab. Semarang	4.198.550.200	4.198.550.200	0
0302	Kab. Kendal	3.924.492.000	3.924.492.000	0
0303	Kab. Demak	3.181.653.800	3.181.653.800	0
0304	Kab. Grobogan	4.725.000.800	4.725.000.800	0
0305	Kab. Pekalongan	3.624.927.800	3.624.927.800	0
0306	Kab. Batang	2.885.025.000	2.885.025.000	0
0307	Kab. Tegal	5.551.933.400	5.551.933.400	0
0308	Kab. Brebes	5.405.054.200	5.405.054.200	0
0309	Kab. Pati	4.803.874.400	4.803.874.400	0
0310	Kab. Kudus	3.660.937.800	3.660.937.800	0
0311	Kab. Pemalang	4.845.388.600	4.845.388.600	0
0312	Kab. Jepara	3.888.749.800	3.888.749.800	0
0313	Kab. Rembang	2.922.790.000	2.922.790.000	0
0314	Kab. Blora	3.877.434.600	3.877.434.600	0
0315	Kab. Banyumas	6.740.913.400	6.740.913.400	0
0316	Kab. Cilacap	5.845.990.800	5.845.990.800	0
0317	Kab. Purbalingga	3.684.798.000	3.684.798.000	0
0318	Kab. Banjarnegara	3.812.218.800	3.812.218.800	0
0319	Kab. Magelang	7.244.853.200	7.244.853.200	0
0320	Kab. Temanggung	2.951.078.000	2.951.078.000	0
0321	Kab. Wonosobo	3.296.456.800	3.296.456.800	0
0322	Kab. Purworejo	4.379.499.800	4.379.499.800	0
0323	Kab. Kebumen	5.653.341.200	5.653.341.200	0
0324	Kab. Klaten	7.102.914.000	7.102.914.000	0
0325	Kab. Boyolali	5.347.050.800	5.347.050.800	0
0326	Kab. Sragen	5.094.993.800	5.094.993.800	0
0327	Kab. Sukoharjo	4.438.358.600	4.438.358.600	0
0328	Kab. Karanganyar	4.535.203.400	4.535.203.400	0
0329	Kab. Wonogiri	5.788.231.800	5.788.231.800	0
0351	Kota Semarang	5.073.398.200	5.073.398.200	0
0352	Kota Salatiga	1.264.325.400	1.264.325.400	0
0353	Kota Pekalongan	1.222.642.200	1.222.642.200	0
0354	Kota Tegal	1.306.871.800	1.306.871.800	0
0355	Kota Magelang	1.339.455.000	1.339.455.000	0
0356	Kota Surakarta	3.720.059.200	3.720.059.200	0
0400	Provinsi DI Yogyakarta	487.078.800	487.078.800	0
0401	Kab. Bantul	4.642.804.400	4.642.804.400	0
0402	Kab. Sleman	5.613.532.600	5.613.532.600	0
0403	Kab. Gunung Kidul	5.392.553.400	5.392.553.400	0
0404	Kab. Kulon Progo	3.385.129.800	3.385.129.800	0
0451	Kota Yogyakarta	2.917.756.400	2.917.756.400	0
0500	Provinsi Jawa Timur	46.334.600	46.334.600	0
0501	Kab. Gresik	3.982.079.400	3.982.079.400	0
0502	Kab. Mojokerto	3.681.379.000	3.681.379.000	0
0503	Kab. Sidoarjo	5.884.481.200	5.884.481.200	0
0504	Kab. Jombang	4.486.999.400	4.486.999.400	0
0505	Kab. Sampang	2.978.037.400	2.978.037.400	0
0506	Kab. Pamekasan	3.465.989.800	3.465.989.800	0
0507	Kab. Sumenep	4.114.331.000	4.114.331.000	0
0508	Kab. Bangkalan	3.556.982.000	3.556.982.000	0
0509	Kab. Bondowoso	3.818.739.600	3.818.739.600	0
0510	Kab. Situbondo	3.085.791.800	3.085.791.800	0
0511	Kab. Banyuwangi	6.470.484.800	6.470.484.800	0

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN
0512	Kab. Jember	7.552.966.200	7.552.966.200	0
0513	Kab. Malang	8.279.546.600	8.279.546.600	0
0514	Kab. Pasuruan	4.799.579.200	4.799.579.200	0
0515	Kab. Probolinggo	3.777.256.600	3.777.256.600	0
0516	Kab. Lumajang	3.952.982.800	3.952.982.800	0
0517	Kab. Kediri	5.902.132.600	5.902.132.600	0
0518	Kab. Tulungagung	5.978.453.000	5.978.453.000	0
0519	Kab. Nganjuk	5.322.236.400	5.322.236.400	0
0520	Kab. Trenggalek	4.104.656.400	4.104.656.400	0
0521	Kab. Blitar	6.394.510.200	6.394.510.200	0
0522	Kab. Madiun	3.695.169.400	3.695.169.400	0
0523	Kab. Ngawi	4.949.968.400	4.949.968.400	0
0524	Kab. Magetan	4.317.409.200	4.317.409.200	0
0525	Kab. Ponorogo	5.214.370.200	5.214.370.200	0
0526	Kab. Pacitan	2.996.567.600	2.996.567.600	0
0527	Kab. Bojonegoro	4.984.275.400	4.984.275.400	0
0528	Kab. Tuban	3.813.828.200	3.813.828.200	0
0529	Kab. Lamongan	5.136.328.600	5.136.328.600	0
0551	Kota Surabaya	6.679.368.800	6.679.368.800	0
0552	Kota Mojokerto	951.602.600	951.602.600	0
0553	Kota Malang	2.934.685.000	2.934.685.000	0
0554	Kota Pasuruan	1.072.536.400	1.072.536.400	0
0555	Kota Probollinggo	1.362.680.800	1.362.680.800	0
0556	Kota Blitar	1.294.308.600	1.294.308.600	0
0557	Kota Kediri	2.307.840.600	2.307.840.600	0
0558	Kota Madiun	1.892.137.000	1.892.137.000	0
0559	Kota Batu	784.474.600	784.474.600	0
0600	Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam	0	0	0
0601	Kab. Aceh Besar	3.028.885.600	3.028.885.600	0
0602	Kab. Aceh Pidie	4.377.679.800	4.377.679.800	0
0603	Kab. Aceh Utara	3.536.738.400	3.536.738.400	0
0604	Kab. Aceh Timur	2.211.630.200	2.211.630.200	0
0605	Kab. Aceh Selatan	2.050.435.400	2.050.435.400	0
0606	Kab. Aceh Barat	1.707.282.200	1.707.282.200	0
0607	Kab. Aceh Tengah	1.778.639.200	1.778.639.200	0
0608	Kab. Aceh Tenggara	1.546.979.200	1.546.979.200	0
0609	Kab. Simeulue	570.908.000	570.908.000	0
0610	Kab. Aceh Singkil	698.599.200	698.599.200	0
0611	Kab. Bireun	3.338.805.600	3.338.805.600	0
0612	Kab. Aceh Barat Daya	806.371.800	806.371.800	0
0613	Kab. Gayo Lues	529.367.800	529.367.800	0
0614	Kab. Aceh Jaya	560.255.800	560.255.800	0
0615	Kab. Nagan Raya	1.077.923.600	1.077.923.600	0
0616	Kab. Aceh Tamiang	1.403.402.000	1.403.402.000	0
0617	Kab. Bener Meriah	1.700.524.800	1.700.524.800	0
0651	Kota Banda Aceh	2.620.846.800	2.620.846.800	0
0652	Kota Sabang	476.000.200	476.000.200	0
0653	Kota Langsa	1.116.632.400	1.116.632.400	0
0654	Kota Lhokseumawe	1.055.327.000	1.055.327.000	0
0700	Provinsi Sumatera Utara	0	0	0
0701	Kab. Deli Serdang	6.664.637.200	6.664.637.200	0
0702	Kab. Tanah Karo	940.412.200	940.412.200	0
0703	Kab. Langkat	5.580.978.000	5.580.978.000	0

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN
0704	Kab. Tapanuli Tengah	2.010.702.200	2.010.702.200	0
0705	Kab. Simalungun	5.953.191.400	5.953.191.400	0
0706	Kab. Labuhan Batu	4.565.597.400	4.565.597.400	0
0707	Kab. Dairi	2.457.314.600	2.457.314.600	0
0708	Kab. Tapanuli Utara	3.752.507.200	3.752.507.200	0
0709	Kab. Tapanuli Selatan	3.884.080.200	3.884.080.200	0
0710	Kab. Asahan	5.194.779.200	5.194.779.200	0
0711	Kab. Nias	3.537.287.000	3.537.287.000	0
0712	Kab. Toba Samosir	2.365.259.000	2.365.259.000	0
0713	Kab. Mandailing Natal	2.563.163.200	2.563.163.200	0
0714	Kab. Nias Selatan	852.888.400	852.888.400	0
0715	Kab. Pakpak Bharat	442.995.800	442.995.800	0
0716	Kab. Humbang Hasundutan	1.478.271.600	1.478.271.600	0
0717	Kab. Samosir	1.173.237.000	1.173.237.000	0
0718	Kab. Serdang Berdagai	2.585.193.000	2.585.193.000	0
0751	Kota Medan	7.695.945.400	7.695.945.400	0
0752	Kota Tebing Tinggi	977.579.200	977.579.200	0
0753	Kota Binjai	1.621.828.000	1.621.828.000	0
0754	Kota Pematang siantar	1.808.219.400	1.808.219.400	0
0755	Kota Tanjung Balai	801.564.400	801.564.400	0
0756	Kota Sibolga	890.211.400	890.211.400	0
0757	Kota Padang Sidempuan	1.635.969.400	1.635.969.400	0
0800	Provinsi Sumatera Barat	69.560.400	69.560.400	0
0801	Kab. Agam	3.646.175.000	3.646.175.000	0
0802	Kab. Pasaman	3.204.494.800	3.204.494.800	0
0803	Kab. Limapuluh Koto	3.003.949.000	3.003.949.000	0
0804	Kab. Solok	1.186.907.800	1.186.907.800	0
0805	Kab. Padang Pariaman	3.366.875.200	3.366.875.200	0
0806	Kab. Pesisir Selatan	3.573.850.800	3.573.850.800	0
0807	Kab. Tanah Datar	3.283.456.800	3.283.456.800	0
0808	Kab. Sawahlunto Sijunjung	2.403.632.400	2.403.632.400	0
0809	Kab. Kepulauan Mentawai	472.191.200	472.191.200	0
0810	Kab. Dharmasraya	1.144.236.600	1.144.236.600	0
0811	Kab. Solok Selatan	953.768.400	953.768.400	0
0812	Kab. Pasaman Barat	1.544.270.000	1.544.270.000	0
0851	Kota Bukit Tinggi	971.336.600	971.336.600	0
0852	Kota Padang Panjang	600.462.200	600.462.200	0
0853	Kota Solok	3.698.661.200	3.698.661.200	0
0854	Kota Sawahlunto	585.962.000	585.962.000	0
0855	Kota Padang	5.089.679.400	5.089.679.400	0
0856	Kota Payakumbuh	1.079.858.000	1.079.858.000	0
0857	Kota Pariaman	1.065.797.200	1.065.797.200	0
0900	Provinsi Riau	21.294.000	21.294.000	0
0901	Kab. Kampar	4.067.944.400	4.067.944.400	0
0902	Kab. Bengkalis	3.383.556.800	3.383.556.800	0
0904	Kab. Indragiri Hulu	1.999.485.800	1.999.485.800	0
0905	Kab. Indragiri Hilir	2.878.909.800	2.878.909.800	0
0906	Kab. Pelalawan	1.098.359.600	1.098.359.600	0
0907	Kab. Rokan Hulu	1.938.539.200	1.938.539.200	0
0908	Kab. Rokan Hilir	1.845.823.200	1.845.823.200	0
0909	Kab. Siak	1.385.797.400	1.385.797.400	0
0912	Kab. Kuantan Singingi	2.216.778.200	2.216.778.200	0
0951	Kota Pekanbaru	3.566.672.200	3.566.672.200	0

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN
0953	Kota Dumai	1.262.326.000	1.262.326.000	0
1000	Provinsi Jambi	18.454.800	18.454.800	0
1001	Kab. Batanghari	1.581.379.800	1.581.379.800	0
1002	Kab. Tanjung Jabung Barat	1.317.206.800	1.317.206.800	0
1003	Kab. Bungo	1.966.198.000	1.966.198.000	0
1004	Kab. Sarolangun	1.528.792.200	1.528.792.200	0
1005	Kab. Kerinci	2.893.319.000	2.893.319.000	0
1006	Kab. Merangin	2.191.727.200	2.191.727.200	0
1007	Kab. Tanjung Jabung Timur	1.367.306.200	1.367.306.200	0
1008	Kab. Tebo	1.500.860.400	1.500.860.400	0
1009	Kab. Muaro Jambi	2.009.365.800	2.009.365.800	0
1051	Kota Jambi	2.979.332.200	2.979.332.200	0
1100	Provinsi Sumatera Selatan	18.454.800	18.454.800	0
1103	Kab. Musi Banyuasin	2.579.379.400	2.579.379.400	0
1104	Kab. Ogan Komering Ulu	1.904.939.400	1.904.939.400	0
1105	Kab. Muara Enim	3.276.865.800	3.276.865.800	0
1106	Kab. Lahat	3.299.623.600	3.299.623.600	0
1107	Kab. Musi Rawas	2.465.223.800	2.465.223.800	0
1108	Kab. Ogan Komering Ilir	3.444.932.400	3.444.932.400	0
1109	Kab. Banyuasin	2.919.168.200	2.919.168.200	0
1110	Kab. OKU Timur	2.771.444.000	2.771.444.000	0
1111	Kab. OKU Selatan	576.464.200	576.464.200	0
1112	Kab. Ogan Ilir	2.476.154.200	2.476.154.200	0
1151	Kota Palembang	6.550.798.800	6.550.798.800	0
1153	Kota Prabumulih	964.615.600	964.615.600	0
1154	Kota Pagar Alam	770.952.000	770.952.000	0
1155	Kota Lubuk Linggau	1.404.891.800	1.404.891.800	0
1200	Provinsi Lampung	17.035.200	17.035.200	0
1201	Kab. Lampung Selatan	5.421.278.200	5.421.278.200	0
1202	Kab. Lampung Tengah	8.515.371.800	8.515.371.800	0
1203	Kab. Lampung Utara	8.618.376.000	8.618.376.000	0
1204	Kab. Lampung Barat	2.045.911.400	2.045.911.400	0
1205	Kab. Tulang Bawang	2.615.870.400	2.615.870.400	0
1206	Kab. Tanggamus	5.186.149.800	5.186.149.800	0
1207	Kab. Lampung Timur	3.029.083.200	3.029.083.200	0
1208	Kab. Way Kanan	1.752.345.400	1.752.345.400	0
1251	Kota Bandar Lampung	4.067.684.400	4.067.684.400	0
1252	Kota Metro	1.542.811.400	1.542.811.400	0
1300	Provinsi Kalimantan Barat	2.839.200	2.839.200	0
1301	Kab. Sambas	2.978.411.800	2.978.411.800	0
1302	Kab. Sanggau	2.697.851.000	2.697.851.000	0
1303	Kab. Sintang	2.630.656.600	2.630.656.600	0
1304	Kab. Pontianak	4.025.941.400	4.025.941.400	0
1305	kab. Kapuas Hulu	1.845.641.200	1.845.641.200	0
1306	Kab. Ketapang	2.494.845.600	2.494.845.600	0
1307	Kab. Bengkayang	1.089.571.600	1.089.571.600	0
1308	Kab. Landak	1.742.938.600	1.742.938.600	0
1309	Kab. Melawi	1.023.310.600	1.023.310.600	0
1310	Kab. Sekadau	386.882.600	386.882.600	0
1351	Kota Pontianak	3.076.777.600	3.076.777.600	0
1352	Kota Singkawang	1.142.237.200	1.142.237.200	0
1400	Provinsi Kalimantan Tengah	0	0	0
1401	Kab. Kapuas	2.394.652.000	2.394.652.000	0

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN
1402	Kab. Barito Utara	1.250.074.800	1.250.074.800	0
1403	Kab. Barito Selatan	1.363.611.600	1.363.611.600	0
1404	Kab. Kotawaringin Timur	1.947.870.600	1.947.870.600	0
1405	Kab. Kotawaringin Barat	1.406.360.800	1.406.360.800	0
1406	Kab. Katingan	1.335.846.200	1.335.846.200	0
1407	Kab. Seruyan	603.384.600	603.384.600	0
1408	Kab. Sukamara	417.768.000	417.768.000	0
1409	Kab. Lamandau	707.673.200	707.673.200	0
1410	Kab. Gunung Mas	1.134.567.200	1.134.567.200	0
1411	Kab. Pulang Pisau	1.035.086.000	1.035.086.000	0
1412	Kab. Murung Raya	897.202.800	897.202.800	0
1413	Kab. Barito Timur	1.061.619.000	1.061.619.000	0
1451	Kota Palangkaraya	2.162.752.800	2.162.752.800	0
1500	Provinsi Kalimantan Selatan	11.421.800	11.421.800	0
1501	Kab. Banjar	2.225.347.800	2.225.347.800	0
1502	Kab. Tanah Laut	1.716.247.000	1.716.247.000	0
1503	Kab. Tapin	1.414.418.200	1.414.418.200	0
1504	Kab. Hulu Sungai Selatan	2.118.909.000	2.118.909.000	0
1505	Kab. Hulu Sungai Tengah	2.244.650.200	2.244.650.200	0
1506	Kab. Barito Kuala	1.646.200.400	1.646.200.400	0
1507	Kab. Tabalong	1.595.336.600	1.595.336.600	0
1508	Kab. Kota Baru	1.457.261.000	1.457.261.000	0
1509	Kab. Hulu Sungai Utara	2.321.415.200	2.321.415.200	0
1510	Kab. Tanah Bumbu	1.071.613.400	1.071.613.400	0
1511	Kab. Balangan	786.903.000	786.903.000	0
1551	Kota Banjarmasin	2.222.376.000	2.222.376.000	0
1552	Kota Banjar Baru	1.058.080.400	1.058.080.400	0
1600	Provinsi Kalimantan Timur	4.258.800	4.258.800	0
1601	Kab. Kutai Kartanegara	4.578.724.800	4.578.724.800	0
1602	Kab. Pasir	1.326.699.400	1.326.699.400	0
1603	Kab. Bulungan	1.296.882.600	1.296.882.600	0
1604	Kab. Berau	1.165.151.000	1.165.151.000	0
1605	Kab. Nunukan	534.094.600	534.094.600	0
1606	Kab. Malinau	617.546.800	617.546.800	0
1607	Kab. Kutai Barat	1.234.298.000	1.234.298.000	0
1608	Kab. Kutai Timur	1.154.189.400	1.154.189.400	0
1609	Kab. Penajam Paser Utara	778.744.200	778.744.200	0
1651	Kota Samarinda	3.346.665.400	3.346.665.400	0
1652	Kota Balikpapan	1.973.345.400	1.973.345.400	0
1653	Kota Tarakan	730.472.600	730.472.600	0
1654	Kota Bontang	562.034.200	562.034.200	0
1700	Provinsi Sulawesi Utara	57.538.000	57.538.000	0
1702	Kab. Minahasa	2.811.660.800	2.811.660.800	0
1703	Kab. Bolaang Mongondow	3.258.910.200	3.258.910.200	0
1704	Kab. Sangihe	2.142.608.000	2.142.608.000	0
1705	Kab. Kepulauan Talaud	835.861.000	835.861.000	0
1706	Kab. Minahasa Selatan	1.995.955.000	1.995.955.000	0
1707	Kota Tomohon	767.551.200	767.551.200	0
1708	Kab. Minahasa Utara	1.204.915.400	1.204.915.400	0
1751	Kota Manado	3.179.836.400	3.179.836.400	0
1753	Kota Bitung	1.054.359.800	1.054.359.800	0
1800	Provinsi Sulawesi Tengah	0	0	0
1801	Kab. Poso	2.182.557.000	2.182.557.000	0

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN
1802	Kab. Donggala	3.901.487.200	3.901.487.200	0
1803	Kab. Toli-Toli	1.333.945.600	1.333.945.600	0
1804	Kab. Banggai	2.712.070.400	2.712.070.400	0
1805	Kab. Buol	1.241.541.600	1.241.541.600	0
1806	Kab. Morowali	1.712.172.800	1.712.172.800	0
1807	Kab. Banggai Kepulauan	1.119.736.800	1.119.736.800	0
1808	Kab. Parigi Moutong	1.801.542.600	1.801.542.600	0
1809	Kab. Tojo Una Una	1.252.245.800	1.252.245.800	0
1851	Kota Palu	3.128.015.800	3.128.015.800	0
1900	Provinsi Sulawesi Selatan	62.462.400	62.462.400	0
1901	Kab. Pinrang	2.179.140.600	2.179.140.600	0
1902	Kab. G o w a	3.146.767.000	3.146.767.000	0
1903	Kab. Wajo	2.573.516.400	2.573.516.400	0
1905	Kab. Bone	4.929.168.400	4.929.168.400	0
1906	Kab. Tana Toraja	3.205.922.200	3.205.922.200	0
1907	Kab. M a r o s	1.855.027.200	1.855.027.200	0
1909	Kab. Luwu	1.838.202.600	1.838.202.600	0
1910	Kab. Sinjai	1.901.523.000	1.901.523.000	0
1911	Kab. Bulukumba	3.010.329.400	3.010.329.400	0
1912	Kab. Bantaeng	1.061.067.800	1.061.067.800	0
1913	Kab. Jeneponto	1.919.369.400	1.919.369.400	0
1914	Kab. Selayar	982.563.400	982.563.400	0
1915	Kab. Takalar	1.857.486.800	1.857.486.800	0
1916	Kab. Barru	1.612.720.200	1.612.720.200	0
1917	Kab. Sidenreng Rappang	1.706.094.000	1.706.094.000	0
1918	Kab. Pangkajene Kepulauan	2.334.891.000	2.334.891.000	0
1919	Kab. Soppeng	2.289.435.200	2.289.435.200	0
1921	Kab. Enrekang	1.616.043.000	1.616.043.000	0
1922	Kab. Luwu Utara	2.109.161.600	2.109.161.600	0
1924	Kab. Luwu Timur	1.100.301.800	1.100.301.800	0
1951	Kota Makassar	5.078.559.200	5.078.559.200	0
1952	Kota Pare-Pare	1.236.383.200	1.236.383.200	0
1953	Kota Palopo	1.236.697.800	1.236.697.800	0
2000	Provinsi Sulawesi Tenggara	2.839.200	2.839.200	0
2001	Kab. Konawe	3.921.099.000	3.921.099.000	0
2002	Kab. Buton	3.163.113.200	3.163.113.200	0
2003	Kab. Muna	2.498.914.600	2.498.914.600	0
2004	Kab. Kolaka	1.909.918.400	1.909.918.400	0
2005	Kab. Konawe Selatan	1.519.720.800	1.519.720.800	0
2006	Kab. Wakatobi	798.278.000	798.278.000	0
2007	Kab. Bombana	793.959.400	793.959.400	0
2008	Kab. Kolaka Utara	556.426.000	556.426.000	0
2051	Kota Kendari	2.121.805.400	2.121.805.400	0
2052	Kota Bau-Bau	1.357.631.600	1.357.631.600	0
2100	Provinsi Maluku	20.194.200	20.194.200	0
2101	Kab. Maluku Tengah	5.219.783.400	5.219.783.400	0
2102	Kab. Maluku Tenggara	1.916.889.000	1.916.889.000	0
2103	Kab. Maluku Tenggara Barat	2.011.154.600	2.011.154.600	0
2104	Kab. Pulau Buru	878.126.600	878.126.600	0
2105	Kab. Kepulauan Aru	571.196.600	571.196.600	0
2106	Kab. Seram Bagian Barat	1.651.756.600	1.651.756.600	0
2107	Kab. Seram Bagian Timur	398.616.400	398.616.400	0
2151	Kota Ambon	3.207.835.800	3.207.835.800	0

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN
2200	Provinsi Bali	4.258.800	4.258.800	0
2201	Kab. Buleleng	4.100.816.200	4.100.816.200	0
2202	Kab. Jembrana	1.482.624.000	1.482.624.000	0
2203	Kab. Klungkung	1.272.037.000	1.272.037.000	0
2204	Kab. Gianyar	2.573.945.400	2.573.945.400	0
2205	Kab. Karangasem	2.626.200.200	2.626.200.200	0
2206	Kab. Bangli	1.287.990.600	1.287.990.600	0
2207	Kab. Badung	2.178.592.000	2.178.592.000	0
2208	Kab. Tabanan	2.840.666.400	2.840.666.400	0
2251	Kota Denpasar	2.384.636.800	2.384.636.800	0
2300	Provinsi Nusa Tenggara Barat	8.517.600	8.517.600	0
2301	Kab. Lombok Barat	3.176.932.200	3.176.932.200	0
2302	Kab. Lombok Tengah	4.187.027.000	4.187.027.000	0
2303	Kab. Lombok Timur	4.476.872.400	4.476.872.400	0
2304	Kab. Bima	4.399.291.000	4.399.291.000	0
2305	Kab. Sumbawa	3.008.613.400	3.008.613.400	0
2306	Kab. Dompu	1.697.893.600	1.697.893.600	0
2307	Kab. Sumbawa Barat	666.819.400	666.819.400	0
2351	Kota Mataram	2.113.859.800	2.113.859.800	0
2352	Kota Bima	1.615.408.600	1.615.408.600	0
2400	Provinsi Nusa Tenggara Timur	0	0	0
2401	Kab. Kupang	2.210.460.200	2.210.460.200	0
2402	Kab. Belu	2.729.638.600	2.729.638.600	0
2403	Kab. Timor Tengah Utara	1.528.883.200	1.528.883.200	0
2404	Kab. Timor Tengah Selatan	2.612.443.600	2.612.443.600	0
2405	Kab. Alor	1.479.810.800	1.479.810.800	0
2406	Kab. Sikka	1.851.816.200	1.851.816.200	0
2407	Kab. Flores Timur	1.479.907.000	1.479.907.000	0
2408	Kab. Ende	2.093.925.600	2.093.925.600	0
2409	Kab. Ngada	1.980.274.400	1.980.274.400	0
2410	Kab. Manggarai	3.171.636.000	3.171.636.000	0
2411	Kab. Sumba Timur	1.203.012.200	1.203.012.200	0
2412	Kab. Sumba Barat	1.815.650.200	1.815.650.200	0
2413	Kab. Lembata	1.297.693.800	1.297.693.800	0
2414	Kab. Rote Ndao	625.102.400	625.102.400	0
2415	Kab. Manggarai Barat	998.127.000	998.127.000	0
2451	Kota Kupang	2.222.373.400	2.222.373.400	0
2500	Provinsi Papua	0	0	0
2501	Kab. Jayapura	2.464.511.400	2.464.511.400	0
2502	Kab. Biak Numfor	1.320.750.600	1.320.750.600	0
2504	Kab. Yapen Waropen	692.967.600	692.967.600	0
2507	Kab. Merauke	1.436.177.600	1.436.177.600	0
2508	Kab. Jayawijaya	954.005.000	954.005.000	0
2509	Kab. Paniai	513.892.600	513.892.600	0
2510	Kab. Nabire	1.273.248.600	1.273.248.600	0
2511	Kab. Puncak Jaya	191.573.200	191.573.200	0
2512	Kab. Mimika	405.870.400	405.870.400	0
2513	Kab. Mappi	191.890.400	191.890.400	0
2514	Kab. Asmat	407.851.600	407.851.600	0
2515	Kab. Boven Digoel	147.266.600	147.266.600	0
2516	Kab. Sarmi	129.807.600	129.807.600	0
2517	Kab. Keerom	671.793.200	671.793.200	0
2518	Kab. Tolikara	113.092.200	113.092.200	0

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN
2519	Kab. Pegunungan Bintang	120.036.800	120.036.800	0
2523	Kab. Waropen	52.018.200	52.018.200	0
2524	Kab. Yahukimo	382.917.600	382.917.600	0
2525	Kab. Supiori	169.213.200	169.213.200	0
2551	Kota Jayapura	1.639.773.200	1.639.773.200	0
2600	Provinsi Bengkulu	0	0	0
2601	Kab. Bengkulu Utara	2.954.346.200	2.954.346.200	0
2602	Kab. Bengkulu Selatan	1.810.346.200	1.810.346.200	0
2603	Kab. Rejang Lebong	3.055.093.600	3.055.093.600	0
2604	Kab. Seluma	1.164.397.000	1.164.397.000	0
2605	Kab. Kaur	585.442.000	585.442.000	0
2606	Kab. Mukomuko	745.056.000	745.056.000	0
2607	Kab. Lebong	636.168.000	636.168.000	0
2608	Kab. Kepahiang	651.479.400	651.479.400	0
2651	Kota Bengkulu	1.948.780.600	1.948.780.600	0
2800	Provinsi Maluku Utara	42.879.200	42.879.200	0
2801	Kab. Halmahera Barat	2.848.372.800	2.848.372.800	0
2802	Kab. Halmahera Tengah	664.869.400	664.869.400	0
2803	Kab. Halmahera Utara	1.277.294.200	1.277.294.200	0
2804	Kab. Halmahera Selatan	1.156.524.200	1.156.524.200	0
2805	Kab. Kepulauan Sula	842.426.000	842.426.000	0
2806	Kab. Halmahera Timur	189.277.400	189.277.400	0
2851	Kota Ternate	1.481.433.200	1.481.433.200	0
2852	Kota Tidore Kepulauan	1.201.166.200	1.201.166.200	0
2900	Provinsi Banten	80.917.200	80.917.200	0
2901	Kab. Serang	6.108.564.800	6.108.564.800	0
2902	Kab. Pandeglang	5.929.926.600	5.929.926.600	0
2903	Kab. Lebak	5.203.658.200	5.203.658.200	0
2904	Kab. Tangerang	5.774.719.600	5.774.719.600	0
2951	Kota Tangerang	3.311.323.600	3.311.323.600	0
2952	Kota Cilegon	1.605.024.200	1.605.024.200	0
3000	Provinsi Bangka Belitung	0	0	0
3001	Kab. Belitung	1.068.132.000	1.068.132.000	0
3002	Kab. Bangka	2.178.685.600	2.178.685.600	0
3003	Kab. Bangka Barat	310.427.000	310.427.000	0
3004	Kab. Bangka Tengah	618.199.400	618.199.400	0
3005	Kab. Bangka Selatan	154.515.400	154.515.400	0
3006	Kab. Belitung Timur	704.652.000	704.652.000	0
3051	Kota Pangkal Pinang	883.672.400	883.672.400	0
3100	Provinsi Gorontalo	0	0	0
3101	Kab. Gorontalo	4.251.031.200	4.251.031.200	0
3102	Kab. Boalemo	827.886.800	827.886.800	0
3103	Kab. Pohuwato	655.301.400	655.301.400	0
3104	Kab. Bone Bolango	921.866.400	921.866.400	0
3151	Kota Gorontalo	1.801.181.200	1.801.181.200	0
3200	Provinsi Riau Kepulauan	0	0	0
3201	Kab. Bintan	1.163.086.600	1.163.086.600	0
3202	Kab. Karimun	1.225.013.400	1.225.013.400	0
3203	Kab. Natuna	711.542.000	711.542.000	0
3204	Kab. Lingga	170.830.400	170.830.400	0
3251	Kota Batam	882.083.800	882.083.800	0
3252	Kota Tanjung Pinang	1.148.479.800	1.148.479.800	0
3300	Provinsi Papua Barat	0	0	0

KODE WILAYAH	NAMA WILAYAH	PAGU	REALISASI	SISA ANGGARAN
3301	Kab. Manokwari	1.187.602.000	1.187.602.000	0
3302	Kab. Sorong	837.410.600	837.410.600	0
3303	Kab. Fak Fak	955.718.400	955.718.400	0
3304	Kab. Sorong Selatan	188.856.200	188.856.200	0
3305	Kab. Raja Ampat	187.579.600	187.579.600	0
3306	Kab. Teluk Bintuni	263.117.400	263.117.400	0
3307	Kab. Teluk Wondama	184.932.800	184.932.800	0
3308	Kab. Kaimana	316.401.800	316.401.800	0
3351	Kota Sorong	1.147.746.600	1.147.746.600	0
3400	Provinsi Sulawesi Barat	0	0	0
3401	Kab. Majene	1.456.106.600	1.456.106.600	0
3402	Kab. Mamuju	1.836.577.600	1.836.577.600	0
3403	Kab. Mamuju Utara	328.447.600	328.447.600	0
3404	Kab. Polewali Mandar	2.567.879.600	2.567.879.600	0
3405	Kab. Mamasa	765.081.200	765.081.200	0
JUMLAH DANA PENYESUAIAN TUNJANGAN KEPENDIDIKAN		**1.141.360.776.400**	**1.141.360.776.400**	**0**
TOTAL DANA OTSUS DAN PENYESUAIAN		**6.030.022.276.400**	**6.030.022.276.400**	**0**

LAPORAN REALISASI DANA OTONOMI KHUSUS DAN PENYESUAIAN
DANA PENYESUAIAN INFRASTRUKTUR DAN LAINNYA
TAHUN ANGGARAN 2007
(Dalam Rupiah)

KODE WILAYAH	KODE SATKER	NAMA PEMDA	ANGGARAN	RALISASI	SISA ANGGARAN
0205	991003	Kab. Bandung	10.000.000.000		
0206	990963	Kab. Bekasi	18.000.000.000	18.000.000.000	0
0207	990938	Kab. Bogor	15.000.000.000	15.000.000.000	0
0208	991045	Kab. Ciamis	10.000.000.000	10.000.000.000	0
0209	990959	Kab. Cianjur	5.000.000.000	5.000.000.000	0
0210	991052	Kab. Cirebon	20.000.000.000	20.000.000.000	0
0212	991070	Kab. Indramayu	38.000.000.000	38.000.000.000	0
0214	991066	Kab. Kuningan	11.500.000.000	11.436.579.000	63.421.000
0215	991087	Kab. Majalengka	10.000.000.000	10.000.000.000	0
0218	990942	Kab. Sukabumi	5.000.000.000	5.000.000.000	0
0220	991031	Kab. Tasikmalaya	11.000.000.000	11.000.000.000	0
0251	991091	Kota Bandung	18.500.000.000	14.618.659.652	3.881.340.348
0252	993330	Kota Bekasi	5.000.000.000	5.000.000.000	0
0253	991109	Kota Bogor	9.500.000.000	9.500.000.000	0
0257	980032	Kota Depok	19.000.000.000	19.000.000.000	0
0260	994754	Kota Cimahi	10.000.000.000	9.000.000.000	1.000.000.000
0262	998126	Kota Banjar	11.500.000.000	11.500.000.000	0
0307	991308	Kab. Cilacap	1.400.000.000	1.400.000.000	0
0308	991176	Kab. Demak	5.000.000.000	5.000.000.000	0
0309	991180	Kab. Grobogan	10.000.000.000	10.000.000.000	0
0310	991265	Kab. Jepara	25.000.000.000	25.000.000.000	0
0315	991244	Kab. Kudus	40.000.000.000	40.000.000.000	0
0316	991333	Kab. Magelang	4.400.000.000	3.960.000.000	440.000.000
0317	991230	Kab. Pati	15.000.000.000	15.000.000.000	0
0320	991312	Kab. Purbalingga	12.000.000.000	12.000.000.000	0
0321	991361	Kab. Purworejo	9.000.000.000	9.000.000.000	0
0322	991272	Kab. Rembang	1.650.000.000	1.650.000.000	0
0323	991155	Kab. Semarang	4.650.000.000	4.185.000.000	465.000.000
0324	991401	Kab. Sragen	30.000.000.000	30.000.000.000	0
0327	991340	Kab. Temanggung	5.000.000.000	5.000.000.000	0
0329	991354	Kab. Wonosobo	10.000.000.000	7.479.542.000	2.520.458.000
0354	991443	Kota Semarang	5.000.000.000	5.000.000.000	0
0355	991492	Kota Surakarta	12.996.500.000	7.797.900.000	5.198.600.000
0401	991511	Kab. Bantul	17.500.000.000	17.500.000.000	0
0403	991549	Kab. Kulon Progo	13.500.000.000	12.150.000.000	1.350.000.000
0404	991528	Kab. Sleman	8.000.000.000	8.000.000.000	0
0501	991642	Kab. Bangkalan	5.000.000.000	5.000.000.000	0
0503	991773	Kab. Blitar	30.000.000.000	30.000.000.000	0
0505	991659	Kab. Bondowoso	5.000.000.000	5.000.000.000	0
0506	991574	Kab. Gresik	7.500.000.000	7.500.000.000	0
0509	991731	Kab. Kediri	20.000.000.000	20.000.000.000	0
0510	991858	Kab. Lamongan	3.000.000.000	3.000.000.000	0
0511	991727	Kab. Lumajang	3.000.000.000	3.000.000.000	0
0512	991780	Kab. Madiun	10.000.000.000	10.000.000.000	0
0515	991581	Kab. Mojokerto	10.000.000.000	10.000.000.000	0

KODE WILAYAH	KODE SATKER	NAMA PEMDA	ANGGARAN	RALISASI	SISA ANGGARAN
0519	991621	Kab. Pamekasan	15.000.000.000	15.000.000.000	0
0520	991706	Kab. Pasuruan	3.000.000.000	2.700.000.000	300.000.000
0522	991710	Kab. Probolinggo	10.000.000.000	10.000.000.000	0
0527	991769	Kab. Trenggalek	25.000.000.000	25.000.000.000	0
0529	991748	Kab. Tulungagung	10.000.000.000	10.000.000.000	0
0555	991879	Kota Mojokerto	10.000.000.000	10.000.000.000	0
0556	991890	Kota Pasuruan	15.000.000.000	15.000.000.000	0
0557	991905	Kota Probolinggo	30.000.000.000	30.000.000.000	0
0559	994761	Kota Batu	10.000.000.000	10.000.000.000	0
0602	990022	Kab. Aceh Besar	5.000.000.000	5.000.000.000	0
0603	990061	Kab. Aceh Selatan	4.400.000.000	4.400.000.000	0
0604	980007	Kab. Aceh Singkil	4.400.000.000	4.400.000.000	0
0605	990082	Kab. Aceh Tengah	5.000.000.000	5.000.000.000	0
0609	980053	Kab. Bireun	15.000.000.000	15.000.000.000	0
0612	990104	Kota Banda Aceh	5.000.000.000	5.000.000.000	0
0613	990111	Kota Sabang	4.400.000.000	4.400.000.000	0
0617	997447	Kab. Aceh Jaya	5.000.000.000	5.000.000.000	0
0700	990125	Provinsi Sumatera Utara	20.000.000.000	18.000.000.000	2.000.000.000
0703	990132	Kab. Deli Serdang	29.000.000.000	29.000.000.000	0
0704	990146	Kab. Tanah Karo	29.000.000.000	29.000.000.000	0
0706	990150	Kab. Langkat	32.000.000.000	32.000.000.000	0
0707	941915	Kab. Mandailing Natal	17.000.000.000	17.000.000.000	0
0708	990235	Kab. Nias	2.000.000.000	1.978.036.400	21.963.600
0709	990171	Kab. Simalungun	24.000.000.000	24.000.000.000	0
0710	990214	Kab. Tapanuli Selatan	15.000.000.000	15.000.000.000	0
0711	990167	Kab. Tapanuli Tengah	10.000.000.000	10.000.000.000	0
0712	990200	Kab. Tapanuli Utara	14.500.000.000	14.500.000.000	0
0715	990242	Kota Medan	61.000.000.000	47.414.625.081	13.585.374.919
0716	990277	Kota Pematang Siantar	15.000.000.000	15.000.000.000	0
0752	994690	Kota Padang Sidempuan	30.500.000.000	30.500.000.000	0
0755	998151	Kab. Humbang Hasundutan	10.000.000.000	10.000.000.000	0
0800	990303	Provinsi Sumatera Barat	20.000.000.000	20.000.000.000	0
0802	990310	Kab. Agam	5.000.000.000	5.000.000.000	0
0806	990366	Kab. Pesisir Selatan	5.000.000.000	3.000.000.000	2.000.000.000
0809	990370	Kab. Tanah Datar	5.000.000.000	4.500.000.000	500.000.000
0810	990391	Kota Bukit Tinggi	5.000.000.000	5.000.000.000	0
0812	990434	Kota Padang	5.000.000.000	5.000.000.000	0
0854	997611	Kota Pariaman	10.000.000.000	10.000.000.000	0
0856	987574	Kab. Dharmasraya	5.000.000.000	5.000.000.000	0
0857	987581	Kab. Solok Selatan	9.500.000.000		
0900	990455	Provinsi Riau	20.000.000.000	20.000.000.000	0
0901	990476	Kab. Bengkalis	2.000.000.000		
0904	990497	Kab. Indragiri Hulu	15.000.000.000	15.000.000.000	0
0905	990462	Kab. Kampar	15.000.000.000	15.000.000.000	0
0908	980095	Kab. Rokan Hilir	10.000.000.000	10.000.000.000	0
0951	980142	Kota Dumai	21.000.000.000	12.600.000.000	8.400.000.000
0953	990519	Kota Pekanbaru	42.000.000.000	42.000.000.000	0
1000	990530	Provinsi Jambi	20.000.000.000	17.743.055.000	2.256.945.000
1002	990565	Kab. Bungo	19.000.000.000	19.000.000.000	0
1003	990586	Kab. Kerinci	12.000.000.000	12.000.000.000	0

KODE WILAYAH	KODE SATKER	NAMA PEMDA	ANGGARAN	RALISASI	SISA ANGGARAN
1005	980184	Kab. Muaro Jambi	18.000.000.000	18.000.000.000	0
1008	980522	Kab. Tanjung Jabung Timur	17.000.000.000	17.000.000.000	0
1100	990608	Provinsi Sumatera Selatan	20.000.000.000		
1103	990661	Kab. Lahat	23.000.000.000	23.000.000.000	0
1104	990633	Kab. Musi Banyuasin	24.400.000.000	24.400.000.000	0
1105	990675	Kab. Musi Rawas	20.000.000.000	20.000.000.000	0
1106	990654	Kab. Muara Enim	23.000.000.000	23.000.000.000	0
1107	990682	Kab. Ogan Komering Ilir	3.000.000.000	3.000.000.000	0
1108	990640	Kab. Ogan Komering Ulu	5.000.000.000	5.000.000.000	0
1109	990696	Kota Palembang	14.000.000.000	14.000.000.000	0
1110	994729	Kota Pagar Alam	10.000.000.000	10.000.000.000	0
1112	994712	Kota Prabumulih	4.400.000.000	1.320.000.000	3.080.000.000
1153	987560	Kab. Ogan Ilir	3.000.000.000	3.000.000.000	0
1154	987549	Kab. OKU Timur	8.000.000.000	8.000.000.000	0
1155	987553	Kab. OKU Selatan	3.000.000.000	3.000.000.000	0
1201	990807	Kab. Lampung Barat	4.400.000.000	4.400.000.000	0
1202	990771	Kab. Lampung Selatan	18.400.000.000	18.400.000.000	0
1203	990785	Kab. Lampung Tengah	10.000.000.000		
1204	990792	Kab. Lampung Utara	18.400.000.000	18.400.000.000	0
1205	980191	Kab. Lampung Timur	5.400.000.000	5.400.000.000	0
1207	993347	Kab. Tulang Bawang	10.000.000.000	10.000.000.000	0
1251	990811	Kota Bandar Lampung	9.000.000.000	9.000.000.000	0
1301	980227	Kab. Bengkayang	19.400.000.000	19.400.000.000	0
1302	980231	Kab. Landak	15.000.000.000	15.000.000.000	0
1304	992008	Kab. Ketapang	3.000.000.000	3.000.000.000	0
1305	991989	Kab. Pontianak	15.000.000.000	15.000.000.000	0
1307	991968	Kab. Sanggau	12.500.000.000	12.500.000.000	0
1309	992012	Kota Pontianak	5.000.000.000	5.000.000.000	0
1400	992029	Provinsi Kalimantan Tengah	65.000.000.000	65.000.000.000	0
1404	992075	Kab. Kotawaringin Barat	20.000.000.000	20.000.000.000	0
1405	992061	Kab. Kotawaringin Timur	25.500.000.000	24.349.567.500	1.150.432.500
1406	992082	Kota Palangkaraya	8.500.000.000	8.500.000.000	0
1409	997522	Kab. Pulang Pisau	37.000.000.000	37.000.000.000	0
1411	997501	Kab. Lamandau	30.000.000.000	27.000.000.000	3.000.000.000
1413	997472	Kab. Katingan	15.000.000.000	14.544.679.100	455.320.900
1451	997489	Kab. Seruyan	16.250.000.000	16.250.000.000	0
1500	992164	Provinsi Kalimantan Selatan	50.000.000.000	50.000.000.000	0
1501	992171	Kab. Banjar	5.000.000.000		
1506	992249	Kab. Kota Baru	15.000.000.000	13.500.000.000	1.500.000.000
1511	992260	Kota Banjarmasin	14.690.000.000	14.690.000.000	0
1552	998222	Kab. Tanah Bumbu	5.000.000.000	1.500.000.000	3.500.000.000
1601	992139	Kab. Berau	5.000.000.000	5.000.000.000	0
1602	992122	Kab. Bulungan	14.000.000.000	8.400.000.000	5.600.000.000
1604	980273	Kab. Kutai Barat	5.000.000.000	1.500.000.000	3.500.000.000
1607	980252	Kab. Nunukan	5.000.000.000	5.000.000.000	0
1653	941901	Kota Tarakan	14.500.000.000	14.500.000.000	0
1654	997561	Kab. Penajam Paser Utara	10.000.000.000	10.000.000.000	0
1700	993021	Provinsi Sulawesi Utara	20.000.000.000	20.000.000.000	0
1702	993059	Kab. Bolaang Mongondow	5.000.000.000	5.000.000.000	0
1703	993042	Kab. Minahasa	3.000.000.000	3.000.000.000	0

KODE WILAYAH	KODE SATKER	NAMA PEMDA	ANGGARAN	RALISASI	SISA ANGGARAN
1704	993063	Kab. Sangihe	5.000.000.000	4.500.000.000	500.000.000
1705	993091	Kota Bitung	10.000.000.000	10.000.000.000	0
1706	993070	Kota Manado	43.000.000.000	38.700.000.000	4.300.000.000
1707	997412	Kab. Kepulauan Talaud	46.000.000.000	46.000.000.000	0
1708	998240	Kab. Minahasa Selatan	17.750.000.000	17.750.000.000	0
1753	987485	Kab. Minahasa Utara	5.000.000.000	5.000.000.000	0
1801	993000	Kab. Banggai	18.000.000.000	18.000.000.000	0
1802	980337	Kab. Banggai Kepulauan	4.000.000.000	4.000.000.000	0
1804	992998	Kab. Toli-Toli	17.000.000.000	17.000.000.000	0
1805	992981	Kab. Donggala	8.650.000.000	8.650.000.000	0
1806	980320	Kab. Morowali	10.000.000.000	10.000.000.000	0
1807	992977	Kab. Poso	4.400.000.000	4.400.000.000	0
1808	993017	Kota Palu	7.400.000.000	7.400.000.000	0
1851	987471	Kab. Tojo Una Una	17.000.000.000	17.000.000.000	0
1900	992722	Provinsi Sulawesi Selatan	20.000.000.000		
1902	992888	Kab. Barru	8.000.000.000	8.000.000.000	0
1903	992778	Kab. Bone	5.000.000.000	5.000.000.000	0
1906	992935	Kab. Enrekang	45.000.000.000	45.000.000.000	0
1907	992740	Kab. Gowa	5.000.000.000	5.000.000.000	0
1909	992850	Kab. Jeneponto	5.000.000.000	5.000.000.000	0
1911	980341	Kab. Luwu Utara	4.400.000.000	4.400.000.000	0
1912	992799	Kab. Maros	4.400.000.000	4.400.000.000	0
1913	992900	Kab. Pangkajene Kepulauan	5.000.000.000	5.000.000.000	0
1915	992867	Kab. Selayar	5.000.000.000	5.000.000.000	0
1916	992892	Kab. Sidenreng Rappang	14.400.000.000	14.400.000.000	0
1917	992825	Kab. Sinjai	10.000.000.000	10.000.000.000	0
1918	992914	Kab. Soppeng	5.000.000.000	5.000.000.000	0
1924	992956	Kota Pare-pare	4.500.000.000	4.500.000.000	0
1952	997604	Kota Palopo	3.000.000.000	3.000.000.000	0
2000	993106	Provinsi Sulawesi Tenggara	10.000.000.000	10.000.000.000	0
2001	993127	Kab. Buton	8.000.000.000	8.000.000.000	0
2002	993110	Kab. Konawe	19.000.000.000	19.000.000.000	0
2003	993148	Kab. Kolaka	14.000.000.000	14.000.000.000	0
2004	993131	Kab. Muna	15.000.000.000	13.500.000.000	1.500.000.000
2008	987642	Kab. Bombana	6.100.000.000	6.100.000.000	0
2051	987638	Kab. Wakatobi	25.000.000.000	25.000.000.000	0
2102	993169	Kab. Maluku Tengah	5.500.000.000	1.650.000.000	3.850.000.000
2105	993202	Kota Ambon	14.000.000.000	14.000.000.000	0
2107	987422	Kab. Seram Bagian Timur	29.950.000.000	26.955.000.000	2.995.000.000
2200	992274	Provinsi Bali	20.000.000.000		
2201	992342	Kab. Badung	10.000.000.000	10.000.000.000	0
2202	992338	Kab. Bangli	35.000.000.000	35.000.000.000	0
2204	992317	Kab. Gianyar	20.000.000.000	20.000.000.000	0
2206	992321	Kab. Karangasem	10.000.000.000	10.000.000.000	0
2301	992410	Kab. Bima	5.000.000.000	5.000.000.000	0
2302	992431	Kab. Dompu	5.000.000.000	5.000.000.000	0
2304	992391	Kab. Lombok Tengah	7.000.000.000	7.000.000.000	0
2306	992427	Kab. Sumbawa	7.000.000.000	7.000.000.000	0
2307	992448	Kota Mataram	9.000.000.000	9.000.000.000	0
2352	987450	Kab. Sumbawa Barat	7.000.000.000	7.000.000.000	0

KODE WILAYAH	KODE SATKER	NAMA PEMDA	ANGGARAN	RALISASI	SISA ANGGARAN
2400	992452	Provinsi Nusa Tenggara Timur	25.000.000.000	25.000.000.000	0
2403	992537	Kab. Ende	9.400.000.000	9.400.000.000	0
2405	992469	Kab. Kupang	7.000.000.000	7.000.000.000	0
2406	980379	Kab. Lembata	5.000.000.000	5.000.000.000	0
2407	992558	Kab. Manggarai	36.000.000.000	32.400.000.000	3.600.000.000
2408	992541	Kab. Ngada	28.400.000.000	25.560.000.000	2.840.000.000
2409	992516	Kab. Sikka	4.400.000.000	4.400.000.000	0
2412	992494	Kab. Timor Tengah Selatan	17.500.000.000	10.500.000.000	7.000.000.000
2414	993368	Kota Kupang	19.000.000.000	19.000.000.000	0
2451	998510	Kab. Manggarai Barat	4.000.000.000	3.600.000.000	400.000.000
2502	993220	Kab. Jayapura	10.000.000.000	10.000.000.000	0
2507	993283	Kab. Merauke	50.000.000.000	50.000.000.000	0
2509	993305	Kab. Nabire	9.000.000.000	9.000.000.000	0
2513	993312	Kota Jayapura	8.000.000.000	8.000.000.000	0
2515	998400	Kab. Keerom	10.000.000.000	10.000.000.000	0
2516	998477	Kab. Yahukimo	25.000.000.000	22.500.000.000	2.500.000.000
2517	998421	Kab. Pegunungan Bintang	32.500.000.000	32.500.000.000	0
2518	998414	Kab. Tolikara	70.000.000.000	39.900.000.000	30.100.000.000
2519	998388	Kab. Boven Digoel	50.500.000.000	50.500.000.000	0
2603	990743	Kab. Rejang Lebong	13.000.000.000	13.000.000.000	0
2607	998503	Kab. Mukomuko	29.000.000.000	29.000.000.000	0
2800	980011	Provinsi Maluku Utara	15.000.000.000	15.000.000.000	0
2801	993194	Kab. Halmahera Tengah	4.000.000.000	4.000.000.000	0
2802	993180	Kab. Halmahera Barat	15.000.000.000	15.000.000.000	0
2804	998346	Kab. Halmahera Timur	12.500.000.000	12.500.000.000	0
2806	998332	Kab. Kepulauan Sula	5.000.000.000	5.000.000.000	0
2851	998325	Kab. Halmahera Selatan	22.000.000.000	22.000.000.000	0
2902	990900	Kab. Pandeglang	5.000.000.000		
3004	998189	Kab. Bangka Selatan	9.000.000.000	9.000.000.000	0
3101	980302	Kab. Boalemo	10.000.000.000	10.000.000.000	0
3102	993038	Kab. Gorontalo	15.000.000.000	15.000.000.000	0
3104	998261	Kab. Pohuwato	17.500.000.000	17.500.000.000	0
3200	998840	Provinsi Kepulauan Riau	30.000.000.000	30.000.000.000	0
3203	980117	Kab. Karimun	25.000.000.000	25.000.000.000	0
3204	990523	Kota Batam	60.500.000.000	60.500.000.000	0
3251	994708	Kota Tanjung Pinang	25.000.000.000		
3252	987464	Kab. Lingga	20.000.000.000	6.000.000.000	14.000.000.000
3301	993262	Kab. Sorong	8.500.000.000	7.650.000.000	850.000.000
3302	993241	Kab. Manokwari	48.500.000.000	48.500.000.000	0
3303	993279	Kab. Fak Fak	25.000.000.000	25.000.000.000	0
3305	998442	Kab. Sorong Selatan	26.500.000.000		
3402	992761	Kab. Mamuju	3.000.000.000	3.000.000.000	0
3403	992921	Kab. Polewali Mandar	9.000.000.000	9.000.000.000	0
3405	998299	Kab. Mamuju Utara	40.000.000.000	36.000.000.000	4.000.000.000
JUMLAH			**3.563.186.500.000**	**3.265.982.643.733**	**144.203.856.267**

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2007	2006
	I. ACEH		**95.372.439.108**	**634.523.971.745**
1	BANDA ACEH	001	39.515.802.600	210.543.336.000
2	LANGSA	002	6.769.641.300	70.914.725.000
3	MEULABOH	003	12.184.362.300	90.183.936.000
4	TAPAK TUAN	074	5.000.000.000	66.609.351.000
5	LHOKSEUMAWE	089	23.351.246.408	97.782.938.000
6	KUTACANE	105	4.829.231.000	41.900.604.400
7	TAKENGON	122	3.722.155.500	47.748.555.000
8	BANDA ACEH (KHUSUS)	175	-	8.840.526.345
	II. MEDAN		**155.800.725.550**	**1.031.848.656.332**
9	MEDAN I	004	45.580.773.000	191.304.533.000
10	PEMATANG SIANTAR	005	16.991.322.900	97.310.542.000
11	PADANG SIDEMPUAN	006	6.605.460.400	103.216.022.000
12	GUNUNG SITOLI	007	2.563.106.900	50.224.008.700
13	RANTAU PRAPAT	075	4.274.925.300	53.733.902.000
14	TANJUNG BALAI	076	5.314.538.800	73.053.854.000
15	SIBOLGA	106	9.608.701.200	51.939.026.000
16	SIDIKALANG	119	4.464.392.376	72.457.497.900
17	TEBING TINGGI	124	8.585.658.100	119.565.548.000
18	BALIGE	125	5.031.494.800	87.253.486.732
19	MEDAN II	123	46.780.351.774	131.790.236.000
	III. PADANG		**76.954.160.777**	**598.330.572.775**
20	PADANG	010	43.195.614.100	222.294.429.000
21	BUKIT TINGGI	011	19.844.212.777	166.566.858.000
22	SIJUNJUNG	077	3.567.856.400	55.411.891.133
23	SOLOK	090	4.877.872.300	68.139.628.000
24	LUBUK SIKAPING	091	3.018.090.300	52.104.164.742
25	PAINAN	142	2.450.514.900	33.813.601.900
	IV. PEKANBARU		**79.760.958.670**	**449.910.922.899**
26	PEKANBARU	008	40.366.792.770	172.878.076.000
27	TANJUNG PINANG	009	15.131.932.600	106.096.904.000
28	RENGAT	092	6.575.915.700	84.887.830.000
29	DUMAI	120	7.346.209.800	41.155.620.699
30	BATAM	137	10.340.107.800	44.892.492.200
	V. JAMBI		**40.648.152.411**	**333.699.307.500**
31	JAMBI	012	27.558.650.211	150.384.195.000
32	SUNGAI PENUH	013	3.166.331.300	32.443.591.500
33	MUARA BUNGO	078	3.585.135.300	54.377.670.000
34	KUALA TUNGKAL	143	3.021.858.500	43.294.045.000
35	BANGKO	159	3.316.177.100	53.199.806.000
	VI. PALEMBANG		**88.330.306.225**	**530.312.369.500**
36	PALEMBANG	014	60.982.342.660	254.578.351.000

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2007	2006
37	LUBUK LINGGAU	070	4.144.739.500	58.328.261.000
38	BATURAJA	109	5.499.060.400	75.250.704.500
39	LAHAT	144	13.049.700.665	85.449.299.000
40	SEKAYU	160	4.654.463.000	56.705.754.000
	VII. BANDAR LAMPUNG		**60.865.104.150**	**472.232.502.138**
41	BANDAR LAMPUNG	017	42.785.770.658	233.781.294.000
42	KOTABUMI	116	7.124.950.800	89.656.254.838
43	METRO	126	8.774.541.292	123.021.607.000
44	LIWA	145	2.179.841.400	25.773.346.300
	VIII. BENGKULU		**29.120.366.200**	**263.238.177.400**
45	BENGKULU	016	20.863.177.500	123.833.042.000
46	MANNA	121	3.463.846.200	60.561.729.000
47	CURUP	146	3.851.157.500	58.517.147.400
48	MUKO MUKO		942.185.000	20.326.259.000
	IX. PANGKAL PINANG		**12.487.278.700**	**167.587.539.648**
49	PANGKAL PINANG	015	10.105.321.100	131.437.539.748
50	TANJUNG PANDAN	107	2.381.957.600	36.149.999.900
	X. SERANG		**61.955.481.496**	**349.036.032.133**
51	SERANG	020	29.673.756.096	186.746.021.000
52	TANGERANG	127	28.501.920.100	111.584.522.133
53	RANGKASBITUNG	161	3.779.805.300	50.705.489.000
	XII. JAKARTA		**2.731.938.333.108**	**2.869.269.209.060**
54	JAKARTA I	018	131.611.625.050	470.507.725.360
55	JAKARTA II	019	2.199.116.452.329	1.825.696.838.700
56	JAKARTA III	088	142.349.061.456	217.826.056.000
57	JAKARTA IV	133	137.472.666.376	174.749.763.000
58	JAKARTA V	139	121.388.527.897	180.488.826.000
59	**JAKARTA VI**	140	-	**10.000.000.000**
	XII. BANDUNG		**373.542.754.406**	**1.809.381.751.200**
60	PURWAKARTA	021	17.584.849.735	103.190.708.000
61	BANDUNG I	022	79.572.161.334	248.061.959.000
62	BOGOR	023	64.641.253.300	228.797.814.000
63	CIREBON	024	25.891.547.200	175.988.206.000
64	TASIKMALAYA	025	21.019.731.100	210.488.159.000
65	KARAWANG	086	5.454.490.911	56.575.771.100
66	SUMEDANG	087	9.239.625.700	60.086.717.000
67	GARUT	096	13.451.325.200	96.030.899.000
68	SUKABUMI	128	23.034.797.900	186.314.316.000
69	KUNINGAN	147	9.527.186.400	99.602.014.100

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2007	2006
70	BEKASI	171	14.198.483.089	90.973.691.000
71	BANDUNG II	095	89.927.302.537	253.271.497.000
	XIII. SEMARANG		**304.307.430.365**	**1.875.651.280.600**
72	SEMARANG I	026	49.702.635.565	201.609.458.000
73	PURWOREJO	027	9.670.607.700	104.596.440.000
74	SURAKARTA	028	49.399.872.200	182.448.096.000
75	PURWOKERTO	029	25.721.980.700	126.811.169.000
76	PEKALONGAN	072	9.075.015.900	92.026.748.300
77	SEMARANG II	134	40.787.008.200	148.853.190.000
78	PATI	097	16.335.798.700	100.351.112.000
79	MAGELANG	115	29.526.760.600	123.317.927.300
80	TEGAL	118	20.689.209.000	193.395.100.000
81	KUDUS	129	10.792.796.800	129.610.348.000
82	CILACAP	130	7.027.248.900	73.889.810.000
83	KLATEN	148	12.478.431.300	122.744.510.000
84	SRAGEN	162	8.130.652.000	95.156.646.000
85	PURWODADI	163	8.016.796.300	97.803.389.000
86	BANJARNEGARA	164	6.952.616.500	83.037.337.000
	XIV. YOGYAKARTA		**93.938.669.800**	**350.532.366.700**
87	YOGYAKARTA	030	83.279.374.000	265.261.386.000
88	WONOSARI	149	5.956.255.100	49.868.222.000
89	WATES	176	4.703.040.700	35.402.758.700
	XV. SURABAYA		**422.482.102.150**	**2.120.047.709.294**
90	SURABAYA I	031	93.328.503.900	304.568.425.000
91	MALANG	032	73.163.784.050	281.643.839.000
92	MADIUN	033	36.780.883.400	226.731.782.000
93	KEDIRI	034	28.481.927.200	187.441.652.094
94	BONDOWOSO	035	11.366.963.300	143.077.737.000
95	PAMEKASAN	036	18.797.244.400	169.009.668.000
96	BOJONEGORO	073	9.491.158.300	106.567.881.000
97	MOJOKERTO	098	21.976.954.900	130.806.496.000
98	PACITAN	099	2.844.352.900	37.353.337.000
99	BANYUWANGI	100	5.303.937.800	68.174.672.000
100	JEMBER	131	28.165.116.700	136.626.988.300
101	BLITAR	150	11.526.051.900	122.160.067.900
102	SIDOARJO	165	16.793.288.700	74.123.303.000
103	TUBAN	166	3.625.406.400	46.632.065.000
104	SURABAYA II	135	60.836.528.300	85.129.796.000
	XVI. PONTIANAK		**60.856.657.100**	**518.720.725.098**
105	PONTIANAK	042	34.032.704.300	175.739.037.298
106	SINTANG	076	6.789.439.800	73.760.403.000
107	SINGKAWANG	093	9.916.114.600	82.593.406.800

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2007	2006
108	KETAPANG	094	3.019.103.700	56.080.289.000
109	PUTUSSIBAU	117	2.130.082.400	44.041.548.000
110	SANGGAU	167	4.969.212.300	86.506.041.000
	XVII. PALANGKARAYA		**32.611.791.150**	**456.804.940.600**
111	PALANGKARAYA	043	19.834.477.750	189.765.100.000
112	SAMPIT	044	4.561.470.000	91.116.437.000
113	BUNTOK	080	4.755.023.200	106.441.076.000
114	PANGKALAN BUN	102	3.460.820.200	69.482.327.600
	XVIII. BANJARMASIN		**59.323.310.873**	**409.105.174.998**
115	BANJARMASIN	045	40.669.689.873	223.152.983.999
116	KOTABARU	081	3.439.786.200	53.208.772.000
117	BARABAI	110	8.021.404.400	51.030.433.966
118	TANJUNG	151	5.003.125.900	54.827.550.033
119	PELAIHARI	168	2.189.304.500	26.885.435.000
	XIX. SAMARINDA		**62.653.583.950**	**337.361.087.380**
120	SAMARINDA	046	26.793.730.650	172.977.744.415
121	BALIKPAPAN	047	24.237.247.600	54.003.549.632
122	TARAKAN	048	8.437.244.400	67.585.554.000
123	NUNUKAN	152	1.340.248.000	12.890.436.333
124	TANJUNG REDEP	153	1.845.113.300	29.903.803.000
	XX. DENPASAR		**77.255.402.400**	**382.940.095.400**
125	DENPASAR	037	56.320.304.900	229.895.627.000
126	SINGARAJA	132	13.972.576.800	73.902.053.400
127	AMLAPURA	154	6.962.520.700	79.142.415.000
	XXI. MATARAM		**46.137.817.734**	**356.640.378.333**
128	MATARAM	038	31.876.223.734	182.488.410.000
129	BIMA	071	6.340.708.000	75.534.287.767
130	SUMBAWA BESAR	101	3.684.451.900	45.812.691.566
131	SELONG	169	4.236.434.100	52.804.989.000
	XXII. KUPANG		**54.616.806.077**	**511.567.646.816**
132	KUPANG	039	34.037.630.277	225.059.585.000
133	ENDE	040	5.815.044.800	49.713.609.250
134	WAINGAPU	041	3.682.613.900	58.138.296.000
135	RUTENG	111	4.411.369.600	79.824.485.000
136	ATAMBUA	172	4.010.347.500	53.571.264.566
137	LARANTUKA	174	2.659.800.000	45.260.407.000
	XXIII. MAKASAR		**157.546.962.600**	**968.022.568.500**
138	MAKASSAR I	054	61.718.380.400	177.424.354.000
139	WATAMPONE	055	12.961.438.000	102.267.996.100

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2007	2006
140	BANTAENG	056	5.566.582.100	79.237.239.000
141	PARE-PARE	057	17.847.161.400	132.444.686.000
142	PALOPO	058	6.223.434.400	86.690.899.400
143	MAJENE	059	3.969.042.300	68.351.628.000
144	MAKASAR II	136	41.271.605.100	166.799.806.600
145	BENTENG	155	1.373.458.300	22.831.837.000
146	MAKALE	170	2.164.202.300	32.096.710.400
147	SINJAI	177	1.692.761.500	28.916.506.000
148	MAMUJU	178	2.758.896.800	70.960.906.000
	XXIV. PALU		**43.443.310.679**	**370.390.655.233**
149	PALU	051	29.633.809.979	180.383.173.000
150	POSO	052	6.920.054.800	86.275.141.000
151	LUWUK	053	3.654.295.100	59.755.870.000
152	TOLI-TOLI	082	3.235.150.800	43.976.471.233
	XXV. KENDARI		**34.439.397.500**	**323.498.510.332**
153	KENDARI	060	24.578.280.600	175.835.052.000
154	BAU-BAU	103	4.237.106.200	61.895.696.466
155	KOLAKA	156	3.289.617.100	52.562.230.000
156	RAHA	157	2.334.393.600	33.205.531.866
	XXVI. GORONTALO		**16.009.022.500**	**157.130.584.587**
157	GORONTALO	050	13.856.397.000	121.029.587.587
158	MARISA		2.152.625.500	36.100.997.000
	XXVII. MANADO		**52.916.115.500**	**339.440.642.500**
159	MANADO	049	42.012.625.800	200.644.609.000
160	TAHUNA	083	2.253.652.100	27.468.984.500
161	KOTAMOBAGU	158	3.351.887.200	42.912.005.000
162	BITUNG	179	5.297.950.400	68.415.044.000
	XXVIII. TERNATE		**15.720.021.600**	**210.161.508.600**
163	TERNATE	062	13.521.351.300	172.506.444.000
22	TOBELO	112	2.198.670.300	37.655.064.600
	XXIX. AMBON		**47.426.455.400**	**307.253.554.400**
165	AMBON	061	36.898.991.400	144.304.746.000
166	TUAL	084	3.895.747.000	43.904.988.000
167	SAUMLAKI	104	1.841.709.600	32.337.021.400
168	MASOHI	173	4.790.007.400	86.706.799.000
	XXX. JAYAPURA		**104.435.735.900**	**1.079.978.190.800**
169	JAYAPURA	063	44.831.622.000	300.515.787.000
170	BIAK	064	10.508.755.600	57.130.316.000
171	MANOKWARI	065	8.458.473.900	121.745.347.000

SALDO KAS KPPN PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006

No.	Kanwil/KPPN	Kode KPPN	2007	2006
172	SORONG	066	12.035.057.700	116.304.750.000
173	FAK-AK	067	2.749.102.700	62.657.585.000
174	MERAUKE	068	9.590.525.900	150.869.896.500
175	NABIRE	085	4.038.462.900	76.088.303.000
176	WAMENA	113	3.203.704.000	122.226.891.000
177	SERUI	138	2.150.916.000	51.677.198.000
178	TIMIKA	141	6.869.115.200	20.762.117.300
JUMLAH			**5.492.896.654.079**	**20.594.618.632.501**

REKENING PEMERINTAH LAINNYA DI BANK INDONESIA
PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
(dalam rupiah)

NO.	NO REKENING	NAMA REKENING	2007	2006
1	513000000	Rekening Dana Investasi	5.710.086.606	314.873.612.566
2	519000102	Rekening Pembangunan Daerah	39.868.819.550	186.302.586.420
3	508000071	Penerimaan Pertambangan dan perikanan	88.732.911.793	93.387.943.922
4	508000084	Penerimaan Panas Bumi	291.316.908.993	408.924.235.586
5	519000003	Dana Hasil Divestasi Sahan-saham BUMN Dalam Rupiah	67.193.107.587	32.048.184
6	600000411	Depkeu K / Hasil Minyak Perjanjian Karya Production Sharing	162.925.619.964	1.151.490.051.659
7	607000111	RDI JPY	105.675.036.416	941.202.831.224
8	607000311	RDI AUD	25.009.533.791	66.383.994.747
9	607000411	RDI USD	136.829.444.247	800.614.502.664
10	607000511	RDI GBP	22.226.965.945	376.000.363.869
11	607000990	RDI SDR	4.963.383.168	4.558.696.900
12	607000991	RDI EUR	111.974.118.730	1.101.909.110.886
13	500000001	Menteri Keuangan Cq.Direktur Jenderal Anggaran utk menampung dana talangan reksus	8.820.882.560	123.022.956
14	500000002	Menteri Keuangan Cq. Direktur Anggaran untuk menampung dana Sisa Anggaran Lebih	51.259.408.895	305.609.932.283
15	500000003	Menteri Keuangan Cq. Direktur Anggaran untuk pengelolaan Surat Utang Negara	0	0
16	500000004	Menteri Keuangan Cq. Direktur Anggaran untuk menampung pengembalian dana talangan	31.311.080.717	26.440.123.754
17	502000001	Bendahara Umum Negara untuk Obligasi dalam rangka Rekapitulasi Perbankan	36.280.991.691	0
18	502000002	Bendahara Umum Negara untuk Obligasi dalam rangka penjaminan	83.442.505.302	83.809.786.304
19	510000239	Rekening Khusus Menteri Keuangan karena penjualan saham PT Telkom di pasar domestik	1.194.101.700	1.149.713.755
20	510000242	Reksus Depkeu untuk pembiayaan proyek SPL VIII *sector education* INP-19OECF	0	5.544.399.708
21	510000247	Reksus Depkeu untuk proyek *sector health* SPL IX INP-20 OECF	0	3.771.700.817
22	510000251	Reksus Depkeu untuk proyek *sector education and human resources dev. SPL X INP21*	0	152.846.605.151
23	510000252	Reksus Depkeu untuk *sector Social Welfare* SPL X INP-20 OECF	0	988.032
24	510000253	Reksus Depkeu untuk *sector health* SPL X INP-20 OECF	0	2.740.339.567
25	510000266	SUB BUN (Rp) dlm rangka monetisasi *non project type grant aid*	0	123.092.255
26	510000267	Rekening Khusus Depkeu (Rp) untuk monetasi *non project type grant aid* 2000	14.994.645.979	109.748.651.934
27	510000268	Rekening Khusus Depkeu (Rp) untuk *increase of food* (SKR) 2000	25.378.590.121	26.029.871.121
28	510000269	Rekening Khusus Depkeu (Rp) untuk *increase of food* (SKR) 2001	40.128.228.176	40.127.382.582
29	510000270	Rekening khusus Depkeu (Rp) untuk monetisasi *non project type grant aid* 2001	155.681.029.689	154.731.029.689
30	510000271	Rek. Pinjamanan Luar Negeri untuk menampung sisa saldo SPL XI INP 22 dan SPL XII INP	8.276.997.786	8.276.997.786
31	510000272	Rek. Depkeu untuk penampungan hibah luar negeri dalam rangka bencana alam nasional di	0	27.995.000
32	510000274	*Increase of food production* (SKR) 2003	30.412.885.365	26.233.193.432
33	510000275	*Non project grant aid* 2002	160.165.761.169	118.300.839.169
34	510000276	*Non project grant aid* 2003	52.844.971.084	49.798.286.924
35	519000116	Rekening penerimaan Tim Pemberesan BPPN	12.651.311	12.651.311
36	555000150	Departemen Keuangan karena pembayaran hutang pokok dan biaya kredit atas PKE	0	2.957.149
37	555000213	Departeman Keuangan Rekening Pembiayaan Industri Strategis dan Pengeluaran Lainnya	0	410.058.516
38	555000215	Rekening Cadangan CAR Bank-bank Pemerintah	0	36.000.000.000
39	555000216	Rekening Cadangan Anggaran Lain-lain	0	69.856.901.797
40	600500411	Rekening Giro Kas Negara Dalam Valuta Asing (USD)	0	0
41	602074411	Rek. Depkeu untuk penampungan hibah dari LN dlm rangka Bencana Alam Nasional dlm	2.671.824.623	2.558.642.966
42	609020411	Menkeu Cq. DJA untuk menampung Pengelolaan SUN dlm USD	0	0
43	519000001	Menkeu pemberian fas. Kredit kend. Perorangan u/ Pej. Eselon 1 s/d 4	305.336.126	305.340.000
44	603000111	Depkeu karena penerimaan pinjaman dari exim bank of japan ninth port Project	651.616.722	594.571.539
45	603001111	Depkeu karena pinjaman dari exim bank of japan untuk power project XIX	43.125.988.672	39.350.563.855
46	603002111	Depkeu karena penerimaan pinjaman dari exim bank of japan tenth roads	37.984.090.986	34.658.808.849
47	603003111	Depkeu karena pinjaman dari exim bank of japan untuk power project XX	19.204.625.029	17.523.373.882
48	604010411	Depkeu k/ PISA dlm rangka Suralaya Steam power plant	5.841.497.743	5.594.044.977
49	604013411	Depkeu k/ PISA dlm rangka jakarta and west java subst & trans	557.605	533.984
50	604014411	Depkeu k/ PISA dlm rangka Trans lintas muara tawar cibatu	7.616.280.636	7.293.645.964
51	604016411	Depkeu k/ PISA dlm rangka minahasa dan palu diesel	2.799.604.284	2.681.009.729
52	604017411	Depkeu k/ PISA dlm rangka proyek grati ccpp	10.561.513.868	10.114.115.627
53	604018411	Depkeu k/ PISA dlm rangka proyek ombilin SPP	1.939.771.089	1.857.600.087
54	605000411	Rekening Pinjaman Obligasi RI tgl 25071996	75.074.473.592	71.894.229.939
55	609000111	Rekening Depkeu karena pinjaman dari exim bank of japan	230.593.031.294	210.405.977.505

REKENING PEMERINTAH LAINNYA DI BANK INDONESIA
PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
(dalam rupiah)

NO.	NO REKENING	NAMA REKENING	2007	2006
56	609000412	Depkeu karena pembayaran hutang kepada PT. Indosat	5.640.947.736	4.570.213.075
57	609000517	Depkeu karena pembayaran hutang kepada PT. Indosat	28.167.903.903	25.171.129.020
58	609000522	Depkeu dlm rangka proyek PLC minahasa loan NIB	72.535	60.330
59	609001111	Rekening giro pemerintah lainnya	71.424.632.446	65.171.829.015
60	609002411	Reksus menkeu qq. PT. Telkom	716.652.099.997	686.293.867.923
61	609005111	Rekening Depkeu karena pinjaman dari exim bank of japan untied AJDF	12.120.752.168	11.059.652.123
62	609005411	Proyek Implementation Unit Universitas Sumatera Utara	8.324.795	7.972.147
63	609006111	Rekening Depkeu karena pinjaman dari exim bank of japan two step loan 6	46.000.751.418	41.973.658.153
64	609015411	Proyek Implementation Unit Universitas Hasanudin	3.041.489	2.912.648
65	609016411	Imprest account Dirjen Geologi 641-INO ADB	95.320	91.282
66	609019411	Rek. Giro Pemerintah sehub. Reklasifkasi pembay fas. Rediskonto web PT. INDOvest	152.629.853.669	146.164.272.225
67	609021411	Rek. Giro Pemerintah sehub. Reklasifkasi pembay fas. Rediskonto web PT. Bunas	454.937.700	435.666.000
68	519000119	Rek. Penerimaan Hasil Penjualan Beras Pemerintah	6.997.689.631	0
69	519000121	Rek Khusus Depkeu (Rupiah) untuk Increase of food Production (SKR) 2005	7.306.409.068	0
	607001991	RDI EUR (ex.607.000512-NLG) -- sudah ditutup	0	229.591.715.894
	607002991	RDI EUR (ex.607.000513-FRF) -- sudah ditutup	0	178.513.359.220
	607003991	RDI EUR (ex.607.000514-DEM) --sudah ditutup	0	14.687.241.458
	607004991	RDI EUR (ex.607.000515-ATS) -- sudah ditutup	0	46.963.234.620
	607005991	RDI EUR (ex.607.000516-BEF) -- sudah ditutup	0	1.678.858.023
	600502411	Rekening Sub BUN dalam Valuta USD -- direklasifikasi ke RKUN	0	3.806.594.579.799
	502000003	SUB BUN Dana DAK-DR tahun 2002 yang belum disalurkan -- disajikan sbg escrow account	0	0
	JUMLAH		**3.248.408.392.480**	**12.331.109.271.481**

CATATAN:

a. Daftar Rekening Pemerintah Lainnya yang telah ditutup:

1	519000002	Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
2	510000149	Subsidi Bunga SEDP 3
3	510000265	Pembiayaan Proyek RDA
4	519000114	Iuran Hak Pengusahaan Hutan dan PSDH
5	519000115	Pungutan Pengusahaan dan Hasil Perikanan
6	555000904	Dana Untuk Pembayaran Kewajiban
7	609017411	Menkeu u/Penampungan Dana Hasil Divestasi Saham BUMN dlm Valas
8	519000111	BUN Setoran BULOG hasil penjualan beras pinjaman luar negeri dalam rupiah
9	602075111	Rek. Depkeu untuk penampungan hibah dari LN dlm rangka Bencana Alam Nasional dlm JPY
10	602076991	Rek. Depkeu untuk penampungan hibah dari LN dlm rangka Bencana Alam Nasional dlm EUR
11	519999001	Penerimaan Fee Penjaminan BPR
12	607001991	RDI EUR (ex.607.000512-NLG)
13	607002991	RDI EUR (ex.607.000513-FRF)
14	607003991	RDI EUR (ex.607.000514-DEM)
15	607004991	RDI EUR (ex.607.000515-ATS)
16	607005991	RDI EUR (ex.607.000516-BEF)

b. Daftar Rekening Pemerintah Lainnya yang direklasifikasi ke kelompok rekening lainnya

1	600502411	Rekening Sub BUN dalam Valuta USD -- direklasifikasi ke RKUN
2	502000003	SUB BUN Dana DAK-DR tahun 2002 yang belum disalurkan -- disajikan sebagai escrow account

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2007	2006
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	1.049.816.672	1.918.438.682
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	1.688.914.646	11.998.028.596
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	135.365.014	1.897.054.594
4	005	MAHKAMAH AGUNG	12.206.211.258	8.709.459.479
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	6.407.595.073	11.741.214.514
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	12.346.593.920	11.318.645.035
7	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	21.095.493.341	5.031.727.528
8	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	577.413.286.299	545.903.716.055
9	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	11.181.674.600	601.536.072
10	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	4.866.055.063	10.519.059.966
11	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	11.778.438.432	7.371.918.674
12	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	36.750.740.311	23.394.944.241
13	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	6.595.867.706	9.293.956.336
14	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	10.730.324.775	5.096.358.938
15	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	1.352.539.222	46.421.283.900
16	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	91.216.117.514	109.158.505.291
17	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	49.805.788.407	142.462.285.248
18	025	DEPARTEMEN AGAMA	15.453.947.460	69.188.968.556
19	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	22.780.087.977	27.206.823.300
20	027	DEPARTEMEN SOSIAL	10.680.322.834	5.571.325.733
21	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	29.277.327.657	16.323.333.349
22	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.654.562.334	15.560.307.774
23	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	7.958.778.263	191.386.598
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	285.926.845	24.916.500
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	90	-
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	2.298.806.983	3.280.216.195
27	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.897.677.289	2.608.844.798
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	204.252.026	-
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	2.745.256.300	4.427.437.171
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	2.696.276.107	3.642.181.723
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	869.427.883	1.015.374.466
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	1.059.046.736	1.538.827.897
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	13.059.169	507.084.681
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	10.208.462	16.805.080
35	054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.155.329.232	5.962.481.817
36	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	24.241.678	50.000
37	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	4.544.892.638	11.186.578.522
38	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	3.814.231.468	961.562.214
39	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	78.493.953.080	95.306.626.439
40	062	SUBSIDI DAN TRANSFER	11.161.484.920	6.129.857.105
41	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	393.896.161	65.702.303
42	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	104.025.000	944.000
43	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	6.287.099.434	1.118.983.024
44	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	483.262.378	-
45	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	1.310.776.167	59.507.400
46	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.912.227.640	4.295.337.416
47	069	BELANJA LAIN-LAIN	108.393.389.000	140.984.289.229
48	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	229.330.662	(3)
49	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	1.970.239.934	47.776.573
50	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	464.225.657	4.976.072.576
51	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	1.783.375.916	958.969.056
52	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	62.524.731	75.243.032
53	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	215.657.845	337.222.158
54	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	366.459.626	534.151.112
55	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	899.743.794	490.408.383
56	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	8.300.000	-
57	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	40.147	-
58	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	17.269.677
59	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	-	39.540.756

KAS DI BENDAHARA PENGELUARAN

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2007	2006
60	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	797.810.812	351.329.278
61	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	2.830.622.886	643.677.015
62	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	862.048.127	854.513.086
63	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	36.049.306.397	57.343.136.800
64	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	15.363.080	897.356
65	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	5.104.485.900	4.520.682.508
66	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	-	385.781.300
67	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	3.584.330.754	14.114.115.312
68	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	3.972.769.563	1.084.515.865
69	100	KOMISI YUDISIAL RI	118.677.600	573.363.400
70	103	BAKORNAS	301.377.802	-
71	105	BPLS	(13.600)	-
JUMLAH			**1.245.221.273.097**	**1.457.362.551.679**

KAS DI BENDAHARA PENERIMA
PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2007	2006
1	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	92.497.178	134.850.000
2	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	126.655.453	9.355.901
3	005	MAHKAMAH AGUNG	28.048.862	27.404.362
4	006	KEJAKSAAN AGUNG	-	17.466.266
5	007	SEKRETARIAT NEGARA	1.117.500.947	1.832.800.341
6	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	20.700.000	-
7	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	485.334.457.649	266.743.316.420
8	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	594.978.105	-
9	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	10.426.810.801	6.062.318.494
10	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	131.809.629.419	85.907.531.316
11	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	169.610.542	37.698.236
12	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	2.593.853.451	4.946.871.704
13	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.358.755.329	330.468.215
14	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	8.097.579.087	3.293.849.776
15	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	99.251.382.897	-
16	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	3.560.851.936	11.091.103.413
17	025	DEPARTEMEN AGAMA	-	1.000.000
18	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	113.780.000
19	027	DEPARTEMEN SOSIAL	192.657	
20	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	26.031.940.545	933.855.746
21	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	3.806.587	-
22	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	1.000.000	-
23	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	2.763.705	-
24	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	12.572.878.693	-
25	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	86.877.600	-
26	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	-	2.111.980
27	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	9.546.634	-
28	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	2.000.000	2.000.000
29	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	50.619.692.931	20.705.419.596
30	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	213.689.850	50.318.000
31	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	38.200.718.675	26.284.868.236
32	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	160.422.271	2.432.532
33	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	57.026.408	-
34	069	BELANJA LAIN-LAIN	17.514.239	-
35	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	102.800.322	-
36	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	-	203.782
37	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	100.314.636	-
38	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.630.446	-
39	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	4.447.247.925	708.136.995
40	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	18.020.819	-
41	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	77.661	-
42	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	517.736.603	199.089.046
43	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	4.969.812	6.122.268
44	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	147.085.240	-
45	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	5.580.485	-
46	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	98.606.217	23.320.388
47	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	47.383.498	-
48	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	-	21.429.775
JUMLAH			**878.054.836.115**	**429.489.122.788**

DAFTAR PIUTANG PENERIMAAN PUNGUTAN EKSPOR
PERHITUNGAN SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007 DAN 2006
(dalam Rupiah)

No.	Nama Perusahaan	KURANG BAYAR	DENDA ADM ATAS		TOTAL TAGIHAN PER 31 DES 2007	TOTAL TAGIHAN PER 31 DES 2006
			TERLAMBAT	KURANG		
1	CV. Antara	122.021.835,92	58.570.481,24	-	180.592.317,15	158.628.386,69
2	CV. Antara	122.036.719,62	46.373.953,45	-	168.410.673,07	136.681.125,97
3	CV. Makmur Bersama	382.648.877,79	183.671.461,34	-	566.320.339,13	492.217.738,70
4	CV. United Profit International	610.653.584,28	293.113.720,45	-	903.767.304,73	757.210.444,51
5	CV. United Profit International	116.398.378,42	55.871.221,64	-	172.269.600,06	146.661.956,81
6	PT. Agrabudi Jaya Bersama	3.863.071.917,00	1.854.274.520,16	-	5.717.346.437,16	4.949.774.928,90
7	PT. Alpha Archipelago Energi	113.485.932,00	52.203.528,72	-	165.689.460,72	138.452.837,04
8	PT. Asia Pacific Coalindo	1.081.707.726,00	519.219.708,48	-	1.600.927.434,48	1.362.951.734,76
9	PT. Bahari Cakrawala Sebuku	18.041.005.920,00	8.643.025.055,07	-	26.684.030.975,07	22.680.145.455,00
10	PT. Bara Jaya Utama	3.984.705.432,00	1.888.029.855,81	-	5.872.735.287,81	4.979.713.963,98
11	PT. Bara Multi Sugih Sentosa	9.288.935.978,11	4.455.883.549,77	-	13.744.819.527,88	11.788.913.332,88
12	PT. Batu Kali Welang Ampuh	800.918.646,00	472.635.076,80	17.615.485,44	1.291.169.208,24	1.125.847.629,12
13	PT. Berkat Banua Indah	946.587.120,00	454.361.817,60	-	1.400.948.937,60	1.211.631.513,60
14	PT. Borneo Indobara	2.400.881.178,00	1.127.354.131,68	-	3.528.235.309,68	2.952.023.826,96
15	PT. Borneo Indobara	714.161.595,00	328.514.333,70	-	1.042.675.928,70	871.277.145,90
16	PT. Borneo Omega Group	688.850.400,00	330.648.192,00	-	1.019.498.592,00	881.728.512,00
17	PT. Bukit Bara Interprice	613.003.694,73	294.241.773,47	-	907.245.468,20	767.545.948,50
18	PT. Bumi Dharma Kencana	2.236.199.644,84	1.073.375.829,52	-	3.309.575.474,36	2.863.159.400,26
19	PT. Bumi Dharma Kencana	559.677.450,00	268.645.176,00	-	828.322.626,00	705.193.587,00
20	PT. Bumi Dharma Kencana	103.735.918,50	149.090.485,95	46.796.844,24	299.623.248,69	263.199.996,30
21	PT. Cahaya Timur Permai	76.585.488,00	36.761.034,24	-	113.346.522,24	94.966.005,12
22	PT. Cipta Mandiri Sejati	3.595.641.951,72	1.725.908.136,82	-	5.321.550.088,54	4.579.935.014,60
23	PT. Corsindo Global Trading	45.451.939,46	46.398.275,05	21.816.930,94	113.667.145,46	100.940.602,41
24	PT. Dasa Eka Jasatama	15.113.099.291,54	7.245.585.292,12	-	22.358.684.583,66	19.138.215.746,78
25	PT. Dewata Utama	539.827.947,00	259.117.414,56	-	798.945.361,56	680.183.213,22
26	CV. Elang Alam Perkasa	282.300,00	135.504,00	-	417.804,00	344.406,00
27	PT. Emirates Trading Agency	34.899.706,50	55.003.924,20	16.751.859,12	106.655.489,82	96.185.577,87
28	PT. Global Inti Trade	55.309.702,14	25.442.462,98	-	80.752.165,12	68.584.030,65
29	PT. Global Inti Trading QQ	54.597.957,50	26.207.019,60	-	80.804.977,10	68.793.426,45
30	PT. Harjomas Makmur	471.010.365,00	216.664.767,90	-	687.675.132,90	574.632.645,30
31	PT. Indodharma Multi Perkasa	187.836.513,28	37.498.506,77	67.621.144,78	292.956.164,83	244.118.671,37
32	PT. Indodharma Multi Perkasa	11.197.948.873,50	5.343.460.027,29	-	16.541.408.900,79	14.214.359.286,45
33	PT. Indominco Mandiri	3.723.874.209,90	5.209.873.539,72	1.818.730.821,31	10.752.478.570,93	9.534.780.634,97
34	PT. Indomineratama Prayasa	959.732.745,00	460.671.717,60	-	1.420.404.462,60	1.200.070.723,80
35	PT. Indotai International	3.516.978.610,50	1.688.149.733,04	-	5.205.128.343,54	4.516.534.775,73
36	PT. Jorong Barutama Greston	13.165.445.235,85	6.296.651.782,02	-	19.462.097.017,87	16.642.863.969,94
37	PT. Kalimantan Energi Lestari	1.088.440.388,08	522.451.386,28	-	1.610.891.774,36	1.397.821.247,98
38	PT. Kalimantan Energi Utama	1.091.391.075,00	523.867.716,00	-	1.615.258.791,00	1.353.324.933,00
39	PT. Mandiri Intiperkasa	889.968.867,90	927.330.876,63	431.983.683,75	2.249.283.428,28	1.964.493.390,55
40	PT. Marunda Graha Mineral	4.387.103.860,50	2.097.124.389,00	-	6.484.228.249,50	5.516.933.739,90
41	PT. Marunda Graha Mineral	1.640.569.509,00	768.028.066,14	-	2.408.597.575,14	2.028.226.984,98
42	PT. Mega Citra Prima Coal	1.654.105.897,12	793.970.830,62	-	2.448.076.727,74	2.088.245.550,48
43	PT. Mega Putra Citra Primacoal	519.606.389,11	246.803.143,50	-	766.409.532,61	636.525.325,98
44	PT. Padang Bara Sukses Makmur	499.423.396,50	7.413.104,70	239.723.230,32	746.559.731,52	651.839.190,09
45	PT. Prima Multitrada	4.616.576.676,81	2.200.851.111,18	-	6.817.427.788,00	5.824.382.219,42
46	PT. Surya Sakti Darma Kencana	241.011.971,78	-	115.685.746,45	356.697.718,23	269.933.408,39
47	PT. Trinity Artha Nugraha	308.900.531,86	148.272.255,29	-	457.172.787,15	389.214.670,14
48	PT. Trubaindo Coal Mining	276.334.179,00	1.015.190.126,67	138.573.236,16	1.430.097.541,83	1.331.941.499,55
49	PT. TTI Trans Global	4.189.858.939,50	2.011.132.290,96	-	6.200.991.230,46	5.366.448.392,82
50	PT. Tunas Karya Wijaya Agung	483.877.665,00	232.261.279,20	-	716.138.944,20	609.685.857,90
52	PT. Wahana Eka Pratama	462.262.239,24	221.885.874,83	-	684.148.114,07	573.205.176,65
	PT. Kitadin					
	J u m l a h	**121.878.642.371,47**	**62.939.215.461,79**	**2.915.298.982,52**	**187.733.156.815,78**	**160.990.689.783,38**

REKAPITULASI DATA TUNGGAKAN KEBERATAN DAN BANDING (SKPKB) PER JENIS PAJAK
PER 31 DESEMBER 2007

Jenis Pajak	IDR		USD	
	Jml Permhn	Nilai SKP	Jml Permhn	Nilai SKP
TUNGGAKAN KEBERATAN (SKPKB)				
PPh Non Migas Lainnya	570	1.144.397.452.913,84	5	2.707.753,65
PPh Pasal 21	696	155.263.310.197,60		
PPh Pasal 22	47	6.784.888.940,00		
PPh Pasal 23	728	554.169.974.886,56		
PPh Pasal 25 badan	1093	4.065.822.588.410,67	34	103.648.975,09
PPh Pasal 25 OP	504	48.492.445.742,73		
PPN	3342	3.315.674.295.465,64		
PPNBM	29	40.332.288.565,00		
PBB	1194	242.021.241.203,00		
Bunga Penagihan	157	133.700.530.864,67	4	1.391.890,00
Total Tunggakan Keberatan (SKPKB)	**8360**	**9.706.659.017.189,71**	**43**	**107.748.618,74**
TUNGGAKAN BANDING (SKPKB)				
PPh Non Migas Lainnya	62	297.441.756.342,00		
PPh Pasal 21	54	47.070.360.854,00		
PPh Pasal 22	4	2.442.014.553,00		
PPh Pasal 23	66	65.081.445.087,00		
PPh Pasal 25 badan	116	409.817.095.579,00	4	472.274,60
PPh Pasal 25 OP	21	7.825.804.663,00		
PPN	313	503.869.590.973,00		
PPNBM	4	3.133.152.320,00		
PBB	3	917.217.093,00		
Bunga Penagihan	2	1.083.805.548,00		
Belum diketahui Jenis Pajaknya	17	151.955.330.580,00		
Total Tunggakan Banding (SKPKB)	**662**	**1.490.637.573.592,00**	**4**	**472.274,60**
Grand Total Tunggakan Keberatan dan Banding atas SKPKB	**9022**	**11.197.296.590.781,70**	**47**	**108.220.893**

PIUTANG BUKAN PAJAK

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2007	2006
1	005	MAHKAMAH AGUNG	120.000	-
2	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	1.292.020	-
3	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	-	40.154.563.198
4	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	34.458.942.679.003	22.598.801.458.415
5	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	27.036.064.041	1.235.032.417
6	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	3.411.860.984	2.507.836.773
7	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	2.213.041.658.967	1.852.257.897.999
8	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	607.958.007.654	565.550.009.305
9	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	26.338.320.950	-
10	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	20.285.977.316	198.682.451.772
11	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	12.600.000
12	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	317.674.186.966	167.671.912.927
13	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	-	53.489.965
14	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.121.376.760	-
15	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.417.546.700	1.417.546.700
16	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	-	960.000.000
17	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	1.933.593.903	-
18	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	39.200.000	-
19	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	245.917.200	245.917.200
20	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	-	405.690.000
21	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	226.295.613.642	222.698.208.460
22	062	SUBSIDI DAN TRANSFER	22.460.000	-
23	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	-	224.400.000
24	069	BELANJA LAIN-LAIN	82.407.738.470	-
25	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	27.396.004	-
26	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	3.299.531.869	-
27	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	9.776.756.941	4.559.038.266
28	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	39.500.000	110.000.000
29	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	-	381.198.683
30	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	745.240.901	788.410.784
31	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	841.442.796	-
32	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	69.882.000	-
JUMLAH			**38.005.973.365.087**	**25.658.717.662.864**

BAGIAN LANCAR TUNTUTAN GANTI RUGI

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2007	2006
1	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	59.000.000	65.800.000
2	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	6.612.373	2.348.436
3	006	KEJAKSAAN AGUNG	-	4.750.000
4	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	182.500.000	226.000.000
5	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	332.911.535	1.258.779.925
6	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	16.049.880	58.837.410
7	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	1.465.194.852	744.449.467
8	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	123.613.081	38.103.800
9	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	6.522.000	-
10	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	14.393.500	51.443.034
11	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	9.910.000	439.489.073
12	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	58.200.000	-
13	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	310.052.256	2.273.385.172
14	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	52.913.600	58.960.400
15	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	63.945.000	93.166.700
16	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	112.948.500	3.249.500
17	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	999.343.800	-
18	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	29.646.200	30.891.600
19	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	-	51.500.000
20	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	62.750.000	71.250.000
21	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	4.138.144	1.890.000
22	054	BADAN PUSAT STATISTIK	78.450.751	24.281.800
23	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	840.000	1.800.000
24	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	40.000.000	175.000.000
25	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	45.594.238	48.261.290
26	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	17.138.977	22.048.497
27	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	11.200.000	11.200.000
28	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	7.200.000	7.200.000
29	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	10.000.000	10.000.000
30	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.080.000	1.080.000
31	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	4.200.000	6.378.713.832
32	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	103.333.333	-
JUMLAH			**4.229.682.020**	**12.153.879.936**

BAGIAN LANCAR PINJAMAN SLA, RDI DAN RPD MENURUT SEKTOR PEMINJAM

Per 31 DESEMBER 2007

dalam Juta Rupiah

No	Sektor	Pokok jatuh Tempo 01-01-08 s/d 31-12-08	Tunggakan s/d 31-12 07	Akrual Bunga, CC & Denda s/d 31-12-07	Bagian Lancara/Piutang Jangka Pendek	Piutang Jangka Panjang Jatuh Tempo Setelah 31-12-08	Total Piutang
1	2	3	4	5	6=3+4+5	7	8=6+7
1	KOPERASI	635,98	64.579,81	1,143.21	66.359,01	3.046,20	69.405,22
2	BPIS	31.265,06	450.880,44	4,206.37	486.351,88	1.847.021,86	2.333.373,75
3	PERTANIAN	74.628,17	2.859.814,81	1,585.75	2.936.028,75	190.052,86	3.126.081,62
4	KEUANGAN	1.099.463,66	5.084.876,00	44,692.02	6.229.031,68	2.754.330,49	8.983.362,18
5	PARIWISATA POS TELEKOMUNIKASI	450.445,54	21.260,81	72,234.88	543.941,24	3.725.712,21	4.269.653,46
6	KEHUTANAN	697,53	4.595,71	52.82	5.346,06	13.941,12	19.287,19
7	PEKERJAAN UMUM	15.626,52	295.342,04	2,538.53	313.507,10	145.829,45	459.336,55
8	PERHUBUNGAN	2.504,06	310.478,27	308.32	313.290,67	529.134,74	842.425,41
9	INDUSTRI	469.843,68	2.166.893,27	60,835.19	2.697.572,15	4.598.058,49	7.295.630,64
10	PERTAMBANGAN & ENERGI	2.590.290,19	3,38	1.240.557,98	3.830.851,55	23.557.515,10	27.388.366,66
11	PDAM	266.716,10	4.393.470,69	151.406,50	4.811.593,30	1.771.819,69	6.583.413,00
12	PEMERINTAH DAERAH	104.792,18	742.118,38	46,821.39	893.731,96	389.220,98	1.282.952,95
13	PERUSDA KEBERSIHAN	2.401,46	49.484,52	1,455.80	53.341,78	7.398,07	60.739,86
Jumlah		5.109.310,20	16.443.798,17	1.627.838,81	23.180.947,19	39.533.081,33	62.714.028,52

PENERIMAAN BUNGA DAN DENDA PINJAMAN PENDANAAN KUMK-DANA EKS SU-005
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2007

(dalam rupiah)

NO.	BUMN PENGELOLA / LKP	HAK TAGIH 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2007				TELAH DIBAYAR 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2007				PIUTANG BUNGA DAN DENDA PER 31 DESEMER 2006		
		TAGIHAN BUNGA & DENDA TAHUN SEBELUMNYA PER 31 DES 2006	BUNGA DAN DENDA TAHUN 2007			TAGIHAN BUNGA & DENDA TAHUN SEBELUMNYA PER 31 DES 2006	PEMBAYARAN BUNGA DAN DENDA TAHUN 2007			PIUTANG TAHUN-TAHUN SEBELUMNYA	PIUTANG TAHUN 2007	PIUTANG TAHUN 2006
			BUNGA (ACRUAL)	DENDA (ACRUAL)	JUMLAH		BUNGA	DENDA	JUMLAH			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)+(5)	(7)	(8)	(9)	(10)=(8)+(9)	(11)=(3)-(7)	(12)=(6)-(10)	(13)
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	2.004.109.589	28.408.167.104	-	30.412.276.694	2.004.109.589	27.086.158.535	-	29.090.268.124	-	1.322.008.570	2.004.109.589
2	PT PNM (Persero)	1.603.287.671	26.323.043.863	518.121.070	28.444.452.604	1.603.287.671	24.717.747.743	347.070.797	26.668.106.211	-	1.776.346.393	1.603.287.671
3	PT BRI (Persero) Tbk	2.868.251.078	40.583.095.863	103.701.973	43.555.048.914	2.868.251.078	38.694.512.192	103.701.973	41.666.465.243	-	1.888.583.671	2.866.310.873
4	Bank Bukopin	2.004.109.589	33.879.795.334	-	35.883.904.923	2.004.109.589	31.660.709.519	-	33.664.819.109	-	2.219.085.815	2.004.109.589
5	PT BTN (Persero)	1.145.205.479	16.233.238.345	732.323.476	18.110.767.300	1.145.205.479	15.477.804.877	401.141.805	17.024.152.161	-	1.086.615.139	1.145.205.479
6	Perum Pegadaian	1.775.068.493	31.007.764.012	-	32.782.832.504	1.775.068.493	29.071.965.749	-	30.847.034.242	-	1.935.798.262	1.775.068.493
7	BPD Aceh	513.842.529	1.231.657.253	2.555.431	1.748.055.213	513.842.529	1.160.835.366	2.555.431	1.677.233.326	-	70.821.888	513.842.529
8	BPD Bengkulu	342.614.846	1.211.698.276	11.405.433	1.565.718.556	342.614.846	1.117.269.093	11.405.433	1.471.289.372	-	94.429.184	342.614.846
9	BPD Sumatera Utara	143.150.685	2.052.762.089	127.911.903	2.323.824.677	143.150.685	1.934.725.609	-	2.077.876.294	-	245.948.383	143.150.685
10	BPD Sumatera Selatan	229.041.096	3.284.419.342	55.706.457	3.569.166.895	229.041.096	3.095.560.975	45.697.217	3.370.299.288	-	198.867.607	229.041.096
11	BPD Sumatera Barat	257.671.233	3.694.971.760	-	3.952.642.993	257.671.233	3.482.506.097	-	3.740.177.330	-	212.465.663	257.671.233
12	BPD Riau	196.151.528	2.044.177.617	52.246.418	2.292.575.564	196.151.528	1.934.725.609	13.059.691	2.143.936.829	-	148.638.735	196.151.528
13	BPD Lampung	86.932.611	1.231.657.253	291.214.241	1.609.804.106	86.932.611	1.160.835.366	205.480.035	1.453.248.012	-	156.556.094	86.932.611
14	BPD Jambi	11.473.004	164.220.967	(276.484)	175.417.488	11.473.004	154.778.049	(276.484)	165.974.569	-	9.442.918	11.473.004
15	BPD DKI Jakarta	379.308.492	4.926.629.014	4.659.261	5.310.596.766	379.308.492	4.643.341.463	4.659.261	5.027.309.216	-	283.287.551	379.308.492
16	BPD Jawa Barat	353.050.988	4.058.309.586	6.355.097	4.417.715.671	353.050.988	3.869.451.219	6.355.097	4.228.857.304	-	188.858.367	353.050.988
17	BPD DI Yogyakarta	143.150.685	2.052.762.089	537.077.059	2.732.989.833	143.150.685	1.934.725.609	386.530.022	2.464.406.316	-	268.583.517	143.150.685
18	BPD Jawa Tengah	344.909.100	4.058.309.586	34.680.104	4.437.898.790	344.909.100	3.869.451.219	34.680.104	4.249.040.423	-	188.858.367	344.909.100
19	BPD Jawa Timur	558.941.867	7.904.839.975	663.732.361	9.127.514.203	558.941.867	7.376.036.547	469.649.474	8.404.627.888	-	722.886.315	558.941.867
20	BPD Bali	243.278.119	2.840.816.710	619.626.118	3.703.720.948	243.278.119	2.708.615.853	395.892.605	3.347.786.577	-	355.934.370	243.278.119
21	BPD Nusa Tenggara Barat	213.265.900	3.058.204.961	391.373.009	3.662.843.870	213.265.900	2.882.354.213	285.376.062	3.380.996.176	-	281.847.694	213.265.900
22	BPD Nusa Tenggara Timur	123.109.589	1.745.073.122	-	1.868.182.712	123.109.589	1.663.864.025	-	1.786.973.614	-	81.209.098	123.109.589
23	BPD Sulawesi Selatan	219.386.102	3.459.757.086	(226.486)	3.678.916.702	219.386.102	3.223.684.127	(226.486)	3.442.843.743	-	236.072.959	219.386.102
24	BPD Sulawesi Tengah	133.273.930	1.519.431.107	237.088.110	1.889.793.146	133.273.930	1.448.722.535	189.907.040	1.771.903.505	-	117.889.642	133.273.930
25	BPD Sulawesi Tenggara	16.556.615	174.074.225	148.708.667	339.339.507	16.556.615	164.064.732	115.113.440	295.734.787	-	43.604.720	16.327.483
26	BPD Kalimantan Selatan	114.520.548	1.623.323.835	723.368	1.738.567.751	114.520.548	1.547.780.488	723.368	1.663.024.404	-	75.543.347	114.520.548
27	BPD Kalimantan Tengah	176.370.964	1.642.209.671	128.022	1.818.708.657	176.370.964	1.547.780.488	-	1.724.151.452	-	94.557.206	176.370.964
28	BPD Kalimantan Barat	171.780.822	2.463.314.507	167.729.270	2.802.824.599	171.780.822	2.321.670.731	167.729.270	2.661.180.824	-	141.643.775	171.780.822
29	BPD Kalimantan Timur	301.315.159	2.791.756.441	3.261.592	3.096.333.193	301.315.159	2.631.226.829	3.261.592	2.935.803.580	-	160.529.612	301.315.159
30	BPD Maluku	147.701.252	2.251.058.907	119.088.312	2.517.848.471	147.701.252	2.121.620.103	119.088.312	2.388.409.668	-	129.438.803	147.701.252
31	BPD Papua	238.321.975	2.873.866.925	29.590.395	3.141.779.295	238.321.975	2.708.615.853	11.151.882	2.958.089.711	-	183.689.584	238.321.975
	JUMLAH	**17.059.151.539**	**240.794.406.827**	**4.858.504.179**	**262.712.062.545**	**17.059.151.539**	**227.413.140.814**	**3.319.726.942**	**247.792.019.296**	**-**	**14.920.043.249**	**17.056.982.202**

Catatan :

- Penerimaan Bunga dan Denda Pinjaman Pendanaan KUMK telah ditransfer ke Rekening Penampungan Dana SUP No. : 0329-01-000510-30-8 di BRI Cabang Veteran, Jakarta.

LAPORAN PENGEMBALIAN BLBI 15 BANK DALAM LIKUIDASI EKS DANA TALANGAN PER 31 DESEMBER 2007

No	Nama Bank	Jumlah Kewajiban/BLBI Yang Dicessiekan			Setoran Kas Ke Rekg. BUN. 502.000000				Saldo Akhir Per 31 Desember 2007	Saldo Akhir Per 31 Desember 2006
		Dana Talangan *)	Giro Debet	Total (Saldo Awal)	Setoran s.d Desember 2006	Pengembalian Selama Tahun 2007	Total Pengembalian	%		
1	2	3	4	5=3+4	6	7	8=6+7	9	10=5-8	11
	A. BDL Yang Sudah BAST									
1	PT. Bank Citrahasta Dhanamanunggal	43.398.000.000,00	158.404.166.935,30	201.802.166.935,30	25.098.188.837,19	6.315.060.527,00	31.413.249.364,19	15,57	170.388.917.571,11	176.703.978.098,11
2	PT. Bank Guna Internasional	251.055.008.000,00	0,00	251.055.008.000,00	183.555.008.000,00	17.316.896.847,89	200.871.904.847,89	80,01	50.183.103.152,11	67.500.000.000,00
3	PT. Bank Harapan Sentosa	2.296.138.048.061,00	1.570.044.264.791,07	3.866.182.312.852,07	585.728.056.499,00	41.314.533.283,56	627.042.589.782,56	16,22	3.239.139.723.069,51	3.280.454.256.353,07
4	PT. Bank Kosagraha Semesta Sejahtera	46.872.202.071,00	154.940.412.220,48	201.812.614.291,48	46.872.202.071,00	30.746.092.410,83	77.618.294.481,83	38,46	124.194.319.809,65	154.940.412.220,48
5	PT. Bank Mataram Dhanarta	53.498.000.000,00	283.265.209.866,98	336.763.209.866,98	31.186.000.000,00	4.018.000.000,00	35.204.000.000,00	10,45	301.559.209.866,98	305.577.209.866,98
6	PT. Bank Pasific	290.023.076.268,00	1.843.343.358.571,63	2.133.366.434.839,63	332.023.076.267,80	29.347.497.898,00	361.370.574.165,80	16,94	1.771.995.860.673,83	1.801.343.358.571,83
7	PT. Sejahtera Bank Umum	1.483.617.626.147,00	203.731.889.225,53	1.687.349.515.372,53	857.387.217.393,65	550.081.483,46	857.937.298.877,11	50,85	829.412.216.495,42	829.962.297.978,88
8	PT. South East Asia Bank	166.082.000.000,00	733.317.023.305,99	899.399.023.305,99	99.302.719.380,89	28.197.078.896,79	127.499.798.277,68	14,18	771.899.225.028,31	800.096.303.925,10
9	PT. Bank Anrico	200.277.000.000,00	9.803.728.375,73	210.080.728.375,73	9.532.957.340,07	9.502.388.722,00	19.035.346.062,07	9,06	191.045.382.313,66	200.547.771.035,66
	B. BDL Yang Belum BAST									
10	PT. Astria Raya Bank	121.949.000.000,00	456.969.260.698,77	578.918.260.698,77	131.949.603.600,00	0,00	131.949.603.600,00	22,79	446.968.657.098,77	446.968.657.098,77
11	PT. Bank Dwipa Semesta	6.970.134.589,81	103.135.862.541,06	110.105.997.130,87	6.970.134.600,00	0,00	6.970.134.600,00	6,33	103.135.862.530,87	103.135.862.530,87
12	PT. Bank Industri	279.124.000.000,00	232.346.229.326,68	511.470.229.326,68	279.124.000.000,00	0,00	279.124.000.000,00	54,57	232.346.229.326,68	232.346.229.326,68
13	PT. Bank Jakarta	210.994.000.000,00	0,00	210.994.000.000,00	120.959.930.061,67	60.000.000.000,00	180.959.930.061,67	85,77	30.034.069.938,33	90.034.069.938,33
14	PT. Bank Pinaesaan	269.966.000.000,00	411.118.490.919,58	681.084.490.919,58	18.456.680.100,11	745.723.907,00	19.202.404.007,11	2,82	661.882.086.912,47	662.627.810.819,47
15	PT. Bank Umum Majapahit Jaya	7.971.008.175,00	583.781.467,67	8.554.789.642,67	2.500.000.000,00	0,00	2.500.000.000,00	29,22	6.054.789.642,67	6.054.789.642,67
	JUMLAH	5.727.935.103.311,81	6.161.003.678.246,47	11.888.938.781.558,30	2.730.645.774.151,38	228.053.353.976,53	2.958.699.128.127,91	24,89	8.930.239.653.430,37	9.158.293.007.406,90

PERSEDIAAN

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2007	2006
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	2.149.776.968	2.586.345.936
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	5.574.180.236	3.938.062.798
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	2.932.368.557	4.739.502.147
4	005	MAHKAMAH AGUNG	9.372.684.168	5.590.378.453
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	941.681.919	-
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	102.766.344.867	65.162.411.617
7	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	3.083.255.325	334.321.655
8	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	7.039.808.443	5.832.166.675
9	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	3.426.363.502.221	-
10	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	38.376.328.970	18.404.750.813
11	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	107.466.860.517	83.265.789.110
12	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	16.797.548.715	19.499.958.199
13	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	8.205.958.375	973.951.915
14	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	39.633.451.116	6.551.907.878
15	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	46.124.697.882	201.635.396.590
16	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	230.314.478.883	6.285.855.424
17	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	297.866.984.950	178.291.519.092
18	025	DEPARTEMEN AGAMA	1.877.188.538	560.325.246
19	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	260.168.083.792	12.743.586.112
20	027	DEPARTEMEN SOSIAL	54.535.627.229	83.520.161.912
21	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	4.352.429.099	5.379.745.296
22	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	7.583.567.669	526.583.916
23	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	5.713.957.891	5.769.374.614
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	136.369.697	22.767.400
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	863.631.584	795.657.921
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	1.958.475	7.107.827
27	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	100.575.000	952.096.000
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	991.571.305	234.008.480
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	631.268.050	32.830.500
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	9.894.531.658	522.822.610
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	29.888.600	22.132.900
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	40.924.867	4.602.500
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	156.576.488	67.211.950
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	444.631.761	458.689.752
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	2.520.101.390	12.151.300
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	586.000	3.250.000
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	4.608.868.158	4.539.830.281
38	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	438.581.495	575.485.680
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	533.173.573	1.462.760.895
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	9.459.035	25.000.000
41	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	5.225.625.027	2.467.866.091
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	437.011.904.156	618.428.379.304
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	21.144.996.006	15.771.174.622
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	39.335.634	15.429.120
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	291.971.676	199.565.925
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	3.871.966.940	4.327.130.947
47	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	93.167.504	3.593.425
48	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	293.571.244.673	67.417.476.341
49	069	BELANJA LAIN-LAIN	19.550.737.518	
50	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	429.208.249	377.997.315
51	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	28.184.928.927	9.729.767.266
52	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	73.577.617.623	72.278.699.743

PERSEDIAAN

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2007	2006
53	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	811.326.033	620.046.088
54	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	380.040.660	232.114.863
55	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	309.631.721	327.395.938
56	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	11.036.070.461	4.374.538.846
57	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	987.288.201	2.196.937.288
58	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	2.293.915.248	1.979.280.234
59	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	134.550.170.087	66.270.510.260
60	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	1.905.140	46.321.840
61	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	190.627.719	149.979.324
62	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	896.035.512	1.067.183.134
63	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	90.267.200	142.056.875
64	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	3.870.805.550	2.355.869.476
65	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	2.967.307.025	2.911.268.766
66	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	2.692.162.284	1.230.606.108
67	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	18.686.200	-
68	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	288.269.250	138.833.080
69	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	1.022.436.634	850.674.192
70	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	59.261.987.044	452.392.778.617
71	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	1.237.066.803	1.114.252.277
72	100	KOMISI YUDISIAL RI	248.008.386	146.030.993
73	103	BAKORNAS	14.157.991.085	-
JUMLAH			**5.820.948.165.642**	**2.050.894.259.692**

POSISI PINJAMAN SLA, RDI DAN RPD MENURUT SEKTOR PEMINJAM
Per 31 DESEMBER 2007
dalam Juta Rupiah

No	Sektor	Penarikan				Pembayaran		Outstanding	Tunggakan							Piutang	Akrual Bunga-C.Charge-Denda	Piutang Termasuk Akrual
		Pinjaman	BMT	Equity	Total	Pokok	BMT-P		Pokok	BMT-P	Bunga	BMT-B	C.Charge	Denda	Total			
2	3	4	5	6	7=4+5-6	8	9	10=7-8-9	11	12	13	14	15	16	17=11 s.d 16	18=10+(13 s.d.16)	19	20=18+19
1	KOPERASI	31.284,75	2.110,73	0,00	33.395,49	2.216,50	125,90	31.053,08	25.492,38	1.878,50	22.727,60	0,00	23,62	14.457,70	64.579,81	68.262,01	1,143.21	69.405,22
2	BPIS	3.176.120,10	0,00	978.577,33	2.197.542,77	159.442,97	0,00	2.038.099,79	159.812,86	0,00	212.363,75	0,00	0,00	78.703,82	450.880,44	2.329.167,37	4,206.37	2.333.373,75
3	PERTANIAN	2.126.425,51	177.342,18	0,00	2.303.767,69	721.743,94	88.542,97	1.493.480,76	1.185.785,53	43.014,18	464.455,43	0,00	3.386,61	1.163.173,04	2.859.814,81	3.124.495,86	1,585.75	3.126.081,62
4	KEUANGAN	12.360.036,80	359.934,54	777.778,30	11.942.193,05	5.682.934,99	308.356,69	5.950.901,36	2.063.850,53	33.256,66	1.761.360,78	0,00	2.422,93	1.223.985,07	5.084.876,00	8.938.670,16	44,692.02	8.983.362,18
5	PARIWISATA POS TELEKOMUNIKASI	8.822.271,61	170.703,14	0,00	8.992.974,76	4.658.952,44	142.286,12	4.191.736,18	15.576,98	1,42	5.675,06	0,00	0,00	7,32	21.260,81	4.197.418,58	72,234.88	4.269.653,46
6	KEHUTANAN	47.429,57	3.721,47	0,00	51.151,05	29.824,63	3.721,47	17.604,94	2.966,28	0,00	1.476,59	0,00	0,00	152,82	4.595,71	19.234,37	52.82	19.287,19
7	PEKERJAAN UMUM	759.867,18	10.294,85	679,89	769.482,14	432.581,24	2.551,11	334.349,78	165.175,89	7.717,90	83.412,79	0,00	0,00	39.035,44	295.342,04	456.798,02	2,538.53	459.336,55
8	PERHUBUNGAN	1.099.062,49	20.330,95	0,00	1.119.393,45	464.909,57	16.875,60	637.608,27	102.502,21	3.467,24	108.239,12	0,00	26.716,23	69.553,44	310.478,27	842.117,08	308.32	842.425,41
9	INDUSTRI	9.587.952,37	653.028,72	136.876,63	10.104.104,46	3.979.687,45	56.468,64	6.067.948,37	757.209,15	242.837,03	479.002,83	0,00	812,28	687.031,95	2.166.893,27	7.234.795,45	60,835.19	7.295.630,64
10	PERTAMBANGAN & ENERGI	49.860.332,65	1.482.090,27	0,00	51.342.422,92	24.168.574,88	1.026.039,35	26.147.808,67	3,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,38	26.147.808,67	1.240.557,98	27.388.366,66
11	PDAM	3.605.523,35	997.511,67	0,00	4.603.035,02	908.895,81	218.980,66	3.475.158,54	1.208.240,13	228.382,60	1.742.592,07	470,61	6.701,78	1.207.083,47	4.393.470,69	6.432.006,49	151.406,50	6.583.413,00
12	PEMERINTAH DAERAH	1.552.851,12	91.882,96	0,00	1.644.734,08	857.190,38	54.614,59	732.929,10	229.446,28	9.469,64	277.830,21	2.205,61	1.590,66	221.575,95	742.118,38	1.236.131,55	46,821.39	1.282.952,95
13	PERUSDA KEBERSIHAN	26.348,50	9.173,88	0,00	35.522,39	4.776,04	1.026,45	29.719,89	15.442,24	4.478,11	17.753,31	0,00	137,81	11.673,03	49.484,52	59.284,06	1,455.80	60.739,86
Jumlah		93.055.506,06	3.978.125,41	1.893.912,16	95.139.719,31	42.071.730,91	1.919.589,60	51.148.398,78	5.931.503,90	574.503,34	5.176.889,61	2.676,22	41.791,96	4.716.433,11	16.443.798,17	61.086.189,71	1.627.838,81	62.714.028,52

DAFTAR REKENING PENGELOLAAN DANA BERGULIR
YANG DIKELOLA DIREKTORAT PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN
PER 31 DSEMBER 2007 DAN 2006

No.	No. Rekening		Nama Bank	Nama Rekening (Keterangan)	Sumber Dana	Fungsi (Tujuan) Pembentukan Rekening	Saldo Per 31 Desember 2007	Saldo Per 31 Desember 2006
1	2		3	4	5	6	7	8
Dana Terkait dengan RDI								
1	1	0206.01.000023.30.5	PT BRI (Persero)	Dirjen Perbendaharaan untuk penampungan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (92%)	Dari penerimaan angsuran pinjaman petani yang dibiayai dari sumber IBRD, ADB dan RDI	Untuk menampung pengembalian pinjaman petani proyek PIR/ UPP Perkebunan sebesar 92 % dari angsuran pinjaman petani. Sesuai surat Dirjen Lembaga Keuangan S-4082/LK/1994 tanggal 16 September 1994 mengenai pelimpahan ke RDI dilakukan setelah terlebih dahulu	3.026.036.270,01	341.738.465.440,89
	2	116-00-9400983-5	PT Bank Mandiri (eks.BBD)				144.389.465.703,57	141.734.114.408,73
	3	122,0094007906	PT Bank Mandiri (eks. BEII)				318.676.528.585,28	315.515.264.518,79
2	4	0206.01.000022.30.9	PT BRI (Persero)	Cadangan Pembayaran Fee Konversi dan Collecting Fee Proyek PIR/ UPP (5%)	Dari penerimaan angsuran pinjaman petani yang dibiayai dari sumber IBRD, ADB dan RDI	Untuk pembayaran Fee Konversi dan Collecting Fee Proyek PIR/ UPP Perkebunan sebesar 5 % dari angsuran pinjaman petani.	251.623.749,37	6.029.492.849,73
	5	116-00-9400984-3	PT Bank Mandiri (eks.BBD)				2.118.341.291,87	2.202.346.916,31
	6	122,0094007914	PT Bank Mandiri (eks. BEII)				5.268.106.970,87	5.593.727.253,02
3	7	0206.01.000032.30.4	PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus (KCK)	Pembiayaan percepatan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/UPP perkebunan (3%)	Dari penerimaan angsuran pinjaman petani yang dibiayai dari sumber IBRD, ADB dan RDI	Untuk pembiayaan percepatan pengembalian pinjaman petani proyek PIR/ UPP Perkebunan sebesar 3 % dari angsuran pinjaman petani	141.215.203,76	9.141.204.913,80
4	8	0206-01-000015-30-2	PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus (KCK)	Proyek P3 Bali (Proyek Pemuliaan dan Pengembangbiakan Sapi Bali)	Dari penerimaan angsuran pinjaman peternak eks. RDI	Untuk membiayai Proyek Pengembangan Pembibitan Sapi Bali (P3 Bali) di Bali dan Dompu, NTB	380.116.053,28	2.862.416.630,28
5	9	0206-01-000014-30-6	PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus (KCK)	Proyek Redistribusi Ternak	Dari pengembalian pinjaman dari peternak Eks. IFAD, ADB, IBRD	Untuk menampung 20 % pengembalian pinjaman petani peternak yang digunakan untuk membiayai pembinaan para petani peternak (80% disetor ke RDI).	35.711.948,10	1.642.531.547,10
6	10	0206-01-000034-30-6	PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus	Proyek P4K (Proyek Peningkatan Pendapatan Petani Kecil)	Dari penerimaan pengembalian pinjaman petani eks. IFAD	Untuk menampung akumulasi spread bunga bagian Pemerintah 1,21% untuk pembiayaan pembinaan peningkatan pendapatan kelompok petani kecil	3.990.192,00	684.477.304,00
7	11	0206-01-000002-30-9	PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus	Rekening Induk Dana Lingkungan Bergulir	Pengembalian dari bank pelaksana eks. Hibah KFW	Digulirkan untuk pembiayaan efisiensi produksi yang berkaitan dengan pencegahan dan pengendalian dampak lingkungan	14.504.150.196,25	11.855.027.083,99
8	12	1008276-01-0 RP	PT Bank Bukopin	Rekening Direktur Jenderal Perbendaharaan	Penerimaan pengembalian pokok, bunga, dan denda Pinjaman Dana Bergulir eks RDI	Untuk menampung penerimaan pengembalian pokok pinjaman, bunga, dan denda pinjaman dana bergulir	7.136.005.244,30	7.065.265.783,70
	13	100 01.06.017300-0	PT Bank Sumut				1.194.142.683,03	1.361.669.734,03
	14	0000.280.06.42	PT Bank Nagari				12.394.561.035,98	14.949.099.033,62

DAFTAR REKENING PENGELOLAAN DANA BERGULIR
YANG DIKELOLA DIREKTORAT PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN
PER 31 DSEMBER 2007 DAN 2006

No.	No. Rekening		Nama Bank	Nama Rekening (Keterangan)	Sumber Dana	Fungsi (Tujuan) Pembentukan Rekening	Saldo Per 31 Desember 2007	Saldo Per 31 Desember 2006
1	2		3	4	5	6	7	8
	15	0011539818	PT BPD Kaltim				686.661.110,21	766.139.911,44
	16	10.401.01.00027-7	PT BPD Kalbar	Rekening Direktur Jenderal Perbendaharaan	Penerimaan pengembalian pokok, bunga, dan denda Pinjaman Dana Bergulir eks RDI	Untuk menampung penerimaan pengembalian pokok pinjaman, bunga, dan denda pinjaman dana bergulir	9.268.788.663,33	9.040.337.632,95
	17	101-01-06320-5	PT Bank DKI				14.109.939.944,00	18.103.925.493,00
	18	0001-023149-800	PT Bank Jabar				8.960.600.433,00	9.852.676.009,00
	19	1.034-12652-1	PT BPD Jateng				16.015.292.737,00	15.441.965.079,00
	20	20.01.9.00003-1	PT BPD DIY				4.290.909.025,24	5.042.318.757,24
	21	0011146855	PT Bank Jatim				8.677.050.060,30	8.386.984.557,70
	22	00.00917-0	PT BPD Bali				5.077.259.436,52	4.909.716.612,41
	23	21.04405.00-5	PT BPD NTB				4.377.167.367,98	4.323.388.850,98
	24	001.01.02.000002-8	PT BPD Sulut				686.280.353,00	769.205.647,00
9	25	301.00276.15	PT Bank Muamalat Indonesia, Tbk.	Penampungan Nisbah Bagi Hasil Dalam Rangka KKPA-Bagi Hasil Bank Muamalat	Bagi Hasil bagian pemerintah dari pinjaman KKPA-Bagi Hasil	Menampung penerimaan nisbah bagi hasil atas pinjaman pendanaan KKPA Bagi Hasil	1.665.117.521,12	6.079.899.015,33
JUMLAH I							**583.335.061.779,37**	**945.091.660.984,04**
Dana Tidak Terkait dengan RDI								
10	26	0329-01-000510-30-8	PT BRI (Persero), Tbk. Cabang Veteran, Jakarta	Penampungan Pencairan Dana Surat Utang Pemerintah	Penerimaan pengembalian pokok, bunga, dan denda dari Bank Penyalur eks Surat Utang No. SU-005/KMK/ 1999	Untuk penampungan pencairan dana SUP, dan penerimaan pengembalian pokok, bunga, dan denda dari Bank Pelaksana	1.075.484.966.934,81	567.838.339.376,66
11	27	0329-01-000310-30-0	PT BRI (Persero), Tbk. Cabang Veteran, Jakarta	Penampungan Recovery Risiko KUT TP 1999/2000	Penerimaan recovery tunggakan KUT 1999/2000	Untuk penampungan recovery tunggakan KUT TP 1999/2000	112.305.847.993,28	110.455.796.182,93
12	28	018-01-000036-30-3	PT BRI (Persero), Tbk. Cabang Jakarta Tanah Abang	Penampungan Dana Cadangan Risiko KUT TP 1999/2000	Penerimaan bunga KUT TP 1999/2000 Bagian Pemerintah sebesar 2,5%	Untuk penampungan dana cadangan risiko KUT TP 1999/2000	5.867.672.703,98	5.720.767.616,98
13	29	0206-01-000008-30-5	PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus	Dana Pembinaan dan Pengembangan Koperasi	APBN Anggaran XVI	Untuk menampung angsuran : a. Kredit Moester tester b. Kredit Hand sprayer c. Pembiayaan Proyek Pengem bangan dan Pembinaan Koperasi d. Pembiayaan Yodisasi Garam Rakyat e. Pembiayaan GLK-KUD	5.622.011.202,49	5.983.689.643,49
14	30	0206-01-000006-30-3	PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus	Penampungan Pengembalian Pinjaman Proyek Pengembangan Akuntansi (P2A)	Pengembalian Bantuan Uang Muka IPEDA dan pengembalian pokok, bunga, dan denda eks kredit Bank	Pengembalian Bantuan Uang Muka IPEDA dan pengembalian pokok, bunga, dan denda eks kredit Bank Dunia, LA Nomor	1.586.783.839,91	1.587.306.401,91

DAFTAR REKENING PENGELOLAAN DANA BERGULIR
YANG DIKELOLA DIREKTORAT PENGELOLAAN PENERUSAN PINJAMAN
PER 31 DSEMBER 2007 DAN 2006

No.	No. Rekening		Nama Bank	Nama Rekening (Keterangan)	Sumber Dana	Fungsi (Tujuan) Pembentukan Rekening	Saldo Per 31 Desember 2007	Saldo Per 31 Desember 2006
1	2		3	4	5	6	7	8
15	31	1008275-01-3	PT Bank Bukopin	Penampungan Pengembalian Kredit Gudang, Lantai Jemur, dan Kios KUD (GLK-KUD)	Pengembalian pokok, bunga, dan denda kredit GLK eks APBN Anggaran VXVI	Untuk menampung angsuran pokok dan bunga kredit GLK	10.360.052.059,73	9.966.182.200,26
16	32	0206-01-000033-30-0	PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus (KCK)	Rekening Tim Pembenahan Administrasi Kredit Program	Sisa saldo dana Tim Khusus Inpres 9 tahun 1989 yg bersumber dari Dana Pemerintah, Bank Indonesia, BRI, BBD, Bank Exim	Menampung dana pembiayaan Tim Pembenahan Administrasi Kredit Program (TPAKP)	1.821.383.135,00	2.148.055.483,00
17	33	0206-01.000010.30.2	PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus	Rekening Kredit Listrik Pedesaan (KLP)	Pengembalian pinjaman masyarakat eks. APBN TA 1981/1982 -BA XVI	Digulirkan untuk biaya penyambungan dan pemasangan instalasi listrik di rumah konsumen.	9.459.308.617,19	9.442.738.924,19
JUMLAH II							**1.222.508.026.486,39**	**713.142.875.829,42**
JUMLAH I + II							**1.805.843.088.265,76**	**1.658.234.536.813,46**

Catatan:
Rekening yang telah ditutup:

1		510.000.265	Bank Indonesia	Rekening Khusus Depertemen Keuangan Untuk Pembiayaan Proyek RDA	RDA	Untuk menampung pembiayaan Proyek RDA	Telah ditutup tanggal 21 Juni 2006, saldo disetor ke RPD.
2		0206-01-000017-30-4	PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus (KCK)	Penampungan Fee Bagian Pemerintah KUD Padi/Palawija	Penerimaan bunga KUT TP 1987/1988 s.d. 1988/1989 bagian pemerintah sebesar 1,5%	Untuk menampung fee KUD 3% yang menjadi penerimaan pemerintah dari bunga kredit program KUT Padi/Palawija MT 87/88 s.d. 89/90	Telah ditutup tanggal 7 Agustus 2006, saldo disetor ke Rekening BUN 502,000,000.
3		0206-01-000018-30-0	PT BRI (Persero), Tbk. Kantor Cabang Khusus	Penampungan Cadangan Dana Risiko Kredit TRI	Penerimaan Dana Cadangan Risiko KUT-TRI bagian pemerintah 0,15%, fee KUD 3% dan fee Perum PKK 1,5% dari pelaksanaan KUT-TRI dan KUT Padi/Palawija	Untuk menampung dana risiko (0,15%) dan fee bagian Pemerintah (1,5%) dari bunga kredit program KUT-TRI MT 87/88 s.d. 89/90	Telah ditutup tanggal 31 Mei 2006, saldo disetor ke Rekening BUN 502,000,000.
4		0.22709.0101	PT Bank Bukopin	Rekening Pembiayaan Kredit Peralatan KUD	Dari penerimaan angsuran GLK	Menampung pendanaan kredit peralatan KUD dan pengembalian pokok, bunga, dan denda.	Telah ditutup tanggal 11 Agustus 2006, saldo disetor ke Rekening BUN 502,000,000
5		510.000.149	Bank Indonesia	Subsidi Bunga SEDP III	APBN	Untuk menampung pembayaran dana subsidi bunga SEDP III dari APBN	

OUTSTANDING PENARIKAN PINJAMAN PENDANAAN KUMK-EKS DANA SU-005
PERIODE 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2007

(dalam rupiah)

NO	BUMN PENGELOLA / LKP	PLAFON PINJAMAN	OUTSTANDING 1 JANUARI 2007	MUTASI PINJAMAN 1 JANUARI S.D. 31 DESEMBER 2007		OUTSTANDING 31 DESEMBER 2007	OUTSTANDING 31 DESEMBER 2006
				PENARIKAN PINJAMAN	ANGSURAN POKOK		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) = (4) + (5) - (6)	(8)
1	PT Bank Mandiri (Persero) Tbk	350.000.000.000	350.000.000.000	-	70.000.000.000	280.000.000.000	350.000.000.000
2	PT PNM (Persero)	355.000.000.000	280.000.000.000	60.000.000.000	-	340.000.000.000	280.000.000.000
3	PT BRI (Persero) Tbk	500.000.000.000	500.000.000.000	-	100.000.000.000	400.000.000.000	500.000.000.000
4	Bank Bukopin	470.000.000.000	350.000.000.000	120.000.000.000	-	470.000.000.000	350.000.000.000
5	PT BTN (Persero)	200.000.000.000	200.000.000.000	-	40.000.000.000	160.000.000.000	200.000.000.000
6	Perum Pegadaian	410.000.000.000	310.000.000.000	100.000.000.000	-	410.000.000.000	310.000.000.000
7	BPD Aceh	15.000.000.000	15.000.000.000	-	-	15.000.000.000	15.000.000.000
8	BPD Bengkulu	20.000.000.000	10.000.000.000	10.000.000.000	-	20.000.000.000	10.000.000.000
9	BPD Sumatera Utara	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-	25.000.000.000	25.000.000.000
10	BPD Sumatera Selatan	40.000.000.000	40.000.000.000	-	-	40.000.000.000	40.000.000.000
11	BPD Sumatera Barat	45.000.000.000	45.000.000.000	-	-	45.000.000.000	45.000.000.000
12	BPD Riau	25.000.000.000	25.000.000.000	-	5.000.000.000	20.000.000.000	25.000.000.000
13	BPD Lampung	15.000.000.000	15.000.000.000	-	-	15.000.000.000	15.000.000.000
14	BPD Jambi	2.000.000.000	2.000.000.000	-	-	2.000.000.000	2.000.000.000
15	BPD DKI Jakarta	60.000.000.000	60.000.000.000	-	-	60.000.000.000	60.000.000.000
16	BPD Jawa Barat	50.000.000.000	50.000.000.000	-	10.000.000.000	40.000.000.000	50.000.000.000
17	BPD DI Yogyakarta	25.000.000.000	25.000.000.000	-	-	25.000.000.000	25.000.000.000
18	BPD Jawa Tengah	50.000.000.000	50.000.000.000	-	10.000.000.000	40.000.000.000	50.000.000.000
19	BPD Jawa Timur	112.000.000.000	82.000.000.000	30.000.000.000	-	112.000.000.000	82.000.000.000
20	BPD Bali	35.000.000.000	35.000.000.000	-	7.000.000.000	28.000.000.000	35.000.000.000
21	BPD Nusa Tenggara Barat	37.245.000.000	37.245.000.000	-	-	37.245.000.000	37.245.000.000
22	BPD Nusa Tenggara Timur	21.500.000.000	21.500.000.000	-	4.300.000.000	17.200.000.000	21.500.000.000
23	BPD Sulawesi Selatan	50.000.000.000	35.000.000.000	15.000.000.000	-	50.000.000.000	35.000.000.000
24	BPD Sulawesi Tengah	18.720.000.000	18.720.000.000	-	3.744.000.000	14.976.000.000	18.720.000.000
25	BPD Sulawesi Tenggara	2.120.000.000	2.120.000.000	-	-	2.120.000.000	2.120.000.000
26	BPD Kalimantan Selatan	20.000.000.000	20.000.000.000	-	4.000.000.000	16.000.000.000	20.000.000.000
27	BPD Kalimantan Tengah	20.000.000.000	20.000.000.000	-	-	20.000.000.000	20.000.000.000
28	BPD Kalimantan Barat	30.000.000.000	30.000.000.000	-	-	30.000.000.000	30.000.000.000
29	BPD Kalimantan Timur	34.000.000.000	34.000.000.000	-	-	34.000.000.000	34.000.000.000
30	BPD Maluku	27.415.000.000	27.415.000.000	-	-	27.415.000.000	27.415.000.000
31	BPD Papua	35.000.000.000	35.000.000.000	-	-	35.000.000.000	35.000.000.000
	JUMLAH	**3.100.000.000.000**	**2.750.000.000.000**	**335.000.000.000**	**254.044.000.000**	**2.830.956.000.000**	**2.750.000.000.000**

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA BUMN
PER 31 DESEMBER 2007
(DALAM JUTA RUPIAH)

NO	SEKTOR	BUMN	STATUS	TOTAL EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
1	2	3	4	6	7	8=6x7
1	ANEKA INDUSTRI	PT Garam	Audited	207.653	100,00%	207.653
		PT Industri Gelas (IGLAS)	Audited	(26.814)	100,00%	(26.814)
		PT Industri Soda Indonesian (ISI) **)	n.a	-		
2	ANGKUTAN DARAT	Perum DAMRI	Tahunan	106.982	100,00%	106.982
		Perum PPD	Tahunan	(54.089)	100,00%	(54.089)
		PT Kereta Api Indonesia (KAI)	Prognosa	3.252.935	100,00%	3.252.935
3	ASURANSI	PT Asuransi ABRI (ASABRI)	Audited	592.498	100,00%	592.498
		PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI)	Audited	545.362	100,00%	545.362
		PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)	Audited	663.765	100,00%	663.765
		PT Asuransi Jasa Raharja	Audited	1.582.656	100,00%	1.582.656
		PT Asuransi Jiwasraya	Tahunan	465.301	100,00%	465.301
		PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)	Audited	2.167.282	100,00%	2.167.282
		PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)	Audited	4.021.058	100,00%	4.021.058
		PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI)	Audited	(35.563)	100,00%	(35.563)
		PT Taspen	Audited	2.082.330	100,00%	2.082.330
4	BAJA & KONSTRUKSI BAJA	PT Barata Indonesia	Audited	60.066	100,00%	60.066
		PT Boma Bisma Indra (BBI)	Tahunan	(45.096)	100,00%	(45.096)
		PT Krakatau Steel (KS)	Prognosa	5.057.846	100,00%	5.057.846
5	DOK DAN PERKAPALAN	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari	Prognosa	(1.977.288)	99,00%	(1.957.515)
		PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS)	Prognosa	58.221	100,00%	58.221
		PT Industri Kapal Indonesia (IKI)	Prognosa	7.045	100,00%	7.045
		PT PAL Indonesia	Semester	1.144.451	100,00%	1.144.451
6	ENERGI	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Audited	16.643	100,00%	16.643
		PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN)	Audited	6.435.410	55,22%	3.553.633
		PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)	Tahunan	136.355.675	100,00%	136.355.675
		PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA)	Audited	2.799.118	65,02%	1.819.903
7	INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI	PT Batan Teknologi	Prognosa	21.546	100,00%	21.546
		PT Industri Kereta Api (INKA)	Audited	209.598	100,00%	209.598
		PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI)	Prognosa	488.736	100,00%	488.736
		PT LEN Industri	Audited	72.324	100,00%	72.324
8	INDUSTRI FARMASI	PT Biofarma	Audited	628.638	100,00%	628.638
		PT Indo Farma, Tbk	Audited	291.563	80,66%	235.174
		PT Kimia Farma, Tbk	Audited	908.028	90,03%	817.497
9	INDUSTRI PERTAHANAN	PT Dahana	Audited	145.466	100,00%	145.466
		PT PINDAD	Audited	184.444	100,00%	184.444
10	INDUSTRI SANDANG	PT Industri Sandang Nusantara (INSAN)	Audited	(147.340)	100,00%	(147.340)
		PT Primissima	Audited	13.761	100,00%	13.761
11	JASA KONSTRUKSI	Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS)	Prognosa	473.074	100,00%	473.074
		PT Adhi Karya	Audited	531.235	51,00%	270.930
		PT Brantas Abipraya	Audited	(75.220)	100,00%	(75.220)
		PT Hutama Karya (HK)	Prognosa	261.838	100,00%	261.838
		PT Istaka Karya	Prognosa	40.430	100,00%	40.430
		PT Nindya Karya	Audited	77.665	100,00%	77.665
		PT Pembangunan Perumahan (PP)	Audited	333.490	51,00%	170.080
		PT Waskita Karya	Audited	357.050	100,00%	357.050
		PT Wijaya Karya (WIKA)	Audited	1.291.212	68,40%	883.189
12	JASA LAINNYA	Perum Jasa Tirta I	Audited	60.583	100,00%	60.583
		Perum Jasa Tirta II	Audited	271.253	100,00%	271.253
		PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA)	Audited	764.358	100,00%	764.358
13	JASA PEMBIAYAAN	Perum Pegadaian	Audited	1.491.804	100,00%	1.491.804
		Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU)	Audited	945.624	100,00%	945.624
		PT Danareksa	Audited	728.451	100,00%	728.451
		PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI)	Audited	116.078	100,00%	116.078
		PT PANN Multi Finance	Audited	(1.468.143)	93,00%	(1.365.373)
		PT Permodalan Nasional Madani (PNM)	Audited	446.875	100,00%	446.875
14	JASA PENILAI	PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)	Audited	62.354	100,00%	62.354
		PT Sucofindo	Audited	408.901	95,00%	388.456
		PT Surveyor Indonesia (SI)	Audited	239.955	85,00%	203.962
		PT Survey Udara Penas **)	n.a	-		-
15	KAWASAN INDUSTRI	PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN)	Audited	357.151	88,74%	316.936
		PT Kawasan Industri Makasar (KIMA)	Prognosa	57.872	60,00%	34.723
		PT Kawasan Industri Medan (KIM)	Prognosa	54.648	60,00%	32.789
		PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW)	Prognosa	25.383	60,00%	15.230
		PT Pengembangan Daerah Industri (PDI) Pulau Batam	Audited	33.267	100,00%	33.267
16	KEBANDARUDARAAN	PT Angkasa Pura I (AP I)	Audited	6.982.106	100,00%	6.982.106
		PT Angkasa Pura II (AP II)	Audited	5.888.972	100,00%	5.888.972
17	KEHUTANAN	Perum Perhutani	Prognosa	1.064.627	100,00%	1.064.627
		PT Inhutani I	Prognosa	328.130	100,00%	328.130
		PT Inhutani II	Prognosa	183.819	100,00%	183.819
		PT Inhutani III	Prognosa	341.083	100,00%	341.083
		PT Inhutani IV	Prognosa	64.529	100,00%	64.529
		PT Inhutani V	Prognosa	13.574	100,00%	13.574
18	KERTAS	PT Kertas Kraft Aceh	Prognosa	71.785	94,64%	67.938
		PT Kertas Leces	Prognosa	(247.043)	100,00%	(247.043)
19	KONSULTAN KONSTRUKSI	PT Bina Karya	Prognosa	4.077	100,00%	4.077
		PT Indah Karya	Audited	5.262	100,00%	5.262
		PT Indra Karya	Prognosa	6.743	100,00%	6.743
		PT Virama Karya	Prognosa	11.616	100,00%	11.616
		PT Yodya Karya	Prognosa	9.875	100,00%	9.875

20	LOGISTIK	Perum Bulog	Prognosa	5.306.667	100,00%	5.306.667
		PT Bhanda Ghara Reksa (BGR)	Audited	73.568	100,00%	73.568
		PT Pos Indonesia (POSINDO)	Tahunan	446.480	100,00%	446.480
		PT Varuna Tirta Prakasya (VTP)	Tahunan	(7.763)	100,00%	(7.763)
21	PARIWISATA	PT Bali Tourism & Development Corporation	Tahunan	196.542	100,00%	196.542
		PT Hotel Indonesia Natour (HIN)	Audited	55.367	100,00%	55.367
		PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	Audited	89.791	100,00%	89.791
22	PELABUHAN	PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I)	Audited	1.097.413	100,00%	1.097.413
		PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II)	Audited	4.219.229	100,00%	4.219.229
		PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III)	Audited	2.550.627	100,00%	2.550.627
		PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV)	Audited	911.446	100,00%	911.446
23	PELAYARAN	PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)	Prognosa	1.131.066	100,00%	1.131.066
		PT Djakarta Lloyd	Tahunan	325.693	100,00%	325.693
		PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Prognosa	23.904	100,00%	23.904
		PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)	Prognosa	4.213.082	100,00%	4.213.082
24	PENGERUKAN	PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO)	Audited	146.236	100,00%	146.236
25	PENUNJANG KONSTRUKSI	PT Amarta Karya	Prognosa	(2.962)	100,00%	(2.962)
		PT Jasa Marga	Audited	5.975.316	70,00%	4.182.721
26	PERBANKAN	PT Bank Ekspor Indonesia (BEI)	Audited	4.166.084	100,00%	4.166.084
		PT Bank Mandiri, Tbk	Audited	29.243.732	67,47%	19.730.746
		PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI)	Audited	17.219.585	76,36%	13.148.875
		PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI)	Audited	19.437.635	56,83%	11.046.408
		PT Bank Tabungan Negara (BTN)	Audited	2.787.412	100,00%	2.787.412
27	PERCETAKAN & PENERBITAN	Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI)	Prognosa	98.921	100,00%	98.921
		Perum Percetakan Uang RI (PERURI)	Prognosa	553.501	100,00%	553.501
		PT Balai Pustaka (BP)	Prognosa	(51.885)	100,00%	(51.885)
		PT Pradnya Paramita	Prognosa	3.425	100,00%	3.425
28	PERDAGANGAN	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)	Tahunan	(467.556)	100,00%	(467.556)
		PT PP Berdikari	Tahunan	145.094	100,00%	145.094
		PT Sarinah	Prognosa	85.380	100,00%	85.380
29	PERIKANAN	Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS)	Prognosa	80.949	100,00%	80.949
		PT Perikanan Nusantara	Prognosa	(47.943)	100,00%	(47.943)
30	PERKEBUNAN	PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I)	Audited	11.520	100,00%	11.520
		PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II)	Audited	107.099	100,00%	107.099
		PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III)	Audited	1.902.285	100,00%	1.902.285
		PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV)	Audited	1.870.202	100,00%	1.870.202
		PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX)	Prognosa	297.381	100,00%	297.381
		PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V)	Audited	919.656	100,00%	919.656
		PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI)	Prognosa	362.651	100,00%	362.651
		PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)	Audited	997.282	100,00%	997.282
		PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII)	Prognosa	686.668	100,00%	686.668
		PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X)	Prognosa	753.629	100,00%	753.629
		PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI)	Prognosa	429.266	100,00%	429.266
		PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII)	Prognosa	441.138	100,00%	441.138
		PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII)	Audited	787.249	100,00%	787.249
		PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV)	Prognosa	(229.996)	100,00%	(229.996)
		PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)	Prognosa	469.746	100,00%	469.746
31	PERTAMBANGAN	PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM)	Audited	8.763.579	65,00%	5.696.326
		PT Pertamina	Tahunan	142.583.666	100,00%	142.583.666
		PT Sarana Karya	Prognosa	1.623	100,00%	1.623
		PT Timah, Tbk	Audited	3.359.046	65,00%	2.183.380
32	PERTANIAN	PT Pertani	Prognosa	66.772	100,00%	66.772
		PT Sang Hyang Seri (SHS)	Prognosa	156.107	100,00%	156.107
33	PUPUK	PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI)	Audited	10.601.209	100,00%	10.601.209
34	SEMEN	PT Semen Baturaja	Audited	171.892	100,00%	171.892
		PT Semen Gresik, Tbk	Audited	6.627.263	51,01%	3.380.567
35	TELEKOMUNIKASI	Perum Produksi Film Negara (PFN)	Tahunan	25.515	100,00%	25.515
		PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM)	Triwulan III	31.818.485	51,76%	16.469.248
36	USAHA PENERBANGAN	PT Garuda Indonesia (GIA)	Audited	1.829.180	100,00%	1.829.180
		PT Merpati Nusantara Airlines (MNA)	Prognosa	(1.187.502)	95,79%	(1.137.508)
37		PT. Dirgantara Indonesia *	Unaudited	76.485	92,76%	70.948
		PT. Sarana Multigriya Finansial *	Audited	1.180.873	100,00%	1.180.873
Grand Total				505.545.203		455.367.879

* Masih dibawah pembinaan Departemen Keuangan
** Tidak mengirimkan Laporan Keuangan

DAFTAR BPYBDS DI BUMN

	BUMN	Rp Juta
1	Perum DAMRI	9.775
2	Perum PPD	55.620
3	PT Kereta Api Indonesia (KAI)	170.000
4	PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN)	127.432
5	PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)	28.089.259
6	PT Industri Kereta Api (INKA)	100.000
7	Perum Jasa Tirta I	276
8	Perum Jasa Tirta II	39.820
9	PT Angkasa Pura I (AP I)	4.202.050
10	PT Angkasa Pura II (AP II)	1.672.715
11	PT Inhutani I	6.168
12	Perum Bulog	1.119.844
13	PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I)	86.750
14	PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III)	222.304
15	PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV)	252.524
16	PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)	647.385
17	Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI)	1.003
18	Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS)	47.037
19	PT. Dirgantara Indonesia *	109.282
	JUMLAH	36.959.243

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH PADA NON BUMN (MINORITAS)
PER 31 DESEMBER 2007

NO	NAMA PERUSAHAAN	SUMBER a)	STATUS b)	% SAHAM KEPEMILIKAN RI	NILAI EKUITAS	KEPEMILIKAN PEMERINTAH
1	PT Atmindo	Audited 2006	S	36,60%	16.321.000.000	5.973.486.000
2	PT Semen Kupang	Audited 2005	-	38,50%	58.064.000.000	22.354.640.000
3	PT Indonesia Asahan Alimunium (INALUM)	Lap Triwulan 2006	S	41,12%	3.285.001.981.140	1.350.792.814.645
4	PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO)	1	KS	82,40%	1.727.625.000.000	1.423.563.000.000
5	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)	2	-	50,00%	137.852.621.709	68.926.310.855
6	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)	1	S	50,00%	117.844.709.000	58.922.354.500
7	PT Kertas Padalarang	2	KS	40,77%	11.818.890.112	4.817.970.554
J U M L A H I						***2.935.350.576.553***

NO	NAMA PERUSAHAAN	SUMBER a)	STATUS b)		% SAHAM KEPEMILIKAN RI	JUMLAH SAHAM	KEPEMILIKAN PEMERINTAH
1	PT Bank Bukopin	1	S	A	0,08%	4.736.255	47.362.550.000
				B	18,11%	1.034.232.376	103.423.237.600
2	PT Rekayasa Industri (REKIND)	1	S		4,97%	2.500	2.500.000.000
3	PT Freeport Indonesia	1	S	Biasa	9,36%	21.300	20.062.470.000
4	PT Bahana PUI (BPUI)	1	S	Prioritas	7,11%	1.600	1.600.000.000
		1	-	Biasa	10,67%	2.400	2.400.000.000
5	PT Dirgantara Indonesia (PTDI) *)	-	-	-	-	-	-
6	PT Indosat, Tbk	1	-	Seri B	14,29%	776.624.999	77.662.499.900
7	PT Kertas Basuki Rahmat	1	-		0,44%	1.094	25.000.000.000
8	PT Kertas Blabak	2	-		0,84%	-	531.000.000
9	PT Asean Bintulu Fertilizer (ABF)	-	-	-	-	-	-
10	PT Asean Copper Product	-	-	-	-	-	-
11	PT JIHD Tbk.	1	-		1,33%	12.834.760.680	12.834.760.680
12	PT Intirub	Audited 2005	-		9,90%	4.129.000.000	4.129.000.000
13	PT Socfindo	1	S	Seri B		1	265.000
				Seri C		2.999	794.735.000
				Seri D		2.000	3.430.000.000
				Total	10,00%	42.250.000.000	
14	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI)	Audited 2005	-		5,00%	49.578.225.000	2.478.911.250
J U M L A H II							***304.209.429.430***
J U M L A H I + II							**3.239.560.005.983**

Keterangan :

(a) 1) Telah diaudit (*audited*); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (*unaudited*); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa: 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ; 7) Audited Th 2007

(b) SS = Sangat Sehat; S = Sehat; KS = Kurang Sehat; TS = Tidak Sehat

*). Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Nomor:S-411/MK.06/2006 tanggal 25 September 2006 dan Surat Menteri Negara BUMN Nomor :S-559/MBU/2006 tanggal 29 Nopember 2006 dinyatakan bahwa Pengelolaan PT Dirgantara Indonesia (Persero) kembali berada dibawah Menteri Negara BUMN sebagai pemegang 92.9% Saham PT Dirgantara Indonesia (Persero)

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH
PADA ORGANISASI/LEMBAGA KEUANGAN INTERNASIONAL/REGIONAL
PER 31 DESEMBER 2007 DAN 2006

NO	LEMBAGA KEUANGAN MULTILATERAL	TOTAL PENYERTAAN		TELAH DIBAYAR S.D 31 DESEMBER 2007		TELAH DIBAYAR S.D 31 DESEMBER 2006	
		USD	IDR	USD	IDR*)	USD	IDR
1.	ADB	2.863.000.000	26.966.597.000.000	213.000.000	2.006.247.000.000	209.000.000	1.885.180.000.000
2.	IMF	3.128.000.000	29.462.632.000.000	3.282.133.464	30.914.415.097.416	3.128.000.000	28.214.560.000.000
	World Bank :						
3.	IBRD	1.807.232.935	17.022.327.014.765	110.275.771	1.038.687.487.049	180.000.000	1.623.600.000.000
4.	IDA	15.000.000	141.285.000.000	-		-	24.570.195.827
5.	IFC	29.000.000	273.151.000.000	29.000.000	273.151.000.000	29.000.000	261.580.000.000
6.	MIGA	20.000.000	188.380.000.000	4.000.000	37.676.000.000	4.000.000	36.080.000.000
7.	IDB	642.000.000	6.046.998.000.000	149.000.000	1.403.431.000.000	116.000.000	1.046.320.000.000
	IDB Group :						
8.	Export Financing Scheme	2.000.000	18.838.000.000	1.000.000	9.419.000.000	1.000.000	9.020.000.000
9.	Islamic Corporation for Insurance of						
	Investment and Export Credit	400.000	3.767.600.000	200.000	1.883.800.000	200.000	1.804.000.000
10.	Bank for International Settlements	60.000.000	565.140.000.000	60.000.000	565.140.000.000	60.000.000	541.200.000.000
11.	IFAD	46.959.000	442.306.821.000	41.959.000	395.211.821.000	41.959.000	378.470.180.000
12.	Common Fund for Commodities	1.323.000	12.461.337.000	1.323.000	12.461.337.000	1.292.506	11.658.404.120
	TOTAL	**8.614.914.935**	**81.143.883.772.765**	**3.891.891.235**	**36.657.723.542.465**	**3.770.451.506**	**34.034.042.779.947**

Keterangan:

*) : Konversi ke dalam IDR menggunakan kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2007
USD 1 = Rp 9.419

ASET TETAP - TANAH

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2007	2006
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	855.562.990	855.562.990
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	65.274.646.000	65.274.646.000
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	597.323.106.106	146.110.411.622
4	005	MAHKAMAH AGUNG	208.023.810.322	59.206.649.510
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	135.696.809.583	127.607.217.392
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	245.493.710.559	253.459.351.460
7	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	85.882.943.512	65.313.937.117
8	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	266.352.637.054	44.884.756.000
9	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	62.455.787.612.493	28.937.235.521.024
10	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	623.961.405.906	118.795.748.723
11	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	2.163.847.241.366	1.192.038.786.976
12	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	983.802.572.062	927.482.602.939
13	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	150.356.861.095	80.741.024.866
14	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	231.248.148.044	229.362.662.271
15	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	1.116.371.890.029	718.286.414.172
16	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	8.124.789.827.518	5.398.070.887.690
17	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	1.323.050.014.782	1.205.198.675.165
18	025	DEPARTEMEN AGAMA	1.835.740.307.523	1.012.402.069.213
19	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	98.223.430.523	96.389.983.023
20	027	DEPARTEMEN SOSIAL	66.188.707.807	65.250.944.238
21	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	84.536.168.656	70.417.607.455
22	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	218.370.699.821	186.024.510.769
23	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	8.584.102.070.083	5.912.945.327.055
24	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	499.335.699.689	499.335.699.689
25	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	273.366.032.500	-
26	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	10.613.601.978	10.613.601.978
27	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	12.515.775.000	12.202.150.000
28	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	27.182.098.240	27.185.789.853
29	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	294.120.000	120.600.000
30	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	788.846.732.635	5.348.759.075
31	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	46.181.451.921	26.613.296.671
32	054	BADAN PUSAT STATISTIK	41.337.848.662	24.381.734.000
33	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	19.143.260.737	15.072.368.243
34	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	157.954.327.000	147.452.635.000
35	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	27.814.000.000	27.814.000.000
36	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	467.608.046.592	449.048.602.940
37	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	32.199.237.635.374	32.195.885.830.499
38	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	8.345.141.016	4.187.691.016
39	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	5.196.726.379	5.196.725.979
40	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	20.217.517.915	19.550.918.916
41	069	BELANJA LAIN-LAIN	34.573.743.794	-
42	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	39.654.693.339	21.408.583.595
43	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	8.767.690.000	8.731.800.000
44	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	77.293.038.316	49.497.690.816
45	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	1	-
46	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	45.944.877.645	32.040.456.851
47	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	13.426.875.232	13.396.875.232
48	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	11.730.982.761	11.014.434.840
49	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	25.210.531.290	25.203.714.090
50	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	14.238.000	14.238.000
51	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	20.540.396.870	19.316.681.000
52	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	489.892.345.919	236.082.133.445
53	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1.009.013.000	1.009.013.000
54	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	107.092.944.152	79.048.944.152
55	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	85.820.069.534	84.678.922.865
56	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	252.772.959.030	251.543.575.590
57	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	11.275.825.100	11.275.825.101
58	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	661.558.584.250	163.574.708.198
59	100	KOMISI YUDISIAL RI	47.188.389.400	-
61		OTORITA SABANG	107.312.581.978	8.733.404.550
62		LPP TVRI	23.109.586.967	21.871.918.029
63		LPP RRI	21.464.384.000	21.464.384.000
JUMLAH			**126.356.123.950.050**	**81.443.273.004.883**

ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2007	2006
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	74.378.644.185	84.683.825.681
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	292.152.898.378	244.657.533.165
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	262.346.317.705	183.159.486.978
4	005	MAHKAMAH AGUNG	450.575.302.094	238.498.256.933
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	501.695.202.902	423.846.503.298
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	922.853.689.984	821.663.239.384
7	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	540.991.583.559	334.429.178.258
8	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	752.100.396.834	739.188.582.946
9	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	32.649.586.943.427	32.352.987.337.462
10	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	1.005.254.509.363	1.232.166.301.488
11	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	5.115.729.712.372	3.595.602.871.078
12	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	2.388.265.894.545	2.147.977.890.239
13	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	1.108.744.928.220	917.201.828.739
14	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	1.803.303.642.758	1.533.419.533.801
15	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	6.019.573.969.892	4.531.253.507.764
16	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	6.685.940.286.781	6.099.332.125.289
17	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	6.577.495.534.672	2.707.000.793.990
18	025	DEPARTEMEN AGAMA	1.350.417.680.153	915.062.881.825
19	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	774.315.904.030	580.664.722.171
20	027	DEPARTEMEN SOSIAL	447.159.254.806	289.528.871.244
21	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	1.741.509.548.052	1.634.022.994.600
22	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	1.332.484.108.759	1.023.539.368.289
23	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	3.306.736.813.685	2.604.676.343.013
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	91.000.544.212	27.444.367.993
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	24.412.187.455	21.584.224.939
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	21.462.354.142	15.235.417.472
27	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	107.803.419.637	96.108.122.000
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	61.881.171.581	36.992.516.905
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	360.092.894.502	277.043.978.559
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	200.752.304.435	122.140.277.805
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	123.444.106.739	113.048.050.303
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	23.722.056.977	20.202.541.250
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	37.468.585.110	29.636.752.428
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.123.011.229.503	798.753.654.071
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	2.359.989.266.880	1.412.208.853.795
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	13.189.135.331	12.995.642.280
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	310.434.051.670	281.786.436.000
38	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	79.431.247.589	63.183.563.598
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	844.774.092.464	467.320.941.600
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	69.951.139.202	56.457.296.362
41	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	871.614.974.477	699.836.227.195
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	35.833.523.963.308	34.202.445.070.994
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	314.037.384.794	226.700.303.400
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	58.025.863.013	53.068.796.048
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	73.504.994.744	70.741.306.239
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	331.681.011.266	246.427.076.388
47	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	29.435.643.025	25.000.665.560
48	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	191.064.216.327	144.174.197.948
49	069	BELANJA LAIN-LAIN	233.748.918.214	-
50	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	6.043.770.854	4.947.432.648
51	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	511.242.001.241	394.669.496.302
52	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	131.480.454.297	105.290.991.416

ASET TETAP - PERALATAN DAN MESIN

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2007	2006
53	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	47.873.291.753	25.023.573.262
54	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	23.392.185.056	5.784.612.757
55	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	673.347.901.924	589.870.350.083
56	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	284.427.659.304	257.679.764.629
57	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	837.658.619.657	712.699.646.001
58	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	201.909.986.488	158.961.437.943
59	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	292.590.559.555	293.184.976.538
60	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	11.012.337.049	10.802.928.713
61	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	42.797.928.038	34.034.421.725
62	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	70.786.884.196	65.034.069.409
63	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	110.353.324.970	89.850.939.041
64	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	172.079.773.028	152.356.027.801
65	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	213.630.739.286	184.810.017.414
66	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	439.884.172.542	420.496.065.152
67	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	20.804.576.108	17.666.373.840
68	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	61.951.888.628	35.049.534.188
69	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	109.020.952.960	55.639.303.174
70	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	1.263.987.673.283	733.888.261.632
71	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	39.718.026.506	5.884.729.500
72	100	KOMISI YUDISIAL RI	8.975.124.210	7.910.376.400
73	103	BAKORNAS	12.593.385.039	-
74	105	BPLS	4.112.772.650	-
75		OTORITA SABANG	4.936.970.800	922.575.800
76		LPP TVRI	1.395.690.398.519	1.419.864.760.188
77		LPP RRI	1.478.803.581.000	1.408.058.122.000
JUMLAH			**128.364.176.462.694**	**111.945.481.046.323**

ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2007	2006
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	230.168.601.031	231.789.534.471
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	500.139.934.030	485.904.519.212
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	342.962.435.735	196.848.771.793
4	005	MAHKAMAH AGUNG	631.142.847.650	118.344.705.023
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	328.096.366.984	273.142.928.423
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	1.019.627.383.454	778.103.674.800
7	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	662.407.357.501	358.434.514.189
8	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	207.838.112.534	261.489.391.188
9	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	13.722.477.160.156	6.366.133.185.897
10	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	714.542.364.153	763.043.480.537
11	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	3.848.353.886.512	2.215.579.784.049
12	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	958.899.553.649	781.800.234.548
13	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	402.740.909.411	308.298.307.729
14	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	543.671.684.810	307.396.155.315
15	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	4.179.513.534.868	3.650.189.154.965
16	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	9.754.877.988.497	9.754.071.759.852
17	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	2.424.774.877.432	970.602.710.600
18	025	DEPARTEMEN AGAMA	3.309.428.116.527	3.178.811.393.772
19	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	1.023.834.207.845	875.703.294.808
20	027	DEPARTEMEN SOSIAL	308.784.931.192	242.098.151.246
21	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	341.574.152.950	270.990.661.471
22	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	842.808.265.977	627.649.122.742
23	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	806.259.884.035	596.653.582.656
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	804.035.400	518.268.400
25	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	148.974.650	-
26	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	195.734.326.898	193.920.196.898
27	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	143.936.870.000	-
28	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	124.510.778.625	118.528.751.715
29	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	31.105.869.519	18.037.030.039
30	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	359.024.312.805	348.054.734.905
31	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	240.425.660	90.900.000
32	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	13.272.744.000	10.143.448.000
33	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	193.494.976.104	180.648.174.094
34	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	90.069.697.653	65.193.977.136
35	054	BADAN PUSAT STATISTIK	143.895.636.921	74.999.807.000
36	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	41.274.998.179	25.683.022.400
37	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	97.051.019.799	86.461.475.600
38	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	82.443.628.358	93.067.315.610
39	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	287.022.172.888	237.648.889.492
40	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	20.505.985.440.302	14.733.031.755.211
41	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	68.312.386.318	57.533.502.573
42	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	14.448.613.394	11.771.283.303
43	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	93.125.682.894	94.628.272.885
44	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	157.882.635.926	141.734.882.837
45	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	89.174.535.478	76.937.292.408
46	069	BELANJA LAIN-LAIN	249.631.577.053	-
47	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	6.470.495.720	6.470.495.720
48	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	332.854.370.422	105.976.858.108
49	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	75.071.228.906	59.811.711.343
50	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	223.289.719.895	-
51	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	58.459.341.189	-

ASET TETAP - GEDUNG DAN BANGUNAN

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2007	2006
52	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	352.533.799.161	193.677.309.862
53	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	309.596.309.717	301.408.514.758
54	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	213.796.631.014	120.224.716.344
55	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	51.361.807.028	48.999.680.390
56	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	26.677.498.465	22.511.510.710
57	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	27.834.975.281	24.625.770.000
58	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	246.389.742.198	123.923.502.399
59	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	75.764.287.514	79.391.336.675
60	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	171.772.482.995	136.165.871.315
61	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	310.568.394.531	281.321.162.233
62	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	314.236.222.973	189.232.665.191
63	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	219.092.060.562	141.395.131.750
64	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	23.544.366.308	14.308.676.258
65	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	962.184.487.864	416.397.950.498
67		OTORITA SABANG	17.922.414.789	39.443.352.465
68		LPP TVRI	134.643.189.731	157.251.595.082
69		LPP RRI	589.150.836.000	581.617.932.000
JUMLAH			**74.830.730.558.020**	**53.225.867.742.893**

ASET TETAP - JALAN, IRIGASI DAN JARINGAN
PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2007	2006
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	9.790.961.500	9.790.961.500
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	19.807.993.220	16.959.448.900
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.833.575.418	1.540.616.568
4	005	MAHKAMAH AGUNG	16.261.187.444	12.102.718.172
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	3.796.678.894	2.052.348.494
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	37.612.253.137	20.313.869.373
7	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	48.457.147.787	30.205.119.412
8	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	948.204.154	-
9	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	7.493.639.449	1.886.116.000
10	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	100.318.650.329	71.325.330.483
11	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	227.355.000.291	80.587.850.133
12	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	11.054.636.734	5.506.605.625
13	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	6.467.895.696.474	18.582.483.673.492
14	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	15.230.441.739.415	7.994.036.610.589
15	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	228.013.262.287	178.061.368.175
16	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	205.430.762.064	206.240.238.924
17	025	DEPARTEMEN AGAMA	56.238.858.145	37.170.683.556
18	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	381.647.815.878	199.085.364.949
19	027	DEPARTEMEN SOSIAL	20.374.338.718	71.633.459.701
20	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	35.234.832.000	32.803.596.000
21	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	601.562.311.366	491.082.591.947
22	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	67.037.336.675.808	52.793.701.705.988
23	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	9.187.816.000	11.316.000
25	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	1.280.851.000	1.182.715.000
26	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	23.692.099.426	14.562.240.186
27	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	2.123.761.300	1.089.445.000
28	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	6.121.014.000	6.121.014.000
29	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	214.430.000	119.465.000
30	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	1.283.366.550	1.283.366.550
31	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	97.650.362.029	44.562.577.468
32	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	24.552.789.144	24.552.789.144
33	054	BADAN PUSAT STATISTIK	779.005.850	50.000.000
34	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	734.031.000	179.114.000
35	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	1.079.182.500	1.007.613.000
36	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	26.078.018.456	19.399.173.042
37	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	235.694.286.476	147.752.458.418
38	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	2.324.605.388	918.039.463
39	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.369.996.087	1.118.864.580
40	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	5.017.531.473	4.257.031.557
41	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	8.126.341.350	377.408.309
42	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	1.114.733.790	423.400.690
43	069	BELANJA LAIN-LAIN	80.147.940.321	-
44	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	179.755.896.115	123.929.670.987
45	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	146.082.550	-
46	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	150.904.069.547	158.674.478.945
47	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	32.451.352.612	32.401.892.612
48	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	30.920.601.355	30.408.837.811
49	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	10.999.556.936	8.728.140.436
50	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	2.983.091.000	2.799.665.000
51	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	-	66.319.200
52	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	648.531.172	-
53	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	10.713.505.071	4.978.895.674
54	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	5.096.975.830	4.841.792.840
55	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	3.406.816.755	2.849.346.805
56	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	9.749.127.010	8.415.812.310
57	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	1.356.189.000	834.338.000
58	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	108.438.141.975	16.820.535.944
59	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	6.952.362.836	6.952.362.836
60	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	14.256.869.959	849.524.500
61	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	1.943.615.382.745	491.645.399.585
62	105	BPLS	94.837.104.930	-
63		OTORITA SABANG	35.741.991.872	35.392.777.450
64		LPP TVRI	24.953.171.921	-
65		LPP RRI	136.689.722.000	135.532.940.000
JUMLAH			**94.082.094.925.843**	**82.173.661.040.323**

ASET TETAP LAINNYA

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2007	2006
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	3.660.717.796	840.807.320
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.898.318.300	2.632.373.300
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	25.460.537.454	13.772.957.435
4	005	MAHKAMAH AGUNG	33.732.492.586	9.259.536.405
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	11.138.204.342	9.448.360.565
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	7.130.764.790	3.699.372.264
7	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	5.056.902.943	2.292.488.385
8	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	10.944.138.621	23.677.769.722
9	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	30.616.124.025	32.196.594.025
10	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	9.431.017.587	12.501.419.134
11	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	405.382.420.518	388.017.557.872
12	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	274.788.610.897	196.597.961.987
13	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	14.950.284.369	13.371.657.105
14	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	182.418.724.059	221.546.018.033
15	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	533.577.399.454	66.218.134.903
16	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	1.641.386.799.228	1.807.892.314.964
17	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	152.517.793.815	51.218.635.271
18	025	DEPARTEMEN AGAMA	359.110.103.106	64.002.010.878
19	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	39.743.826.718	25.511.782.722
20	027	DEPARTEMEN SOSIAL	15.818.238.701	4.451.660.645
21	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	39.305.361.255	4.570.902.280
22	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	20.629.021.531	13.734.036.808
23	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	1.733.419.354.644	845.450.540.864
24	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	11.056.120.136	736.280.000
25	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	384.220.476	4.455.000
26	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	3.375.330.335	3.153.946.150
27	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	6.249.383.000	6.249.383.000
28	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	1.612.457.779	894.212.231
29	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	7.101.178.591	1.452.397.290
30	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	9.714.684.850	5.217.472.000
31	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	90.643.934	90.643.934
32	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	2.742.169.484	112.310.000
33	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	3.254.968.500	3.350.000
34	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.583.915.545	423.696.964
35	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	2.403.737.350	1.329.253.350
36	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	1.595.170.704	1.376.988.904
37	054	BADAN PUSAT STATISTIK	688.066.200	88.273.000
38	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	1.017.064.843	908.449.685
39	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	40.762.796.332	24.679.108.700
40	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	113.982.555.859	47.146.090.214
41	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	12.992.551.185	4.774.868.644
42	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	40.288.214.935	13.390.538.000
43	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	22.137.524.222	2.542.315.536
44	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	1.049.966.158	170.605.158
45	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	864.161.814	188.669.970
46	066	BADAN NARKOTIKA NASIONAL	2.428.120.207	6.619.868.560
47	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	5.806.170.078	3.795.065.000
48	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.293.601.087	1.996.113.808
49	069	BELANJA LAIN-LAIN	4.861.198.930	-
50	070	DANA PERIMBANGAN	-	44.237.199.966
51	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	2.271.744.525	1.588.415.225

ASET TETAP LAINNYA

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2007	2006
52	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	10.041.161.224	8.243.772.964
53	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	651.402.401	1.257.172.375
54	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	2.292.000.900	1.282.801.200
55	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	55.665.625	595.729.360
56	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	34.029.018.126	32.104.355.407
57	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	9.544.711.363	3.454.718.463
58	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	32.320.174.207	29.169.597.718
59	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	6.272.242.383	3.730.031.858
60	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	580.474.000	569.574.000
61	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	772.380.592	650.377.992
62	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	1.651.211.478	1.077.924.190
63	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	2.294.170.490	1.514.286.786
64	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	71.783.100	61.134.000
65	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	370.364.303	245.014.153
66	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	1.100.780.196	882.149.821
67	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	8.934.511.651	3.593.889.510
68	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	10.123.753.068	-
69	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	9.215.833.955	1.530.928.995
70	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	38.644.378.682	153.956.459
71	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	17.892.662.959	15.976.301.914
72	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	860.942.860	-
73	100	KOMISI YUDISIAL RI	200.912.208	109.527.400
74	105	BPLS	527.441.750	-
75		LPP TVRI	1.601.105.728	-
76		LPP RRI	9.705.483.000	9.595.404.000
JUMLAH			**6.056.479.440.047**	**4.101.873.511.741**

ASET TETAP - KONSTRUKSI DALAM PENGERJAAN

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2007	2006
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	3.744.530.000	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	-	3.112.012.000
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	33.164.564.370	14.986.136.765
4	005	MAHKAMAH AGUNG	21.656.948.737	-
5	006	KEJAKSAAN AGUNG	234.400.032.733	234.400.032.733
6	007	SEKRETARIAT NEGARA	-	2.090.500.000
7	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	142.411.678.362	106.846.963.282
8	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	110.299.527.000	-
9	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	65.214.021.664	5.184.588.880
10	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	1.293.271.578.300	848.522.774.583
11	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	51.532.071.942	7.669.200.900
12	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	5.186.554.286	7.406.456.360
13	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	554.154.180.893	2.767.654.465.894
14	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	4.633.802.659.238	2.863.649.090.202
15	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	76.430.929.185	-
16	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	273.168.937.751	21.601.370.016
17	025	DEPARTEMEN AGAMA	153.159.919.265	41.651.297.868
18	032	DEPARTEMEN KELAUTAN DAN PERIKANAN	64.392.134.953	-
19	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	2.474.959.081.369	1.092.939.159.593
20	036	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG KESEJAHTERAAN RAKYAT	4.913.485.370	492.017.130
21	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	200.618.370.400	27.964.105.400
22	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	-	2.349.363.000
23	054	BADAN PUSAT STATISTIK	-	908.933.340
24	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	68.307.861.760	24.135.340.000
25	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	373.198.950	-
26	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	117.639.225.000	142.083.790.000
27	063	BADAN PENGAWAS OBAT DAN MAKANAN	6.548.811.173	-
28	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	55.754.811.255	8.741.939.000
29	068	BADAN KOORDINASI KELUARGA BERENCANA NASIONAL	3.172.240.900	-
30	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	6.489.758	-
31	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	8.014.710.000	202.917.003.795
32	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	-	14.971.291.384
33	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	13.992.109.600	135.908.000
34	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	1.723.404.900	-
35	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	836.910.000	17.223.453.000
36	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	3.295.960.804	1.407.453.970
37	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	5.202.787.152	-
38	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	21.574.954.447	9.458.027.155
39	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	371.117.606.719	191.489.658.619
40	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	35.105.166.160	30.829.321.305
41	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	7.014.603.500	5.186.827.000
42	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	-	66.991.239.693
43	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	2.592.836.178.072	2.269.797.749.321
44	105	BPLS	745.765.500	-
45		OTORITA SABANG	86.621.614.607	-
JUMLAH			**13.796.365.616.075**	**11.034.797.470.188**

TAGIHAN TUNTUTAN PERBENDAHARAAN/TUNTUTAN GANTI RUGI

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2007	2006
1	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	32.375.000	-
2	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	1.909.918.251	1.834.887.921
3	006	KEJAKSAAN AGUNG	129.688.627	130.138.627
4	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	8.750.000	-
5	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	-	27.441.077.789
6	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	4.244.005.108	4.220.050.740
7	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	196.503.227	213.092.747
8	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	6.480.383.549	5.444.402.659
9	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	430.776.430	410.285.935
10	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	23.149.821	29.779.821
11	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	48.023.034	3.440.000
12	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	590.075.854	160.787.416
13	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	24.328.530	217.057.320
14	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	33.750.000	931.162.681
15	027	DEPARTEMEN SOSIAL	152.273.503	88.238.012
16	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	805.606.554	987.102.217
17	035	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEREKONOMIAN	3.901.000	33.547.200
18	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	175.793.055	175.793.055
19	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	13.550.000	13.550.000
20	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	1.754.072	-
21	054	BADAN PUSAT STATISTIK	-	50.893.825
22	055	KEMENTERIAN NEGARA PPN/BAPPENAS	-	340.000
23	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	956.746.487	384.765.026
24	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	39.103.007	39.103.623
25	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	215.276.488	12.870.645
26	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	6.833.974.526	8.088.914.827
27	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	-	58.500.000
28	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	247.783.432	60.370.000
29	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	17.690.000	18.770.000
30	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	6.382.113.832	-
31	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	51.666.667	-
JUMLAH			**30.048.960.054**	**51.048.922.086**

ASET TAK BERWUJUD

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2007	2006
1	001	MAJELIS PERMUSYAWARATAN RAKYAT	343.109.450	-
2	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	3.206.509.039	-
3	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	5.246.436.280	312.150.000
4	005	MAHKAMAH AGUNG	31.292.000	-
5	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	5.527.030.075	-
6	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	767.947.667	21.849.594
7	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	1.360.150.000	-
8	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	4.402.842.800	-
9	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	37.418.315.534	11.690.734.880
10	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	64.075.000	-
11	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	3.431.722.677	-
12	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	509.679.900.285	147.763.000
13	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	277.936.558.972	226.821.512.459
14	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	3.850.000	-
15	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	47.547.182.276	-
16	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	6.476.590.106	5.628.296.253
17	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	22.586.048.680	-
18	034	KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG POLITIK DAN KEAMANAN	18.382.233.000	-
19	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	8.193.492.960	-
20	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	2.807.943.900	-
21	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	134.850.000	-
22	047	KEMENTERIAN NEGARA PEMBERDAYAAN PEREMPUAN	263.870.000	-
23	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	1.793.718.720	2.623.882.500
24	050	BADAN INTELIJEN NEGARA	333.326.376.078	247.638.477.353
25	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	2.061.741.995	529.100.000
26	052	DEWAN KETAHANAN NASIONAL	3.677.614.411	3.485.481.799
27	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	22.855.899.334	19.956.192.669
28	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	11.444.072.975	1.631.707.975
29	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	20.916.638.500	-
30	067	KEMENTERIAN NEGARA PEMBANGUNAN DAERAH TERTINGGAL	1.024.000.000	-
31	069	BELANJA LAIN-LAIN	348.560.445.956	-
32	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	199.167.900	118.205.400
33	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	3.625.357.250	2.759.056.250
34	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	3.601.892.267	2.754.279.367
35	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	21.500.000	-
36	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	1.429.258.000	-
37	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	166.767.571.808	38.039.060.197
38	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	294.999.000	-
39	085	BADAN PENGAWAS TENAGA NUKLIR	48.100.000	-
40	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	1.207.862.000	617.040.000
41	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	3.350.546.950	2.584.086.450
42	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	5.935.760.200	-
43	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	7.599.116.135	2.137.956.557
44	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	1.567.732.800	222.325.000
45	092	KEMENTERIAN NEGARA PEMUDA DAN OLAH RAGA	701.642.400	-
46	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	873.290.000	-
47	100	KOMISI YUDISIAL RI	423.656.600	-
JUMLAH			**1.899.119.911.980**	**569.719.157.703**

REKENING KHUSUS
PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	2007	2006
1	601 001311	Reksus Depkeu u/ Const. of Junior Secondary School Facilities under The Basic Education Program, Loan AIRPD-L001	58.590.683.836	93.239.704.511
2	601 002111	Reksus Depkeu k/ Penerimaan Pinjaman dari Exim Bank of Japan (Second Exim United Loan)	777.236.055	709.194.111
3	601 002311	Reksus Depkeu u/ Loan Eastern Indonesia National Road Improvement Project (EINRIP) AIPRD-L002	0	0
4	601 002991	Reksus Depkeu karena Penerimaan Pinjaman dari Belanda dalam Val. EUR	136.701.878	117.809.653
5	601 003991	Reksus Depkeu u/ Proyek Integrated Infrastructur Dev. 1990. 01Dutch dalam Valuta EUR	5.077.898	4.376.132
6	601 004991	Reksus Depkeu u/ Trade Support Program (TSP) No.70539501 dalam valuta EURO	287.999.961	5.162.361.172
7	601 007111	Reksus Depkeu k/ Pinjaman dari Exim Bank of Japan (Third Exim United Loan)	17.714.683	16.163.878
8	601 007411	Reksus Depkeu u/ Proyek Inc.Gen.F/Marginal Farmer & Landless 215-ID IFAD	1.188.602.165	1.138.251.569
9	601 019411	Reksus Depkeu u/ Proyek Nusa Tenggara Agriculture Development 952/953-INO ADB	155.319	148.740
10	601 023411	Reksus Depkeu u/ Proyek East Java Rainfed Agriculture 255-ID IFAD	1.086.405.356	1.040.383.939
11	601 027111	Reksus Depkeu u/ Proyek Upland Plantation and Development Citarik S/Watersheip IP-455 OECF	9.494.694.008	877.750.201
12	601 030111	Reksus Depkeu u/ Proyek Profesional Human Resources Development IP-458A OECF	0	0
13	601 030411	Reksus Depkeu u/ Proyek Second Tree Corp Smallholder Sec for 1118-INO ADB	869.562	832.726
14	601 031111	Reksus Depkeu u/ Proyek Profesional Human Resources Development IP-458B OECF	0	0
15	601 032111	Reksus Depkeu u/ Proyek Profesional Human Resources Development IP-458-C OECF	0	0
16	601 032411	Reksus Depkeu u/ Proy. Central Java Ground Water 1126-INO ADB	141.662	135.661
17	601 033411	Reksus Depkeu u/ Proyek Third Non Formal Education 3431-IND IBRD	377	361
18	601 041111	Reksus Depkeu u/ Proyek Gajah Mada University Dev. IP-494 OECF	215.011.330	196.646.897
19	601 042411	Reksus Depkeu u/ Proyek Tree Corp Smallholder Development 3464-IND IBRD	968.744	927.707
20	601 043411	Reksus Depkeu u/ Proyek South Sumatera Smallholder Tree Crops 301-ID IFAD	0	0
21	601 045111	Reksus Depkeu u/ Proy. Pengemb. Pras. Pedesaan (P2D) Rural Areas Infrast.Development Project (III) IP-506 JBIC dlm JPY	1.844.018.716	1.682.586.912
22	601 046111	Reksus Depkeu u/ Develop. Policy Loan (Loan Agreement No.INP-27)	0	0
23	601 047111	Reksus Depkeu u/ Develop. Policy Loan (Loan Agreement No.INP-28)	0	0
24	601 047411	Reksus Depkeu u/ Proyek Smallholder Tree Crop Processing 1186-INO ADB	91.647	87.765
25	601 048111	Reksus Depkeu u/ Profesional Human Resources Development Project-III (Overseas Program), Project Loan JBIC-535-A	43.572.319.658	4.790.812.140
26	601 048411	Reksus Depkeu u/ Proyek Upland Farmer Development 1184-INO SF ADB	124.519	200.875
27	601 049111	Reksus Depkeu u/ Professional Human Resources Development Project-III (Domestic Program), Project Loan JBIC-535-B	33.969.967.230	8.960.392.045
28	601 050111	Reksus Depkeu untuk Proyek Pengembangan FKIK UIN Syarif Hidayatullah IP-530 JBIC	1.039.338.058	0
29	601 053111	Reksus Depkeu untuk Proyek Pengembangan Fakultas Teknik Universitas Hasanudin Loan JBIC IP-541	0	0
30	601 054111	Reksus Depkeu untuk Pinjaman Program The Indonesia Disaster Recovery and Management Sector Program Loan JBIC No. INP-31	0	0
31	601 056411	Reksus Depkeu u/ Proyek W. Supl & Sanitn. f/ Low Income Communities 3629-IND IBRD	2.532.769	2.425.478
32	601 057411	Reksus Depkeu u/ Proyek Sustainable Agriculture Dev. In Irja 1258-INO ADB	208.254	199.432
33	601 061411	Reksus Depkeu u/ Proyek Natl. Watershed Management & Conservation 3658-IND IBRD	55.232.357	52.892.649
34	601 063411	Reksus Depkeu u/ Proyek Eastern Island Urban Develop (Sect) 1292-INO ADB	0	0
35	601 066411	Reksus Depkeu u/ Proyek Eastern Island Smallholder Cashew Dev 350-ID IFAD	76.800.454	73.547.095
36	601 073411	Reksus Depkeu u/ Proyek Rural Health and Population Project 1299-INO ADB	283	271
37	601 077411	Reksus Depkeu u/ Proyek Second Accountancy Development Projec 3801-IND IBRD	0	0
38	601 078411	Reksus Depkeu u/ Proyek Ozone Project Trust Fund TF 021982-IND IBRD	3.855.782.750	9.254.672.979
39	601 080411	Reksus Depkeu u/ Proyek Second Prof. Human Resources Development 3825-IND IBRD	347.386.566	332.670.859
40	601 081411	Reksus Depkeu u/ Proyek Cap'ty B'ding Pry. in the Water R'çes Sec.1339-INO ADB	110.108	105.444
41	601 087411	Reksus Depkeu u/ Proyek Second Agric.Research Manag. Project 3886-IND IBRD	26.585.410	25.459.221
42	601 088411	Reksus Depkeu u/ Proyek Rural Water Supply and Sanit.Sect. Project 1352-INO ADB	0	0
43	601 089411	Reksus Depkeu u/ Proyek Second Tech.Ass.Proj.F/Publ.&Priv.p/o INF-3913-IND IBRD	0	0
44	601 093411	Reksus Depkeu u/ Proyek Sulawesi Rainfed Agric.Develop.Project 1351-INO SF ADB	139.307	133.406
45	601 095411	Reksus Depkeu u/ Proyek Private Junior Second Education Project 1359-INO ADB	17.802	17.048
46	601 096411	Reksus Depkeu u/ Proyek Senior Secondary Education Project 1360-INO ADB	18.273	17.499
47	601 099411	Reksus Depkeu u/ Proyek Eastern Island Smallholder Farm Sys & LI396-ID IFAD	8.968.022.613	8.588.126.549
48	601 103411	Reksus Depkeu u/ Proyek Engineering Education Development Project 1432-INO ADB	1.240.011	1.187.483
49	601 105411	Reksus Depkeu u/ Proyek Nusa Tenggara Agriculture Area Development 3984-IND IBRD	206.894.363	197.538.992
50	601 107411	Reksus Depkeu u/ Proyek Basic Education Project 1442-INO ADB	8.195	7.847
51	601 108411	Reksus Depkeu u/ Proyek Sulawesi Agricultural Area Development 4007-IND IBRD	37.108.317	35.536.365
52	601 118411	Reksus Depkeu u/ Proyek Sumatera Urban Development Sector 1383-INO ADB	1.525.972	1.461.330
53	601 119411	Reksus Depkeu u/ Proyek East Java and EastNusaTeng Jun Sec.Ed Proj 4042-IND IBRD	0	0
54	601 120411	Reksus Depkeu u/ Proyek Central Ind.Junior Second Education Project 4062-IND IBRD	0	0
55	601 121411	Reksus Depkeu u/ Proyek Sumatera Junior Second Education Project 4095-IND IBRD	0	0
56	601 122411	Reksus Depkeu u/ Proyek Indonesia-Gas Transmission & Dist Loan European Invest.Bank (EIB)	232.930.080	223.062.886
57	601 123411	Reksus Depkeu u/ Proyek ADB Gas Transmission & Dist Loan the Exp-Imp Bank of Japan (EBJ)	58.857.819.910	56.364.532.921
58	601 124411	Reksus Depkeu u/ Proyek West Java Urban Dev (Sector) Project 1384-INO ADB	237.701.652	227.632.328

REKENING KHUSUS

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	2007	2006
59	601 126411	Reksus Depkeu u/ Proyek Integr.Pest.Manag.for Smallh.Est.Crops 1469-INO ADB	35.321	33.825
60	601 127411	Reksus Depkeu u/ Proyek Family Health and Nutrition 1471-INO ADB	74.693	71.529
61	601 128411	Reksus Depkeu u/ Proyek North Java Flood Control Sector 1425/1426-INO ADB	0	0
62	601 129411	Reksus Depkeu u/ Proyek Segara Anakan Cons.& Development 1475/1476-INO ADB	106.694.382	102.174.681
63	601 130411	Reksus Depkeu u/ Proyek South Java Flood Control Sector 1479-INO ADB	67.317.499	673.072
64	601 131411	Reksus Depkeu u/ Proyek Farmer Managed Irrigation System 1378-INO ADB	13.281	12.718
65	601 133411	Reksus Depkeu u/ Proyek Intensified Iodine Def. Control Project 4125-IND IBRD	5.236.210	5.014.398
66	601 138411	Reksus Depkeu u/ Proyek Metropolitan Botabek Urban Development Proj. 1511-INO ADB	3.856.515	3.693.149
67	601 139411	Reksus Depkeu u/ Proyek North Java Roads Improvement 1428-INO ADB	0	0
68	601 145411	Reksus Depkeu u/ Proyek Participatory Dev Of Agric Tech 1526-INO ADB	4.144	3.969
69	601 148411	Reksus Depkeu u/ Proyek Safe Motherhood Partner & Family Approach 4207-IND IBRD	41.605.136	39.842.693
70	601 149411	Reksus Depkeu u/ Proyek Intensf Communicable Deseases Contr Proj 1523-INO ADB	13.469	12.899
71	601 150411	Reksus Depkeu u/ Proyek Pembiayaan Dev. Madrasah Aliyah 1519-INO ADB	83.452	79.917
72	601 155411	Reksus Depkeu u/ Proyek Quality of Undergraduate Education 4193 IBRD	51.688.364	5.488
73	601 159411	Reksus Depkeu u/ Proyek Information Infrastructure Dev.Project 4244-IND IBRD	6.908.648	733
74	601 160411	Reksus Depkeu u/ Proyek Northern Sumatera Irrigated Agric Sect 1579-INO ADB	169.825	162.631
75	601 164411	Reksus Depkeu u/ Proyek Capacity Bldg in Urban Infrastructure MG 1572-INO ADB	71.679	0
76	601 165411	Reksus Depkeu u/ Proyek Coastal Comm Dev & Fisheries Res Mgt 1570/1571-INO ADB	7.145.159	68.642
77	601 165411	Reksus Depkeu u/ Proyek Coastal Comm Dev & Fisheries Res Mgt 1570/1571-INO ADB	0	6.842.482
78	601 166411	Reksus Depkeu u/ Proyek Central Sulawesi I'ted Area Dev & c'tion 1605-INO ADB	189.793	181.753
79	601 169411	Reksus Depkeu u/ Proyek Coral Reef Rehab and Manag Proj 1613-INO ADB	989.843	947.912
80	601 173411	Reksus Depkeu u/ Proyek Maluku Regional Dev Loan 4306-IND IBRD	0	0
81	601 174411	Reksus Depkeu u/ Proyek Railway Efficiency Project Loan 4106-IND IBRD	0	0
82	601 178411	Reksus Depkeu u/ Proyek Early Child Development Loan No. 4378-IND IBRD	9.890	160.285
83	601 179411	Reksus Depkeu u/ Proyek Second Junior Secondary Education Proj. 1574-INO ADB	324.515.633	310.768.766
84	601 180411	Reksus Depkeu u/ Proyek Health Nutrition Dev 1676-INO ADB	0	0
85	601 185411	Reksus Depkeu u/ Proyek Sumatera Region Roads Proj Loan 4307-IND IBRD	530.477.515	296.817.712
86	601 193411	Reksus Depkeu u/ Pembiayaan Cap'ty B'ding for F'cial G'ment Loan 1620-INO ADB	4.549.471	4.356.750
87	601 199411	Reksus Depkeu u/ Pembiayaan Second Junior Secondary Educ 1573-INO ADB	166.716	159.654
88	601 200411	Reksus Depkeu u/ Proyek Rural Income Generation 1583-INO ADB	0	9.193.184
89	601 201411	Reksus Depkeu u/ Proyek Rural Income Generation 458-ID IFAD	5.195.238	8.214.514
90	601 203411	Reksus Depkeu u/ Proyek Capacity Building for Establishment of a Competitive Electricity Market 1674-INO ADB	471.609	451.631
91	601 204411	Reksus Depkeu u/ Pembiayaan Profincial Healt Project Loan IDA 3381 IND	9.268.250.695	19.611.225.099
92	601 205411	Reksus Depkeu u/ pembiy Second Water & Sanitation for Low Income Communities Project IDA-3382-IND	11.221.702	14.724.632.612
93	601 206411	Reksus Depkeu u/ Proyek Community Empowerment for Rural Development Project ADB 1765-INO (SF)	163.137	3.428
94	601 207411	Reksus Depkeu u/ Proyek Community Empowerment for Rural Development Project No.1766 INO ADB	55.384	7.603
95	601 208411	Reksus Depkeu Participatory Intregrated Dev. In Rainfed Areas Proj PIDRA 539-ID IFAD	129.605	7.487
96	601 209411	Reksus Depkeu u/ Proyek Decentralized Health Services 1810-IND ADB	4.992	9.471
97	601 213411	Reksus Depkeu U/P : Technological and Professional Skills Develop.Sector Proj. 1792-INO ADB	91.270	7.872.746
98	601 214411	Reksus ADB No.1770-INO dalam USD (Marine & Coastal Resources Management Project)	24.168.024	2.157.674
99	601 215411	Reksus ADB No.1798-INO Road Rehabilitatiom Sector Project dlm Valas USD	0	0
100	601 216411	Reksus Depkeu u/ State Owned Enterprise Gov. Privattn. Prog. Loan ADB No.1866-INO dlm USD	0	0
101	601 217411	Reksus Depkeu Western Java Environmental Management Project Loan IBRD 4612-IND/Credit 3519-IND d/ Valuta USD	106.341.829	102.503.181
102	601 219411	Reksus Depkeu Second Kecamatan Dev. Proj. Loan IBRD No.4627-IND/IDA No.3535-IND/GRANT TF-051369 dlm. val. USD	47.884.135.029	1.280.354.453
103	601 221411	Reksus ADB No.1863-INO (SF) Decentralized Basic Education Project	516.797.642	22.343.341.517
104	601 222411	Reksus Depkeu Provincial Health Proj II Loan IDA Credit No.3537-IND & IBRD Loan No.4629-IND dlm val USD	617.698	158.783.522.825
105	601 223411	Reksus ADB No.1965-INO Financial Governance & Social Security Reform (FGSSR) dalam Valuta USD	0	0
106	601 224411	Reksus Depkeu u/ Second Urban Poverty Project Loan IBRD No.4664-IND/Credit IDA 3658-IND dalam Valas USD	857.412	19.480.082.327
107	601 226411	Reksus Depkeu Gas Transmission & Distribution Phase 2 Project (EIB Loan No.F1 20.630 Indon) dalam Valas USD	1.814.602.186	1.737.733.488
108	601 227411	Reksus Depkeu Global Dev. Network Proj (Loan IBRD 4669-IND) dalam Valas USD	18.222.186	6.105.513.795
109	601 228411	Reksus Depkeu u/ Pembyn Private Provision of Infrastructure Technical Assistance Project Loan IBRD 4696-IND	17.069.281.719	27.055.073.096
110	601 229411	Reksus Depkeu o/ Poor Farmer Income Improvement Through Innovationt Proj (PF13P) Loan ADB 1909-INO dlm val USD	50.109	20.633.701
111	601 230411	Reksus Depkeu u/ Coral Reef Rehabilitation and Management Project Phase II (COREMAP II) - ADB No.1962-INO (SF) dlm USD-DLN	3.624.243	751.997
112	601 232411	Reksus Depkeu Government Finance Management Revenue Administration Project Loan No.4762 IND/IDA Credit 4026	15.275.869.174	27.014.584.300
113	601 233411	Reksus Depkeu Health Workforce & Service Project Loan IBRD 4702-IND/IDA Credit 3784-IND dlm valuta USD	69.138.673.198	29.831.933.494
114	601 234411	Reksus ADB No.601-ID East Kalimantan Local Communities Empowerment Programme (EKLCEP)	0	0
115	601 235411	Reksus Advance for Preparation of Strategic Roads Infrastructure Project (SRIP) Letter Agreement No.P4080	0	76.349.519
116	601 236411	Reksus Depkeu Land Management & Policy Dev. Project Loan/ Credit No.4731/3884-IND dlm vls USD	12.898.532.506	32.141.026.344
117	601 238411	Reksus Depkeu Second Eastern Indonesia Transport Project (EIRTP-2) LA No.4744-IND	159.840	76.566.921.515
118	601 239411	Reksus Depkeu u/ State Audit Reform Sector Development Prog Loan No.2126-IND dalam Valas USD	0	0
119	601 240411	Reksus Depkeu u/ Third Kecamatan Development Project-Loan IBRD No.4710-IND/IDA Credit 3806-IND dalam valuta USD	67.649.206.885	1.093.239.334

REKENING KHUSUS

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	2007	2006
120	601 241411	Reksus Depkeu u/ The Improvement o/ Land & Irrigation System at Farm Level Project IDB No.IND-0080	46.052.411	0
121	601 242411	Reksus Depkeu u/ Coral Reef Rehabilitation & Management Proj Phase II (Coremep II) IBRD No.4740-IND/IDA No.3910-IND dlm USD	1.656.450.112	5.505.013.152
122	601 243411	Reksus Depkeu u/ Second Decentralized Health Services Project Loan ADB No.2074-INO dlm val USD	32.967	21.828
123	601 244411	Reksus Depkeu u/ Second Decentralized Health Services Project Loan ADB No.2075-INO dalam Valas USD	400.025	2.886
124	601 245411	Reksus Depkeu u/ State Audit Reform Sector Development Prog Loan No.2127-INO dlm val USD	8.023.282.878	15.830.581.668
125	601 246411	Reksus Depkeu u/ Support for Poor & Disadvantaged Areas Project Loan IBRD No.4788-IND/IDA No.4076-IND dlm val USD	26.345.219.636	3.450.406.979
126	601 247411	Reksus Depkeu u/ Indonesia Managing High Education f/ Relevance & Efficienc Proj. IBRD No.4789-IND/IDA No.4077-IND	39.638.567.989	10.713.414
127	601 248411	Reksus Depkeu u/ Neighborhood Upgrading Shelter Sector Project (NUSSP) Loan ADB 2072-INO	355.379	2.313.269
128	601 251411	Reksus Depkeu u/ Third Kecamatan Development Project Phase II Loan IBRD No.4771-IND/IDA CR No.4045-IND	587.557	5.616.664
129	601 252411	Reksus Depkeu u/ Third Urban Poverty Project Loan IBRD No.4779-IND/IDA CR 4063-IND	280.780	44.303.597.501
130	601 253411	Reksus Depkeu u/ Local Government Finance and Governance Reform Sec Dev Program (LGFGRSDP) Loan ADB No.2192-INO	0	0
131	601 254411	Reksus Depkeu u/ Local Government Finance and Governance Reform Sec Dev Program (LGFGRSDP) Loan ADB No.2193-INO	0	0
132	601 255411	Reksus Depkeu u/ Initatives for Local Governance Reform Project (ILGRP) Loan IBRD No.4790-IND/IDA CR no.4078-IND	55.802.618.628	19.370.742.248
133	601 256411	Reksus Depkeu u/ Water Resources and Irrigation Sector Mngmnt PRJ-WISMP Loan IBRD No.4711-IND/IDA GR No.3807-IND	6.593	16.912.825.622
134	601 257411	Reksus Depkeu u/ Community Water Services & Health Project Loan ADB No.2163-IND	5.049.004.653	9.820.211.645
135	601 258411	Reksus Depkeu u/ Community Water Services & Health Project Loan ADB No.2164-IND (SF)	6.258.035.781	10.735.391.669
136	601 259411	Reksus Depkeu u/ Urban Sector Development Reform Project Loan IBRD 4786-IND	479.503.959	0
137	601 260411	Reksus Depkeu u/ Participatory Irrigation Sector (PISP), Loan ADB No.2064 (SF)-INO	21.852	0
138	601 261411	Reksus Depkeu u/ Participatory Irrigation Sector (PISP), Loan ADB No.2065 (SF)-INO	57.079	992
139	601 262411	Reksus Depkeu u/ Rural Infrastructur Support Project (RISP) Loan ADB No.2221-INO (SF)	140.908	233.257
140	601 263411	Reksus Depkeu u/Decentr Basic Educ Proj DBEP-Grant Co-Fin fr the Gov Netherlands Loan No.1863-INO ADB	0	0
141	601 264411	Reksus Depkeu u/ Early Childhood Educ & Dev Proj (ECED), Loan IDA Credit No.4205-IND	0	0
142	601 265411	Reksus Depkeu u/ Proyek Infrastruktur Reform Sector Development Program (IRSDP) 2263-INO ADB	0	0
143	601 266411	Reksus Depkeu u/ Second Development Policy Support Program (DPSP 2), Loan ADB 2305-INO ADB	0	0
144	601 267411	Reksus Depkeu u/ Infrastructure Reform Sector Development Program Loan 2264-INO ADB	0	0
145	601 268411	Reksus Depkeu u/ Proyek READ, Loan IFAD 645-ID	0	0
146	601 269411	Reksus Depkeu u/ LA 2285 -INO (SF) Sustainable Aquaculture Dev.For Food Security and Poverty Reduction Project	0	0
147	601 270411	Reksus Depkeu u/ Loan Agreement 2294-INO (SF) Madrasah Education Development Project	47.095.000.000	0
148	601 271411	Reksus Depkeu u/ P. Farmer Empownt Through Agricultural Tech & Information Project Loan IBRD No.7427-IND / IDA Cr No.4260 IND	85.492.888.549	0
149	601 272411	Reksus Depkeu Additional Financing for The Seccond Urban Poverty Project (IDA Credit No.3658-1-IND)	0	0
150	601 273411	Reksus Depkeu untuk Poverty Reduction and Millenium Development Goals Acceleration Program Cluster -Sub Program 1	0	0
151	601 274411	Reksus Depkeu Loan Strategic Roads Infrastructure Project / Srip, Loan IBRD LN-4834-IND	0	0
152	601 275411	Reksus Depkeu untuk Capital Market Development Program Cluster-Subprogram 1	0	0
153	601 276411	Reksus Depkeu untuk Fourth Development Policy Loan (DPL) No.7495-IND	0	0
154	601 277411	Reksus Depkeu untuk Third Development Policy Support Program Loan ADB 2394-INO	0	0
155	601 278411	Reksus Depkeu u/ Better Education Through Reformed Management And Universal Teacher Upgrading Project (BERMUTU) Loan IBRD IDA	0	0
156	602 000517	Reksus Depkeu u/ Proyek : Cirebon-Jakarta Water Supply Swiss Grant	1.458.808.863	1.303.606.624
157	602 001311	Reksus Depkeu u/ Construction of Junior Secondary School Facilities under The Basic Education Program, Loan AIRPD-G001	0	0
158	602 002411	Reksus Depkeu Jap.Soc.Dev F/Grant for the Improve. O.T. Qual of Educ. Serv. T.E. Part Central Java & Yogyakarta Grant TF-053814	382.208.986	0
159	602 002411	Reksus Depkeu Jap.Soc.Dev F/Grant for the Improve. O.T. Qual of Educ. Serv. T.E. Part Central Java & Yogyakarta Grant TF-053814	0	318.950.447
160	602 002991	Reksus Netherlands Grant for Cofinancing the Second Kecamatan Development Project (Grant No.TF-051369) dlm Val.Euro	0	3.644.981.803
161	602 003411	Reksus Depkeu u/ Proyek Kerinci Seblat Integrated Conser & Dev TF-28312 GEF Grant	2.543.130	2.435.400
162	602 003991	Reksus Depkeu u/ Netherlands Grant for the Second Schools Improvement Grants Prog (Grant No.TF051575-IND) dlm Val.EUR	0	0
163	602 012411	Reksus Depkeu u/ Proyek Strenghthening Management of External Dev. Financing for Public Inv TF-27184 IBRD	1.412.850.000	1.353.000.000
164	602 018411	Reksus Depkeu u/ Pemb. Australian Gov.Grant for Second Water & Sanitation for Low Income Comm Proj (GRANT TF-023692)	30.392.287	2.490.114.418
165	602 028411	Reksus Depkeu u/ Proyek Grant for the Water Resources & Irrigation Reform Implementation Prog (TF-027755 Grant)	4.787.489	4.584.686
166	602 030411	Reksus Depkeu u/ Proyek Japan Social Develop Fund Grant for the Widows & Poverty Project, Grant No.TF-026564 Valuta USD	70.548	67.560
167	602 033411	Reksus Depkeu u/ Proyek Japan Social Dev. Grant for Squatter Sett. Pillots Assistant Proj.Grant No.TF-026563 dalam valuta USD	0	0
168	602 034411	Reksus Depkeu u/ Proyek Japanese Grant for Prep of the Land Mgt & Policy Dev.Prog (Grant No.TF-026379) dalam valuta USD	0	0
169	602 036411	Reksus Depkeu Western Java Environmental Management Project (Grant No.TF-029805) dalam valuta USD	11.868	11.440
170	602 041411	Reksus Depkeu Grant for Increasing Accs to Statit Data for Lcl.Pol Dec.Making (TF-050609) dalam valuta USD	4.101.880	3.928.120
171	602 048411	Reksus Depkeu Jap.Soc.Dev Fund Grant for Educ & Employ Opport for undereducated youth Grant TF-051701-IND	209.761	200.875
172	602 050411	Reksus Depkeu u/ Grant for Prog. Enhancing Grant TF.051941	0	0
173	602 053411	Reksus Depkeu DFID Grant for Initiatives for Local Governance Reform Project (Grant No.TF-052572) dalam USD	895.182	857.261
174	602 054411	Reksus Depkeu Japan Social Dev. Fund Grant for the Marginal Fishing Community Dev. Pilot Proj.No.TF-026799 dalam USD	0	0
175	602 055411	Reksus Depkeu Grant TF-052800 (Japan Grant for the Prepare of a Proposed Recov.Support Conflict Ridden Areas Proj. USD	0	0
176	602 056411	Reksus Depkeu Grant TF-053002 (Poverty Reduction Strategy Trust Fund Grant for Capacity Building) dalam USD	220.781	211.429
177	602 060411	Reksus Depkeu ASEM Grant for Housing Finance Policy Reform-Grant TF-052962 dalam valuta USD	0	0
178	602 061411	Reksus Depkeu IDF Grant for Dev.Procure.Training Providers t/ Facilities, Certicator/Procure.Prof Grant TF-052481-USD	0	270.600.000
179	602 062411	Reksus Depkeu PHRD Grant for the Prep.of Prop.Gov.Fin.Mng.& Rev Adm.Proj.Grant Agreement No. TF-053116 dalam valuta USD	0	0
180	602 063411	Reksus Depkeu Japan Grant for the Prep. Of Farmer Empow. Through Agric.Tech. & Information Proj Grant TF-052678 dlm val USD	0	0
181	602 064411	Reksus Depkeu Grant TF-053117 (Jap Grant for the Implementation of the Second Provicial Health Project) dalam valuta USD	0	94.796.017

REKENING KHUSUS

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO.	NO. REKENING	NAMA REKENING	2007	2006
182	602 066411	Reksus Depkeu Grant TF-053282 (Asem Grant for Designing Effective Community Empowerment Programs) dalam valuta USD	42.353.758	40.559.603
183	602 068411	Reksus Depkeu u/ IDF Grant for Strengthening of Indonesian Institute of Acc No Grant TF-053499 dalam valuta USD	0	184.206.440
184	602 069411	Reksus Depkeu u/ Asem Grant for Dev. Capacity in the Cptl Market and non Bank Financial Inst No Grant TF-053347 dalam valuta USD	36.169	34.637
185	602 070411	Reksus Depkeu u/ Asem Grant For Strenght Fiscal Policy Analisys Capacity in Ministry of Finance Grant TF-053895 dalam USD	0	617.860.709
186	602 073411	Reksus Depkeu u/ PHRD Grant for the Preparation of Higher Education for Competitivenes (Grant TF-053737) dalam USD	0	0
187	602 074411	Reksus Depkeu u/ Penampungan Hibah dari Luar Negeri dalam Rangka Bencana Alam Nasional dalam valuta USD	2.671.824.623	2.667.853.337
188	602 075111	Reksus Depkeu u/ Penampungan Hibah dari Luar Negeri dalam Rangka Bencana Alam Nasional dalam valuta JPY	0	0
189	602 075411	Reksus Depkeu u/ Netherlands Grant Support to Basic Education Reform Project Grant TF-054419 dalam valuta USD	0	33.645.322
190	602 076411	Reksus Depkeu ASEM Grant for Rural Investment Climate Survey Grant IBRD No. TF-053367	0	2.722.236
191	602 076991	Reksus Depkeu u/ Menampung Hibah dari Luar Negeri dlm Rangka Bencana Alam Nasional dalam Val.EUR	0	0
192	602 077411	Reksus Depkeu JDF for Upper Semarang Land Conservation & Poverty Allevation Proj. Grant IBRD No.TF-053816	1.602.295.289	4.057.467
193	602 078411	Reksus Depkeu ASEM Grant For Institusional Strengtening for Dept of Community & Village Dev. Grant IBRD No.TF-053785 dlm USD	0	0
194	602 079411	Reksus Depkeu u/ Coral reef rehabilition and management proj. phase II (Coremap II) IBRD no.TF-053350 Grant	1.656.853.622	2.307.113.681
195	602 080411	Reksus Depkeu u/ Government financial management & revenue administration project grant IBRD No. TF-053556 dalam USD	174.372.063	2.169.794.825
196	602 081411	Reksus Depkeu u/ IDF Grant f/ Strengthening National Capacity f/ Public Monitor Local Gov.Reform Grant IBRD No.TF-054921	265.793.348	249.857.067
197	602 082411	Reksus Depkeu u/Earthquake and Tsunami Emergency Support Project Grant ADB No. 0002-INO dlm val. USD	494.686	6.152.451
198	602 083411	Reksus Depkeu u/IDF Grant F/Devlp.The Cap.O/the Minst.Of Forgn Aff to Supp.Wom.Migrn.Works Grant IBRD TF-054332 dlm USD	235.475.000	208.223.814
199	602 084411	Reksus Depkeu u/Community water services and health Aceh/Nias North Sumatera Project, Grant 0003-INO (SF)	7.145.951.725	14.432.000.000
200	602 085411	Reksus Depkeu u/State Audit Reform Sector Development Project Loan ADB No.2127-INO	1.259.791	2.137.769.676
201	602 086411	Reksus Depkeu u/Initiatives for local governance reform project (ILGRP) IBRD Grant No.TF-055913	4.846.338.196	10.458.060.855
202	602 087411	Reksus Depkeu u/Water Resources and Irrigation Sector Mngmnt Project WISMP IBRD Grant No.TF-052124	2.650.199.729	8.725.385.964
203	602 088411	Reksus Depkeu u/Support for poor and disadvantaged areas project (SPADA) Grant IBRD No.TF-054749	2.359.011.909	2.467.974.016
204	602 089411	Reksus Depkeu u/ Search and Tsunami Emergency Supp.Prj d/ Hbh.Pem.Belanda Sec.FDCRY.OVSGHT. Supp.Grant Agreement ADB No.0002-INO	3.776.171.573	1.047.503.424
205	602 090411	Reksus Depkeu u/ Strengthening Forensic Audit Capacity of State Audt Board (BPK) (IDF Grant) No.TF-056263)	282.570.000	198.663.876
206	602 091411	Reksus Depkeu u/ Urban Sector Development Project IBRD No.TF-053555-IND	4.709.500.000	0
207	602 092411	Reksus Depkeu u/ European Union Grant F/N USA Tengg.Brt. Wtr. RSRC.Mng.Program Letter Agreement no.TF-055997	16.393.553.805	1.037.085.595
208	602 093411	Reksus Depkeu u/ Preparation of National Roads Improvement Project IBRD Grant No.TF-054589	1.883.800.000	1.804.000.000
209	602 094411	Reksus Depkeu u/ Western Java Enviromental Management Project/Addaptive Program Loan (APL2) IBRD Grant TF-053118-IND	0	0
210	602 095411	Reksus Depkeu u/ Participatory Irrigation Sector Project, Grant GON No.4299-INO	31.083	0
211	602 096411	Reksus Depkeu u/ Early Childhood Education and Development Project (ECED), IBRD Grant No.TF-056841	449.855.976.850	0
212	602 097411	Reksus Depkeu u/ Seismically Upgraded Housing in Nanggroe Aceh Darussalam and North Sumatera, Grant JFPR 9074-INO	4.709.500.000	4.510.000.000
213	602 098411	Reksus Depkeu u/ Proyek Deutch Grant, Grant 0047-INO	9.358.467.101	23.073.301.343
214	602 099411	Reksus Depkeu u/ Proyek From Best Practice Policy Formulation Project IDF Grant TF-057276-IND dalam USD	410.310.572	0
215	602 100411	Reksus Depkeu u/ Proyek Kecamatan Based Reconstr and Rehabilitation Planning Project (KRRP) Grant IBRD TF 057307 IND	95.602.850.000	0
216	602 101411	Reksus u/ Proyek The Pilot Housing Vulnerable Communities in Aceh Project Grant TF-055389-IND	0	0
217	602 102411	Reksus Depkeu u/ Strengthening Accountability for and Audit of Disaster Related Aid , IDF Grant No. No.TF-057426	277.267.857	0
218	602 103411	Reksus Depkeu u/ Proyek PHRD Grant For The Preparation of Electricity Acces for Rural Transformation Project, Grant TF 054618	1.412.850.000	0
219	602 104411	Reksus Depkeu u/ Grant IDA No. TF-057955 (MDTF for Aceh and North Sumatera, Supp. For Poor and Disadvantage Areas Proj.)	22.318.542.694	0
220	602 105411	Reksus Depkeu u/Infrastructure Project Development Facility Imprest Account F/Dutch Grant Agreement 0064- INO	0	0
221	602 106411	Reksus Depkeu u/ Proyek READ, Grant IFAD 726-ID	0	0
222	602 107411	Reksus Depkeu u/ Proyek MDTFANS-Infrastructure Reconstruction Financing Facility Grant TF-057657	75.601.543.124	0
223	602 108411	Reksus Depkeu u/ Proy Java Reconstruction Fund (JRF) Grant IBRD TF 090014-IND	81.990.871.854	0
224	602 109411	Reksus Depkeu u/ Pilot Study on Teacher Sertification IBRD Grant TF 057271	945.536.770	0
225	602 110411	Reksus Depkeu u/MDTF to Support Public Financial Management and Revenue Administration Reform Project Grant TF 090047 IND	3.941.297.003	0
226	602 111411	Reksus Depkeu u/Mainstreaming Environment in Aceh and Nias Project IBRD Grant TF 057667	224.709.177	0
227	602 112411	Reksus Depkeu Untuk Kecamatan Development Project and Environment in Sulawesi Project Grant IBRD TF-056890-IND	0	0
228	602 113411	Reksus Depkeu u/ Netherland Grant for KDP and Community Based MDG Achievment Grant IBRD TF-090003 IND/70691901	12.524.214.382	0
229	602 114411	Reksus Depkeu u/ Third Kec. Dev. Proj. Phase II for Smallholder Agribus. Dev. Initiative (SADI) Grant IBRD TF-057097-IND	2.825.700.000	0
230	602 115411	Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-057574 Streamling Data Flows From Region to The Center Under Decentralization Project	0	0
231	602 116411	Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-090666-IND Spada, Monitoring and Evaluating Capacity Building Project	0	0
232	602 117411	Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-057749/DGLS Indonesia Avian Influenza Surveillance and Control Project	0	0
233	602 118411	Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-057749/Komnas FBPI Indonesia Avian Influenza Surveillance and Control Project	0	0
234	602 119411	Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-056895/DGLS Indonesia Avian Influenza Surveillance and Control Project	0	0
235	602 120411	Reksus Depkeu Grant IBRD No. TF-056895/Komnas FBPI Indonesia Avian Influenza Surveillance and Control Project	0	0
236	609 020411	Menteri Keuangan CQ Direktur Jenderal Perbendaharaan untuk menampung Pengelolaan Surat Utang Negara dalam USD	0	0
237	609 100411	Rekening Penerimaan Pinjaman/ Hibah Luar negeri dalam rangka Reksus dalam Valuta USD	0	0
JUMLAH			1.559.857.860.322	845.909.266.282

SALDO REKENING ESCROW SUBSIDI/PSO DAN DANA BAGI HASIL
PER 31 DESEMBER 2007
(Dalam Rupiah)

No.	REKENING ESCROW			REKENING	SALDO AKHIR 31-Des-07	SALDO AKHIR 31-Des-06
	JENIS/BANK	NAMA REKENING	NO. REKENING			
	SUBSIDI/PSO					
1	BRI KCK Sudirman	Cadangan Subsidi Pangan Tahun Anggaran 2001	0206-01-000089-30-1	Perum Bulog	65.921.450.580	65.921.450.580
2	BRI KCK Sudirman	Rekening Cadangan Dana Subsidi Pangan TA 2003	0206-01-001939-30-5	Perum Bulog	155.178.346.179	155.178.346.179
3	BRI Cab Jakarta Kebayoran Baru	CadanganSubsidi/PSO	0193-01-000747-30-4	Dirjen Perbendaharaan		2.610.944.907.327
4	BRI Cab Jakarta Veteran	CadanganSubsidi/PSO	0329-01-001890-30-3	Dirjen Perbendaharaan		82.916.000.000
	Bank BRI Cabang Jakarta Veteran	Menkeu Cadangan Subsidi/PSO	0329-01-002078-30-2	Dirjen Perbendaharaan	1.288.577.576.961	
5	Bank Bukopin KPO MT Haryono	Rekening Titipan Subsidi Pangan	1016053-01-1	Perum Bulog	382.597.051.254	382.597.026.468
6	Bank Bukopin KPO MT Haryono	Rekening Titipan Subsidi Pangan	1016977-01-9	Perum Bulog	54.043.916.963	54.043.913.463
7	Bank Bukopin KPO MT Haryono	CadanganSubsidi/PSO	1016977-01-5	Dirjen Perbendaharaan		359.271.304.945
8	Bank BNI KCU Kramat Jakarta	Cadangan Subsidi Bulog QQ Dirjen Perbendaharaan	0094720712	Dirjen Perbendaharaan	14.067.201.192	14.032.115.059
9	Bank BNI KCU Jakarta Kota	Cadangan Subsidi Bulog QQ Dirjen Perbendaharaan	0114846647	Dirjen Perbendaharaan		463.645.305.445
	Bank BNI KCU Jakarta Kota	Menkeu Cadangan Subsidi/PSO	0138709102	Dirjen Perbendaharaan	2.793.904.895.785	
	Bank Mandiri Cabang Jakarta Plaza	Menkeu Cadangan Subsidi/PSO	070-00-0523304-9	Dirjen Perbendaharaan	310.520.876.231	
10	Bank Mandiri Cabang Jakarta Cikini	CadanganSubsidi/PSO	123-00-46-0456750-0	Dirjen Perbendaharaan		54.621.281.363
11	Bank jabar Cabang Khusus Jakarta	CadanganSubsidi/PSO	0074-001ZY3-001	Dirjen Perbendaharaan		424.094.402.896
	Jumlah				**5.064.811.315.145**	**4.667.266.053.725**
	DANA BAGI HASIL					
1	Bank BNI KCU Kramat Jakarta	Sub Account DBH SDA Kehutanan	0010560801	Dirjen Perbendaharaan	162.636.848.513	1.141.489.174.161
2	Bank BNI KCU Kramat Jakarta	Sub Account DBH SDA Perikanan	0010560798	Dirjen Perbendaharaan	43.230.742.127	181.960.711.503
3	Bank BNI KCU Kramat Jakarta	Sub Account DBH SDA Pertambangan Umum	0010560812	Dirjen Perbendaharaan	167.008.300.354	540.086.557.467
4	Bank BNI KCU Kramat Jakarta	Sub Account DAK DR	0013630358	Dirjen Perbendaharaan	887.393.458.400	1.225.819.452.770
5	Bank Indonesia	Sub BUN Dana DAK DR Tahun 2002 Yang Belum Disalurkan	502.000.003	Dirjen Perbendaharaan	16.168.946.303	16.168.946.303
	Bank BRI Cabang Jakarta Veteran	Menkeu Cadangan DBH	0329-01-002077-30-6	Dirjen Perbendaharaan	1.604.726.104.260	
	Jumlah				**2.881.164.399.957**	**3.105.524.842.204**

CATATAN :

Daftar Saldo ini dibuat berdasarkan Rekening Koran dari Bank Umum
setelah dikurangi dengan Pembatalan SP2D untuk Cadangan Subsidi/PSO
sebesar Rp7.862.829.419.655,-

SALDO REKENING - REKENING ESCROW DANA REBOISASI
PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006
(dalam rupiah)

No.	BANK	NAMA REKENING	NO. REKENING	REKENING	SALDO AKHIR 31-Des-07	SALDO AKHIR 31-Des-06
1	PT. BANK MANDIRI KCK JAKARTA PLAZA	Menkeu-DJA Cadangan Reboisasi	070-00-0021024-0	Dirjen Perbendaharaan	3.910.637.163.098	4.283.612.581.649
2	PT. BNI Cab. Taman Niaga Suwarna	Menkeu-DJA Cadangan Sisa Dana Reboisasi	19700977	Dirjen Perbendaharaan		467.699.430.382
3	PT. BNI Cab. Jakarta Kramat	Menkeu-DJA Cadangan Sisa Dana Jasa Giro Reboisasi	10560776	Dirjen Perbendaharaan		415.053.663.645
4	PT. BNI KCU TANGERANG	Departemen Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan	0019717937	Dirjen Perbendaharaan		105.852.045.247
5	PT. BNI KCU TANGERANG	Departemen Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan	0019717926	Dirjen Perbendaharaan	2.355.769.618.952	2.086.798.662.506
6	Bank BNI KCU Jakarta Kota	Cadangan Dana Reboisasi	94697884	Dirjen Perbendaharaan		36.042.243.000
7	Bank DKI Cabang Utama Juanda	Departemen Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan	101.01.07211-5	Dirjen Perbendaharaan	200.000.000.000	284.921.805.996
8	Bank DKI Cabang Utama Juanda	Departemen Keuangan cq. Dirjen Perbendaharaan	101.01.07212-3	Dirjen Perbendaharaan		59.570.502.324
9	Bank BNI KCU Jakarta Kota	Cadangan Dana Reboisasi QQ Dirjen Perbendaharaan	1.018.896.016	Dirjen Perbendaharaan	300.000.000.000	300.000.000.000
10	Bank BRI Cabang Jakarta Veteran	Cadangan Dana Reboisasi QQ Dirjen Perbendaharaan	0329.01.001767.30.6	Dirjen Perbendaharaan	1.458.653.223.000	851.884.503.672
11	Bank Jabar Cabang Utama Jakarta	Cadangan Jasa Giro Dana Reboisasi	0074-0010NX-001	Dirjen Perbendaharaan	105.166.165.000	105.166.165.000
Jumlah					**8.330.226.170.050**	**8.996.601.603.421**

ASET LAIN-LAIN

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2007	2006
1	002	DEWAN PERWAKILAN RAKYAT	2.766.639.620	1.018.778.620
2	004	BADAN PEMERIKSA KEUANGAN	3.660.197.755	1.834.692.216
3	005	MAHKAMAH AGUNG	14.355.044.785	-
4	006	KEJAKSAAN AGUNG	7.597.289.491.529	-
5	007	SEKRETARIAT NEGARA	#N/A	
6	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	253.292.820.318	-
7	011	DEPARTEMEN LUAR NEGERI	31.831.799.806	68.076.028.987
8	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	6.268.032.500	-
9	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	-	15.308.780
10	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	24.652.410.653	414.363.650.119
11	018	DEPARTEMEN PERTANIAN	7.162.424.170	16.984.052.325
12	019	DEPARTEMEN PERINDUSTRIAN	144.452.000	-
13	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	28.881.425.678	3.937.095.003.201
14	022	DEPARTEMEN PERHUBUNGAN	335.114.604.034	237.393.709.322
15	023	DEPARTEMEN PENDIDIKAN NASIONAL	39.231.457.587	12.500.000
16	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	79.263.643.590	4.331.099.748
17	025	DEPARTEMEN AGAMA	19.126.276.551	11.540.572.583
18	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	2.380.176.602	305.482.108
19	029	DEPARTEMEN KEHUTANAN	2.363.100.436.957	822.981.080.586
20	033	DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM	6.393.301.372	6.306.216.557
21	040	DEPARTEMEN KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA	587.567.000	-
22	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	391.946.000	87.085.726.235
23	042	KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI	99.750.387.293	
24	043	KEMENTERIAN NEGARA LINGKUNGAN HIDUP	10.155.144.702	
25	044	KEMENTERIAN NEGARA KOPERASI DAN UKM	70.937.623.015	58.249.044.256
26	048	KEMENTERIAN NEGARA PENDAYAGUNAAN APARATUR NEGARA	71.795.750	2.219.000
27	054	BADAN PUSAT STATISTIK	-	4.493.176.658
28	056	BADAN PERTANAHAN NASIONAL	720.112.500	405.690.000
29	057	PERPUSTAKAAN NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	1.302.829.001	-
30	059	DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	89.600.000	89.600.000
31	064	LEMBAGA KETAHANAN NASIONAL	207.559.142	1.071.335.642
32	065	BADAN KOORDINASI PENANAMAN MODAL	87.822.038	-
33	069	BELANJA LAIN-LAIN	601.199.632.817	-
34	075	BADAN METEOROLOGI DAN GEOFISIKA	610.985.000	516.046.278
35	076	KOMISI PEMILIHAN UMUM	28.750.000	-
36	077	MAHKAMAH KONSTITUSI RI	408.008.460	720.159.710
37	078	PUSAT PELAPORAN DAN ANALISIS TRANSAKSI KEUANGAN	282.748.620	359.089.620
38	079	LEMBAGA ILMU PENGETAHUAN INDONESIA	94.550.000	94.550.000
39	080	BADAN TENAGA NUKLIR NASIONAL	11.795.838.604	5.334.947.672
40	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	58.676.140.283	81.670.449.361
41	082	LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL	11.854.656.742	
42	083	BADAN KOORDINASI SURVEY DAN PEMETAAN NASIONAL	44.003.148.368	60.664.688.494
43	084	BADAN STANDARISASI NASIONAL	1.714.950.718	-
44	086	LEMBAGA ADMINISTRASI NEGARA	683.655.514	295.925.903
45	087	ARSIP NASIONAL REPUBLIK INDONESIA	911.635.000	125.820.000
46	088	BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA	373.220.000	-
47	089	BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	4.568.800.933	18.048.316.931
48	090	DEPARTEMEN PERDAGANGAN	56.302.000	13.852.606.468
49	091	KEMENTERIAN NEGARA PERUMAHAN RAKYAT	2.955.153.597	-
50	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	14.232.475.026	8.232.435.016
51	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	486.293.304.867	121.021.665.470
52		LPP RRI	-	-
53		INSTANSI LAINNYA	-	2.818.344.765
JUMLAH			**#N/A**	**5.987.410.012.631**

PT. PERUSAHAAN PENGELOLA ASET (PERSERO)
RINGKASAN ASET NEGARA YANG DIKELOLA PPA
UNTUK PERIODE 01 JANUARI 2007 - 31 DESEMBER 2007

NO	JENIS ASET	SATUAN ASET	SALDO AKHIR PERIODE SEBELUMNYA 31-Des-06		MUTASI PERIODE BERJALAN					SALDO AKHIR PERIODE BERJALAN 31 DESEMBER 2007	
					MUTASI SERAH KELOLA		MUTASI TRANSAKSI				
			ITEM ASET	NILAI ASET (Rp)	ITEM ASET	NILAI ASET	ITEM ASET	PROCEEDS	NILAI (Rp)	ITEM ASET	NILAI ASET (Rp)
1	Aset Saham Bank	Bank	6	142.563.236.654	-	3.154.891.599 1)	-	687.554.726	(6.091.824.849)	6	139.626.303.404
2	Aset Saham Non Bank	Perusahaan	24	315.769.321.428	5	145.789.071.470	-	8.203.361.030	-	29	461.558.392.898
3	Aset Hak Tagih	Debitur	388	1.316.953.062.340	16	(479.666.288.924) 2)	(28)	647.731.971.528	(127.347.465.759)	376	709.939.307.657
4	Aset Properti	Unit	3.890	1.884.301.689.354	(318)	(98.662.397.203) 3)	(4)	7.543.454.545	(2.997.446.230)	3.568	1.782.641.845.921
5	Surat Berharga	Perusahaan	11	17.128.634.432	(2)	(471.392.223) 4)	-	-	-	9	16.657.242.209
6	Saham dan Kredit	Perusahaan	3	705.791.122.704	1	905.912.557.951	(2)	1.015.433.895.848	(732.330.079.755)	2	879.373.600.900
	JUMLAH		4.322	4.382.507.066.912	(298)	476.056.442.670	(34)	1.679.600.237.677	(868.766.816.593)	3.990	3.989.796.692.989

KETERANGAN :

1) Pencatatan kembali lembar saham 3 (tiga) bank yang terkait dengan SBH
2) Termasuk penyesuaian nilai aset hak tagih sesuai KMK No. 645/KMK.01/2006
3) Termasuk penyesuaian nilai aset properti sesuai KMK No. 669/KMK.06/2006
4) Penyesuaian nilai aset surat berharga sesuai KMK No. 394/.01/2004

ASET EKS BPPN YANG DIKELOLA TIM KOORDINASI
PER 31 DESEMBER 2007
(Dalam Rupiah)

NO	JENIS ASET	JUMLAH ASET	NILAI PENGALIHAN
1.	Surat Berharga		
	- Surat Berharga Treasury	36	336.744.406.680
	- Surat Berharga Non Treasury	121	169.269.366.213
	- Surat Berharga terkait PKPS	2	18.100.848.909
2.	Penyertaan di Bank Lainnya	8	-
3.	Penyertaan Non Bank	21	25.321.044.355
4.	Pinjaman yang diberikan		
	- Dikelola BPPN	13.950	2.702.947.038.220
	- Dikelola BDI	1	19.489.668.884
5.	Aktiva Non Inti		
	- NCA Properti	701	123.228.291.946
	- NCA Non Properti	7	293.510.290.511
	- Inventaris	76.413	8.134.769.815
6.	Tagihan PKPS	17	2.235.982.000.000
7.	Piutang Bank	13	1.249.659.000.000
8.	Piutang Non Bank	3	20.000.000
9.	Penempatan Antar Bank dan Nostro	2	83.698.000.000
10.	Aktiva Lainnya	7	93.971.000.000
	T O T A L	91.302	7.360.075.725.532

Catatan:

1. Surat Berharga adalah Surat berharga yang dimiliki oleh BPPN yang diperoleh dari pengalihan aset milik BBO/BBKU, BTO, Bank rekap dar aktivitas penyelesaian kewajiban debitur kepada BPPN atau diterima BPPN dari pihak lain sebagai alat pembayaran kewajibannya kepada BPPN (*asset settlement*).
2. Penyertaan di Bank Lainnya adalah penyertaan dimiliki BPPN di bank umum yang berasal dari penyertaan yang sebelumnya dimiliki oleh BBO/BBKU dan BTO.
3. Penyertaan Non Bank adalah penanaman dana bank dalam bentuk saham perusahaan lain untuk tujuan investasi jangka panjang.
4. Pinjaman yang Diberikan merupakan pinjaman uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan pinjam meminjam antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak peminjam untuk melunasi hutangnya setelah jangka waktu tertentu dengan jumlah bunga, imbalan, atau pembagian hasil keuntungan.
5. Aktiva Non Inti merupakan aktiva non inti berupa asset properti dan asset non properti milik BBO/BBKU, BTO, dan Bank Rekap yang dialihkan ke BPPN serta aktiva properti yang diserahkan oleh debitur dalam rangka pembayaran kewajibannya kepada BPPN (*"Asset Settlement"*). Aktiva non inti milik Bank yang dialihkan ke BPPN tersebut berasal dari aktiva non inti yang diterima Bank dari debitur untuk penyelesaian kewajibannya maupun barang jaminan diambil alih ("BJDA").
6. Tagihan PKPS merupakan piutang BPPN yang timbul sehubungan dengan PKPS kepada perusahaan induk yang didirikan oleh eks PSP BT(dan BBO dalam rangka penyelesaian terhadapa kewajiban eks PSP tersebut berdasarkan perjanjian MSAA, MRNIA, dan piutang BPPN kepada eks PSP BBKU dan BTO II dalam perjanjian APU.
7. Piutang Bank adalah tagihan BPPN kepada 50 BBO/BBKUdan 2 BDL (Bank Ratu dan Bank Prasidha) yang timbul karena dilakukannya pengalihan (*cessie*) Piutang BLBI dari BI kepada Negara RI c.q. BPPN dan/atau karena BPPN melakukan pembayaran talangan kewajiban bank yang termasuk dalam skema penjaminan, pembayaran talangan pesangon karyawan eks bank, atau talangan-talangan lainnya setelah dikurangi realisasi aktiva eks bank tersebut yang diterima BPPN.
8. Penempatan Antar Bank merupakan penanaman dana BDP pada bank lain, baik di dalam negeri maupun di luar negeri, dalam bentuk *interbank call money,* tabungan, deposito berjangka, pinjaman antar bank, dan lain-lain yang sejenis dimaksudkan untuk memperoleh penghasilan. Sedangkan Nostro merupakan saldo rekening giro BDP baik dalam rupiah maupun dalam valuta asing di BI dan bank lain.
9. Aktiva Lainnya merupakan aktiva yang dimiliki BPPN yang tidak termasuk dalam kelompok akun aktiva tersebut di atas.

DATA NILAI ASET KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BPMIGAS
PER 31 DESEMBER 2007

A. KKKS PRODUKSI

NO.	NAMA OPERATOR	BLOK AREA	KODE	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI DEPRESIASI	NILAI BUKU
1	BOB PT. BUMI SIAK PUSAKO-PERTAMINA HULU	COASTAL PLAIN PEKAN BARU	007	12.213.616	7.935.896	4.277.720
	BOB PT.BSP - PERTAMINA HULU EX CPP	CPP BLOCK	907	259.337.367	259.337.367	0
2	BP WEST JAVA LTD.	WEST JAVA	010	2.521.566.153	2.398.886.749	122.679.404
	BP WEST JAVA LTD. EX ARCO	WEST JAVA Z CAT	910	185.298.408	185.298.408	0
3	CAMAR RESOURCE	BAWEAN	000	8.216.088	8.162.000	54.088
4	CHEVRON INDONESIA COMPANY	EAST KALIMANTAN	030	742.174.173	702.951.376	39.222.797
5	CHEVRON MAKASSAR LTD	MAKASSAR	51	423.313.463	414.921.584	8.391.879
6	CHEVRON PACIFIC INDONESIA	ROKAN BLOCK	016	4.251.824.519	4.030.541.473	221.283.046
7	CHEVRON PACIFIC INDONESIA	SIAK BLOCK	092	19.976.133	19.625.161	350.972
8	CHEVRON PACIFIC INDONESIA	FRON MOUNTAIN KUANTAN BLOCK	018	5.020.314	5.020.314	0
9	CITIC SERAM ENERGY LIMITED	BULA SERAM	020	109.063.207	95.918.389	13.144.818
10	CNOOC SES LTD	CNOOC SES LTD	011	1.413.284.236	1.226.235.127	187.049.109
	CNOOC SES LTD EX MAXUS	CNOOC SES LTD	111	112.406.217	112.406.217	0
11	CONOCOPHILLIPS (GRISSIK) LTD.	CORRIDOR SOUTHERN SUMATERA (PSC)	012	878.624.913	803.327.550	75.297.363
12	CONOCOPHILLIPS (SOUTH JAMBI) LTD	SOUTH JAMBI B SOUTH SUMATERA (PSC)	074	47.542.136	16.241.794	31.300.342
13	CONOCOPHILLIPS INDONESIA INC. LTD.	SOUTH NATUNA SEA BLOCK B (PSC)	017	2.456.983.493	2.295.443.071	161.540.422
14	EMP KANGEAN LIMITED	KANGEAN BLOCK	062	338.591.247	311.891.605	26.699.642
15	ENERGY EQUITY EPIC PTY LTD	SENGKANG	003	18.227.227	17.835.725	391.502
16	EXXONMOBIL OIL INDONESIA	BEE BLOCK	019	1.516.195.644	1.478.865.508	37.330.136
17	JOB PERTAMINA - COSTA INT'L LTD	GEBANG BLOCK	034	41.439.062	40.658.531	780.531
18	JOB PERTAMINA - HESS JAMBI MERANG	JAMBI MERANG (OWN OPERATION)	050	285.588	124.025	161.563
19	JOB PERTAMINA - MEDCO E&P TOMORI SULAWESI	SENORO TOILI BLOCK	107	8.539.159	4.854.831	3.684.328
20	JOB PERTAMINA - PETROCHINA EAST JAVA	TUBAN BLOCK + SUKOWATI	022	104.030.237	92.997.496	11.032.741
21	JOB PERTAMINA - PETROCHINA SALAWATI	SALAWATI ISLAND IRIAN JAYA	081	27.636.194	23.543.399	4.092.795
22	JOB PERTAMINA - TALISMAN (OK) LTD	OGAN KOMERING - SUMATRA SELATAN	044	52.799.674	47.416.241	5.383.433
23	KALREZ PETROLEUM (SERAM) LTD	BULA SERAM	036	7.910.011	7.282.488	627.523
24	KODECO ENERGY CO. LTD.	WEST MADURA	069	61.994.121	51.963.762	10.030.359
25	KONDUR PETROLEUM S.A	MALACCA STRAIT	033	281.187.451	272.976.026	8.211.425
26	LAPINDO BRANTAS, INC.	BRANTAS BLOCK	021	22.554.906	15.367.180	7.187.726
27	MEDCO E&P INDONESIA	SOUTH AND CENTRAL SUMATERA BLOCK	168	201.951.803	178.598.667	23.353.136
28	MEDCO E&P LEMATANG	LEMATANG BLOCK	031	6.101.183	6.101.183	0
29	MEDCO E&P MALAKA	BLOCK A	004	10.181.911	10.178.659	3.252
30	MEDCO E&P RIMAU	BARISAN RIMAU BLOCK	067	142.657.684	114.859.500	27.798.184
31	MEDCO E&P TARAKAN	TARAKAN BLOCK	078	29.298.115	26.627.611	2.670.504
32	MOBIL EXPLORATION INDONESIA INC.	NSO BLOCK	027	473.845.075	447.360.864	26.484.211
33	MOBIL PASE INC.	PASE BLOCK	066	73.454.926	50.836.787	22.618.139
34	PEARLOIL (TUNGKAL) LTD	TUNGKAL PSC	002	13.965.744	6.432.271	7.533.473
35	PERTAMINA EP	INDONESIA (ALL REGION)	000	389.968.146	73.446.827	316.521.319
36	PETROCHINA INTERNATIONAL BANGKO LTD	BANGKO BLOCK	046	880.044	473.145	406.899
37	PETROCHINA INTERNATIONAL SALAWATI LTD	SALAWATI BASIN, IRIAN JAYA	042	122.377.515	117.415.167	4.962.348
	PETROCHINA INTERNATIONAL SALAWATI LTD Z	SALAWATI BASIN, IRIAN JAYA	942	7.594.758	7.594.758	0

DATA NILAI ASET KONTRAKTOR KONTRAK KERJA SAMA BPMIGAS
PER 31 DESEMBER 2007

38	PETROCHINA INT'L JABUNG LTD	JABUNG BLOCK	046	558.803.369	272.164.216	286.639.153
39	PETROSELAT LTD	SELAT PANJANG BLOCK RIAU	070	3.914.054	2.479.408	1.434.646
40	PREMIER OIL NATUNA SEA BV	NATUNA SEA BLOCK A	014	435.983.964	411.014.865	24.969.099
41	SANTOS (MADURA) PTY LTD	MADURA OFFSHORE BLOCK	108	28.174.157	5.353.090	22.821.067
42	STARENERGY	KAKAP	025	367.442.773	366.319.244	1.123.529
43	TOTAL E&P INDONESIE MAHAKAM	MAHAKAM	013	4.639.779.979	3.129.134.962	1.510.645.017
44	TOTAL E&P INDONESIE TENGAH	TENGAH BLOCK	015	15.827.636	1.692.773	14.134.863
45	VICO INDONESIA Z CAT EX HUFFCO	EAST KALIMANTAN	947	31.061.115	31.061.115	0
	VIRGINIA CO INDONESIA	NILAM BLOCK	147	373.795.058	353.449.217	20.345.841
	VIRGINIA CO INDONESIA	EAST KALIMANTAN	047	787.029.433	757.792.031	29.237.402
JUMLAH DALAM USD				**24.642.323.399**	**21.318.415.653**	**3.323.907.746**
JUMLAH DALAM RUPIAH				**232.106.044.095.181**	**200.798.157.035.607**	**31.307.887.059.574**

B. KKKS NON PRODUKSI

NO	NAMA OPERATOR	BLOK AREA	KODE	NILAI PEROLEHAN	AKUMULASI DEPRESIASI	NILAI BUKU
1	ANADARKO	NORTH EAST MADURA II	000	30.121	0	30.121
2	ANADARKO	PAPALANG	000	104.573	0	104.573
3	ANADARKO	POPODI	000	211.939	0	211.939
4	ANADARKO	BUNGAMAS	000	107.635	0	107.635
5	BP TANGGUH BERAU	TANGGUH BERAU	055	1.229.383	0	1.229.383
6	BRITISH GAS EXPLORATION & PRODUCTION	MUTURI BLOCK IRIAN JAYA	032	333.351	0	333.351
7	ELNUSA BANGKANAI ENERGY LTD	BANGKANAI BLOCK1	064	25.050	0	25.050
8	ENI INDONESIA	KREUNG MANE	059	310.766	0	310.766
9	ENI INDONESIA	BUKAT - OFFSHORE KALTIM	072	425.467	0	425.467
10	ENI INDONESIA	AMBALAT	037	4.310	0	4.310
11	ESSO NATUNA	NATUNA BLOCK	000	8.454.202	0	8.454.202
12	HUSKY OIL	MADURA	000	553.911	0	553.911
13	KALILA (BENTU) LIMITED	BENTU BLOCK	098	37.395	0	37.395
14	KALILA (KORINCI BARU) LTD	KORINCI BLOCK	099	7.987.547	0	7.987.547
15	NATIONAL PETROLEUM	ROMBEBAI	000	431.503	0	431.503
16	SANTOS (SAMPANG) PTY LTD	SAMPANG BLOCK	106	13.346.340	0	13.346.340
JUMLAH DALAM USD				**33.593.493**	0	33.593.493
JUMLAH DALAM RUPIAH				316.417.110.567		316.417.110.567
JUMLAH A + B DALAM USD				**24.675.916.892**	**21.318.415.653**	**3.357.501.239**
JUMLAH A + B DALAM RUPIAH				**232.422.461.205.748**	**200.798.157.035.607**	**31.624.304.170.141**

KETERANGAN

1) Jumlah dalam Rupiah berdasarkan konversi kurs tengah BI tanggal 31 Desember 2007 sebesar Rp9.419/USD
2) Untuk status aset non produksi merupakan tahap eksplorasi sehingga belum memperhitungkan Biaya Depresiasi

Surat Berharga Negara Jangka Pendek
Per 31 Desember 2007

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
FIXED RATE BOND			**1.100.000.000.000**		**(4.196.162.000)**	**1.095.803.838.000**
1	FR0041	15/11/2008	1.100.000.000.000	9,25000%	(4.196.162.000)	1.095.803.838.000
SBN TANPA BUNGA			**10.168.800.000.000**		**(536.649.842.000)**	**9.632.150.158.000**
1	SPN2008052801	28/05/2008	4.168.800.000.000	-	(133.390.042.000)	4.035.409.958.000
2	ZC0001	20/11/2008	6.000.000.000.000	-	(403.259.800.000)	5.596.740.200.000
VARIABLE RATE BOND			**25.746.389.000.000**		-	**25.746.389.000.000**
1	VR0013	25/01/2008	7.698.286.000.000	7,83333%	-	7.698.286.000.000
2	VR0014	25/08/2008	9.258.632.000.000	7,83333%	-	9.258.632.000.000
3	VR0015	25/12/2008	8.789.471.000.000	7,83333%	-	8.789.471.000.000
SURAT UTANG KEPADA BI			**2.369.793.220.197**		-	**2.369.793.220.197**
1	SU005	10/06/2008	609.296.200.000	7,83333%	-	609.296.200.000
2	SU005	10/12/2008	609.296.200.000	7,83333%		609.296.200.000
3	SU007	01/02/2008	561.561.375.706	0,10000%		561.561.375.706
4	SU007	01/08/2008	589.639.444.491	0,10000%	-	589.639.444.491
TOTAL			**39.384.982.220.197**		**(540.846.004.000)**	**38.844.136.216.197**

Utang Bunga (*Accrued Interest*) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2007

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)	Accrued Interest
FIXED RATE BOND			**294.452.587.000.000**		**7.695.068.729.841**
1	FR0002	15/06/2009	15.324.493.000.000	14,00000%	99.655.177.979
2	FR0010	15/03/2010	9.983.678.000.000	13,15000%	389.523.180.848
3	FR0011	15/05/2010	800.000.000.000	13,55000%	13.996.800.000
4	FR0012	15/05/2010	1.725.141.000.000	12,62500%	28.123.248.582
5	FR0013	15/09/2010	4.733.601.000.000	15,42500%	216.637.983.366
6	FR0014	15/11/2010	1.205.947.000.000	15,57500%	24.252.800.117
7	FR0015	15/02/2011	5.620.938.000.000	13,40000%	284.498.155.932
8	FR0016	15/08/2011	4.118.937.000.000	13,45000%	209.254.356.411
9	FR0017	15/01/2012	8.245.063.000.000	13,15000%	500.862.842.061
10	FR0018	15/07/2012	5.915.062.000.000	13,17500%	360.008.418.506
11	FR0019	15/06/2013	11.856.341.000.000	14,25000%	78.477.121.079
12	FR0020	15/12/2013	11.856.341.000.000	14,27500%	78.607.540.830
13	FR0021	15/12/2010	2.474.000.000.000	14,50000%	16.662.390.000
14	FR0022	15/09/2011	7.331.000.000.000	12,00000%	261.012.924.000
15	FR0023	15/12/2012	13.432.500.000.000	11,00000%	68.626.642.500
16	FR0024	15/10/2010	4.404.000.000.000	12,00000%	112.627.896.000
17	FR0025	15/10/2011	6.749.000.000.000	10,00000%	143.827.939.000
18	FR0026	15/10/2014	11.382.000.000.000	11,00000%	266.828.226.000
19	FR0027	15/06/2015	9.100.000.000.000	9,50000%	40.158.300.000
20	FR0028	15/07/2017	10.100.000.000.000	10,00000%	466.579.600.000
21	FR0030	15/05/2016	5.330.000.000.000	10,75000%	73.980.400.000
22	FR0031	15/11/2020	11.469.000.000.000	11,00000%	162.894.207.000
23	FR0032	15/07/2018	1.560.000.000.000	15,00000%	108.097.080.000
24	FR0033	15/03/2013	9.945.000.000.000	12,50000%	368.840.160.000
25	FR0034	15/06/2021	10.379.000.000.000	12,80000%	61.703.155.000
26	FR0035	15/06/2022	6.600.000.000.000	12,90000%	39.547.200.000
27	FR0036	15/09/2019	3.711.000.000.000	11,50000%	126.623.031.000
28	FR0037	15/09/2026	2.450.000.000.000	12,00000%	87.229.800.000
29	FR0038	15/08/2018	3.083.000.000.000	11,60000%	135.081.645.000
30	FR0039	15/08/2023	4.175.000.000.000	11,75000%	185.294.850.000
31	FR0040	15/09/2025	12.914.000.000.000	11,00000%	421.474.218.000
32	FR0041	15/11/2008	1.100.000.000.000	9,25000%	13.138.400.000
33	FR0042	15/07/2027	14.426.000.000.000	10,25000%	683.085.526.000
34	FR0043	15/07/2022	12.653.000.000.000	10,25000%	599.132.203.000
35	FR0044	15/09/2024	5.589.000.000.000	10,00000%	165.825.630.000
36	FR0045	15/05/2037	6.400.000.000.000	9,75000%	80.569.600.000
37	FR0046	15/07/2023	5.359.000.000.000	9,50000%	235.185.074.000
38	FR0047	15/02/2028	7.850.000.000.000	10,00000%	296.510.200.000
39	FR0048	15/09/2018	4.217.000.000.000	9,00000%	112.606.551.000
40	ORI001	09/08/2009	3.283.650.000.000	12,05000%	24.463.192.500
41	ORI002	28/03/2010	6.233.200.000.000	9,28000%	6.220.733.600
42	ORI003	12/09/2011	9.367.695.000.000	9,40000%	47.344.330.530

Utang Bunga (*Accrued Interest*) - Surat Berharga Negara
Per 31 Desember 2007

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle	Rate (%)	Accrued Interest
SBN TANPA BUNGA			**14.668.800.000.000**		**-**
1	SPN2008052801	28/05/2008	4.168.800.000.000	-	-
2	ZC0001	20/11/2008	6.000.000.000.000	-	-
3	ZC0002	20/09/2009	3.000.000.000.000	-	-
4	ZC0003	20/11/2012	1.500.000.000.000	-	-
VARIABLE RATE BOND			**168.625.188.000.000**		**1.479.593.953.711**
1	VR0013	25/01/2008	7.698.286.000.000	7,83333%	111.432.689.850
2	VR0014	25/08/2008	9.258.632.000.000	7,83333%	72.920.985.632
3	VR0015	25/12/2008	8.789.471.000.000	7,83333%	13.236.943.326
4	VR0016	25/07/2009	8.958.717.000.000	7,83333%	129.677.428.575
5	VR0017	25/06/2011	3.458.666.000.000	7,83333%	5.208.750.996
6	VR0018	25/10/2012	516.483.000.000	7,83333%	7.476.091.425
7	VR0019	25/12/2014	11.406.226.000.000	7,83333%	17.177.776.356
8	VR0020	25/04/2015	9.899.007.000.000	7,83333%	143.288.126.325
9	VR0021	25/11/2015	7.546.328.000.000	7,83333%	59.434.879.328
10	VR0022	25/03/2016	9.666.749.000.000	7,83333%	14.558.123.994
11	VR0023	25/10/2016	8.652.056.000.000	7,83333%	125.238.510.600
12	VR0024	25/02/2017	9.909.300.000.000	7,83333%	78.045.646.800
13	VR0025	25/09/2017	6.909.300.000.000	7,83333%	10.405.405.800
14	VR0026	25/01/2018	5.442.142.000.000	7,83333%	78.775.005.450
15	VR0027	25/07/2018	5.442.142.000.000	7,83333%	78.775.005.450
16	VR0028	25/08/2018	7.033.994.000.000	7,83333%	55.399.736.744
17	VR0029	25/08/2019	12.212.320.000.000	7,83333%	96.184.232.320
18	VR0030	25/12/2019	10.503.015.000.000	7,83333%	15.817.540.590
19	VR0031	25/07/2020	25.322.354.000.000	7,83333%	366.541.074.150
SURAT UTANG KEPADA BI			**259.378.964.837.845**		**275.280.862.916**
1	SU002	01/04/2025	20.000.000.000.000	1,00000%	50.410.958.904
2	SU004	01/12/2025	53.779.500.000.000	3,00000%	137.027.219.178
3	SU005	10/12/2009	2.437.184.800.000	7,83333%	11.507.068.543
4	SU007	01/08/2025	53.817.977.228.878	0,10000%	22.559.316.482
5	SRBI01	01/08/2033	129.344.302.808.967	0,10000%	53.776.299.809
INTERNATIONAL BOND			**65.933.000.000.000**		**1.462.042.199.972**
1	RI0014	10/03/2014	9.419.000.000.000	6,75000%	197.372.039.838
2	RI0015	20/04/2015	9.419.000.000.000	7,25000%	136.202.347.477
3	RI0016	15/01/2016	8.477.100.000.000	7,50000%	293.703.870.235
4	RI0017	09/03/2017	9.419.000.000.000	6,87500%	202.806.074.467
5	RI0035	12/10/2035	15.070.400.000.000	8,50000%	283.496.462.259
6	RI0037	17/02/2037	14.128.500.000.000	6,62500%	348.461.405.696
TOTAL			**803.058.539.837.845**		**10.911.985.746.440**

UTANG KEPADA PIHAK KETIGA

PER 31 DESEMBER 2007 DAN 31 DESEMBER 2006

NO	BA	KEMENTERIAN NEGARA/LEMBAGA	2007	2006
1	005	MAHKAMAH AGUNG	21.141.034	-
2	007	SEKRETARIAT NEGARA	7.788.887.342	-
3	010	DEPARTEMEN DALAM NEGERI	1.522.372.224	-
4	012	DEPARTEMEN PERTAHANAN	332.000.000	-
5	013	DEPARTEMEN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA RI	37.946.637.516	17.049.958.838
6	015	DEPARTEMEN KEUANGAN	1.881.258.267.370	-
7	020	DEPARTEMEN ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL	26.158.283.489	-
8	024	DEPARTEMEN KESEHATAN	176.905.450.392	-
9	026	DEPARTEMEN TENAGA KERJA DAN TRANSMIGRASI	-	14.617.424
10	041	KEMENTERIAN NEGARA BADAN USAHA MILIK NEGARA	278.315.547.190	84.500.000
11	051	LEMBAGA SANDI NEGARA	7.345.798	
12	060	KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA	16.557.102.589	76.186.434.426
13	074	KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA	3.719.760	-
14	081	BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI	5.704.815.015	-
15	093	KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI	217.786.000	-
16	094	BADAN REHABILITASI DAN REKONSTRUKSI NAD-NIAS	105.954.502.049	2.425.944.284.122
17	095	DEWAN PERWAKILAN DAERAH (DPD)	276.077.152	-
JUMLAH			**2.538.969.934.920**	**2.519.279.794.810**

Utang Obligasi Dalam Negeri
Per 31 Desember 2007

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
FIXED RATE BOND			**293.352.587.000.000**		**(3.001.386.028.000)**	**290.351.200.972.000**
1	FR0002	15/06/2009	15.324.493.000.000	14,00000%	-	15.324.493.000.000
2	FR0010	15/03/2010	9.983.678.000.000	13,15000%	-	9.983.678.000.000
3	FR0011	15/05/2010	800.000.000.000	13,55000%	-	800.000.000.000
4	FR0012	15/05/2010	1.725.141.000.000	12,62500%	-	1.725.141.000.000
5	FR0013	15/09/2010	4.733.601.000.000	15,42500%	-	4.733.601.000.000
6	FR0014	15/11/2010	1.205.947.000.000	15,57500%	-	1.205.947.000.000
7	FR0015	15/02/2011	5.620.938.000.000	13,40000%	-	5.620.938.000.000
8	FR0016	15/08/2011	4.118.937.000.000	13,45000%	-	4.118.937.000.000
9	FR0017	15/01/2012	8.245.063.000.000	13,15000%	38.038.804.000	8.283.101.804.000
10	FR0018	15/07/2012	5.915.062.000.000	13,17500%	-	5.915.062.000.000
11	FR0019	15/06/2013	11.856.341.000.000	14,25000%	-	11.856.341.000.000
12	FR0020	15/12/2013	11.856.341.000.000	14,27500%	-	11.856.341.000.000
13	FR0021	15/12/2010	2.474.000.000.000	14,50000%	(14.787.192.000)	2.459.212.808.000
14	FR0022	15/09/2011	7.331.000.000.000	12,00000%	(28.692.692.000)	7.302.307.308.000
15	FR0023	15/12/2012	13.432.500.000.000	11,00000%	(273.163.497.000)	13.159.336.503.000
16	FR0024	15/10/2010	4.404.000.000.000	12,00000%	(79.674.274.000)	4.324.325.726.000
17	FR0025	15/10/2011	6.749.000.000.000	10,00000%	(123.660.231.000)	6.625.339.769.000
18	FR0026	15/10/2014	11.382.000.000.000	11,00000%	(335.811.937.000)	11.046.188.063.000
19	FR0027	15/06/2015	9.100.000.000.000	9,50000%	(168.060.836.000)	8.931.939.164.000
20	FR0028	15/07/2017	10.100.000.000.000	10,00000%	(13.955.836.000)	10.086.044.164.000
21	FR0030	15/05/2016	5.330.000.000.000	10,75000%	(132.386.674.000)	5.197.613.326.000
22	FR0031	15/11/2020	11.469.000.000.000	11,00000%	(1.166.176.366.000)	10.302.823.634.000
23	FR0032	15/07/2018	1.560.000.000.000	15,00000%	(66.819.255.000)	1.493.180.745.000
24	FR0033	15/03/2013	9.945.000.000.000	12,50000%	(43.679.078.000)	9.901.320.922.000
25	FR0034	15/06/2021	10.379.000.000.000	12,80000%	222.883.135.000	10.601.883.135.000
26	FR0035	15/06/2022	6.600.000.000.000	12,90000%	(28.491.312.000)	6.571.508.688.000
27	FR0036	15/09/2019	3.711.000.000.000	11,50000%	(64.582.041.000)	3.646.417.959.000
28	FR0037	15/09/2026	2.450.000.000.000	12,00000%	(147.458.721.000)	2.302.541.279.000
29	FR0038	15/08/2018	3.083.000.000.000	11,60000%	(29.262.507.000)	3.053.737.493.000
30	FR0039	15/08/2023	4.175.000.000.000	11,75000%	(55.622.657.000)	4.119.377.343.000
31	FR0040	15/09/2025	12.914.000.000.000	11,00000%	172.633.907.000	13.086.633.907.000
32	FR0042	15/07/2027	14.426.000.000.000	10,25000%	(144.542.066.000)	14.281.457.934.000
33	FR0043	15/07/2022	12.653.000.000.000	10,25000%	(47.288.025.000)	12.605.711.975.000
34	FR0044	15/09/2024	5.589.000.000.000	10,00000%	(83.039.099.000)	5.505.960.901.000
35	FR0045	15/05/2037	6.400.000.000.000	9,75000%	(28.165.364.000)	6.371.834.636.000
36	FR0046	15/07/2023	5.359.000.000.000	9,50000%	(159.264.618.000)	5.199.735.382.000
37	FR0047	15/02/2028	7.850.000.000.000	10,00000%	(68.358.992.000)	7.781.641.008.000
38	FR0048	15/09/2018	4.217.000.000.000	9,00000%	(131.998.604.000)	4.085.001.396.000
39	ORI001	09/08/2009	3.283.650.000.000	12,05000%	-	3.283.650.000.000
40	ORI002	28/03/2010	6.233.200.000.000	9,28000%	-	6.233.200.000.000
41	ORI003	12/09/2011	9.367.695.000.000	9,40000%	-	9.367.695.000.000

Utang Obligasi Dalam Negeri
Per 31 Desember 2007

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Principle Outstanding	Rate (%)	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
SBN TANPA BUNGA			**4.500.000.000.000**		**(949.726.369.000)**	**3.550.273.631.000**
1	ZC0002	20/09/2009	3.000.000.000.000	-	(398.715.892.000)	2.601.284.108.000
2	ZC0003	20/11/2012	1.500.000.000.000	-	(551.010.477.000)	948.989.523.000
VARIABLE RATE BOND			**142.878.799.000.000**		-	**142.878.799.000.000**
1	VR0016	25/07/2009	8.958.717.000.000	7,83333%	-	8.958.717.000.000
2	VR0017	25/06/2011	3.458.666.000.000	7,83333%	-	3.458.666.000.000
3	VR0018	25/10/2012	516.483.000.000	7,83333%	-	516.483.000.000
4	VR0019	25/12/2014	11.406.226.000.000	7,83333%	-	11.406.226.000.000
5	VR0020	25/04/2015	9.899.007.000.000	7,83333%	-	9.899.007.000.000
6	VR0021	25/11/2015	7.546.328.000.000	7,83333%	-	7.546.328.000.000
7	VR0022	25/03/2016	9.666.749.000.000	7,83333%	-	9.666.749.000.000
8	VR0023	25/10/2016	8.652.056.000.000	7,83333%	-	8.652.056.000.000
9	VR0024	25/02/2017	9.909.300.000.000	7,83333%	-	9.909.300.000.000
10	VR0025	25/09/2017	6.909.300.000.000	7,83333%	-	6.909.300.000.000
11	VR0026	25/01/2018	5.442.142.000.000	7,83333%	-	5.442.142.000.000
12	VR0027	25/07/2018	5.442.142.000.000	7,83333%	-	5.442.142.000.000
13	VR0028	25/08/2018	7.033.994.000.000	7,83333%	-	7.033.994.000.000
14	VR0029	25/08/2019	12.212.320.000.000	7,83333%	-	12.212.320.000.000
15	VR0030	25/12/2019	10.503.015.000.000	7,83333%	-	10.503.015.000.000
16	VR0031	25/07/2020	25.322.354.000.000	7,83333%	-	25.322.354.000.000
SURAT UTANG KEPADA BI			**257.009.171.617.648**		-	**257.009.171.617.648**
1	SU002	01/04/2025	20.000.000.000.000	1,00000%	-	20.000.000.000.000
2	SU004	01/12/2025	53.779.500.000.000	3,00000%	-	53.779.500.000.000
3	SU005	10/12/2009	1.218.592.400.000	7,83333%		1.218.592.400.000
4	SU007	01/08/2025	52.666.776.408.681	0,10000%	-	52.666.776.408.681
5	SRBI01	01/08/2033	129.344.302.808.967	0,10000%	-	129.344.302.808.967
TOTAL			**697.740.557.617.648**		**(3.951.112.397.000)**	**693.789.445.220.648**

Utang Obligasi Luar Negeri
Per 31 Desember 2007

(Dalam Rupiah)

No.	Seri	Maturity Date	Issued Principle Outstanding	Rate (%)	Accrued Indexation	Indexed Principle Outstanding	Unamortized Prem(+)/Disc(-)	BookValue
INTERNATIONAL BOND								
1	RI0014	10/03/2014	8.554.000.000.000	6,75000%	865.000.000.000	9.419.000.000.000	(39.358.931.000)	9.379.641.069.000
2	RI0015	20/04/2015	9.613.000.000.000	7,25000%	(194.000.000.000)	9.419.000.000.000	(56.969.888.000)	9.362.030.112.000
3	RI0016	15/01/2016	9.099.000.000.000	7,50000%	(621.900.000.000)	8.477.100.000.000	(54.573.154.000)	8.422.526.846.000
4	RI0017	09/03/2017	9.370.000.000.000	6,87500%	49.000.000.000	9.419.000.000.000	(68.812.257.000)	9.350.187.743.000
5	RI0035	12/10/2035	15.436.000.000.000	8,50000%	(365.600.000.000)	15.070.400.000.000	1.056.653.941.000	16.127.053.941.000
6	RI0037	17/02/2037	13.575.648.587.500	6,62500%	552.851.412.500	14.128.500.000.000	(210.724.398.000)	13.917.775.602.000
TOTAL			**65.647.648.587.500**		**285.351.412.500**	**65.933.000.000.000**	**626.215.313.000**	**66.559.215.313.000**

* Kurs Tengah BI pada tanggal pelaporan (31 Des 2007) adalah Rp9419/USD,-

Daftar 34

LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN PENGELOLAAN SURAT UTANG NEGARA TAHUN ANGGARAN 2007

I. Pendahuluan

Laporan pertanggungjawaban pengelolaan Surat Utang Negara (SUN) ini disusun untuk memenuhi amanat Pasal 16 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2002 tentang Surat Utang Negara dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 76 Tahun 2005 tentang Tata Cara Penatausahaan, Pertanggungjawaban, dan Publikasi Informasi atas Pengelolaan Surat Utang Negara. Dalam Pasal 16 Undang-Undang dimaksud, disebutkan bahwa:

(1) Menteri wajib menyelenggarakan penatausahaan dan membuat pertanggungjawaban atas pengelolaan Surat Utang Negara dan dana yang dikelola;

(2) Pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) disampaikan sebagai bagian dari pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara.

Selain itu, laporan ini juga disusun agar seluruh pihak yang berkepentingan dapat mengetahui secara jelas dan transparan informasi terkait dengan pengelolaan Surat Utang Negara. Hal ini sejalan dengan komitmen Pemerintah untuk mengelola keuangan negara secara transparan, profesional dan bertanggung jawab. Seluruh angka dan data yang digunakan dalam laporan ini meliputi realisasi selama satu tahun anggaran yang dimulai 1 Januari 2007 dan berakhir 31 Desember 2007, kecuali secara jelas dinyatakan lain.

II. Portofolio SUN

Surat Utang Negara berdasarkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2004 adalah surat berharga yang berupa surat pengakuan utang dalam mata uang Rupiah maupun valuta asing yang dijamin pembayaran bunga dan pokoknya oleh Negara Republik Indonesia, sesuai dengan masa berlakunya. Tujuan penerbitan SUN ialah untuk: (1) membiayai defisit APBN, (2) menutup kekurangan kas jangka pendek, dan (3) mengelola portofolio utang negara, sehingga tujuan strategis yang hendak dicapai yaitu mengoptimalkan pengelolaan utang dan perumusan pembiayaan defisit agar diperoleh sumber pembiayaan dengan biaya rendah dan tingkat risiko yang dapat ditolerir dapat dilaksanakan dengan baik.

A. Jenis SUN

Secara umum SUN dapat dibedakan atas Surat Perbendaharaan Negara (SPN) yang berjangka waktu sampai dengan 12 bulan dan Obligasi Negara (ON) yang berjangka waktu lebih dari 12 bulan. Menurut denominasi mata uangnya, ON yang telah diterbitkan Pemerintah dapat dikelompokkan ke dalam dua kelompok, yaitu ON berdenominasi Rupiah dan ON berdenominasi valuta asing. Menurut jenis tingkat bunganya, ON dapat dikelompokkan ke dalam ON dengan tingkat bunga tetap dan ON dengan tingkat bunga mengambang. Selain itu, Pemerintah juga telah menerbitkan ON tanpa bunga yaitu *Zero Coupon* (ZC).

1. Obligasi Negara Berdenominasi Rupiah

Obligasi negara berdenominasi Rupiah dapat dipisahkan ke dalam beberapa jenis, yaitu:

a. Obligasi berbunga tetap (*fixed rate bonds* – FR dan ORI)

Obligasi jenis ini memiliki tingkat kupon yang ditetapkan pada saat penerbitan dan dibayarkan secara periodik. Kupon obligasi berbunga tetap seri FR (*Fixed Rate*) dibayarkan setiap enam bulan sekali (*semi-annual*) sementara kupon ORI (Obligasi Ritel Negara) dibayarkan sebulan sekali (*monthly*). Penerbitan ORI secara khusus akan dijelaskan pada bagian lainnya.

Berdasarkan posisi akhir tahun 2007, terdapat 39 seri FR dengan tingkat kupon berkisar antara 9% (FR0048, jatuh tempo 15 September 2018) sampai 15,575% (FR0014, jatuh tempo 15 Nopember 2010), dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2008 sampai 2037. Selain itu terdapat tiga seri ORI, yaitu ORI001, ORI002, dan ORI003 dengan tingkat kupon berkisar antara 9,28 % sampai 12,05% dengan masa jatuh tempo berkisar antara tahun 2009 sampai dengan tahun 2011. Baik obligasi jenis FR maupun ORI dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

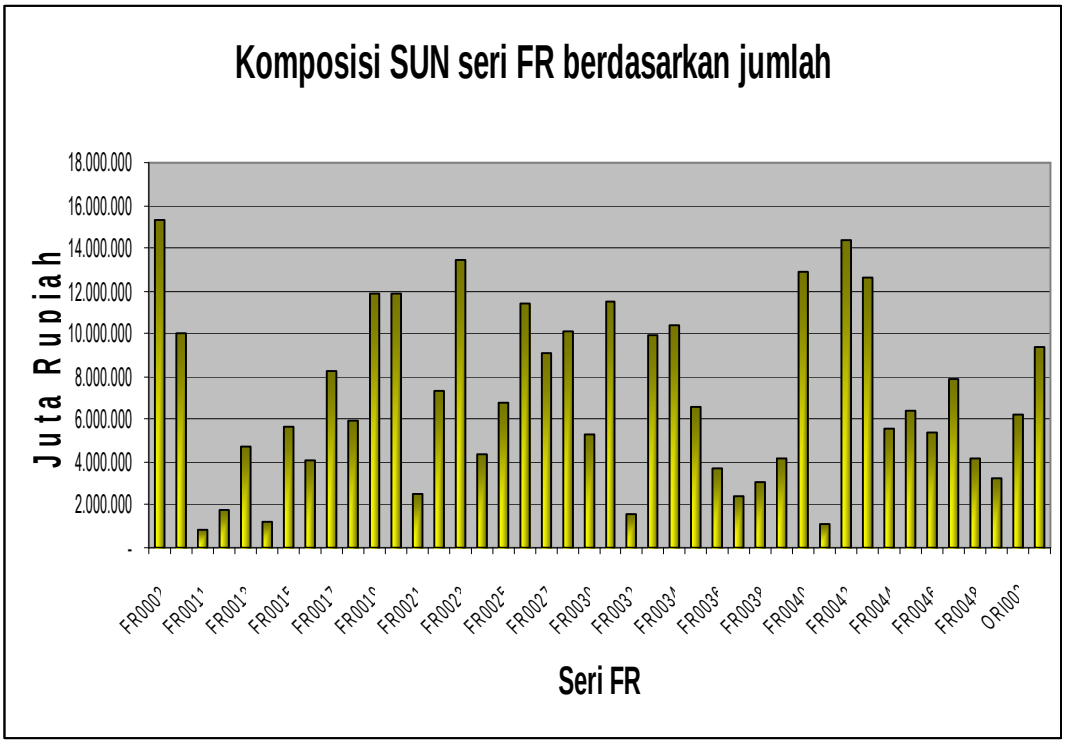

Grafik 32: Komposisi SUN seri FR menurut Jumlah TA 2007

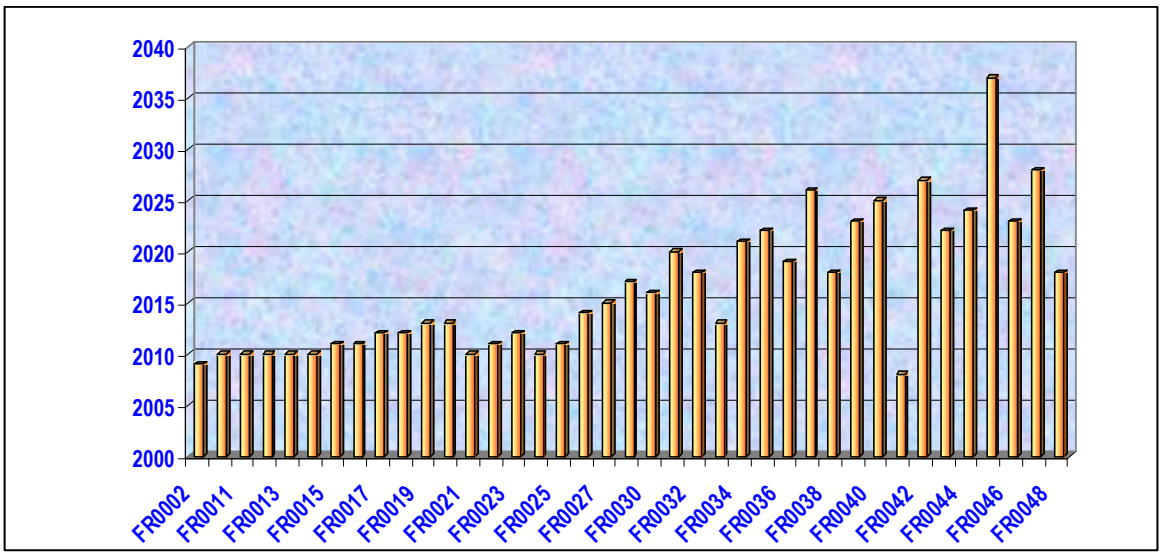

Grafik 33: Struktur Jatuh Tempo Obligasi FR TA 2007

b. Obligasi tanpa bunga (*zero coupon* – ZC)

Zero coupon adalah obligasi negara tanpa bunga yang dijual secara diskonto. Penerbitan perdana *zero coupon bond* dilakukan oleh pemerintah pada tanggal 28 Agustus 2007. Seri yang diterbitkan adalah seri ZC0001 yang jatuh tempo 20 November 2008 (tenor 15 bulan). Mengingat tingginya minat investor terhadap *zero coupon bond*, pemerintah kembali menerbitkan seri ZC0002 pada tanggal 18 September 2007 dengan tenor 24 bulan. Pada penerbitan *zero coupon bond* berikutnya tanggal 20 November 2007, pemerintah menerbitkan ZC0003 dengan waktu jatuh tempo yang lebih panjang yaitu 5 tahun. Secara keseluruhan selama tahun 2007, pemerintah telah menerbitkan 3 seri *zero coupon bond*, dengan total *outstanding* sebesar Rp10,50 triliun.

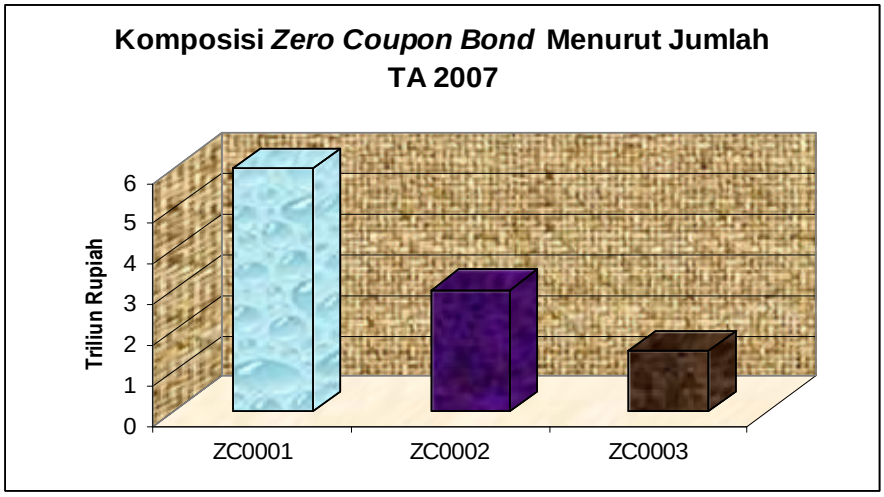

Grafik 34: Komposisi *Zero Coupon Bond* Menurut Jumlah TA 2007

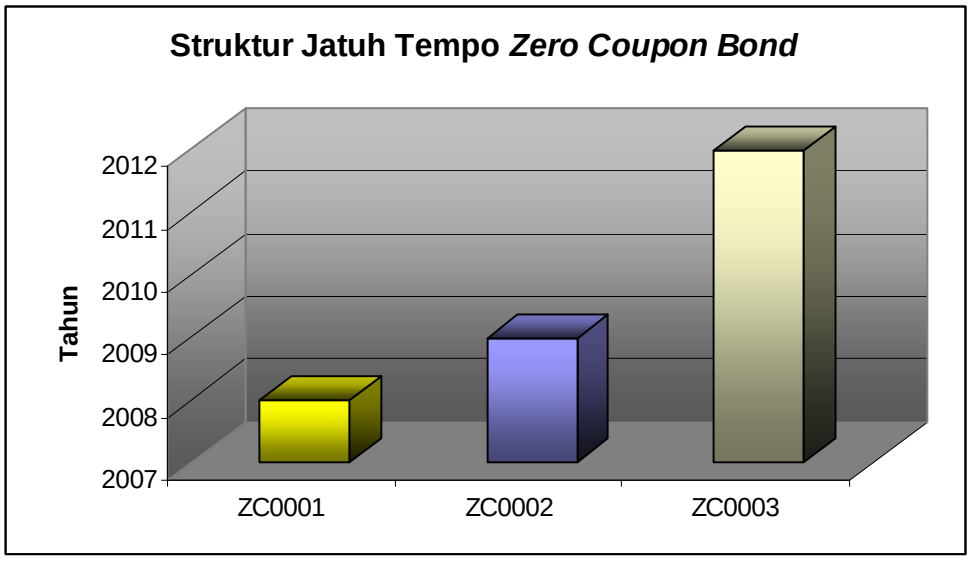

Grafik 35: Struktur Jatuh Tempo *Zero Coupon Bond* TA 2007

c. Obligasi berbunga mengambang (*variable rate bonds* – VR)

Obligasi berbunga mengambang memiliki tingkat kupon yang ditetapkan secara periodik berdasarkan tingkat bunga SBI (Sertifikat Bank Indonesia) berjangka 3 bulan. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 3 (tiga) bulan. Sampai akhir tahun 2007, terdapat 19 seri VR yang masa

jatuh temponya berkisar antara tahun 2008 sampai dengan 2020 dengan total *outstanding* sebesar Rp168 triliun. Obligasi jenis VR dapat diperdagangkan dan dipindahtangankan kepemilikannya di pasar sekunder.

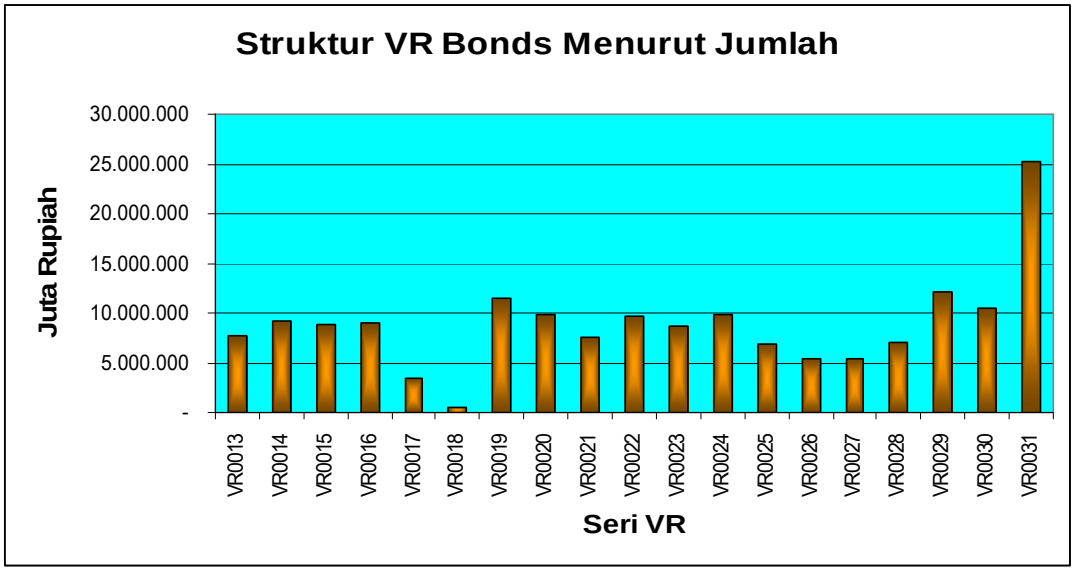

Grafik 36: Komposisi Jumlah Obligasi VR TA 2007

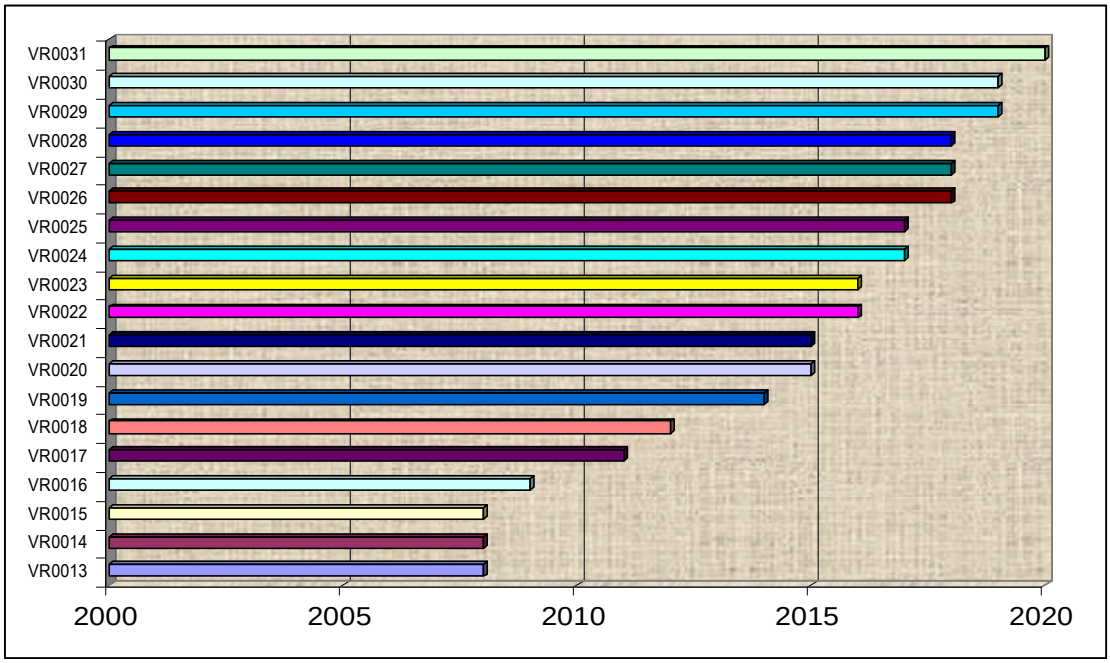

Grafik 37: Struktur Jatuh Tempo Obligasi VR TA 2007

d. Surat utang kepada BI

Surat utang kepada Bank Indonesia pada akhir tahun 2007 terdiri atas empat seri Surat Utang (SU) yaitu SU002, SU004, SU005, dan SU007 serta satu seri *Special Rate Bank Indonesia* (SRBI01). Surat Utang (SU) diterbitkan dalam rangka penyelesaian bantuan likuiditas BI yang

dikucurkan oleh Bank Indonesia saat krisis moneter tahun 1998/1999. SRBI diterbitkan untuk pembiayaan kredit program. Kupon dibayarkan secara periodik setiap 6 (enam) bulan sekali, sementara pokok utang diamortisasi (dicicil) setiap enam bulan sekali secara proporsional atas dasar pokok utang. Pembayaran cicilan pokok dilakukan bersamaan dengan pembayaran bunga, dan dimulai setelah masa tenggang (*grace period*) berakhir. Pada akhir tahun 2007, total *outstanding* surat utang kepada BI adalah Rp259 triliun.

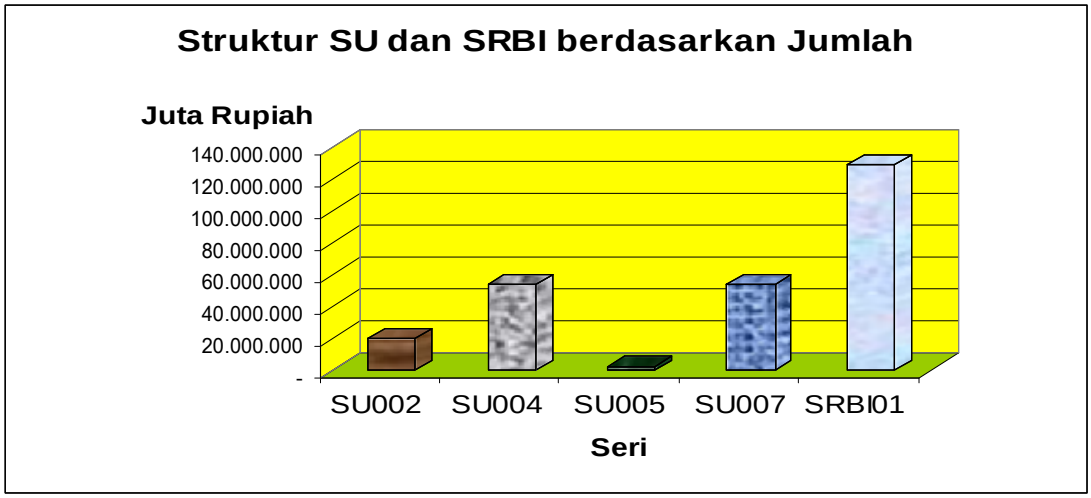

Grafik 38: Komposisi Surat Utang kepada BI (SU/SRBI) TA 2007

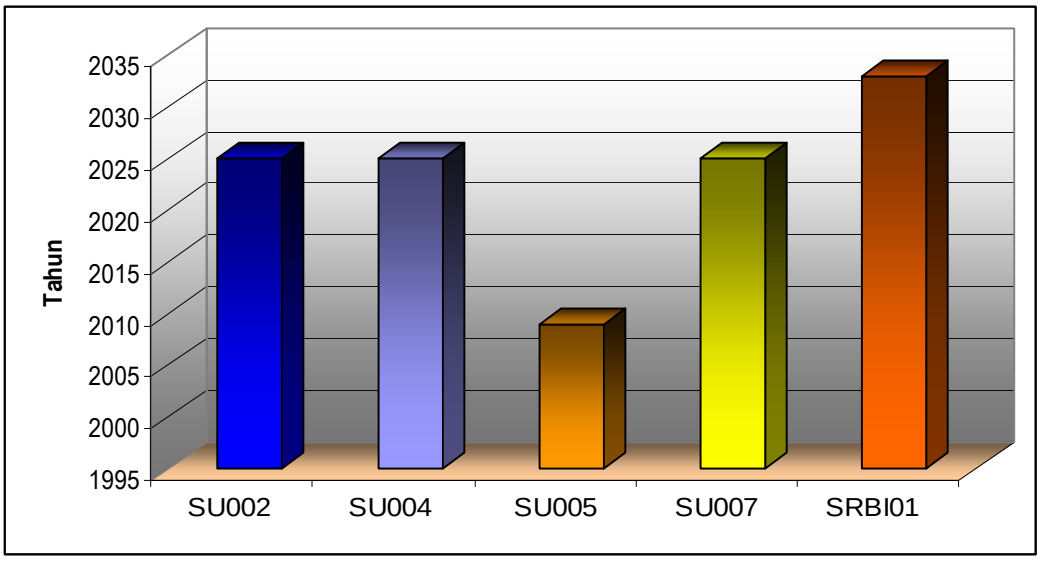

Grafik 39: Struktur Jatuh Tempo Surat Utang kepada BI (SU/SRBI) TA 2007

2. Surat Perbendaharaan Negara (SPN)

Penerbitan SPN mengacu kepada peraturan perundang-undangan yang telah ada yaitu: Undang-Undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara, Peraturan Menteri Keuangan nomor 26/PMK.08//2007 tentang Lelang Surat Utang Negara di Pasar Perdana, Pemerintah Nomor 11 tahun 2006 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan atas Diskonto SPN serta Peraturan Menteri Keuangan nomor 46/PMK.03/2007 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Penghasilan atas Diskonto SPN. Pada tanggal 28 Mei 2007, Pemerintah untuk pertama kalinya menerbitkan SPN dengan seri SPN2008052801. Sepanjang tahun 2007, Pemerintah telah menerbitkan SPN sebesar Rp4,16 triliun.

3. Obligasi Negara Berdenominasi Mata Uang Asing

Surat Utang Negara (SUN) saat ini telah menjadi sumber utama dalam pemenuhan target pembiayaan dalam APBN karena mempunyai pengaruh yang signifikan. Dalam rangka pemenuhan target tersebut pemerintah semaksimal mungkin berusaha terus menggali potensi sumber pembiayaan dari dalam negeri, yaitu dengan menerbitkan SUN berdenominasi Rupiah di pasar domestik. Namun, dengan pertimbangan beberapa hal seperti daya serap pasar obligasi dalam negeri yang masih terbatas dan kebutuhan untuk pemenuhan *benchmark* atas obligasi Indonesia dalam denominasi USD, maka Pemerintah memutuskan untuk melakukan penerbitan SUN dalam valuta asing di pasar internasional mengacu pada Undang-undang nomor 24 tahun 2002 tentang Surat Utang Negara juga berlandaskan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 15/PMK.08/2007 tanggal 19 Februari 1997 tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Menteri Keuangan Nomor 22/KMK.01/2004 tentang Penjualan Obligasi Negara Dalam Valuta Asing di Pasar Perdana Internasional.

Sepanjang tahun 2007, Pemerintah telah menerbitkan SUN valas sebanyak 1 kali yaitu seri INDO-37 sebesar USD1,5 miliar pada tanggal 7 Februari 2007. Obligasi ini memiliki kupon 6,625% dan akan jatuh tempo pada 17 Februari 2037

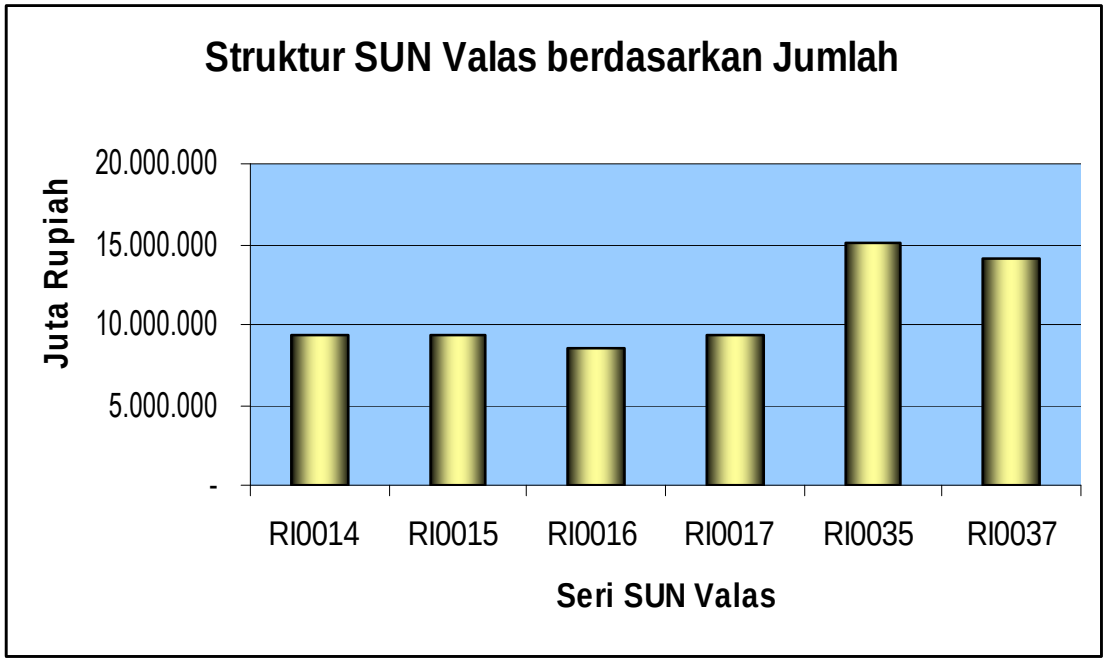

Grafik 40: Komposisi Jumlah per Seri *International Bonds*

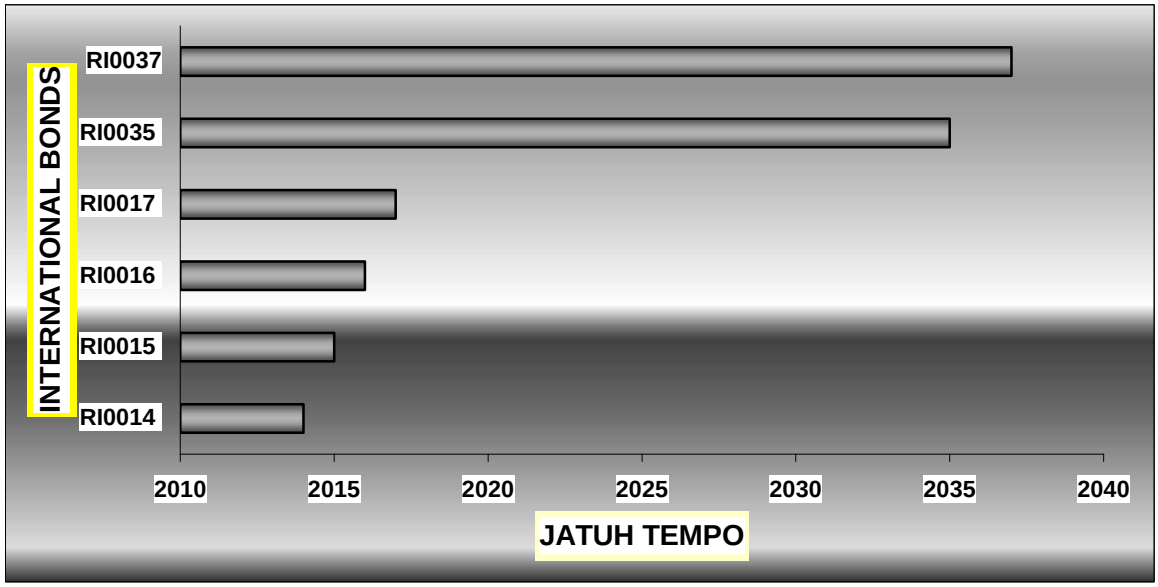

Grafik 41: Struktur Jatuh tempo *International Bonds*

B. Saldo SUN dan Perubahannya

Surat Utang Negara dapat berubah saldonya akibat adanya penerbitan baru, pelunasan, pembelian kembali atau oleh sebab lainnya. Posisi SUN per 31 Desember 2006 dan 31 Desember 2007 masing-masing dapat dilihat pada Lampiran 1 dan Lampiran 2. Adapun ringkasan perubahan posisi SUN tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 11: Ringkasan Perubahan Posisi SUN Tahun 2007

Obligasi Negara	31 Desember 2007 (Juta Rp)	31 Desember 2006 (Juta Rp)	Mutasi (Juta Rp)
Seri Fixed Rate	294.452.587	238.564.501	55.888.086
Seri Variable Rate	168.625.188	180.186.698	(11.561.510)
SU + SRBI	259.378.965	274.366.755	(14.987.790)
Tanpa Bunga (SPN+ZC)	14.668.800	-	14.668.800
Total SUN Dalam Negeri	737.125.540	693.117.954	44.007.586
SUN Valas (USD)	*7.000.000.000*	*5.500.000.000*	*1.500.000.000*
SUN Valas (Rp)	65.933.000	49.610.000	16.323.000
Total SUN DN + Valas	803.058.540	742.727.954	60.330.586

Memperhatikan tabel di atas, dapat dilihat adanya perubahan yang cukup signifikan berupa meningkatnya porsi SUN berbunga tetap (FR) dan menurunnya porsi SUN berbunga mengambang (VR). Hal ini sejalan dengan upaya Pemerintah untuk menurunkan risiko tingkat bunga dengan meningkatkan porsi *fixed rate bonds* dalam portofolio SUN.

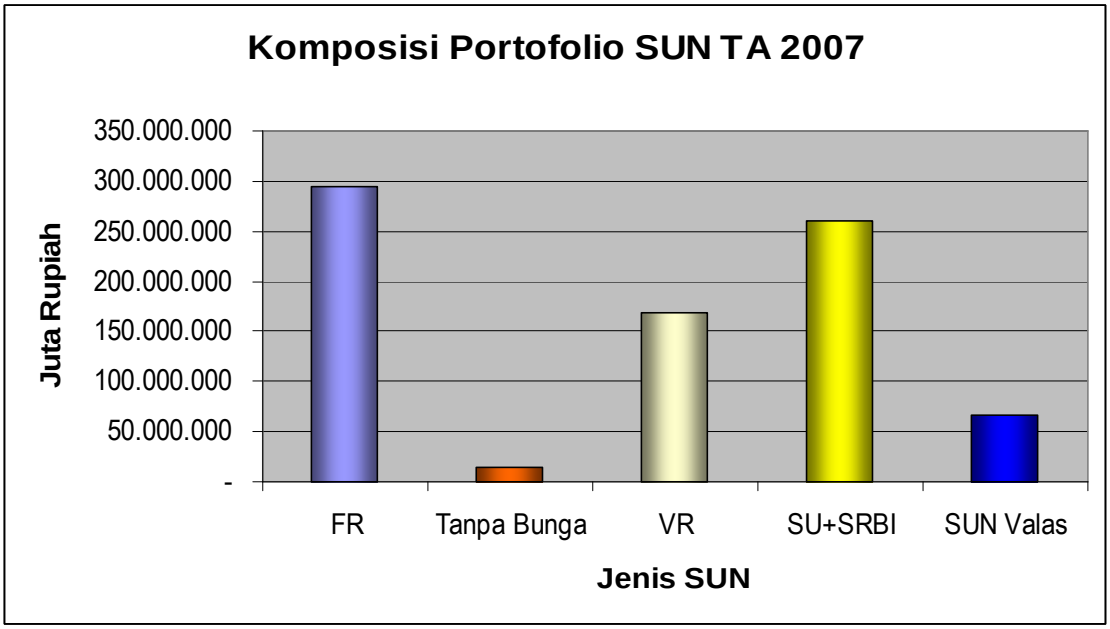

Grafik 42: Komposisi Jenis-Jenis SUN pada TA 2007

III. Kegiatan Pengelolaan SUN Tahun 2007

Kegiatan pengelolaan SUN meliputi penerbitan SUN, pelunasan pokok dan pembelian kembali, pertukaran obligasi, dan pembayaran bunga dan biaya lainnya.

A. Penerbitan SUN

Pemerintah dan DPR sepakat menetapkan target SUN neto dalam APBN-P 2007 sebesar Rp58.546.319.276.000,00. Hal ini berarti Pemerintah memperoleh fleksibilitas untuk menerbitkan SUN dalam jumlah berapa pun dan membeli kembali SUN dalam jumlah berapapun, sepanjang jumlah netonya (termasuk yang jatuh tempo) tidak pagu tersebut di atas. Sepanjang tahun 2007, Pemerintah telah menerbitkan SUN baik dalam denominasi Rupiah maupun dalam denominasi valas. Penerbitan dilakukan baik melalui lelang, maupun *bookbuilding*.

1. Penerbitan SUN Berdenominasi Rupiah Melalui Lelang

Sepanjang tahun 2007, Pemerintah telah melakukan lelang penerbitan ON berdenominasi Rupiah sebanyak 13 (tiga belas) kali, yang diselenggarakan setiap bulan, mulai bulan Januari sampai Nopember. Pada setiap penerbitan selalu terjadi *oversubscription*, yaitu jumlah *bids* yang masuk dibandingkan dengan jumlah target awal yang diumumkan, berkisar dari 1,2 kali sampai 7,07 dengan rata-rata 4,20 kali (tahun sebelumnya 3,5 kali). Hal ini merupakan salah satu indikator semakin tingginya kepercayaan investor terhadap SUN. Total nilai nominal ON seri FR yang diterbitkan Pemerintah tahun 2007 mencapai Rp71,89 triliun, dengan kupon berkisar antara 9,00% sampai 10,25%, dan waktu jatuh tempo pada umumnya berjangka menengah dan panjang, yaitu antara tahun 2017 sampai 2037.

Mengantisipasi minat investor yang cenderung bergeser dari instrumen jangka menegah sampai panjang ke instrumen jangka pendek sehubungan dengan kondisi ketidakpastian pasar karena adanya isu *subprime mortgages* pada pertengahan bulan agustus 2007, pemerintah mengambil inisiatif untuk menerbitkan instrumen Obligasi Negara dengan waktu *maturity date* yang lebih singkat (kurang dari 5 tahun). Alternatif penerbitan instrumen jangka pendek yang berbentuk obligasi negara dipilih pemerintah karena penerbitan SPN masih memiliki kendala seputar isu masalah perpajakan. Instrumen yang kemudian diterbitkan oleh pemerintah adalah *Zero Coupon Bond* yaitu Obligasi Negara Tanpa

Bunga yang dijual secara diskonto. Secara keseluruhan selama tahun 2007, pemerintah telah menerbitkan 3 seri *Zero Coupon Bond* dengan total *outstanding* sebesar Rp10,5 triliun.

2. Penerbitan Obligasi Negara Ritel (ORI)

ORI adalah Obligasi Negara yang dijual kepada individu atau perseorangan Warga Negara Indonesia melalui Agen Penjual di pasar perdana. Penerbitan ORI merupakan salah satu upaya untuk melaksanakan Strategi Pengelolaan Utang Negara tahun 2005 – 2009 yang telah ditetapkan oleh Menteri Keuangan melalui Keputusan Menteri Keuangan nomor 447/KMK.06/2005.

Di dalam dokumen strategi dimaksud ditetapkan bahwa pengembangan pasar sekunder SUN dilakukan antara lain dengan melakukan diversifikasi instrumen SUN melalui SUN Ritel yang mana hal ini sejalan pula dengan upaya memperluas basis investor. Penerbitan ORI merupakan langkah nyata Pemerintah dalam melaksanakan strategi dimaksud. Selain itu, ORI diterbitkan juga dalam rangka memberikan alternatif investasi yang cukup menguntungkan dan aman bagi investor individu, serta memberikan unsur pendidikan bagi investor individu untuk berinvestasi pada instrumen pasar modal seperti ORI. Selama ini investor individu umumnya menyimpan dananya pada instrumen investasi berupa tabungan atau deposito yang notabene instrumen pasar uang. Terlebih dengan belum pulihnya kepercayaan masyarakat umum pada industri reksadana.

Selama tahun 2007 pemerintah melakukan penerbitan ORI sebanyak dua kali dengan beberapa penyempurnaan *terms and conditions* untuk memelihara keberlanjutan *supply* ORI dalam upaya perluasan basis investor dan sebagai alternatif instrumen pembiayaan APBN. Selain itu, keberadaan ORI dapat menjadi alternatif lahan investasi yang menjanjikan seperti instrumen investasi lainnya yang sudah ada seperti saham, reksadana dan deposito.

ORI002 mulai ditawarkan ke pasar tanggal 8 Maret 2007 dan resmi diterbitkan tanggal 28 Marer 2007 dengan total pemesanan pembelian Rp 6,23 triliun yang terdiri dari 13.158 investor dengan jumlah pemesanan terbesar berada dalam kelompok Rp 100,00 juta s.d. Rp 500,00 juta per pemesanan. Sementara ORI003 diterbitkan tanggal 10 September 2007 senilai Rp 9,37 triliun dengan investor sebanyak 22.387 orang. Secara umum penerbitan perdana ORI002 dan ORI003 dapat dikatakan terlaksana dengan baik dan memberikan kontribusi yang cukup signifikan pada pembiayaan APBN 2007 yaitu sebesar 15,6% dari seluruh penerbitan SBN.

3. Surat Perbendaharaan Negara

Penerbitan perdana SPN dilakukan oleh pemerintah pada tanggal 29 Mei 2007, dengan menerbitkan SPN seri SPN20080528O1. Penerbitan perdana SPN mendapat respon positif dari pelaku pasar yang terlihat dari *oversubcription* saat penawaran sebesar 6,44 kali dari Rp2,00 triliun saat penawaran. Pemerintah menerbitkan kembali (*reopening*) SPN20080528O1 pada bulan Juni dan Juli 2007, namun respon pelaku pasar atas *reopening* tersebut tidak setinggi pada saat penawaran perdana karena terjadi penurunan nilai *oversubcription* menjadi 1,96 kali pada *reopening* pertama dan 1,33 kali pada *reopening* kedua. Penurunan minat pelaku pasar atas SPN berkaitan dengan perlakuan pajak seperti yang tertuang dalam PP No 11 Tahun 2006 tentang Pemungutan Pajak Penghasilan Atas Diskonto SPN yang menyatakan atas penghasilan tertentu dari Wajib Pajak berupa Diskonto SPN dikenakan pemungutan PPh sebesar 20% yang bersifat final di Pasar Perdana. Secara total, sepanjang tahun 2007, pemerintah telah menerbitkan SPN seri SPN20080528O1 sebesar Rp4,168 triliun.

4. Surat Utang Kepada Bank Indonesia

Sepanjang tahun 2007, Pemerintah telah mencairkan dana SU005 sebanyak 3 kali, yaitu pada tanggal 15 Mei 2007 sebesar Rp245 miliar, tanggal 18 Juli 2007 sebesar Rp55 miliar, dan tanggal 31 Oktober

2007 sebesar Rp35 miliar, sehingga total pertambahan jumlah SU005 selama tahun 2007 adalah sebesar Rp335 miliar.

5. Penerbitan SUN Berdenominasi USD

Pada tanggal 7 Februari 2007 Menteri Keuangan menetapkan penerbitan INDO-37, sebagai berikut :

- Nominal : USD 1,5 miliar
- Jatuh Tempo : 15 Februari 2037
- *Yield* : 6,750%,(*offer price* 98,40%)
- Ekivalen *spread* atas *US Treasury* : 189,3 bps
- Kupon : 6,625%, *semiannually* dibayarkan setiap Tanggal 17 Februari dan 17 Agustus
- Dicatatkan pada Bursa : Singapore Stock Exchange
- *Trustee, Registrar, Transfer Agent* dan *Paying Agent* : Bank of New York
- Tanggal Setelmen : 14 Februari 2007

Secara umum penerbitan Obligasi Negara dalam Valuta Asing seri INDO-37 telah dapat dilaksanakan dengan baik dan kinerja INDO-37 di pasar sekunder juga membaik yang diindikasikan oleh pergerakan harga maupun maupun rentang imbal hasil (*yield spread*) terhadap *US* Treasury dengan tenor yang sama. Namun demikian evaluasi dan penyempurnaan akan terus dilakukan.

B. Pelunasan Pokok dan Pembelian Kembali

Pokok SUN dapat berkurang melalui pelunasan baik saat jatuh tempo maupun sebelum jatuh tempo melalui pembelian kembali (*buyback dan switching*). Sepanjang tahun 2007, nominal SUN telah berkurang sebanyak Rp58,5 triliun, yang terdiri dari pelunasan SUN jatuh tempo sebesar Rp39,8 triliun dan pelunasan SUN dalam rangka pembelian kembali sebesar Rp18,7 triliun.

1. Pelunasan SUN Jatuh Tempo

Seluruh SUN yang jatuh tempo tahun 2007 dibayar tepat pada waktunya secara tunai dengan total Rp39,8 triliun. Seri-seri SUN yang jatuh tempo tahun 2007 adalah sebagai berikut:

Tabel 12: SUN Jatuh Tempo Tahun 2007

Seri	Tanggal Jatuh Tempo
FR0005	15 Juli 2007
VR0029	15 April 2007
VR0011	25 Februari 2007
VR0012	25 September 2007
SU007	01 Februari 2007
SU007	01 Agustus 2007
SU005	10 Desember 2007
SRBI01	25 Mei 2007

Pelunasan SRBI dapat bersumber dari surplus Bank Indonesia yang menjadi bagian Pemerintah dan akan dilakukan apabila rasio modal terhadap kewajiban moneter BI telah mencapai di atas 10%. Pada tahun 2007, berdasarkan hasil audit BPK, rasio modal terhadap kewajiban moneter Bank Indonesia lebih dari 10%, sehingga pada tahun 2007 kelebihan tersebut digunakan untuk mengurangi saldo SRBI-01/MK/2003 sebesar Rp13,7 triliun.

2. Pelunasan SUN Melalui Pembelian Kembali (*Buyback* dan *Switching*)

Pertukaran obligasi atau *debt switching* umumnya dilakukan dengan dua alasan utama, yaitu: (i) memperbaiki struktur jatuh tempo pokok SUN (oleh karena itu sering juga disebut sebagai *debt reprofiling*), dan (ii) meningkatkan likuiditas pasar sekunder SUN, yaitu dengan menarik obligasi yang tidak likuid *(off-the-run bonds)* dan menggantinya dengan obligasi yang lebih likuid *(on-the-run bonds)*. Selama tahun 2007, Pemerintah telah melakukan *debt switching* melalui lelang sebanyak 9 dengan nilai nominal total sebesar Rp15,78 triliun dan *buyback* sebanyak 3 kali dengan nominal total Rp2,9 triliun, sehingga total pembelian kembali SUN yang dilakukan selama tahun 2007 adalah Rp18,7 triliun. Seri-seri SUN yang ditarik diutamakan pada SUN yang jatuh tempo dalam jangka pendek dan digantikan dengan SUN jangka panjang dengan pertimbangan untuk menurunkan *refinancing risk* periode tersebut.

C. Pembayaran Bunga dan Biaya Lain Penerbitan SUN

Pembayaran bunga dan biaya lain penerbitan SUN meliputi: (i) bunga dan biaya lain penerbitan SUN Rupiah, dan (ii) bunga dan biaya lain penerbitan SUN valas.

1. Bunga dan Biaya Lain Penerbitan SUN Berdenominasi Rupiah

Pembayaran bunga dan biaya penerbitan SUN berdenominasi Rupiah tahun 2007 secara total mencapai Rp53,5 triliun, yang terdiri dari:

a. Bunga Obligasi negara Dalam Negeri sebesar Rp48,4 triliun;

b. Biaya/Kewajiban Obligasi Negara lainnya sebesar Rp81 miliar;

c. *Discount* SPN sebesar Rp311 miliar;

d. *Discount* Obligasi Negara Dalam Negeri sebesar Rp2,7 triliun; dan

e. *Loss on Bond Redemption* sebesar Rp2,0 triliun.

2. Bunga dan Biaya Penerbitan SUN Berdenominasi USD

Sepanjang tahun 2007, pembayaran bunga dan biaya penerbitan SUN valas mencapai Rp4,5 triliun, yang terdiri dari:

a. Bunga SUN Valas sebesar Rp4,2 triliun;

b. Biaya/Kewajiban SUN Valas lainnya sebesar Rp19 miliar;

c. *Discount* SUN Valas sebesar Rp217 miliar.

D. *Pengembangan* Produk dan Infrastruktur Surat Berharga Negara

1. Surat Berharga Syariah Negara (SBSN)

Dalam rangka perluasan basis investor, diversifikasi sumber pembiayaan, dan pengembangan pasar keuangan dalam negeri, Pemerintah merencanakan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, atau dikenal secara internasional dengan istilah sukuk. Instrumen keuangan ini pada prinsipnya sama seperti surat berharga konvensional, dengan perbedaan pokok antara lain berupa penggunaan konsep imbalan dan bagi hasil sebagai pengganti bunga, adanya suatu transaksi pendukung (*underlying transaction*) berupa sejumlah tertentu aset yang menjadi dasar penerbitan sukuk, serta adanya *aqad* atau penjanjian antara para pihak yang disusun berdasarkan prinsip-prinsip syariah.

Untuk keperluan penerbitan surat berharga berdasarkan prinsip syariah, perlu adanya pengaturan secara khusus, baik yang menyangkut instrumen maupun perangkat yang diperlukan. Hal tersebut, juga dengan mempertimbangkan adanya kendala-kendala yang dihadapi dari sisi legal dalam hal Pemerintah akan menerbitkan surat berharga berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan basis hukum yang ada di Indonesia pada saat ini. Oleh karena itu, Pemerintah telah menyiapkan Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Surat Berharga Syariah Negara (SBSN). RUU tentang SBSN ini, secara garis besar mengatur hal-hal sebagai berikut:

- Transparansi pengelolaan Surat Berharga Syariah Negara dalam kerangka kebijakan fiskal dan kebijakan pengembangan pasar Surat Berharga Syariah Negara dengan mengatur lebih lanjut tujuan penerbitannya dan jenis-jenis akad atau perjanjian yang digunakan.
- Kewenangan Pemerintah untuk menerbitkan Surat Berharga Syariah Negara, baik dilakukan secara langsung oleh Pemerintah yang didelegasikan kepada Menteri, ataupun dilaksanakan melalui Perusahaan Penerbit yang dibentuk oleh Menteri.
- Kewenangan Pemerintah untuk menggunakan Barang Milik Negara sebagai dasar penerbitan Surat Berharga Syariah Negara (*underlying asset*).
- Kewenangan Wali Amanat untuk bertindak mewakili kepentingan Pemegang Surat Berharga Syariah Negara;
- Kewenangan Pemerintah untuk membayar semua kewajiban yang timbul dari penerbitan Surat Berharga Syariah Negara, baik yang diterbitkan secara langsung oleh Pemerintah maupun melalui Perusahaan Penerbit, secara penuh dan tepat waktu sampai berakhirnya kewajiban tersebut.
- Landasan hukum bagi pengaturan lebih lanjut atas tata cara dan mekanisme penerbitan Surat Berharga Syariah Negara di pasar perdana maupun perdagangan Surat Berharga Syariah Negara di pasar sekunder agar pemodal memperoleh kepastian untuk memiliki dan memperdagangkan Surat Berharga Syariah Negara secara mudah dan aman.

Pada saat ini, RUU tentang SBSN tersebut telah disampaikan kepada DPR untuk dilakukan pembahasan dan ditetapkan.

IV. Pencapaian Target APBN

Target APBN atas pengelolaan SUN ditetapkan dalam tiga pos yaitu pos Surat Utang Negara (neto), Bunga Utang Dalam Negeri, dan Bunga Utang Luar Negeri (SUN Valas).

A. Surat Utang Negara (neto)

Mulai tahun 2005, DPR telah menyetujui penerapan konsep net penerbitan SUN. Net penerbitan SUN ialah selisih antara SUN yang diterbitkan dengan yang jatuh tempo dan yang dibeli kembali. Mengingat target pembiayaan SUN di APBN ditetapkan dalam bentuk net penerbitan SUN, maka Pemerintah memiliki fleksibilitas untuk menentukan jumlah penerbitan SUN dan jumlah pembelian kembali, asalkan jumlah net penerbitan tidak melebihi yang telah ditetapkan DPR.

Untuk tahun 2007 target net penerbitan SUN (SUN neto) ditetapkan sebesar Rp58,54 triliun. Realisasinya mencapai Rp57,17 triliun, angka ini belum memasukkan adanya penerimaan dari pencairan SU005 sebesar Rp335 miliar, sehingga terdapat kekurangan dari target sebesar Rp1,37 triliun dengan rincian sebagai berikut:

SUN NETO TA 2007

Penerbitan SUN	
Penerimaan Utang Bunga Obligasi Negara Dalam Negeri (711423)	1,120,907,117,000.00
Penerimaan Pembiayaan Obligasi Dalam Negeri (711424)	97,992,895,000,000.00
Penerimaan Penerbitan/Penjualan Obligasi LN (711431)	13,575,648,587,500.00
Penerimaan Penerbitan/Penjualan SPN (711441)	4,168,800,000,000.00
Total Penerbitan SUN	**116,858,250,704,500.00**
Pelunasan SUN	
Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN (721321)	39,786,861,003,598.00
Belanja Pengeluaran Pelunasan Obligasi DN melalui Pembelian Kembali (721323)	18,702,248,000,000.00
Belanja Pembayaran Utang Bunga Obligasi Dalam Negeri (721324)	1,196,954,544,000.00
Total Pelunasan SUN	**59,686,063,547,598.00**
Realisasi SUN Neto	**57,172,187,156,902.00**
Target APBN-P 2007	**58,546,319,276,000.00**
Selisih Kurang	**(1,374,132,119,098.00)**

B. Bunga Utang Dalam Negeri (SUN Domestik)

Berdasarkan APBN-P tahun 2007, pagu Bunga Utang Dalam Negeri ditetapkan sebesar Rp56,7 triliun sementara realisasi pembayaran bunga dan biaya penerbitan SUN berdenominasi Rupiah tahun 2007 secara total mencapai Rp53,5 triliun, sehingga terdapat sisa pagu sebesar Rp3,2 triliun.

C. Bunga Utang Luar Negeri (SUN Valas)

Berdasarkan APBN-P tahun 2007, pagu bunga SUN Valas ditetapkan sebesar Rp4,7 triliun sedangkan realisasinya sebesar Rp4,48 triliun sehingga terdapat sisa pagu bunga SUN Valas untuk TA 2007 sebesar Rp260 miliar.

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN UNAUDITED TAHUN 2007
A. PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH
(Rp. Juta)

NO	SEKTOR	PERUSAHAAN NEGARA	TAHUN	STATUS	SUMBER	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA	POS LUAR BIASA	LABA RUGI SEBELUM HAK MINORITAS	HAK MINORITAS	LABA RUGI BERSIH
						1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8=(6-7)	9	10=(8-9)	11	12=(10+11)	13	14=(12-13)
1	ANEKA INDUSTRI	PT Garam	2007		Prognosa	131.899	122.292	9.608	2.325	2.630	9.302	6.808	2.494	775	1.719	0	1.719	0	1.719
		PT Industri Gelas (IGLAS)	2007		Prognosa	173.796	202.752	(28.956)	496	1.160	(29.620)	10.253	(39.873)	0	(39.873)	0	(39.873)	0	(39.873)
		PT Industri Soda Indonesian (ISI) **)																	
2	ANGKUTAN DARAT	Perum DAMRI	2007		Tahunan	384.275	378.387	5.888	11.489	1.008	16.369	0	16.369	0	16.369	0	16.369	0	16.369
		Perum PPD	2007		Tahunan	97.764	144.084	(46.320)	27.016	9.143	(28.447)	0	(28.447)	(5.333)	(23.114)	15.216	(7.898)	0	(7.898)
		PT Kereta Api Indonesia (KAI)	2007		Prognosa	4.216.937	4.447.211	(230.275)	284.595	9.252	45.068	0	45.068	0	45.068	(23.515)	21.554	0	21.554
3	ASURANSI	PT Asuransi ABRI (ASABRI)	2007		Tahunan	793.667	686.605	107.062	1.681	0	108.743	0	108.743	0	108.743	0	108.743	0	108.743
		PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI)	2007		Tahunan	336.301	314.502	21.799	693	819	21.673	0	21.673	0	21.673	0	21.673	0	21.673
		PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)	2007		Tahunan	2.920.896	2.837.998	82.898	22.905	0	105.804	0	105.804	16.899	88.904	0	88.904	0	88.904
		PT Asuransi Jasa Raharja	2007		Tahunan	1.361.462	1.028.476	332.986	316.042	0	649.028	0	649.028	153.380	495.648	0	495.648	0	495.648
		PT Asuransi Jiwasraya	2007		Tahunan	2.718.441	2.674.620	43.821	10.049	11.170	42.700	0	42.700	266	42.434	0	42.434	0	42.434
		PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)	2007		Tahunan	4.473.806	3.736.738	737.068	168.046	128.931	776.183	0	776.183	157.455	618.728	0	618.728	0	618.728
		PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)	2007		Tahunan	8.227.674	2.811.407	5.416.267	15.106	4.359.524	1.071.849	0	1.071.849	174.887	896.962	0	896.962	1	896.963
		PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI)	2007		Audited	552.777	496.149	56.628	0	38.667	17.961	0	17.961	(5.935)	23.896	0	23.896	1	23.897
		PT Taspen	2007		Tahunan	4.806.542	4.332.453	474.089	314.183	0	788.272	0	788.272	180	788.092	0	788.092	(563)	787.529
4	BAJA & KONSTRUKSI BAJA	PT Barata Indonesia	2007		Prognosa	223.707	210.284	13.423	4.465	9.384	8.504	5.371	3.133	940	2.193	0	2.193	0	2.193
		PT Boma Bisma Indra (BBI)	2007		Tahunan	24.333	36.506	(12.173)	580	9.955	(21.548)	5.515	(27.063)	0	(27.063)	0	(27.063)	0	(27.063)
		PT Krakatau Steel (KS)	2007		Prognosa	14.928.308	14.054.514	873.794	64.977	119.068	819.703	285.845	533.858	151.444	382.414	0	382.414	18.959	363.455
5	DOK DAN PERKAPALAN	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari	2007		Prognosa	377.709	376.572	1.137	14.156	0	15.293	10.781	4.512	0	4.512		4.512		4.512
		PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS)	2007		Prognosa	193.914	181.821	12.093	2.698	4.315	10.476	0	10.476	3.125	7.351	0	7.351	0	7.351
		PT Industri Kapal Indonesia (IKI)	2007		Prognosa	40.800	43.393	(2.593)	320	0	(2.273)	722	(2.995)	0	(2.995)	0	(2.995)	0	(2.995)
		PT PAL Indonesia	2007		Semester	477.554	498.399	(20.845)	0	19.304	(40.148)	0	(40.148)	0	(40.148)	0	(40.148)	0	(40.148)
6	ENERGI	PT Konversi Energi Abadi (KONEBA)	2007		Prognosa	27.583	25.278	2.305	0	179	2.126	0	2.126	574	1.552	0	1.552	0	1.552
		PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN)	2007		Triwulan III	6.127.548	3.967.281	2.160.267	242.922	191.585	2.211.604	257.501	1.954.102	599.013	1.355.090	0	1.355.090	52.001	1.303.089
		PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)	2007		Prognosa	110.893.410	107.054.524	3.838.886	2.516.258	908.988	5.446.156	2.923.362	2.522.794	2.776.386	(253.592)	0	(253.592)	0	(253.592)
		PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA)	2007		Triwulan III	3.011.632	2.349.609	662.023	78.553	3.044	737.532	0	737.532	212.283	525.249	0	525.249	(2.048)	527.297
7	INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI	PT Batan Teknologi	2007		Prognosa	27.915	31.312	(3.397)	184	338	(3.551)	0	(3.551)	0	(3.551)	0	(3.551)	0	(3.551)
		PT Industri Kereta Api (INKA)	2007		Tahunan	371.489	348.881	22.608	2.514	11.526	13.596		13.596	(1.546)	15.142		15.142		15.142
		PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI)	2007		Prognosa	687.315	671.452	15.863	0	4.252	11.611	0	11.611	4.877	6.734	0	6.734	101	6.633
		PT LEN Industri	2007		Prognosa	368.789	335.512	33.277	1.539	11.151	23.665	9.013	14.652	4.715	9.937	0	9.937	358	9.579
8	INDUSTRI FARMASI	PT Bioforma	2007		Prognosa	743.710	573.902	169.808	18.298	18.582	169.524	1.930	167.594	54.894	112.700	0	112.700		112.700
		PT Indo Farma, Tbk	2007		Triwulan III	648.779	649.913	(1.135)	2.666	14.166	(12.635)	0	(12.635)	(650)	(11.985)	0	(11.985)	0	(11.985)
		PT Kimia Farma, Tbk	2007		Triwulan III	1.488.494	1.422.493	66.001	3.831	4.803	65.030	0	65.030	24.499	40.531	0	40.531	0	40.531
9	INDUSTRI PERTAHANAN	PT Dahana	2007		Prognosa	320.806	297.956	22.850	1.640	0	24.490	0	24.490	7.330	17.160	0	17.160	0	17.160
		PT PINDAD	2007		Prognosa	434.258	401.424	32.834	11.281	30.343	13.772	0	13.772	7.172	6.600	0	6.600	0	6.600
10	INDUSTRI SANDANG	PT Industri Sandang Nusantara (INSAN)	2007		Prognosa	178.869	197.366	(18.496)	16.718	19.452	(21.231)	0	(21.231)	(3.299)	(17.932)	0	(17.932)	0	(17.932)
		PT Primissima	2007		Prognosa	94.151	98.078	(3.927)	2.589	5.976	(7.314)	1.478	(8.792)	0	(8.792)	0	(8.792)		(8.792)
11	JASA KONSTRUKSI	Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS)	2007		Prognosa	273.243	312.717	(39.475)	3.307	22.838	(59.005)	0	(59.005)	0	(59.005)	0	(59.005)	0	(59.005)
		PT Adhi Karya	2007		Triwulan III	3.025.187	2.812.184	213.003	45.474	6.882	251.595	102.621	148.975	44.675	104.300	0	104.300	268	104.032
		PT Brantas Abipraya	2007		Prognosa	369.130	345.186	23.944	796	132	24.608	17.899	6.709	0	6.709	0	6.709	0	6.709
		PT Hutama Karya (HK)	2007		Prognosa	2.501.691	2.412.770	88.921	6.130	15.687	79.364	32.517	46.847	14.037	32.810	0	32.810	0	32.810
		PT Istaka Karya	2007		Prognosa	421.798	406.716	15.083	689	0	15.772	8.865	6.907	0	6.907	0	6.907	0	6.907
		PT Nindya Karya	2007		Prognosa	1.142.947	1.101.189	41.758	1.005	0	42.763	39.608	3.155	929	2.226	0	2.226	0	2.226
		PT Pembangunan Perumahan (PP)	2007		Tahunan	3.247.349	3.051.895	195.454	2.099	15.996	181.557	50.608	130.949	38.238	92.711	0	92.711	0	92.711
		PT Waskita Karya	2007		Tahunan	2.319.995	2.209.481	110.515	3.732	1.173	113.074	57.851	55.223	19.711	35.512	0	35.512	0	35.512
		PT Wijaya Karya (WIKA)	2007		Prognosa	4.246.549	3.991.880	254.669	0	29.163	225.506	51.442	174.064	45.256	128.808	0	128.808	11.379	117.429
12	JASA LAINNYA	Perum Jasa Tirta I	2007		Tahunan	100.256	89.391	10.865	3.247	2.375	11.737	0	11.737	3.402	8.335	0	8.335	0	8.335
		Perum Jasa Tirta II	2007		Prognosa	203.910	159.073	44.837	16.626	36.043	25.420		25.420	7.638	17.781	0	17.781	0	17.781
		PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA)	2007		Tahunan	186.074	150.546	35.528	49.080	1.034	83.573	0	83.573	10.798	72.775	0	72.775	0	72.775
13	JASA PEMBIAYAAN	Perum Pegadaian	2007		Prognosa	2.211.330	1.648.296	563.034	47.179	237	609.976	0	609.976	182.984	426.992	0	426.992	0	426.992
		Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU)	2007		Prognosa	294.439	222.779	71.659	20.078	8.655	83.082	0	83.082	22.450	60.633	0	60.633	0	60.633
		PT Danareksa	2007		Prognosa	444.246	335.254	108.992	0	55.903	53.089	0	53.089	0	53.089	0	53.089	0	53.089
		PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI)	2007		Tahunan	39.492	17.069	22.424	6.410	328	28.505	8.764	19.741	2.387	17.355	0	17.355	0	17.355
		PT PANN Multi Finance	2007		Audited	70.357	44.055	26.302	27.720	10.355	43.667	0	43.667	(1.114)	44.780	0	44.780	0	44.780
		PT Permodalan Nasional Madani (PNM)	2007		Prognosa	187.078	140.451	46.627	0	25.357	21.270	0	21.270	5.846	15.424	0	15.424	0	15.424
14	JASA PENILAI	PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)	2007		Prognosa	160.390	137.625	22.765	1.009	353	23.421	0	23.421	6.960	16.461	0	16.461	0	16.461
		PT Sucofindo	2007		Prognosa	902.727	814.606	88.121	22.356	38.090	72.386	6.786	65.601	25.960	39.641	0	39.641	282	39.359
		PT Surveyor Indonesia (SI)	2007		Tahunan	423.779	392.639	31.140	6.683	2.257	35.566	0	35.566	14.956	20.610	0	20.610	0	20.610

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN UNAUDITED TAHUN 2007
A. PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH
(Rp. Juta)

NO	SEKTOR	PERUSAHAAN NEGARA	TAHUN	STATUS	SUMBER	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA	POS LUAR BIASA	LABA RUGI SEBELUM HAK MINORITAS	HAK MINORITAS	LABA RUGI BERSIH
						1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8=(6-7)	9	10=(8-9)	11	12=(10+11)	13	14=(12-13)
		PT Survey Udara Penas **)																	
15	KAWASAN INDUSTRI	PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN)	2007		Prognosa	158.249	139.944	18.305	7.660	1.202	24.763	0	24.763	10.965	13.798	0	13.798		13.798
		PT Kawasan Industri Makasar (KIMA)	2007		Prognosa	29.167	19.899	9.268	574	0	9.842	0	9.842	2.918	6.925	0	6.925	0	6.925
		PT Kawasan Industri Medan (KIM)	2007		Prognosa	63.725	49.448	14.278	526	25	14.779	0	14.779	4.416	10.363	0	10.363	0	10.363
		PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW)	2007		Prognosa	5.453	5.302	151	279	34	396	0	396	101	295	0	295	0	295
		PT Pengembangan Daerah Industri (PDI) Pulau Batam	2007		Prognosa	65.233	65.156	77	643	667	54	0	54	6	48	0	48	0	48
16	KEBANDARUDARAAN	PT Angkasa Pura I (AP I)	2007		Tahunan	1.547.550	1.305.343	242.207	214.707	65.055	391.860	0	391.860	61.659	330.200	0	330.200	0	330.200
		PT Angkasa Pura II (AP II)	2007		Tahunan	2.047.470	1.379.724	667.746	174.049	46.174	795.621	0	795.621	195.443	600.178	(46.871)	553.308	0	553.308
17	KEHUTANAN	Perum Perhutani	2007		Prognosa	2.321.562	2.255.227	66.335	68.765	23.996	111.104	0	111.104	33.331	77.773	0	77.773	0	77.773
		PT Inhutani I	2007		Prognosa	48.137	58.942	(10.806)	26.023	12.951	2.266	0	2.266	0	2.266	0	2.266	0	2.266
		PT Inhutani II	2007		Prognosa	73.347	73.420	(74)	7.776	4.845	2.858	0	2.858	0	2.858	(34)	2.823	0	2.823
		PT Inhutani III	2007		Prognosa	23.734	25.467	(1.733)	3.979	946	1.300	209	1.091	44	1.047	0	1.047	0	1.047
		PT Inhutani IV	2007		Prognosa	16.311	20.396	(4.085)	7.045	664	2.296	0	2.296	0	2.296	0	2.296	0	2.296
		PT Inhutani V	2007		Prognosa	750.000	6.764.473	(6.014.473)	8.653.537	8.068.636	(5.429.572)	0	(5.429.572)	(174.856)	(5.254.716)	0	(5.254.716)	0	(5.254.716)
		PT Kertas kraft Aceh	2007		Prognosa	20.503	79.707	(59.204)	3.843	760	(56.122)	22.308	(78.430)	0	(78.430)	0	(78.430)	0	(78.430)
18	KERTAS	PT Kertas Leces	2007		Prognosa	909.172	963.214	(54.042)	4.064	0	(49.978)	7.956	(57.934)	0	(57.934)	0	(57.934)	0	(57.934)
19	KONSULTAN KONSTRUKSI	PT Bina Karya	2007		Prognosa	43.538	39.120	4.417	568	89	4.897	3.620	1.277	363	914	0	914	0	914
		PT Indah Karya	2007		Prognosa	19.451	19.923	(472)	130	1.178	(1.520)	817	(2.337)	(596)	(1.741)	0	(1.741)	0	(1.741)
		PT Indra Karya	2007		Prognosa	69.848	66.276	3.572	264	2.519	1.317	0	1.317	378	939	0	939	0	939
		PT Virama Karya	2007		Prognosa	61.729	58.413	3.316	100	0	3.416	1.952	1.464	209	1.255	0	1.255	0	1.255
		PT Yodya Karya	2007		Prognosa	79.100	74.620	4.480	80	860	3.700	1.450	2.250	820	1.430	0	1.430	0	1.430
20	LOGISTIK	Perum Bulog	2007		Prognosa	11.914.766	11.462.847	451.918	575.100	185.885	841.033	936.554	(95.521)	0	(95.521)	0	(95.521)	0	(95.521)
		PT Bhanda Ghara Reksa (BGR)	2007		Prognosa	255.693	237.758	17.936	1.796	3.449	16.283	0	16.283	6.130	10.153	0	10.153	0	10.153
		PT Pos Indonesia (POSINDO)	2007		Tahunan	1.613.624	1.593.608	20.016	226.584	239.768	6.832	0	6.832	0	6.832	0	6.832	437	6.395
		PT Varuna Tirta Prakasya (VTP)	2007		Tahunan	85.022	87.214	(2.192)	5.469	303	2.975	2.704	271	(111)	382	0	382	0	382
21	PARIWISATA	PT Bali Tourism & Development Corporation	2007		Tahunan	53.137	36.996	16.141	15.372	0	31.513	0	31.513	0	31.513	0	31.513	(691)	32.205
		PT Hotel Indonesia Natour (HIN)	2007		Prognosa	207.377	182.795	24.582	11.305	24.152	11.735	0	11.735	0	11.735	0	11.735	0	11.735
		PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	2007		Prognosa	39.093	38.112	981	719	400	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300	0	1.300
22	PELABUHAN	PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I)	2007		Tahunan	638.362	443.757	194.605	45.655	18.425	221.835	0	221.835	0	221.835	0	221.835	0	221.835
		PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II)	2007		Tahunan	1.975.480	1.320.737	654.743	556.946	116.037	1.095.652	0	1.095.652	220.484	875.168	0	875.168	8.451	866.717
		PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III)	2007		Tahunan	2.060.066	1.267.091	792.975	88.157	13.137	867.994	2.652	865.342	255.536	609.806	0	609.806	152.823	456.983
		PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV)	2007		Tahunan	499.975	354.331	145.644	40.968	32.139	154.472	1.932	152.540	45.553	106.987	0	106.987	0	106.987
23	PELAYARAN	PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)	2007		Prognosa	611.932	581.243	30.689	13.356	1.684	42.361	0	42.361	9.876	32.485	0	32.485	0	32.485
		PT Djakarta Lloyd	2007		Tahunan	438.028	499.087	(61.060)	72.602	157.814	(146.271)	0	(146.271)	4.738	(151.009)	0	(151.009)	(1)	(151.009)
		PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	2007		Prognosa	135.880	140.611	(4.731)	11.235	2.981	3.523	0	3.523	3.487	36	0	36	0	36
		PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)	2007		Prognosa	1.969.705	2.069.736	(100.031)	25.893	22.110	(96.248)	0	(96.248)	0	(96.248)	0	(96.248)	(8.200)	(88.048)
24	PENGERUKAN	PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO)	2007		Tahunan	126.615	126.054	561	7.103	30.775	(23.111)	0	(23.111)	(3.980)	(19.131)	0	(19.131)	0	(19.131)
25	PENUNJANG KONSTRUKSI	PT Amarta Karya	2007		Prognosa	62.304	74.204	(11.900)	1.355	3.245	(13.790)	0	(13.790)	(3.860)	(9.930)	0	(9.930)	0	(9.930)
		PT Jasa Marga	2007		Tahunan	2.641.023	1.613.385	1.027.638	84.125	711.867	399.897	0	399.897	116.033	283.864	0	283.864	1.689	282.175
26	PERBANKAN	PT Bank Ekspor Indonesia (BEI)	2007		Tahunan	946.229	543.948	402.281	8	329	401.960	0	401.960	127.282	274.678	0	274.678	0	274.678
		PT Bank Mandiri, Tbk	2007		Triwulan III	20.597.716	16.033.273	4.564.443	13.385	0	4.577.828	0	4.577.828	1.424.008	3.153.820	0	3.153.820	907	3.152.913
		PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI)	2007		Triwulan III	14.380.683	12.169.297	2.211.386	46.048	0	2.257.434	0	2.257.434	698.644	1.558.790	0	1.558.790	3.025	1.555.765
		PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI)	2007		Triwulan III	18.344.932	13.193.826	5.151.106	40.435	0	5.191.541	0	5.191.541	1.573.092	3.618.449	0	3.618.449	0	3.618.449
		PT Bank Tabungan Negara (BTN)	2007		Prognosa	4.113.608	3.575.348	538.260	21.668	1.252	558.676	0	558.676	172.526	386.150	0	386.150	0	386.150
27	PERCETAKAN & PENERBITAN	Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI)	2007		Prognosa	48.402	48.012	390	7.231	3.250	4.371	0	4.371	0	4.371	0	4.371	0	4.371
		Perum Percetakan Uang RI (PERURI)	2007		Prognosa	1.364.868	1.211.031	153.837	30.060	71.012	112.885	0	112.885	32.348	80.537	0	80.537	0	80.537
		PT Balai Pustaka (BP)	2007		Prognosa	54.018	51.045	2.974	1.520	3.518	976	4.500	(3.524)	0	(3.524)	0	(3.524)	0	(3.524)
		PT Pradnya Paramita	2007		Prognosa	1.981	2.777	(796)	396	2	(402)	0	(402)	0	(402)	0	(402)	0	(402)
28	PERDAGANGAN	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)	2007		Tahunan	1.191.628	1.160.571	31.057	39.233	30.022	40.268	0	40.268	0	40.268	0	40.268	(186)	40.453
		PT PP Berdikari	2007		Tahunan	299.525	292.691	6.834	7.031	6.927	6.937	6.102	836	2.741	(1.905)	0	(1.905)	0	(1.905)
		PT Sarinah	2007		Prognosa	183.184	175.145	8.039	2.435	4.633	5.841	0	5.841	0	5.841	0	5.841	0	5.841
29	PERIKANAN	Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS)	2007		Prognosa	66.320	66.629	(308)	679	1.065	(694)	0	(694)	0	(694)	0	(694)	0	(694)
		PT Perikanan Nusantara	2007		Prognosa	28.415	34.720	(6.305)	6.229	872	(948)	693	(1.641)	0	(1.641)	0	(1.641)	0	(1.641)
30	PERKEBUNAN	PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I)	2007		Prognosa	330.960	308.735	22.225	16.312	34.822	3.715	0	3.715	0	3.715	0	3.715	0	3.715
		PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II)	2007		Prognosa	1.338.826	1.139.570	199.256	0	179.188	20.068	0	20.068	0	20.068	0	20.068	0	20.068
		PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III)	2007		Prognosa	3.922.385	2.907.182	1.015.203	82.549	87.530	1.010.222	0	1.010.222	0	1.010.222	0	1.010.222	0	1.010.222
		PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV)	2007		Tahunan	3.317.097	2.429.767	887.330	40.416	43.492	884.254	83.238	801.016	251.811	549.205	0	549.205	0	549.205
		PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX)	2007		Prognosa	1.396.288	1.203.975	192.313	16.909	44.450	164.771	41.958	122.813	36.826	85.987	0	85.987	0	85.987

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN UNAUDITED TAHUN 2007
A. PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH
(Rp. Juta)

NO	SEKTOR	PERUSAHAAN NEGARA	TAHUN	STATUS	SUMBER	PENDAPATAN USAHA	HPP+ BEBAN USAHA	LABA USAHA	PENDAPATAN LAIN - LAIN	BEBAN LAIN - LAIN	EBIT	BEBAN BUNGA	LABA SEBELUM PAJAK	PAJAK	LABA RUGI SEBELUM POS LUAR BIASA	POS LUAR BIASA	LABA RUGI SEBELUM HAK MINORITAS	HAK MINORITAS	LABA RUGI BERSIH
						1	2	3 = (1-2)	4	5	6 = (3+4-5)	7	8=(6-7)	9	10=(8-9)	11	12=(10+11)	13	14=(12-13)
		PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V)	2007		Tahunan	2.413.293	2.013.910	399.383	15.364	63.012	351.736	0	351.736	105.900	245.835	0	245.835	0	245.835
		PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI)	2007		Prognosa	1.161.014	977.920	183.094	0	99.850	83.244	0	83.244	24.973	58.271	0	58.271	0	58.271
		PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)	2007		Prognosa	2.799.140	2.330.331	468.809	0	130.049	338.760	0	338.760	111.790	226.970	0	226.970	0	226.970
		PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII)	2007		Prognosa	1.399.921	1.098.856	301.065	22.041	190.779	132.327	12.988	119.339	35.766	83.573	0	83.573	449	83.124
		PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X)	2007		Prognosa	2.052.218	1.864.908	187.310	40.312	46.695	180.927	20.425	160.502	39.536	120.966	0	120.966	87	120.879
		PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI)	2007		Prognosa	1.862.991	1.749.087	113.904	18.938	46.355	86.486	0	86.486	0	86.486	0	86.486	0	86.486
		PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII)	2007		Prognosa	562.965	426.010	136.955	48.328	65.768	119.516	32.543	86.973	26.879	60.094	0	60.094	0	60.094
		PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII)	2007		Prognosa	2.041.664	1.750.241	291.423	0	51.639	239.784	33.474	206.310	0	206.310	0	206.310	0	206.310
		PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV)	2007		Prognosa	322.907	317.049	5.858	0	12.981	(7.123)	27.711	(34.834)	0	(34.834)	0	(34.834)	0	(34.834)
		PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)	2007		Prognosa	3.135.667	2.894.120	241.547	29.270	120.357	150.459	0	150.459	51.693	98.765	0	98.765	27.299	71.466
31	PERTAMBANGAN	PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM)	2007		Triwulan III	8.269.627	3.137.695	5.131.932	377.680	56.358	5.453.255	0	5.453.255	1.621.792	3.831.463	0	3.831.463	(1)	3.831.462
		PT Pertamina	2007		Tahunan	390.198.769	355.209.028	34.989.741	3.414.756	1.173.761	37.230.736	329.804	36.900.932	12.226.220	24.674.712	0	24.674.712	214.779	24.459.933
		PT Sarana Karya	2007		Prognosa	20.427	18.553	1.874	2.156	443	3.587	0	3.587	1.051	2.536	0	2.536	0	2.536
		PT Timah, Tbk	2007		Triwulan III	6.583.017	4.525.237	2.057.780	8.158	97.158	1.968.780	0	1.968.780	704.259	1.264.521	0	1.264.521	(11)	1.264.532
32	PERTANIAN	PT Pertani	2007		Prognosa	844.643	842.749	1.894	778	0	2.672	10.696	(8.024)	0	(8.024)	0	(8.024)	0	(8.024)
		PT Sang Hyang Seri (SHS)	2007		Prognosa	725.496	707.735	17.761	9.382	13.967	13.175	0	13.175	4.611	8.564	0	8.564	0	8.564
33	PUPUK	PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI)	2007		Prognosa	22.152.603	19.142.890	3.009.713	1.127.026	1.091.583	3.045.156	630.051	2.415.105	730.975	1.684.130	(68.217)	1.615.913	4.854	1.611.059
34	SEMEN	PT Semen Baturaja	2007		Prognosa	576.517	515.167	61.351	4.550	0	65.900	39.309	26.591	7.977	18.614	0	18.614	0	18.614
		PT Semen Gresik, Tbk	2007		Triwulan III	7.091.927	5.357.611	1.734.316	113.031	0	1.847.347	10.223	1.837.123	549.495	1.287.628	0	1.287.628	15.716	1.271.913
35	TELEKOMUNIKASI	Perum Produksi Film Negara (PFN)	2007		Tahunan	5.555	8.248	(2.694)	244	91	(2.540)	0	(2.540)	0	(2.540)	0	(2.540)	0	(2.540)
		PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM)	2007		Triwulan III	45.287.403	25.390.834	19.896.569	446.329	113.642	20.229.256	1.070.206	19.159.050	5.921.719	13.237.331	0	13.237.331	3.418.276	9.819.055
36	USAHA PENERBANGAN	PT Garuda Indonesia (GIA)	2007		Prognosa	13.773.116	13.477.283	295.833	179.959	181.524	294.268	0	294.268	40.916	253.352	0	253.352	2.565	250.787
		PT Merpati Nusantara Airlines (MNA)	2007		Unaudited	1.891.994	2.091.718	(199.724)	399.372	344.448	(144.800)	0	(144.800)	0	(144.800)	0	(144.800)	0	(144.800)
37		PT. Dirgantara Indonesia *	2007		Unaudited	757.344	824.921	(67.576)	94.041	36.843	(10.379)		(9.585)	(6.001)	(3.584)		(3.584)		(3.584)
		PT. Sarana Multigriya Finansial *	2007		Audited	83.724	20.628	63.096	2.255		65.351		65.351	252	65.098	0	65.098	0	65.098
		Grand Total				816.440.576	716.824.246	99.616.330	22.013.001	20.429.265	101.200.065	7.231.614	93.968.452	32.093.363	61.875.089	(123.421)	61.751.668	3.923.008	64.255.196

137

* Masih dibawah pembinaan Departemen Keuangan

** Tidak mengirimkan Laporan Keuangan

Audited	3
	1
Tahunan	37
Prognosa	84
Triwulan III	12
Semester	1
Tidak ada Laporannya Sama Sekali (PT Industri Soda Indonesia dan PT Survey Udara Penas, PT DI tdk ada rekap laba rugi)	3
JUMLAH	**141**

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN AUDITED TAHUN 2007

B. NERACA

(RP. Juta)

NO	SEKTOR	BUMN	SUMBER	STATUS	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAIN	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	HAK MINORITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS	EKUITAS LAIN	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
					1	2	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12+13)	15	16=(14*15)
1	ANEKA INDUSTRI	PT Garam	Audited	KS	139.555	128.893	53.482	321.929	108.243	6.030	114.274	2	200.000	-	-	-	7.653	207.653	100,00%	207.653
		PT Industri Gelas (IGLAS)	Audited	KS	46.032	173.905	3.783	223.720	182.343	68.191	250.534	-	47.007	94.583	-	-	(168.403)	(26.814)	100,00%	(26.814)
		PT Industri Soda Indonesian (ISI) **)	n.a															-		
2	ANGKUTAN DARAT	Perum DAMRI	Tahunan	S	24.606	200.599	2.185	227.391	38.902	81.506	120.409	-	19.700	-	9.775	-	77.507	106.982	100,00%	106.982
		Perum PPD	Tahunan	S	73.963	136.807	7.236	218.006	178.463	93.632	272.095	-	231.769	153.917	55.620	9.040	(504.435)	(54.089)	100,00%	(54.089)
		PT Kereta Api Indonesia (KAI)	Prognosa	S	1.966.772	2.274.709	1.057.736	5.299.218	824.272	1.222.011	2.046.283	-	2.200.000	696.820	170.000	968	185.147	3.252.935	100,00%	3.252.935
3	ASURANSI	PT Asuransi ABRI (ASABRI)	Audited	SS	51.286	4.020.199	1.637	4.073.122	7.670	3.472.954	3.480.624	-	90.000	-	-	20.910	481.588	592.498	100,00%	592.498
		PT Asuransi Ekspor Indonesia (ASEI)	Audited	KS	45.255	569.756	13.655	628.666	83.303	-	83.303	-	300.000	-	-	-	245.362	545.362	100,00%	545.362
		PT Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO)	Audited	SS	723.211	1.010.093	22.194	1.755.498	954.745	134.609	1.089.354	2.380	155.000	-	-	-	508.765	663.765	100,00%	663.765
		PT Asuransi Jasa Raharja	Audited	SS	211.629	2.281.186	5.165	2.497.980	842.947	4.661	847.608	67.716	500.000	-	-	4.193	1.078.463	1.582.656	100,00%	1.582.656
		PT Asuransi Jiwasraya	Tahunan	S	270.187	4.876.070	36.889	5.183.146	104.132	4.613.714	4.717.846	-	235.000	3.038	-	-	227.263	465.301	100,00%	465.301
		PT Asuransi Kesehatan Indonesia (ASKES)	Audited	SS	3.402.319	1.211.063	32.642	4.646.024	326.718	2.152.024	2.478.742	-	400.000	-	-	-	1.767.282	2.167.282	100,00%	2.167.282
		PT Jaminan Sosial Tenaga Kerja (JAMSOSTEK)	Audited	S	902.113	60.308.533	172.781	61.383.427	318.999	57.043.367	57.362.366	3	125.000	-	-	2.289.802	1.606.256	4.021.058	100,00%	4.021.058
		PT Reasuransi Umum Indonesia (RUI)	Audited	KS	245.216	471.977	2.685	719.878	113.278	642.159	755.437	4	40.000	-	-	18.132	(93.695)	(35.563)	100,00%	(35.563)
		PT Taspen	Audited	KS	714.587	20.455.247	3.438.396	24.608.229	180.701	22.337.267	22.517.967	7.931	12.500	-	-	474.939	1.594.891	2.082.330	100,00%	2.082.330
4	BAJA & KONSTRUKSI BAJA	PT Barata Indonesia	Audited	KS	168.229	56.040	24.544	248.813	174.658	14.090	188.747	-	128.203	111.908	-	-	(180.046)	60.066	100,00%	60.066
		PT Boma Bisma Indra (BBI)	Tahunan	TS	128.309	26.359	35.148	189.816	144.770	90.143	234.913	-	4.800	299.877	-	-	(349.773)	(45.096)	100,00%	(45.096)
		PT Krakatau Steel (KS)	Prognosa	KS	6.489.881	3.133.294	854.040	10.477.215	3.729.720	1.614.624	5.344.344	75.024	2.000.000	-	-	-	3.057.846	5.057.846	100,00%	5.057.846
5	DOK DAN PERKAPALAN	PT Dok dan Perkapalan Kodja Bahari	Prognosa	KS	328.345	398.818	3.058	730.221	1.454.155	1.253.354	2.707.509	-	76.600	85	-	324.787	(2.378.760)	(1.977.288)	99,00%	(1.957.515)
		PT Dok dan Perkapalan Surabaya (DPS)	Prognosa	S	84.807	97.748	28.176	210.731	91.086	61.426	152.512	-	40.535	402	-	1.091	16.193	58.221	100,00%	58.221
		PT Industri Kapal Indonesia (IKI)	Prognosa	KS	72.039	111.164	76.485	259.688	72.908	179.735	252.643	-	3.521	-	-	53.173	(49.649)	7.045	100,00%	7.045
		PT PAL Indonesia	Semester	KS	2.263.148	760.026	75.639	3.098.814	1.491.859	462.521	1.954.381	-	1.137.331	-	-	18.286	(11.165)	1.144.451	100,00%	1.144.451
6	ENERGI	PT Energy Management Indonesia (Persero)	Audited	S	19.443	7.739	1.837	29.019	11.735	642	12.377	-	9.100	6.455	-	-	1.087	16.643	100,00%	16.643
		PT Perusahaan Gas Negara, Tbk (PGN)	Audited	S	3.715.443	16.470.370	162.528	20.348.341	3.169.415	10.014.684	13.184.100	728.832	2.269.943	1.017.693	127.432	(331.846)	3.352.188	6.435.410	55,22%	3.553.633
		PT Perusahaan Listrik Negara (PLN)	Tahunan	KS	42.383.252	230.119.556	-	272.502.808	39.184.023	96.963.109	136.147.132	-	46.107.154	-	28.089.259	137.556.253	(75.396.991)	136.355.675	100,00%	136.355.675
		PT Tambang Batubara Bukit Asam, Tbk (PTBA)	Audited	S	3.080.350	625.096	222.625	3.928.071	695.010	421.789	1.116.799	12.154	1.152.066	30.485	-	-	1.616.567	2.799.118	65,02%	1.819.903
7	INDUSTRI BERBASIS TEKNOLOGI	PT Batan Teknologi	Prognosa	S	19.199	27.187	-	46.386	5.641	-	5.641	-	25.000	2.200	-	-	(5.654)	21.546	100,00%	21.546
		PT Industri Kereta Api (INKA)	Audited	S	220.135	19.035	111.057	350.228	133.283	7.347	140.629	-	120.280	39.646	100.000	-	(50.328)	209.598	100,00%	209.598
		PT Industri Telekomunikasi Indonesia (INTI)	Prognosa	S	549.008	94.064	-	643.072	92.717	61.620	154.336	-	488.736	-	-	-	-	488.736	100,00%	488.736
		PT LEN Industri	Audited	S	198.675	6.544	14.076	219.295	139.776	6.276	146.051	919	45.601	8.083	-	157	18.483	72.324	100,00%	72.324
8	INDUSTRI FARMASI	PT Bioforma	Audited	S	404.052	348.232	1.511	751.795	101.162	21.996	123.157	-	250.000	9.392	-	-	369.246	628.638	100,00%	628.638
		PT Indo Farma, Tbk	Audited	KS	899.307	104.847	5.284	1.009.438	686.297	31.577	717.874	1	309.927	75.100	-	-	(93.464)	291.563	80,66%	235.174
		PT Kimia Farma, Tbk	Audited	S	893.447	420.461	72.831	1.386.739	433.564	45.148	478.712	-	555.400	43.580	-	44.852	264.196	908.028	90,03%	817.497
9	INDUSTRI PERTAHANAN	PT Dahana	Audited	S	222.421	21.925	30.355	274.701	123.314	5.920	129.234	-	76.090	8.083	-	-	61.293	145.466	100,00%	145.466
		PT PINDAD	Audited	S	540.505	123.985	36.162	700.651	275.757	240.448	516.205	2	367.542	2.526	-	(177.556)	(8.068)	184.444	100,00%	184.444
10	INDUSTRI SANDANG	PT Industri Sandang Nusantara (INSAN)	Audited	KS	54.099	118.551	6.823	179.473	270.278	56.535	326.813	-	197.500	1.369	-	-	(346.209)	(147.340)	100,00%	(147.340)
		PT Primissima	Audited	KS	35.616	17.185	366	53.166	38.822	603	39.425	-	13.000	121	-	1.756	(1.116)	13.761	100,00%	13.761
11	JASA KONSTRUKSI	Perum Pembangunan Perumahan Nasional (PERUMNAS)	Prognosa	KS	910.666	34.879	201.141	1.146.686	344.177	329.435	673.612	-	1.000	433.552	-	55.036	(16.513)	473.074	100,00%	473.074
		PT Adhi Karya	Audited	S	3.952.657	239.469	141.042	4.333.167	3.268.544	519.268	3.787.812	14.121	180.132	19.144	-	904	331.055	531.235	51,00%	270.930
		PT Brantas Abipraya	Audited	KS	175.028	56.102	3.282	234.412	161.490	148.142	309.632	-	10.000	-	-	21.234	(106.454)	(75.220)	100,00%	(75.220)
		PT Hutama Karya (HK)	Prognosa	S	1.367.089	173.199	12.783	1.553.071	1.155.342	135.891	1.291.233	-	20.000	-	-	78.023	163.815	261.838	100,00%	261.838
		PT Istaka Karya	Prognosa	KS	295.487	206.232	66.464	568.183	278.670	249.082	527.752	-	50.000	115.500	-	-	(125.070)	40.430	100,00%	40.430
		PT Nindya Karya	Audited	S	914.222	84.186	34.090	1.032.497	835.575	119.237	954.812	20	17.000	-	-	45.857	14.808	77.665	100,00%	77.665
		PT Pembangunan Perumahan (PP)	Audited	S	1.967.732	124.620	7.226	2.099.578	1.574.814	191.274	1.766.088	-	110.000	-	-	-	223.490	333.490	51,00%	170.080
		PT Waskita Karya	Audited	S	1.699.845	236.779	27.155	1.963.778	1.460.742	145.987	1.606.729	-	180.000	-	-	343	176.706	357.050	100,00%	357.050
		PT Wijaya Karya (WIKA)	Audited	S	3.687.320	253.806	191.937	4.133.064	2.231.957	544.947	2.776.904	64.947	584.615	577.340	-	-	129.257	1.291.212	68,40%	883.189
12	JASA LAINNYA	Perum Jasa Tirta I	Audited	S	39.394	37.092	539	77.025	16.116	326	16.442	-	15.000	15.570	276	-	29.737	60.583	100,00%	60.583
		Perum Jasa Tirta II	Audited	S	116.579	177.162	15.056	308.797	23.882	13.662	37.544	-	124.727	-	39.820	-	106.705	271.253	100,00%	271.253
		PT Perusahaan Pengelola Aset (PPA)	Audited	S	839.495	9.456	2.550	851.501	63.311	23.832	87.143	-	300.000	1.358	-	-	463.000	764.358	100,00%	764.358
13	JASA PEMBIAYAAN	Perum Pegadaian	Audited	S	6.949.060	388.745	34.260	7.372.065	3.630.705	2.249.556	5.880.261	-	205.000	46.252	-	-	1.240.552	1.491.804	100,00%	1.491.804
		Perum Sarana Pengembangan Usaha (SPU)	Audited	S	935.497	56.541	133.945	1.125.982	59.093	121.265	180.359	-	699.733	-	-	-	245.890	945.624	100,00%	945.624
		PT Danareksa	Audited	S	3.085.141	148.073	67.434	3.300.648	1.336.126	1.236.069	2.572.195	2	701.480	85.927	-	117.163	(176.119)	728.451	100,00%	728.451
		PT Kliring Berjangka Indonesia (KBI)	Audited	KS	134.855	3.952	1.964	140.771	8.515	16.179	24.693	-	102.000	1.980	-	-	12.098	116.078	100,00%	116.078
		PT PANN Multi Finance	Audited	SS	464.614	14.139	1.507.732	1.986.484	1.713.400	1.741.228	3.454.627	-	45.997	192.066	-	-	(1.706.205)	(1.468.143)	93,00%	(1.365.373)
		PT Permodalan Nasional Madani (PNM)	Audited	S	2.101.716	47.115	17.131	2.165.962	1.710.726	8.360	1.719.086	1	300.000	-	-	556	146.319	446.875	100,00%	446.875
14	JASA PENILAI	PT Biro Klasifikasi Indonesia (BKI)	Audited	S	53.766	37.115	449	91.330	26.743	2.233	28.976	-	6.000	-	-	979	55.376	62.354	100,00%	62.354
		PT Sucofindo	Audited	S	481.100	192.888	19.461	693.449	246.639	37.424	284.062	486	75.000	-	-	-	333.901	408.901	95,00%	388.456
		PT Surveyor Indonesia (SI)	Audited	S	245.059	53.694	16.286	315.039	39.457	35.627	75.084	-	25.000	-	-	(2.548)	217.503	239.955	85,00%	203.962
		PT Survey Udara Penas **)	n.a															-		-

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN AUDITED TAHUN 2007

B. NERACA

(RP. Juta)

NO	SEKTOR	BUMN	SUMBER	STATUS	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAIN	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	HAK MINORITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS	EKUITAS LAIN	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
					1	2	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12+13)	15	16=(14*15)
15	KAWASAN INDUSTRI	PT Kawasan Berikat Nusantara (KBN)	Audited	S	121.182	284.510	27.129	432.821	41.970	33.700	75.670	-	200.000	-	-	650	156.501	357.151	88,74%	316.936
		PT Kawasan Industri Makasar (KIMA)	Prognosa	S	33.787	19.071	15.456	68.314	4.847	5.594	10.441	-	34.550	-	-	-	23.322	57.872	60,00%	34.723
		PT Kawasan Industri Medan (KIM)	Prognosa	S	79.090	17.428	-	96.518	39.328	2.543	41.870	-	18.268	-	-	-	36.380	54.648	60,00%	32.789
		PT Kawasan Industri Wijaya Kusuma (KIW)	Prognosa	KS	17.801	13.798	334	31.932	6.549	-	6.549	-	14.000	-	-	-	11.383	25.383	60,00%	15.230
		PT Pengembangan Daerah Industri (PDI) Pulau Batam	Audited	S	11.514	21.149	8.371	41.034	5.417	2.350	7.767	-	19.000	7.184	-	-	7.083	33.267	100,00%	33.267
16	KEBANDARUDARAAN	PT Angkasa Pura I (AP I)	Audited	S	1.822.659	4.974.790	678.737	7.476.187	350.795	143.286	494.080	-	1.800.000	-	4.202.050	942	979.115	6.982.106	100,00%	6.982.106
		PT Angkasa Pura II (AP II)	Audited	S	2.480.214	3.551.490	308.528	6.340.232	350.951	100.309	451.260	-	1.900.000	200.055	1.672.715	-	2.116.203	5.888.972	100,00%	5.888.972
17	KEHUTANAN	Perum Perhutani	Prognosa	S	1.096.205	221.989	27.876	1.346.070	210.684	70.760	281.444	-	700.000	-	-	-	364.627	1.064.627	100,00%	1.064.627
		PT Inhutani I	Prognosa	KS	359.716	57.550	43.880	461.146	49.690	83.326	133.016	-	445.333	16.001	6.168	-	(139.372)	328.130	100,00%	328.130
		PT Inhutani II	Prognosa	KS	191.550	34.101	9.592	235.243	33.704	17.720	51.424	-	183.083	7.852	-	-	(7.116)	183.819	100,00%	183.819
		PT Inhutani III	Prognosa	KS	305.691	6.672	37.535	349.898	2.260	6.555	8.814	-	324.120	-	-	3.495	13.469	341.083	100,00%	341.083
		PT Inhutani IV	Prognosa	KS	17.256	64.184	277	81.717	9.718	7.471	17.188	-	92.253	12.664	-	-	(40.388)	64.529	100,00%	64.529
		PT Inhutani V	Prognosa	TS	5.172	138.355	11.839	155.366	134.434	7.358	141.792	-	132.660	-	-	44.861	(163.947)	13.574	100,00%	13.574
18	KERTAS	PT Kertas Kraft Aceh	Prognosa		198.649	281.449	29.605	509.703	395.054	42.883	437.938	-	798.994	-	-	-	(727.208)	71.785	94,64%	67.938
		PT Kertas Leces	Prognosa	TS	401.452	772.799	59.371	1.233.622	532.229	948.435	1.480.664	-	140.073	1.976	-	782.116	(1.171.209)	(247.043)	100,00%	(247.043)
19	KONSULTAN KONSTRUKSI	PT Bina Karya	Prognosa	S	24.486	26.616	1.103	52.206	18.076	30.052	48.129	-	2.728	-	-	273	1.076	4.077	100,00%	4.077
		PT Indah Karya	Audited	KS	14.787	5.665	1.637	22.089	15.397	1.430	16.827	-	7.000	-	-	-	(1.738)	5.262	100,00%	5.262
		PT Indra Karya	Prognosa	KS	33.372	17.998	-	51.370	41.508	3.118	44.626	-	2.000	-	-	5.062	(319)	6.743	100,00%	6.743
		PT Virama Karya	Prognosa	S	26.334	2.080	263	28.677	12.208	4.854	17.062	-	7.400	-	-	-	4.216	11.616	100,00%	11.616
		PT Yodya Karya	Prognosa	S	27.003	2.646	150	29.800	19.925	-	19.925	-	3.500	-	-	15	6.360	9.875	100,00%	9.875
20	LOGISTIK	Perum Bulog	Prognosa	n.a	11.277.466	3.022.586	580.197	14.880.249	9.520.726	52.857	9.573.582	-	6.354.565	-	1.119.844	-	(2.167.742)	5.306.667	100,00%	5.306.667
		PT Bhanda Ghara Reksa (BGR)	Audited	S	81.983	29.765	3.682	115.430	32.415	9.446	41.862	-	40.000	-	-	-	33.568	73.568	100,00%	73.568
		PT Pos Indonesia (POSINDO)	Tahunan	KS	4.192.977	572.775	297.820	5.063.572	4.188.266	460.414	4.648.680	(31.588)	425.000	25.732	-	-	(4.252)	446.480	100,00%	446.480
		PT Varuna Tirta Prakasya (VTP)	Tahunan	KS	34.102	14.977	101	49.180	56.942	-	56.942	-	11.000	-	-	-	(18.763)	(7.763)	100,00%	(7.763)
21	PARIWISATA	PT Bali Tourism & Development Corporation	Tahunan	S	147.713	83.469	35.428	266.611	20.495	46.351	66.847	3.222	112.500	148	-	-	83.894	196.542	100,00%	196.542
		PT Hotel Indonesia Natour (HIN)	Audited	KS	72.290	122.300	15.879	210.469	76.991	78.111	155.103	-	101.700	82	-	-	(46.415)	55.367	100,00%	55.367
		PT TWC Borobudur, Prambanan dan Ratu Boko	Audited	S	18.075	72.722	4.613	95.410	5.619	-	5.619	0	79.502	106	-	(1.230)	11.414	89.791	100,00%	89.791
22	PELABUHAN	PT Pelabuhan Indonesia I (PELINDO I)	Audited	S	554.971	599.741	273.837	1.428.549	240.890	90.246	331.136	-	312.000	143.059	86.750	-	555.604	1.097.413	100,00%	1.097.413
		PT Pelabuhan Indonesia II (PELINDO II)	Audited	S	1.781.554	3.559.013	101.229	5.441.796	624.827	562.895	1.187.723	34.844	1.000.000	35.735	-	-	3.183.495	4.219.229	100,00%	4.219.229
		PT Pelabuhan Indonesia III (PELINDO III)	Audited	S	1.559.635	2.071.366	258.675	3.889.676	495.171	621.630	1.116.802	222.248	525.000	284.334	222.304	-	1.518.989	2.550.627	100,00%	2.550.627
		PT Pelabuhan Indonesia IV (PELINDO IV)	Audited	S	278.909	780.498	9.289	1.068.696	95.768	61.482	157.250	-	133.000	217.624	252.524	-	308.298	911.446	100,00%	911.446
23	PELAYARAN	PT Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP)	Prognosa	S	272.158	887.930	32.518	1.192.605	55.378	6.161	61.539	-	266.362	147.133	647.385	-	70.186	1.131.066	100,00%	1.131.066
		PT Djakarta Lloyd	Tahunan	S	104.130	835.994	222.142	1.162.266	328.081	508.496	836.576	(4)	180.640	-	1.030.702	-	(885.649)	325.693	100,00%	325.693
		PT Pelayaran Bahtera Adhiguna	Prognosa	S	91.850	60.014	4.506	156.370	88.670	43.796	132.466	-	31.130	-	-	-	(7.226)	23.904	100,00%	23.904
		PT Pelayaran Nasional Indonesia (PELNI)	Prognosa	KS	888.810	4.040.337	59.303	4.988.450	377.846	397.522	775.368	-	359.000	5.140.195	-	-	(1.286.113)	4.213.082	100,00%	4.213.082
24	PENGERUKAN	PT Pengerukan Indonesia (RUKINDO)	Audited	KS	95.847	293.637	24.035	413.520	178.317	88.967	267.284	-	482.923	-	-	-	(336.687)	146.236	100,00%	146.236
25	PENUNJANG KONSTRUKSI	PT Amarta Karya	Prognosa	S	39.335	23.383	3.811	66.528	44.317	25.174	69.490	-	11.250	886	-	2.333	(17.431)	(2.962)	100,00%	(2.962)
		PT Jasa Marga	Audited	S	4.075.786	9.396.955	374.487	13.847.227	1.325.320	6.307.223	7.632.543	239.368	3.400.000	2.345.069	-	3	230.244	5.975.316	70,00%	4.182.721
26	PERBANKAN	PT Bank Ekspor Indonesia (BEI)	Audited	S	10.241.601	7.391	43.045	10.292.037	6.125.953	-	6.125.953	-	3.000.000	-	-	-	1.166.084	4.166.084	100,00%	4.166.084
		PT Bank Mandiri, Tbk	Audited	S	305.172.128	8.752.929	5.160.533	319.085.590	296.900.237	2.935.275	299.835.512	6.346	10.502.369	6.670.869	-	3.265.567	8.904.837	29.243.732	67,47%	19.730.746
		PT Bank Negara Indonesia, Tbk (BNI)	Audited	S	175.825.149	4.716.777	2.799.685	183.341.611	165.160.712	933.704	166.094.416	27.610	7.789.288	5.812.879	-	(143.168)	3.760.586	17.219.585	76,36%	13.148.875
		PT Bank Rakyat Indonesia, Tbk (BRI)	Audited	S	198.030.371	2.990.583	2.713.984	203.734.938	182.157.050	2.140.253	184.297.303	-	6.158.900	2.676.620	-	624.023	9.978.092	19.437.635	56,83%	11.046.408
		PT Bank Tabungan Negara (BTN)	Audited	S	34.839.624	1.013.942	839.681	36.693.247	33.656.227	249.608	33.905.835	-	1.250.000	13.843.540	-	662.850	(12.968.978)	2.787.412	100,00%	2.787.412
27	PERCETAKAN & PENERBITAN	Perum Percetakan Negara Indonesia (PNRI)	Prognosa	S	115.118	31.136	18.120	164.374	8.773	56.680	65.453	-	42.507	-	1.003	736	54.675	98.921	100,00%	98.921
		Perum Percetakan Uang RI (PERURI)	Prognosa	S	496.062	940.901	-	1.436.963	254.167	629.295	883.462	-	363.573	-	-	-	189.928	553.501	100,00%	553.501
		PT Balai Pustaka (BP)	Prognosa	TS	32.113	6.535	9.346	47.994	90.997	8.883	99.879	-	10.000	-	-	-	(61.885)	(51.885)	100,00%	(51.885)
		PT Pradnya Paramita	Prognosa	KS	3.313	1.550	-	4.863	1.437	-	1.437	-	1.871	-	-	-	1.555	3.425	100,00%	3.425
28	PERDAGANGAN	PT Perusahaan Perdagangan Indonesia (PPI)	Tahunan	TS	495.791	325.267	54.616	875.674	769.566	573.372	1.342.938	293	156.200	86	-	196.904	(820.746)	(467.556)	100,00%	(467.556)
		PT PP Berdikari	Tahunan	KS	186.010	71.317	13.268	270.595	99.851	25.651	125.501	-	75.000	-	-	14	70.079	145.094	100,00%	145.094
		PT Sarinah	Prognosa	S	50.460	88.433	16.202	135.095	31.143	18.572	49.715	-	25.000	-	-	-	60.380	85.380	100,00%	85.380
29	PERIKANAN	Perum Prasarana Perikanan Samudra (PPS)	Prognosa	S	25.099	68.249	5.156	98.504	10.247	7.308	17.555	-	24.498	4.400	47.037	-	5.014	80.949	100,00%	80.949
		PT Perikanan Nusantara	Prognosa	n.a	65.256	43.449	42.036	150.741	112.292	86.392	198.684	-	145.005	-	-	32	(192.980)	(47.943)	100,00%	(47.943)
30	PERKEBUNAN	PT Perkebunan Nusantara I (PTPN I)	Audited	KS	39.557	410.344	13.318	463.219	178.390	273.308	451.699	-	120.000	-	-	-	(108.480)	11.520	100,00%	11.520
		PT Perkebunan Nusantara II (PTPN II)	Audited	KS	413.684	1.174.248	228.809	1.816.741	906.760	902.882	1.709.641	-	290.000	-	-	-	(182.901)	107.099	100,00%	107.099
		PT Perkebunan Nusantara III (PTPN III)	Audited	S	822.842	761.898	2.375.948	3.960.688	745.253	1.306.313	2.051.566	6.838	315.000	-	-	(22.895)	1.610.180	1.902.285	100,00%	1.902.285
		PT Perkebunan Nusantara IV (PTPN IV)	Audited	S	1.294.792	2.679.656	194.768	4.169.216	996.163	1.293.924	2.290.087	8.928	975.000	-	-	322	894.880	1.870.202	100,00%	1.870.202
		PT Perkebunan Nusantara IX (PTPN IX)	Prognosa	S	437.824	533.085	18.520	989.428	576.636	115.411	692.047	-	165000	-	-	-	132.381	297.381	100,00%	297.381
		PT Perkebunan Nusantara V (PTPN V)	Audited	S	775.480	612.029	1.016.236	2.403.745	694.647	789.442	1.484.089	-	250.000	48.813	-	-	620.843	919.656	100,00%	919.656
		PT Perkebunan Nusantara VI (PTPN VI)	Prognosa	S	154.364	885.943	-	1.040.307	285.155	392.501	677.657	-	200.000	-	-	198	162.453	362.651	100,00%	362.651

DAFTAR 35.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA BUMN AUDITED TAHUN 2007

B. NERACA

(RP. Juta)

NO	SEKTOR	BUMN	SUMBER	STATUS	AKTIVA LANCAR	AKTIVA TIDAK LANCAR	AKTIVA LAIN	TOTAL AKTIVA	KEWAJIBAN JANGKA PENDEK	KEWAJIBAN JANGKA PANJANG	TOTAL KEWAJIBAN	HAK MINORITAS	MODAL SAHAM	TAMBAHAN MODAL DISETOR	BPYDS	EKUITAS LAIN	LABA DITAHAN	TOTAL EKUITAS	% SAHAM NEGARA	KEPEMILIKAN NEGARA
					1	2	3	4=(1+2+3)	5	6	7=(5+6)	8	9	10	11	12	13	14=(9+10+11+12+13)	15	16=(14*15)
		PT Perkebunan Nusantara VII (PTPN VII)	Audited	S	950.513	442.116	1.016.682	2.409.310	731.089	680.940	1.412.029	-	365.000	-	-	19.092	613.190	997.282	100,00%	997.282
		PT Perkebunan Nusantara VIII (PTPN VIII)	Prognosa	S	389.394	670.750	439.788	1.499.932	339.283	470.530	809.813	3.451	270.000	-	-	-	416.668	686.668	100,00%	686.668
		PT Perkebunan Nusantara X (PTPN X)	Prognosa	S	797.879	535.190	29.258	1.362.327	473.549	135.062	608.611	87	632.749	-	-	-	120.880	753.629	100,00%	753.629
		PT Perkebunan Nusantara XI (PTPN XI)	Prognosa	S	799.022	309.052	187.443	1.295.517	525.579	340.672	866.251	-	165.000	33.526	-	-	230.740	429.266	100,00%	429.266
		PT Perkebunan Nusantara XII (PTPN XII)	Prognosa	S	315.084	598.133	31.842	945.038	259.428	244.473	503.901	-	381.044	-	-	-	60.094	441.138	100,00%	441.138
		PT Perkebunan Nusantara XIII (PTPN XIII)	Audited	S	396.816	1.105.458	111.724	1.613.998	620.402	206.347	826.749	-	460.000	-	-	-	327.249	787.249	100,00%	787.249
		PT Perkebunan Nusantara XIV (PTPN XIV)	Prognosa	KS	212.755	226.426	141.712	580.893	664.915	145.974	810.889	-	135.000	-	-	-	(364.996)	(229.996)	100,00%	(229.996)
		PT Rajawali Nusantara Indonesia (RNI)	Prognosa	S	1.819.544	1.298.192	739.116	3.797.852	2.726.103	441.227	3.167.330	160.776	352.425	-	-	-	117.321	469.746	100,00%	469.746
31	PERTAMBANGAN	PT Aneka Tambang, Tbk (ANTAM)	Audited	S	8.048.100	3.387.415	602.402	12.037.917	1.798.817	1.474.301	3.273.118	1.221	953.846	2.526	-	22.018	7.785.189	8.763.579	65,00%	5.696.326
		PT Pertamina	Tahunan	S	151.211.312	100.174.826	2.165.053	253.551.191	80.825.411	28.480.445	109.305.856	1.661.669	100.000.000	6.046.386	-	(7.615.327)	44.152.607	142.583.666	100,00%	142.583.666
		PT Sarana Karya	Prognosa	S	13.116	1.167	2.325	16.608	14.985	-	14.985	-	5.000	7.432	-	-	(10.809)	1.623	100,00%	1.623
		PT Timah, Tbk	Audited	S	3.922.668	561.405	548.639	5.032.712	1.350.230	323.163	1.673.393	273	251.651	120.792	-	9.785	2.976.818	3.359.046	65,00%	2.183.380
32	PERTANIAN	PT Pertani	Prognosa	KS	234.444	32.319	12.670	279.433	154.213	58.448	212.661	-	54.662	-	-	-	12.110	66.772	100,00%	66.772
		PT Sang Hyang Seri (SHS)	Prognosa	S	239.977	130.072	22.103	392.152	164.661	71.385	236.046	-	34.000	100.000	-	-	22.107	156.107	100,00%	156.107
33	PUPUK	PT Pupuk Sriwidjaja (PUSRI)	Audited	S	10.541.478	11.823.997	855.783	23.221.258	5.809.347	6.713.275	12.522.623	97.425	3.963.949	325.058	-	-	6.312.203	10.601.209	100,00%	10.601.209
34	SEMEN	PT Semen Baturaja	Audited	S	225.221	383.950	7.588	616.759	207.048	237.819	444.867	-	60.414	1	-	-	111.478	171.892	100,00%	171.892
		PT Semen Gresik, Tbk	Audited	S	5.267.912	3.176.145	71.170	8.515.227	1.445.874	349.766	1.795.640	92.324	593.152	1.247.355	-	-	4.786.755	6.627.263	51,01%	3.380.567
35	TELEKOMUNIKASI	Perum Produksi Film Negara (PFN)	Tahunan	KS	1.212	30.885	-	32.097	6.547	35	6.582	-	40.000	14.904	-	-	(29.388)	25.515	100,00%	25.515
		PT Telekomunikasi Indonesia, Tbk (TELKOM)	Triwulan III	S	13.295.046	58.492.310	4.997.602	76.784.958	19.840.925	16.863.468	36.704.393	8.262.080	5.040.000	1.073.333	-	(1.137.290)	26.842.442	31.818.485	51,76%	16.469.248
36	USAHA PENERBANGAN	PT Garuda Indonesia (GIA)	Audited	KS	5.395.568	3.066.207	1.435.712	9.897.487	6.287.813	1.779.338	8.067.151	1.156	7.152.629	1.008.402	-	8.336	(6.340.187)	1.829.180	100,00%	1.829.180
		PT Merpati Nusantara Airlines (MNA)	Prognosa	KS	544.970	226.366	235.833	1.007.169	1.761.690	432.981	2.194.671	-	1.486.299	-	-	-	(2.673.801)	(1.187.502)	95,79%	(1.137.508)
37		PT. Dirgantara Indonesia *	Unaudited		2.045.726	366.692		2.412.419	796.673	88.656	885.329		1.950.417	1.815.549	109.282	31.051	(3.829.814)	76.485	92,76%	70.948
		PT. Sarana Multigriya Finansial *	Audited	S	827.754	360.396	-	1.188.150	5.251	2.026	7.277	-	1.000.000	180.873	-	-	-	1.180.873	100,00%	1.180.873
		Grand Total			1.068.976.922	603.491.350	41.895.909	1.714.364.182	902.671.038	294.355.669	1.197.026.708	11.773.112	238.593.554	51.616.898	37.880.663	137.356.200	40.097.888	505.545.203		455.367.879

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN (MINORITAS)
A. AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS

No.	Perusahaan	Sumber (a)	Status b)	Aktiva Lancar	Aktiva Tidak Lancar	Aktiva Lainnya*	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal Saham	Tambahan Modal Disetor	BPYBDS*	Ekuitas Lainnya	Laba Ditahan	Total Ekuitas	% Saham Negara	Kepemilikan Negara
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8) =(5)+(6)+(7)	(9)	(10)	(11) =(9)+(10)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19) =(17)*(18)
1	PT Atmindo		S				0			0							0,37	0
2	PT Semen Kupang		-				0			0							0,39	0
3	PT Indonesia Asahan Alimunium (INALUM)		S				0			0							0,41	0
4	PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO)	1	KS	1.831.344.000.000	139.686.000.000	81.973.000.000	2.053.003.000.000	193.654.000.000	131.723.000.000	325.377.000.000	400.000.000.000	850.000.000.000	0	419.641.000.000	57.984.000.000	1.727.625.000.000	0,82	1.423.563.000.000
5	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)	2		133.210.053.412	42.225.157.415	490.998.766	175.926.209.593	24.157.529.986	13.916.057.898	38.073.587.884	30.000.000.000			84.239.682.235	23.612.939.474	137.852.621.709	0,50	68.926.310.855
6	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)	1	S	96.344.726.000	50.339.940.000	4.596.744.000	151.281.410.000	20.919.883.000	12.516.818.000	33.436.701.000	50.000.000.000			3.122.000	67.841.587.000	117.844.709.000	0,50	58.922.354.500
7	PT Kertas Padalarang	2	KS	28.531.785.310	19.831.539.841	763.180.148	49.126.505.298	37.045.162.185	262.453.001	37.307.615.186	61.327.000.000			-1.427.282.624	-48.080.827.264	11.818.890.112	0,41	4.817.970.554
8	PT Bank Bukopin	1	S	33.604.056.000.000	321.991.000.000	520.130.000.000	34.446.177.000.000	208.481.000.000	32.272.903.000.000	32.481.384.000.000	782.479.000.000	217.832.000.000		964.482.000.000	0	1.964.793.000.000	0,18	142.332.930.100
9	PT Rekayasa Industri (REKIND)	1	S	1.205.761.854.000	256.976.006.000		1.462.737.860.000	951.408.494.000	24.272.927.000	975.681.421.000	50.300.000.000				436.756.439.000	487.056.439.000	0,05	2.499.910.000
10	PT Freeport Indonesia	1	S	8.788.294.341.000	30.830.270.800.000	0	39.618.565.141.000	7.058.626.857.000	11.032.851.460.000	18.091.478.317.000	214.272.831.000	2.302.267.332.000	0	69.615.829.000	18.940.930.832.000	21.527.086.824.000	0,09	20.055.936.982
11	PT Bahana PUI (BPUI)	1	S	1.945.937.953.000	227.713.135.000	58.119.429.000	2.231.770.517.000	1.796.991.266.000	1.069.549.921.000	2.866.541.187.000	22.500.000.000			5.215.179.000	-662.485.849.000	-634.770.670.000	0,18	-112.862.225.126
12	PT Dirgantara Indonesia (PTDI) *)		-				0			0							-	0
13	PT Indosat, Tbk	1	-	10.794.127.000.000	34.510.959.000.000		45.305.086.000.000	11.658.581.000.000	17.101.775.000.000	28.760.356.000.000	543.393.000.000	1.546.587.000.000	0	409.989.000.000	14.044.761.000.000	16.544.730.000.000	0,14	77.650.859.700
14	PT Kertas Basuki Rahmat	1	-	3.002.285.990	1.034.851.005.952		1.037.853.291.942	77.991.622.031	477.247.023.487	555.238.645.518	668.625.000.000	1.531.251.858.618	0		-1.717.262.212.194	482.614.646.424	0,10	66.862.500.000
15	PT Kertas Blabak	2	-	14.512.002.217	140.043.207.114	2.439.941.622	156.995.150.953	76.012.321.927	90.800.143.759	166.812.465.686	63.531.000.000	0		123.697.701.153	-197.046.015.886	-9.817.314.733	0,01	533.660.400
16	PT Asean Bintulu Fertilizer (ABF)		-				0			-							-	-
17	PT Asean Copper Product		-				0			-							-	
18	PT JIHD	1	-	2.330.716.569.000	2.595.250.869.000	154.975.073.000	5.080.942.511.000			3.861.268.318.000	965.015.600.000	1.219.436.685.000		-123.341.997.909	-1.235.543.687.000	1.219.674.193.000	0,01	12.834.707.480
19	PT Intirub		-				0			0							0,10	0
20	PT Socfindo	1	S	461.089.581.402	839.971.383.670		1.301.060.965.072	371.518.426.535	203.499.611.929	575.018.038.464	42.250.000.000	3.670.500.000		336.638.482	679.785.788.126	726.042.926.608	0,10	4.225
21	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI)						0			0							0,05	0
	TOTAL			**61.236.928.151.330**	**71.010.109.043.992**	**823.488.366.537**	**133.070.525.561.858**	**22.475.387.562.664**	**62.431.317.416.074**	**84.906.704.978.738**	**3.893.693.431.000**	**7.671.045.375.618**	**0**	**1.952.450.871.337**	**30.391.253.994.256**	**44.302.551.265.120**		**1.766.137.919.669**

Keterangan:

(a) 1) Telah diaudit (*audited*); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (*unaudited*); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa: 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ; 7) Audited Th 2005

(b) SS = Sangat Sehat; S = Sehat; KS = Kurang Sehat; TS = Tidak Sehat

(c) BPYBDS = Bagian Pemerintah yang Belum Ditentukan Statusnya

*). Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Nomor:S-411/MK.06/2006 tanggal 25 September 2006 dan Surat Menteri Negara BUMN Nomor :S-559/MBU/2006 tanggal 29 Nopember 2007 dinyatakan bahwa Pengelolaan PT Dirgantara Indonesia (Persero) kembali berada dibawah Menteri Negara BUMN sebagai pemegang 92.9% Saham PT Dirgantara Indonesia (Persero)

DAFTAR 35.D

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN PERUSAHAAN NEGARA (NON BUMN-MINORITAS)
B. PENDAPATAN, BEBAN, DAN LABA (RUGI) BERSIH

No.	Perusahaan	Sumber (a)	Status b)	Pendapatan Usaha	Beban Usaha	Pendapatan Kotor	Pendapatan Lain-lain	Beban Lain-lain	Laba Rugi Sebelum PKLB	PKLB c)	Laba (Rugi) Sebelum Pajak	Pajak Penghasilan	Hak Minoritas	Laba (Rugi) bersih
(1)		(3)	(4)	(5)	(6)	(7)=(5)-(6)	(8)	(9)	(10)=(7)+(8)-(9)	(11)	(12)=(10)-(11)	(13)	(14)	(15)=(12)-(13)-(14)
1	PT Atmindo		S			-			-					-
2	PT Semen Kupang		-			-			-					-
3	PT Indonesia Asahan Alimunium (INALUM)		S			-			-					-
4	PT Bank Bukopin	1	S	3.205.929.000.000	1.924.020.000.000	1.281.909.000.000	289.037.000.000	1.027.335.000.000	543.611.000.000		543.611.000.000	168.350.000.000	135.000.000	375.126.000.000
5	PT Asuransi Kredit Indonesia (ASKRINDO)	1	KS	622.929.000.000	553.986.000.000	68.943.000.000	4.936.000.000	19.337.000.000	54.542.000.000	-	54.542.000.000	3.441.000.000		57.983.000.000
6	PT Surabaya Industrial Estate Rungkut (SIER)	2	-	68.571.277.472	43.706.871.111	24.864.406.360	5.511.324.782	1.572.661.053	28.803.070.089		28.803.070.089	5.188.051.670	2.078.945	23.612.939.474
7	PT Jakarta Industrial Estate Pulogadung (JIEP)	1	S	43.512.218.000	30.229.828.000	13.282.390.000	4.938.292.000		18.220.682.000		18.220.682.000	2.931.847.000		15.288.835.000
8	PT Kertas Padalarang	2	KS	67.621.013.524	67.759.944.898	(138.931.374)	197.288.461	4.571.951.149	(4.513.594.062)		(4.513.594.062)	(83.378.723)		(4.430.215.339)
9	PT Rekayasa Industri (REKIND)	1	S	1.817.405.636.000	1.703.530.904.000	113.874.732.000	49.288.286.000	64.326.394.000	98.836.624.000		98.836.624.000	40.196.619.000	1.424.354.000	57.215.651.000
10	PT Freeport Indonesia	1	S	45.287.672.861.000	15.884.361.723.000	29.403.311.138.000	262.356.826.000	77.226.381.000	29.588.441.583.000		29.588.441.583.000	10.233.432.673.000		19.355.008.910.000
11	PT Bahana PUI (BPUI)	1	S	641.777.904.000	332.059.202.000	309.718.702.000		1.790.415.000	307.928.287.000		307.928.287.000	58.811.960.000	20.200.936.000	228.915.391.000
12	PT Dirgantara Indonesia (PTDI) *).		-			-			-		-			-
13	PT Indosat, Tbk	1	-	16.488.495.000.000	11.968.891.000.000	4.519.604.000.000	-	1.589.988.000.000	2.929.616.000.000	-	2.929.616.000.000	859.517.000.000	28.056.000.000	2.042.043.000.000
14	PT Kertas Basuki Rahmat	1	-	9.075.836.003	12.830.913.409	(3.755.077.406)	27.927.173.684		24.172.096.278	-	24.172.096.278	-		24.172.096.278
15	PT Kertas Blabak	2	-	27.618.992.878	48.612.625.956	(20.993.633.078)	488.225.336	9.709.782.998	(30.215.190.740)		(30.215.190.740)			(30.215.190.740)
16	PT Asean Bintulu Fertilizer (ABF)		-			-			-		-			-
17	PT Asean Copper Product		-			-			-		-			-
18	PT JIHD	1	-	485.653.821.000	549.724.785.000	(64.070.964.000)	32.027.400.000	328.451.075.000	(360.494.639.000)		(360.494.639.000)	395.528.000	142.211.637.000	(219.032.906.000)
19	PT Intirub		-			-			-		-			
20	PT Socfindo	1	S	1.764.039.322.187	934.472.190.933	829.567.131.254	23.730.108.847	6.304.188.066	846.993.052.035		846.993.052.035	253.943.451.693		593.049.600.342
21	PT Prasadha Pamunah Limbah Industri (PPLI)		-			-			-		-			-
TOTAL SELURUH BIDANG INDUSTRI				**70.530.301.882.064**	**34.054.185.988.308**	**36.476.115.893.756**	**700.437.925.110**	**3.130.612.848.266**	**34.045.940.970.599**	**-**	**34.045.940.970.599**	**11.626.124.751.640**	**192.030.005.945**	**22.518.737.111.015**

Keterangan:

(a) 1) Telah diaudit (*audited*); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (*unaudited*); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa: 6) RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran Perusahaan ; 7) Audited Th 2007

(b) SS = Sangat Sehat; S = Sehat; KS = Kurang Sehat; TS = Tidak Sehat

(c) PKLB = Pos Kejadian Luar Biasa

*). Berdasarkan Surat dari Menteri Keuangan Nomor:S-411/MK.06/2006 tanggal 25 September 2006 dan Surat Menteri Negara BUMN Nomor :S-559/MBU/2006 tanggal 29 Nopember 2007 dinyatakan bahwa Pengelolaan PT Dirgantara Indonesia (Persero) kembali berada dibawah Menteri Negara BUMN sebagai pemegang 92.9% Saham PT Dirgantara Indonesia (Persero)

DAFTAR 36.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2007

No.	BADAN HUKUM MILIK NEGARA	Sumber a)	Aktiva Lancar	Aktiva Lancar Lainnya	Aktiva Tetap	Aktiva Lain-lain	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Ekuitas Dana Lancar Tidak Terikat	Ekuitas Dana Lancar Terikat Temporer	Ekuitas Dana Lancar Terikat Permanen			Ekuitas Dana Lancar	Ekuitas Dana Tidak Lancar	Ekuitas Dana Cadangan	Total Ekuitas Dana
													PMP*	Lain-lain	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9	10	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Institut Pertanian Bogor	2	45.148.772.579		763.611.032.247		808.759.804.826	39.432.383.729	34.249.942.728	73.682.326.457	735.077.478.369				-				735.077.478.369
2	Universitas Airlangga	2	76.766.509.182		458.478.801.067		535.245.310.249	63.153.320.144	-	63.153.320.144	-				-	472.091.990.105	-		472.091.990.105
3	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas	audited 2006	110.203.038.614	-	24.277.017.669		134.480.056.283	-		-	-	-	-	-	-	134.480.056.283			134.480.056.283
TOTAL			**232.118.320.375**		**1.246.366.850.983**	-	**1.478.485.171.358**	**102.585.703.873**	**34.249.942.728**	**136.835.646.601**	**735.077.478.369**		-	-	-	**606.572.046.388**	-	-	**1.341.649.524.757**

Keterangan:

a) 1) Telah diaudit (*audited*); 2) Laporan Tahunan belum diaudit (*unaudited*); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa; 6)RKAP = Rencana Kerja dan Anggaran BHMN;7).Laporan Keuangan tahun 2005 (Audited)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN HUKUM MILIK NEGARA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
PER 31 DESEMBER 2007

No.	BADAN HUKUM MILIK NEGARA	Sumber a)	Aktiva Lancar	Aktiva Lancar Lainnya	Aktiva Tetap	Aktiva Lain-lain	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Ekuitas Dana Lancar Tidak Terikat	Ekuitas Dana Lancar Terikat Temporer	Ekuitas Dana Lancar Terikat Permanen			Ekuitas Dana Lancar	Ekuitas Dana Tidak Lancar	Ekuitas Dana Cadangan	Total Ekuitas Dana
													PMP*	Lain-lain	Total				
1	2	3	4	5	6	7	8=4+5+6+7	9	10	11=9+10	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1	Institut Pertanian Bogor	2	45.148.772.579		763.611.032.247		808.759.804.826	39.432.383.729	34.249.942.728	73.682.326.457	735.077.478.369				-				735.077.478.369
2	Universitas Airlangga	2	76.766.509.182		458.478.801.067		535.245.310.249	63.153.320.144	-	63.153.320.144	-				-	472.091.990.105	-		472.091.990.105
3	Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Migas	Audited 2006	110.203.038.614	-	24.277.017.669		134.480.056.283	-		-	-	-	-	-	-	134.480.056.283			134.480.056.283
TOTAL			**232.118.320.375**		**1.246.366.850.983**	-	**1.478.485.171.358**	**102.585.703.873**	**34.249.942.728**	**136.835.646.601**	**735.077.478.369**		-	-	-	**606.572.046.388**	-	-	**1.341.649.524.757**

Keterangan:

a) 1) Telah diaudit (*audited*); 2) Laporan Tahunan belum diaudit (*unaudited*); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa; 6)RKAP=Rencana Kerja dan Anggaran BHMN;7).Laporan Keuangan tahun 2005 (Audited)

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
(PER 31 DESEMBER 2007)

No.	Badan Lainnya	Sumber a)	Aktiva Lancar	Aktiva Tetap	Aktiva Lain-lain	Total Aktiva	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	Total Kewajiban	Modal	Surplus/ (Defisit) Tahun Lalu	Surplus/ (Defisit) Tahun Berjalan	Total Ekuitas
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7) =(4)+(5)+(6)	(8)	(9)	(10) =(8)+(9)	(11)	(12)	(13)	(14)
1	Lembaga Penjamin Simpanan	1	10.279.976.544.000	4.083.036.000	5.368.973.000	10.289.428.553.000			3.337.479.609.000	6.951.948.944.000			6.951.948.944.000
2	BP3 Taman Mini Indonesia	1	14.602.074.428	26.915.301.935	876.405.007	42.393.781.370	1.431.676.590	11.916.803.786	13.348.480.376	29.045.300.994			29.045.300.994
3	Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabhakti	1	24.813.209.698	12.049.541.450	68.804.000	36.931.555.148	10.066.995.399	-	10.066.995.399	24.602.389.995		2.262.169.754	26.864.559.749
4	Yayasan Gedung Veteran RI	2	3.466.462.528	28.575.225	-	3.495.037.753	3.605.000		3.605.000	3.491.432.753			3.491.432.753
5	Otorita Batam	2	194.331.754.099	3.497.735.407.687	16.174.625.913	3.708.241.787.699	42.674.020.318	4.063.578.344	46.737.598.662	3.558.989.422.380	102.514.766.657		3.661.504.189.037
6	Otorita Asahan	audited 2006		449.482.699		449.482.699			-				449.482.699
7	Badan Pengelola Gelora Bung Karno	audited 2006	70.222.484.013	13.782.012.421.345	479.163.050	13.852.714.068.407	3.761.726.769	-	3.761.726.769	################	(30.606.207.695)	13.667.384.888	13.661.282.017.192
8	Badan Pengelola Komplek Kemayoran	1	650.273.352.355	4.730.543.986.333		5.380.817.338.688	30.499.691.090		30.499.691.090	4.833.515.200.000	574.631.818.570	(57.829.370.972)	5.350.317.647.598
9	INDRA	1	55.947.623.338			55.947.623.338	172.745.499		172.745.499				55.774.877.839
TOTAL			11.293.633.504.458	22.053.817.752.674	22.967.970.970	33.370.419.228.102	88.610.460.665	15.980.382.130	3.442.070.451.795	################	646.540.377.532	(41.899.816.330)	29.740.678.451.861

Keterangan:

a) 1) Telah diaudit (*audited*); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (*unaudited*); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa.

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAINNYA
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS/DEFISIT BERSIH
(PER 31 DESEMBER 2007)

No.	Badan Lainnya	Sumber a)	Pendapatan Aktivitas Operasional	Beban Aktivitas Operasional	Surplus (Defisit) Aktivitas Operasional	Pendapatan Aktivitas Non Operasional	Beban Aktivitas Non Operasional	Surplus (Defisit) Sebelum PKLB	PKLB b)	Surplus (Defisit) Sebelum Pajak	Pajak Penghasilan	Surplus (Defisit) Bersih
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)=(4)-(5)	(7)	(8)	(9)=(6)+(7)-(8)	(10)	(11)=(9)-(10)	(12)	(13)=(11)-(12)
1	Lembaga Penjamin Simpanan	1	3.567.502.413.000	1.877.599.082.000	1.689.903.331.000	8.363.951.000	452.246.000	1.697.815.036.000		1.697.815.036.000	319.711.053.000	1.378.103.983.000
2	BP3 Taman Mini Indonesia	1	54.304.107.129	43.665.817.915	10.638.289.214	-	-	10.638.289.214	-	10.638.289.214	-	10.638.289.214
3	Badan Pengelola Gedung Manggala Wanabhakti	1	43.524.310.487	38.697.964.614	4.826.345.873	1.803.766.452	1.239.138.343	5.390.973.982	-	5.390.973.982	3.128.804.228	2.262.169.754
4	Yayasan Gedung Veteran RI	2	3.972.796.911	2.458.169.030	1.514.627.881			1.514.627.881		1.514.627.881		1.514.627.881
5	Otorita Batam	2	428.267.841.677	329.964.608.184	98.303.233.492	7.330.955.606	3.119.422.441	102.514.766.657		102.514.766.657		102.514.766.657
6	Otorita Asahan											
7	Badan Pengelola Gelora Bung Karno*)	audited 2006	63.900.620.722	50.233.235.835	13.667.384.888			13.667.384.888		13.667.384.888	-	13.667.384.888
8	Badan Pengelola Komplek Kemayoran	1	17.786.584.967	97.947.939.295	(80.161.354.328)	23.862.986.074	1.531.002.717	(57.829.370.971)	-	(57.829.370.971)		(57.829.370.971)
9	INDRA	1	19.556.341.130	5.550.285.080	14.006.056.050			14.006.056.050		14.006.056.050		14.006.056.050
TOTAL			**4.198.815.016.023**	**2.446.117.101.953**	**1.752.697.914.070**	**41.361.659.132**	**6.341.809.501**	**1.787.717.763.701**	**-**	**1.787.717.763.701**	**322.839.857.228**	**1.464.877.906.473**

Keterangan:

a) 1) Telah diaudit (*audited*); 2) Lap. Tahunan belum diaudit (*unaudited*); 3) Lap. Semester; 4) Lap. Triwulan ; 5) Prognosa:

b) PKLB = Pos Kejadian Luar Biasa

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
Per 31 Desember 2007
BERDASARKAN SAK

No	JENIS LAYANAN	BIDANG/ESELON I/SATKER	ASET										Kewajiban				Ekuitas Dana		Keterangan
			Aset Lancar			Aset Tetap					Aset Lainnya		Utang Jk Pendek		Utang Jk. Panjang		Ekuitas Dana Lancar	Ekuitas Dana Investasi	
			Kas	Piutang	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset tak Berwujud	Aset Lain-lain	Pihak Ke-3	Utang Jk. Pendek Lainnya	Utang Jk. Panjang	Utang Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
1	Penyediaan Barang dan/atau	**DEPARTEMEN KESEHATAN (024)**																	
		A. BIDANG KESEHATAN																	
		1 RS. Cipto Mangunkusumo, Jakarta	55.266.734.675	80.039.512.592	23.288.735.877	21.913.297.097	106.179.661.756	166.043.602.504	-	-	-	27.652.796.312	14.463.006.708	-	989.278.549	-	144.131.976.436	320.800.079.120	
		2 RSUP Fatmawati, Jakarta	9.264.468.590	17.565.062.212	7.653.658.098	104.330.980.000	56.556.738.314	52.539.342.282	-	-	-	-	8.144.358.791	-	-	-	26.338.830.109	213.427.060.596	
		3 RSUP Persahabatan, Jakarta	10.072.065.162	30.557.264.999	7.278.871.007	3.546.052.880	70.465.595.107	43.363.897.499	-	3.066.041.050	-	599.432.801	11.562.730.124	3.305.587.293	-	-	33.039.883.751	121.041.019.337	
		4 RS JPD Harapan Kita, Jakarta	114.753.205.511	49.807.650.258	12.301.528.215	11.060.000.000	117.869.937.473	56.564.635.585	1.711.344.274	-	1.843.900.880	-	42.359.457.996	176.120.353	-	260.521.247	134.326.805.635	188.789.296.965	
		5 RSAB Harapan Kita, Jakarta	31.470.294.000	8.266.819.000	11.559.858.000	39.158.483.000	42.849.260.000	43.034.468.000	-	-	-	-	14.510.503.000	-	-	-	36.786.468.000	125.042.211.000	
		6 RS Kanker Dharmais, Jakarta	8.693.935.634	25.740.251.092	6.798.092.133	73.253.070.000	57.086.424.740	12.453.990.122	-	-	-	17.055.890.756	19.387.386.248	3.221.734.213	-	-	-	178.472.534.016	
		7 RS. Hasan Sadikin, Bandung	25.244.864.901	42.500.205.552	16.733.502.509	9.646.158.625	122.009.581.707	166.856.951.389	-	-	1.273.420.320	12.240.842.375	5.894.852.498	1.023.148.644	-	-	77.560.571.820	312.026.954.416	
		8 RS Kariadi, Semarang	51.250.942.333	20.288.018.012	14.206.575.597	46.576.615	162.565.172.990	87.176.382.648	-	-	7.617.304.910	-	2.911.435.166	-	-	-	82.834.100.776	257.405.437.163	
		9 RS Sardjito, Yogyakarta	31.004.881.112	29.564.907.254,86	5.349.762.679,85	82.000	152.203.426.350,83	107.942.979.483,70	3.235.290.479,14	-	67.149.612,00	89.779.026.920	24.717.308.249,76	-	-	-	41.202.242.797	353.227.954.846	
		10 RSUP Sanglah, Denpasar	11.493.662.816	39.966.259.919	9.220.945.337	1.416.766.760	49.243.135.310	94.346.759.713	-	-		128.678.877	23.858.297.478	10.997.672.750	-	-	25.824.897.844	145.135.340.660	
		11 RS Wahidin Sudirohusodo, Makassar	6.752.012.381	17.514.813.965	8.709.288.281	918.600.000	59.017.907.975	41.620.904.691	-	-	1.857.699.319	28.693.701.029	-	21.344.438.415	-	-	11.631.676.212	132.108.813.014	
		12 RS Djamil, Padang	3.344.908.898,00	39.354.714.372,50	9.173.939.349,50	8.798.297.910	176.080.847.620	55.848.471.676	-	10.165.680.000	-	1.794.176.143	5.380.177.031	-	-	-	46.493.385.589	252.687.473.349	
		13 RS Muhammad Hoesin, Palembang	7.516.225.364	24.956.785.403	5.368.525.585	12.640.750.000	37.924.889.397	83.731.694.226	-	13.683.199.749	65.980.498	-	7.424.263.658	-	-	-	30.417.272.694	148.046.513.870	
		14 RSPI PROF.DR. Sulianti Saroso, Jakarta	3.245.524.462	1.840.406.145	2.196.419.278	-	56.508.837.062	127.007.093.101	-	-	-	-	-	-	-	-	7.282.349.885	183.515.930.163	Perbaikan
		15 RSO PROF.DR.R.Soeharso, Surakarta	19.869.558.153	4.020.910.520	4.388.735.331	34.752.800	32.119.804.724	9.089.397.677	6.559.736.848	21.144.111.000	-	1.032.966.592	195.184.800	2.327.188	-	-	28.081.692.016	69.980.769.641	
		16 RSU PROF.Dr.R.D. Kandow, Manado	957.387.968	19.376.742.620	2.688.614.506	5.351.400.000	29.944.398.619	68.101.171.654	8.504.987.096	-	-	-	2.801.067.309	6.829.937.000	-	-	13.391.740.785	111.901.957.369	
		17 RSU Dr. Soeradji Tirtonegoro, Klaten	9.760.296.264	5.709.319.186	6.618.550.604	1.190.267.550	26.929.149.676	19.029.502.064	2.555.624.298	-	-	72.846.949	354.050.627	347.341.290	-	-	-	71.164.164.676	
		18 RS Paru Ario Wirawan, Salatiga	2.947.806.149	543.553.442	2.970.469.765	4.966.578.000	9.292.684.036	8.878.420.800	1.667.251.600	-	29.500.000	-	-	897.609.610	93.000.000	-	5.564.219.746	24.741.434.436	
		19 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung	2.721.467.454	459.907.256	1.391.899.008	5.424.000.000	5.690.087.580	11.685.217.876	589.673.022	-	13.278.199	87.386.316	220.786.545	-	-	-	4.352.487.173	23.489.642.993	
		20 RS Mata Cicendo, Bandung	3.628.351.030	1.680.894.869	810.989.703	695.150.000	26.079.685.987	14.642.458.392	3.261.721.800	-	217.748.611	-	-	-	1.700.024.522	-	6.120.235.602	43.196.740.268	
		21 RSJ Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta	35.483.996	2.405.849.639	1.982.350.279	52.009.700.000	9.793.034.074	10.924.793.065			516.431.995			246.986.405			4.176.697.509	73.243.959.134	
		22 RS Jiwa Dr. Soeroyo, Magelang	4.545.337.209	7.407.741.097	2.616.872.624	4.794.702.325	19.496.256.703	17.742.902.235	724.838.840	-	-	-	2.181.369.815	1.078.487.070	-	-	11.310.094.045	42.758.700.103	
		23 RS. DR. H. Marzoeki Mahdi, Bogor	3.357.150.996	3.548.848.428	1.157.962.304	3.921.256.820	19.882.602.273	12.981.715.100	3.868.676.020	-	148.081.667	2.023.294.509	1.368.917.359	-	-	-	6.695.044.369	42.825.626.389	
		24 RS Adam Malik, Medan	4.118.632.433	21.681.731.322	4.249.701.178	325.000.000	63.673.754.198	40.013.498.636	5.840.563.815	-	242.122.500	889.911.051	-	-	-	889.911.051	30.050.064.933	110.094.939.149	
		25 RS Ketergantungan Obat, Jakarta	208.192.605	329.204.868	902.749.850	-	13.829.120.738	24.505.915.280	-	-	-	-	6.731.000	-	-	-	1.433.416.323	38.335.036.018	
		26 RS Paru Dr. M. Gunawan, Cisarua Bogor	2.446.954.546	1.008.593.876	1.019.505.699	124.126.500	11.526.146.787	10.589.960.688	2.621.008.824	-	671.093.584	810.824.000	183.597.650	-	-	-	4.291.456.471	26.343.160.383	
		27 RSUP Rujukan Stroke Nasional, Bukittinggi	3.616.586.184	892.797.714	1.061.438.280	13.500.000.000	15.127.289.897	7.891.912.391	758.040.364	-	-	658.644.050	1.192.430.706	13.708.334	-	-	4.364.683.138	37.935.886.702	
		28 RS Jiwa Radjiman W., Lawang	6.119.008.109	5.716.963.781	2.177.632.902	683.796.800	9.933.414.997	4.782.263.304	1.408.287.520	-	-	3.978.095.420	-	19.695.451	-	-	13.993.909.341	20.785.858.041	
		DEPARTEMEN AGAMA (025)																	
		A. BIDANG PENDIDIKAN																	
		1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta																	
		KEMENTERIAN NEGARA RISET DAN TEKNOLOGI (042)																	
		1 PP IPTEK	738.952.594	-	10.245.000	-	4.272.560.282	10.264.811.597	23.850.513	-	-	26.445.000	232.603.000	-	-	-	516.594.594	14.587.667.392	
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)																	
		A. BIDANG LAIN-LAIN																	
		1 Lembaga Layanan Pemasaran - KUKM	2.844.497.579	2.168.449.236	11.997.000	-	5.221.097.263	-	-	-	132.040.625	-	4.761.226.354	-	-	-	263.717.461	5.353.137.888	
		DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA (059)																	
		A. BIDANG TELEKOMUNIKASI																	
		1. Balai Telekomunikasi dan Informasi Perdesaan (BTIP)	1.079.706.820.458	-	-	-	6.708.899.321	-	-	-	-	-	-	116.479.850	-		1.079.590.340.608	6.708.899.321	
		BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKNOLOGI (BPPT)																	
		A. BIDANG PENERAPAN TEKNOLOGI																	
		1. BPPT Enjiniring	5.036.174.675	2.366.989.672	-	-	-	-	-	-	-	-	157.688	5.704.815.015			1.698.191.644	-	
		TOTAL PER DEPARTEMEN																	
		DEPARTEMEN KESEHATAN (024)	**433.705.938.936**	**502.745.729.394**	**173.877.173.980**	**379.749.845.682**	**1.559.878.846.090**	**1.399.390.302.082**	**43.307.044.800**	**48.059.031.799**	**14.563.712.095**	**187.498.514.100**	**189.117.912.758**	**49.504.794.016**	**2.782.303.071**	**1.150.432.298**	**831.696.202.999**	**3.668.524.493.816**	
		DEPARTEMEN AGAMA (025)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		KEMENTERIAN NEGARA RISTEK (042)	**738.952.594**	-	**10.245.000**	-	**4.272.560.282**	**10.264.811.597**	**23.850.513**	-	-	**26.445.000**	**232.603.000**	-	-	-	**516.594.594**	**14.587.667.392**	
		KEMENTERIAN KOPERASI DAN UKM (044)	**2.844.497.579**	**2.168.449.236**	**11.997.000**	-	**5.221.097.263**	-	-	-	**132.040.625**	-	**4.761.226.354**	-	-	-	**263.717.461**	**5.353.137.888**	
		DEPARTEMEN KOMUNIKASI DAN INFORMASI (059)	**1.079.706.820.458**	-	-	-	**6.708.899.321**	-	-	-	-	-	-	**116.479.850**	-	-	**1.079.590.340.608**	**6.708.899.321**	
		BADAN PENGKAJIAN DAN PENERAPAN TEKHNOLOGI	**5.036.174.675**	**2.366.989.672**	-	-	-	-	-	-	-	-	**157.688**	**5.704.815.015**	-	-	**1.698.191.644**	-	
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENYEDIAAN BARANG DAN JASA	**1.522.032.384.242**	**507.281.168.302**	**173.899.415.980**	**379.749.845.682**	**1.576.081.402.956**	**1.409.655.113.678**	**43.330.895.313**	**48.059.031.799**	**14.695.752.720**	**187.524.959.100**	**194.111.899.800**	**55.326.088.881**	**2.782.303.071**	**1.150.432.298**	**1.913.765.047.306**	**3.695.174.198.417**	
2	Pengelolaan Wilayah/Kawasan																		

DAFTAR 37.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
ASET, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
Per 31 Desember 2007
BERDASARKAN SAK

No	JENIS LAYANAN	BIDANG/ESELON I/SATKER	ASET										Kewajiban				Ekuitas Dana		Keterangan
			Aset Lancar			Aset Tetap					Aset Lainnya		Utang Jk Pendek		Utang Jk. Panjang		Ekuitas Dana Lancar	Ekuitas Dana Investasi	
			Kas	Piutang	Persediaan	Tanah	Peralatan dan Mesin	Gedung dan Bangunan	Aset Tetap Lainnya	Konstruksi Dalam Pengerjaan	Aset tak Berwujud	Aset Lain-lain	Pihak Ke-3	Utang Jk. Pendek Lainnya	Utang Jk. Panjang	Utang Lainnya			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)
3	Pengelolaan Dana Khusus	**DEPARTEMEN KEUANGAN (015)**																	
		A. BIDANG PEMBIAYAAN																	
		1. Pusat Investasi Pemerintah (PIP)	3.465.675.846.026	25.747.022.203	11.502.360	-	1.821.002.800	-	17.600.000	-	593.630.343.750	-	-	74.060.000	-	-	3.491.360.310.589	595.468.946.550	
		DEPARTEMEN KEHUTANAN (029)																	
		A. BIDANG PEMBIAYAAN																	
		1. Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM (033)																	
		A. BIDANG PEMBIAYAAN																	
		1. Badan Pengatur Jalan Tol (BPJT)	459.599.234.116	185.509.174.183	-	-	-	-	-	-	-	-	20.023.288.889	-	593.618.666.667	-	31.466.452.743	-	
		DEPARTEMEN KOPERASI DAN UKM (044)																	
		A. BIDANG PEMBIAYAAN																	
		1. Lembaga Pengelola Dana Bergulir (LPDB)	131.510.556.599	-	-	-	2.998.660.000	606.458.000	-	-	-		-	-	-	-	131.510.556.599	3.605.118.000	
		TOTAL PER DEPARTEMEN																	
		DEPARTEMEN KEUANGAN (015)	**3.465.675.846.026**	**25.747.022.203**	**11.502.360**	-	**1.821.002.800**	-	**17.600.000**	-	**593.630.343.750**	-	-	**74.060.000**	-	-	**3.491.360.310.589**	**595.468.946.550**	
		DEPARTEMEN KEHUTANAN (029)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		DEPARTEMEN PEKERJAAN UMUM (033)	**459.599.234.116**	**185.509.174.183**	-	-	-	-	-	-	-	-	**20.023.288.889**	-	**593.618.666.667**	-	**31.466.452.743**	-	
		DEPARTEMEN KOPERASI DAN UKM (044)	**131.510.556.599**	-	-	-	**2.998.660.000**	**606.458.000**	-	-	-	-	-	-	-	-	**131.510.556.599**	**3.605.118.000**	
		TOTAL JENIS PELAYANAN PENGELOLAAN DANA KHUSUS	**4.056.785.636.741**	**211.256.196.386**	**11.502.360**	-	**4.819.662.800**	**606.458.000**	**17.600.000**	-	**593.630.343.750**	-	**20.023.288.889**	**74.060.000**	**593.618.666.667**	-	**3.654.337.319.931**	**599.074.064.550**	
TOTAL SELURUH JENIS PELAYANAN			**5.578.818.020.982**	**718.537.364.689**	**173.910.918.340**	**379.749.845.682**	**1.580.901.065.756**	**1.410.261.571.678**	**43.348.495.313**	**48.059.031.799**	**608.326.096.470**	**187.524.959.100**	**214.135.188.689**	**55.400.148.881**	**596.400.969.738**	**1.150.432.298**	**5.568.102.367.237**	**4.294.248.262.967**	

DAFTAR 37.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS (DEFISIT)
Periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007
BERDASARKAN SAK

No	Nama BLU	Sumber a)	Status b)	Pendapatan dan Sumbangan Tidak Terikat				Total Pendapatan	Beban Usaha	Surplus (Defisit) Sblm Disetor ke Kas Negara	Setor Ke Kas Negara	Surplus (Defisit) dengan APBN	Dikurangi APBN	Surplus (Defisit) tanpa APBN	Keterangan
				Operasional	Non Operasional	APBN	Lainnya								
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11=9-10	12	13=11-12	14	15=13-14	16
I	**BIDANG KESEHATAN**														
	1 RS. Cipto Mangunkusumo, Jakarta	1	3	303.286.074.846	3.475.549.432	209.834.272.951	-	516.595.897.229	402.008.149.296	114.587.747.933	-	114.587.747.933	209.834.272.951	(95.246.525.018)	
	2 RSUP Fatmawati, Jakarta	1	3	128.354.323.793	1.050.010.115	76.715.363.772	14.995.212.950	221.114.910.630	181.478.923.915	39.635.986.715	-	39.635.986.715	76.715.363.772	(37.079.377.057)	
	3 RSUP Persahabatan, Jakarta	1	3	99.587.830.510	818.259.021	68.983.337.495	225.000.000	169.614.427.026	149.650.111.282	19.964.315.744	-	19.964.315.744	68.983.337.495	(49.019.021.751)	
	4 RS JPD Harapan Kita, Jakarta	1	3	301.555.578.512	7.592.785.982	46.738.264.639	1.224.100.000	357.110.729.133	295.593.878.383	61.516.850.750	-	61.516.850.750	46.738.264.639	14.778.586.111	
	5 RSAB Harapan Kita, Jakarta	1	3	124.585.052.000	3.660.850.000	66.764.681.000	-	195.010.583.000	178.965.913.000	16.044.670.000	-	16.044.670.000	66.764.681.000	(50.720.011.000)	
	6 RS Kanker Dharmais, Jakarta	1	3	134.403.300.531,49	1.107.631.190,60	43.485.660.236	-	178.996.591.958,09	165.749.109.372,08	13.247.482.586,01	-	13.247.482.586,01	43.485.660.236	(30.238.177.649,99)	
	7 RS. Hasan Sadikin, Bandung	1	3	187.949.867.019	5.183.968.867	103.322.962.082	-	296.456.797.968	288.959.464.707	7.497.333.261	-	7.497.333.261	103.322.962.082	(95.825.628.821)	
	8 RS Kariadi, Semarang	1	3	125.857.332.076	2.154.595.838	94.372.561.083	6.318.436.046	228.702.925.043	200.719.083.289	27.983.841.754	-	27.983.841.754	94.372.561.083	(66.388.719.329)	
	9 RS Sardjito, Yogyakarta	1	3	135.136.886.080,29	1.291.939.724,38	95.144.635.166	-	231.573.460.970,67	247.093.982.134,91	(15.520.521.164)	-	(15.520.521.164)	95.144.635.166	(110.665.156.330)	
	10 RSUP Sanglah, Denpasar	1	3	146.658.386.587	1.056.389.975	76.081.755.159	-	223.796.531.721	210.249.687.961	13.546.843.760	-	13.546.843.760	76.081.755.159	(62.534.911.399)	
	11 RS Wahidin Sudirohusodo, Makassar	1	3	103.709.456.677	534.406.050	70.531.037.290	-	174.774.900.017	144.910.275.478	29.864.624.539	-	29.864.624.539	70.531.037.290	(40.666.412.751)	
	12 RS Djamil, Padang	1	3	98.246.867.525	112.505.216	75.679.396.402	-	174.038.769.143	169.359.721.037,79	4.679.048.105,21	-	4.679.048.105	75.679.396.402	(71.000.348.297)	
	13 RS Muhammad Hoesin, Palembang	1	3	108.020.719.443	1.056.374.793	98.624.627.864	-	207.701.722.100	153.939.818.981	53.761.903.119	-	53.761.903.119	98.624.627.864	(44.862.724.745)	
	14 RSPI PROF.DR. Sulianti Saroso, Jakarta	1	3	9.243.364.370	226.649.056	48.610.601.505	-	58.080.614.931	43.204.745.365	14.875.869.566	3.497.371.266	11.378.498.300	48.610.601.505	(37.232.103.205)	Perbaikan
	15 RSO PROF.DR.R.Soeharso, Surakarta	1	3	38.716.723.659	-	51.950.935.169	71.240.000	90.738.898.828	59.023.838.788	31.715.060.040	-	31.715.060.040	51.950.935.169	(20.235.875.129)	
	16 RSU PROF.Dr.R.D. Kandow, Manado	1	3	44.164.248.818	533.351.470	89.131.228.000	-	133.828.828.288	103.224.619.871	30.604.208.417	-	30.604.208.417	89.131.228.000	(58.527.019.583)	
	17 RSU Dr. Soeradji Tirtonegoro, Klaten	1	3	23.772.002.901	214.282.684,78	45.725.171.583	-	69.711.457.168,78	48.500.922.928,78	21.210.534.240	-	21.210.534.240	45.725.171.583	(24.514.637.343)	
	18 RS Paru Ario Wirawan, Salatiga	1	3	11.646.044.891	2.038.600	19.574.373.029	-	31.222.456.520	21.408.041.350	9.814.415.170	-	9.814.415.170	19.574.373.029	(9.759.957.859)	
	19 RS Paru Dr. H.A. Rotinsulu Bandung	1	3	5.561.468.445	26.700.000	12.682.770.480	-	18.270.938.925	14.423.932.868	3.847.006.057	-	3.847.006.057	12.682.770.480	(8.835.764.423)	
	20 RS Mata Cicendo, Bandung	1	3	11.763.945.673	217.608.858	25.569.039.041	-	37.550.593.572	23.908.867.834	13.641.725.738	275.769.957	13.365.955.781	25.569.039.041	(12.203.083.260)	
	21 RSJ Dr. Soeharto Heerdjan, Jakarta	1	3	9.014.395.300	14.756.181	24.230.856.758	-	33.260.008.239	31.584.162.838	1.675.845.401	82.029.141	1.593.816.260	24.230.856.758	(22.637.040.498)	
	22 RS Jiwa Dr. Soeroyo, Magelang	1	3	19.070.906.531	89.401.245	32.857.331.008	-	52.017.638.784	37.718.156.781	14.299.482.003	-	14.299.482.003	32.857.331.008	(18.557.849.005)	
	23 RS. DR. H. Marzoeki Mahdi, Bogor	1	3	33.767.592.006	81.856.196	36.175.859.322	-	70.025.307.524	63.541.786.199	6.483.521.325	-	6.483.521.325	36.175.859.322	(29.692.337.997)	
	24 RS Adam Malik, Medan	1	4	69.190.264.298	444.384.473	88.050.603.526	-	157.685.252.297	136.215.694.527	21.469.557.770	-	21.469.557.770	88.050.603.526	(66.581.045.756)	
	25 RS Ketergantungan Obat, Jakarta	1	4	4.538.025.879	18.975.000	20.269.314.994	-	24.826.315.873	22.078.023.385	2.748.292.488	465.025.051	2.283.267.437	20.269.314.994	(17.986.047.557)	
	26 RS Paru Dr. M. Gunawan, Cisarua Bogor	1	4	9.883.082.915	87.955.150	18.575.712.933	-	28.546.750.998	20.220.341.830	8.326.409.168	-	8.326.409.168	18.575.712.933	(10.249.303.765)	
	27 RSUP Rujukan Stroke Nasional, Bukittinggi	1	4	9.112.159.196	27.863.483	27.173.285.583	1.494.582.186	37.807.890.448	30.698.914.344	7.108.976.104	353.747.800	6.755.228.304	27.173.285.583	(20.418.057.279)	
	28 RS Jiwa Radjiman W., Lawang	1	3	20.528.347.567	-	35.750.970.071	-	56.279.317.638	47.208.381.917	9.070.935.721	-	9.070.935.721	35.750.970.071	(26.680.034.350)	
	Sub Total (I)			**2.317.324.248.049**	**31.081.088.601**	**1.702.606.608.141**	**24.328.571.182**	**4.075.340.515.973**	**3.491.638.549.663**	**583.701.966.310**	**4.673.943.215**	**579.028.023.095**	**1.702.606.608.141**	**(1.123.578.585.046)**	
II	**BIDANG PEMBIAYAAN**														
	1 Pusat Investasi Pemerintah, Jakarta	1	4	23.718.245.833	109.176.544.963	1.177.506.316	-	134.072.297.112	770.091.447	133.302.205.665	46.472.948.526	86.829.257.139	1.177.506.316	85.651.750.823	

DAFTAR 37.B

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM
PENDAPATAN, BEBAN, DAN SURPLUS (DEFISIT)
Periode 1 Januari 2007 sampai dengan 31 Desember 2007
BERDASARKAN SAK

No	Nama BLU	Sumber a)	Status b)	Pendapatan dan Sumbangan Tidak Terikat				Total Pendapatan	Beban Usaha	Surplus (Defisit) Sblm Disetor ke Kas Negara	Setor Ke Kas Negara	Surplus (Defisit) dengan APBN	Dikurangi APBN	Surplus (Defisit) tanpa APBN	Keterangan
				Operasional	Non Operasional	APBN	Lainnya								
1	2	3	4	5	6	7	8	9=5+6+7+8	10	11=9-10	12	13=11-12	14	15=13-14	16
	2 Lembaga Pengelola Dana Bergulir Koperasi dan UMKM	1	3	12.740.174.409	-	2.772.720.400	-	15.512.894.809	4.714.940.254	10.797.954.555	-	10.797.954.555	2.772.720.400	8.025.234.155	
	3 Pusat Pembiayaan Pembangunan Hutan (PPPH)	1	4												
	4 Badan Pengatur Jalan Tol	1	4	9.724.738.081	45.384.685.217,79	-	55.109.423.299	110.218.846.598	23.642.970.556	86.575.876.043	-	86.575.876.043	-	31.466.452.743	
	Sub Total (II)			**46.183.158.324**	**154.561.230.181**	**3.950.226.716**	**55.109.423.299**	**259.804.038.519**	**29.128.002.257**	**230.676.036.263**	**46.472.948.526**	**184.203.087.737**	**3.950.226.716**	**125.143.437.722**	
III	**BIDANG TELEKOMUNIKASI**														
	1 Balai Telekomunikasi dan Informasi Perdesaan (BTIP)	1	4	756.447.661.551	24.465.202.849	17.275.433.855		798.188.298.255	22.168.864.423	776.019.433.832	226.816.409.900	549.203.023.932	17.275.433.855	531.927.590.077	
	Sub Total (III)			**756.447.661.551**	**24.465.202.849**	**17.275.433.855**	-	**798.188.298.255**	**22.168.864.423**	**776.019.433.832**	**226.816.409.900**	**549.203.023.932**	**17.275.433.855**	**531.927.590.077**	
IV	**BIDANG PENDIDIKAN**														
	1 UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta	1	3												
	Sub Total (IV)			-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
V	**BIDANG PENERAPAN TEKNOLOGI**														
	1 BPPT Enjiniring	1	3	17.716.409.200	-	299.842.312	1.331.669.500	19.347.921.012	13.568.639.871	5.779.281.141	-	5.779.281.141	299.842.312	5.479.438.829	
	2 PP IPTEK	1	3	3.400.509.150	944.705.006	2.954.500.962	-	7.299.715.118	8.733.825.990	(1.434.110.872)	-	(1.434.110.872)	2.954.500.962	(4.388.611.834)	
	Sub Total (V)			**21.116.918.350**	**944.705.006**	**3.254.343.274**	**1.331.669.500**	**26.647.636.130**	**22.302.465.861**	**4.345.170.269**	-	**4.345.170.269**	**3.254.343.274**	**1.090.826.995**	
VI	**LAIN-LAIN**														
	1 Lembaga Layanan Pemasaran - KUKM	1	3	6.945.549.765	1.287.103.522	5.772.298.468	-	14.004.951.755	8.388.096.406	5.616.855.349	-	5.616.855.349	5.772.298.468	(155.443.119)	
	Sub Total (VI)			**6.945.549.765**	**1.287.103.522**	**5.772.298.468**	-	**14.004.951.755**	**8.388.096.406**	**5.616.855.349**	-	**5.616.855.349**	**5.772.298.468**	**(155.443.119)**	
Total				**3.148.017.536.038**	**212.339.330.159**	**1.732.858.910.454**	**80.769.663.981**	**5.173.985.440.632**	**3.573.625.978.609**	**1.600.359.462.023**	**277.963.301.641**	**1.322.396.160.382**	**1.732.858.910.454**	**(465.572.173.371)**	

Catatan :

a) 1. Laporan Unaudited
   2. Laporan Audited

b) 3. BLU Penuh
   4. BLU Bertahap

DAFTAR 38.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL/INDEPENDEN UNAUDITED
PAGU DIPA DAN REALISASI ANGGARAN TA. 2007
Per 31 Desember 2007
(dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN TA. 2007	REALISASI						JUMLAH REALISASI	%	SISA	%
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	SUBSIDI	BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN-LAIN				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10=(4+5+6+7+8+9)	11	12=(3-10)	13
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)	1.889.481	1.145.550	426.964	-	-	-	-	1.572.514	83%	316.967	17%
2	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	207.523.507	-	-	-	-	-	199.363.930	199.363.930	96%	8.159.577	4%
3	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas SABANG (BPKS)	215.000.000	189.263.930	-	-	-	-	-	189.263.930	88%	25.736.070	12%
4	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)	1.000.000	181.925	154.748	41.150	-	-	315.867	693.690	69%	306.310	31%
7	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	24.432.000	1.570.365	16.028.669	3.247.975	-	-	-	20.847.008	85%	3.584.992	15%
8	Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	11.000.000	3.297.170	2.463.832	102.300	-	-	-	5.863.302	53%	5.136.698	47%
10	Badan Pengelola Kompleks Kemayoran (BPKK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
11	Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno (BP GBK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pengelola KAPET Bandar Aceh Darussalam - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola KAPET Khatulistiwa - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.900.000	545.450	1.195.378	-	-	-	-	1.741.828	92%	158.172	8%
14	Badan Pengelola KAPET DAS KAKAB - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.300.000	416.240	661.120	-	-	-	-	1.077.360	83%	222.640	17%
15	Badan Pengelola KAPET Sasamba - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.900.000	623.790	1.015.980	-	-	-	-	1.639.770	86%	260.230	14%
16	Badan Pengelola KAPET Batulicin - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.400.000	523.800	769.184	-	-	-	-	1.292.984	92%	107.016	8%
17	Badan Pengelola KAPET Parepare - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.600.000	590.400	779.815	-	-	-	-	1.370.215	86%	229.785	14%
18	Badan Pengelola KAPET Bukari - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.400.000	560.040	774.316	-	-	-	-	1.334.356	95%	65.644	5%
19	Badan Pengelola KAPET Batui - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.400.000	615.050	774.947	-	-	-	-	1.389.997	99%	10.003	1%
20	Badan Pengelola KAPET Manado - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.900.000	545.400	1.206.659	-	-	-	-	1.752.059	92%	147.941	8%
21	Badan Pengelola KAPET Bima - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	1.600.000	492.900	953.722	-	-	-	-	1.446.622	90%	153.378	10%
22	Badan Pengelola KAPET Mbay - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Badan Pengelola KAPET Seram - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Badan Pengelola KAPET Biak - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
26	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	25.147.921	11.079.486	13.140.936	927.500	-	-	-	25.147.922	100%	(1)	0%
27	Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKOR KAMLA)	100.000.000	851.840	29.500.308	68.400.271				98.752.419	99%	1.247.581	1%
29	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BPPN)	935.000	474.000	365.000				60.000	899.000	96%	36.000	4%
31	Badan Pelaksana Pengelolaan Masjid Istiqlal	13.000.000	3.654.229	4.875.607	2.284.591	-	-	800	10.815.227	83%	2.184.773	17%
32	Dewan Pers	16.262.350	4.111.265	7.817.440	1.372.834	-	-	-	13.301.539	82%	2.960.811	18%

DAFTAR 38.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL/INDEPENDEN UNAUDITED
PAGU DIPA DAN REALISASI ANGGARAN TA. 2007
Per 31 Desember 2007
(dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN TA. 2007	REALISASI						JUMLAH REALISASI	%	SISA	%
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	SUBSIDI	BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN-LAIN				
33	Dewan Gula Indonesia (DGI)	643.035	-	213.970	-	-	-	322.039	536.008	83%	107.027	17%
34	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	5.054.050	249.907	3.082.964	96.400	-	-	-	3.429.271	68%	1.624.779	32%
36	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	5.000.000	518.250	866.319	34.210	-	-	837.976	2.256.755	45%	2.743.245	55%
37	Dewan Pertimbangan Presiden (DPP)	12.397.772	-	-	-	-	-	10.027.060	10.027.060	81%	2.370.712	19%
38	Dewan Riset Nasional (DRN)	3.000.000	2.003.049	723.129	38.500	-	-	-	2.764.678	92%	235.323	8%
39	Dewan Buku Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)	9.200.000	2.574.280	5.020.073	282.246	-	-	-	7.876.599	86%	1.323.401	14%
41	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DETIKNAS)	5.121.800	146.350	774.254	122.555	-	-	-	1.043.159	20%	4.078.641	80%
42	Dewan Pengupahan Nasional (DPN)	302.840	220.800	73.440	-	-	-	-	294.240	97%	8.600	3%
43	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	8.418.506	2.096.181	1.999.642	49.197	-	-	-	4.145.020	49%	4.273.486	51%
44	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	4.999.980	2.306.800	825.351	568.547	-	-	301.116	4.001.814	80%	998.166	20%
45	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	85.000.000	13.396.902	17.753.764	3.017.053	-	-	-	34.167.719	40%	50.832.281	60%
46	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	22.904.520	5.910.103	7.847.430	2.033.194	-	-	-	15.790.727	69%	7.113.793	31%
47	Komisi Ombudsman Nasional (KON)	15.000.000	1.961.215	4.270.065	879.155	-	-	-	7.110.435	47%	7.889.565	53%
48	Komisi Nasional Lanjut Usia	5.510.715	-	-	-	-	-	4.136.435	4.136.435	75%	1.374.280	25%
49	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	12.163.000	2.600.755	5.602.555	441.974	-	-	-	8.645.284	71%	3.517.716	29%
50	Komisi Banding Merk	416.168	-	416.168	-	-	-	-	416.168	100%	-	0%
51	Komisi Banding Paten	150.180						150.180	150.180	100%	-	0%
52	Komisi Hukum Nasional RI (KHN)	9.817.086	983.025	5.167.235	234.691	-	-	-	6.384.951	65%	3.432.135	35%
53	Komisi Kepolisian Nasional	3.734.567	422.500	2.516.402	-	-	-	-	2.938.902	79%	795.665	21%
54	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional	5.928.364	-	-	-	-	-	5.803.206	5.803.206	-	125.157	2%
55	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Komite Akreditasi Nasional KAN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)	3.495.270	550.600	2.252.280	96.800	-	-	-	2.899.680	83%	595.590	17%
58	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak (KAN-PBPTA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	9.068.475	305.685	4.754.681	3.246.258	-	-	-	8.306.624	92%	761.851	8%
61	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)	1.000.000	185.950	121.114	-	-	-	284.217	591.281	59%	408.719	41%
62	Komite Privatisasi Perusaahaan Perseroan (Persero)	816.670	465.200	-	-	-	-	69.680	534.880	65%	281.790	35%
63	Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (KOMNAS FBI	27.000.999	-	-	-	-	-	-	-	0%	27.000.999	100%
64	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	31.115.027	6.891.978	13.645.399	1.442.235	-	-	-	21.979.612	71%	9.135.415	29%

DAFTAR 38.A

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL/INDEPENDEN UNAUDITED
PAGU DIPA DAN REALISASI ANGGARAN TA. 2007
Per 31 Desember 2007
(dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	APBN TA. 2007	REALISASI						JUMLAH REALISASI	%	SISA	%
			BELANJA PEGAWAI	BELANJA BARANG	BELANJA MODAL	SUBSIDI	BANTUAN SOSIAL	BELANJA LAIN-LAIN				
66	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	1.999.300	545.450	58.370	-	-	-	905.537	1.509.357	75%	489.943	25%
67	Lembaga Sensor Film (LSF)	10.553.927	6.472.799	1.829.438	1.168.443	-	-	-	9.470.680	90%	1.083.247	10%
68	Lembaga Penyiaran Publik TVRI	478.195.357	200.913.989	-	-	-	-	208.416.373	409.330.362	86%	68.864.995	14%
69	Lembaga Penyiaran Publik RRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkstan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Lembaga Kerjasama Tripartit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	871.850	363.650	237.808	-	-	-	601.458	1.202.916	138%	(331.066)	-38%
73	Otorita Asahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam	218.105.095	-	-	-	-	-	208.353.856	208.353.856	96%	9.751.239	4%
75	Sekretariat Pengadilan Pajak	29.513.121	10.715.535	6.667.274	1.268.719	-	-	-	18.651.528	63%	10.861.593	37%
76	Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R)	9.541.813	-	-	-	-	-	3.689.406	3.689.406	39%	5.852.407	61%
J U M L A H		**1.666.629.746**	**483.343.784**	**169.623.750**	**91.396.797**	**-**	**-**	**643.639.136**	**1.388.004.466**		**278.625.280**	

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL/INDEPENDEN UNAUDITED
PENERIMAAN NON APBN TAHUN ANGGARAN 2007
Per 31 Desember 2007
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	PENERIMAAN NON APBN						JUMLAH
		HIBAH		SUMBANGAN PIHAK LAIN YANG TIDAK MENGIKAT	SUMBER USAHA LAIN YANG SAH	BANTUAN PEMERINTAH DAERAH	IMBALAN ATAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI	
		DALAM NEGERI	LUAR NEGERI					
1	2	3	4	5	6	7	8	9=(3+4+5+6+7+8)
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia (AIPI)	-	-	-	-	-	-	-
2	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	-	-	-	-	-	373.838.061	373.838.061
3	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas SABANG (BPKS)	-	-	-	-	-	-	-
4	Badan Pengelola Dana Abadi Umat (BP DAU)	-	-	-	-	-	-	-
5	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Pertimbangan Kepegawaian (BAPEK)	-	-	-	-	-	-	-
7	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	-	-	-	-	-	-	-
8	Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional	-	-	-	-	-	-	-
9	Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	-	-	-	-	-	-	-
10	Badan Pengelola Kompleks Kemayoran (BPKK)	-	-	-	-	-	-	-
11	Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno (BP GBK)	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pengelola KAPET Bandar Aceh Darussalam - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola KAPET Khatulistiwa - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-
14	Badan Pengelola KAPET DAS KAKAB - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-
15	Badan Pengelola KAPET Sasamba - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Pengelola KAPET Batulicin - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-
17	Badan Pengelola KAPET Parepare - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Pengelola KAPET Bukari - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Pengelola KAPET Batui - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Pengelola KAPET Manado - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Pengelola KAPET Bima - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-
22	Badan Pengelola KAPET Mbay - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-
23	Badan Pengelola KAPET Seram - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-
24	Badan Pengelola KAPET Biak - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-
25	Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)	-	-	-	-	-	-	-
26	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	-	-	-	-	-	-	-
27	Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN)	-	-	-	-	-	-	-
28	Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKOR KAMLA)	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	-	-	-	-	-	-	-
30	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BPPN)	-	-	-	-	-	-	-
31	Badan Pelaksana Pengelolaan Masjid Istiqlal	-	-	2.044.449	-	-	-	2.044.449
32	Dewan Pers	-	-	-	-	-	-	-
33	Dewan Gula Indonesia (DGI)	-	-	-	-	-	-	-
34	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	-	-	-	-	-	-	-
35	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	-	-	-	-	-	-	-
36	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	-	-	-	-	-	-	-
37	Dewan Pertimbangan Presiden (DPP)	-	-	-	-	-	-	-
38	Dewan Riset Nasional (DRN)	-	-	-	-	-	-	-

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL/INDEPENDEN UNAUDITED
PENERIMAAN NON APBN TAHUN ANGGARAN 2007
Per 31 Desember 2007
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	NAMA LEMBAGA	PENERIMAAN NON APBN						JUMLAH
		HIBAH		SUMBANGAN PIHAK LAIN YANG TIDAK MENGIKAT	SUMBER USAHA LAIN YANG SAH	BANTUAN PEMERINTAH DAERAH	IMBALAN ATAS PELAKSANAAN TUGAS DAN FUNGSI	
		DALAM NEGERI	LUAR NEGERI					
39	Dewan Buku Nasional	-	-	-	-	-	-	-
40	Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)	-	-	-	-	-	-	-
41	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DETIKNAS)	-	-	-	-	-	-	-
42	Dewan Pengupahan Nasional (DPN)	-	-	-	-	-	-	-
43	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	-	4.685.718	-	-	-	-	4.685.718
44	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	-	-	-	-	-	-	-
45	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	-	-	-	-	-	-	-
46	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	-	-	-	-	-	-	-
47	Komisi Ombudsman Nasional (KON)	-	-	-	-	-	-	-
48	Komisi Nasional Lanjut Usia	-	-	-	-	-	-	-
49	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	-	-	-	-	-	-	-
50	Komisi Banding Merk	-	-	-	-	-	-	-
51	Komisi Banding Paten	-	-	-	-	-	-	-
52	Komisi Hukum Nasional RI (KHN)	-	-	-	-	-	-	-
53	Komisi Kepolisian Nasional	-	-	-	-	-	-	-
54	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional		23.089.606	-	-	-	-	23.089.606
55	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran	-	-	-	-	-	-	-
56	Komite Akreditasi Nasional KAN)	-	-	-	-	-	-	-
57	Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)	-	-	-	-	-	-	-
58	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	-	-	-	-	-	-	-
59	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak (KAN-PBPTA)	-	-	-	-	-	-	-
60	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	-	-	-	-	-	-	-
61	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)	-	-	-	-	-	-	-
62	Komite Privatisasi Perusaahaan Perseroan (Persero)	-	-	-	-	-	-	-
63	Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (KOMNAS FBPI)	-	-	-	-	-	-	-
64	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-
65	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	-	-	-	-	-	-	-
66	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	-	-	-	-	-	-	-
67	Lembaga Sensor Film (LSF)	-	-	-	-	-	-	-
68	Lembaga Penyiaran Publik TVRI	-	-	45.410	2.134.744	10.275.078	6.698.176	19.153.407
69	Lembaga Penyiaran Publik RRI	-	-	-	-	-	-	-
70	Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkstan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	-	-	-	-	-	-	-
71	Lembaga Kerjasama Tripartit	-	-	-	-	-	-	-
72	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)							
73	Otorita Asahan	-	-	-	-	-	3.550.116	3.550.116
74	Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam	-	-	-	152.185.000	-	285.814.000	437.999.000
75	Sekretariat Pengadilan Pajak							
76	Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R)							
		-	27.775.324	2.089.859	154.319.744	10.275.078	669.900.353	490.522.296

DAFTAR 38.C

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL/INDEPENDEN UNAUDITED
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
Per 31 Desember 2007
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	`	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	TOTAL Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	TOTAL Kewajiban	Ekuitas Dana Lancar	Ekuitas Dana Investasi	TOTAL Ekuitas Dana	Total Kewajiban dan Ekuitas Dana
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(9+12)
1	Akademi Ilmu Pengetahuan Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2	Badan Pengatur Hilir Migas (BPH MIGAS)	82.586.583	98.689.417	327.861.176	509.137.176	-	-	-	82.586.583	426.550.593	509.137.176	509.137.176
3	Badan Pengusahaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas SABANG (BPKS)	-	252.535.574	20.631.670	273.167.244	-	-	-	-	273.167.244	273.167.244	273.167.244
4	Badan Pengelola Dana Abadi Umat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5	Badan Pertimbangan Tabungan Perumahan - PNS (BAPERTARUM-PNS)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
6	Badan Pertimbangan Kepegawaian	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
7	Badan Pendukung Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (BPP-SPAM)	-	6.035.607	88.598	6.124.205	-	-	-	-	6.124.205	6.124.205	6.124.205
8	Badan Kebijaksanaan dan Pengendalian Pembangunan Perumahan dan Pemukiman Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
9	Badan Perlindungan Konsumen Nasional (BPKN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
10	Badan Pengelola Kompleks Kemayoran (BPKK)	650.273.352	4.730.543.986	-	5.380.817.338	30.499.691	-	30.499.691	-	5.350.317.647	5.350.317.647	5.380.817.338
11	Badan Pengelola Gelanggang Olahraga Bung Karno (BP GBK)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
12	Badan Pengelola KAPET Bandar Aceh Darussalam - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
13	Badan Pengelola KAPET Khatulistiwa - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
14	Badan Pengelola KAPET DAS KAKAB - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
15	Badan Pengelola KAPET Sasamba - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
16	Badan Pengelola KAPET Batulicin - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
17	Badan Pengelola KAPET Parepare - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
18	Badan Pengelola KAPET Bukari - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
19	Badan Pengelola KAPET Batui - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
20	Badan Pengelola KAPET Manado - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
21	Badan Pengelola KAPET Bima - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
22	Badan Pengelola KAPET Mbay - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
23	Badan Pengelola KAPET Seram - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
24	Badan Pengelola KAPET Biak - Pembinaan Manajemen Pengelolaan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
25	Badan Regulasi Telekomunikasi Indonesia (BRTI)	2.671.317	-	-	2.671.317	-	-	-	-	2.671.317	2.671.317	2.671.317
26	Badan Nasional Sertifikasi Profesi (BNSP)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
27	Badan Koordinasi Energi Nasional (BAKOREN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
28	Badan Koordinasi Keamanan Laut (BAKOR KAMLA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
29	Badan Wakaf Indonesia (BWI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
30	Badan Pertimbangan Perfilman Nasional (BPPN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
31	Badan Pelaksana Pengelolaan Masjid Istiqlal	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
32	Dewan Pers	9.540	2.705.293	17.463	2.732.296	9.540	-	9.540	-	2.722.269	2.722.269	2.731.809
33	Dewan Gula Indonesia (DGI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
34	Dewan Koperasi Indonesia (DEKOPIN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
35	Dewan Ketahanan Pangan (DKP)	-	96.400	-	96.400	-	-	-	-	96.400	96.400	96.400
36	Dewan Pertimbangan Otonomi Daerah (DPOD)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
37	Dewan Pertimbangan Presiden (DPP)	1.411.201	4.714.137	-	6.125.338	1.196.473	-	1.196.473	4.928.865	-	4.928.865	6.125.338
38	Dewan Riset Nasional (DRN)	48.042	38.500	-	86.542	48.042	-	48.042	-	38.500	38.500	86.542

DAFTAR 38.C

IKHTISAR LAPORAN KEUANGAN LEMBAGA NON STRUKTURAL/INDEPENDEN UNAUDITED
AKTIVA, KEWAJIBAN, DAN EKUITAS
Per 31 Desember 2007
(Dalam Ribuan Rupiah)

NO	`	Aset Lancar	Aset Tetap	Aset Lainnya	TOTAL Aset	Kewajiban Jangka Pendek	Kewajiban Jangka Panjang	TOTAL Kewajiban	Ekuitas Dana Lancar	Ekuitas Dana Investasi	TOTAL Ekuitas Dana	Total Kewajiban dan Ekuitas Dana
1	2	3	4	5	6=(3+4+5)	7	8	9=(7+8)	10	11	12=(10+11)	13=(9+12)
39	Dewan Buku Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
40	Dewan Kelautan Indonesia (DEKIN)	-	412.146	-	412.146	-	-	-	-	412.146	412.146	412.146
41	Dewan Teknologi Informasi dan Komunikasi (DETIKNAS)	-	122.500	-	122.500	-	-	-	-	122.500	122.500	122.500
42	Dewan Pengupahan Nasional (DPN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
43	Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (KOMNAS PEREMPUAN)	4.781.641	858.641	-	5.640.282	382.705	-	382.705	5.257.576	-	5.257.576	5.640.282
44	Komisi Kejaksaan Republik Indonesia	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
45	Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)	762.203	22.931.159	-	23.693.362	85.448	-	85.448	676.754	22.931.159	23.607.913	23.693.362
46	Komisi Penyiaran Indonesia (KPI)	302.586	5.520.135	-	5.822.721	89.675	-	89.675	212.911	5.520.135	5.733.046	5.822.721
47	Komisi Ombudsman Nasional (KON)	47.843	-	-	47.843	47.843		47.843	-	-	-	47.843
48	Komisi Nasional Lanjut Usia	-	433.390	-	433.390	-	-	-		433.390	433.390	433.390
49	Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI)	-	441.974	-	441.974	-	-	-	-	441.974	441.974	441.974
50	Komisi Banding Merk	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
51	Komisi Banding Paten	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
52	Komisi Hukum Nasional RI (KHN)	15.468	199.808	-	215.276	15.468	-	15.468	-	199.808	199.808	215.276
53	Komisi Kepolisian Nasional	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
54	Komisi Penanggulangan AIDS Nasional	68.274	-	-	68.274	-	-	-	68.274	-	68.274	68.274
55	Komite Standar Nasional untuk Satuan Ukuran	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
56	Komite Akreditasi Nasional KAN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
57	Komite Standar Akuntansi Pemerintah (KSAP)	43.042	126.600	-	169.642	42.037	-	42.037	1.005	126.600	127.605	169.642
58	Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
59	Komite Aksi Nasional Penghapusan Bentuk-Bentuk Pekerjaan Buruk untuk Anak (KAN-PBPTA)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
60	Komite Nasional Keselamatan Transportasi (KNKT)	-	4.382.335	176.473	4.558.808	-	-	-	-	4.558.808	4.558.808	4.558.808
61	Komite Kebijakan Percepatan Penyediaan Infrastruktur (KKPPI)	-	-	591.281	591.281		-	-	-	592.381	592.381	592.381
62	Komite Privatisasi Perusaahaan Perseroan (Persero)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
63	Komite Nasional Pengendalian Flu Burung dan Kesiapsiagaan Menghadapi Pandemi Influenza (KOMNAS FBPI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
64	Komite Antar Departemen Bidang Kehutanan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
65	Konsil Kedokteran Indonesia (KKI)	4.539.009	5.006.059	-	9.545.068	3.454.777	-	3.454.777	1.084.232	5.006.059	6.090.290	9.545.068
66	Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
67	Lembaga Sensor Film (LSF)	125.000	402.104	-	527.104	125.000	-	125.000	-	402.104	402.104	527.104
68	Lembaga Penyiaran Publik TVRI	202.566.578	218.146.481	5.369.735	426.082.794	379.138.426	317.564	379.455.990		46.626.804	46.626.804	426.082.794
69	Lembaga Penyiaran Publik RRI	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
70	Lembaga Koordinasi dan Pengendalian Peningkstan Kesejahteraan Sosial Penyandang Cacat	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
71	Lembaga Kerjasama Tripartit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
72	Lembaga Produktivitas Nasional (LPN)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
73	Otorita Asahan	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
74	Otorita Pengembangan Daerah Industri Pulau Batam	194.331.754	3.497.735.408	16.174.626	3.708.241.788	42.674.020	4.063.578	46.737.599	-	3.661.504.189	3.661.504.189	3.708.241.788
75	Sekretariat Pengadilan Pajak	212.352	7.877.409	38.248	8.128.009	-	-	-	212.352	7.877.409	8.089.761	8.089.761
76	Unit Kerja Presiden Pengelolaan Program dan Reformasi (UKP3R)	231.917	2.601.804	-	2.833.721	2.833.721	-	2.833.721	-	-	-	2.833.721
	J U M L A H	1.145.027.703	8.862.556.865	370.949.271	10.378.533.839	460.642.868	4.381.143	465.024.011	95.028.553	9.818.443.640	9.913.472.193	10.378.496.204

DAFTAR ASET BEKAS MILIK ASING/CINA YANG BELUM SELESAI
SAMPAI DENGAN 31 DESEMBER 2007
(Berdasarkan Lampiran I Surat Menteri Keuangan S-394/MK.03/1989)

NO	KANWIL	PROPINSI	PETUNJUK PENYELESAIAN								Jumlah
			Sertifikat	Kompensasi/Dijual	Ditukar	Hibah	Dikembalikan/ Hapus dari Daftar	Diteliti	Sertifikat/Jual/ Tukar/Lainnya	Lain-Lain	
			(a)	*(b)*	*(c)*	*(d)*	*(e)*	*(f)*	*(g)*	*(h)*	
1	I. BANDA ACEH	N. ACEH DARUSSALAM	3	2	5	0	0	1	4	1	16
2	II. MEDAN	SUMATERA UTARA	63	55	0	0	1	1	15	4	139
3	III. PEKANBARU	RIAU	0	0	0	0	0	0	1	0	1
4		KEPULAUAN RIAU	50	0	0	0	0	0	6	2	58
5		SUMATERA BARAT	4	1	0	0	0	3	2	1	11
6	IV. PALEMBANG	SUMATERA SELATAN	18	4	1	0	1	3	6	7	40
7		JAMBI	1	1	0	0	0	0	0	1	3
8		BANGKA BELITUNG	13	2	1	0	0	1	14	0	31
9	V. BANDAR LAMPUNG	BENGKULU	0	0	0	0	0	0	0	0	0
10		LAMPUNG	6	1	0	0	0	0	3	1	11
11	VI. SERANG	BANTEN	3	1	0	0	0	2	0	0	6
12	VII. JAKARTA	DKI JAKARTA	5	12	0	0	4	8	0	3	32
13	VIII. BANDUNG	JAWA BARAT	44	27	0	0	0	9	10	6	96
14	IX. SEMARANG	JAWA TENGAH	22	17	1	0	0	0	7	2	49
15		D.I. YOGYAKARTA	3	3	0	0	0	2	0	1	9
16	X. SURABAYA	JAWA TIMUR	109	25	0	0	1	5	24	6	170
17	XI. PONTIANAK	KALIMANTAN BARAT	103	25	0	0	0	0	21	0	149
18	XII. BANJARMASIN	KALIMANTAN SELATAN	4	2	0	0	0	0	1	3	10
19		KALIMANTAN TENGAH	0	0	0	0	0	0	0	0	0
20	XIII. SAMARINDA	KALIMANTAN TIMUR	1	8	0	0	0	0	1	0	10
21	XV. MANADO	SULAWESI UTARA	5	2	0	1	0	2	2	0	12
22		SULAWESI TENGAH	5	1	0	0	0	0	0	0	6
23		GORONTALO	1	0	0	0	0	0	0	0	1
24		MALUKU UTARA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
25	XVI. MAKASSAR	SULAWESI SELATAN	19	11	0	0	1	1	7	2	41
26		SULAWESI BARAT	0	0	0	0	0	0	0	0	0
27		SULAWESI TENGGARA	1	1	0	0	0	0	2	0	4
28	XIV. DENPASAR	BALI	5	1	0	0	0	0	1	0	7
29		N.T.B	1	1	0	0	0	0	3	0	5
30		N.T.T	3	4	0	0	0	0	3	0	10
31	XVII. JAYAPURA	MALUKU	8	0	0	0	0	0	6	0	14
32		IRIAN JAYA BARAT	1	0	0	0	0	0	0	0	1
33		PAPUA	0	0	0	0	0	0	0	0	0
JUMLAH			501	207	8	1	8	38	139	40	942

Keterangan:

1 DJKN masih terus melakukan *updating* data melalui pelaksanaan inventarisasi dan penilaian ABMA/C oleh Kanwil dan KPKNL di seluruh Indonesia yang ditargetkan sampai dengan akhir tahun 2008.

2 Untuk mengetahui keberadaan 942 aset tersebut di atas, telah dilakukan penelitian fisik/lapangan dan dilaporkan keberadaan asetnya oleh Kanwil dan KPKNL di seluruh Indonesia sebanyak 167 aset, sementara sisanya akan dilaksanakan pada tahun 2008.

3 Untuk mengetahui nilainya, telah dilakukan penilaian dan baru dilaporkan nilai 67 aset berupa tanah dan bangunan dengan nilai total Rp613.619.131.523,00 yang akan dilaporkan dalam Catatan Atas Laporan Keuangan karena belum menjadi Barang Milik Negara, sementara 100 aset lainnya yang telah diteliti namun belum dapat dinilai karena data pendukungnya kurang lengkap.

4 Terhadap ABMA/C eks Universitas Res Publica (sekarang digunakan oleh Universitas Trisakti) sedang dipersiapkan upaya hukum berupa gugatan kepada Yayasan/Universitas Trisakti sesuai rekomendasi BPK.

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA
TAHUN 2007

NO	KANWIL DJKN	NILAI
1	I BANDA ACEH	Belum Dinilai
2	II MEDAN	Belum Dinilai
3	III PEKAN BARU	Belum Dinilai
4	**IV PALEMBANG**	369.750.596.514,24
	1. Kel. 15 Ulu Kec. Seb. Ulu I-Palembang	139.270.000,00
	2. Jl. Remiva Rt. 11, Komplek NV Remiva, Kel. Organ Baru Kec. Seb. Ulu I,	44.977.200,00
	Palembang (Bekas TK Melati)	
	3. Jl. Letkol. Iskandar No. 708 Kel. 15 Iiir Timur I, Palembang	38.632.498.000,00
	4. Jl. Veteran No. 7085 Kel. 20 Iiir I, Kec. Iiir Timur I, Palembang	1.466.055.000,00
	5. Jl. Jend. Sudirman No. 31/2 Kel. 20 Iiir, Kec. Iiir Timur I, Palembang	129.965.635.000,00
	6. Jl. Padang Selasa Kel. Bukit Lama, Kec. Iiir Barat I Palembang	3.982.200.000,00
	7. Jl. Jen. Sudirman KM 3,5 No. 74 Palembang	39.753.525.000,00
	8. Jl. Letkol. Iskandar No. 452 Kel. 15 Iiir Timur I, Palembang	3.820.300.000,00
	9. Jl. Rawakasih Kel. Duku Iiir Timur II Palembang	4.551.900.000,00
	10. Jl. DI Panjaitan Kel. Plaju Hulu, Kec. Seb. Ulu II, Palembang	1.123.706.578,38
	11. Jl. Bukit Intan Kec. Bukit Intan Pangkal Pinang	2.397.600.000,00
	12. Kel. Semabung Baru II Pangkal Pinang	376.483.000,00
	13. Jl. Mayor H. Muhidin Kel. Masjid Jamik Kec. Rangkui Pangkal Pinang	2.253.372.172,86
	14. Jl. Mesjid Jamik Kec. Rangkui, Pangkal Pinang	1.891.968.000,00
	15. Jl. Mesjid Jamik No. 26 Kel. Mesjid Jamik, Kec. Rangkui, Pangkal Pinang	2.141.958.000,00
	16. Jl. Mayor H. Muhidin Kec. Rangkui, Pangkal Pinang	14.431.964.463,00
	17. Jl. Bukit Intan No. 121, Kel. Bukit Intan Kec. Bukit Intan Pangkal Pinang	32.954.760.000,00
	18. Jl. Jend. A. Yani Kel. Kacang Pedang Pangkal Pinang	3.166.140.000,00
	19. Jl. Mayor Syafri Rachman Kel. Semabung Baru, Kec. Bukit Intan, Pangkal	37.879.25.400,00
	20. Jl.Yos Sudarso No. 90, Pangkal Pinang	2.399.778.700,00
	21. Jl. Gudang Padi No. 16, Kel. Gudang Padi, Pangkal Pinang	8.227.460.000,00
	22. Jl. Pasir Putih Kel. Pasir Putih, Pangkal Pinang	34.130.620.000,00
	23. Jl. Moh Yamin, Jambi	2.198.500.000,00
	24. Jl. Panglima Polim Jambi Kel. Kasang Jaya	1.820.000.000,00
5	V LAMPUNG	Belum Dinilai
6	**VI SERANG**	**28.533.055.000,00**
	1. Jl. Juhdi No. Kel. Cimunjang, Kec. Serang, Kota Serang, Propinsi	9.490.600.000,00
	2. Jl. Ki Samaun, Gang Babakan Ledeng No. 06 RT 01 RW 07, Kel. Sukasari,	4.274.000.000,00
	Kec. Tangerang Kota, Kota Tangerang, Propinsi Banten	
	3. Jl. Ki. Semaun No. 171 Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	9.099.536.000,00
	4. Jl. Syekh Yusuf RT 005 RW 06 No. 20, Kel. Sujasari, Kec. Tangerang Kota,	2.714.000.000,00
	Kota Tangerang	
	5. Jl. A. Dimyati No. 52/KH. Sholeh Ali Kel. Sukasari, Kec. Tangerang, Kota Tangerang	948.000.000,00
	6. Jl. Raya Curug RT 001/007 Desa Curug Kulon, Kec. Curug, Kab. Banten,	1.171.919.000,00
	Tangerang, Banten	835.000.000,00
	7. Jl. Raya Kedaung Barat RT 002/01 Desa Kedaung Barat Kec. Sepatan Timur, Tangerang	
	, Banten	
7	VII JAKARTA	Belum Dinilai
8	VIII BANDUNG	Belum Dinilai
9	**IX SEMARANG**	**S12.685.706.975,00**
	1. Sukowati No. 378 Sragen	3.969.600.000,00
	2. Jl. Gondang Winong, Gondang Sragen	396.340.000,00
	3. Jl. Diponegoro No. 23 Kel. Tasik Aging, Kec. Kota, Kab. Rembang	1.570.200.000,00
	4. Jl. Petungi No. 23 Adiwerna, Tegal 52194	2.087.900.000,00
	5. Jl. Dr. Wahidin No. 2, Kel. Temanggung II, Kec/Kab. Temanggung	2.375.200.000,00
	6. Jl. Stasiun No. 5, Kutowinangun, Kabumen	921.466.975,00
	7. Jl. Jeruk No. 18 Kota Pekalongan	1.365.000.000,00
10	**X SURABAYA**	**91.766.005.033,74**
	1. Jl. Bunguran No. 31-33 Kel. Bongkaran, Kec. Pabean Cantikan, Surabaya	15.298.000.000,00
	2. Jl. Bunguran No. 63 Kel. Bongkaran, kec. Pabean Cantikan, Surabaya	17.853.750.000,00
	3. Jl. Pekulan, Sekarang Jl. Sultan Iskandar Muda No. 42 Kel. Ujung, Kec.	10.519.110.000,00
	4. Jl. Gentengkali 43-45 Kel. Genteng, Kec. Genteng, Surabaya	6.215.625.000,00

REKAPITULASI HASIL PENILAIAN ASET BEKAS MILIK ASING/CINA
TAHUN 2007
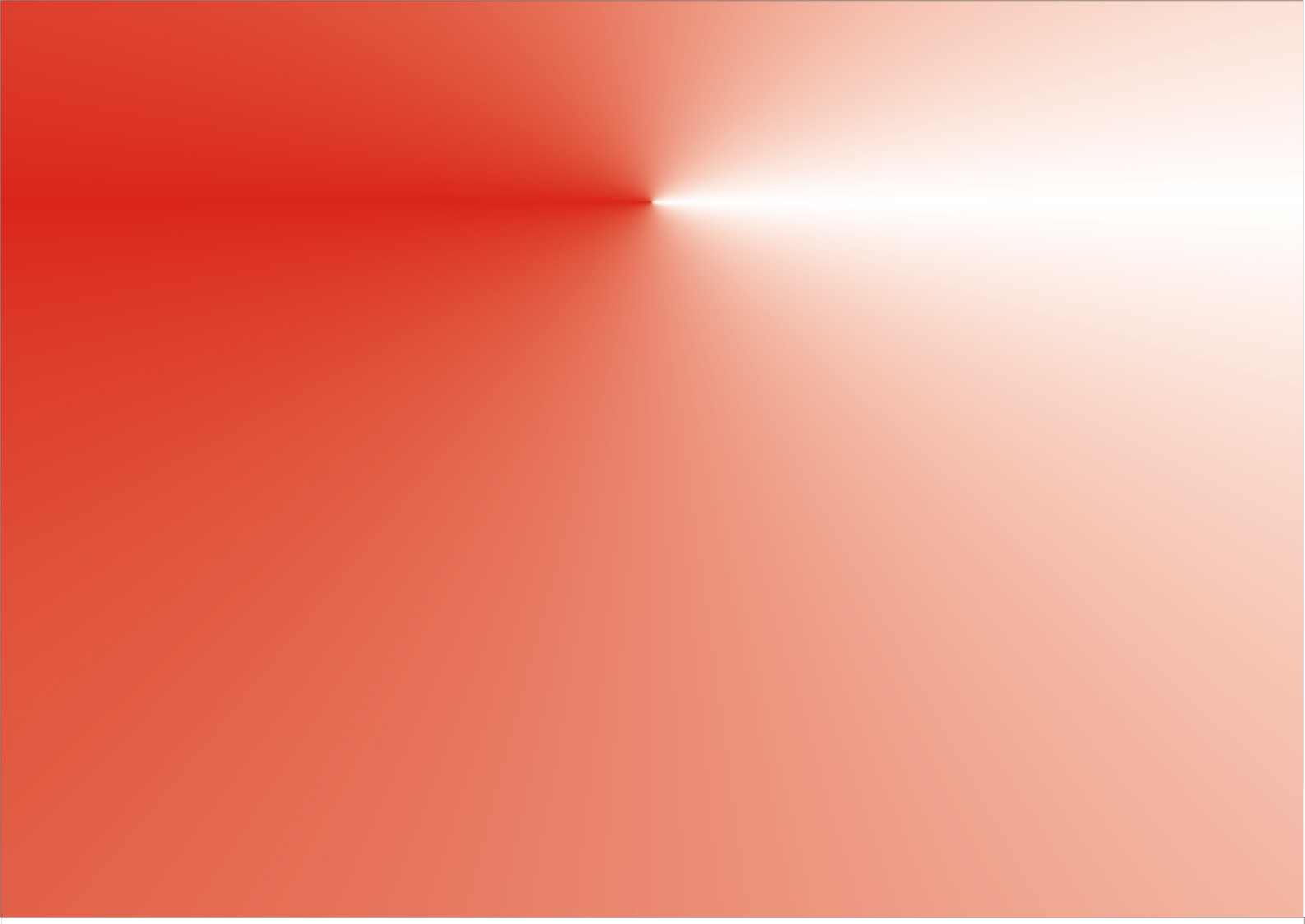
NO	KANWIL DJKN	NILAI
	5. Jl. Darmokali 69 Kel. Darmo, Kec. Wonokromo, Surabaya	3.292.800.000,00
	6. Jl. Darmokali 69 Kel. Darmo, Kac. Wonokromo, Surabaya	4.599.479.000,00
	7. Jl. Gentengkali 10 Kel. Genteng, Kec. Genteng, Surabaya	6.442.960.000,00
	8. Jl. Gembong Cantikan No. 48-50 Kel. Kapasan, Kec. Simokerto, Surabaya	11.313.400.000,00
	9. Jl. Waspada No. 94-96 Kel. Bongkaran, Kec,. Pabeanan Cantikan	10.553.692.500,00
	10. Jl. Sidodadi No. 27 Kel. Sawahan, Surabaya	2.434.000.000,00
	11. Jl. Argopuro No. 27 Kel. Sawahan, Kec. Sawahan, Surabaya	806.949.000,00
	12. Jl. Wahid Hasim (d/h Jl. Let. Jend. Panjaitan No. 4) Jember Kidul, Kali	1.511.677.938,74
	13. Jl. Raya A. Yani 89, Bangsalsari, Jember	924.561.595.00
11	XI PONTIANAK	Belum Dinilai
12	**XII BANJARMASIN**	**104.708.468.000,00**
	1. Jl. P. Samudera No. 95 Kel. Kertak Baru Ulu, Kec Banjarmasi Tengah, Kota Banjarmasin	16.770.000.000,00
	2. Jl. P. Samudera No. 97-99 Kel. Kertak Baru Uli, Kec Banjarmasi Tengah, Kota Banjarmasin	9.277.500.000,00
	3. Jl. P. Samudera Kel. Kertak Baru Ulu, Kec.Banjarmasin Tengah, Kota	3.600.000.000,00
	4. Jl. Brigjen Katamdo Kel. Kertak Baru Iiir, Kec. Banjarmasin Tengah,m Kota	6.305.250.000,00
	5. Jl. Jend. A. Yani Km 2,5 No. 180 Kel. Sungai Baru, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin	12.312.465.000,00
	6. Jl. Kapt. Pierre Tendean No. 22 Kel. Gadang Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin	14.438.580.000,00
	7. Jl. Veteran Kel. Kampung Melayu, Kec. Banjarmasin Tengah, Kot Banjarmasin	38.879.950.000,00
	8. Jl. K.S Tubun No. 122 Kel. Kelayan Barat, Kec. Banjarmasin, Kota Banjarmasin	3.124.723.000,00
13	XIII SMARINDA	Belum Dinilai
14	XIV DENPASAR	Belum Dinilai
15	**XV MAKASSAR**	**5.454.511.000,00**
	1. Jl. Sangir Lr. 223 No. 9 (153) Kel. Melayu Kec Wajo, Makassar	151.672.000,00
	2. Jl. G. Latimojo No. 54 A (No. 124A) Kel. Lariangbangi, Makassar.	755.860.000,00
	3. Jl. Ranggong Daeng Romo No. No. 7 Kel. Molaku Kec. Ujung Pandang,	499.494.000,00
	4. Jl. Lembeh No. 63 Kel. Melayu Kec. Wajo, Makassar.	728.068.000,00
	5. Jl. Jend. Sudirman No. 52 Kel. Parang Kec. Mamajang (No.42), Makassar	2.186.911.000,00
	6. Jl. Serui No. 18 Kel. Pattunuang, Kec Wajo, Kota Makassar.	456.758.000,00
	7. Jl. Sumba No. 44 Kel. Pattunuang, Kec Wajo, Makassar	675.748.000,00
16	XVI MANADO	Belum Dinilai
17	**XVII JAYAPURA**	**720.789.000,00**
	1. Jl. Macan Tutul No. 137 RT.03/RW.01 Doom	720.789.000,00
	TOTAL	**613.619.131.522,98**